SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
dengan
BUPATI BOGOR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana ...

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.

15. Program ...

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD berkedudukan sebagai dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan tahunan dan perencanaan Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

   berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen Perencanaan pembangunan Daerah lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

   berisi tentang penjelasan mengenai gambaran umum kondisi Daerah, gambaran keuangan Daerah, serta permasalahan dan isu strategis.

c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

   berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, dan Program prioritas.

d. BAB IV ...

d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

berisi tentang Program Perangkat Daerah, serta kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

e. BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan

b. pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil RPJMD.

(4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan pembangunan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dalam hal terdapat perbedaan RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025, maka harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT: (4/116/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah yang disusun berdasarkan periode jabatan kepala daerah, dimana pemilihannya telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 untuk periode jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025-2029.

Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pasca pelantikan berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai periode masa bakti sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak kepala daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, serta berkewajiban menetapkannya dalam bentuk peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik sebagaimana tercantum dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang telah diundangkan pada bulan Juli 2024, sehingga RPJMD yang disusun mempertimbangkan perencanaan teknokratik, sesuai dengan kewenangan konkuren daerah, yang terintegrasi dengan perencanaan politis kepala daerah dalam visi dan misi yang disampaikan saat kampanye.

Berdasarkan pentahapan pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, RPJMD tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama yang merupakan tahapan fondasi dimana pembangunan Kabupaten Bogor akan diarahkan pada penguatan fondasi sebagai dasar pelaksanaan Pembangunan dengan menjaga kesinambungan Pembangunan yang telah dilaksanakan serta berorientasi pada peningkatan capaian kinerja yang belum optimal. Upaya penguatan fondasi ini dilakukan melalui:

1) pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia;
2) pengembangan potensi ekonomi daerah;
3) peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah;
4) transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5) pengembangan konsep masyarakat Bogor berbudaya dan peduli lingkungan;
6) penataan potensi unggulan kecamatan;
7) penataan sarana prasarana dasar secara merata; dan
8) penataan penyelenggaraan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan serta tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi landasan strategis yang memayungi seluruh upaya pencapaian target kinerja daerah sebagaimana dirinci dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan perencanaan tahunan perangkat daerah (Rencana Kerja Perangkat Daerah) hingga tahun 2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 137

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-4
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I-9
1.4 Maksud dan Tujuan I-12
1.5 Sistematika Penulisan I-12

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **II-1**
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-82
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-122
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-135
2.2 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bogor Sampai Dengan Tahun 2024 ..... II-206
2.3 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah II-210
2.3.1 Profil dan Kinerja BUMD II-211
2.4 Gambaran Keuangan Daerah II-228
2.4.1 Kinerja Keuangan Tahun 2019-2024 ..... II-229
2.4.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030 ..... II-232
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis II-234
2.5.1 Permasalahan II-234
2.5.2 Isu Strategis II-235

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **III-1**
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1
3.1.1 Visi III-1
3.1.2 Misi III-5
3.1.3 Tujuan dan Sasaran III-7

3.2 Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-11
3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Daerah III-11
3.2.2 Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 ..... III-33

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-45
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) IV-45
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) IV-101

BAB V PENUTUP..... V-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor II-1
Tabel 2.2 Kondisi Klimatologi di Kabupaten Bogor Tahun 2024 ..... II-7
Tabel 2.3 Jenis Batuan di Kabupaten Bogor II-13
Tabel 2.4 Jenis Tanah Di Kabupaten Bogor II-14
Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bogor II-15
Tabel 2.6 Wilayah Sungai di Kabupaten Bogor II-16
Tabel 2.7 Penggunaan Lahan Kabupaten Bogor Tahun 2023..... II-17
Tabel 2.8 Komoditas Unggulan 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor II-17
Tabel 2.9 Jenis Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor II-20
Tabel 2.10 Status DDLH Penyedia Pangan (Tabulasi setiap Kecamatan) II-23
Tabel 2.11 Status DDLH Penyedia Air (Tabulasi setiap kecamatan)..... II-29
Tabel 2.12 Klasifikasi Jasa Lingkungan II-33
Tabel 2.13 Luasan Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan di Kabupaten Bogor II-36
Tabel 2.14 Luasan Jasa Penyediaan Air di Kabupaten Bogor II-38
Tabel 2.15 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Bogor II-41
Tabel 2.16 Luasan Jasa Lingkungan Pemurnian Air di Kabupaten Bogor II-43
Tabel 2.17 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kabupaten Bogor II-45
Tabel 2.18 Luasan Jasa Lingkungan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kabupaten Bogor II-48
Tabel 2.19 Perbedaan Parameter Metode IKLH Lama dan IKLH- INA ... II-57
Tabel 2.20 Kejadian Bencana di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 II-63
Tabel 2.21 Emisi GRK Kabupaten Bogor Tahun 2024..... II-65
Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2024 ..... II-67
Tabel 2.23 Kondisi Kecamatan dengan LPP Diatas LPP Kabupaten Bogor Tahun 2024 ..... II-73

Tabel 2.24 Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 ..... II-86
Tabel 2.25 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024 ..... II-88
Tabel 2.26 Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 ..... II-92
Tabel 2.27 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 atas Dasar Harga Konstan II-101
Tabel 2.28 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 atas Dasar Harga Berlaku..... II-103
Tabel 2.29 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (%) II-105
Tabel 2.30 Jenis Kebudayaan di Kabupaten Bogor II-119
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020 – 2024 ..... II-141
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2020 – 2024 ..... II-144
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 - 2024 ..... II-146
Tabel 2.34 Pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 ..... II-148
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 – 2024 ..... II-151
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2020 – 2024 ..... II-153
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020 – 2024 ..... II-156
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024 ..... II-158
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2020 – 2024 ..... II-161

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2020 – 2024 ..... II-163
Tabel 2.41 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024 ..... II-164
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 – 2024..... II-168
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 – 2024 ..... II-170
Tabel 2.44 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 ..... II-172
Tabel 2.45 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2020 – 2024 ..... II-175
Tabel 2.46 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 ..... II-178
Tabel 2.47 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 – 2024 ..... II-180
Tabel 2.48 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024 ..... II-183
Tabel 2.49 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 – 2024 ..... II-185
Tabel 2.50 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistika Tahun 2020 – 2024 ..... II-187
Tabel 2.51 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2020 – 2024 ..... II-189
Tabel 2.52 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 ..... II-190
Tabel 2.53 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2020 – 2024..... II-191
Tabel 2.54 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2020 – 2024 ..... II-193

Tabel 2.55 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 ..... II-195
Tabel 2.56 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2020 – 2024 ..... II-197
Tabel 2.57 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2020 – 2024 ..... II-199
Tabel 2.58 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2020 – 2024 ..... II-202
Tabel 2.59 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2020 – 2024 ..... II-204
Tabel 2.60 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2020 – 2024 ..... II-205
Tabel 2.61 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bogor Tahun 2024 ..... II-208
Tabel 2.62 Capaian Kinerja Pembangunan Perumda Pasar Tohaga ... II-211
Tabel 2.63 Capaian Kinerja Pembangunan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan II-213
Tabel 2.64 Kinerja Keuangan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan .. II-214
Tabel 2.65 Capaian Kinerja Pembangunan PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) II-217
Tabel 2.66 Capaian Kinerja Keuangan PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda)..... II-217
Tabel 2.67 Capaian Kinerja Pembangunan PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) II-220
Tabel 2.68 Capaian Kinerja Keuangan PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) II-220
Tabel 2.69 Struktur Modal PT. LKM Bogor II-221
Tabel 2.70 Susunan Pengurus PT. LKM Bogor II-221
Tabel 2.71 Capaian Kinerja Pembangunan PT. LKM Bogor II-221
Tabel 2.72 Capaian Kinerja Keuangan PT. LKM Bogor II-221
Tabel 2.73 Susunan Pengurus PT BPR Bogor Jabar (Perseroda) II-223
Tabel 2.74 Capaian Kinerja Keuangan LPK Ciampea II-225
Tabel 2.75 Ekuitas BUMD di Kabupaten Bogor II-225
Tabel 2.76 Aset BUMD di Kabupaten Bogor II-225
Tabel 2.77 Pendapatan BUMD di Kabupaten Bogor..... II-226

Tabel 2.78 Biaya BUMD di Kabupaten Bogor II-226
Tabel 2.79 Laba/Rugi BUMD di Kabupaten Bogor II-226
Tabel 2.80 Penyertaan Modal Pemerintah Terhadap BUMD di Kabupaten Bogor II-227
Tabel 2.81 Kontribusi BUMD Terhadap PAD Kabupaten Bogor II-227
Tabel 2.82 Kontribusi BUMD Terhadap IKD Kabupaten Bogor II-228
Tabel 2.83 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019-2024..... II-230
Tabel 2.84 Neraca Daerah Tahun 2019-2024 ..... II-231
Tabel 2.85 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030 ..... II-232
Tabel 2.86 Matriks Sanding Isu Strategis Global, Nasional Provinsi dan Daerah II-252
Tabel 3.1 Sanding Visi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor dalam Perencanaan Jangka Menengah Tahun 2025-2029..... III-3
Tabel 3.2 Sanding Misi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025-2029 ..... III-5
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029..... III-7
Tabel 3.4 Indikator dan Target Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2025-2030 ..... III-9
Tabel 3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2030 ..... III-12
Tabel 3.6 Program Prioritas Daerah Tahun 2025-2030 ..... III-34
Tabel 4.1 Penjabaran Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 ..... IV-3
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025-2030..... IV-46
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2025-2030 .... IV-49
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2025-2030 ..... IV-102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya I-11

Gambar 2.1 Peta Wilayah Daerah dan Arahan Pembagian Wilayah Pengembangan II-5

Gambar 2.2 Peta Ketinggian Lahan di Kabupaten Bogor II-6

Gambar 2.3 Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bogor II-16

Gambar 2.4 Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Bogor II-32

Gambar 2.5 Peta Status Daya Dukung Air di Kabupaten Bogor .. II-32

Gambar 2.6 Peta Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Di Kabupaten Bogor II-37

Gambar 2.7 Peta Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih Di Kabupaten Bogor II-39

Gambar 2.8 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir di Kabupaten Bogor II-42

Gambar 2.9 Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Di Kabupaten Bogor II-44

Gambar 2.10 Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kabupaten Bogor II-47

Gambar 2.11 Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup II-49

Gambar 2.12 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Bogor 2022-2024 ..... II-51

Gambar 2.13 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bogor II-52

Gambar 2.14 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor 2022-2024 ..... II-53

Gambar 2.15 Rumah Tangga dengan Akses Layanan Sanitasi Layak Kabupaten Bogor 2022-2024 ..... II-54

Gambar 2.16 Persentase Rumah Tangga Dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat di Kabupaten Bogor 2022-2024 ..... II-55
Gambar 2.17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor 2022-2024..... II-56
Gambar 2.18 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bogor 2022-2024.....II-65
Gambar 2.19 Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-69
Gambar 2.20 Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk terbanyak Di Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-69
Gambar 2.21 Perbandingan LPP Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-70
Gambar 2.22 Perbandingan LPP Kabupaten Bogor Tahun 2024 ..... II-71
Gambar 2.23 Perbandingan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-72
Gambar 2.24 Perbandingan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 ..... II-72
Gambar 2.25 Distribusi Penduduk Berdasarkan Wilayah Pengembangan Tahun 2024 ..... II-73
Gambar 2.26 Piramida Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2024 .. II-75
Gambar 2.27 Perbandingan LPE Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 ..... II-83
Gambar 2.28 Perbandingan LPE Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024 ..... II-84
Gambar 2.29 Perbandingan Rasio Gini Provinsi Jawa Barat, Nasional dan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 ..... II-85
Gambar 2.30 Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024 .. II-86

Gambar 2.31 Perbandingan Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan antara Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-87
Gambar 2.32 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka, Kabupaten Bogor dengan Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-89
Gambar 2.33 Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024... II-90
Gambar 2.34 Perkembangan IPM Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-91
Gambar 2.35 Perbandingan IPM Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024 II-92
Gambar 2.36 Perkembangan HLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-93
Gambar 2.37 Perbandingan HLS Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024 ..... II-94
Gambar 2.38 Perkembangan Kinerja RLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-95
Gambar 2.39 Perbandingan RLS Kabupaten bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024 ..... II-96
Gambar 2.40 Perkembangan AHH Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-97
Gambar 2.41 Perbandingan AHH Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024 II-98
Gambar 2.42 Perkembangan Pengeluaran per Kapita (Rp) per Tahun Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-99

Gambar 2.43 Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Rp) per Tahun Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah perbatasan Tahun 2024 ..... II-100
Gambar 2.44 Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 (%) II-107
Gambar 2.45 Laju Inflasi 10(Sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-108
Gambar 2.46 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 ..... II-109
Gambar 2.47 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 ..... II-109
Gambar 2.48 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bogor 2020-2024..... II-110
Gambar 2.49 Prevalensi Stunting Kabupaten Bogor 2020-2024 ..... II-111
Gambar 2.50 Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor 2022-2024 ..... II-112
Gambar 2.51 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bogor 2020-2024..... II-115
Gambar 2.52 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bogor 2020-2024..... II-116
Gambar 2.53 Angka Melek Aksara Kabupaten Bogor 2020-2024..... II-118
Gambar 2.54 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bogor 2020-2024 ..... II-120
Gambar 2.55 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Bogor 2020-2024 ..... II-121
Gambar 2.56 Angka Ketergantungan Kabupaten Bogor 2020-2024 ..... II-123
Gambar 2.57 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bogor 2020-2024..... II-124
Gambar 2.58 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Bogor 2020-2024..... II-125

Gambar 2.59 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Bogor 2020-2024 ..... II-126
Gambar 2.60 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bogor 2020-2024 ..... II-127
Gambar 2.61 Indeks Desa Membangun Kabupaten Bogor 2020-2024 ..... II-130
Gambar 2.62 Indeks Williamson Kabupaten Bogor 2020-2024..... II-131
Gambar 2.63 Inflasi Kabupaten Bogor 2020-2024 ..... II-134
Gambar 2.64 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bogor 2020-2024 ..... II-135
Gambar 2.65 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bogor 2020-2024..... II-136
Gambar 2.66 Nilai SAKIP Kabupaten Bogor 2020-2024 ..... II-137
Gambar 2.67 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bogor 2022-2024..... II-138
Gambar 2.68 Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada Kabupaten Bogor 2022-2024 ..... II-139
Gambar 2.69 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bogor 2022-2024 .... II-140
Gambar 2.70 Capaian Indeks Komposit IKLH II-166
Gambar 2.71 Kinerja Keuangan PT. Prayoga Pertambangan dan Energi..... II-216
Gambar 2.72 Struktur Modal PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda) .. II-223
Gambar 2.73 Capaian Kinerja Pembangunan PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda) II-223
Gambar 2.74 Capaian Kinerja Keuangan PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda)..... II-224
Gambar 2.75 Proyeksi Indeks Kemandirian Fiskal II-233

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2025
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era baru perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dimulai dari tahun 2025-2029, setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Bogor tanggal 20 Februari 2025. Dengan visi dan misi yang diusung, akan dijabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah selama lima tahun ke depan dalam bentuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan.

RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjabarkan pelaksanaan kewenangan daerah berdasarkan fungsi konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, substansi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani RPJPD Kabupaten Bogor tahun 2025-2045, memperhatikan substansi RPJMN Tahun 2025-2029, dan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 serta secara simultan disusun dengan memperhatikan substansi RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyuratkan bahwa pemerintah daerah menyusun RPJMD, dimana dengan adanya penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Melalui undang-undang ini, RPJMD menjadi representasi adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan pada aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Di samping itu, RPJMD juga merupakan representasi dari pengaturan yang bersifat afirmatif, dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan daerah yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.

Di sisi lain, RPJMD menggambarkan adanya hubungan sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. RPJMD Kabupaten Bogor merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam upaya mencapai visi, melalui pelaksanaan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan tahun demi tahun berdasarkan kewenangan urusan konkuren daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan, yaitu:

1. Pendekatan partisipatif

   Pendekatan ini dilakukan melalui pelaksanaan musrenbang RPJMD yang bertujuan untuk menjaring aspirasi yang muncul dari pemangku kepentingan, terkait substansi rancangan awal RPJMD.
2. Pendekatan teknokratik

   Pendekatan ini dilakukan melalui penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Dengan adanya Rancangan Teknokratik RPJMD tersebut, diharapkan RPJMD dapat disusun dengan mempertimbangkan perencanaan teknokratik, sesuai dengan kewenangan konkuren daerah, yang terintegrasi dengan perencanaan politis kepala daerah dalam visi dan misi yang disampaikan saat kampanye.

   Disamping itu, pendekatan teknokratik ditempuh melalui diskusi akademis dan perumusan substansi dari hasil-hasil kajian.

3. Pendekatan *bottom-up* dan *top-down*

   Pendekatan ini dilakukan dengan menyinergikan kebijakan nasional dan Jawa Barat ke dalam kebijakan daerah sebagai bentuk dukungan untuk melaksanakan kebijakan nasional dan Jawa Barat, serta menyinergikan kebijakan daerah untuk dipedomani oleh desa/kelurahan sebagai bentuk sinergi pelaksanaan pembangunan di wilayah.

4. Pendekatan politis

   Pendekatan ini mengidentifikasi dan menginventarisir janji politis Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagai bahan perumusan penyempurnaan visi dan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi daerah. Pendekatan politis juga didekati dengan menelaah program-program strategis Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

5. Pendekatan tematik

   Pendekatan ini berorientasi pada upaya penyelesaian isu-isu atau tema tertentu yang akan diselesaikan misalnya pengurangan emisi karbon, peningkatan kualitas lingkungan, atau pengembangan ekonomi berkelanjutan.

6. Pendekatan holistik

   Pendekatan ini berorientasi pada perencanaan yang dirumuskan dan diampu pelaksanaannya secara bersama oleh beberapa perangkat daerah pada satu atau beberapa tema perencanaan *(cross cutting*).

7. Pendekatan integratif

   Pendekatan ini berorientasi pada upaya mengintegrasikan berbagai kepentingan dan perspektif dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

8. Pendekatan spasial

   Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lokasi dan keruangan dalam pembangunan, termasuk distribusi sumber daya dan dampak pembangunan terhadap lingkungan.

Keseluruhan pendekatan perencanaan ini digunakan untuk dapat merinci penetapan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan skala daerah dan agar bisa dijabarkan dalam renstra PD. Secara teknis, Pemerintah Kabupaten Bogor akan

melakukan kerjasama dengan berbagai pihak pemangku kepentingan agar dapat terwujud sinergi pembangunan yang bermuara pada terwujudnya visi Pemerintah kabupaten Bogor tahun 2025-2029.

Keseluruhan pendekatan ini juga digunakan untuk menjawab isu – isu strategis dan permasalahan krusial daerah yang secara optimal diharapkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 2025-2029, sehingga terlihat pentingnya perencanaan strategis yang melibatkan analisis yang kuat dan adanya pelibatan pemangku kepentingan untuk berbagi dan mengambil peran dalam pembangunan di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan penahapan pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari perencanaan jangka panjang, yang menekankan pada penguatan fondasi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dilaksanakan serta berorientasi pada peningkatan capaian kinerja yang belum optimal.

Diharapkan, dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dapat memayungi seluruh upaya pencapaian target kinerja daerah, didukung penuh dalam substansi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, namun sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan perencanaan tahunan perangkat daerah (Rencana Kerja Perangkat Daerah) hingga tahun 2030.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);

24. Surat Edaran Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda terkait penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ketentuan terkait hubungan antar dokumen perencanaan adalah Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPD, RTRW dan RPJMN.**

Di sisi lain, hubungan antar dokumen tersebut merupakan bentuk dari sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana ketentuan pasal 159-160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan substansi sebagai berikut:

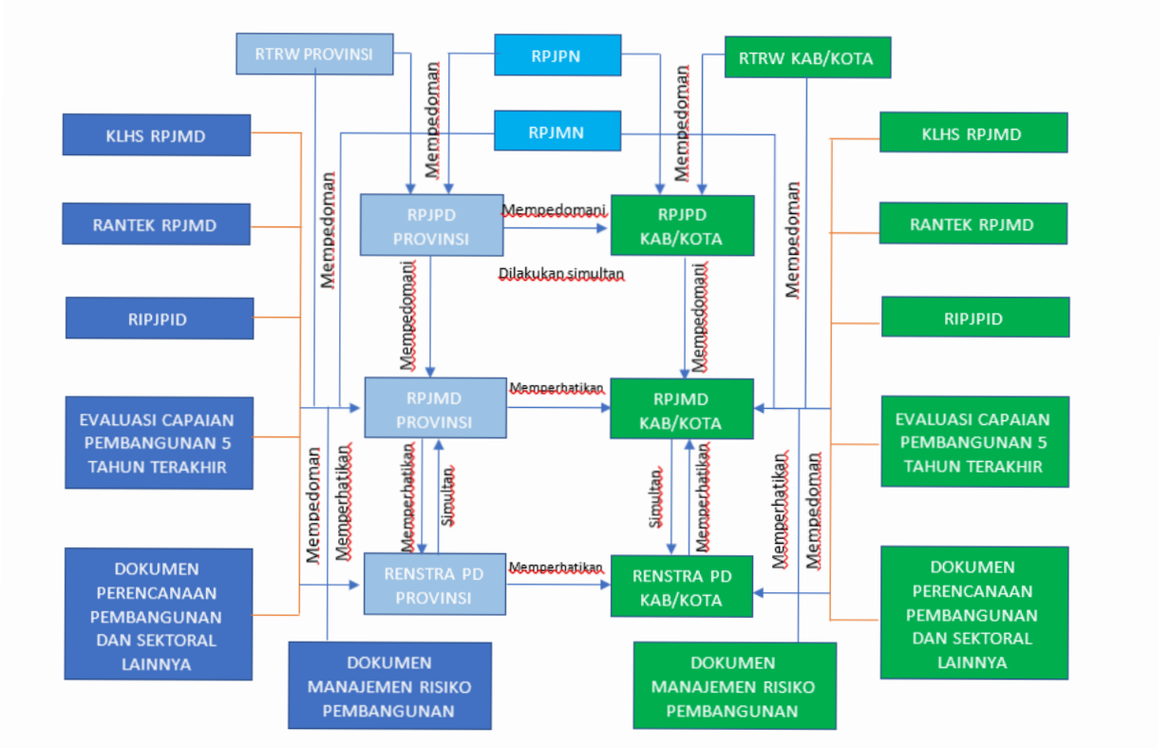
1. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilaksanakan diantaranya dalam penyusunan RPJMD;
2. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, serta pembangunan antar daerah;

3. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah;
4. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Kabupaten Bogor dengan menelaah kebijakan Provinsi Jawa Barat yang berdampak dan harus dipedomani oleh Kabupaten Bogor;
5. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan;
6. Memedomani RTRW sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044. Dalam penyusunan RPJMD, dilakukan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah;
7. Memedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
8. Memedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
9. Memedomani RPJMD Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor dengan arah serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan

pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;

10. Memedomani Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, dalam rangka mengakomodir rekomendasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan agar selaras dengan perencanaan pembangunan jangka menengah;
11. Memperhatikan RPJMD daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan kebijakan daerah lainnya;
12. Memperhatikan Renstra Perangkat Daerah sebagai kebijakan sektoral yang disusun secara simultan.

Hubungan antar dokumen disajikan dalam Gambar 1.1 sebagai berikut:



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029

Gambar 1.1.
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arahan bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor sebagai bagian dari tahapan pertama perencanaan pembangunan jangka panjang.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah:

1. sebagai dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
2. sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJMD, meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, sspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, serta penerapan standar pelayanan minimal; gambaran keuangan daerah, yang menyajikan penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2019-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2030; serta permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah.

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029, arah kebijakan, strategi, dan program

prioritas pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah serta indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030. Sementara berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, diuraikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis terhadap aspek geografi dan demografi di Kabupaten bogor dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai posisi dan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas, resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dan demografi, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Posisi dan Peran Strategis Wilayah

Kabupaten Bogor secara geografis diantara 16°21'-107°13' Bujur Timur dan 6°19'-6°47' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah meliputi:

- sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten), Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok;
- sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur;
- sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;
- sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten);
- sebelah tengah : berbatasan dengan Kota Bogor.

Secara administratif Kabupaten Bogor terbagi atas 40 (empat puluh) kecamatan, 416 (empat ratus enam belas) desa dan 19 (sembilan belas) kelurahan, dengan luas wilayah administrasi Kabupaten Bogor kurang lebih mencapai 299.177,85 hektar.

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1	Nanggung	Parakan Muncang	11	0	15.792,63	5,28%
2	Leuwiliang	Leuwimekar	11	0	9.227,01	3,08%

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
3	Leuwisadeng	Leuwisadeng	8	0	3.606,79	1,21%
4	Pamijahan	Gunungsari	15	0	12.516,94	4,18%
5	Cibungbulang	Cimanggu 2	15	0	3.769,79	1,26%
6	Ciampea	Bojongrangkas	13	0	3.397,61	1,14%
7	Tenjolaya	Tapos 1	7	0	3.633,14	1,21%
8	Dramaga	Dramaga	10	0	2.557,47	0,85%
9	Ciomas	Pagelaran	10	1	1.787,62	0,60%
10	Tamansari	Tamansari	8	0	3.925,81	1,31%
11	Cijeruk	Cipelang	9	0	4.799,12	1,60%
12	Cigombong	Cigombong	9	0	4.653,72	1,56%
13	Caringin	Cimande Hilir	12	0	7.789,02	2,60%
14	Ciawi	Bendungan	13	0	4.705,77	1,57%
15	Cisarua	Leuwimalang	9	1	7.103,93	2,37%
16	Megamendung	Sukamaju	12	0	6.342,42	2,12%
17	Sukaraja	Cimandala	13	0	4.348,77	1,45%
18	Babakan	Babakan Madang	9	0	8.858,15	2,96%
19	Sukamakmur	Sukamakmur	10	0	18.294,46	6,11%
20	Cariu	Cariu	10	0	8.481,11	2,83%
21	Tanjungsari	Tanjunsari	10	0	14.726,94	4,92%
22	Jonggol	Jonggol	14	0	13.437,78	4,49%
23	Cileungsi	Cileungsi	12	0	7.008,04	2,34%
24	Klapanunggal	Kembang Kuning	9	0	9.580,57	3,20%
25	Gunungputri	Wanaherang	10	0	6.099,50	2,04%
26	Citeureup	Puspanegara	12	2	7.231,94	2,42%
27	Cibinong	Cirimekar	-	13	4.707,68	1,57%
28	Bojonggede	Bojonggede	8	1	2.893,47	0,97%
29	Tajurhalang	Tajurhalang	7	0	3.037,80	1,02%
30	Kemang	Kemang	8	1	3.309,12	1,11%
31	Rancabungur	Rancabungur	7	0	2.318,15	0,77%
32	Parung	Parung	9	0	2.773,52	0,93%
33	Ciseeng	Cibentang	10	0	3.990,84	1,33%
34	Gunungsindur	Gunungsindur	10	0	4.855,91	1,62%
35	Rumpin	Rumpin	14	0	13.907,26	4,65%
36	Cigudeg	Cigudeg	15	0	17.929,95	5,99%
37	Sukajaya	Sukajaya	11	0	16.624,49	5,56%
38	Jasinga	Pamagersari	16	0	13.753,51	4,60%
39	Tenjo	Singabraja	9	0	8.302,52	2,78%
40	Parungpanjang	Parungpanjang	11	0	7.097,62	2,37%
TOTAL			416	19	299.177,85	100

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2024

Memperhatikan tabel di atas, dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor terdapat beberapa kecamatan dengan luas wilayah lebih luas dari kecamatan lainnya seperti Kecamatan Sukamakmur dengan total luas wilayah sebesar

18.294,46 Ha atau 6,11 % dari total luas wilayah Kabupaten Bogor, diikuti dengan Kecamatan Cigudeg dengan total luas wilayah sebesar 17.929,95 Ha atau 5,99% dari total luas wilayah Kabupaten Bogor. Adapun kecamatan dengan luas wilayah terkecil terdapat di Kecamatan Ciomas dengan luas wilayah sebesar 1.787,62 Ha atau 0,60 % diikuti oleh Kecamatan Rancabungur dengan luas wilayah 2.318,15 Ha atau 0,77 % dari total luas wilayah Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor dikelilingi oleh beberapa rangkaian gunung atau pegunungan yang tinggi dan besar, antara lain di bagian barat ada Pegunungan Halimun Salak yang membentang dari Kabupaten Lebak, Banten hingga kaki timur Gunung Salak. Kemudian, dua pegunungan yang mengurung Kawasan Puncak di sebelah selatan, yaitu Pegunungan Gede Pangrango yang membentang di tiga wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, di sebelah utara Puncak, ada Pegunungan Jonggol yang membentang dari Sentul, Jonggol, Sukamakmur hingga Cipanas, Cianjur. Selain itu, terdapat beberapa pegunungan kecil yang biasanya tandus dan terdiri atas batuan kapur, antara lain Pegunungan Cigudeg-Rumpin, Pegunungan Kapur Leuwiliang, Pegunungan Kapur Cileungsi dan Pegunungan Sanggabuana, Jonggol yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

Kabupaten Bogor memiliki posisi strategis karena menjadi daerah penyangga ibukota negara bersamaan dengan beberapa kabupaten/kota lainnya. Meskipun tidak berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, namun jarak dengan Provinsi DKI Jakarta sangat dekat, terutama karena adanya kemudahan akses transportasi darat sehingga aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Bogor yang berhubungan dengan DKI Jakarta cukup mudah dijangkau. Sementara itu, terkait dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor memiliki posisi strategis secara regional, yaitu masuk ke dalam kawasan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dalam kawasan aglomerasi ini, masing-masing daerah saling memiliki keterkaitan fungsional yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif, sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global.

Sementara itu, dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044, Kabupaten Bogor meliputi 3 (tiga) wilayah pengembangan, yaitu:

- **Wilayah Pengembangan Barat**

  Wilayah pengembangan ini meliputi 14 (empat belas) kecamatan yang terdiri dari : Kecamatan Tenjo, Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Tenjolaya dan Kecamatan Pamijahan, yang berorientasi pada pusat pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, pertambangan dan energi, pendidikan dan penelitian, penyediaan sistem pengolahan air minum, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, pariwisata, dan budaya.

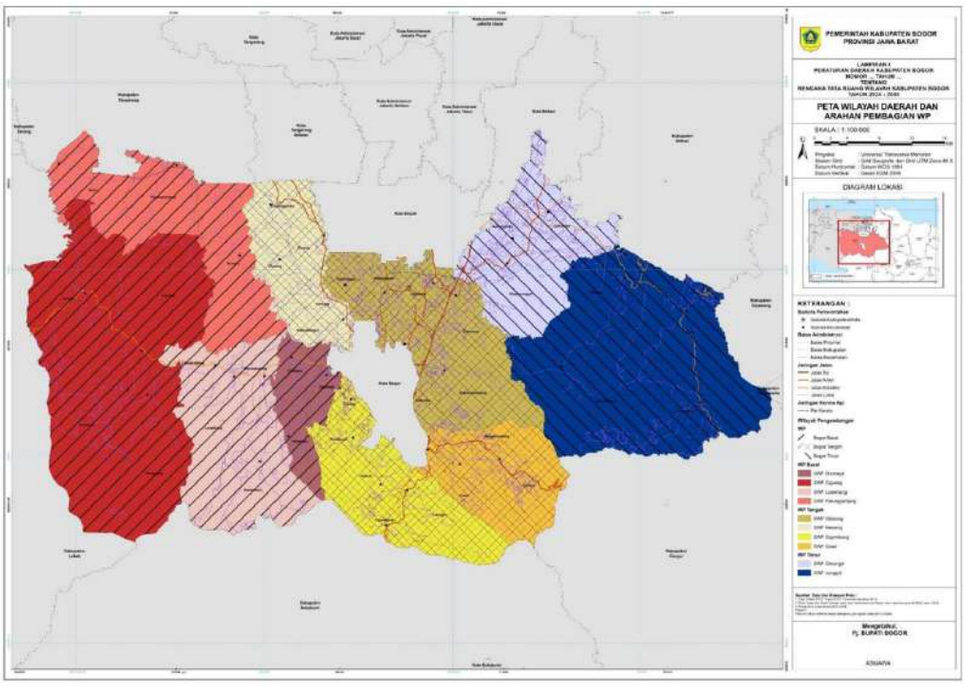
- **Wilayah Pengembangan Tengah**

  Wilayah pengembangan ini meliputi 19 (sembilan belas) kecamatan yang terdiri dari : Kecamatan Gunungsindur, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Kemang, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Caringin, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Megamendung, yang berorientasi pada pusat pemerintahan dan penelitian, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum dan sosial, industri ramah lingkungan, perikanan, konservasi wilayah hulu, penyediaan sistem pengolahan air minum, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, pariwisata dan budaya.

- **Wilayah Pengembangan Timur**

  Wilayah pengembangan ini meliputi 7 (tujuh) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal, Jonggol, Cariu, Sukamakmur dan Kecamatan Tanjungsari, yang berorientasi pada

pusat permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, pertambagan dan energi, penyediaan sistem pengolahan air minum, pengolahan sampah dan limbah, transportasi dan pergudangan, dan pariwisata. Peta wilayah daerah dan arahan pembagian WP disajikan pada Gambar berikut:



Sumber : Perda Nomor 1 Tahun 2024 RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

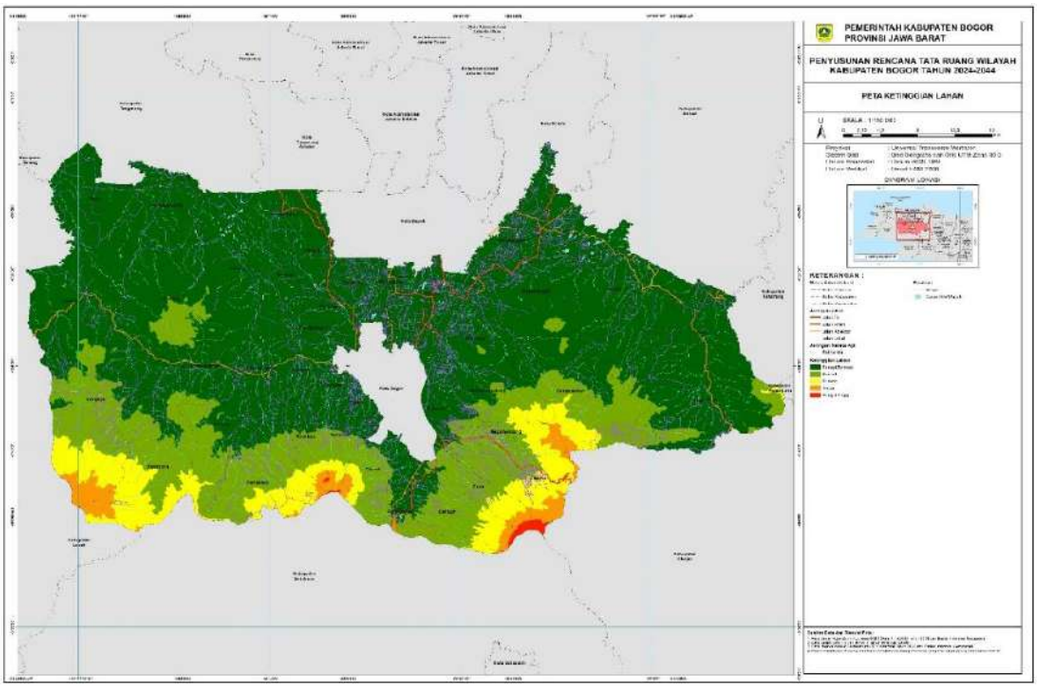
Gambar 2.1
Peta Wilayah Daerah dan Arahan Pembagian Wilayah Pengembangan

a. Kondisi Topografi dan Morfologi

Dari sisi morfologi atau bentuk permukaan bumi, Kabupaten Bogor sebagian besar merupakan dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan yang menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Bogor ini termasuk ke dalam wilayah rawan bencana tanah longsor. Hal tersebut tidak terlepas dari karakteristik geologi batuan di Kabupaten Bogor berupa batuan penyusun yang berasal dari hasil letusan gunung, dan jenis tanah penutup yang berasal dari material vulkanik lepas (seperti tanah Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol) sehingga agak peka dan sangat peka terhadap erosi. Komposisi batuan penyusun sebagaimana dimaksud merupakan gabungan batu yang terdiri dari jenis batu andesit, tufa, dan basalt dengan sifat relatif lulus air atau memiliki daya resap tinggi terhadap air hujan. Oleh karena itu, jenis

pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah apabila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi.

Adapun dari segi topografi, ketinggian lahan Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber : Buku Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Gambar 2.2
Peta Ketinggian Lahan di Kabupaten Bogor

b. Kondisi Klimatologi

Secara klimatologis, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 3.500 - 4.000 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Kemudian mengenai rata-rata suhu di wilayah Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2024 berkisar di antara 26,1°-27,3°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 26,7°C. Sedangkan untuk rata-rata kelembaban udara di wilayah Kabupaten Bogor berkisar 83 persen, dengan kecepatan angin yang cukup rendah di antara 2,9 - 4,0 m/detik dan penyinaran matahari terendah 13,8% terjadi pada bulan Desember, sampai dengan tertinggi 86% yang terjadi pada bulan Oktober.

Tabel 2.2
Kondisi Klimatologi di Kabupaten Bogor Tahun 2024

Bulan	Rata-Rata Suhu (^{0}C)	Rata-Rata Kelembaban Udara (%)	Rata-Rata Kecepatan Angin (m/det)	Rata-Rata Tekanan Udara (mbar)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	26,2	87	2,9	1011,7	10.392	25	36,1
Februari	26,4	87	3,2	1012,5	6.997	25	46,6
Maret	26,3	87	3,2	1011,4	10.572	27	42,7
April	27,3	85	3,3	1009,9	9.086	23	48,6
Mei	27,3	84	3,4	1010,4	6.405	21	55,0
Juni	26,9	83	3,2	1011,6	4.588	20	64,1
Juli	26,2	79	3,5	1011,6	2.854	13	80,7
Agustus	26,8	77	3,8	1011,9	2.990	14	82,7
September	26,8	78	3,8	1011,2	5.453	15	77,8
Oktober	27,2	78	3,9	1011,5	5.470	14	86,0
November	26,7	84	3,9	1010,1	13.916	25	60,0
Desember	26,1	85	4,0	1009,9	6.081	28	13,8

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2024

Pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bogor tahun 2022-2052, terdapat indikasi arah kebijakan yang meliputi indikasi arahan bagi rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Rumusan kebijakan ini dampak negatif karena adanya perubahan kondisi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim antara lain sebagai berikut:

1) Penguatan Ketahanan Ekonomi, dengan strategi implementasi Penyesuaian dan pengembangan sistem usaha tani terhadap perubahan iklim; Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap cekaman iklim; Pengembangan dan optimalisasi sumberdaya lahan, air dan genetik; Perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada DAS yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air dan panas bumi; Optimalisasi pemanfaatan limbah organik dan biomassa serta pengembangan sumber energi dari bahan bakar nabati (BBN).
2) Penguatan Ketahanan Sistem Kehidupan, dengan strategi implementasi Penguatan dan pemutakhiran informasi kerentanan dan risiko kesehatan terhadap perubahan iklim; Pengembangan kebijakan, perencanaaan, jejaring, dan kerja sama antar lembaga di

tingkat lokal, regional dan nasional terkait risiko kesehatan terhadap perubahan iklim; Penguatan kapasitas dan kewaspadaan dini terkait ancaman perubahan iklim terhadap kesehatan di tingkat masyarakat dan pemerintah; Pengembangan struktur perumahan yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim yang terjangkau; Diseminasi informasi mengenai permukiman yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim kepada pemerintah pada berbagai tingkatan; Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim sub bidang permukiman mengacu pada kebutuhan sub bidang permukiman dalam menghadapi dampak perubahan iklim; Penyesuaian baik dari struktur, komponen, desain maupun lokasi infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim; Perbaikan infrastruktur eksisting yang rentan terhadap perubahan iklim baik dari segi struktur, fungsi maupun lokasinya; Fasilitasi aktivitas kajian dan penelitian mengenai konsep ketahanan infrastruktur terhadap perubahan iklim.

3) Penguatan Ketahanan Ekosistem, dengan strategi implementasi Pengamanan ketersediaan air dan perlindungan terhadap iklim ekstrim (*Securing Water Availability and Protecting from Extreme Weather*); Pencegahan kehilangan ekosistem dan keanekaragaman hayati (*Avoiding Ecosistem and Biodiversity Loss*); Penjagaan keberlanjutan ketersediaan air dan konservasi ekosistem serta keanekaragaman hayati (*Sustainable Water Supply and Conservation of Ecosistem and Biodiversity*).
4) Penguatan Ketahanan Wilayah, dengan strategi implementasi Penyesuaian rencana tata ruang kawasan terhadap ancaman perubahan iklim; Pengelolaan lingkungan kawasan perkotaan secara berkelanjutan; Pengelolaan lingkungan kawasan perkotaan secara berkelanjutan; Peningkatan kapasitas masyarakat perkotaan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim; Pengembangan dan optimalisasi riset dan sistem informasi tentang perubahan iklim di kawasan perkotaan; Pengembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
5) Penguatan Sistem Pendukung yang memadai, dengan strategi implementasi Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia

tanggap perubahan iklim; Inventarisasi informasi terkait perubahan iklim; Pengembangan riset daerah dalam menyiapkan perubahan iklim; Perencanaan, penganggaran, peraturan pendukung, dan monev kegiatan adaptasi perubahan iklim.

Selain rencana adaptasi terhadap perubahan iklim, terdapat rencana mitigasi terhadap perubahan iklim. Rumusan kebijakan ini dalam rangka mencegah, menahan dan/atau memperlambat efek gas rumah kaca dengan cara mengurangi sumber-sumber penghasil gas rumah kaca/penyebab yang dapat menaikan suhu bumi serta diarahkan dalam rangka meningkatkan penyerapan karbon, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan baru.

Kebijakan mitigasi terhadap perubahan iklim antara lain sebagai berikut:

1) Pemantapan ketahanan pangan daerah dan peningkatan produksi pertanian dengan emisi GRK yang rendah, dengan strategi implementasi mengoptimalisasikan sumberdaya lahan dan air; dan menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisis GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal meminimalisasi emisi gas rumah kaca. Upaya ini juga diperkuat melalui inovasi Aplikasi Mobile Ngupahan (Ngabagi, Ngubah, Ngurai Sampah Makanan) yang menjadi solusi pengelolaan sampah pangan di tingkat rumah tangga. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk membagikan makanan layak konsumsi kepada warga sekitar yang membutuhkan (fitur Piring Berbagi), mengolah sampah makanan menjadi kompos melalui sistem bank komposter, serta mendukung pemanfaatan pangan keluarga yang lebih beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Dengan pendekatan digital berbasis spasial, Ngupahan tidak hanya mengurangi *food waste* dan menyediakan pupuk organik bagi kelompok berkebun seperti Berdikari, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi GRK, peningkatan ketahanan pangan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2) Peningkatan fungsi dan pemeliharaan sistem irigasi, dengan strategi implementasi menstabilkan elevasi muka air dan memperlancar sirkulasi air pada jaringan irigasi. Upaya ini diperkuat melalui

inovasi Masterplan Pengelolaan Irigasi Tersier (MasPit) yang dikembangkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. MasPit memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan data irigasi secara spasial dan tabular, sehingga ketersediaan air dapat dipetakan secara lebih akurat, mendukung peningkatan produksi pertanian, serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air sebagai bagian dari adaptasi terhadap perubahan iklim.

3) Penurunan emisi GRK sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan, mencegah bencana, menyerap tenaga kerja, dan menambah pendapatan, dengan strategi implementasi Menurunkan degradasi hutan untuk menurunkan emisi GRK dan mengabsorbsi GRK secara optimal dan meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK. Upaya ini sejalan dengan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam aksi mitigasi dan adaptasi, seperti pengelolaan sampah, pemanfaatan energi terbarukan, penghijauan, dan konservasi sumber daya alam. Melalui ProKlim, upaya penurunan emisi GRK tidak hanya berkontribusi pada kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.
4) Pengelolaan sistem jaringan dan tata air pada danau, dengan strategi implementasi melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi serta menstabilkan elevasi muka air pada jaringan tata air danau.
5) Peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian dengan emisi serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal, dengan strategi implementasi mengoptimalkan sumberdaya lahan dan air dengan meningkatkan RTH dan menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal.
6) Peningkatan penghematan energi penggunaan bahan bakar yang lebih bersih, dengan strategi implementasi menghemat penggunaan energi baik melalui penggunaan teknologi yang bersih dan efisien maupun pengurangan konsumsi energi tak terbarukan dan

mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan skala kecil dan menengah di daerah.

7) Peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan, dengan strategi mengurangi kebutuhan akan perjalanan khususnya perkotaan melalui penatagunaan lahan mengurangi perjalanan dan jarak perjalanan yang tidak perlu.
8) Pemanfaatan teknologi bersih baik untuk pembangkit listrik dan saran transportasi, dengan strategi implementasi Meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan pengeluaran karbon pada kendaraan bermotor pada sarana transportasi.
9) Pengembangan transportasi massal nasional yang rendah emisi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, dengan strategi implementasi menggeser pola penggunaan kendaraan pribadi ke pola transportasi rendah karbon (transportasi masal).
10) Peningkatan pertumbuhan industri dengan mengoptimalkan pemakaian energi, dengan strategi implementasi memberikan insentif pada program efisiensi energi.
11) Meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah domestik, dengan strategi implementasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan peraturan di daerah; peningkatan pengelolaan air limbah di perkotaan; pengurangan timbulan sampah melalui 3r; perbaikan proses pengelolaan sampah di TPA; peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah; peningkatan/ pembangunan/ rehabilitasi TPA; dan pemanfaatan limbah/sampah menjadi produksi energi ramah lingkungan. Upaya ini sejalan dengan inovasi Lawang Hegar (Langkah Berwawasan Lingkungan Hijau Estetik Segar) yang dikembangkan oleh RSUD Cibinong. Program Lawang Hegar meliputi pengolahan sampah plastik menjadi Ecobrick, pemanfaatan limbah organik menjadi Eco Enzyme dan Kompos, serta optimalisasi lahan rumah sakit untuk penghijauan dan ketahanan pangan. Inovasi ini tidak hanya mendukung pengelolaan sampah ramah lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada penurunan emisi GRK, penciptaan lingkungan hijau yang estetik, dan peningkatan partisipasi masyarakat rumah sakit dalam pelestarian lingkungan. SIADUL KECIL (Sistem Informasi Pelaporan

Administrasi Dokumen Lingkungan, Limbah B3 Medis bagi Usaha Skala Kecil) yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor juga mendukung kebijakan tersebut dengan menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan digital untuk pengelolaan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan skala kecil, sehingga pengelolaan limbah berbahaya dapat terintegrasi dengan pengelolaan sampah domestik dan limbah lainnya secara lebih akurat, transparan, dan berkelanjutan.

Terdapat tantangan bagaimana agar lingkungan hidup mampu mempertahankan fungsi dan jasa lingkungan alaminya untuk mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan. Setidaknya ada 3 (tiga) Jasa Lingkungan yang bernilai sangat penting dan saling terkait dalam mendukung kehidupan, yaitu jasa lingkungan fungsi penyedia (pangan), jasa lingkungan fungsi penyedia (air bersih), dan jasa lingkungan fungsi pengaturan (tata aliran air). Hal yang terkait langsung dengan meningkatnya jumlah penduduk adalah kebutuhan akan pangan yang juga semakin meningkat. Kestabilan dan keberlangsungan negara akan sangat bergantung pada ketahanan pangannya.

Tren perubahan iklim global yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi dalam persiapan dan kesiapan sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Peningkatan suhu laut dan fenomena el-nino dan la-nina menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi curah hujan bulanan sehingga mengganggu pola dan produksi hasil pertanian.

Kondisi ketersediaan air di Kabupaten Bogor juga mengalami ancaman dari berkurangnya daerah-daerah resapan air dan berubah fungsinya daerah-daerah penyimpan air. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas di Kabupaten Bogor yang daya dukung air yang menurun. Walaupun secara agregat masih cukup tinggi suplai airnya, tetapi untuk beberapa lokasi kecamatan khususnya perkotaan atau sub urban perkotaan telah mengalami kekeringan ketika musim kemarau.

c. Kondisi Geologi

Sebagaimana diketahui bahwa pada umumya geologi terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu geologi fisik *(Physical Geology)* dan geologi dinamis *(Dynamic Geology)*. Adapun dalam hal ini, kondisi geologi yang dijelaskan termasuk dalam kelompok geologi fisik yang mencakup jenis batuan dan tanah yang menjadi tutupan di wilayah Kabupaten Bogor.

Adapun jenis batuan geologi di Kabupaten Bogor terdiri dari 31 jenis batuan yang tersebar di 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Jenis batuan Kipas Aluvium dan Batuan Gunung Api Gunung Salak yang merupakan jenis batuan yang paling dominan di Kabupaten Bogor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3
Jenis Batuan di Kabupaten Bogor

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)	Persentase
1	Aluvium	13.398,81	4,48
2	Aluvium Tua	4.018,81	1,34
3	Andesit	98,15	0,03
4	Andesit dan Basalt	30,18	0,01
5	Andesit Gunungapi Sudamanik	2.195,44	0,73
6	Andesit horenblenda dan porfit diorite	2.751,13	0,92
7	Anggota Batugamping	360,37	0,12
8	Batulempung, Formasi Bojong Manik	2.808,19	0,94
9	Basal Gunungapi Dago	311,09	0,10
10	Batu pasir tufaan dan konglomerat	7.587,19	2,54
11	Batuan Gunung Api G. Pangrango	20.356,38	6,80
12	Batuan Gunung Api Gunung Gede	15.011,85	5,02
13	Batuan Gunung Api Gunung Salak	37.801,57	12,64
14	Batuan Gunung Api Tua	37.670,77	12,59
15	Batuan gunungapi muda	11.072,66	3,70
16	Batuan Gunungapi Tua	859,18	0,29
17	Dasit	945,33	0,32
18	Diorit Kuarsa	457,76	0,15
19	Formasi Bojongmanik	31.284,61	10,46
20	Formasi Cantayan	1.328,50	0,44
21	Formasi Cihoe	103,68	0,03
22	Formasi Cimapag	549,27	0,18
23	Formasi Genteng	6.296,21	2,10
24	Formasi Jatiluhur	36.349,86	12,15
25	Formasi Klapanunggal	6.867,76	2,30
26	Formasi Parigi	202,86	0,07
27	Formasi Rengganis	536,66	0,18
28	Formasi Serpong	783,62	0,26
29	Formasi Subang	2.486,36	0,83
30	Kipas Aluvium	50.964,15	17,03

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)	Persentase
31	Tufa dan Breksi	3.689,44	1,23
TOTAL		299.177,85	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044, 2024

Selanjutnya jenis tanah yang menjadi tutupan di wilayah Kabupaten Bogor didominasi oleh material vulkanik lepas yang agak peka dan sangat peka terhadap erosi. Adapun jenis tanah di Kabupaten Bogor terdiri dari 50 jenis yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor dengan dominasi jenis tanah yaitu Latosol Haplik, Gleisol Eutrik, Kambisol Gleik dengan total luas 22.962,31 Ha yang terdapat di Kecamatan Babakan Madang, Bojonggede, Ciawi, Cibinong, Cileungsi, Ciseeng, Citereup, Gunungputri, Jonggol, Kemang, Klapanunggal, Parung, Rancabungur, Sukaraja dan Kecamatan Tajurhalang, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Jenis Tanah Di Kabupaten Bogor

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1	Andosol Distrik, Kambisol Distrik	4.286,00	1,43
2	Andosol Distrik, Kambisol Distrik, Latosol Haplik	1.065,83	0,36
3	Andosol Distrik, Latosol Haplik, Litosol	12.154,41	4,06
4	Andosol Distrik, Litosol, Latosol Haplik	14.515,04	4,85
5	Gleisol Distrik, Kambisol Gleik	21.733,77	7,26
6	Kambisol Distrik, Aluvial Distrik, Gleisol Eutrik	1.009,25	0,34
7	Kambisol Distrik, Andosol Distrik, Litosol	3.430,85	1,15
8	Kambisol Distrik, Gleisol Distrik, Latosol Haplik	1.363,11	0,46
9	Kambisol Distrik, Gleisol Distrik, Podsolik Haplik	4.840,07	1,62
10	Kambisol Distrik, Kambisol Distrik	10.778,40	3,6
11	Kambisol Distrik, Kambisol Distrik, Kambisol, Gleik	1.047,57	0,35
12	Kambisol Distrik, Kambisol Distrik, Kambisol, Gleik	1.775,95	0,59
13	Kambisol Distrik, Kambisol Distrik, Podsolik, Haplik	6.018,42	2,01
14	Kambisol Distrik, Kambisol Gleik	6.432,00	2,15
15	Kambisol Distrik, Kambisol Gleik, Gleisol Distrik	11.206,23	3,75
16	Kambisol Distrik, Kambisol Gleik, Latosol Haplik	5.410,28	1,81
17	Kambisol Distrik, Latosol Haplik	1.129,65	0,38
18	Kambisol Distrik, Latosol Haplik, Gleisol Eutrik	10.260,12	3,43
19	Kambisol Distrik, Litosol, Singapan batuan	3.073,70	1,03
20	Kambisol Distrik, Podsolik Haplik, Andosol Distrik	2.678,66	0,9
21	Kambisol Distrik, Podsolik Haplik, Kambisol Gleik	9.216,24	3,08
22	Kambisol Distrik, Podsolik Haplik, Kambisol Litik	458,13	0,15
23	Kambisol Distrik, Podsolik Haplik, Litosol	1.944,64	0,65
24	Kambisol Eutrik, Litosol, Kambisol Distrik	3.453,47	1,15
25	Kambisol Eutrik, Litosol, Singkapan batuan	5.324,93	1,78
26	Kambisol Eutrik, Mediteran Haplik	881,77	0,29
27	Kambisol Gleik, Kambisol Distrik	3.776,66	1,26
28	Kambisol Gleik, Latosol Haplik, Regosol Gleik	1.221,39	0,41
29	Kambisol Litik, Andosol Distrik, Litosol	7.476,15	2,5
30	Kambisol Oksik, Litosol, Latosol Haplik	14.197,00	4,75
31	Kambisol Oksik, Podsolik Haplik, Litosol	130,08	0,04

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase
32	Latosol Haplik, Gleisol Eutrik, Kambisol Gleik	22.962,31	7,68
33	Latosol Haplik, Kambisol Distrik, Gleisol Distrik	2.215,54	0,74
34	Latosol Haplik, Kambisol Distrik, Kambisol Gleik	4.924,44	1,65
35	Latosol Haplik, Litosol	9.659,10	3,23
36	Latosol Haplik, Podsolik Haplik, Gleisol Eutrik	11.759,20	3,93
37	Litosol, Andosol Distrik, Kambisol Litik	11.398,35	3,81
38	Litosol, Andosol Distrik, Singapan batuan	12.207,35	4,08
39	Litosol, Kambisol Eutrik, Singkapan batuan	2.391,77	0,8
40	Litosol, Kambisol Litik	1.273,35	0,43
41	Litosol, Kambisol Oksik, Podsolik Haplik	2.361,89	0,79
42	Litosol, Latosol Haplik, Andosol Distrik	4.041,61	1,35
43	Litosol, Latosol Haplik, Kambisol Oksik	5.951,84	1,99
44	Mediteran Haplik, Kambisol Eutrik	4.196,97	1,4
45	Mediteran Haplik, Kambisol Eutrik, Litosol	2.456,05	0,82
46	Mediteran Haplik, Kambisol Eutrik, Podsolik, Haplik	11.682,93	3,91
47	Regosol Distrik, Kambisol Distrik, Regosol Gleik	1.050,70	0,35
48	Regosol Distrik, Latosol Haplik, Regosol Gleik	3.776,46	1,26
49	Regosol Distrik, Regosol Gleik, Latosol Haplik	11.633,89	3,89
50	Tubuh Air (X3)	944,32	0,32
TOTAL		**299.177,85**	**100**

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044, 2024

d. Kondisi Hidrologi

Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu : (1) DAS Cidurian; (2) DAS Cimanceuri; (3) DAS Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) DAS Cileungsi; (6) DAS Cibeet; (7) DAS Cibeureum, dengan luas dan wilayah sungai, sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6. Adapun peta Daerah Aliran Sungai sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

Tabel 2.5
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bogor

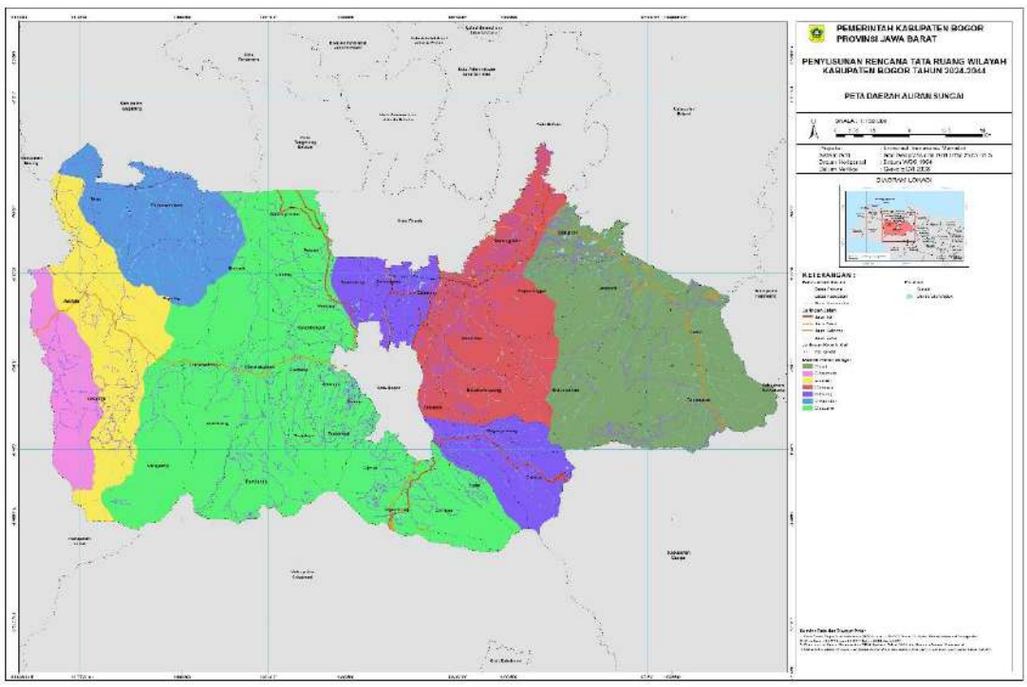
No	Daerah Aliran Sungai	Luas (Ha)	Persentase
1	Cibeet	59.805,85	20,00
2	Cibeureum	13.184,21	4,40
3	Cidurian	28.463,38	9,50
4	Cileungsi	38.158,97	12,80
5	Ciliwung	25.818,57	8,60
6	Cimanceuri	25.379,07	8,50
7	Cisadane	108.367,81	36,20
TOTAL		**299.177,85**	**100,00**

Sumber : Buku Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Tabel 2.6
Wilayah Sungai di Kabupaten Bogor

No	Wilayah Sungai	Luas (Ha)	Persentase
1	WS Cidanau - Ciujung - Cidurian	41.647,58	13,90
2	WS Ciliwung – Cisadane	197.724,41	66,10
3	WS Citarum	59.805,85	20,00
TOTAL		**299.177,85**	**100,00**

Sumber : Buku Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044



Sumber : Buku Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Gambar 2.3
Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bogor

e. Penggunaan Lahan

Berdasarkan peta guna tutupan lahan, mayoritas penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Bogor adalah hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi yaitu seluas 84.412,47 Ha. Penggunaan lahan paling kecil yaitu lahan yang digunakan untuk hutan kota, jalur hijau dan taman kota seluas 8,50 Ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.7
Penggunaan Lahan Kabupaten Bogor Tahun 2023

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran	4.174,34	1,40
2	Bangunan non-permukiman lain	210,38	0,07
3	Bangunan permukiman desa (berasosiasi dengan vegetasi pekarangan)	23.097,19	7,72
4	Bangunan permukiman kota	58.453,01	19,54
5	Danau/telaga alami	557,67	0,19
6	Hutan kota, jalur hijau dan taman kota	8,49	0,00
7	Hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi	84.403,12	28,21
8	Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan rendah	745,51	0,25
9	Kebun campuran	16.064,56	5,37
10	Ladang/tegalan dengan palawija	17.512,00	5,85
11	Lahan terbuka lain	968,61	0,32
12	Landas pacu (runway) dan taxiway	32,00	0,01
13	Padang Rumput	61,96	0,02
14	Penggalian pasir, tanah dan batu (sirtu)	1.726,73	0,58
15	Perkebunan	33.798,75	11,30
16	Sawah dengan padi diselingi tanaman lain/bera	44.849,52	14,99
17	Semak/belukar	8.439,01	2,82
18	Stadion dan sarana olah raga	2.099,45	0,70
19	Sungai	1.757,05	0,59
20	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	15,30	0,01
21	Tubuh air lain	203,20	0,07
TOTAL		**299.177,85**	**100,00**

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044, 2024

B. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Bogor memiliki potensi komoditas unggulan di beberapa Kecamatan. Komoditas ini berbeda di setiap wilayahnya. Perbedaan jenis komoditas ini tentunya dipengaruhi oleh kondisi alam, jenis tanah, bentuk topografi dan masyarakat yang mengelolanya. Berikut adalah komoditas unggulan 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor.

Tabel 2.8
Komoditas Unggulan 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor

No	Kelompok	Kecamatan	Komoditas	SKPD
1	Perikanan	Cibinong	Ikan hias	Diskanak

No	Kelompok	Kecamatan	Komoditas	SKPD
2	Perikanan	Ciseeng	Ikan lele / hias	Diskanak
3	Perikanan	Citeureup	Ikan hias	Diskanak
4	Perikanan	Gunung Sindur	Ikan lele/ hias	Diskanak
5	Perikanan	Kemang	Ikan lele / hias	Diskanak
6	Perikanan	Pamijahan	Ikan mas	Diskanak
7	Perikanan	Parung	Ikan lele	Diskanak
8	Perikanan	Rancabungur	Ikan lele	Diskanak
9	Pertanian	Babakan Madang	Kopi - Arabika - Robusta	Distanhorbun
10	Pertanian	Bojonggede	Sayuran daun - Kangkung - Bayam	Distanhorbun
11	Pertanian	Caringin	Pisang	Distanhorbun
12	Pertanian	Ciampea	Ubi jalar	Distanhorbun
13	Pertanian	Ciawi	Sayuran (Cabe) - Cabe Keriting - Cabe Rawit	Distanhorbun
14	Pertanian	Cibungbulang	Sayuran (Daun) - Kangkung - Bayam - Petsai	Distanhorbun
15	Pertanian	Cigombong	Sayuran - Cabe Keriting - Cabe Rawit	Distanhorbun
16	Pertanian	Cigudeg	Manggis	Distanhorbun
17	Pertanian	Cijeruk	Durian	Distanhorbun
18	Pertanian	Cileungsi	Tanaman obat - Lengkuas - Kencur - Kunyit	Distanhorbun
19	Pertanian	Ciomas	Ubi jalar	Distanhorbun
20	Pertanian	Dramaga	Ubi jalar	Distanhorbun
21	Pertanian	Gunung Putri	Tanaman obat - Lengkuas - Kencur - Kunyit	Distanhorbun

No	Kelompok	Kecamatan	Komoditas	SKPD
22	Pertanian	Jasinga	Manggis	Distanhorbun
23	Pertanian	Jonggol	Durian	Distanhorbun
24	Pertanian	Klapanunggal	Manggis	Distanhorbun
25	Pertanian	Leuwisadeng	Manggis	Distanhorbun
26	Pertanian	Leuwiliang	Manggis	Distanhorbun
27	Pertanian	Megamendung	Sayuran (cabe) - Cabe Keriting - Cabe Rawit	Distanhorbun
28	Pertanian	Nanggung	Pala	Distanhorbun
29	Pertanian	Parung Panjang	Pisang	Distanhorbun
30	Pertanian	Rumpin	Durian	Distanhorbun
31	Pertanian	Sukajaya	Cengkeh	Distanhorbun
32	Pertanian	Sukamakmur	Kopi - Arabika - Robusta	Distanhorbun
33	Pertanian	Sukaraja	Ubi kayu	Distanhorbun
34	Pertanian	Tajur Halang	Jambu biji	Distanhorbun
35	Pertanian	Tamansari	Tanaman Hias	Distanhorbun
36	Pertanian	Tanjungsari	Kopi Robusta	Distanhorbun
37	Pertanian	Tenjo	Tanaman obat - Lengkuas - Sereh	Distanhorbun
38	Pertanian	Tenjolaya	Ubi jalar	Distanhorbun
39	Peternakan	Cariu	Sapi potong	Diskanak
40	Peternakan	Cisarua	Sapi perah	Diskanak

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Terdapat 2 komoditas yang tidak dicantumkan dalam komoditas unggulan kecamatan, tapi sangat populer dibudidayakan masyarakat yaitu padi (dari kelompok pertanian) dan domba (dari kelompok peternakan). Jika dilihat berdasarkan banyaknya masyarakat yang membudidayakan, maka komoditas unggulan daerah berdasarkan kelompok komoditas adalah:

1. Padi (dari kelompok pertanian)
2. Domba (dari kelompok peternakan)
3. Lele (dari kelompok perikanan)

Adapun komoditas unggulan berdasarkan jenisnya terdapat pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9
Jenis Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor

Jenis	Kategori	Jenis	Komoditas Unggulan
Pertanian	Tanaman Pangan	Umbi-umbian	Ubi Jalar
	Holtikultura	Buah	Pisang
			Manggis
			Durian
		Sayur	Cabai
			Tomat
			Jagung
			Kacang Tanah
	Tanaman industry	Kopi	Robusta
			Arabika
		Cengkeh	Zanzibar
Peternakan	Ruminansia	Sapi potong	Petro
		Sapi perah	Frisian Hollstein
	Ikan	Ikan Hias	Coridoras Panda
			Mini Viper
			Guppy
			Manfish
			Blue Pollar
			Perot
			Pamas
			Baby Dolphin
			Cordoras
			Blue Jack
		Ikan konsumsi	Lele

Sumber: Laporan Akhir Kajian Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor, 2024

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Ambang batas Jasa Lingkungan penyedia digunakan untuk menganalisis kemampuan lingkungan Kabupaten Bogor yang dikuantifikasi sebagai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk menguantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH). Yang dimaksud dengan "Daya Dukung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar

keduanya. Sementara "Daya Tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ambang batas secara sederhana didefinisikan sebagai suatu tingkatan yang masih dapat diterima. Dalam hal ini ambang batas yang digunakan adalah ambang batas penduduk, yaitu seberapa banyak penduduk yang dapat didukung suatu wilayah dengan ketersediaan sumber daya yang ada atau tersedia. Penentuan ambang batas dan status DDLH ini dilakukan melalui pendekatan menggunakan Jasa Lingkungan penyedia bahan pangan dan Jasa Lingkungan penyedia air bersih dengan asumsi tidak terjadi aliran materi/energi *(closed system)*.

- **Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan**

  Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang menjadi penyokong pangan untuk kesatuan wilayah megapolitan Jabodetabek. Hal ini didukung oleh bentang lahan yang subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman pangan utama dan hortikultura. Jasa lingkungan fungsi penyedia (pangan) Kabupaten Bogor termasuk ke dalam katagori kelas tinggi sebagai indikator bahwa wilayah atau daerah tersebut memiliki suatu lingkungan dengan daya dukung serta kemampuan dalam menyediakan pangan yang tinggi.

  Akan tetapi, status DDDTLH Penyedia Pangan (Tabel 2.10) menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Bogor sudah melewati ambang batas. Ketersediaan pangan sebesar 2.792.414.284.778,40 kkal tidak dapat mengimbangi kebutuhan pangan Kabupaten Bogor sebesar 4.881.865.400.500,00 kkal. Terjadi selisih ketersediaan pangan sebanyak (-) 2.089.451.115.721,60 kkal dengan ambang batas penduduk sebanyak 3.558.254 jiwa, dan luas yang belum melampaui seluas 30,25 persen.

  Diketahui bahwa Kabupaten Bogor mengalami defisit besar dalam ketersediaan pangan. Total kebutuhan pangan penduduk mencapai 4,88 triliun kilokalori, sementara total ketersediaan hanya sekitar 2,79 triliun kilokalori, sehingga terdapat defisit sebesar 2,09 triliun kilokalori. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor telah melampaui daya dukung lingkungannya untuk menyediakan pangan,

dengan hanya 30,25% wilayah yang masih berada di bawah ambang batas daya dukung. Beberapa kecamatan seperti Gunungputri, Sukaraja, dan Cibinong mengalami defisit yang sangat tinggi akibat tekanan urbanisasi dan konversi lahan pertanian menjadi permukiman dan kawasan industri. Sebaliknya, sejumlah kecamatan di wilayah barat dan tenggara seperti Tenjo, Rumpin, Cigudeg, dan Cariu masih menunjukkan surplus ketersediaan pangan.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan spasial antara daerah surplus dan defisit yang tidak dapat saling menutupi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan model suplai pangan yang lebih terintegrasi dan berbasis daya dukung lingkungan. Salah satu usulan model adalah pembagian kawasan ke dalam zona produksi pangan (seperti Tenjo, Rumpin, dan Cigudeg) dan zona konsumsi tinggi (seperti Gunungputri dan Bojonggede), yang terhubung melalui sistem logistik pangan intra-kabupaten. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan lahan tidur di kawasan defisit melalui program pertanian perkotaan dan teknologi seperti hidroponik vertikal. Diversifikasi sumber pangan lokal juga perlu dikembangkan, dengan mengandalkan komoditas seperti singkong, jagung, dan ubi sebagai alternatif beras. Di samping itu, penguatan sistem cadangan pangan daerah serta digitalisasi distribusi pangan antar kecamatan dapat menjadi solusi untuk efisiensi dan ketahanan sistem pangan. Untuk mendukung keberlanjutan, kebijakan seperti moratorium alih fungsi lahan pangan, perlindungan kawasan pertanian berkelanjutan dalam dokumen tata ruang, serta pemberian insentif bagi petani dan rumah tangga produsen pangan lokal menjadi sangat penting untuk segera diterapkan. Disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.10
Status DDLH Penyedia Pangan (Tabulasi setiap Kecamatan)

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)	Selisih Ketersediaan Pangan (kkal)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas Yang Belum Melampaui (%)
1	Babakan Madang	61.940.203.514,10	151.295.091.500,00	-89.354.887.985,90	78.922	24,09
2	Bojonggede	26.774.876.671,80	120.274.708.750,00	-93.499.832.078,20	34.116	0,00
3	Caringin	58.609,696,486,20	84.552.104.000,00	-25.942.407.513,80	74.681	37,76
4	Cariu	67.016.154.062,20	144.168.776.750,00	-77.152.622.687,80	85.395	7,68
5	Ciampea	41.333.448.011,80	74.748.222.250,00	-33.414.774.238,20	52.672	2,57
6	Ciawi	33.975.822.824,50	77.365.363.500,00	-43.389.540.675,50	43.292	35,32
7	Cibinong	36.362.324.597,40	163.836.966.000,00	-127.474.641.402,60	46.338	0,00
8	Cibungbulang	49.351.834.713,10	84.138.540.750,00	-34.786.706.036,90	62.888	8,53
9	Cigombong	48.940.974.755,30	66.950.946.250,00	-18.009.971.494,70	62.363	24,41
10	Cigudeg	143.005.497.186,00	143.063.848.750,00	-58.369.564,00	182.229	60,20
11	Cijeruk	40.004.054.144,70	111.294.029.750,00	-71.289.975.605,30	50.974	18,21
12	Cileungsi	93.973.228.818,90	184.086.655.000,00	-90.113.426.181,10	119.748	7,43
13	Ciomas	15.084.300.926,20	81.945.949.250,00	-66.861.648.323,80	19.221	0,00
14	Cisarua	67.007.907.290,30	87.842.560.750,00	-20.834.653.459,70	85.383	43,99
15	Ciseeng	59.954.990.871,00	72.865.607.000,00	-12.910.616.129,00	76.400	33,41
16	Citeureup	38.309.233.962,10	137.667.907.750,00	-99.358.673.787,90	48.809	0,00

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)	Selisih Ketersediaan Pangan (kkal)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas Yang Belum Melampaui (%)
17	Dramaga	28.108.113.678,60	75.253.601.250,00	-47.145.487.562,40	35.815	0,00
18	Gunungputri	59.963.134.719,40	287.558.296.250,00	-227.595.162.030,60	76.412	2,36
19	Gunungsindur	70.282.924.780,50	101.470.529.250,00	-31.187.604.469,50	89.563	43,95
20	Jasinga	121.086.098.604,00	141.844.347.250,00	-20.758.248.646,00	154.273	47,36
21	Jonggol	125.086.128.919,00	242.452.436.250,00	-117.366.307.331,00	159.390	11,06
22	Kemang	36.948.051.897,10	79.829.478.500,00	-42.881.426.602,90	47.081	15,29
23	Klapanunggal	82.683.749.807,60	155.427.585.000,00	-72.743.835.192,40	105.373	13,16
24	Leuwiliang	78.667.142.783,60	117.105.888.250,00	-38.438.745.466,40	100.247	23,25
25	Leuwisadeng	27.019.090.073,50	48.164.816.000,00	-21.145.725.926,50	34.432	7,90
26	Megamendung	50.772.769.296,80	86.816.107.750,00	-36.043.338.453,20	64.697	39,17
27	Nanggung	126.351.114.526,00	125.275.920.500,00	-1.075.194.026,00	161.010	55,12
28	Pamijahan	116.015.851.181,00	178.476.477.250,00	-62.460.626.069,00	147.842	22,66
29	Parung	34.546.178.338,60	70.266.515.000,00	-35.720.336.661,40	44.022	29,52
30	Parungpanjang	121.528.215.696,00	117.083.130.500,00	4.445.085.196,00	154.865	55,64
31	Rancabungur	22.310.333.810,20	31.320.942.000,00	-9.010.608.189,80	28.428	36,96
32	Rumpin	190.531.175.403,00	169.227.413.750,00	21.303.761.653,00	242.803	64,80
33	Sukajaya	127.207.932.728,00	167.459.372.000,00	-40.251.439.272,00	162.096	38,51
34	Sukamakmur	131.990.983.573,00	244.448.840.250,00	-112.457.856.677,00	168.176	18,20

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)	Selisih Ketersediaan Pangan (kkal)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas Yang Belum Melampaui (%)
35	Sukaraja	34.010.417.049,30	170.859.693.750,00	-136.849.276.700,70	43.341	0,00
36	Tajurhalang	38.660.662.839,30	90.289.411.250,00	-51.628.748.410,70	49.264	2,74
37	Tamansari	29.525.442.647,50	66.768.099.500,00	-37.242.656.852,50	37.619	23,89
38	Tanjungsari	98.092.020.207,80	171.008.796.250,00	-72.916.776.042,20	124.968	24,94
39	Tenjo	121.123.219.016,00	98.392.739.750,00	22.730.479.266,00	154.354	72,47
40	Tenjolaya	38.259.002.358,00	58.967.684.500,00	-20.708.682.142,00	48.752	34,05
	Kabupaten Bogor	**2.792.414.284.778,40**	**4.881.865.400.500,00**	**-2.089.451.115.721,60**	**3.558.254**	**30,25**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup, 2024

- **Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air Bersih**

Kebutuhan akan ketersediaan air merupakan kebutuhan dasar manusia dan mahluk hidup di muka bumi ini, sehingga daya dukung dan daya tampung air ditetapkan secara nasional dan diterjemahkan dalam skala kabupaten. Setiap pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor memiliki peran dan tanggung jawab melakukan perlindungan dan pengelolaan air untuk menjamin keberlanjutan fungsi jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air.

Secara agregat, DDDTLH Air di Pulau Jawa terindikasi telah terlampaui karena minimnya selisih ketersediaan air di masing-masing wilayah dan kecenderungan kinerja jasa lingkungan fungsi penyedia (air bersih) yang semakin menurun setiap tahunnya. Ketersediaan air dari keenam provinsi di Pulau Jawa sebanyak 118.901.282.137 m^3/tahun diperkirakan mampu mendukung populasi penduduk paling banyak 148.626.602 jiwa apabila tidak mempertimbangkan pembangunan dan perubahan lahan. Proporsi pemanfaatan air di Provinsi Jawa Barat adalah seluas 1.196.453,33 hektar (31,81 persen) sudah terlampaui dan 2.564.412,74 hektar (68,19 persen) sisanya masih belum terlampaui.

Sementara itu, hasil analisis untuk status DDDTLH penyedia air di Kabupaten Bogor tercatat dengan ketersediaan air sebanyak 2.373.481.483,85 m^3, kebutuhan air sebanyak 2.256.573.575,49 m^3, sehingga selisih ketersediaan air sebanyak 116.907.908,36 m^3, dimana luas wilayah yang belum terlampaui di Kabupaten Bogor seluas 161.244 hektar atau 54,46 persen.

Ketika suatu wilayah direncanakan menjadi kawasan aglomerasi, perhitungan ulang terhadap daya dukung air menjadi sangat penting. Berdasarkan peta neraca air dan proyeksi kebutuhan yang ditampilkan dalam grafik serta peta-peta tematik, terlihat bahwa kebutuhan air akan meningkat signifikan seiring dengan pertumbuhan penduduk, industri, dan aktivitas ekonomi lainnya. Namun, tidak semua wilayah dalam kawasan aglomerasi memiliki kecukupan sumber daya air yang memadai. Beberapa wilayah bahkan telah mengalami defisit air, yang ditunjukkan dalam peta neraca air negatif, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan air secara mandiri. Dalam konteks ini, dukungan dari wilayah tetangga yang memiliki surplus air menjadi sangat relevan

dan perlu dipertimbangkan secara strategis. Konektivitas antarwilayah dalam sistem suplai air, termasuk pemanfaatan sumber air permukaan dan baku dari daerah lain, harus dirancang secara terpadu. Oleh karena itu, integrasi tata ruang dan rencana pengelolaan sumber daya air lintas wilayah menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan dan ketahanan air dalam kawasan aglomerasi. Tanpa perhitungan ini, kawasan aglomerasi berisiko mengalami tekanan tinggi terhadap sumber daya air yang dapat menghambat pertumbuhan dan menimbulkan konflik antarsektor atau antarwilayah.

Berdasarkan analisis data dan visualisasi yang ditampilkan dalam peta dan grafik, terlihat bahwa kebutuhan air di kawasan yang direncanakan sebagai aglomerasi tidak seluruhnya tercukupi. Terdapat wilayah-wilayah dengan neraca air negatif, artinya jumlah kebutuhan air melebihi ketersediaan sumber daya air setempat. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan, yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk, perluasan permukiman, peningkatan kegiatan industri, serta kebutuhan pertanian dan domestik lainnya. Peta-peta proyeksi juga menunjukkan bahwa tekanan terhadap sumber daya air akan terus meningkat di masa depan jika tidak ada intervensi yang signifikan. Oleh karena itu, kawasan ini memerlukan perencanaan pengelolaan air yang lebih holistik, termasuk kemungkinan pemanfaatan air dari wilayah sekitarnya yang memiliki surplus, pembangunan infrastruktur penyimpanan dan distribusi air, serta strategi efisiensi dan konservasi air. Dengan demikian, menjawab pertanyaan apakah kebutuhan air tercukupi, maka jawabannya adalah: belum sepenuhnya, dan diperlukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara berkelanjutan.

Dalam kasus Kabupaten Bogor yang telah ditunjukkan pada dokumen sebelumnya, terdapat defisit energi pangan yang signifikan, yaitu selisih antara ketersediaan energi pangan (±2,79 triliun kkal) dan kebutuhan energi pangan penduduk (±4,88 triliun kkal), menghasilkan kekurangan sebesar lebih dari 2 triliun kkal. Kondisi ini menandakan bahwa secara agregat, kebutuhan energi pangan masyarakat tidak tercukupi oleh produksi lokal dan mengindikasikan kerentanan terhadap ketahanan pangan daerah.

Menyampaikan informasi ini dalam dokumen sangat penting karena defisit energi pangan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan stabilitas ekonomi. Selain itu, ketika wilayah menjadi bagian dari kawasan aglomerasi dengan tekanan urbanisasi dan konversi lahan pertanian, risiko terhadap penurunan produksi pangan semakin besar. Oleh karena itu, indikator ketahanan energi pangan (dalam bentuk kecukupan kkal) sebaiknya menjadi bagian eksplisit dalam analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) serta dasar dalam menyusun strategi peningkatan produktivitas pangan, diversifikasi sumber, dan integrasi dengan wilayah sekitar. Secara rinci, tabulasi status DDLH per kecamatan di Kabupaten Bogor tersaji pada tabel berikut:

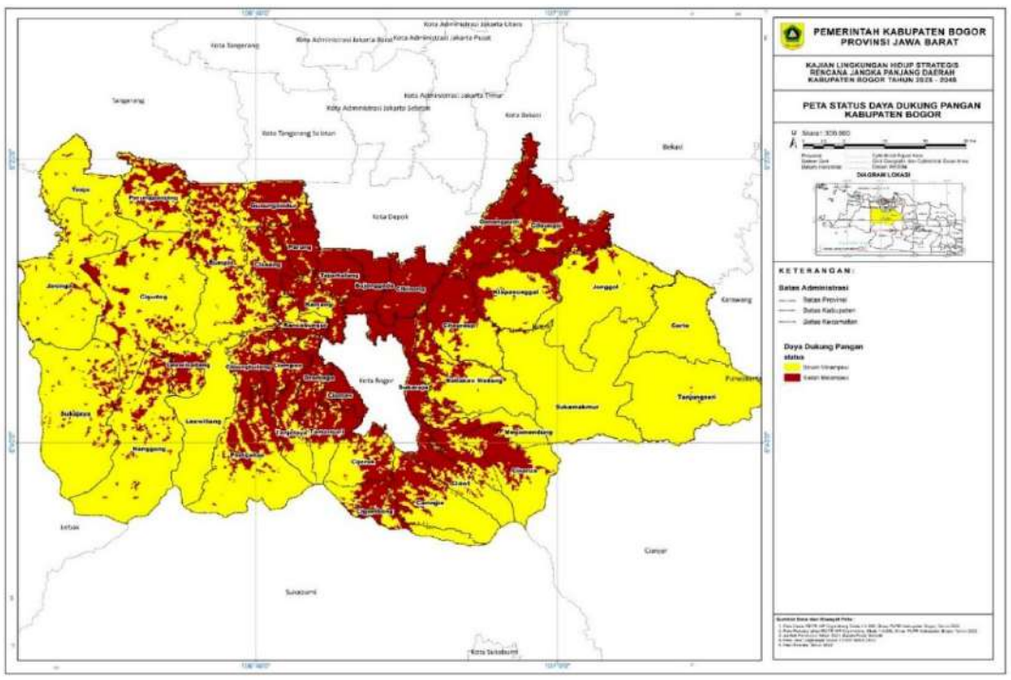
Tabel 2.11
Status DDLH Penyedia Air (Tabulasi setiap kecamatan)

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3)	Kebutuhan Air (m3)	Selisih ketersediaan air (m3)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas yang Belum Melampaui (%)
1	Babakan Madang	67,541,719.02	75,158,440.51	-7,616,721.49	104,641	61.60
2	Bojonggede	10,766,728.46	20,931,942.67	-10,165,214.21	35,612	18.35
3	Caringin	19,795,901.47	30,654,362.38	-10,858,460.91	-17,930	34.46
4	Cariu	79,358,203.71	114,060,528.68	-34,720,324.97	-217,931	38.14
5	Ciampea	7,345,680.23	50,675,206.74	-43,329,526.51	-406,248	2.57
6	Ciawi	20,702,141.00	20,018,481.30	683,659.70	106,501	48.00
7	Cibinong	33,093,597.90	27,249,209.72	5,844,388.17	276,424	92.60
8	Cibungbulang	9,445,823.53	64,154,981.46	-54,709,157.93	-525,991	0.00
9	Cigombong	31,688,832.41	26,812,713.42	4,876,118.98	141,754	32.25
10	Cigudeg	267,030,475.17	86,649,521.14	180,380,954.02	2,270,044	86.26
11	Cijeruk	10,546,740.27	32,295,773.00	-21,749,032.73	-109,902	16.36
12	Cileungsi	59,449,226.26	57,505,131.08	-1,944,095.18	257,076	74.14
13	Ciomas	3,997,931.95	19,606,394.34	-15,608,462.39	-76,230	0.00
14	Cisarua	71,979,085.05	33,715,580.34	38,363,504.72	554,800	82.64
15	Ciseeng	8,453,384.24	27,990,075.29	-19,536,691.04	-133,267	0.00
16	Citeureup	43,435,189.96	44,006,642.33	-571,452.37	168,817	66.28

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3)	Kebutuhan Air (m3)	Selisih ketersediaan air (m3)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas yang Belum Melampaui (%)
17	Dramaga	5,523,781.57	37,571,764.23	-32,047,982.66	-275,031	0.00
18	Gunungputri	52,683,560.90	46,632,615.03	6,050,945.87	436,467	92.19
19	Gunungsindur	10,350,837.14	39,664,156.86	-29,313,319.73	-209,971	0.00
20	Jasinga	166,311,654.42	100,091,831.40	66,219,823.02	947,181	91.62
21	Jonggol	113,221,141.45	187,879,920.51	-74,658,779.07	-555,156	23.48
22	Kemang	7,049,553.87	25,673,958.48	-18,624,404.62	-113,832	0.00
23	Klapanunggal	61,275,727.92	76,588,922.52	-15,313,194.60	20,827	34.24
24	Leuwiliang	22,044,921.06	63,435,658.70	-41,390,737.64	-329,836	11.16
25	Leuwisadeng	6,872,838.26	22,888,775.86	-16,015,937.60	-123,992	5.25
26	Megamendung	46,204,322.53	42,453,947.25	3,750,375.28	154,034	68.92
27	Nanggung	67,940,394.70	69,693,695.97	-1,753,301.27	139,342	46.55
28	Pamijahan	45,437,747.08	89,144,031.89	-43,706,284.81	-278,421	32.82
29	Parung	6,145,909.39	17,683,290.40	-11,537,381.01	-43,996	2.96
30	Parungpanjang	183,662,994.88	72,306,315.33	111,356,679.55	1,438,050	100.00
31	Rancabungur	4,425,918.60	17,649,268.92	-13,223,350.32	-113,137	0.00
32	Rumpin	137,514,682.52	94,453,144.48	43,061,538.04	714,040	42.95
33	Sukajaya	191,667,076.43	83,450,243.54	108,216,832.90	1,465,909	96.13
34	Sukamakmur	140,353,396.56	147,202,005.46	-6,848,608.90	232,232	58.61

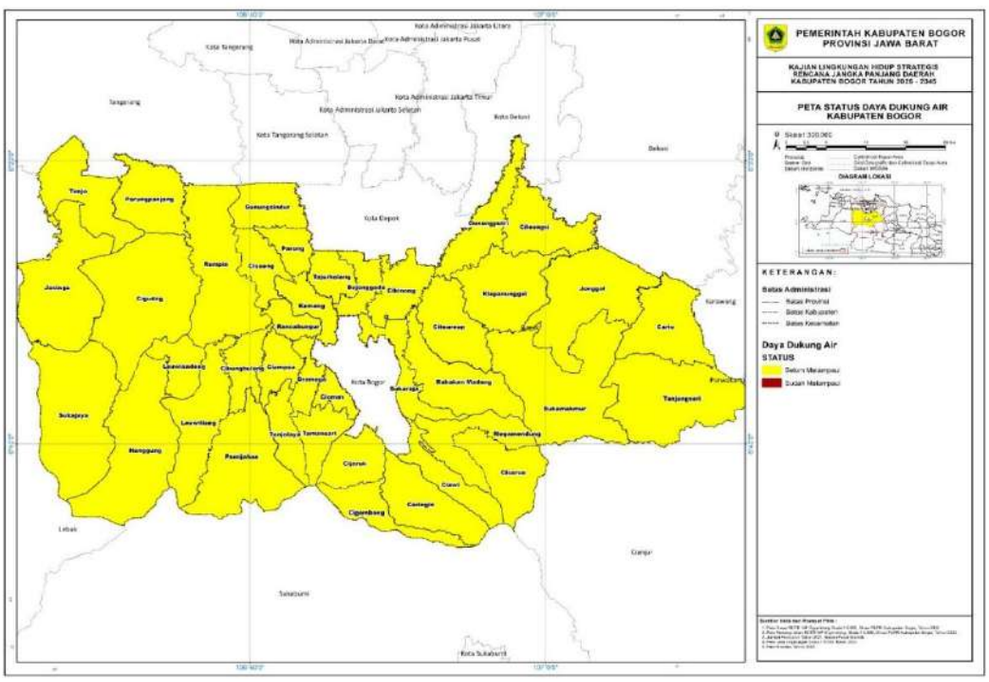
No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3)	Kebutuhan Air (m3)	Selisih ketersediaan air (m3)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas yang Belum Melampaui (%)
35	Sukaraja	30,275,157.25	49,547,029.65	-19,271,872.40	-5,330	45.86
36	Tajurhalang	6,367,946.07	23,029,226.31	-16,661,280.24	-77,785	0.00
37	Tamansari	8,087,882.41	21,726,863.59	-13,638,981.18	-72,774	23.89
38	Tanjungsari	127,885,115.43	105,335,434.64	22,549,680.79	478,906	76.18
39	Tenjo	179,318,017.17	50,564,937.36	-128,753,079.81	1,615,577	100.00
40	Tenjolaya	8,230,245.63	40,421,552.69	116,907,908.36	-297,442	31.76
	Kabupaten Bogor	**2,373,481,483.85**	**2,256,573,575.49**	**116,907,908.36**	**7,574,032**	**54.46**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup, 2024



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2.4
Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Bogor



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2025,

Gambar 2.5
Peta Status Daya Dukung Air di Kabupaten Bogor

- **Kinerja Layanan Jasa Lingkungan**

Jasa lingkungan merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) dapat direpresentasikan oleh Jasa Lingkungan, dengan pemahaman bahwa DDDTLH merupakan kapasitas Jasa Lingkungan dalam mendukung peri kehidupan makhluk hidup di suatu ekoregion. Semakin baik atau tinggi DDDT-LH suatu lokasi atau ekoregion, maka dapat dikatakan ekosistem di ekoregion tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat berfungsi dengan baik untuk menyediakan Jasa Lingkungannya (Riqqi, dkk. 2018). Setiap ekoregion terdiri dari beberapa tipe ekosistem yang menghasilkan jasa. Jasa Lingkungan dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu jasa penyediaan, pengaturan, kultural, dan pendukung.

a) Layanan penyedia (*provisioning services*): Jasa/ produk yang didapat dari ekosistem, seperti sumber daya genetika, makanan, air, dan lain-lain.
b) Layanan pengaturan (*regulating services*): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dan lain-lain.
c) Layanan kultural (*cultural services*): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti pengayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
d) Layanan pendukung (supporting services): Jasa Lingkungan yang diperlukan manusia, seperti produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, air, dan lain-lain.

Berikut klasifikasi jasa lingkungan Kabupaten Bogor.

Tabel 2.12
Klasifikasi Jasa Lingkungan

Klasifikasi Jasa Lingkungan		Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (*Provisioning*)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan

Klasifikasi Jasa Lingkungan		Definisi Operasional
2	Air Bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (fiber)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan Bakar (fuel)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
Fungsi Pengaturan (*Regulating*)		
1	Iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata Aliran Air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Penyerbukan alami (pollination)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (*Cultural*)		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (sense of place)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (*Supporting*)		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (nutrient)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2025

Nilai untuk setiap Jasa Lingkungan – selanjutnya disebut sebagai Indeks Jasa Lingkungan (IJE) ditentukan dengan pembobotan setiap ekoregion dan penutup lahan. Hasil perhitungan akan menghasilkan indeks Jasa Lingkungan dengan rentang indeks 0 sampai 5. Indeks ini kemudian diklasifikasikan ke dalam 5 kategori dengan menggunakan skala likert. Nilai interval tiap kategori adalah 1, dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Untuk memudahkan visualisasi pada peta, masing-masing kategori memiliki warna yang berbeda.

- **Jasa Lingkungan Penyedia Pangan**

Berdasarkan data terkait luasan jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Bogor, dengan pembagian berdasarkan tingkat penyediaan pangan dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Dari total luas 299.177,85 hektar yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor, tercatat bahwa kontribusi besar dalam penyediaan pangan berasal dari kategori "tinggi" dan "sangat tinggi". Secara numerik, luas area dengan penyediaan pangan tinggi mencapai 38.571,4 hektar, sementara yang sangat tinggi mencapai 41.277,1 hektar, yang keduanya menyumbang lebih dari 26% dari total luas lahan yang tercatat.

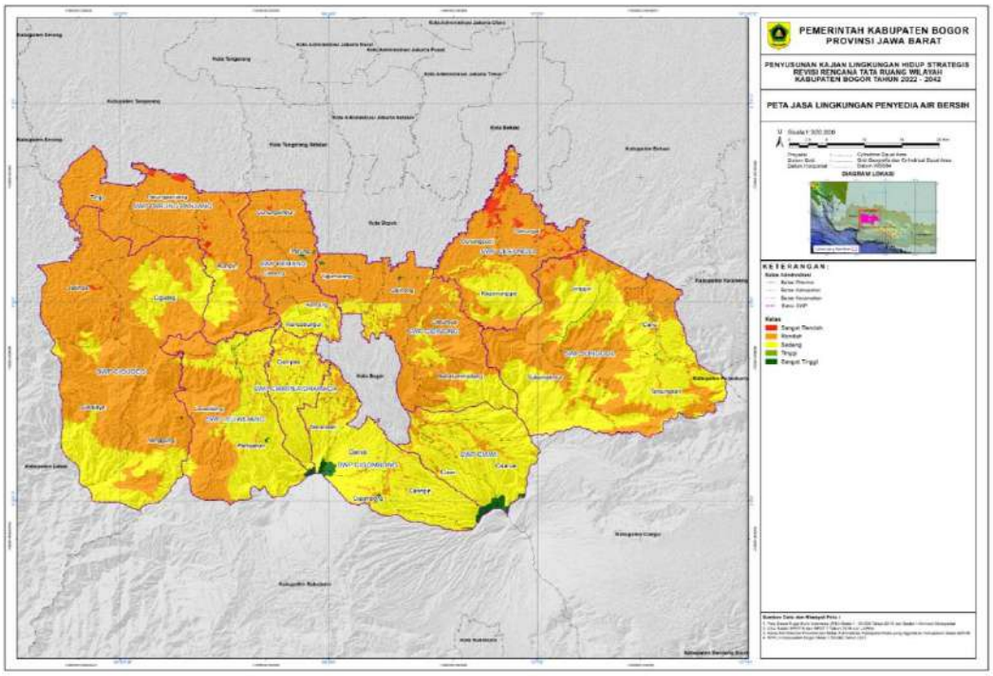
Kecamatan dengan luasan jasa penyediaan pangan sangat tinggi, seperti di Cariu, Cigudeg, dan Jasinga, menunjukkan potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bogor. Misalnya, Cigudeg dengan luas 17.928,59 hektar dan Jasinga dengan 13.751,34 hektar memberikan gambaran penting tentang distribusi dan konsentrasi sumber daya alam yang berkontribusi pada ketahanan pangan di wilayah tersebut. Sementara itu, kecamatan seperti Babakan Madang, Bojonggede, dan Cibinong yang memiliki luas penyediaan pangan tinggi, dapat menjadi prioritas dalam perencanaan kebijakan pengelolaan pangan. Berikut ini rincian luasan Jasa Lingkungan penyedia pangan per kecamatan di Kabupaten Bogor.Disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Luasan Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	JE Penyedia Pangan (Ha)					Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Babakan Madang	557,93	1.731,04	3.928,57	1.884,92	758,28	8.860,74
2	Bojonggede	0	1.950,94	0	936,35	6,68	2.893,97
3	Caringin	0	690,95	5.554,46	1.527,81	17,77	7.791,00
4	Cariu	58,24	594,75	1.893,07	4.097,83	1.842,16	8.486,05
5	Ciampea	0	804,19	106,96	674,69	1.812,02	3.397,86
6	Ciawi	0	809,87	3.381,30	338,17	177,78	4.707,11
7	Cibinong	0	3.286,17	0	1.381,51	41,03	4.708,71
8	Cibungbulang	0	567,76	133,01	866,81	2.202,33	3.769,92
9	Cigombong	0	607,33	3.250,44	775,80	21,06	4.654,63
10	Cigudeg	0	8.844,42	8.169,46	18,54	896,17	17.928,59
11	Cijeruk	0	444,82	2.592,45	1.684,62	78,00	4.799,90
12	Cileungsi	0	4.458,38	1.525,20	421,59	925,19	7.330,36
13	Ciomas	0	864,70	0	700,71	222,46	1.787,87
14	Cisarua	2,61	1.362,42	5.225,17	516,25	0	7.106,46
15	Ciseeng	0	1.259,57	196,79	1.204,73	1.329,96	3.991,05
16	Citeureup	357,03	2.323,18	3.658,46	791,86	203,58	7.334,11
17	Dramaga	0	475,69	10,45	799,34	1.272,26	2.557,74
18	Gunungputri	0	4.411,23	541,79	1.402,10	155,91	6.511,03
19	Gunungsindur	0	3.110,22	914,05	340,96	490,99	4.856,21
20	Jasinga	0	3.597,47	8.699,00	61,03	1.393,84	13.751,34
21	Jonggol	59,19	1.888,53	3.550,24	3.560,31	4.385,79	13.444,06
22	Kemang	0	1.151,80	439,17	1.407,51	311,01	3.309,48
23	Klapanunggal	1.214,1	1.379,75	5.783,06	424,64	958,30	9.759,86
24	Leuwiliang	0	2.610,25	4.800,52	745,27	1.070,82	9.226,86
25	Leuwisadeng	0	716,30	2.170,47	421,45	298,42	3.606,65
26	Megamendung	0	783,32	4.722,54	19,30	819,24	6.344,40
27	Nanggung	0	8.905,33	5.321,03	85,77	1.479,17	15.791,30
28	Pamijahan	0	1.714,21	5.728,45	677,73	4.396,97	12.517,36
29	Parung	0	1.593,98	0	510,74	669,04	2.773,76
30	Parungpanjang	0	2.032,61	3.169,01	13,67	1.881,85	7.097,14
31	Rancabungur	0	339,72	763,67	1.042,19	172,76	2.318,35
32	Rumpin	0	5.010,78	7.246,24	221,56	1.428,76	13.907,34
33	Sukajaya	0	7.032,90	7.640,25	0	1.948,92	16.622,07
34	Sukamakmur	74,24	918,81	14.006,57	796,73	2.506,07	18.302,42
35	Sukaraja	99,52	1.862,07	295,46	1.093,32	999,37	4.349,75
36	Tajurhalang	0	1.308,79	0	1.672,97	56,47	3.038,22
37	Tamansari	0	663,82	2.059,52	1.035,83	167,12	3.926,29
38	Tanjungsari	4,76	4.020,64	5.304,71	4.171,04	1.234,45	14.735,59
39	Tenjo	0	2.893,08	4.396,22	28,95	983,13	8.301,38
40	Tenjolaya	0	228,49	1.526,21	216,78	1.661,96	3.633,44
Grand Total (Ha)		**2.427,6**	**89.250,3**	**128.704,0**	**38.571,4**	**41.277,1**	**300.230,4**

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2025, 2025

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Bogor berada pada kelas jasa sedang dengan total luas sebesar 128.703,99 Ha, sebagaimana tertera pada gambar berikut:



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2.6
Peta Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan di Kabupaten Bogor

- **Jasa Lingkungan Penyedia Air**

Sementara itu, jasa penyediaan air di Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 5 kelas jasa, dari kelas sangat rendah hingga kelas sangat tinggi. Kategori luasan jasa penyediaan air yang paling mendominasi di Kabupaten Bogor berada pada kelas jasa rendah dengan luas sebesar 170.567,01 Ha. Namun terdapat 28 kecamatan yang memiliki wilayah dengan kelas jasa sangat tinggi, dengan total luas sebesar 1.891,52 Ha.

Distribusi luas jasa lingkungan terkait pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Bogor berdasarkan tingkat relevansi pada masing-masing kecamatan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan total luas sebesar 299.177,85 hektar yang terbagi dalam empat kategori relevansi, yakni sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi. Dari total ini, luas dengan kategori "tinggi" mencapai 101.356,1 hektar, yang merupakan proporsi signifikan (33,9%) dari keseluruhan kawasan yang teridentifikasi.

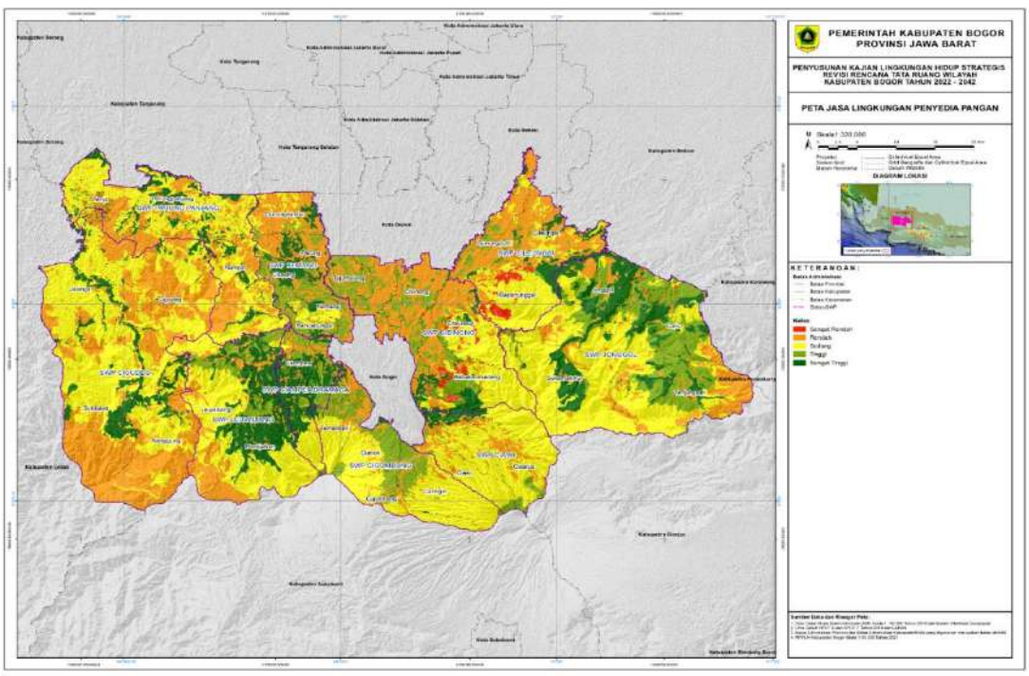
Sebagian besar kecamatan dengan relevansi tinggi terhadap pengaturan tata aliran air dan banjir tersebar di beberapa daerah seperti Kecamatan Cigudeg (10.547,51 ha), Sukajaya (16.622,07 ha), dan Pamijahan (12.517,36 ha). Kecamatan-kecamatan ini memiliki peran strategis dalam mengatur aliran air dan pengendalian banjir, yang penting dalam mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam kerangka RPJMD Kabupaten Bogor. Dengan memperhatikan luas daerah yang memiliki relevansi tinggi ini, pemerintah daerah dapat memprioritaskan perlindungan dan pemeliharaan ekosistem yang berfungsi sebagai pengatur aliran air serta pencegah banjir. Luasan jasa penyediaan air di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Luasan Jasa Penyediaan Air di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	JE Penyedia Air (Ha)					Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Babakan Madang	0	4.596,65	4.264,09	0	0	8.860,74
2	Bojonggede	0	2.608,89	278,40	0	6,68	2.893,97
3	Caringin	0	690,95	6.945,10	0	154,94	7.791,00
4	Cariu	30,42	3.667,99	4.683,09	0	104,56	8.486,05
5	Ciampea	0	804,19	2.582,36	0	11,31	3.397,86
6	Ciawi	0	815,18	3.650,23	0	241,70	4.707,11
7	Cibinong	0	4.038,66	633,23	0	36,81	4.708,71
8	Cibungbulang	0	574,17	3.137,21	0	58,54	3.769,92
9	Cigombong	0	607,33	3.939,10	0	108,19	4.654,63
10	Cigudeg	148,70	13.335,73	4.425,62	0	18,54	17.928,59
11	Cijeruk	0	444,82	4.079,86	0	275,21	4.799,90
12	Cileungsi	2.866,17	4.428,45	0	35,74	0	7.330,36
13	Ciomas	0	864,70	923,17	0	0	1.787,87
14	Cisarua	0	1.206,79	5.639,74	0	259,93	7.106,46
15	Ciseeng	94,08	3.837,66	0	53,61	5,70	3.991,05
16	Citeureup	0	6.769,73	564,38	0	0	7.334,11
17	Dramaga	0	475,69	2.068,65	0	13,40	2.557,74
18	Gunungputri	610,22	5.773,95	126,87	0	0	6.511,03
19	Gunungsindur	2.235,78	2.594,93	0	25,51	0	4.856,21
20	Jasinga	229,52	13.066,04	394,75	48,95	12,08	13.751,34
21	Jonggol	564,13	7.251,43	5.538,26	0	90,24	13.444,06
22	Kemang	0	2.180,00	1.083,72	0	45,76	3.309,48
23	Klapanunggal	395,12	4.749,00	4.597,21	18,52	0	9.759,86
24	Leuwiliang	0	7.281,93	1.877,10	0	67,84	9.226,86
25	Leuwisadeng	188,20	2.959,37	422,35	26,61	10,12	3.606,65
26	Megamendung	0	1.001,98	5.342,42	0	0	6.344,40
27	Nanggung	64,93	9.730,22	5.947,90	15,20	33,04	15.791,30
28	Pamijahan	0	2.829,18	9.639,20	0	48,98	12.517,36

No	Kecamatan	JE Penyedia Air (Ha)					Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
29	Parung	50,86	2.706,11	0	0	16,80	2.773,76
30	Parungpanjang	228,50	6.854,98	4,04	9,62	0	7.097,14
31	Rancabungur	0	719,50	1.570,08	4,96	23,82	2.318,35
32	Rumpin	1.562,01	10.386,24	1.724,08	198,04	36,96	13.907,34
33	Sukajaya	0,12	11.102,10	5.519,85	0	0	16.622,07
34	Sukamakmur	0	8.190,67	10.099,36	0	12,39	18.302,42
35	Sukaraja	0	2.900,47	1.449,28	0	0	4.349,75
36	Tajurhalang	0	3.037,17	1,05	0	0	3.038,22
37	Tamansari	0	663,82	3.162,02	0	100,45	3.926,29
38	Tanjungsari	0	6.319,40	8.401,78	0	14,40	14.735,59
39	Tenjo	0	8.272,43	0	7,04	21,91	8.301,38
40	Tenjolaya	0	228,49	3.343,72	0	61,23	3.633,44
Grand Total (Ha)		**9.268,75**	**170.567,01**	**118.059,28**	**443,82**	**1.891,52**	**300.230,37**

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2025



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2.7
Peta Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Bogor

- **Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir**

Sebagian besar kecamatan dengan relevansi tinggi terhadap pengaturan tata aliran air dan banjir tersebar di beberapa daerah seperti Kecamatan Cigudeg (10.547,51 ha), Sukajaya (16.622,07 ha), dan Pamijahan (12.517,36 ha). Kecamatan-kecamatan ini memiliki peran

strategis dalam mengatur aliran air dan pengendalian banjir, yang penting dalam mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Bogor berada pada kelas kategori rendah dengan luas 114.929,14 Ha, terutama disebabkan belum optimalnya pengelolaan DAS dan air limpasan hujan.

Secara keseluruhan, Kabupaten Bogor memiliki total luasan JE Pemurnian Air sebesar 299.177,85 hektar. Luasan terbesar terdistribusi pada kategori tinggi (98.681,52 Ha) dan sangat tinggi (105.967,57 Ha), menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di kabupaten ini memiliki potensi yang signifikan dalam pemurnian air secara alami. Sebagai contoh, kecamatan dengan kontribusi terbesar terhadap JE Pemurnian Air sangat tinggi adalah Cigudeg (17.928,59 Ha) dan Jasinga (13.751,34 Ha), yang memiliki kapasitas besar dalam menjaga kualitas air melalui proses alami. Hal ini tentunya menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam RPJMD Kabupaten Bogor, khususnya dalam merancang kebijakan yang berbasis pada ekosistem dan keberlanjutan.

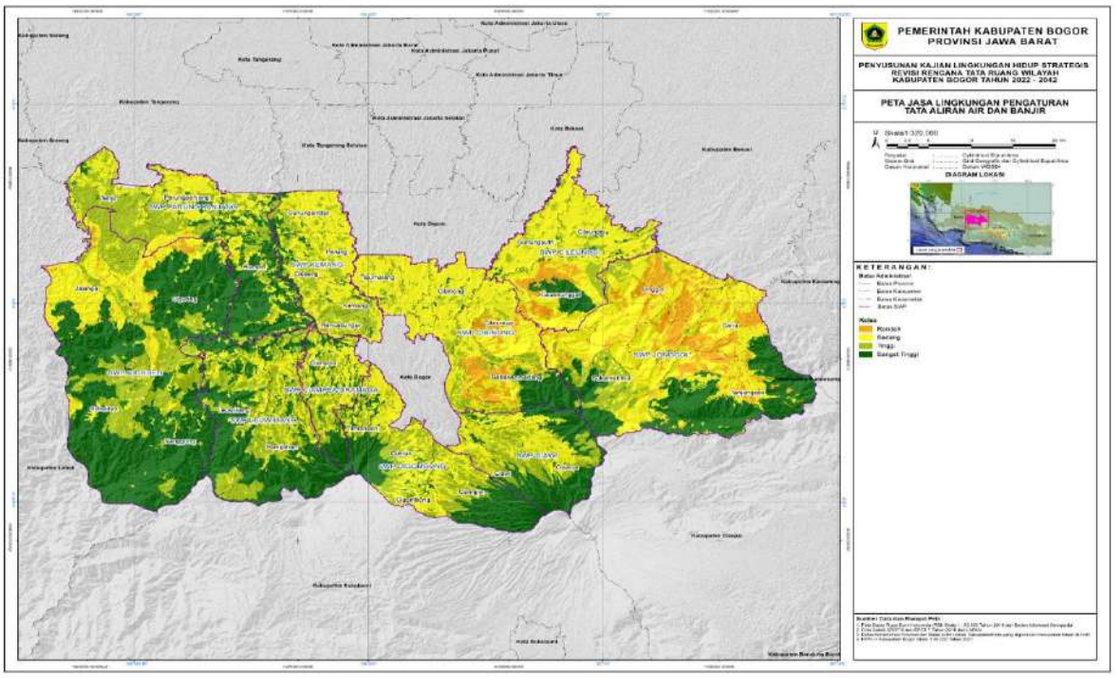
Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pengelolaan jasa ekosistem pemurnian air harus menjadi prioritas. Wilayah dengan jasa lingkungan tinggi dan sangat tinggi, seperti Cigudeg, Jasinga, dan Sukamakmur, perlu mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan tata ruang dan konservasi. Penekanan pada pelestarian kawasan hutan dan sumber daya alam lainnya di daerah ini tidak hanya akan mendukung kualitas air, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem yang esensial untuk kehidupan manusia dan biodiversitas.

Secara numerik, meskipun beberapa kecamatan seperti Bojonggede dan Ciampea memiliki kontribusi lebih kecil dalam hal jasa pemurnian air (dengan angka masing-masing 21,09 Ha dan 456,04 Ha pada kategori sangat tinggi), namun mereka tetap perlu diperhatikan dalam strategi pembangunan yang merata. Oleh karena itu, pemetaan wilayah yang memiliki potensi jasa lingkungan sangat tinggi ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan zonasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan hijau dan ramah lingkungan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	JE Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (Ha)				Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Babakan Madang	1.851,87	2.882,39	1.096,99	3.029,48	8.860,74
2	Bojonggede	0	2.557,48	308,63	27,85	2.893,97
3	Caringin	0	1.948,10	2.288,87	3.554,03	7.791,00
4	Cariu	2.501,10	4.771,95	252,19	960,81	8.486,05
5	Ciampea	0	1.452,78	1.126,58	818,49	3.397,86
6	Ciawi	0	1.444,09	1.120,83	2.142,19	4.707,11
7	Cibinong	0	4.156,68	410,81	141,23	4.708,71
8	Cibungbulang	0	1.278,08	1.670,22	821,62	3.769,92
9	Cigombong	0	1.877,56	1.180,67	1.596,40	4.654,63
10	Cigudeg	659,91	4.034,17	2.687,00	10.547,51	17.928,59
11	Cijeruk	0	1.505,46	2.167,45	1.127,00	4.799,90
12	Cileungsi	0	5.398,74	1.444,69	167,46	7.010,89
13	Ciomas	0	1.374,38	295,73	117,76	1.787,87
14	Cisarua	0	2.521,45	1.921,83	2.663,18	7.106,46
15	Ciseeng	0	1.850,51	1.336,18	804,35	3.991,05
16	Citeureup	989,93	5.397,75	796,46	49,88	7.234,01
17	Dramaga	0	1.530,00	571,74	456,00	2.557,74
18	Gunungputri	0	5.054,07	792,65	254,78	6.101,51
19	Gunungsindur	0	3.283,22	1.146,35	426,64	4.856,21
20	Jasinga	548,19	6.672,08	3.312,73	3.218,33	13.751,34
21	Jonggol	3.909,58	8.322,63	1.197,02	14,83	13.444,06
22	Kemang	0	1.909,79	1.111,94	287,76	3.309,48
23	Klapanunggal	2.077,32	4.647,63	869,57	1.989,46	9.583,99
24	Leuwiliang	0	1.399,09	2.325,60	5.502,17	9.226,86
25	Leuwisadeng	0	725,83	1.259,43	1.621,38	3.606,65
26	Megamendung	0	2.010,99	1.968,39	2.365,02	6.344,40
27	Nanggung	0	775,17	2.797,66	12.218,47	15.791,30
28	Pamijahan	0	1.781,23	3.939,63	6.796,49	12.517,36
29	Parung	0	2.038,78	669,42	65,56	2.773,76
30	Parungpanjang	29,16	3.443,52	2.813,24	811,23	7.097,14
31	Rancabungur	0	838,62	1.362,36	117,38	2.318,35
32	Rumpin	0	3.212,67	2.280,11	8.414,56	13.907,34
33	Sukajaya	0	957,09	4.787,22	10.877,76	16.622,07
34	Sukamakmur	2.040,10	8.284,78	3.425,67	4.551,88	18.302,42
35	Sukaraja	258,58	2.625,91	1.407,62	57,64	4.349,75
36	Tajurhalang	0	2.460,13	480,18	97,91	3.038,22
37	Tamansari	0	1.405,55	819,73	1.701,01	3.926,29
38	Tanjungsari	1.966,17	3.584,73	127,89	9.056,79	14.735,59
39	Tenjo	25,54	2.745,76	5.180,16	258,75	8.210,21
40	Tenjolaya	0	768,29	1.240,09	1.625,06	3.633,44
Grand Total (Ha)		**16.857,4**	**114.929,1**	**65.991,6**	**101.356,1**	**299.134,24**

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2025



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2.8
Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Bogor

- **Jasa Lingkungan Pemurnian Air**

Secara keseluruhan, Kabupaten Bogor memiliki total luasan JE Pemurnian Air sebesar 299.177,85 hektar. Luasan terbesar terdistribusi pada kategori tinggi (98.681,52 Ha) dan sangat tinggi (105.967,57 Ha), menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di kabupaten ini memiliki potensi yang signifikan dalam pemurnian air secara alami. Sebagai contoh, kecamatan dengan kontribusi terbesar terhadap JE Pemurnian Air sangat tinggi adalah Cigudeg (17.928,59 Ha) dan Jasinga (13.751,34 Ha), yang memiliki kapasitas besar dalam menjaga kualitas air melalui proses alami.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pengelolaan jasa ekosistem pemurnian air harus menjadi prioritas. Wilayah dengan jasa lingkungan tinggi dan sangat tinggi, seperti Cigudeg, Jasinga, dan Sukamakmur, perlu mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan tata ruang dan konservasi. Penekanan pada pelestarian kawasan hutan dan sumber daya alam lainnya di daerah ini tidak hanya akan mendukung

kualitas air, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem yang esensial untuk kehidupan manusia dan biodiversitas.

Secara numerik, meskipun beberapa kecamatan seperti Bojonggede dan Ciampea memiliki kontribusi lebih kecil dalam hal jasa pemurnian air (dengan angka masing-masing 21,09 Ha dan 456,04 Ha pada kategori sangat tinggi), namun mereka tetap perlu diperhatikan dalam strategi pembangunan yang merata. Oleh karena itu, pemetaan wilayah yang memiliki potensi jasa lingkungan sangat tinggi ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan zonasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan hijau dan ramah lingkungan.

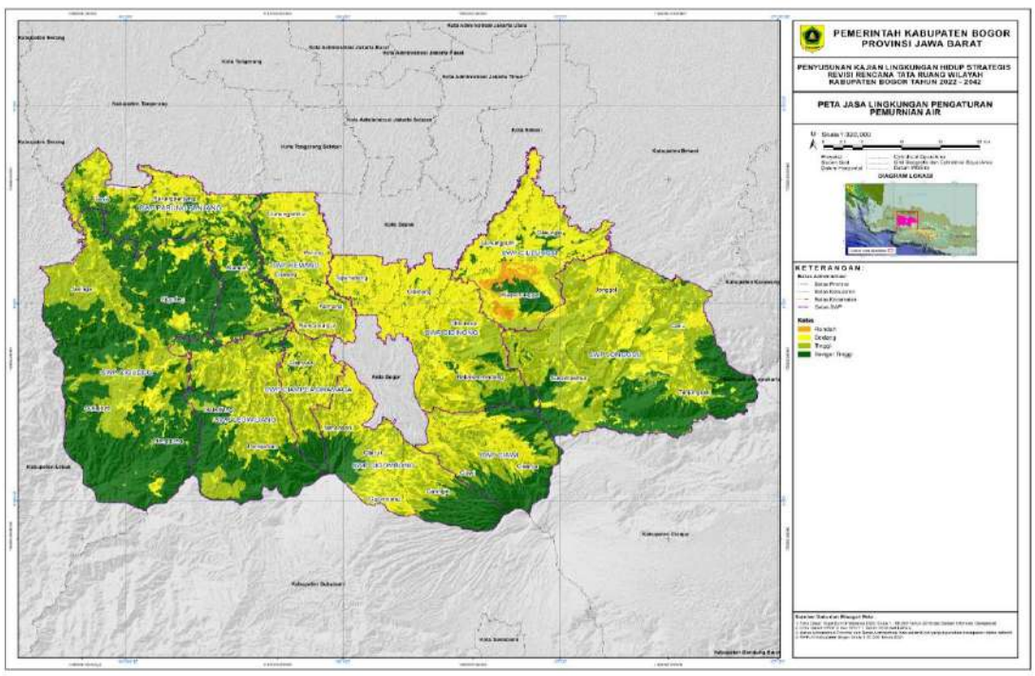
Untuk Jasa Lingkungan Pemurnian Air di Kabupaten Bogor berada pada kelas sangat tinggi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Luasan Jasa Lingkungan Pemurnian Air di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	JE Pemurnian Air (Ha)				Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Babakan Madang	0	3.243,78	3.462,13	2.154,84	8.860,74
2	Bojonggede	0	2.557,48	315,40	21,09	2.893,97
3	Caringin	0	1.948,10	2.358,81	3.484,09	7.791,00
4	Cariu	0	2.501,10	4.771,95	1.213,00	8.486,05
5	Ciampea	0	1.452,78	1.489,04	456,04	3.397,86
6	Ciawi	0	1.444,09	1.218,42	2.044,60	4.707,11
7	Cibinong	0	4.156,68	470,56	81,48	4.708,71
8	Cibungbulang	0	1.278,08	2.068,36	423,48	3.769,92
9	Cigombong	0	1.877,56	1.373,91	1.403,16	4.654,63
10	Cigudeg	0	2.549,23	2.627,85	12.751,51	17.928,59
11	Cijeruk	0	1.505,46	2.239,78	1.054,67	4.799,90
12	Cileungsi	0	5.363,94	998,21	648,74	7.010,89
13	Ciomas	0	1.374,38	413,49		1.787,87
14	Cisarua	0	2.521,45	1.952,88	2.632,13	7.106,46
15	Ciseeng	0	1.832,70	1.353,22	805,13	3.991,05
16	Citeureup	0	3.324,42	3.479,78	429,81	7.234,01
17	Dramaga	0	1.547,23	983,80	26,70	2.557,74
18	Gunungputri	0	5.056,85	637,16	407,51	6.101,51
19	Gunungsindur	0	3.201,29	1.228,28	426,64	4.856,21
20	Jasinga	0	1.149,19	6.150,70	6.451,45	13.751,34
21	Jonggol	9,87	5.046,63	8.193,14	194,43	13.444,06
22	Kemang	0	1.909,79	1.135,21	264,49	3.309,48
23	Klapanunggal	1.894,33	4.020,99	1.692,05	1.976,61	9.583,99
24	Leuwiliang	0	1.399,09	3.279,70	4.548,07	9.226,86
25	Leuwisadeng	0	793,38	1.617,82	1.195,45	3.606,65
26	Megamendung	0	2.010,99	2.225,57	2.107,84	6.344,40

No	Kecamatan	JE Pemurnian Air (Ha)				Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
27	Nanggung	0	1.651,73	2.206,32	11.933,24	15.791,30
28	Pamijahan	0	1.781,23	4.537,17	6.198,96	12.517,36
29	Parung	0	1.985,76	722,44	65,56	2.773,76
30	Parungpanjang	0	3.224,41	2.249,69	1.623,04	7.097,14
31	Rancabungur	0	838,62	1.309,22	170,51	2.318,35
32	Rumpin	0	3.263,45	2.697,71	7.946,18	13.907,34
33	Sukajaya	0	619,82	4.936,89	11.065,36	16.622,07
34	Sukamakmur	0	2.839,88	10.678,17	4.784,37	18.302,42
35	Sukaraja	0	2.721,72	1.613,62	14,41	4.349,75
36	Tajurhalang	0	2.420,44	519,87	97,91	3.038,22
37	Tamansari	0	1.405,55	1.334,95	1.185,79	3.926,29
38	Tanjungsari	0	1.966,17	3.584,73	9.184,69	14.735,59
39	Tenjo	0	2.027,21	3.038,96	3.144,03	8.210,21
40	Tenjolaya	0	768,29	1.514,60	1.350,56	3.633,44
Grand Total (Ha)		**1.904,20**	**92.580,94**	**98.681,52**	**105.967,57**	**299.134,24**

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2025



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2.9
Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air di Kabupaten Bogor

- **Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam**

luas jasa lingkungan terkait pencegahan dan perlindungan dari bencana alam di Kabupaten Bogor, dengan total wilayah sebesar 299.177,85 hektar yang terbagi dalam kategori tingkat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dari total luas tersebut, kategori tingkat rendah mencakup 15.053,82 hektar (5%), tingkat sedang 114.594,29 hektar (38%), tingkat tinggi 84.098,00 hektar (28%), dan tingkat sangat tinggi 85.388,12 hektar (29%). Kecamatan seperti Nanggung, Sukajaya, Sukamakmur, dan Pamijahan menjadi wilayah prioritas karena memiliki luasan yang signifikan dalam kategori "sangat tinggi," masing masing lebih dari 10.000 hektar.

Sebagai contoh, kecamatan seperti Sukajaya (9.648,91 hektar) dan Nanggung (12.216,18 hektar) memiliki potensi besar untuk fokus mitigasi bencana seperti longsor dan banjir, sementara Rumpin (8.276,41 hektar) dan Tanjungsari (9.184,69 hektar) dapat dikembangkan sebagai zona hijau penyangga lingkungan. Pendekatan ini mendorong kebijakan berbasis bukti yang mencakup strategi konservasi, rehabilitasi lingkungan, dan pengembangan wilayah berbasis ekosistem untuk memastikan keberlanjutan fungsi jasa lingkungan.

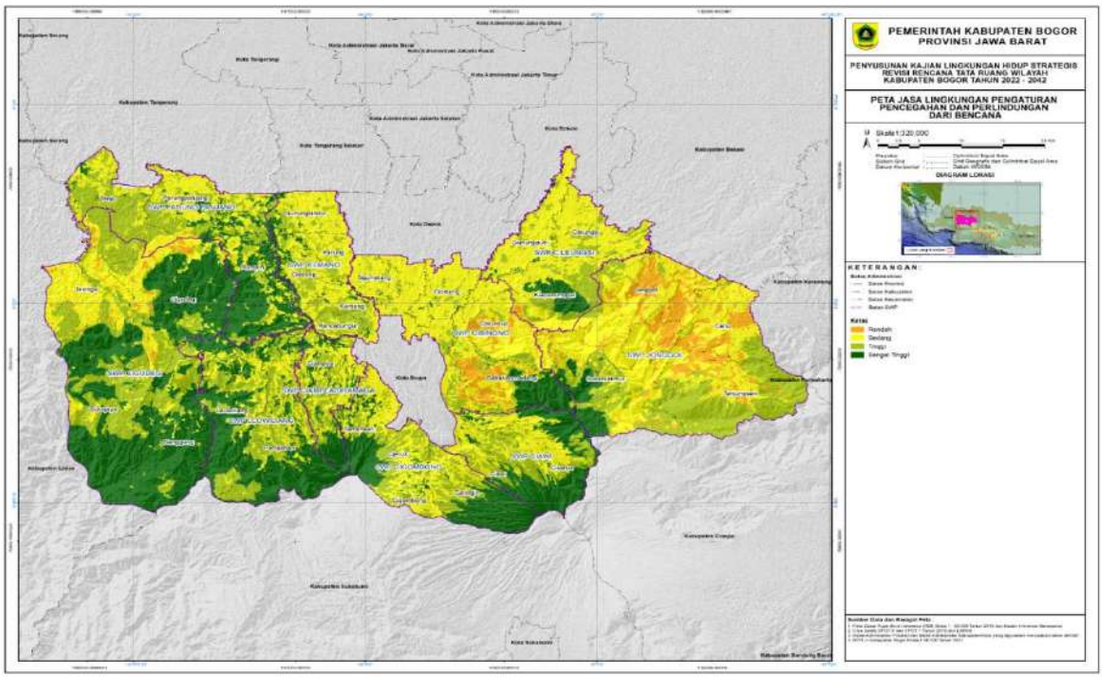
Pada Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kabupaten Bogor luasan terbesar berada pada kelas Jasa Lingkungan Sedang sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	JE Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam (Ha)				Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Babakan Madang	1.851,87	2.882,39	1.109,87	3.016,61	8.860,74
2	Bojonggede	0	2.557,48	313,92	22,57	2.893,97
3	Caringin	0	1.948,10	2.288,87	3.554,03	7.791,00
4	Cariu	2.501,10	4.771,95	1.213,00		8.486,05
5	Ciampea	0	1.452,78	1.126,58	818,49	3.397,86
6	Ciawi	0	1.444,09	1.120,83	2.142,19	4.707,11
7	Cibinong	0	4.156,68	470,70	81,34	4.708,71

No	Kecamatan	JE Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam (Ha)				Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
8	Cibungbulang	0	1.278,08	1.670,22	821,62	3.769,92
9	Cigombong	0	1.877,56	1.180,67	1.596,40	4.654,63
10	Cigudeg	744,46	3.987,27	3.013,14	10.183,72	17.928,59
11	Cijeruk	0	1.505,46	2.167,45	1.127,00	4.799,90
12	Cileungsi	0	5.398,74	1.602,19	9,97	7.010,89
13	Ciomas	0	1.374,38	295,73	117,76	1.787,87
14	Cisarua	0	2.521,45	1.921,83	2.663,18	7.106,46
15	Ciseeng	0	1.850,51	1.349,62	790,91	3.991,05
16	Citeureup	989,93	5.408,25	787,10	48,73	7.234,01
17	Dramaga	0	1.530,00	576,43	451,32	2.557,74
18	Gunungputri	0	5.054,07	830,10	217,34	6.101,51
19	Gunungsindur	0	3.318,39	1.118,88	418,95	4.856,21
20	Jasinga	548,19	6.710,19	5.216,20	1.276,75	13.751,34
21	Jonggol	3.899,71	8.034,12	1.495,40	14,83	13.444,06
22	Kemang	0	1.909,79	1.153,02	246,67	3.309,48
23	Klapanunggal	182,99	4.553,64	2.881,63	1.965,73	9.583,99
24	Leuwiliang	0	1.399,09	2.325,60	5.502,17	9.226,86
25	Leuwisadeng	0	725,83	1.259,43	1.621,38	3.606,65
26	Megamendung	0	2.010,99	1.968,39	2.365,02	6.344,40
27	Nanggung	0	775,17	2.799,95	12.216,18	15.791,30
28	Pamijahan	0	1.781,23	3.939,63	6.796,49	12.517,36
29	Parung	0	2.038,95	693,15	41,67	2.773,76
30	Parungpanjang	45,19	3.427,49	2.844,40	780,06	7.097,14
31	Rancabungur	0	838,62	1.362,36	117,38	2.318,35
32	Rumpin	0	3.239,30	2.391,62	8.276,41	13.907,34
33	Sukajaya	0	957,09	6.016,06	9.648,91	16.622,07
34	Sukamakmur	2.040,10	8.284,78	5.262,94	2.714,61	18.302,42
35	Sukaraja	258,58	2.625,91	1.407,62	57,64	4.349,75
36	Tajurhalang	0	2.460,13	494,04	84,05	3.038,22
37	Tamansari	0	1.405,55	819,73	1.701,01	3.926,29
38	Tanjungsari	1.966,17	3.584,73	9.184,69	0	14.735,59
39	Tenjo	25,54	2.745,76	5.184,91	254,00	8.210,21
40	Tenjolaya	0	768,29	1.240,09	1.625,06	3.633,44
Grand Total (Ha)		**15.053,82**	**114.594,29**	**84.098,00**	**85.388,12**	**299.134,24**

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2025



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2.10
Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kabupaten Bogor

- **Jasa Lingkungan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup**

Luasan jasa lingkungan tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Bogor, dengan total luas wilayah sebesar 299.177,85 hektar yang terbagi dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kategori "sangat tinggi" mencakup area terluas, yaitu 120.152,3 hektar (40%), diikuti kategori "tinggi" dengan 113.058 hektar (38%), "sedang" dengan 57.035 hektar (19%), serta kategori "rendah" dan "sangat rendah" yang masing masing mencakup 1.689,6 hektar (0,56%) dan 8.295,5 hektar (2,8%).

Kecamatan seperti Sukamakmur (7.909,04 hektar), Rumpin (10.426,36 hektar), Sukajaya (13.014,4 hektar), dan Nanggung (12.308,9 hektar) menunjukkan kontribusi besar dalam kategori "sangat tinggi" dan "tinggi". Wilayah ini menjadi fokus utama untuk kebijakan pengelolaan ruang hidup berkelanjutan. Kecamatan seperti Jonggol dan Tanjungsari, dengan luasan di atas 7.000 hektar pada kategori tinggi, dapat dirancang sebagai area pengembangan perumahan terintegrasi yang tetap menjaga keseimbangan ekologis.

Pendekatan berbasis data ini mendukung kebijakan berbasis bukti, seperti mengalokasikan lahan untuk perumahan dengan mempertimbangkan kapasitas jasa lingkungan. Daerah dengan kontribusi besar di kategori "sangat tinggi" harus dilindungi sebagai zona penyangga lingkungan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem. Sebagai contoh, Nanggung dan Sukajaya yang memiliki total luasan lebih dari 25.000 hektar di kategori "tinggi" dan "sangat tinggi" dapat dijadikan prioritas dalam pelestarian dan pengembangan ruang hijau.

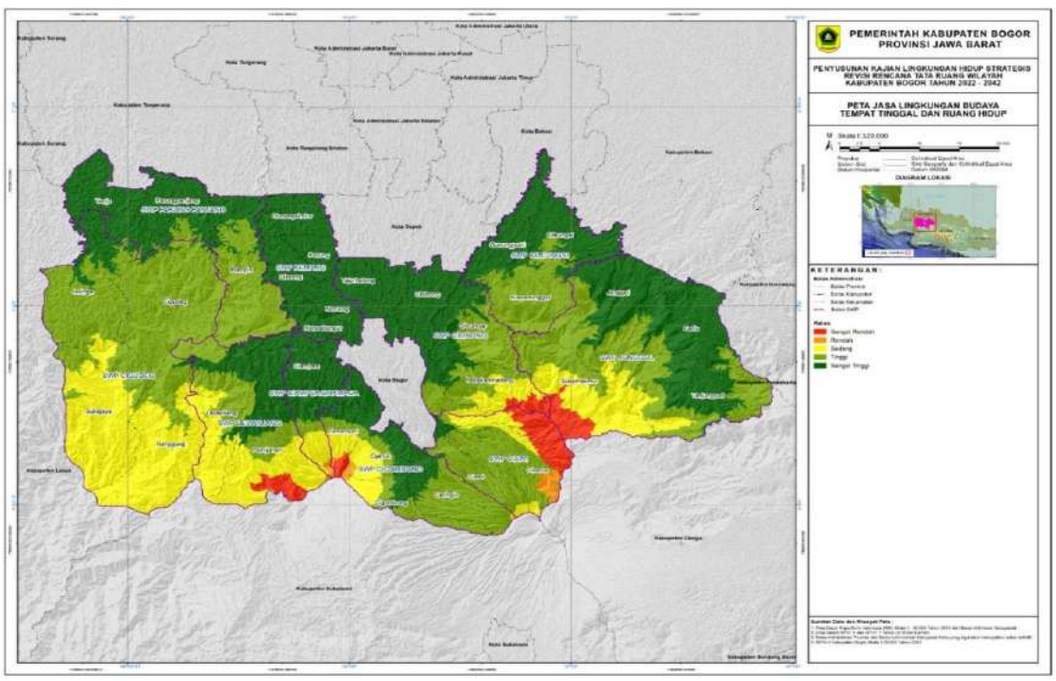
Untuk luasan Jasa Lingkungan tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 5 kelas, dengan rata-rata kelas jasa yang berada di Kabupaten Bogor didominasi oleh kelas jasa sangat tinggi sebagaimana yang dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2.18
Luasan Jasa Lingkungan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	JE Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Ha)					Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Babakan Madang	981,51	0	2.413,97	3.072,98	2.392,28	8.860,74
2	Bojonggede	0	0	0	0	2.893,97	2.893,97
3	Caringin	0	30,58	34,91	5.834,74	1.890,77	7.791,00
4	Cariu	0	0	0	1.094,71	7.391,34	8.486,05
5	Ciampea	0	0	0	0	3.397,86	3.397,86
6	Ciawi	0	6,58	246,50	3.939,63	514,41	4.707,11
7	Cibinong	0	0	0	0	4.708,71	4.708,71
8	Cibungbulang	0	0	0	9,11	3.760,81	3.769,92
9	Cigombong	0,18	77,73	1.083,26	2.547,56	945,90	4.654,63
10	Cigudeg	0	0	0,49	17.343,11	584,98	17.928,59
11	Cijeruk	37,09	218,38	1.728,22	968,57	1.847,63	4.799,90
12	Cileungsi	0	0	0	716,53	6.613,84	7.330,36
13	Ciomas	0	0	0	0	1.787,87	1.787,87
14	Cisarua	1.453,6	1.043,2	817,60	3.792,10	0	7.106,46
15	Ciseeng	0	0	0	10,24	3.980,81	3.991,05
16	Citeureup	0	0	0	4.711,26	2.622,85	7.334,11
17	Dramaga	0	0	0		2.557,74	2.557,74
18	Gunungputri	0	0	0	54,92	6.456,12	6.511,03
19	Gunung sindur	0	0	0	0	4.856,21	4.856,21
20	Jasinga	0	0	434,30	10.012,04	3.305,00	13.751,34
21	Jonggol	0	0	87,38	4.152,62	9.204,06	13.444,06
22	Kemang	0	0	0	0	3.309,48	3.309,48
23	Klapanunggal	0	0	0	8.246,97	1.512,89	9.759,86
24	Leuwiliang	0	0	4.582,21	2.789,46	1.855,20	9.226,86

No	Kecamatan	JE Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Ha)					Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
25	Leuwisadeng	0	0	315,74	2.586,51	704,41	3.606,65
26	Mega mendung	1.908,2	0	1.459,56	2.922,13	54,47	6.344,40
27	Nanggung		0	12.308,9	3.291,10	191,26	15.791,30
28	Pamijahan	1.466,4	31,66	6.643,59	2.014,87	2.360,83	12.517,36
29	Parung	0	0	0	0	2.773,76	2.773,76
30	Parung panjang	0	0	0	677,84	6.419,30	7.097,14
31	Rancabungur	0	0	0	7,52	2.310,83	2.318,35
32	Rumpin	0	0	0	10.426,36	3.480,98	13.907,34
33	Sukajaya	0	0	13.014,4	3.607,68	0	16.622,07
34	Sukamakmur	2.054,2	0	7.711,25	7.909,04	627,95	18.302,42
35	Sukaraja	0	0	438,92	1.431,35	2.479,48	4.349,75
36	Tajurhalang	0	0	0	0	3.038,22	3.038,22
37	Tamansari	389,44	72,78	1.028,29	847,49	1.588,29	3.926,29
38	Tanjungsari	0	0	1.276,78	7.319,33	6.139,48	14.735,59
39	Tenjo	0	0	0	160,83	8.140,55	8.301,38
40	Tenjolaya	4,93	208,62	1.408,73	559,38	1.451,77	3.633,44
Grand Total (Ha)		**8.295,5**	**1.689,6**	**57.035,0**	**113.058,0**	**120.152,3**	**300.230,4**

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2025



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2.11
Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

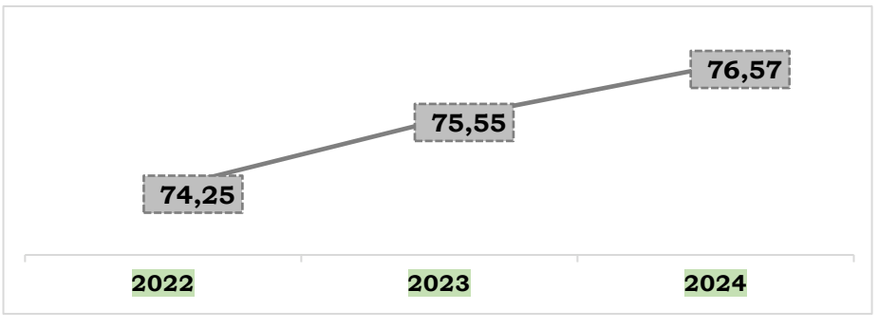
a. Akses pada Layanan Air Minum dan Fasilitas Penyehatan Dasar

Pada tahun 2024, persentase indeks fasilitas penyehatan dasar dan Penduduk dengan Layanan Air Minum di Kabupaten Bogor memiliki angka proyeksi capaian tahun 2024 sebesar 81.12% dan 76,8%. Sedangkan, untuk provinsi Jawa Barat dan Nasional masih belum ada update terbaru pada tahun 2024. Indeks fasilitas penyehatan dasar di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan mulai dari 78,47% di tahun 2022 menjadi 79,78% pada tahun 2023. Kemudian, pada tahun 2024 memiliki nilai proyeksi sebesar 81,12%. Adapun perkembangan penduduk dengan layanan air minum cenderung meningkat dari angka 74,24% tahun 2022 dan memiliki nilai 75,55% pada tahun 2023, kemudian memiliki angka proyeksi sebesar 76,08% di tahun 2024.

b. Rumah Tangga dengan Akses Layanan Sumber Air Minum Layak

Kinerja akses layanan sumber air minum di Kabupaten Bogor diampu secara kolaboratif oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan serta 1 (satu) BUMD Perumda Tirta Kahuripan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengampu kinerja atas jaringan perpipaan perdesaan, Dinas Kesehatan mengampu kinerja atas akses layak dasar dan akses layak terbatas bukan jaringan perpipaan, dan Perumda Tirta Kahuripan mengampu kinerja atas akses aman jaringan perpipaan. Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak di Kabupaten Bogor sebesar 76,57% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat rumah tangga di wilayah ini memiliki akses ke air minum yang memenuhi standar kelayakan. Namun, angka ini masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat 93,86% dan Nasional 92,64%. Oleh karena itu, persentase rumah tangga dengan akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kabupaten Bogor masih belum cukup baik untuk melampaui capaian masing-masing di Jawa Barat dan nasional. Selama tahun 2022-2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan. Persentase rumah tangga

dengan sumber air minum layak di Kabupaten Bogor menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, persentasenya tercatat sebesar 74,25%, kemudian meningkat menjadi 75,55% pada tahun 2023, dan mencapai 76,57% pada tahun 2024. Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Layanan Sumber Air Minum Layak terdapat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas PUPR, 2025

Gambar 2.12
Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak di Kabupaten Bogor 2022-2024

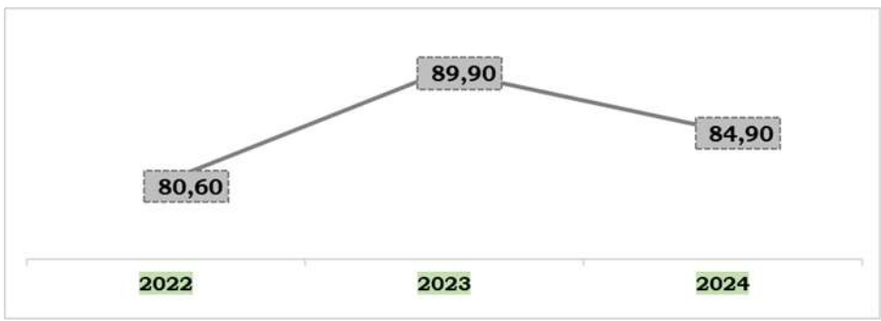
Secara lebih terinci berdasarkan dokumen Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Bogor 2024-2044, capaian pelayanan untuk akses air minum aman Kabupaten Bogor Tahun 2024 adalah sebesar 12,81%. Capaian pelayanan untuk akses minum jaringan perpipaan Tahun 2024 adalah sebesar 17,8%, dan capaian pelayanan untuk akses minum bukan jaringan perpipaan (akses layak dasar dan akses layak terbatas) adalah sebesar 36,76%.

c. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat

Pada tahun 2024, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan di Kabupaten Bogor yang tercatat memiliki angka proyeksi sebesar 39,83%. Selama tahun 2022-2024, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan di Kabupaten Bogor cenderung mengalami penurunan. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan di Kabupaten Bogor dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang sangat kecil, dari 40% pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian memiliki angka proyeksi sebesar 39,83% pada tahun 2024.

d. Kualitas Konsumsi Pangan Menurut Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Selama tahun 2022-2024, kualitas konsumsi pangan menurut skor PPH di Kabupaten Bogor cenderung mengalami peningkatan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bogor cenderung mengalami peningkatan dari yang semula sebesar 80,6 poin pada tahun 2022, kemudian pada 2023 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 89,9 poin. Hal ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam kualitas konsumsi pangan masyarakat. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari sisi kebijakan, edukasi, maupun ketersediaan pangan. Namun berbeda hal nya dengan tahun 2024, dimana skor pola pangan harapan Kabupaten Bogor mengalami penurunan menjadi 84,90 poin. Penurunan ini disebabkan rendahnya minat dan konsumsi pangan lokal asli Kabupaten Bogor di kalangan masyarakat Kabupaten Bogor, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), serta rendahnya konsumsi sayur dan buah di tingkat individu dan keluarga disamping konsumsi pangan cepat saji/*fast food*/*junk food*. Perkembangan skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2022 hingga 2024 terlihat pada gambar berikut:



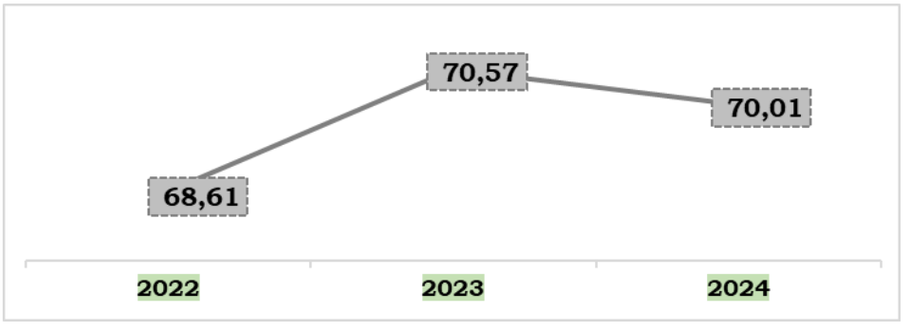
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2025

Gambar 2.13
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bogor
2022-2024

e. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan pangan sebagai salah satu indikator yang menggambarkan pembangunan ketahanan pangan daerah. Pada tahun 2022, indeks ketahanan pangan Kabupaten Bogor mencapai

68,61 poin. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 70,57 poin. Namun hal yang berbeda terjadi pada tahun 2024, dimana indeks ketahanan pangan Kabupaten Bogor mengalami penurunan menjadi 70,01. Penurunan sebesar 0,56 poin ini merupakan tantangan dalam memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Perkembangan indeks ketahanan pangan Kabupatenn Bogor tahun 2022 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2025

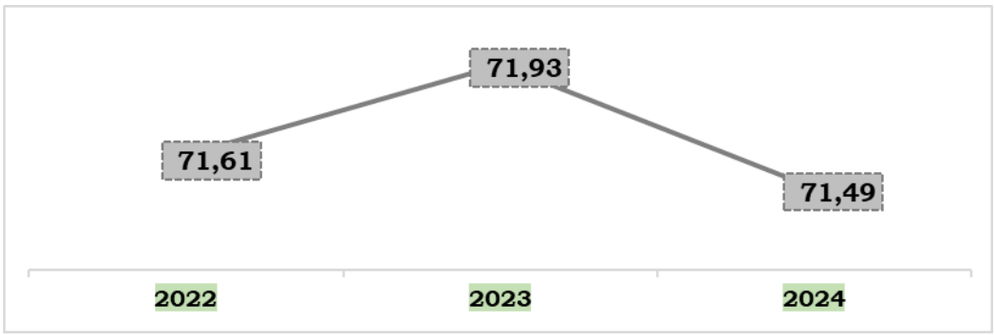
Gambar 2.14
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor
2022-2024

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Rumah Tangga dengan Akses Layanan Sanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak pada tahun 2024 adalah 71.49%, di bawah rata-rata Jawa Barat sebesar 74.88% dan rata-rata nasional sebesar 83.6%. Dengan demikian, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Bogor masih belum cukup baik untuk melampaui capaian masing-masing di Jawa Barat dan nasional. Selama tahun 2022-2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kabupaten Bogor mengalami fluktuatif. Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Bogor menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil antara tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, persentasenya tercatat sebesar 71,61%, yang sedikit meningkat menjadi 71,93% pada tahun 2023, namun menurun sedikit menjadi 71,49% pada tahun 2024. Perkembangan rumah tangga dengan akses layanan sanitasi layak dapat dilihat pada gambar

berikut. Penurunan yang terjadi pada tahun 2024, disebabkan adanya perubahan besaran salah satu variabel dalam menghitung rumah tangga dengan akses sanitasi layak yaitu jumlah kepala keluarga. Pada tahun 2023, dasar menentukan jumlah kepala keluarga adalah sebanyak 5 orang anggota keluarga, sedangkan pada tahun 2024 menentukan jumlah kepala keluarga terdiri dari 4 orang anggota keluarga. Hal ini yang menyebabkan bertambahnya jumlah kepala keluarga pada tahun 2024, sehingga persentase rumah tangga dengan akses layak mengalami penurunan. Namun secara jumlah rumah tangga yang terlayani pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023.



Sumber: Dinas PUPR, 2025

Gambar 2.15
Rumah Tangga dengan Akses Layanan Sanitasi Layak
Kabupaten Bogor
2022-2024

b. Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM

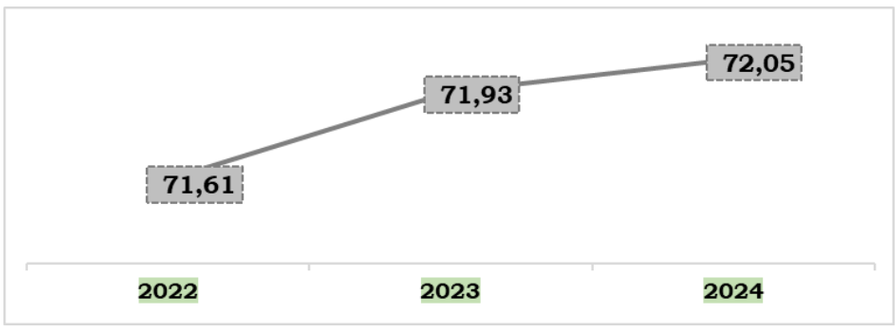
Jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada tahun 2023 adalah 98%. Ini lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat sebesar 91,56% dan rata-rata nasional sebesar 80,92%. Oleh karena itu, jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan STBM di Kabupaten Bogor lebih baik dibandingkan dengan rata-rata masing-masing wilayah tersebut. Selama tahun 2022-2024, jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM di Kabupaten Bogor cenderung konstan. jumlah desa yang melaksanakan STBM di Kabupaten Bogor cenderung konstan, sebanyak 435 desa selama tahun 2022-2024.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Bogor memiliki angka

sebesar 98,00 persen. Angka ini sudah berada di atas capaian rata-rata provinsi dan nasional, dimana capaian rata-rata Jawa Barat memiliki angka sebesar 84,70 persen dan rata-rata capaian nasional sebesar 77,30 persen.

c. Rumah Tangga dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat

Selama tahun 2022-2024, proporsi rumah tangga dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat di Kabupaten Bogor cenderung meningkat. Proporsi rumah tangga dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat di Kabupaten Bogor menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir, dengan persentase mencapai 71,61% pada 2022, kemudian 71,93% pada 2023, dan 72,05% angka proyeksi pada tahun 2024. Perkembangan rumah tangga dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat tahun 2022 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas PUPR, 2025

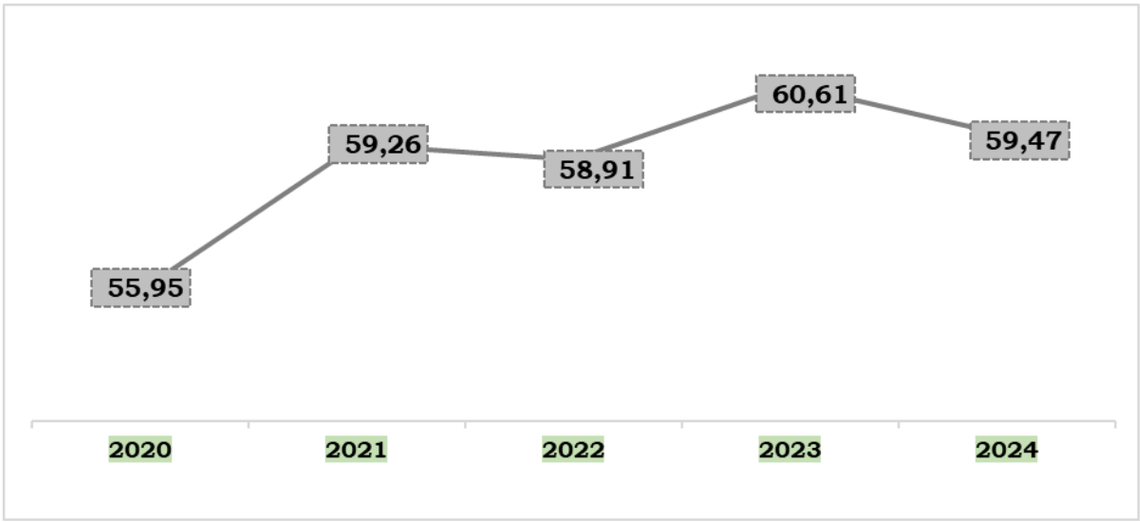
Gambar 2.16
Persentase rumah tangga dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat di Kabupaten Bogor
2022-2024

d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup digunakan sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu.

Tahun 2020, indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bogor mencapai 55,95 poin. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 59,26 poin. Berbeda dengan tahun 2022, indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bogor mengalami penurunan menjadi 58,91 poin. Kemudian mengalami peningkatan kembali

menjadi 60,61 pada tahun 2023. IKLH mengalami peningkatan secara bertahap dari 55,95 (2020) menjadi 60,61 (2023), namun sedikit penurunan menjadi 59,47 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas lingkungan hidup meningkat, tetapi penurunan di tahun terakhir mengindikasikan adanya tekanan atau penurunan dari salah satu atau beberapa komponen penyusunnya. Perkembangan indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Gambar 2.17
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
2020-2024

Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai salah satu variabel pembentuk indeks kualitas lingkungan hidup relatif stagnan dan perlahan meningkat dari 2020 hingga 2022 di kisaran 48, lalu meningkat pada 2023 menjadi sebesar 50,24 poin dan pada 2024 sebesar 51,64 poin. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas air mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya air dan pengurangan beban pencemar. Peningkatan yang relatif lambat, disebabkan adanya tekanan signifikan dari pencemaran domestik, industri, pertanian, maupun kegiatan UMKM.

Variabel lainnya, Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami kenaikan konsisten dari 71,79 poin pada 2019 hingga 79,15 poin pada 2023, lalu menurun ke 75,65 poin pada 2024.

IKU adalah komponen dengan nilai tertinggi, menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian pencemaran udara (kemungkinan dari transportasi atau industri). Penurunan di 2024 perlu dicermati, hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan emisi dari tingginya penggunaan kendaraan bermotor, pembakaran biomassa (pembakaran sisa tanaman/ kebakaran hutan/lahan), atau aktivitas industri.

Selanjutnya, Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah indeks dengan nilai paling rendah, meskipun sempat naik ke 44,96 poin pada 2021, namun mengalami penurunan ke 42,97 poin pada 2024. Rendahnya nilai ini mencerminkan kerusakan ekosistem darat, seperti degradasi tanah, deforestasi, konversi lahan, atau alih fungsi ruang terbuka hijau. Ini menjadi titik lemah terbesar dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

Terdapat perubahan metode perhitungan dan parameter yang digunakan dalam menghitung IKLH dimulai dari tahun 2025 secara nasional sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Hal ini menyebabkan target yang ditetapkan di tahun 2025 terlihat lebih kecil daripada pencapaian di tahun 2024. Rincian perubahan parameter per indeks dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Perbedaan Parameter Metode IKLH Lama dan IKLH- INA

Indeks yang Dianalisa	Perbedaan Metode IKLH LAMA dan IKLH- INA	
	IKLH LAMA (2015-2024)	**IKLH- INA (2025-2045)**
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Parameter : SO_2 dan NO_2 Metode : Manual Aktif, Manual Pasif, Otomatis Kontinu Jumlah data (frekuensi dan periode pemantau): Passive sampler: • 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali).	Parameter : SO_2, NO_2, dan PM 2.5 Metode : Manual Aktif, Otomatis Kontinu • Jumlah data (frekuensi dan periode pemantauan): SPKUA/AQMS fixed station (1 titik mewakili 4 lokasi) minimal 65% : 237 data harian pertahun. • Manual aktif minimal (4 lokasi) : 24 hari pertahun (2 kali per bulan @24 jam). Jika terdapat kekosongan

Indeks yang Dianalisa	Perbedaan Metode IKLH LAMA dan IKLH- INA	
	IKLH LAMA (2015-2024)	**IKLH- INA (2025-2045)**
	• Ketersediaan data untuk tiap tahapan minimal 75%. • Ketersediaan data untuk tiap lokasi minimal mewakili musim penghujan atau kemarau (mengacu pada prediksi BMKG). • Manual aktif minimal : 24 hari pertahun (2 kali perbulan @24 jam). • AQMS fixed station minimal : 292 data harian per tahun.	bulan, dapat digantikan dengan bulan berikutnya selama mewakili musim. • AQMS mobile station minimal 65% : 237 data harian per tahun. • AQMS portable minimal (4 lokasi) : 24 hari per tahun (2 kali per bulan @24 jam). Jika terdapat kekosongan bulan, dapat digantikan dengan bulan berikutnya selama mewakili musim. • AQMS portable minimal (4 lokasi) : 12 hari per tahun (1 kali per bulan @24 jam). Dengan faktor koreksi. Jika terdapat kekosongan bulan, dapat digantikan dengan bulan berikutnya selama mewakili musim.
Indeks Kualitas Air (IKA)	Metode: Indeks Pencemaran (IP) Perhitungan nilai indeks dibandingkan dengan kelas air PP 22 tahun 2021 untuk sungai kelas II Bobot tertinggi untuk IKA 70	Metode : Indeks Kualitas Perhitungan nilai indeks, tidak dibandingkan dengan kelas air Bobot tertinggi 100
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Tutupan Hutan dan Tutupan Vegetasi Non Hutan	Hutan Primer, Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Belukar Rawa, RTH dan RHL, Perkebunan, Belukar, Pertanian Lahan Kering Campur, Pertanian Lahan Kering, Rawa, Sawah, Savanna, Transmigrasi, Bandara/Pelabuhan, Tambak, Tubuh Air, Tanah Terbuka, Permukiman/Lahan Terbangun, Pertambangan

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Strategi peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dibagi menjadi tiga pendekatan. Upaya perbaikan kualitas air difokuskan pada penanganan parameter kritis di titik pemantauan dikaitkan

dengan tata guna lahan disekitarnya, yaitu pengetatan pengawasan pembuangan limbah industri sebagai potensi pencemar *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD), peningkatan fasilitas layanan pengelolaan air limbah domestik, dan sosialisasi terkait penggunaan pupuk yang tepat dan dampaknya termasuk secara tidak langsung dapat menyebabkan *algablooming* (pertumbuhan alga yang berlebihan), yang memiliki potensi menurunkan *Dissolved Oxygen* (DO) dan mengurangi biota perairan.

Upaya perbaikan kualitas udara melalui penyediaan angkutan massal, pengembangan sistem transit, pembangunan ITS pada kawasan perkotaan dan juga pemantauan rutin berupa inspeksi emisi pada kendaraan pribadi dan umum, meningkatkan penyediaan layanan persampahan dan meningkatkan penegakkan hukum untuk pelaku pembakaran sampah. Selain itu juga meningkatkan pengawasan terhadap pelaku industri yang melakukan pembakaran menggunakan bahan bakar diesel serta peningkatan pengelolaan limbah ternak. Dari sisi penyerapan juga dilakukan optimalisasi penyediaan ruang terbuka hijau.

Upaya peningkatan kualitas lahan melalui penegakan regulasi untuk menyediakan lahan hijau pada lahan yang akan dibangun. Serta melalui penambahan jumlah taman dan ruang terbuka hijau, serta melaksanakan penghijauan pada sisi dan pembatas jalan. Selain itu juga melalui pemulihan lahan kritis dengan penghijauan dan penerapan teknologi pengolahan lahan yang ramah lingkungan.

e. Kondisi Persampahan di Kabupaten Bogor

Pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Bogor. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Bogor mencapai 5.682.303 jiwa (BPS, 2024) diperkirakan menghasilkan timbulan sampah sebanyak 0,49 kg/jiwa/hari atau setara dengan 1.016.279.9 ton/tahun. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup baru mampu melakukan pengurangan sampah 136.101 ton/tahun atau setara 13,39% dan penanganan sampah sebanyak 254.779,60 ton/tahun atau setara 25,07% (LPPD Kab. Bogor, 2024). Masih terdapat 880.178,9 ton sampah per tahun yang tidak terkelola dengan baik.

Pengelolaan sampah di Kabupaten bogor dilakukan mulai tahapan sumber (hulu) hingga pemrosesan akhir sampah (hilir). Di tahap sumber, pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan pengurangan sampah, yaitu melaluli sarana dan prasarana/fasilitas pengelolaan sampah. Fasilitas pengelolaan sampah yang dimaksud seperti Bank Sampah, Tempat Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle)* dan Pusat Daur Ulang (PDU). Kegiatan-kegiatan pengurangan sampah di masyarakat yang dilakukan antara lain: Kegiatan di Bank Sampah, Kegiatan Kampung Ramah Lingkungan (KRL), Kegiatan Kampung Iklim (Proklim), serta sektor informal yang meliputi pelapak/pengepul.

Penanganan sampah di Kabupaten Bogor dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui pelayanan pengangkutan/ Pengumpulan sampah dari sumber sampah oleh UPT di 7 wilayah di Kabupaten Bogor. Pelayanan Sampah yang diberikan terdiri dari pengambilan atau pengumpulan sampah rumah tangga, perkantoran dan dari Fasilitas pengelolaan sampah (TPS3R, PDU dan POO) ke Lokasi pembuangan akhir sampah (TPAS). Tata cara atau Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengumpulkan sampah dari sumber sampah untuk diangkut ke tempat penampungan sementara (TPS)/TPS3R/PDU yaitu berupa residu untuk diangkut langsung ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan melalui proses pengelolaan. Sarana yang digunakan untuk pengumpulan sampah di Kabupaten Bogor umumnya adalah menggunakan gerobak sampah dan gerobak motor kapasitas rata-rata 1m^3.

Saat ini sampah di Kabupaten Bogor memiliki TPAS Galuga yang berlokasi di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dengan jumlah rata-rata sampah yang masuk per hari sebanyak 861,86 ton. TPAS Galuga digunakan secara bersama dengan Kota Bogor melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor : 119/37/PKS/KS/XII/ 2020 dengan metode *open dumping* atau tanpa ada teknologi pengolahan sampah. Saat ini timbunan sampah milik Kabupaten Bogor sudah memenuhi area seluas 4,27 Ha. Tinggi timbunan sampah telah mencapai 25,2 m dari dasar tanah. Saat ini sarana prasarana pendukung yang ada masih sangat minim dan terdapat beberapa fasilitas yang ada sudah

rusak seperti *emplacement* dan jalan operasional yang menyebabkan antrian truk sampah yang panjang.

Selain itu, Kabupaten Bogor juga menjadi lokasi TPPAS Regional Lulut Nambo di Kecamatan Klapanunggal, yang direncanakan dapat menampung sampah sebanyak 2.000 ton/hari yang kemudian diolah menjadi RDF dan kompos. TPPAS Regional ini direncanakan untuk digunakan bersamaan dengan Kota Depok, Kota Bogor dan Kota Tangerang Selatan. Namun, saat ini masih dalam proses pembangunan dan tahap uji coba dengan kapasitas 50 ton/hari dengan kuota untuk Kabupaten Bogor sebanyak 20 ton/hari.

Rencana pengelolaan sampah Kabupaten Bogor dilakukan mulai tahapan sumber (hulu) hingga ke pemrosesan akhir sampah (hilir). Di Tahap sumber, pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan pengurangan sampah, yaitu antara lain Bank Sampah, Adiwiyata maupun Kampung Ramah Iklim (KRL) serta sektor informal. Di tahap pengolahan sampah, penyediaan fasilitas pengolahan sampah dibedakan berdasarkan skala area pelayanan dan jenis teknologinya. Direncanakan fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Bogor terdiri dari skala kawasan, dengan memanfaatkan fasilitas pengolah sampah, berupa TPS3R dan PDU eksisting, TPS3R yang akan dibangun, serta fasilitas pengolah sampah skala kota, yang direncanakan untuk dibangun berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan kapasitas berkisar dari 120 hingga 360 ton per hari, yang tersebar di wilayah Barat, Timur dan Selatan. Untuk wilayah Tengah direncanakan untuk memanfaatkan TPA Galuga serta TPPAS Regional Nambo. Khusus TPA Galuga, direncanakan untuk dilakukan kegiatan revitalisasi TPA dan *landfill mining*, sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas TPA sekaligus untuk perlindungan lingkungan. Adapun total kapasitas TPST yang akan dibangun di Kabupaten Bogor adalah 1.560 ton per hari. TPST direncanakan menggunakan opsi teknologi pengolahan sampah menjadi RDF.

Fasilitas pengangkutan yang digunakan di Kabupaten Bogor meliputi gerobak motor pengangkutan, *Dump Truck, Arm Roll Truck,*

Feeder, Compactor Truck, dan truk Tronton. Beroperasinya fasilitas pengolahan sampah yaitu TPS3R Skala Kawasan dan TPST Skala Kota, direncanakan akan berimplikasi pada berkurangnya sampah yang akan masuk ke TPA Galuga dan TPA Regional Nambo. Meskipun telah direncanakan untuk mengolah sampah di skala kawasan dan kota, keberadaan TPA Galuga masih akan tetap diperlukan untuk menimbun sampah, terutama residu yang belum bisa diolah di fasilitas pengolahan.

Dengan mempertimbangkan kondisi TPA Galuga yang sudah darurat kapasitasnya, maka diharapkan mulai tahun 2025, sebagian sampah sudah mulai dapat diolah pada skala individu, skala kawasan maupun skala kota. Selain itu, di tahun yang sama, diharapkan kegiatan revitalisasi dan *landfill mining* juga sudah dimulai, dengan koordinasi dan Kerjasama bersama Pemerintah Kota Bogor.

Strategi yang akan dikembangkan adalah: Pengurangan dan Penanganan Sampah melalui perkuatan regulasi dan kelembagaan, pengembangan sarana prasarana pengelolaan sampah, penegakan hukum, implementasi *polluter pay principle*, peningkatan kemitraan antar *stakeholder*, peningkatan kapasitas SDM, perkuatan sistem informasi dan pengelolaan data, insentif dan disinsentif, peningkatan partisipasi publik serta pengarustamaan gender.

F. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Wilayah Kabupaten Bogor yang cukup luas dengan sebagian besar merupakan dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan serta memiliki curah hujan tinggi dan dialiri 7 Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga mengindikasikan sebagai daerah rawan bencana terutama tanah longsor, angin puting beliung dan banjir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat beberapa jenis bencana yaitu: (1) gempa bumi; (2) tsunami; (3) gunung api; (4) banjir; (5) kekeringan; (6) angin kencang; (7) tanah longsor; (8) kebakaran lahan; dan (9) kebakaran hutan. Adapun khusus untuk di Kabupaten Bogor jenis bencana yang berpotensi terjadi antara lain kebakaran, tanah longsor,

angin kencang, banjir, dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan data kejadian bencana di Kabupaten Bogor dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Kejadian Bencana di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024

Jenis Bencana	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Longsor	428	513	176	487	528
Banjir	175	112	55	87	77
Kebakaran	-	27	17	49	4
Angin Kencang	375	449	192	699	906
Kekeringan	-	20	8	643	58
Pergeseran Tanah	-	56	34	44	46
Gempa Bumi	-	2	10	44	37
Lain-Lain	359	104	72	108	55
Total	**1.337**	**1.283**	**564**	**2.161**	**1.711**

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah manusia *(man-made disaster)*. Jenis bencana terbanyak yang terjadi di Kabupaten Bogor meliputi:

a. Kawasan Rawan Banjir

Berdasarkan keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, banjir adalah bencana alam kedua yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Daerah yang rawan terkena banjir di Kabupaten Bogor tidaklah banyak, namun hampir semuanya berlokasi di daerah sekitar sungai, atau yang menjadi bagian dari badan sungai. Kecamatan yang tingkat rawan bencana banjirnya tinggi adalah Kecamatan Cibinong, Citereup, Jasinga, Leuwisadeng, Jonggol, Klapanunggal, Cariu, dan Tanjungsari, serta sedikit bagian Kecamatan Gunung Putri. Sedangkan untuk potensi rawan bencana rendah berada di Kecamatan Leuwiliang.

b. Kawasan Rawan Gempa

Kerentanan tanah atau kerentanan gerakan tanah menunjukkan potensi suatu kawasan mengalami bencana akibat gerakan tanah seperti gempa. Di Kabupaten Bogor, hampir di semua area berpotensi menjadi kawasan rawan gerakan tanah. Beberapa kecamatan yang berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah adalah Kecamatan Citeureup, Klapanunggal, Jonggol, Babakan Madang, dan Sukajaya. Sedangkan di wilayah Utara seperti Cibinong, Bojong Gede, Tajurhalang, dan Gunung Sindur termasuk yang potensinya sangat rendah. Selengkapnya karakteristik kerentanan gerakan tanah.

c. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi

Kabupaten Bogor termasuk wilayah yang dikeliling gunung berapi aktif terdiri :

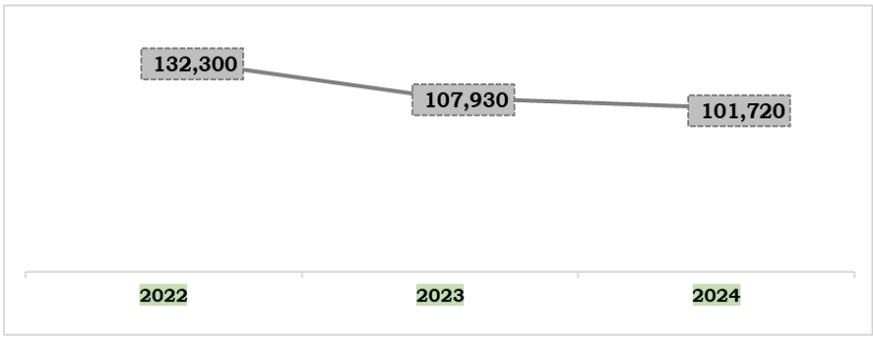
- Gunung Salak di Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Pamijahan;
- Gunung Gede - Pangrango di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Caringin; dan
- Gunung Halimun di Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, dan Kecamatan Sukajaya.

d. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Gerakan tanah dengan indikasi bencana yaitu longsor atau gerakan tanah adalah bencana ketiga yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor.

e. Indeks Risiko Bencana

Indeks risiko bencana menggambarkan dan mengukur Tingkat risiko bencana di suatu wilayah. Pada tahun 2022, indeks risiko bencana Kabupaten Bogor berada di angka 132,3 poin. Kemudian di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 107,93. Pada tahun 2024 indeks risiko bencana Kabupaten Bogor kembali turun menjadi 101,72 poin. Dengan semakin turunnya indeks risiko bencana, artinya upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana di Kabupaten Bogor semakin efektif. Perkembangan indeks risiko bencana Kabupaten Bogor terdapat pada gambar berikut.



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Gambar 2.18
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bogor
2022-2024

f. Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan salah satu parameter utama dalam mengukur kontribusi suatu wilayah terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Setiap sektor kegiatan manusia memiliki potensi menghasilkan emisi GRK, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai proses pembakaran bahan bakar, aktivitas industri, kegiatan pertanian, perubahan tata guna lahan, maupun pengelolaan limbah.

Kabupaten Bogor, sebagai salah satu daerah dengan perkembangan ekonomi, industri, dan pertumbuhan penduduk yang pesat, memiliki variasi sumber emisi yang cukup beragam. Data pada Tabel 2.21 berikut menyajikan total emisi GRK Kabupaten Bogor tahun 2024 yang dihitung dalam satuan Giga gram (Gg) CO_2 ekuivalen, mencakup kontribusi dari sektor energi, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), pertanian, kehutanan, serta limbah. Informasi ini menjadi landasan penting dalam perencanaan strategi mitigasi emisi dan upaya menuju pembangunan rendah karbon.

Tabel 2.21
Emisi GRK Kabupaten Bogor Tahun 2024

Sektor/Emisi	Ton CO2 Eq	Proporsi
Energi	1.102.507.700	99,65%
IPPU	13.520	0,00%
Pertanian	386.260	0,03%

Sektor/Emisi	Ton CO2 Eq	Proporsi
Kehutanan	1.686.630	0,15%
Limbah	1.798.790	0,16%
Total	1.106.392.900	100,00%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Berdasarkan Tabel 2.21, total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Bogor pada tahun 2024 mencapai 1.106.392.900 Ton CO_2 ekuivalen. Sektor energi merupakan penyumbang terbesar dengan emisi mencapai 1.102.507.700 Ton CO_2 eq, atau lebih dari 99% dari total emisi daerah. Sumber utama emisi di sektor ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan penggunaan energi pada berbagai aktivitas.

Sektor kehutanan berada di urutan kedua dengan total emisi 1.686.630 Ton CO_2 eq, yang terutama disumbang oleh konversi lahan non-hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan bentuk penggunaan lahan lainnya. Sektor limbah menyumbang 1.798.790 Ton CO_2 eq, didominasi oleh emisi dari pengolahan limbah industri serta pembakaran sampah secara terbuka.

Sektor pertanian menghasilkan emisi sebesar 386.260 Ton CO_2 eq, terutama dari fermentasi enterik pada ternak dan pengelolaan pupuk organik maupun anorganik yang memicu pelepasan CH_4 dan N_2O. Sementara itu, sektor Industri Proses dan Penggunaan Produk (IPPU) menyumbang jumlah yang relatif kecil, yaitu 13.520 Ton CO_2 eq, yang seluruhnya berasal dari penggunaan pelumas (*lubricants*).

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan dominasi sektor energi dalam kontribusi emisi GRK di Kabupaten Bogor, sehingga strategi penurunan emisi perlu difokuskan pada pengelolaan konsumsi energi dan peralihan ke sumber energi rendah karbon.

Sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko dan pengendalian emisi di tingkat kecamatan, Kecamatan Rumpin mengembangkan inovasi RUMPI (Rumpin *Mapping and Planning Integration*). Inovasi tersebut berbasis sistem pemetaan digital dan data geospasial yang terintegrasi lintas sektor, mencakup informasi mengenai tata guna lahan, potensi lingkungan, hingga kerentanan bencana. Melalui RUMPI, kecamatan dapat melakukan identifikasi lebih akurat terhadap titik rawan bencana, potensi perubahan

tutupan lahan penyebab emisi, serta pola penggunaan ruang yang berisiko terhadap lingkungan. Selain itu, Kecamatan Caringin mengembangkan inovasi CARINA (Caringin Tangguh Bencana). sebagai bentuk nyata penguatan sistem pelaporan dan penanganan bencana di tingkat lokal, Inovasi ini menghadirkan sistem pelaporan bencana yang terintegrasi melalui pemanfaatan platform digital (*WhatsApp Group, Google Form, Google Sheet, dan Google Maps*) serta dilengkapi dengan *E-Book* Panduan Alur Pelaporan Bencana. Kehadiran Pokmas (Kelompok Masyarakat) Penanggulangan Bencana di 10 desa juga memperkuat peran masyarakat dalam penanganan bencana, termasuk akses bantuan sosial dan rehabilitasi rumah pasca bencana. Dengan sistem yang terdokumentasi secara digital, CARINA dapat meningkatkan ketepatan, kecepatan, dan transparansi pelaporan bencana sekaligus memperkuat ketahanan wilayah menghadapi ancaman perubahan iklim.

G. Aspek Demografi

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2024 mencapai 5.682.303 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.912.658 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.769.645 jiwa. Jumlah penduduk ini tersebar di 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Cibinong dengan jumlah penduduk 376.697 jiwa. Jumlah penduduk setiap kecamatan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan Kabupaten Bogor
Tahun 2024

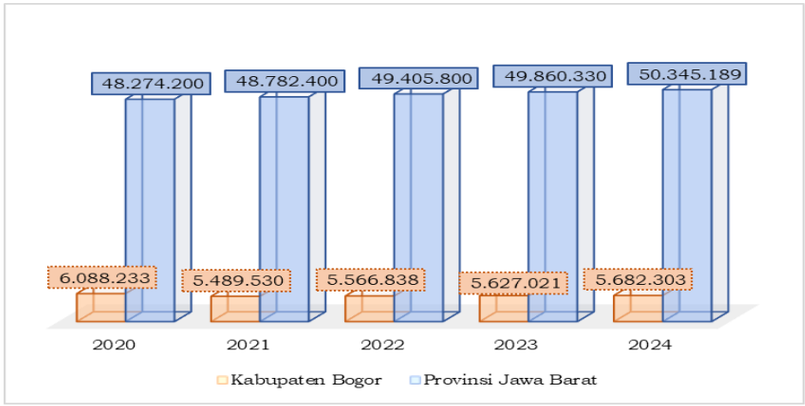
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Bojonggede	308.435
2	Ciomas	178.534
3	Cibinong	376.697
4	Ciampea	176.388
5	Sukaraja	219.532
6	Gunung Putri	296.424
7	Parung	126.712

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
8	Dramaga	113.736
9	Tajurhalang	134.642
10	Cileungsi	304.747
11	Cibungbulang	153.668
12	Kemang	109.526
13	Citeureup	220.094
14	Tamansari	115.625
15	Ciseeng	115.141
16	Gunungsindur	136.712
17	Rancabungur	65.058
18	Ciawi	119.135
19	Leuwisadeng	79.625
20	Cigombong	100.962
21	Cijeruk	96.724
22	Cisarua	132.429
23	Tenjolaya	67.023
24	Caringin	137.382
25	Megamendung	110.769
26	Parungpanjang	120.823
27	Klapanunggal	142.166
28	Leuwiliang	128.660
29	Babakan Madang	118.805
30	Pamijahan	166.226
31	Jonggol	151.637
32	Rumpin	152.255
33	Tenjo	75.838
34	Jasinga	111.348
35	Cigudeg	140.209
36	Nanggung	104.160
37	Cariu	53.590
38	Sukamakmur	89.738
39	Sukajaya	71.464
40	Tanjungsari	59.664
Kabupaten Bogor		**5.682.303**

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2024

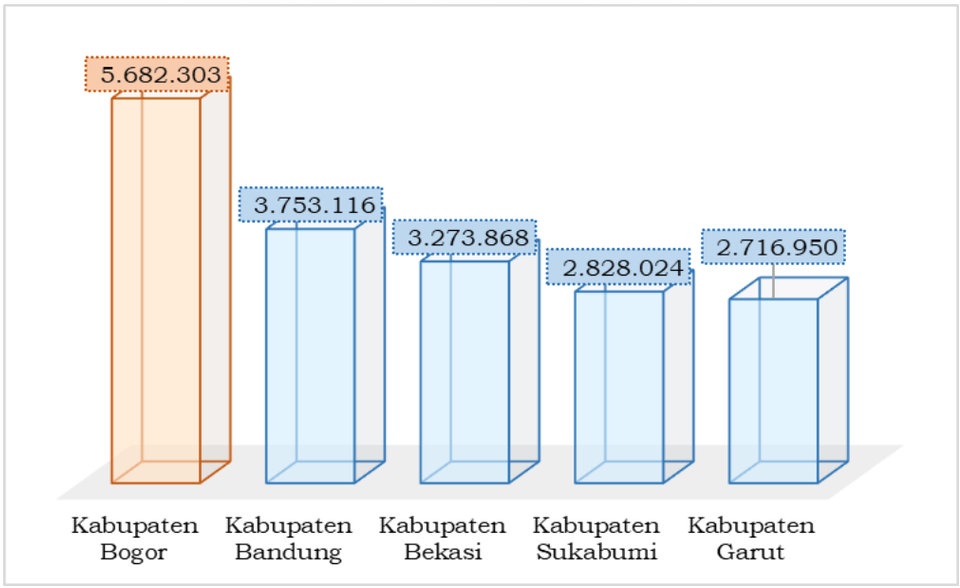
Jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang besar tersebut ekuivalen dengan 11,29 persen dari jumlah total penduduk Provinsi Jawa Barat. Persentase tersebut merupakan yang terbanyak di

Provinsi Jawa Barat. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Bogor maupun Jawa Barat mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Melihat hal tersebut, perlu menjadi perhatian dalam pemenuhan sarana dan prasarana baik pendidikan maupun kesehatan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.19
Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024



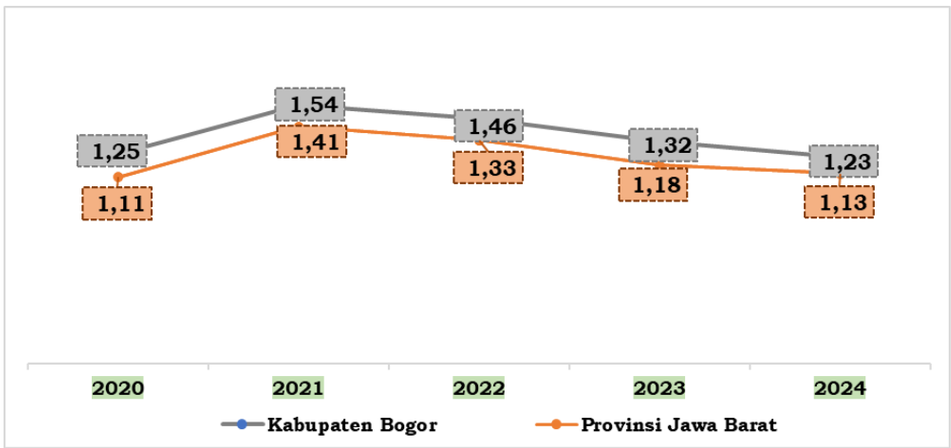
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.20
Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Terbanyak di Jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, Kabupaten Bogor merupakan wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki penduduk terbanyak. Selain Kabupaten Bogor, terdapat empat Kabupaten di Jawa Barat dengan penduduk terpadat yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut. Jumlah

penduduk Kabupaten Bogor sebesar 11,29 persen dari penduduk Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Kabupaten Bandung sebesar 7,45 persen, Kabupaten Bekasi 6,50 persen, 5,62 persen dan Kabupaten Garut sebesar 5,40 persen.

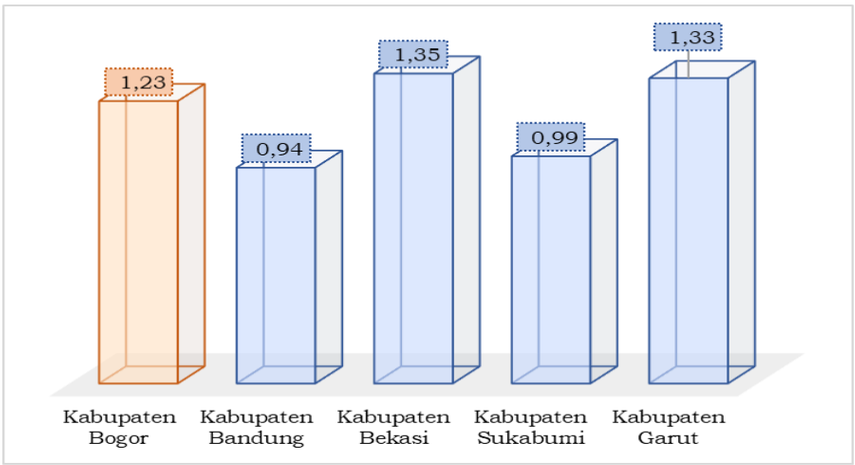
Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-beda.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.21
Perbandingan LPP Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang besar dan cenderung terus bertambah setiap tahunnya, namun secara laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor untuk tahun 2024 memiliki nilai sebesar 1,23 persen. Nilai ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 1,32 persen. Hal ini menunjukan meskipun ada penambahan jumlah penduduk, kecepatan atau tingkat pertumbuhannya tidak setinggi sebelumnya. Tetapi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar 1,13 maka nilai laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor masih diatas laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.22
Perbandingan LPP Kabupaten Bogor Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Barat yang termasuk daerah berkontribusi besar terhadap jumlah penduduk di Jawa Barat, maka untuk laju pertumbuhan penduduk tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Untuk laju pertumbuhan penduduk, Kabupaten Bogor masih di bawah Kabupaten Bekasi yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi untuk Kabupaten/ Kota yang memiliki penduduk terbanyak di Jawa Barat, dimana laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi sebesar 1,35 persen.

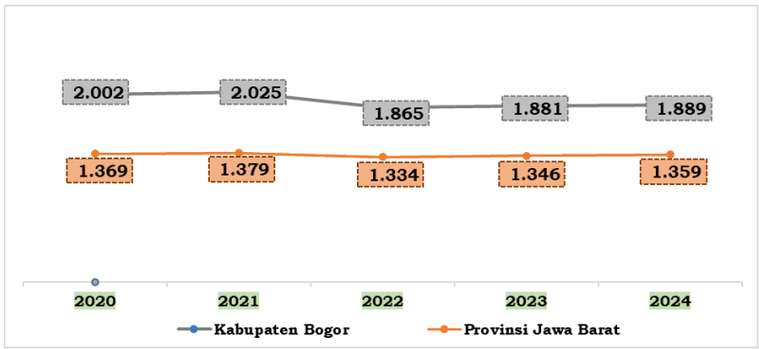
b. Komposisi Penduduk

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan dalam suatu wilayah atau populasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2024 mencapai 5.682.303 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.912.658 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.769.645 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Bogor tercatat sebesar 105, yang berarti terdapat 105 laki-laki pada setiap 100 perempuan.

c. Kepadatan Penduduk

Dengan luas wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang besar, Kabupaten Bogor untuk tahun 2024 memiliki jumlah kepadatan penduduk sebesar 1.889 jiwa/km^2. jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar 1.359 km^2. Hal ini menunjukan bahwa kepadatan di

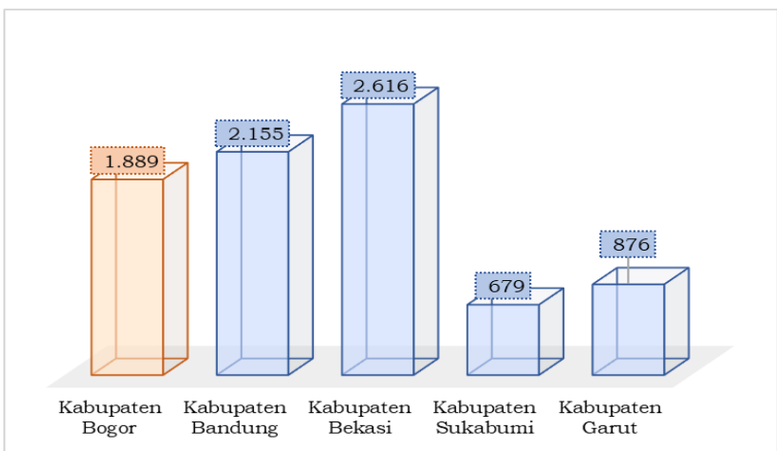
Kabupaten Bogor lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.23
Perbandingan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor Dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Bandung yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Jawa Barat untuk tahun 2023 dengan kepadatan penduduk sebesar 2.111 jiwa/km^2 dan Kabupaten Bekasi yang memiliki kepadatan 2.541 jiwa/Km^2 maka angka kepadatan penduduk Kabupaten Bogor masih di bawah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi. Perbandingan kepadatan penduduk Kabupaten/Kota dengan penduduk terbanyak di Jawa Barat tercantum pada gambar berikut:

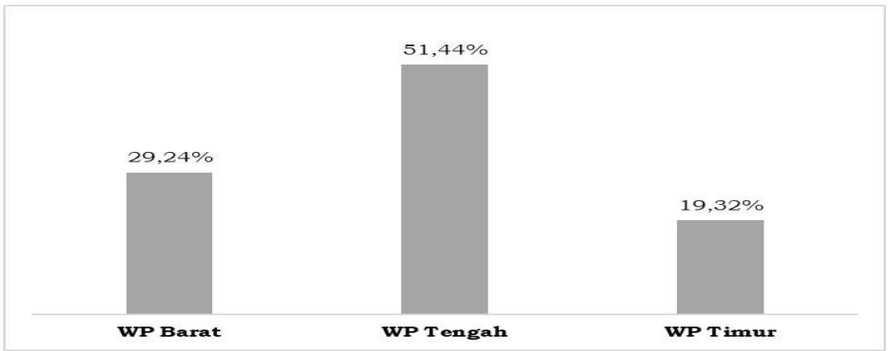


Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.24
Perbandingan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024

Berdasarkan wilayah pengembangan, distribusi penduduk terbanyak berada di wilayah pengembangan tengah, wilayah barat,

dan paling sedikit di wilayah timur. Distribusi penduduk berdasarkan wilayah pengembangan, disajikan dalam Gambar sebagai berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Bogor, diolah

Gambar 2.25
Distribusi Penduduk Berdasarkan Wilayah Pengembangan
Tahun 2024

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2024 menunjukkan angka 1,23 persen, menurun sebesar 0,09 poin dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 1,32 persen. Jika dipetakan, terdapat 19 atau 47,50 persen kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sama dan melebihi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor. Jika dilihat berdasarkan wilayah pengembangan, komposisi kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan di atas laju pertumbuhan Kabupaten Bogor disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.23
Kondisi Kecamatan dengan LPP Diatas LPP Kabupaten Bogor
Tahun 2024

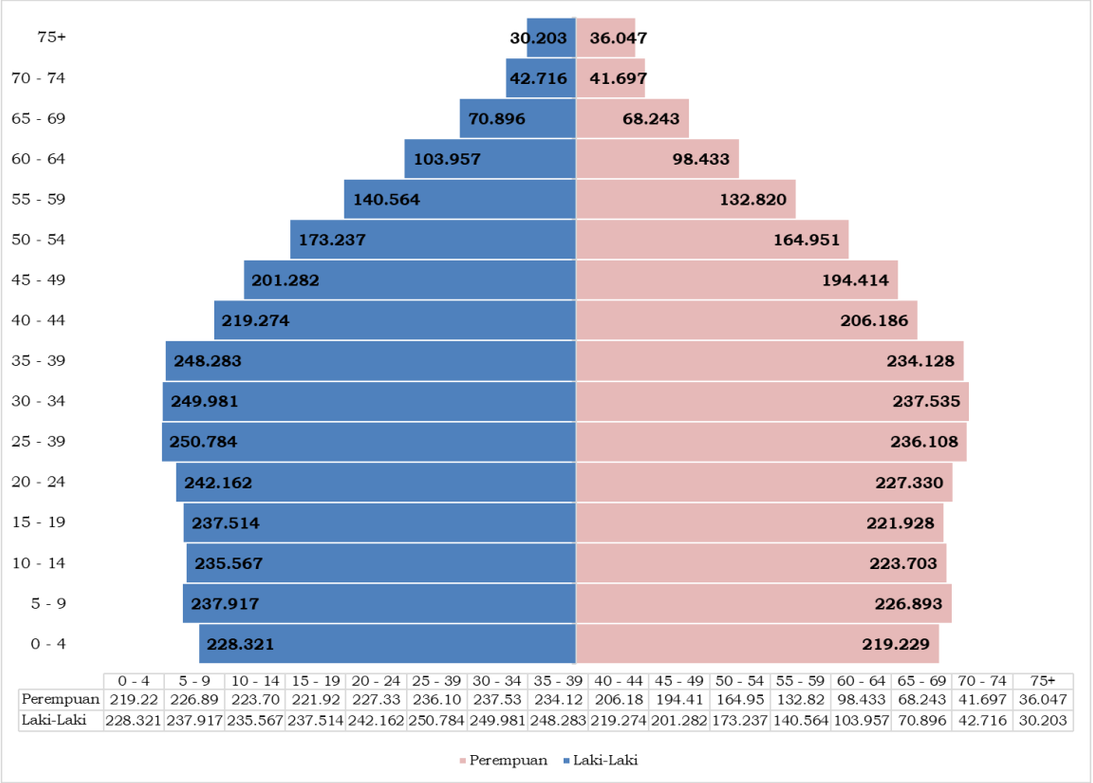
Wilayah Pengembangan	Kecamatan dengan **LPP≥** 1,23%	Total Kecamatan	Persentase (%)	Keterangan Kecamatan
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5=2)**
WP Barat	6	14	42,86	Ciampea, Cibungbulang, Tenjolaya, Pamijahan, Nanggung, Sukajaya
WP Tengah	9	19	47,37	Bojonggede, Ciomas, Sukaraja, Tajurhalang, Tamansari, Gunungsindur, Rancabungur, Cijeruk, Caringin
WP Timur	4	7	57,14	Sukamakmur, Jonggol, Cileungsi, Klapanunggal

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, diolah

Wilayah pengembangan timur memiliki jumlah kecamatan terbanyak dengan laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor dengan 4 Kecamatan dari 7 Kecamatan yang ada di Wilayah Pengembangan Timur atau dengan persentase sebesar 57,14 persen.

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Bogor tahun 2023 tercatat sebanyak 1.881 jiwa/km2. Terdapat 21 atau 52,50 persen kecamatan yang tingkat kepadatannya melebihi kepadatan Kabupaten Bogor. Pada wilayah pengembangan barat terdapat 4 dari 14 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan> 1.881 km2, yaitu kecamatan Dramaga, Leuwiliang, Cibungbulang dan Ciampea. Pada wilayah pengembangan tengah, terdapat 15 kecamatan dari 19 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan > 1.881 km2. Dengan demikian hanya 4 kecamatan yang memiliki kepadatan < 1.881 km2, yaitu Caringin, Cisarua, Megamendung, dan Babakan madang. Adapun untuk wilayah pengembangan timur, terdapat 2 dari 7 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan > 1.881 km2, yaitu kecamatan Cileungsi dan Gunungputri. Di sisi lain dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk terkonsenterasi di wilayah Bogor Tengah.

Gambaran penduduk di Kabupaten Bogor tahun 2024 dapat dilihat dari bentuk piramida penduduk sebagaimana disajikan pada Gambar sebagai berikut:



	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 39	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75+
Perempuan	219.22	226.89	223.70	221.92	227.33	236.10	237.53	234.12	206.18	194.41	164.95	132.82	98.433	68.243	41.697	36.047
Laki-Laki	228.321	237.917	235.567	237.514	242.162	250.784	249.981	248.283	219.274	201.282	173.237	140.564	103.957	70.896	42.716	30.203

Sumber: BPS Kabupaten Bogor, 2024

Gambar 2.26
Piramida Penduduk Kabupaten Bogor
Tahun 2024

Bila dicermati gambar di atas, piramida penduduk Kabupaten Bogor dapat dikatakan dalam proses transisi. Hal tersebut dikarenakan walaupun piramidanya berbentuk limas (expansive), namun grafiknya berbentuk gemuk di bawah dan di tengah yang cenderung mengerucut di bagian atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kelahiran di Kabupaten Bogor masih tinggi, dan tingkat kematian di usia muda semakin berkurang.

Kemudian gambaran lain yang dapat divisualisasikan berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Bogor di atas, bahwa terdapat kecenderungan komposisi penduduk Kabupaten Bogor saat ini didominasi oleh penduduk usia produktif (kelompok muda).

Selanjutnya berdasarkan data pada gambar piramida penduduk di atas diketahui pula bahwa penduduk Kabupaten Bogor sedang mengalami pertumbuhan, dimana tingkat kelahiran, tingkat kematian dan tingkat pertumbuhan penduduk masih tinggi. Hal tersebut digambarkan melalui batang piramida penduduk Kabupaten Bogor

yang panjang pada kelompok umur 0-4 tahun dan 5-9 tahun, berbanding terbalik dengan semakin pendeknya batang pada kelompok umur 60 tahun ke atas.

Diketahui bahwa penduduk Kabupaten Bogor menuju ke arah penduduk usia produktif. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun dan 15-64 tahun yang mendominasi kelompok usia lainnya. Jika dilihat data pada Gambar diatas, kondisi tersebut menggambarkan besarnya jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan 15-64 tahun yang dapat berimplikasi terhadap masalah ketenagakerjaan, baik untuk saat ini maupun di kemudian hari.

Demikian pula rasio ketergantungan anak di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 sebesar 34,11 persen, dan rasio ketergantungan lanjut usia sebesar 7,21 persen atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Bogor sebesar 41,32 persen. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bogor harus menanggung sebanyak 42 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

d. Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk adalah perkiraan atau prediksi mengenai jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara pada masa mendatang, berdasarkan data penduduk yang ada pada saat ini dan asumsi-asumsi tertentu tentang tren-tren demografis yang mungkin terjadi. Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Pembentukan asumsi untuk ketiga komponen tersebut dilakukan menggunakan data-data yang menggambarkan tren di masa lampau, faktor-faktor yang memengaruhi, dan hubungannya satu sama lain. Penerapan asumsi yang digunakan akan menentukan hasil proyeksi jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk berguna untuk perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, ekonomi dan infrastruktur, serta memberikan dasar untuk alokasi sumber daya yang tepat.

1) Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2025 sebesar 5.721.620 jiwa dan diproyeksikan terus mengalami peningkatan atau pertumbuhan penduduk, hingga pada tahun proyeksi maksimum yaitu tahun 2030 mencapai 5.918.258 jiwa.

Apabila dilihat dari besaran proyeksi jumlah penduduk terjadi kecenderungan penambahan jumlah penduduk. Namun, jika secara laju, maka bisa dilihat pertambahan jumlah penduduk tersebut semakin melambat. Hal ini memperlihatkan bahwa secara laju pertumbuhan penduduk, untuk Kabupaten Bogor cenderung menurun. Perlambatan laju pertumbuhan penduduk merupakan bagian dari keberhasilan penurunan tingkat fertilitas. Pada tahun 2025 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor diproyeksikan mencapai 1,09 persen dan pada tahun 2030 diproyeksikan menurun menjadi 0,69 persen.

Pertumbuhan penduduk yang terkendali memudahkan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Perubahan jumlah penduduk disebabkan oleh tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Pelambatan laju pertumbuhan penduduk ini disebabkan semakin rendahnya tingkat kelahiran di Kabupaten Bogor.

2) Proyeksi Distribusi Penduduk

Besaran proyeksi jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap besaran persentase distribusi penduduk di suatu daerah. Distribusi penduduk merujuk pada cara penduduk terdistribusi atau tersebar di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Distribusi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor geografis, ekonomis, sosial, dan politik.

Distribusi penduduk Kabupaten Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 11,27 persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2030 menjadi 11,23 persen. Meskipun demikian, Kabupaten Bogor tetap masih menjadi pilihan utama dalam pola distribusi penduduk di Jawa Barat. Perbedaan kesempatan ekonomi di setiap kabupaten/kota di Jawa

Barat menyebabkan distribusi jumlah penduduk yang tidak merata. Jumlah distribusi penduduk yang cukup besar akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat diantaranya di bidang perumahan, pendidikan dan kesehatan.

3) Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Informasi terkait dengan bentuk analisis dari sudut pandang gender sangat diperlukan mengingat perencanaan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam penentuan program dan kegiatan pembangunan. Apabila melihat hasil proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin diatas, kita bisa melihat bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bogor akan semakin mendekat sama. Hal ini bisa dilihat dari kecenderungan penurunan nilai rasio jenis kelamin dari 105,00 di tahun 2025 menjadi 104,09 pada tahun 2030.

4) Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur memiliki banyak kepentingan strategis dan praktis dalam perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai sektor lainnya.

- **Penduduk Usia 0-14 tahun**

  Terdapat kecenderungan penurunan jumlah penduduk usia 0-14 tahun dari 22,48 persen di tahun 2025 menjadi 18,57 persen di tahun 2030. Hal ini memberikan asumsi bahwa terjadi penurunan nilai *Total Fertility Rate* (TFR) yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa usia suburnya (15-49 tahun) di Kabupaten Bogor. Penurunan yang terjadi akan berpengaruh terhadap proyeksi pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memadai terutama untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan menengah.

- **Penduduk Usia 15-64 tahun**

  Hal lain terjadi untuk usia 15-64 tahun yang masuk ke dalam usia produktif, terjadi peningkatan dari 72,71 di tahun 2025 menjadi 75,99 di tahun 2030. Peningkatan ini memerlukan

perhatian khusus, mengingat jumlah penduduk usia produktif akan berpengaruh terhadap pemanfaatan bonus demografi terutama pada sektor ekonomi sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan khusus terutama terkait dengan pendidikan dan ketenagakerjaan.

- **Penduduk Usia 65+ tahun**

  Peningkatan juga terjadi pada jumlah usia 65+ tahun dari 4,80 di tahun 2025 menjadi 5,44 di tahun 2030. Hal ini menunjukan tingkat capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bogor yang semakin membaik dengan ditunjang oleh pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Kecenderungan kenaikan jumlah usia lanjut (65+tahun) harus segera mendapatkan respon yang cepat oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bogor harus segera mengeluarkan kebijakan untuk mempersiapkan masa lanjut usia, pada semua aspek antara lain ekonomi, sosial, mental, memerlukan upaya lintas sektor. Hal tersebut harus dilakukan untuk mewujudkan penduduk lanjut usia yang mandiri, sehat, dan bermartabat.

5) Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Perubahan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur akan menyebabkan perubahan terkait dengan rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia produktif dengan penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan pada tahun 2025 diproyeksikan adalah sebesar 37,52 persen. Rasio ketergantungan ini akan terus menurun sebesar 31,60 persen pada tahun 2045.

Pemanfaatan data ketergantungan dapat memberikan informasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rasio ketergantungan ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat

ketergantungan ekonomi suatu daerah dan memberikan dasar untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif. Pemanfaatan data rasio ketergantungan ini sebaiknya dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Beberapa cara pemanfaatan data rasio ketergantungan dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- **Penentuan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan**

Jika rasio ketergantungan rendah, dapat menunjukan potensi untuk meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan karena lebih banyak populasi yang produktif secara ekonomi. Hal ini dapat membantu menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan berdaya saing.

- **Perencanaan Kesejahteraan Sosial**

Rasio ketergantungan juga dapat memberikan informasi tentang jumlah populasi yang mungkin membutuhkan dukungan sosial, seperti anak-anak, lansia, dan orang berkebutuhan khsusus. Data ini dapat membantu perencanaan program kesejahteraan sosial yang sesuai dan adaptif.

Implementasi dari perencanaan kesejahteraan sosial dilaksanakan salah satunya oleh Kecamatan Sukamakmur dengan inovasi PUSYANSOS PENTAS (Peningkatan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Sosial melalui Pusat Pelayanan dan Penanganan Penyandang Disabilitas Sosial). Inovasi tersebut hadir untuk memastikan kelompok dengan ketergantungan tinggi, khususnya penyandang disabilitas sosial, mendapatkan layanan yang terstruktur, inklusif, dan responsif. Melalui pendataan terpadu, fasilitasi bantuan sosial, layanan konseling, rujukan kesehatan, serta edukasi masyarakat, PUSYANSOS PENTAS menjawab tantangan keterbatasan akses dan kesenjangan pelayanan bagi kelompok rentan. Dengan demikian, pemanfaatan data rasio ketergantungan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan

nyata yang meningkatkan keadilan sosial, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang inklusif.

- **Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan**

Jika terdapat peningkatan jumlah populasi yang produktif, pemerintah Kabupaten Bogor dapat mengembangkan kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi di sektor-sektor yang dapat menciptakan pekerjaan. Sejalan dengan hal tersebut, inovasi *Bogor Career Center* (BCC) hadir sebagai instrumen strategis untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Melalui sistem layanan karier terpadu, BCC membantu mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha/industri, menyediakan informasi pasar kerja yang akurat, dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan bimbingan karier.

- **Perencanaan Infrastruktur**

Rasio ketergantungan berpengaruh terhadap kebutuhan infrastruktur suatu daerah. Jika terdapat peningkatan populasi yang produktif, maka diperlukan investasi dalam infrastruktur seperti transportasi, perumahan, dan fasilitas umum lainnya. Untuk mendukung hal tersebut, inovasi KABISA (Kabupaten Bogor Satu Data dan Satu Peta) hadir sebagai instrumen penting dalam perencanaan infrastruktur berbasis data dan peta yang akurat. Melalui integrasi data sektoral dan spasial, KABISA membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur prioritas, mencegah tumpang tindih pembangunan, dan memastikan investasi diarahkan pada lokasi dan sektor yang tepat. Dengan demikian, KABISA memperkuat kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor.

- **Perencanaan Kesehatan**

Rasio ketergantungan berpengaruh terhadap sistem kesehatan daerah. Jika terdapat peningkatan jumlah lansia, perluasan layanan kesehatan khusus untuk lansia akan segera diperlukan beserta jaminan sosial pendukungnya.

- **Perencanaan Keuangan Daerah**

  Pemerintah perlu memastikan bahwa ada cukup sumber daya untuk mendukung populasi yang bergantung tanpa memberatkan ekonomi daerah.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

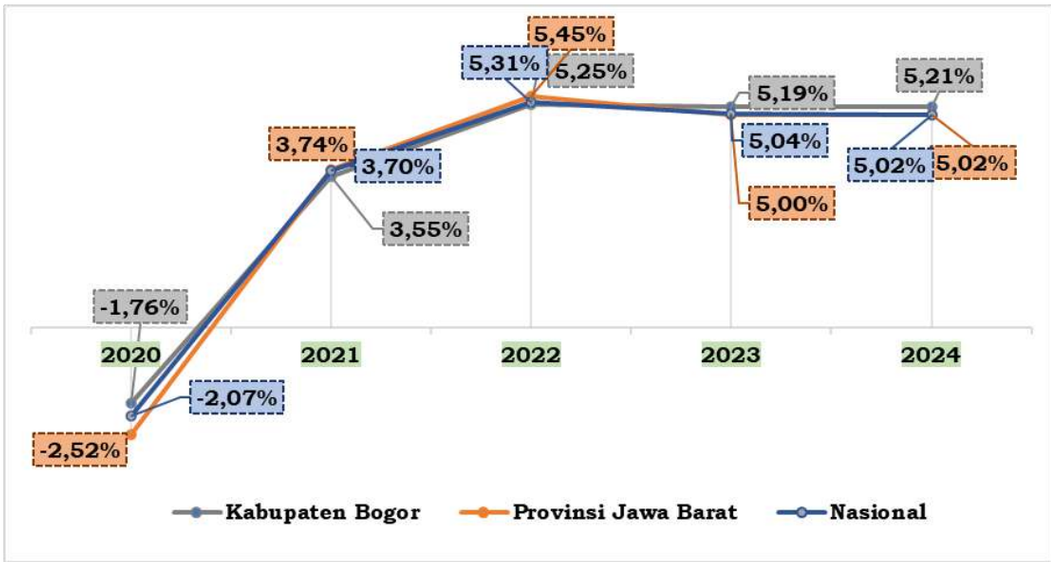
A. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi menggambarkan kesejahteraan pencapaian kesejahteraan secara makro yang dilihat dari indikator-indikator ekonomi. Beberapa aspek yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah laju pertumbuhan ekonomi, Rasio Gini, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia (IPM).

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan nilai total produksi barang dan jasa dalam suatu daerah dalam periode tertentu. Setelah pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor mulai menunjukan pemulihan yang positif, meskipun pertumbuhan yang dialami tidak masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2021 dan 2022, namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 5,19 persen. Penurunan ini disebabkan adanya perlambatan PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2023. Meskipun secara nilai terus mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi di tahun 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 5,46 persen, sedangkan pada 2023 menurun menjadi 4,5 persen. Meskipun sektor lain mengalami peningkatan, namun perlambatan pertumbuhan PDRB sektor industri sebesar 1,10 persen turut berkontribusi pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 5,19 persen. Hal ini disebabkan kontribusi sektor industri pengolahan merupakan terbesar dalam PDRB di Kabupaten Bogor. Namun pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor kembali meningkat menjadi 5,21 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 didorong oleh pertumbuhan industri pengolahan yang

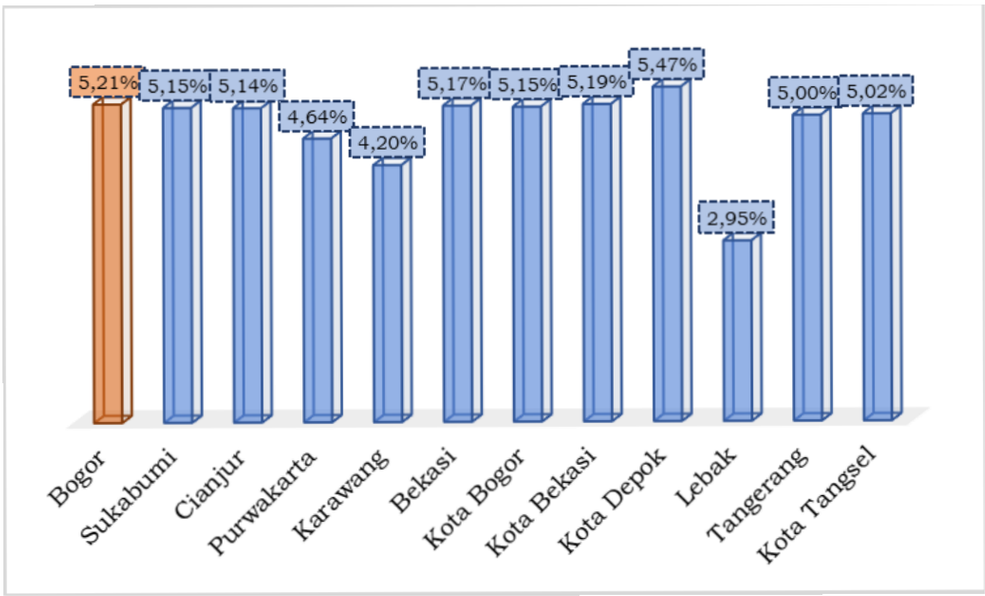
memiliki kontribusi terbesar pda PDRB Kabupaten Bogor. Namun, pertumbuhan sektor industri pengolahan ini terus melambat hingga tahun 2024. Di sisi lain, sektor jasa mengalami pertumbuhan yang positif. `



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.27
Perbandingan LPE Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor dapat dikatakan baik, karena karena menempati peringkat kedua dari 11 kabupaten/kota perbatasan dan berada di bawah Kota Depok.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

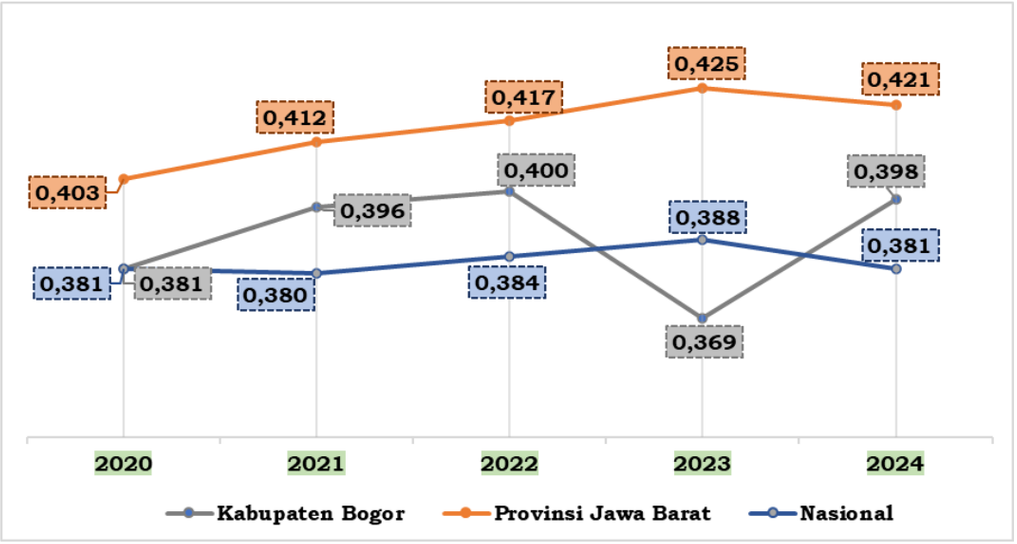
Gambar 2.28
Perbandingan LPE Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024

2) Rasio Gini

Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi. Semakin tinggi nilai Rasio Gini menunjukkan semakin timpang pendapatan masyarakat. Jika dihitung perkembangan capaian Rasio Gini tahun 2020-2024, Kabupaten Bogor mengalami peningkatan Rasio Gini yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan sebesar 0,029 poin menjadi 0,398 poin. Hal ini berbeda dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang mengalami penurunan di tahun 2024.

Peningkatan Rasio Gini yang terjadi dapat dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah ketimpangan pendapatan sektor formal dan informal, dimana peningkatan lapangan pekerjaan di sektor formal yang memberikan upah lebih tinggi, namun tidak demikian bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan pengahasilan rendah. Jika dilihat pada gambar 2.29, terlihat Rasio Gini Kabupaten cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2024, meskipun pada tahun 2023 sempat menurun. Hal yang sama juga terjadi pada Provinsi Jawa Barat dan Nasional, namun mengalami penururunan di tahun 2024.

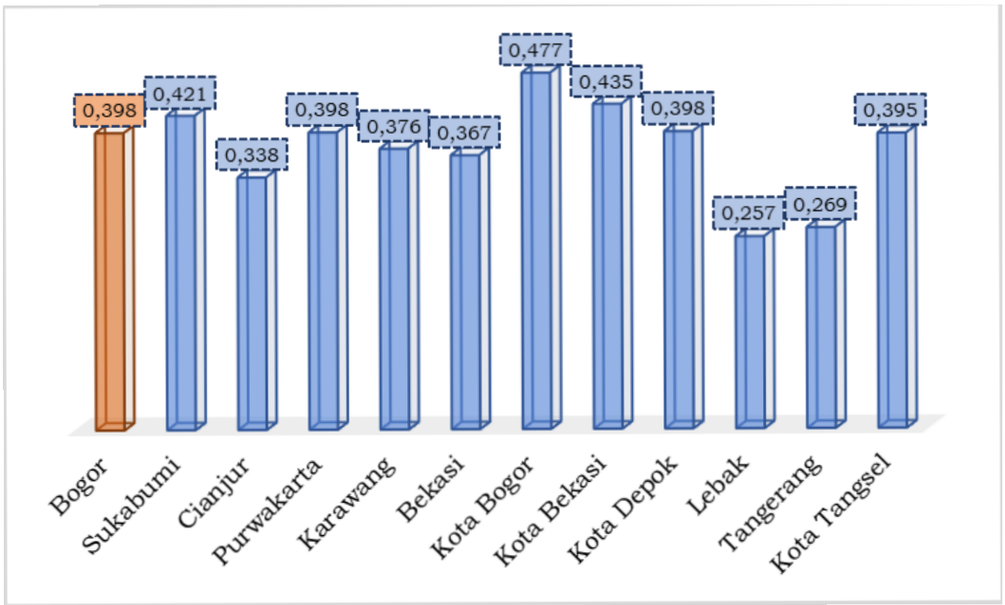
Rasio Gini yang cenderung meningkat dapat diakibatkan efek jangka panjang dari pandemi covid-19, yang mana sangat mempengaruhi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih belum dapat sepenuhnya pulih secara ekonomi. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional terdapat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2024

Gambar 2.29
Perbandingan Rasio Gini Provinsi Jawa Barat, Nasional dan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024

Sampai dengan tahun 2024 Rasio Gini Kabupaten Bogor memiliki nilai 0,398 poin, meningkat ketimpangannya sebesar 0,29 poin dari tahun 2023. Kondisi tahun 2024, menempatkan Kabupaten Bogor berada di posisi tengah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota wilayah perbatasan, sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.30
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024

3) Kemiskinan

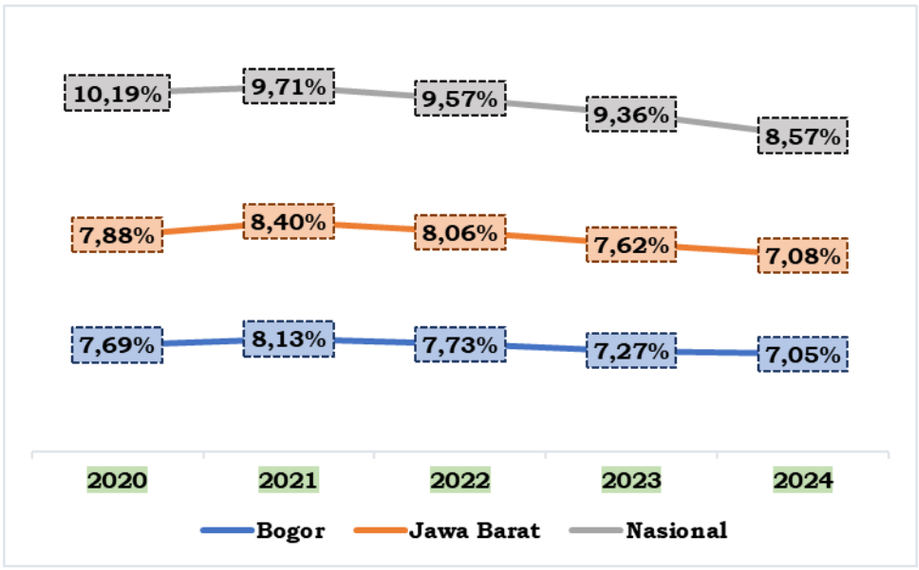
Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan penduduk miskin yang cukup besar. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang besar. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor terus mengalami penurunan mulai dari tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 2.24
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	%	7,69	8,13	7,73	7,27	7,05
Jumlah Penduduk Miskin	ribu orang	465,6	491,2	474,74	453,76	446,79

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2024

Perbandingan persentase penduduk miskin antara Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional disajikan pada gambar berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.31
Perbandingan Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan antara Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

Pada gambar 2.31 terlihat bahwa persentase tingkat kemiskinan baik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional terus mengalami penurunan hingga tahun 2024. Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor pada tahun memperlihatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Aktivitas ekonomi yang kembali normal seperti perdagangan, pariwisata lokal, dan industri dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor. Selain itu kebijakan program bantuan sosial yang diberikan pemerintah membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Namun demikian, perlu menjadi perhatian khusus dalam penurunan kemiskinan ini. Terlihat pada grafik bahwa penurunan tingkat kemiskinan di 2024 lebih lambat dari tahun 2023, dimana penurunan di tahun 2023 sebesar 0,46 poin sedangkan di tahun 2024 sebesar 02,22 poin. Diperlukan upaya lainnya dalam menekan tingkat kemiskinan seperi mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi lokal. Pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha kecil dapat mendorong ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor banyak dikontribusi oleh penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan,

sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan desa seperti:

a. Pengembangan infrastruktur perdesaan;
b. Pengembangan industri perdesaan untuk meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja;
c. Pengembangan wisata baik swasta maupun berbasis masyarakat dan potensi desa masing-masing.

Kemudian, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota wilayah perbatasan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor berada pada peringkat 6 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2024	
		%	Ribu Jiwa
1	Bogor	7,05	446,79
2	Sukabumi	6,87	175,93
3	Cianjur	10,14	239,3
4	Purwakarta	8,41	81,44
5	Karawang	7,86	187,77
6	Bekasi	4,80	204,54
7	Kota Bogor	6,53	73,93
8	Kota Bekasi	4,01	128,84
9	Kota Depok	2,34	62,6
10	Lebak	8,44	111,71
11	Tangerang	6,55	266,43
12	Kota Tangsel	2,36	43,33

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

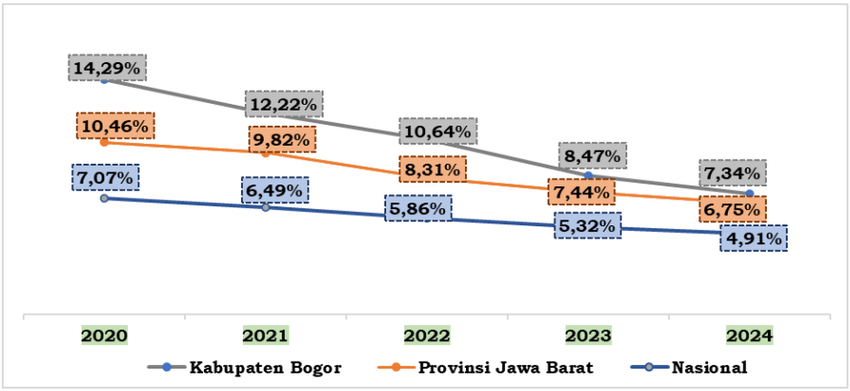
4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur ketenagakerjaan di suatu wilayah. Tingkat pengangguran terbuka ini sangat erat kaitannya sebagai salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan karena dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan produktivitas ekonomi.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor terus mengalami penurunan signifikan hingga tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan dalam pengurangan pengangguran yang cukup baik. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini dapat menunjukkan kondisi ekonomi daerah yang relatif lebih baik dan peluang

kerja yang lebih tinggi. Meski demikian, upaya untuk mempertahankan tren positif ini perlu terus dilakukan, terutama dengan memperkuat sektor ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

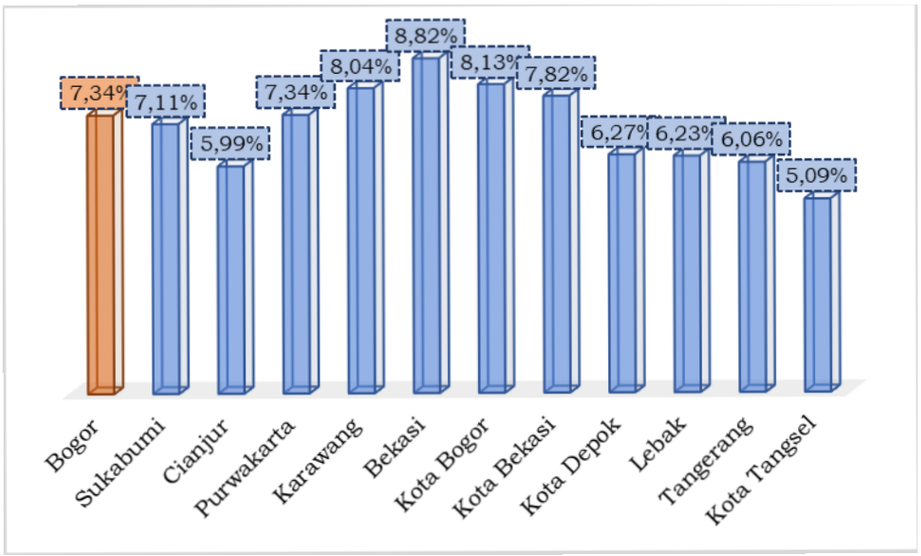
Adapun mengenai perbandingan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.32
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bogor dengan Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Sebagai daerah penyangga ibukota negara, Kabupaten Bogor berbatasan dengan wilayah metropolitan yang memiliki peluang kerja besar, namun tantangan persaingan kerja yang tinggi juga berpengaruh pada tingkat pengangguran terbuka. Untuk menekan angka pengangguran, Kabupaten Bogor perlu meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, khususnya untuk mengimbangi perkembangan industri dan sektor jasa di daerah perkotaan. Selain itu, peningkatan keterampilan ini perlu diperhatikan mengingat Kabupaten Bogor berbatasan dengan wilayah yang berbasis sektor industri, dimana persaingan ketenagakerjaan semakin tinggi. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota perbatasan, Kabupaten Bogor menempati posisi atas bersama Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. memiliki angka tingkat pengangguran terbuka tertinggi keempat. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

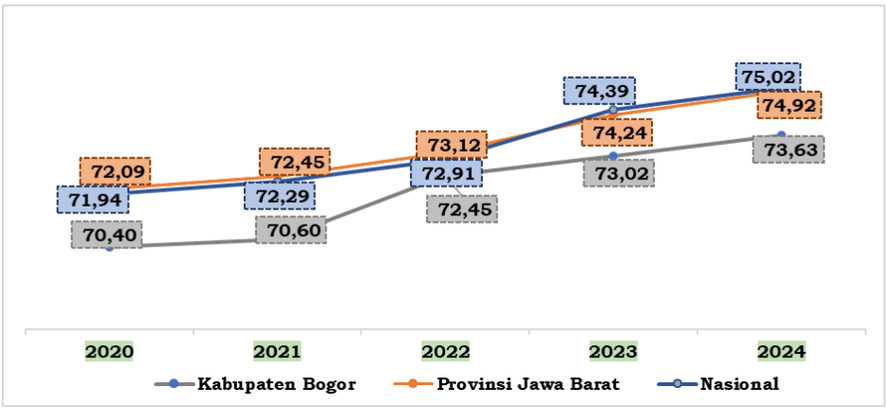


Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.33
Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

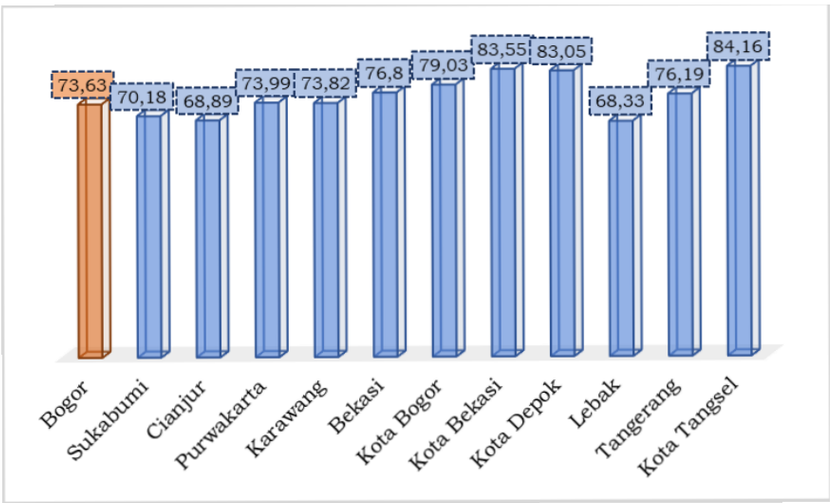
Indeks pembangunan manusia digunakan sebagai salah satu alat ukur kesejahteraan masyarakat. Indeks pembangunan manusia memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas hidup masyarakat suatu daerah, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Hal yang sama terjadi di Jawa Barat dan Nasional. Peningkatan IPM di Kabupaten Bogor didorong oleh peningkatan dari angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan daya beli. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan capaian IPM Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional disajikan pada Gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.34
Perkembangan IPM Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota perbatasan, posisi Kabupaten Bogor berada di tengah. Sebagai wilayah yang berdekatan dengan ibukota negara, Kabupaten Bogor masih tertinggal dibandingkan Kota Bogor dan Kota Bekasi, yang memiliki akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi lebih baik. Jika dilihat dari ciri khas wilayah perbatasan, wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kota Depok, memiliki IPM tinggi. Hal ini menunjukkan adanya akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara itu, wilayah dengan karakteristik lebih pedesaan seperti Lebak, Cianjur dan Purwakarta cenderung memiliki IPM rendah akibat keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar. Dengan keberagaman yang ada di Kabupaten Bogor, dalam meningkatkan IPM, diperlukan dukungan infrastruktur dalam mendorong mobilitas akses kesehatan, pendidikan dan juga ekonomi. Perbandingan nilai IPM Kabupaten Bogor dengan kabupaten/kota perbatasan disajikan dalam gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.35
Perbandingan IPM Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024

Gambaran mengenai keberhasilan program yang dilaksanakan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dapat diketahui melalui capaian IPM yang terdiri dari beberapa komponen pembentuk IPM. Adapun capaian komponen pembentuk IPM seperti di bidang kesehatan yaitu angka harapan hidup, bidang pendidikan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta bidang ekonomi yaitu daya beli. Realisasi indikator indeks pembangunan manusia selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

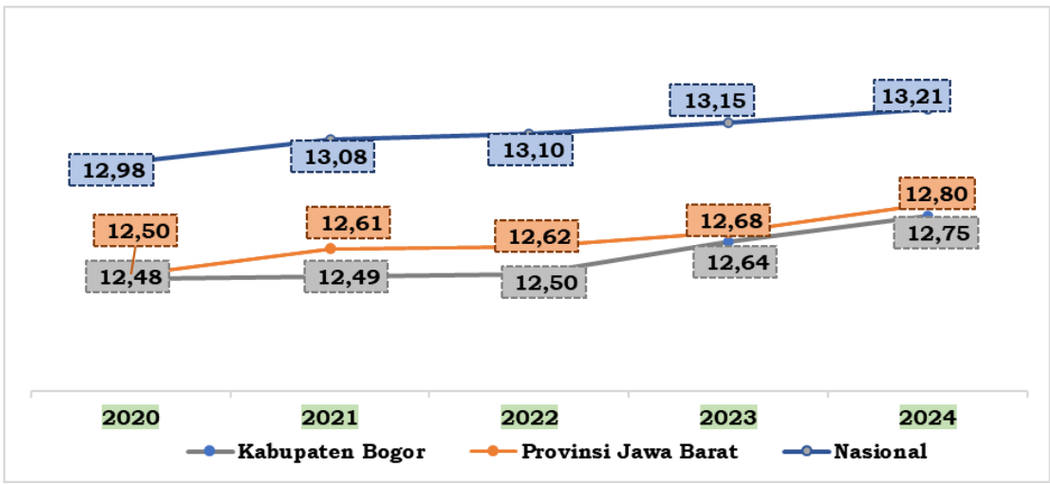
Tabel 2.26
Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024

	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)**	**70,40**	**70,60**	**72,45**	**73,02**	**73,63**
►	**Komponen IPM terdiri dari:**					
A	Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk 7 th +	12,48	12,49	12,50	12,64	12,75
B	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25 th +	8,30	8,31	8,34	8,37	8,39
C	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,90	74,09	74,42	74,67	74,90
D	Pengeluaran per kapita per tahun (Rp ribu)	10.317	10.410	10.680	11.153	11.563

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2024

➢ **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan lama sekolah penduduk selama kurun waktu 2020-2024 telah mencapai angka lebih dari 12 tahun. Artinya di Kabupaten Bogor, harapan lama sekolah penduduk telah berada di atas SMA/sederajat, atau diharapkan penduduk telah menamatkan pendidikan hingga jenjang menengah. Aspek pendidikan yang menjadi perhatian dalam pembangunan manusia dicerminkan oleh HLS. HLS dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. HLS mengasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Perbandingan angka harapan lama sekolah Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional disajikan pada gambar berikut:



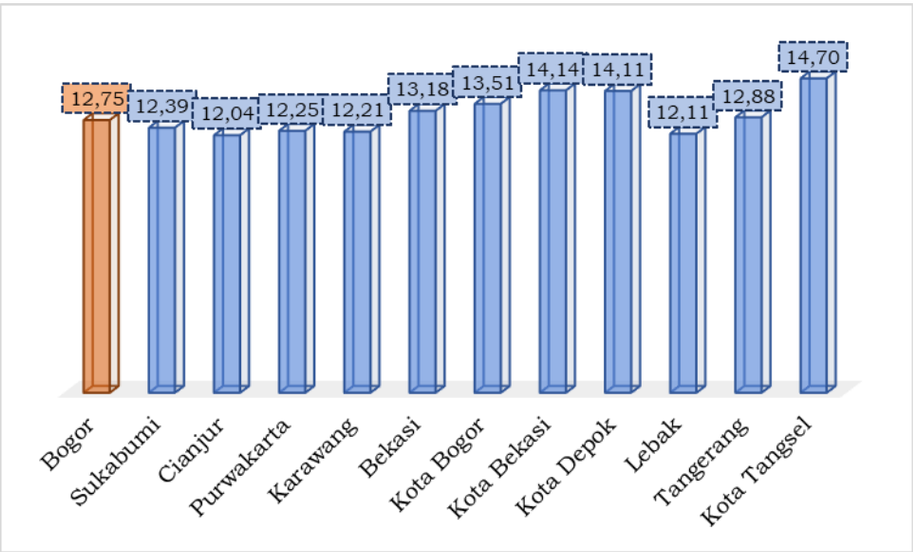
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.36
Perkembangan HLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

Capaian HLS Kabupaten Bogor selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren yang meningkat. Hal tersebut selaras dengan kondisi capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.36. Meskipun pada grafik terlihat bahwa HLS Kabupaten Bogor berada dibawah HLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional, HLS Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan bahkan peningkatannya diatas Nasional, namun masih di bawah peningkatan Provinsi Jawa Barat. Pada

tahun 2024, HLS kabupaten Bogor mengalami peningkatan sebesar 0,11 poin, sedangkan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,12 poin dan Nasional sebesar 0,06 poin.

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota wilayah perbatasan, HLS Kabupaten Bogor berada di posisi tengah. Berdasarkan data, terlihat bahwa wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, dan Kota Bekasi memiliki HLS yang lebih tinggi. Ini dapat dikaitkan dengan akses pendidikan yang lebih baik, lebih banyaknya sekolah berkualitas, dan daya dukung ekonomi yang lebih besar. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bogor dan Kabupaten/Kota wilayah perbatasan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.37
Perbandingan HLS Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024

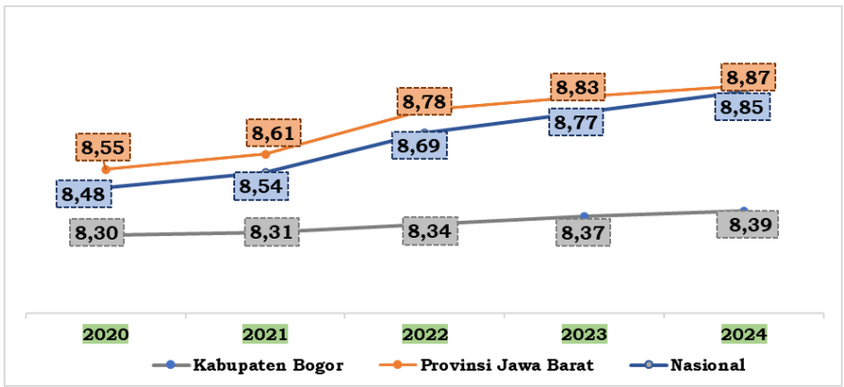
- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Komponen pembentuk IPM selain HLS dari sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, RLS Kabupaten Bogor masih berada dibawah hingga tahun 2024. Dimana pada

tahun 2024, RLS Kabupaten Bogor sebesar 8,39 tahun, sedangkan Provinsi Jawa Barat dan Nasional sebesar 8,87 tahun dan 8,85 tahun. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan RLS pada tahun 2024, dimana meskipun RLS Kabupaten Bogor mengalami peningkatan, namun peningkatan ini masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Peningkatan rata-rata lama sekolah didukung oleh pembangunan infrastruktur pendidikan yang meningkat juga setiap tahunnya. Selain itu, kebijakan dari pemerintah dalam pemberian subsidi pendidikan turut mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah.

Berikut ini merupakan data capaian RLS Kabupaten Bogor jika dibandingkan dengan capaian RLS Provinsi Jawa Barat dengan Nasional yang dijelaskan pada gambar berikut:



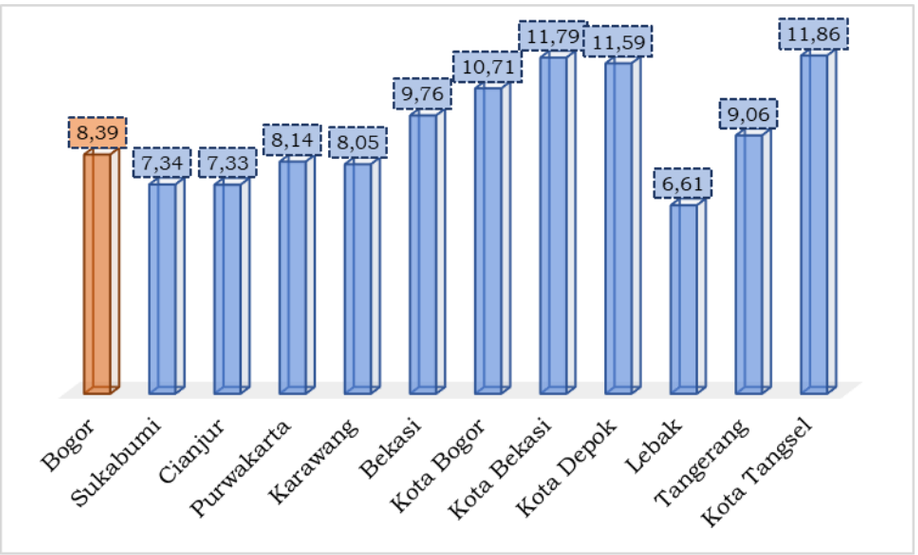
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.38
Perkembangan Kinerja RLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Capaian RLS Kabupaten Bogor selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren yang positif. Walaupun hasil dari penghitungan tersebut selalu menunjukkan pertumbuhan lebih dari 0 di setiap tahunnya, namun posisi capaian RLS Kabupaten Bogor selama periode tersebut selalu berada di bawah capaian RLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota wilayah perbatasan, RLS Kabupaten Bogor berada di bawah. Wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, dan Kota Bekasi memiliki RLS yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan akses pendidikan yang lebih mudah, fasilitas pendidikan yang memadai, serta tingkat kesadaran

pendidikan yang tinggi. Untuk meningkatkan RLS Kabupaten Bogor diperlukan kebijakan peningkatan akses pendidikan melalui program beasiswa, peningkatan kualitas guru, dan sosialisasi pentingnya pendidikan. Capaian RLS kabupaten/kota wilayah perbatasan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

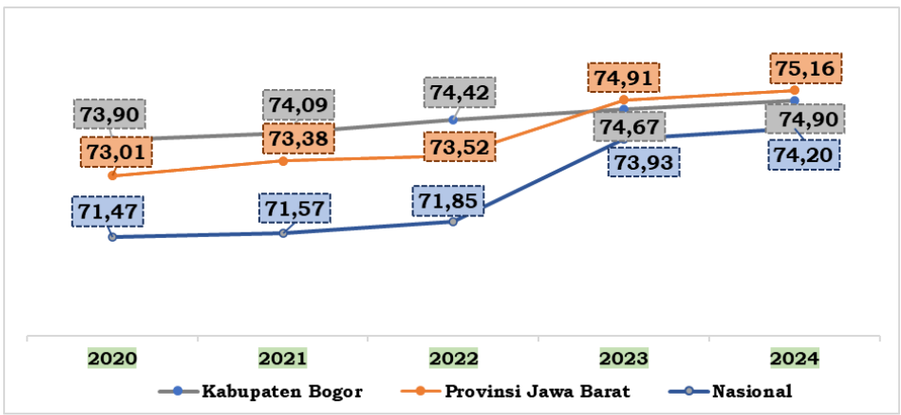
Gambar 2.39
Perbandingan RLS Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bogor yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional menunjukkan bahwa perlu ada intervensi nyata dalam pengelolaan data dan kebijakan pendidikan. Salah satu langkah inovatif yang dilakukan adalah melalui penerapan PENTA (Pendidikan dalam Data), yaitu sistem informasi pendidikan berbasis data yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Melalui PENTA, data pendidikan yang mencakup kelembagaan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, serta sarana prasarana dapat dikelola secara terintegrasi, akurat, dan mutakhir. Kehadiran sistem tersebut mendorong analisis yang lebih tepat terhadap kebutuhan pendidikan, termasuk dalam memetakan disparitas HLS dan RLS antar wilayah. Dengan demikian, PENTA tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengelolaan data, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendukung perencanaan kebijakan, peningkatan akses, dan pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor.

➢ **Angka Harapan Hidup (AHH)**

AHH adalah komponen pembentuk IPM dari sektor kesehatan yang merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir (e0) pada suatu tahun tertentu. Perkembangan AHH Kabupaten Bogor mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kualitas kesehatan, peningkatan akses layanan kesehatan, serta peningkatan standar hidup secara umum yang berdampak pada peningkatan harapan hidup masyarakat. Meskipun trennya menunjukkan perkembangan yang positif, namun capaian AHH Kabupaten Bogor berada di bawah capaian AHH Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2022, namun pada 2023 dan 2024 dapat melampaui angka nasional.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

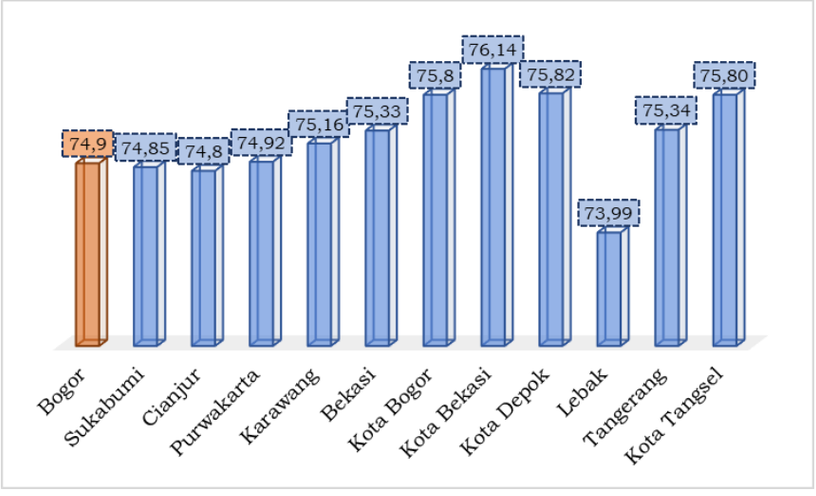
Gambar 2.40
Perkembangan AHH Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

Meskipun trennya menunjukkan perkembangan yang positif, capaian AHH Kabupaten Bogor masih berada di bawah capaian AHH Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2022. Namun pada 2023 dan 2024, Kabupaten Bogor berhasil melampaui angka nasional. Capaian ini tidak lepas dari berbagai intervensi peningkatan layanan kesehatan, salah satunya melalui SiGarda Mas (Strategi Optimalisasi Rujukan Gawat Darurat Berbasis Masyarakat). Program ini mengedepankan pemanfaatan *Call Center* dan *Telemedicine* untuk mempercepat layanan kegawatdaruratan, sehingga masyarakat dapat lebih cepat memperoleh akses penanganan medis yang tepat. Optimalisasi sistem rujukan gawat darurat tersebut berkontribusi terhadap penurunan angka kematian dan

peningkatan kualitas layanan kesehatan, yang pada akhirnya mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bogor.

Angka harapan hidup Kabupaten Bogor masih berada di bawah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota perbatasan. AHH Kabupaten Bogor cukup baik tetapi masih berada di bawah beberapa wilayah perkotaan dengan fasilitas kesehatan yang lebih maju. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di daerah pedesaan, peningkatan kesadaran kesehatan, dan perluasan akses layanan kesehatan dapat menjadi fokus utama untuk meningkatkan AHH Kabupaten Bogor.

Perbandingan capaian AHH Kabupaten Bogor dengan capaian kabupaten/kota wilayah perbatasan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

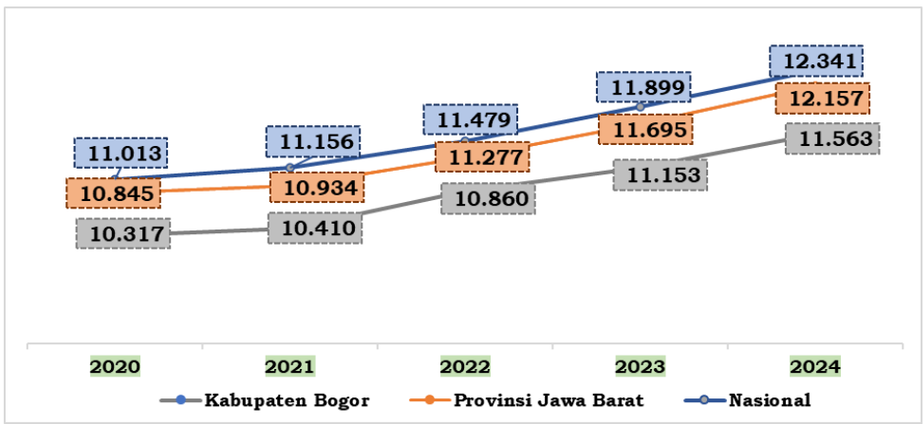
Gambar 2.41
Perbandingan AHH Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024

- **Pengeluaran Per Kapita**

Komponen IPM yang mencerminkan kondisi kesejahteraan ekonomi adalah pengeluaran per kapita per tahun. Kondisi pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor mengalami tren yang positif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Jika dibandingkan secara nilai mutlak antara capaian Kabupaten Bogor dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan nasional, pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor masih berada di bawah capaian keduanya. Hal ini berbanding lurus dengan perkembangan pengeluaran per kapita

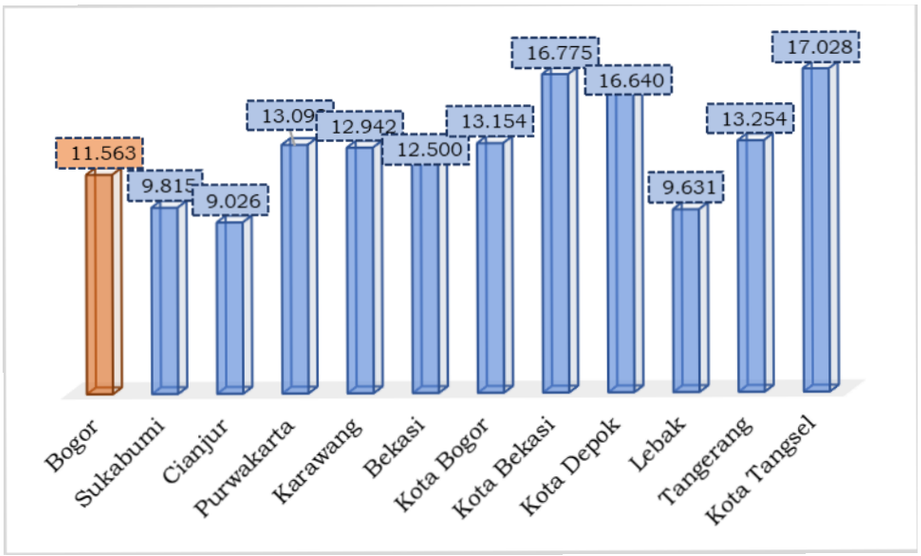
hingga tahun 2023. Meskipun cenderung mengalami peningkatan, namun peningkatan pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor masih dibawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan sosial ikut meningkatkan daya beli masyarakat Kabupaten Bogor. Selain itu, meningkatnya daya beli artinya kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.42
Perkembangan Pengeluaran per Kapita (Rp) per Tahun
Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan kabupaten/kota wilayah perbatasan, pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor berada di bawah, terutama dengan wilayah perbatasan yang bersifat perkotaan. Hal ini disebabkan adanya kondisi infrastruktur yang lebih baik, sehingga memudahkan akses terhadap fasilitas ekonomi. Wilayah sekitar Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kota Depok cenderung memiliki daya beli lebih tinggi karena adanya efek *spillover* ekonomi, seperti peluang kerja dan investasi bisnis yang lebih besar. Melihat hal tersebut, Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang berbatasan dengan kawasan metropolitan harus dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya, baik dalam pendidikan formal maupun keterampilan informal agar dapat memiliki akses yang lebih luas terhadap pekerjaan. Perbandingan pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor dengan capaian kabupaten/kota wilayah perbatasan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 2.43
Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Rp) per Tahun Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2024

Tabel 2.27
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 atas Dasar Harga Konstan

No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp) miliar	%	(Rp) miliar	%	(Rp) miliar	%	%	(Rp) miliar	%	(Rp) miliar
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.196,08	4,67	7.370,78	4,62	7.626,74	7.196,08	4,67	7.370,78	4,62	7.626,74
2.	Pertambangan dan Penggalian	3.555,87	2,31	3.838,47	2,41	4.039,40	3.555,87	2,31	3.838,47	2,41	4.039,40
3.	Industri Pengolahan	83.331,09	54,07	85.421,10	53,53	90.083,91	83.331,09	54,07	85.421,10	53,53	90.083,91
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	237,39	0,15	259,92	0,16	273,51	237,39	0,15	259,92	0,16	273,51
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	197,50	0,13	214,38	0,13	239,03	197,50	0,13	214,38	0,13	239,03
6.	Konstruksi	14.707,94	9,54	15.702,24	9,84	15.526,49	14.707,94	9,54	15.702,24	9,84	15.526,49
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.403,12	11,94	18.951,81	11,88	20.510,09	18.403,12	11,94	18.951,81	11,88	20.510,09
8.	Transportasi dan Pergudangan	5.148,14	3,34	5.253,80	3,29	5.587,59	5.148,14	3,34	5.253,80	3,29	5.587,59
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.660,18	2,37	3.877,78	2,43	4.356,82	3.660,18	2,37	3.877,78	2,43	4.356,82
10.	Informasi dan Komunikasi	5.647,38	3,66	6.251,33	3,92	6.604,95	5.647,38	3,66	6.251,33	3,92	6.604,95
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	857,43	0,56	898,52	0,56	879,78	857,43	0,56	898,52	0,56	879,78
12.	Real Estate	1.512,44	0,98	1.673,94	1,05	1.762,51	1.512,44	0,98	1.673,94	1,05	1.762,51
13.	Jasa Perusahaan	302,54	0,20	328,16	0,21	350,32	302,54	0,20	328,16	0,21	350,32
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.250,49	1,46	2.266,58	1,42	2.265,51	2.250,49	1,46	2.266,58	1,42	2.265,51
15.	Jasa Pendidikan	3.306,95	2,15	3.348,67	2,10	3.470,28	3.306,95	2,15	3.348,67	2,10	3.470,28
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	840,93	0,55	902,71	0,57	924,31	840,93	0,55	902,71	0,57	924,31
17.	Jasa lainnya	2.958,16	1,92	3.029,36	1,90	3.464,93	2.958,16	1,92	3.029,36	1,90	3.464,93
	PDRB	**154.113,60**	**100,00**	**159.589,55**	**100,00**	**167.966,18**	**154.113,60**	**100,00**	**159.589,55**	**100,00**	**167.966,18**

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2024

6) Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor atas Dasar Harga Konstan

Kontribusi beberapa sektor PDRB harga konstan mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hal tersebut karena adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi secara global. Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat sektor industri pengolahan sebagai kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Bogor mengalami perlambatan pertumbuhan dan penurunan kontribusi terhadap PDRB pada tahun 2024. hal ini disebabkan struktur ekonomi Kabupaten Bogor mengalami perubahan, di mana sektor-sektor jasa, perdagangan, dan teknologi informasi mulai berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap PDRB. Perubahan struktur ekonomi ini dapat mengurangi dominasi sektor industri pengolahan. Namun demikian, kontribusi sektor industri pengolahan tetap memegang peranan terbesar pagi PDRB Kabupaten Bogor.

Sektor lain yang dominan adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor ini memiliki kontribusi signifikan sebesar 11,88 persen, yang menunjukkan tingginya aktivitas perdagangan serta kemampuan konsumsi masyarakat di Kabupaten Bogor. Hal ini juga berkaitan erat dengan sektor industri pengolahan yang membutuhkan distribusi hasil produksi. Sektor Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 9,84 persen, mengindikasikan adanya perkembangan infrastruktur yang pesat di Kabupaten Bogor, yang mendukung pertumbuhan sektor industri dan perdagangan.

Kabupaten Bogor memiliki basis ekonomi industri yang kuat, tetapi perlu diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor industri pengolahan. Penguatan sektor jasa yang berorientasi pada teknologi dan informasi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing wilayah. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan mendukung pertumbuhan sektor konstruksi dan transportasi yang lebih besar.

Selanjutnya, perkembangan nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2020-2024 disajikan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 atas Dasar Harga Berlaku

No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp) miliar	%	(Rp) miliar	%	(Rp) miliar	%	(Rp) miliar	%	(Rp) miliar	%
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.683,61	5,38	13.212,32	5,31	14.220,24	5,31	14.992,01	5,19	16.101,25	5,17
2.	Pertambangan dan Penggalian	5.190,70	2,20	5.857,70	2,35	6.110,71	2,28	6.481,48	2,24	6.950,89	2,23
3.	Industri Pengolahan	126.709,81	53,72	132.349,36	53,18	141.864,33	52,99	151.532,05	52,41	160.984,58	51,65
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	347,02	0,15	380,75	0,15	404,28	0,15	422,46	0,15	442,50	0,14
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	327,10	0,14	356,46	0,14	401,10	0,15	415,16	0,14	498,93	0,16
6.	Konstruksi	23.306,08	9,88	25.688,01	10,32	27.336,25	10,21	30.234,07	10,46	31.472,24	10,10
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28.432,54	12,05	29.817,89	11,98	32.391,85	12,10	35.486,09	12,27	38.367,21	12,31
8.	Transportasi dan Pergudangan	9.239,12	3,92	9.668,29	3,88	10.742,83	4,01	12.663,02	4,38	14.498,52	4,65
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.081,14	2,58	6.589,27	2,65	7.647,31	2,86	8.706,15	3,01	10.339,18	3,32
10.	Informasi dan Komunikasi	5.452,47	2,31	6.002,02	2,41	6.261,25	2,34	6.560,10	2,27	7.590,18	2,43
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.326,91	0,56	1.444,90	0,58	1.508,66	0,56	1.556,33	0,54	1.801,13	0,58
12.	Real Estate	2.069,75	0,88	2.293,68	0,92	2.477,05	0,93	2.658,28	0,92	2.890,91	0,93
13.	Jasa Perusahaan	438,68	0,19	480,00	0,19	526,56	0,20	596,10	0,21	659,06	0,21
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.589,47	1,52	3.677,34	1,48	3.674,03	1,37	3.728,76	1,29	4.103,70	1,32
15.	Jasa Pendidikan	5.377,42	2,28	5.546,79	2,23	5.948,54	2,22	6.285,03	2,17	7.005,89	2,25
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.159,76	0,49	1.261,20	0,51	1.293,90	0,48	1.339,41	0,46	1.442,66	0,46
17.	Jasa lainnya	4.155,70	1,76	4.266,50	1,71	4.934,81	1,84	5.449,64	1,88	6.564,36	2,11
	PDRB	**235.887,26**	**100,00**	**248.892,48**	**100,00**	**267.743,69**	**100,00**	**289.106,15**	**100,00**	**311.713,18**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2024

7) Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Selaras dengan nilai beberapa sektor PDRB harga konstan yang mengalami fluktuasi, nilai sektor PDRB harga berlaku pun mengalami kenaikan dan penurunan capaian sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat beberapa sektor yang nilainya tumbuh sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, terdiri dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Real Estate, dan Sektor Jasa Pendidikan.

Adapun kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusinya sebesar 51,65 persen dengan nilainya yang mencapai 160,99 triliun rupiah. sedangkan kontribusi yang terkecil terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan kontribusinya sebesar 0,14 persen dengan nilainya yang hanya sebesar 0,44 triliun rupiah.

Selanjutnya mengenai laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan lapangan usaha tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (%)

No.	Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,58	2,43	3,47	1,50	5,88
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,62	7,95	5,23	1,15	2,35
3.	Industri Pengolahan	-2,47	2,51	5,46	4,54	3,94
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-4,12	9,49	5,23	3,29	5,31
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,65	8,55	11,5	2,61	14,08
6.	Konstruksi	-5,75	6,76	-1,12	8,72	2,74
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,42	2,98	8,22	5,66	5,20
8.	Transportasi dan Pergudangan	-1,3	2,05	6,35	12,12	10,03
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,31	5,95	12,35	9,26	11,57
10.	Informasi dan Komunikasi	32,33	10,69	5,66	4,77	12,07
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,25	4,79	-2,09	1,17	6,86
12.	Real Estate	4,44	10,68	5,29	5,7	6,64
13.	Jasa Perusahaan	-10,9	8,47	6,75	7,52	4,03
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,89	0,71	-0,05	0,08	8,65
15.	Jasa Pendidikan	7,13	1,26	3,63	4,24	8,85
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-6,83	7,35	2,39	2,19	5,52
17.	Jasa lainnya	-3,09	2,41	14,38	6,68	14,02
	PDRB	**-1,76**	**3,55**	**5,25**	**5,19**	**5,21**

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2024

8) Laju Pertumbuhan PDRB

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, sebagai contoh perhitungan PDB dan PBRB di Indonesia menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun 2000. Penentuan PDRB atas harga konstan tersebut, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi.

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit), dimana Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Indikator LPE secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang perkembangannya bergerak secara fluktuatif.

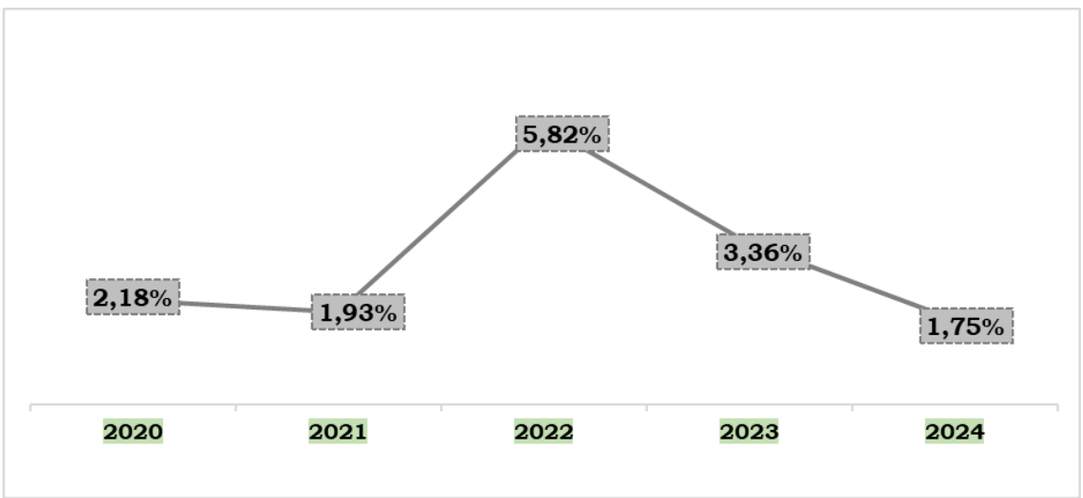
Adapun sektor usaha yang memiliki proporsi laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2024 adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Informasi dan Komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan paling konsisten dan stabil selama periode 2020-2024. Adaptasi digital yang terus berkembang menjadi pendorong utama. Selanjutnya pertumbuhan sektor kontruksi menunjukkan stabilitas dengan kontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menunjukan pemulihan daya beli masyarakat mendukung pemulihan sektor perdagangan, terutama setelah tahun 2021. Sektor-sektor berbasis teknologi dan jasa menunjukkan pertumbuhan yang kuat, sementara sektor industri pengolahan masih menghadapi tantangan. Keberlanjutan pemulihan

ekonomi dapat dicapai dengan memperkuat sektor industri utama, meningkatkan inovasi digital, serta memperluas sektor jasa modern yang berdaya saing tinggi.

9) Laju Inflasi

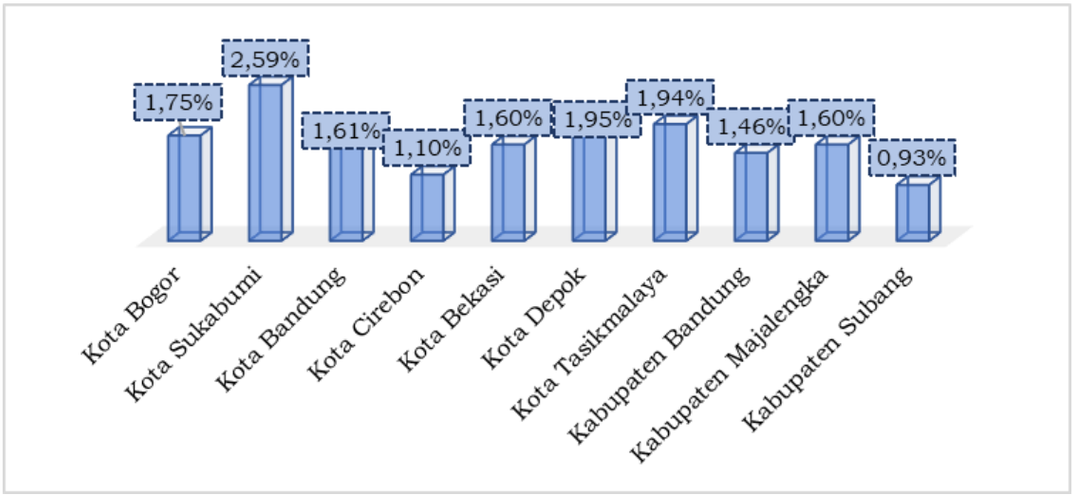
Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Hal tersebut dapat memberikan gambaran kondisi makro perekonomian di suatu daerah, karena inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Kondisi demikian menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, sehingga investasi pun akan terhambat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang menghitung Laju Inflasi Gabungan 7 (tujuh) Kota di Jawa Barat, dimana Kabupaten Bogor merujuk pada inflasi Kota Bogor yang tercatat tahun 2024 inflasi Kabupaten Bogor sebesar 1,75 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 3,36 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024

Gambar 2.44
Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024

Gambar 2.45
Laju Inflasi 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024

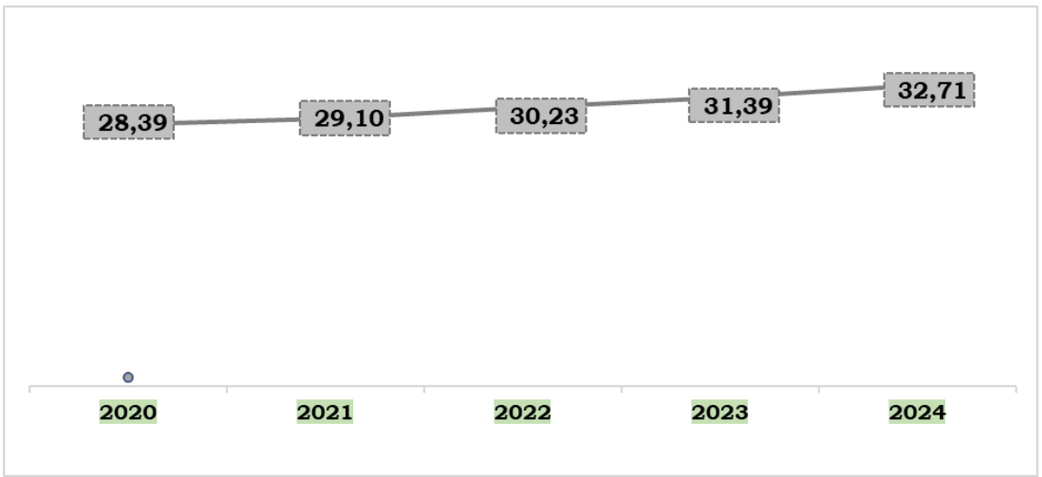
Berdasarkan gambar 2.45 yang menunjukkan laju inflasi kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, tercatat Kota Bogor sebagai rujukan Kabupaten Bogor menempati posisi ke-empat tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

10) PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil pembagian antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita dijadikan indikator yang paling umum digunakan untuk menggambarkan ukuran standar hidup dan tingkat kemakmuran di suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Selain itu, PDRB per kapita juga dapat dijadikan pendekatan untuk indikator pendapatan per kapita, karena angka PDRB per kapita menunjukan angka pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Namun demikian, tidak seluruh pendapatan tersebut dinikmati oleh penduduk suatu daerah, tetapi ada juga sebagian yang dibawa oleh penduduk daerah lain.

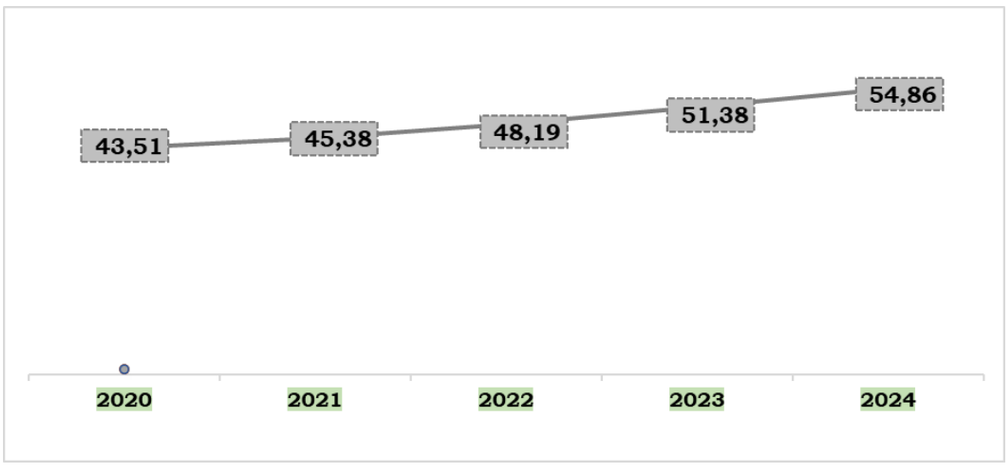
PDRB per kapita Kabupaten Bogor memperlihatkan tren positif hingga tahun 2024, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor yang positif. Artinya,

nilai total barang dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Bogor terus meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Secara kesejahteraan, apabila PDRB per kapita meningkat, artinya pendapatan rata-rata masyarakat naik, sehingga daya beli masyarakat juga meningkat. Perkembangan nilai PDRB per kapita Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2024

Gambar 2.46
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bogor
Tahun 2020-2024



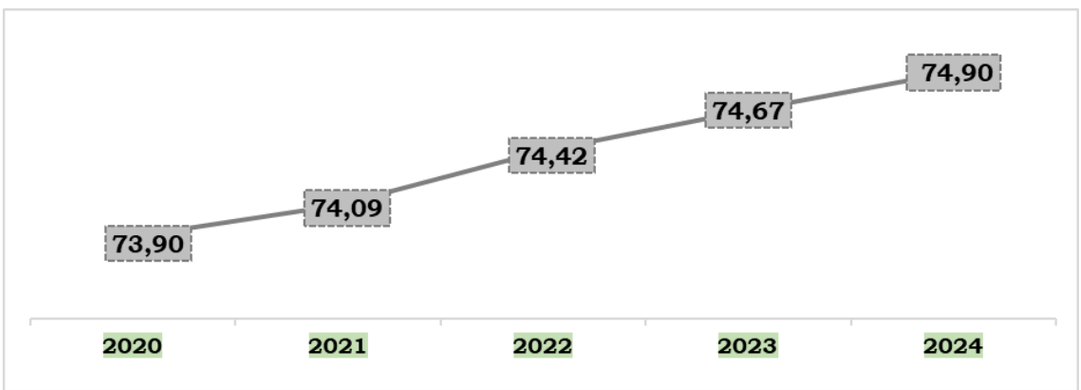
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2024

Gambar 2.47
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor
Tahun 2020-2024

B. Kesehatan untuk Semua

1) Angka Harapan Hidup

AHH adalah komponen pembentuk IPM dari sektor kesehatan yang merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir (e0) pada suatu tahun tertentu. Perkembangan AHH Kabupaten Bogor mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 angka harapan hidup Kabupaten Bogor mencapai 73,90 tahun, hingga pada tahun 2024 menjadi 74,90 tahun. Meningkatnya angka harapan hidup menandakan bahwa kualitas kesehatan di Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis terlatih, dan perawatan medis yang berkualitas dapat menurunkan angka kematian dan meningkatkan harapan hidup. Perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Bogor tahun 2022 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



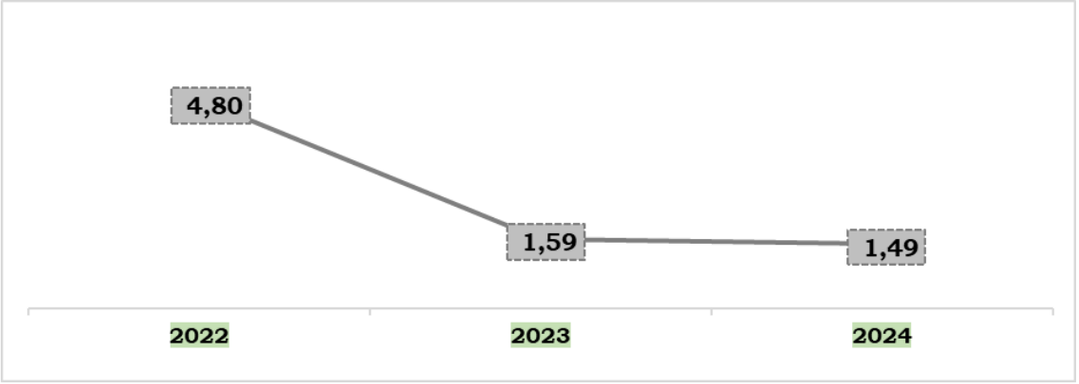
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.48
Angka Harapan Hidup Kabupaten Bogor
2020-2024

2) Prevalensi Stunting Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita

Pada tahun 2024, data persentase stunting tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki angka proyeksi yang sangat rendah, yaitu 1,49%, jauh lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat 15% maupun tingkat nasional 14%. Selama tahun 2022-2024, prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun (balita) di Kabupaten Bogor cenderung mengalami penurunan. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 prevalensi stunting tercatat sebesar 4,8%, kemudian mengalami penurunan tajam menjadi 1,59%

pada tahun 2023, dan sedikit lebih rendah lagi menjadi 1,49% pada angka proyeksi tahun 2024. Perkembangan prevalensi stunting Kabupaten Bogor tahun 2022 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Gambar 2.49
Prevalensi Stunting Kabupaten Bogor
2022-2024

Meskipun capaian di atas sangat baik, upaya penurunan stunting tetap harus diperkuat karena kasus stunting masih ditemukan di fasilitas kesehatan. Sebagai bentuk intervensi strategis, RSUD Cibinong mengembangkan Inovasi PLASTIKAL (PeLAyanan Stunting dengan monitoring dan evaluasI tumbuh Kembang secara digitAL). Inovasi tersebut mengedepankan edukasi kesehatan, monitoring, dan evaluasi tumbuh kembang balita secara digital melalui aplikasi dan grup Telegram yang melibatkan tenaga medis lintas disiplin, kader posyandu, serta puskesmas. Melalui PLASTIKAL, orang tua dapat melakukan pemantauan tumbuh kembang anak secara mandiri dengan panduan KMS online, mendapatkan edukasi kesehatan berbasis multimedia, serta terhubung langsung dengan tenaga kesehatan untuk konseling lanjutan.

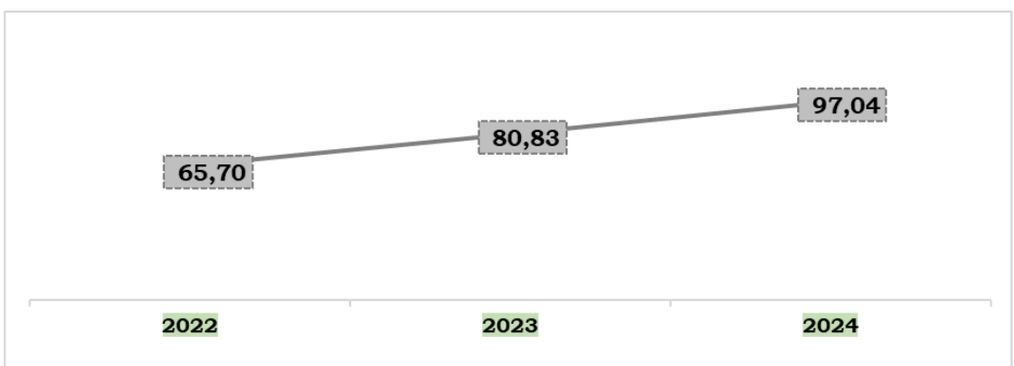
Dengan adanya inovasi ini, pencegahan stunting tidak hanya dilakukan melalui pelayanan kuratif di rumah sakit, tetapi juga diperluas ke tingkat keluarga dan masyarakat. Hal tersebut diharapkan mampu menjaga tren penurunan stunting di Kabupaten Bogor agar tetap konsisten, sekaligus mendorong tercapainya target zero stunting di masa mendatang.

3) Prevalensi Kekurangan Gizi *(Underweight)* pada Anak Balita

Selama tahun 2022-2024, prevalensi kekurangan gizi pada anak balita di Kabupaten Bogor cenderung menurun. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita di Kabupaten Bogor menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, prevalensi kekurangan gizi tercatat sebesar 4,9%, menurun cukup signifikan menjadi 3,04% pada tahun 2023, dan kembali sedikit menurun pada angka proyeksi menjadi 2,95% pada tahun 2024.

4) Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan

Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa cakupan di Kabupaten Bogor mencapai 97,04%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat 95,97% tetapi masih lebih rendah dari tingkat nasional 98,67%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bogor memiliki akses layanan jaminan kesehatan yang relatif baik di tingkat provinsi, namun ada ruang untuk perbaikan agar mencapai tingkat nasional. Selama tahun 2022-2024, proporsi peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Bogor cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, proporsi peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Bogor mencapai 65,7%. Kemudian, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 80,83%. Pada tahun 2024, proporsi peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Bogor kembali meningkat menjadi 97,04%. Perkembangan proporsi peserta jaminan kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2022 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, 2024

Gambar 2.50
Proporsi Perserta Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor 2022-2024

5) Angka Kematian Balita (AKBa), Angka Kematian Neonatal (AKN), dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Selama tahun 2022-2024, Angka Kematian Balita (AKBa) mengalami penurunan, Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung fluktuatif. Angka Kematian Balita (AKBa) di Kabupaten Bogor mengalami penurunan di tahun 2023 dari yang semula sebesar 0.9 menjadi 0.49 pada angka proyeksi tahun 2024. Angka Kematian Neonatal (AKN) mengalami fluktuatif mulai dari 0.8 pada tahun 2022 dan 0.5 pada tahun 2023. Kemudian menjadi 0.53 pada angka proyeksi tahun 2024. Angka Kematian Bayi (AKB) menurun dari yang semula 0.8 menjadi 0.6 di tahun 2023 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 dengan angka proyeksi 0.56.

6) Prevalensi HIV, Insiden Tuberkulosis, dan Kejadian Malaria

Jumlah kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kabupaten Bogor memiliki angka proyeksi pada tahun 2024 yaitu 24 kasus. Kemudian untuk Provinsi Jawa Barat dan Nasional belum ada update terbaru. Selama tahun 2022-2024, insiden tuberkulosis per 100000 mengalami penurunan. Kemudian penduduk prevalensi HIV dan kejadian malaria per 1000 orang pada populasi dewasa cenderung fluktuatif. Insiden tuberkulosis di Kabupaten Bogor menurun mulai dari 57 kasus pada tahun 2022 dan 32 kasus pada tahun 2023. Kemudian memiliki angka proyeksi pada tahun 2024 sebanyak 24 kasus. Adapun kejadian malaria pada tahun 2022 yaitu 12 kasus, pada tahun 2023 memiliki 29 kasus dan pada tahun 2024 memiliki angka proyeksi sebanyak 26 kasus. Sama halnya dengan prevalensi HIV mengalami fluktuatif dengan adanya penurunan angka menjadi 0.0046 di tahun 2022 yang disusul dengan peningkatan angka menjadi 0.0051 di tahun 2023 dan kemudian turun menjadi 0.0049 pada angka proyeksi tahun 2024.

Penurunan kasus tuberkulosis yang konsisten perlu diperkuat dengan strategi inovasi berbasis teknologi. Salah satu terobosan yang dikembangkan adalah *TB Care App*, yaitu aplikasi digital untuk memfasilitasi pencatatan, pemantauan, dan pendampingan pasien TB.

Berbeda dengan aplikasi pencatatan berbasis petugas kesehatan seperti SITB, *TB Care App* dirancang agar pasien dan keluarganya dapat terlibat langsung dalam memantau perkembangan pengobatan, mencatat efek samping harian, serta mendapatkan notifikasi jadwal kontrol. Melalui *TB Care App*, pasien dapat lebih disiplin dalam menjalani regimen pengobatan jangka panjang yang memerlukan konsistensi tinggi, sementara petugas kesehatan dapat lebih mudah memantau kepatuhan pasien, mengetahui efek samping yang muncul secara real time, serta memberikan intervensi lebih cepat jika terjadi masalah. Inovasi ini juga menjaga privasi pasien dengan fitur komunikasi call center berbasis aplikasi tanpa nomor pribadi.

7) Jumlah Penduduk yang dicakup Asuransi Kesehatan

Selama tahun 2022-2024, jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan per 1000 penduduk di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan. jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari yang semula sebesar 95% di tahun 2022 menjadi 100% di tahun 2023 dan tahun 2024 pada angka proyeksi.

8) Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas

Selama tahun 2022-2024, persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Kabupaten Bogor cenderung konstan. Persentase ketersediaan obat di Kabupaten Bogor cenderung konstan di angka 100% selama tahun 2022-2024.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1) Rata-Rata Lama Sekolah

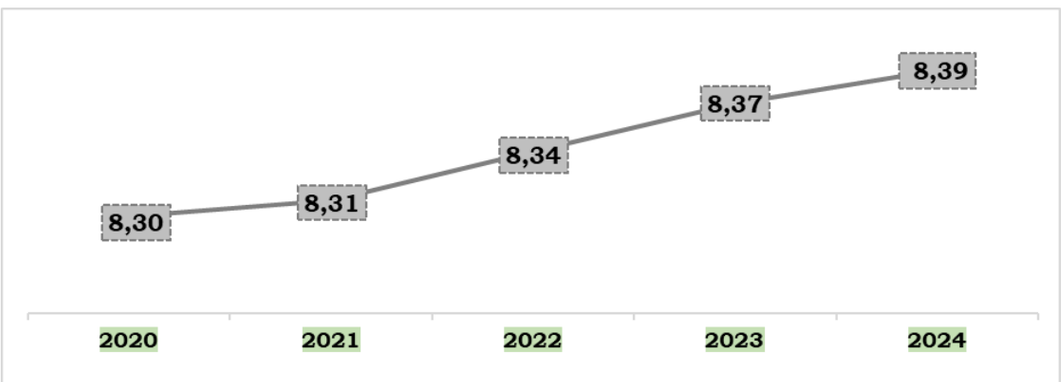
Komponen pembentuk IPM selain HLS dari sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Melalui ukuran ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan estimasi dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Akan

tetapi, jumlah tahun bersekolah ini belum memperhitungkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi (kelebihan estimasi) atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Bogor setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Tahun 2022 rata-rata lama sekolah Kabupaten Bogor berada di angka 8,34 tahun, kemudian pada 2023 mencapai 8,37 tahun, hingga pada tahun 2024 mencapai angka 8,39 tahun. Peningkatan rata-rata lama sekolah didukung oleh pembangunan infrastruktur pendidikan yang meningkat juga setiap tahunnya. Selain itu, kebijakan dari pemerintah dalam pemberian subsidi pendidikan turut mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah.

Meskipun terus mengalami peningkatan, rata-rata lama sekolah perlu menjadi perhatian khusus dalam meningkatkannya. Rata-rata lama sekolah di tahun 2024 sebesar 8,39 tahun artinya menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia dewasa telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 8 (SMP kelas 2) secara rata-rata, dan tidak mencapai wajib belajar 9 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Bogor tahun 2020 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



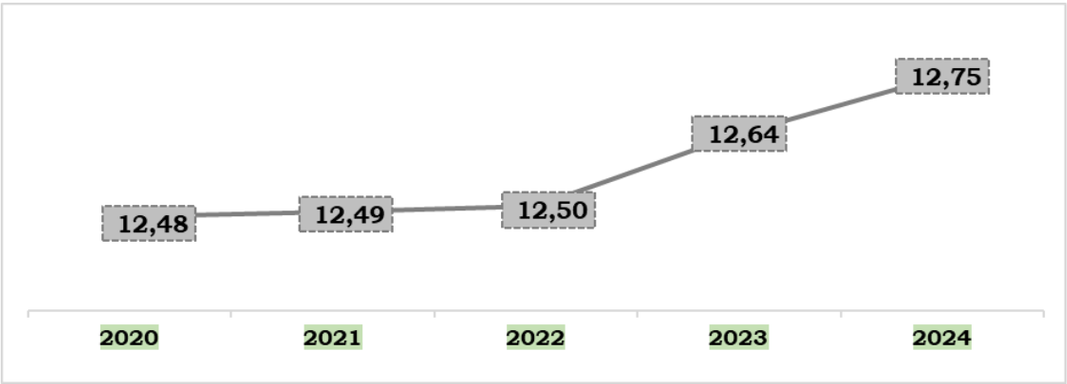
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.51
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bogor
2020-2024

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Sejalan dengan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Tahun 2020 harapan lama sekolah Kabupaten Bogor sebesar 12, 48 tahun, dan pada tahun 2024 menjadi 12,75 tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah ini menandakan adanya peluang besar bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi. Ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pendidikan dan infrastruktur yang memadai. Perkembangan harapan lama sekolah Kabupaten Bogor tahun 2020 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.52
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bogor
2020-2024

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pada tahun 2024 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) dan Angka Partisipasi Kasar SMP di Kabupaten Bogor berturut turut mencapai 97.49% dan 81.7%, masing-masing di bawah rata-rata Jawa Barat sebesar 104.5% dan 94.6% serta rata rata nasional sebesar 106.% pada Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD). Selama tahun 2022-2024, persentase APK SD cenderung fluktuatif, sementara

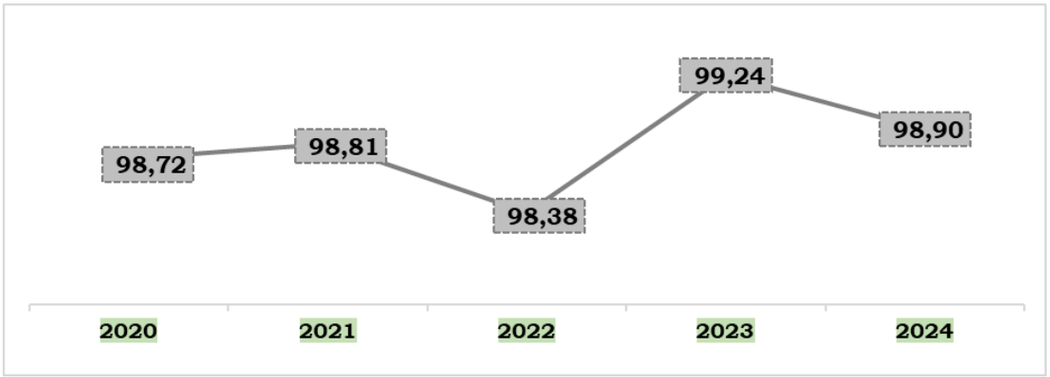
persentase APK SMP mengalami peningkatan. Persentase APK SD mengalami penurunan pada tahun 2022 dari yang semula 97.48% menjadi 94.56%, sementara tahun 2023 terjadi peningkatan angka menjadi 97.5%. Sementara itu, persentase APK SMP terus mengalami peningkatan selama tahun 2021-2023 dari sebesar 93.16% menjadi 93.18%.

4) Rasio APM SD dan Rasio APK SMP

Rasio Angka Partisipasi Murni SD dan SMP kabupaten Bogor pada tahun 2023 berturut-turut memiliki 89.35% dan 92.07%.masing-masing lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat sebesar 98.20% dan 83.61%, dan rata-rata nasional sebesar 97.89% dan 81.35%. Dengan demikian, rasio APM SD dan SMP Kabupaten Bogor belum cukup untuk melampaui rata-rata Jawa Barat dan nasional. Selama tahun 2021-2023, Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD; SMP; SMA/K; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, rasio tersebut tercatat sebesar 89,35%, meningkat menjadi 89,58% pada tahun 2023, dan naik lagi menjadi 89,90% pada angka proyeksi tahun 2024.

5) Angka Melek Aksara

Persentase angka melek aksara tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki tingkat melek aksara sebesar 98,90%. Angka ini cenderung mengalami fluktuasi. Pada 2022 angka melek aksara mengalami penurunan, kemudian kembali meningkat di 2023. Kemudian pada 2024 kembali menurun dari 99,245 menjadi 98,90%. Penurunan di 2024 disebabkan oleh belum meratanya akses pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan, perlu ditingkatkan kembali peningkatan pendidikan untuk anak usia dini. Perkembangan angka melek aksara Kabupaten Bogor tahun 2020 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.53
Angka Melek Aksara Kabupaten Bogor
2020-2024

D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

1) Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan PKH

Selama tahun 2022-2024, jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bogor cenderung fluktuatif. pada tahun 2022 jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan PKH di Kabupaten Bogor terdapat 125.767 jiwa, meningkat menjadi 132.466 jiwa pada tahun 2023, namun kemudian menurun signifikan menjadi 113.232 rumah tangga pada tahun 2024.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1) Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama. Pada tahun 2021 indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Bogor adalah 96,58 poin, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 82,83 poin. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan toleransi sebagai salah satu variabel membentuknya. Pemanfaatan isu agama untuk kepentingan tertentu dapat menyebabkan indeks kerukunan umat beragama menurun. Pada tahun 2023, indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Bogor kembali menurun menjadi 82,73 poin.

2) Pelestarian Kebudayaan

Kebudayaan di Kabupaten Bogor sangatlah beragam yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Jenis kebudayaan di

Kabupaten Bogor didominasi oleh lembaga kesenian dan objek diduga cagar budaya. Jenis kebudayaan di Kabupaten Bogor terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Jenis Kebudayaan di Kabupaten Bogor

NO	JENIS KEBUDAYAAN	JUMLAH
1	LEMBAGA PENDIDIKAN	17
2	MANUSKRIP	11
3	TRADISI LISAN	8
4	DONGENG/CERITA RAKYAT/FOLKLOR	6
5	ADAT ISTIADAT	14
6	RITUS	8
7	MAKANAN	27
8	PENGOBATAN	4
9	KEAHLIAN	2
10	PERTANIAN	5
11	PRANATA WAKTU (NEPTU)	2
12	TEKNOLOGI TRADISIONAL	11
13	PERMAINAN RAKYAT	52
14	OLAH RAGA TRADISIONAL	16
15	KESENIAN	67
16	BAHASA	4
17	LEMBAGA KESENIAN	333
19	CAGAR BUDAYA	72
20	ODCB/OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	145
JUMLAH KESELURUHAN		**804**

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2025

Berdasarkan tabel di atas, lembaga kesenian yang mendominasi jumlah kebudayaan di Kabupaten Bogor dapat menjadi pusat produksi karya budaya.

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

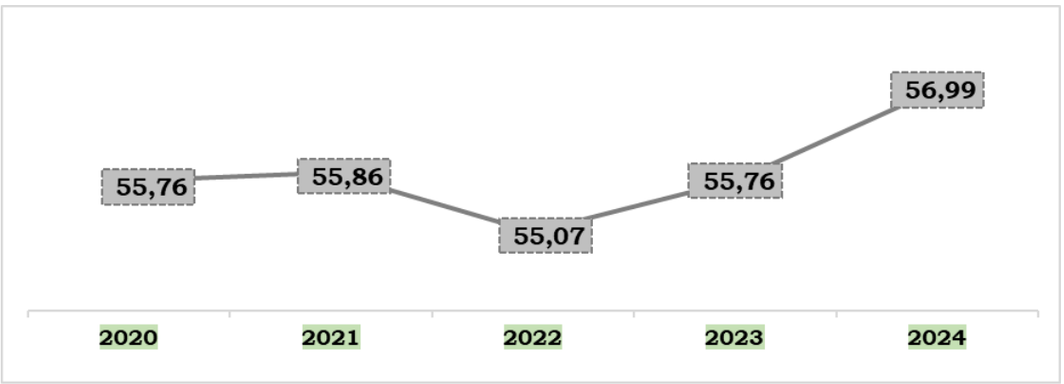
1) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks pemberdayaan gender merupakan gambaran sejauh mana ketimpangan antara laki-laki dan perempuan semakin besar, menunjukkan bahwa perempuan lebih sulit mengakses sumber daya, layanan kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi serta politik.

Indeks pemberdayaan gender pada tahun 2020 sebesar 55,76 poin. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 55,86 poin, dan pada tahun 2022 menurun 55,07 poin. Penurunan partisipasi perempuan di pendidikan tinggi, dikarenakan faktor ekonomi. Kemudian di 2023 kembali meningkat menjadi 55,76 dan di 2024 sebesar 56,99 poin.

Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, khususnya dalam aspek peran perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Salah satu hal yang mendukung pemberdayaan gender ini adalah peningkatan partisipasi perempuan dan angkatan kerja. Dukungan terhadap kewirausahaan perempuan, pelatihan keterampilan kerja, serta perluasan akses terhadap pembiayaan usaha mikro dan kecil, telah mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Hal ini turut memperkuat peran perempuan dalam mendukung perekonomian keluarga.

Peningkatan yang terjadi juga dipengaruhi oleh perempuan sebagai tenaga profesional yang kembali meningkat. Meningkatnya indeks pemberdayaan gender ini artinya semakin banyak perempuan yang duduk di kursi parlemen, menjadi pejabat publik, atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, perempuan semakin memiliki akses terhadap pekerjaan formal, posisi kepemimpinan di perusahaan, dan penghasilan yang lebih setara dengan laki-laki. Perkembangan indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Bogor pada tahun 2020 sampai 2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

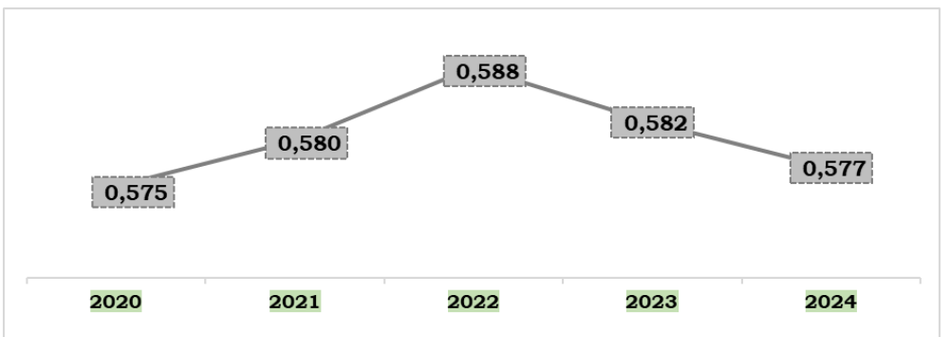
Gambar 2.54
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bogor
2020-2024

2) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender mengukur sejauh mana ketimpangan gender berdampak pada pencapaian keberhasilan pembangunan

dalam tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Indeks ketimpangan gender di Kabupaten Bogor terus mengalami penurunan hingga tahun 2024. Pada tahun 2021, indeks ketimpangan gender Kabupaten Bogor meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 0,580 poin. Di tahun 2022, ketimpangan gender kembali meningkat menjadi 0,588 poin. Hal yang berbeda terjadi di 2023 dan 2024, dimana terjadi penurunan di 2023 menjadi 0,582 poin. Kemudian pada 2024, kembali mengalami penurunan menjadi 0,577 poin.

Penurunan ini mencerminkan semakin kecilnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Beberapa faktor utama yang mendorong penurunan ketimpangan gender ini antara lain, meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan angkatan kerja, bertambahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik dan politik, serta membaiknya akses layanan kesehatan bagi perempuan, khususnya terkait kesehatan ibu dan reproduksi. Selain itu, berbagai program pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dijalankan secara kolaboratif oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra pembangunan turut mempercepat pencapaian kesetaraan gender secara nyata di Kabupaten Bogor. Perkembangan indeks ketimpangan gender Kabupaten Bogor tahun 2020 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.55
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Bogor
2020-2024

3) Kebijakan Responsif Gender dan Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Selama tahun 2022-2024, jumlah kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan dan prevalensi kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bogor cenderung fluktuatif. Jumlah kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bogor menurun pada tahun 2022 dari yang semula sebesar 30% menjadi 32% pada tahun 2023. Kemudian turun menjadi 31% pada angka proyeksi tahun 2024. Prevalensi kekerasan perempuan dan anak juga mengalami fluktuatif dari yang semula sebanyak 198 pada tahun 2022 menjadi 205 di tahun 2023 dan 204 pada angka proyeksi di tahun 2024.

4) Proporsi Kursi Perempuan di Parlemen dan Legislatif

Pada tahun 2024, proporsi perempuan di parlemen (tingkat pusat dan daerah) Kabupaten Bogor sebesar 12% pada angka proyeksi. Namun, pada Provinsi Jawa Barat dan Nasional belum ada update terbaru. Selama tahun 2021-2023, proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen (tingkat pusat dan daerah) mengalami penurunan, sementara di tingkat legislatif cenderung konstan. Terjadi penurunan angka proporsi kursi perempuan di parlemen dari yang semula sebesar 15% di tahun 2021 menjadi 12% di tahun 2022 dan 2023. Sementara itu, proporsi kursi perempuan di legislatif cenderung konstan di angka 49% selama tahun 2021-2022.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing *(competitiveness)* merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kondisi daerah Kabupaten Bogor terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

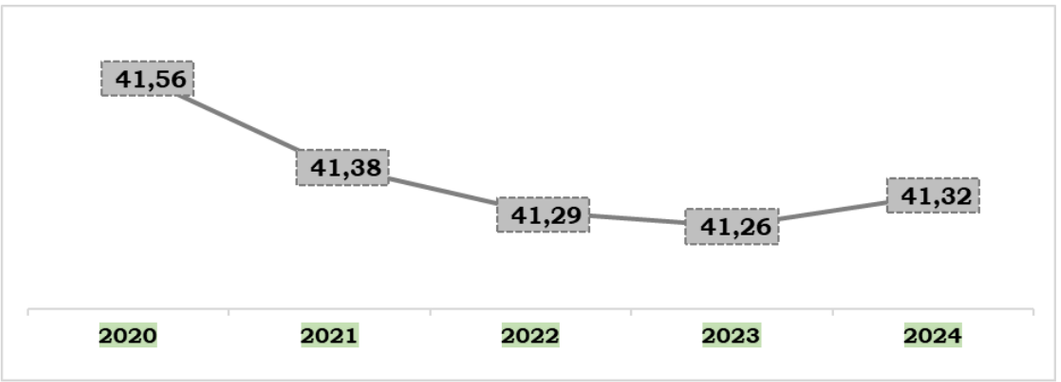
A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1) Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia) dengan jumlah penduduk usia produktif (orang dewasa). Diketahui bahwa penduduk Kabupaten Bogor menuju ke arah penduduk usia produktif. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun dan 15-64 tahun yang mendominasi kelompok usia lainnya.

Rasio ketergantungan anak di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 sebesar 34,11 persen, dan rasio ketergantungan lanjut usia sebesar 7,21 persen atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Bogor sebesar 41,32 persen. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bogor harus menanggung sebanyak 42 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Angka ini cenderung mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana tahun 2020 berada di angka 41,56 persen, kemudian tahun 2021 turun menjadi 41,38 persen, pada 2022 menjadi 41,29 hingga 2023 sebesar 41,26 persen. Namun, pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 41,32 persen. Meningkatnya angka ketergantungan ini harus diantisipasi terutama kebutuhan sarana prasarana pendidikan bagi penduduk usia sekolah. Tantangan lainnya adalah penduduk usia produktif harus memiliki keterampilan agar tidak kehilangan pendapatan. Perkembangan angka ketergantungan Kabupaten Bogor 2020 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



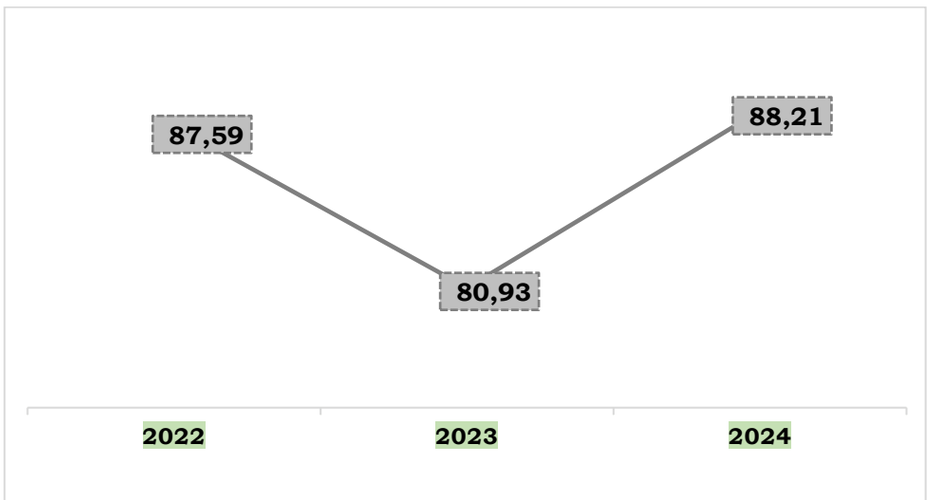
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.56
Angka Ketergantungan Kabupaten Bogor
2020-2024

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1) Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan gambaran bagaimana pelaksanaan inovasi di Pemerintahan Daerah. Inovasi ini tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik kepada masyarakat. Daerah yang inovatif akan terlihat dari kemajuan pembangunan yang dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nilai Indeks Inovasi Daerah yang telah dicapai oleh Kabupaten Bogor pada tahun 2023 adalah sebesar 80,93 poin. Capaian indeks inovasi daerah di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 87,59. Penurunan ini terjadi dikarenakan terdapat inovasi yang tidak berjalan secara optimal. Kemudian pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 88,21 dengan kategori sangat inovatif. Perkembangan indeks inovasi daerah Kabupaten Bogor 2022 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Bappedalitbang, 2024

Gambar 2.57
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bogor
2022-2024

2) Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Sebagaimana diketahui bahwa sektor perindustrian di Kabupaten Bogor merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bogor. Kontribusi sektor industri pengolahan lebih dari 50 persen dari PDRB Kabupaten Bogor. Namun kontribusi industri pengolahan ini semakin menurun hingga

tahun 2024, meskipun secara nilai mengalami pertumbuhan. Kontribusi pada tahun 2020 sebesar 53,72 persen, hingga tahun 2024 berada di angka 51,65 persen. Hal ini disebabkan terjadi pergeseran ekonomi dari sektor industri pengolahan ke sektor jasa, seperti perdagangan, pariwisata, dan teknologi informasi. Meski demikian, kontribusi sektor industri pengolahan tetap menempati porsi terbesar dalam PDRB Kabupaten Bogor. Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bogor 2020 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.

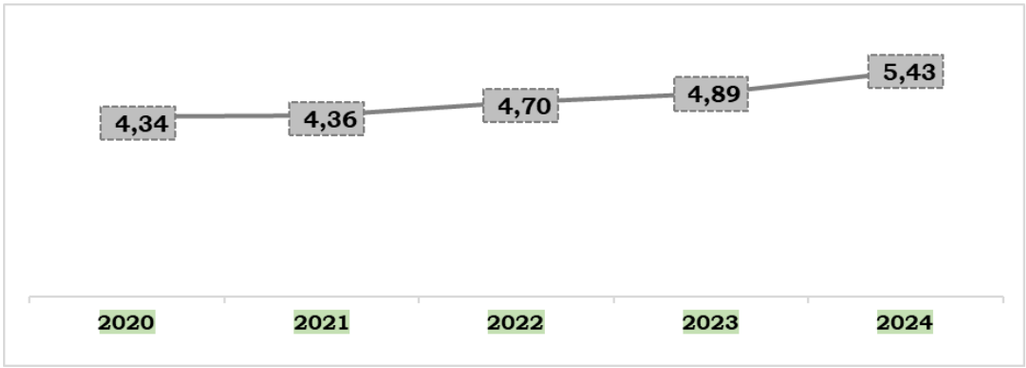


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.58
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Bogor
2020-2024

3) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor memperlihatkan trend yang positif hingga tahun 2024. Tahun 2020 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor sebesar 4,34 persen, pada tahun 2021 sebesar 4,36 persen, tahun 2022 sebesar 4,70 persen, tahun 2023 sebesar 4,90 persen dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 5,43 persen. Kenaikan pada tahun 2024 didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor yang semula pada tahun 2023 sebesar 12.803.678 wisatawan meningkat 26,97 persen menjadi 16.256.354 wisatawan. Perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor 2020 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

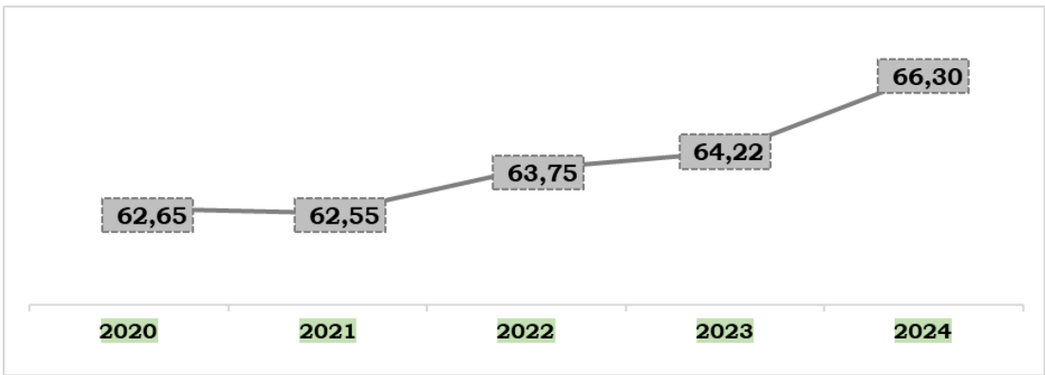
Gambar 2.59
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
Kabupaten Bogor
2020-2024

Untuk mempertahankan tren kenaikan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meluncurkan inovasi EKABO (Elektronik Kabogor Pariwisata) yaitu aplikasi berbasis digital/web-based yang berfungsi sebagai sistem informasi pemasaran pariwisata. Aplikasi tersebut menyediakan informasi terpadu mengenai destinasi wisata, event budaya, dan potensi ekonomi kreatif, sehingga memudahkan wisatawan dalam mengakses informasi secara cepat, akurat, dan *real-time*. Selain menjadi media promosi digital yang efektif, EKABO juga melibatkan peran aktif pelaku usaha pariwisata, komunitas budaya, dan ekonomi kreatif dalam memperkenalkan produknya, sehingga memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar destinasi wisata.

4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi Angkatan kerja menggambarkan seberapa besar penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bogor hingga tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bogor sebesar 62,65 persen, kemudian pada 2021 menurun menjadi 62,55 persen. Penurunan ini disebabkan dampak dari pandemi covid-19. pada tahun 2022 yang merupakan pasca pandemi, tingkat partisipasi angkatan kerja kembali meningkat menjadi 63,75 persen, kemudian meningkat di tahun 2023

menjadi 64,22 persen, dan di tahun 2024 meningkat secara signifikan kembali mencapai 66,30 persen. Hal ini berarti penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi semakin meningkat. Peningkatan ini seiring dengan bonus demografi yang dialami Kabupaten Bogor yang memiliki banyak penduduk di usia produktif. Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja 2020 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.60
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bogor
2020-2024

5) Koperasi

Dalam rangka mendukung pembentukan koperasi merah putih desa/kelurahan, di Kabupaten Bogor sebanyak 20 Kecamatan atau 50 persen telah selesai melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), 17 Kecamatan atau 42,5 persen belum melaksanakan Musdesus dan 3 Kecamatan atau 7,5 persen sedang melaksanakan Musdesus. Hingga tahun 2024, kondisi koperasi aktif di Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Bogor adalah 823 unit, jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan 2023 yaitu sejumlah 730 dan 778 unit.

C. Transformasi Digital

1) Indeks Smart City

Gambaran mengenai transformasi digital salah satu indikator yang digunakan adalan indeks smart city. Indeks smart city menggambarkan bagaimana suatu daerah mengimplementasikan teknologi dalam pelayanan publik sehinga mendorong situasi yang

kondusif dan nyaman bagi masyarakat. Pada tahun 2023 indeks smart city Kabupaten Bogor sebesar 3,10 poin. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,05 poin dari tahun 2022 yang mencapai 3,15 poin. Untuk kembali meningkatkan nilai smart city Kabupaten Bogor terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya pemerataan jaringan infrastruktur teknologi dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Pengembangan layanan digital yang memudahkan warga dalam mengakses informasi dan administrasi.

D. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1) Wilayah Pengembangan

Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bogor dibagi ke dalam 3 (tiga) wilayah Pengembangan. Kabupaten Bogor diarahkan menjadi 3 Wilayah Pengembangan (WP) yang terdiri atas WP Bogor Barat, WP Bogor Tengah dan WP Bogor Timur, dengan 10 Sub Wilayah Pengembangan (SWP). Penetapan Wilayah Pengembangan harus disinkronisasikan agar tercipta pembangunan yang terpadu, seimbang, dan selaras antar kawasan dengan memperhatikan aspek ekonomi, karakteristik wilayah dan masyarakat yang terdiri atas:

a. WP Barat sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah barat dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, pertambangan dan energi, pendidikan dan penelitian, penyediaan sistem pengolahan air minum, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, serta pariwisata dan budaya. WP Barat terdiri dari 4 (empat) Sub Wilayah Pengembangan, meliputi:

- Sub Wilayah Pengembangan Cigudeg terdiri dari Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Nanggung;
- Sub Wilayah Pengembangan Parungpanjang terdiri dari Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Rumpin;

- Sub Wilayah Pengembangan Leuwiliang terdiri dari Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Leuwisadeng dan Kecamatan Pamijahan; dan
- Sub Wilayah Pengembangan Dramaga terdiri dari Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciampea, dan Kecamatan Tenjolaya.

b. WP Tengah sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah tengah dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat pemerintahan dan penelitian, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum dan sosial, industri ramah lingkungan, perikanan, konservasi wilayah hulu, penyediaan sistem pengolahan air minum, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, dan pariwisata dan budaya. WP Tengah terdiri dari 4 (empat) Sub Wilayah Pengembangan, meliputi:

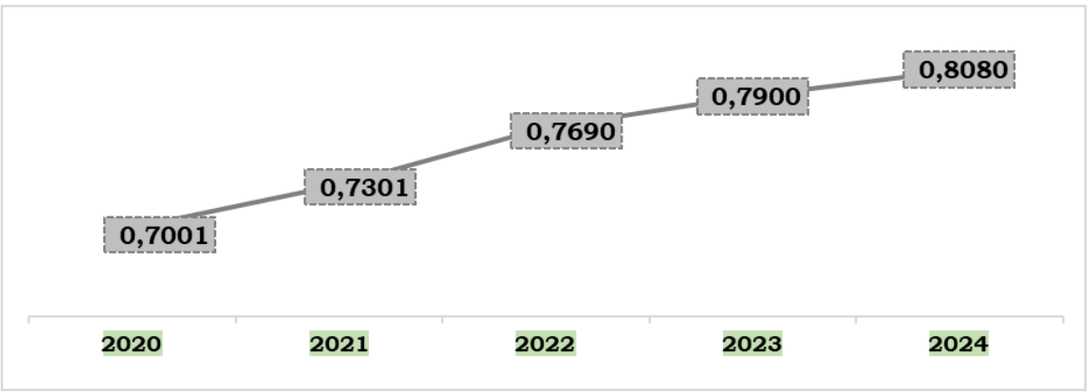
- Sub Wilayah Pengembangan Cibinong yang terdiri dari Kecamatan Cibinong, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Citeureup, dan Kecamatan Tajurhalang;
- Sub Wilayah Pengembangan Parung yang terdiri dari Kecamatan Parung, Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Rancabungur, dan Kecamatan Gunungsindur;
- Sub Wilayah Pengembangan Cigombong yang terdiri dari Kecamatan Cigombong, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Ciomas; dan
- Sub Wilayah Pengembangan Ciawi yang terdiri dari Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung.

c. WP Timur sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah timur dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, pertambangan dan energi, penyedian sistem pengolahan air minum, pengolahan sampah dan limbah, transportasi dan pergudangan, dan pariwisata. WP Timur terdiri dari 2 (dua) Sub Wilayah Pengembangan, meliputi:

- Sub Wilayah Pengembangan Cileungsi yang terdiri dari Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunungputri dan Kecamatan Klapanunggal; dan
- Sub Wilayah Pengembangan Jonggol yang terdiri dari Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur, dan Kecamatan Tanjungsari.

2) Indeks Desa Membangun

Indeks desa membangun merupakan gambaran status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Indeks desa membangun Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 indeks desa membangun Kabupaten Bogor sebesar 0,7001 poin, kemudian pada tahun 2024 sebesar 0,808 poin. Peningkatan indeks desa membangun didorong oleh peningkatan persentase desa mandiri di Kabupaten Bogor. Persentase desa mandiri tahun 2022 sebesar 22,84 persen, kemudian tahun 2023 meningkat menjadi 24,04 persen, dan tahun 2024 menjadi 41,11 persen. Seperti pada gambar grafik berikut ini. Perkembangan indeks desa membangun Kabupaten Bogor 2020 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



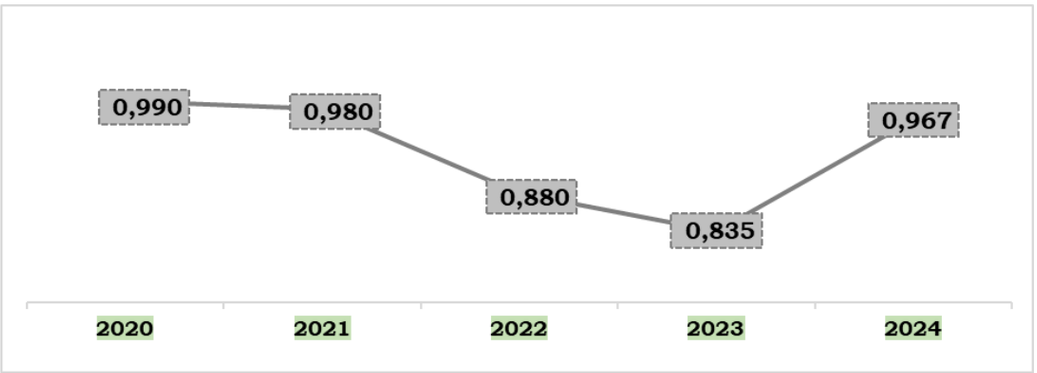
Sumber: Kementerian Desa, 2024

Gambar 2.61
Indeks Desa Membangun Kabupaten Bogor
2020-2024

3) Indeks Williamson

Indeks Williamson adalah sebuah instrumen untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dengan kata lain, indeks ini mengukur seberapa besar perbedaan atau kesenjangan yang ada

dalam pembangunan antar wilayah. Ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Bogor cenderung menurun hingga tahun 2023. Namun hal yang berbeda terjadi di tahun 2024 yang mengalami peningkatan menjadi 0,967. Peningkatan pada tahun 2024 menunjukan perlu perhatian khusus dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor. Perkembangan indeks Williamson Kabupaten Bogor 2020 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Bappedalitbang, 2024

Gambar 2.62
Indeks Williamson Kabupaten Bogor
2020-2024

4) Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi merupakan indikator penting dalam pembangunan yang mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap energi listrik. Rasio elektrifikasi tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan pemerataan infrastruktur energi, tetapi juga menjadi penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, rasio elektrifikasi Kabupaten Bogor pada triwulan III tahun 2024 mencapai 99,99 persen. Capaian ini didukung oleh jumlah rumah tangga berlistrik dari PLN sebanyak 16.631.381 rumah tangga, dan yang non PLN sebanyak 717 rumah tangga. Hal ini menunjukan bahwa masih terdapat rumah tangga yang memerlukan akses listrik dari PLN.

E. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi yang sangat penting untuk menjaga kesinambungan fiskal, stabilitas moneter, dan sektor

keuangan dalam mendukung kebijakan yang pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Dalam konteks Kabupaten Bogor, stabilitas ekonomi makro ini dapat dilihat melalui beberapa indikator yang mencerminkan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta bagaimana daerah ini dapat mengelola sumber daya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan mengenai stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Bogor, serta indikator-indikator yang relevan:

1) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah perbandingan antara Pajak Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio ini dapat menggambarkan tingkat pengaruh Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan PDRB masyarakat di wilayah tersebut. Antara tahun 2020-2024, Kabupaten Bogor memiliki rata-rata Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sebesar 5,26% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,80%, artinya peningkatan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor menghadirkan sejumlah inovasi digital, seperti aplikasi Lapor Pak (Pelaporan Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), B-Tax 2.0, dan Sioboi Lumpat Strategi (Kolaborasi Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)) Aplikasi Lapor Pak berfungsi sebagai platform pelaporan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh desa/kelurahan secara cepat, detail, dan real-time, sehingga basis data penerimaan dapat tergali secara lebih luas. Inovasi ini diperkuat dengan B-Tax 2.0, yaitu sistem pengolahan dan integrasi data potensi pajak yang mampu memetakan kapasitas usaha, harga, lama operasional, serta variabel lain untuk menghasilkan proyeksi penerimaan yang lebih akurat dan dinamis.

Sementara itu, inovasi Sioboi Lumpat hadir untuk menjawab tantangan pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB yang memiliki kompleksitas tinggi. Melalui integrasi aplikasi, sistem

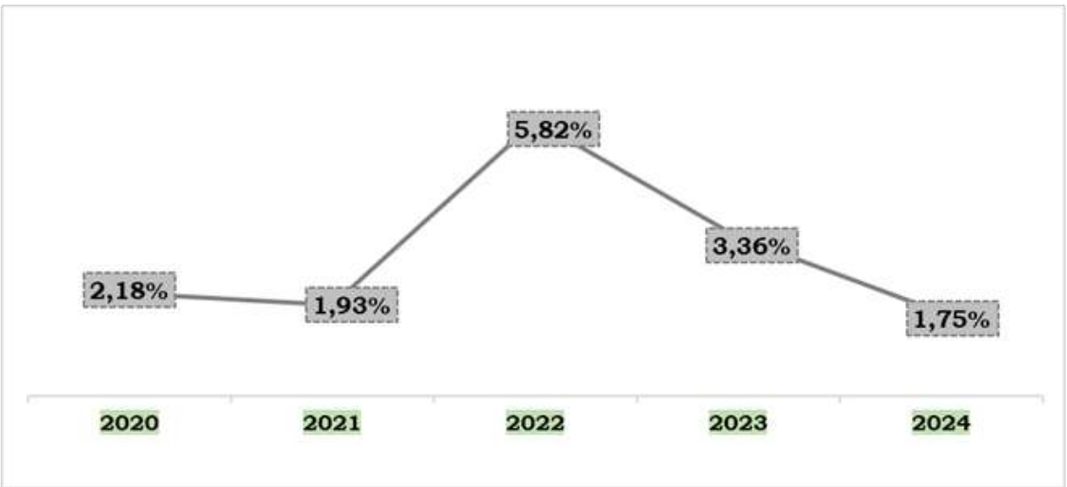
tersebut mendorong transparansi data antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekaligus memperkuat regulasi, pengawasan, serta kolaborasi dalam pemungutan Pajak MBLB. Dengan adanya Sioboi Lumpat, potensi penerimaan Pajak MBLB dapat tergali lebih optimal, akuntabel, dan berdampak pada peningkatan realisasi Opsen Pajak MBLB.

Sinergi antara Lapor Pak, B-Tax 2.0, dan Sioboi Lumpat membentuk satu ekosistem digital perpajakan daerah yang komprehensif. Lapor Pak memperluas basis data melalui partisipasi desa, B-Tax 2.0 mengolah dan mengintegrasikan data potensi secara komprehensif, sedangkan Sioboi Lumpat mengoptimalkan pengelolaan Pajak MBLB melalui kolaborasi lintas pemerintah. Hal tersebut, tidak hanya meningkatkan akurasi dan efisiensi pemungutan pajak, tetapi juga memperkuat penerimaan daerah, memperbesar alokasi BHPRD bagi desa/kelurahan, dan pada akhirnya menopang stabilitas ekonomi makro yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

2) Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi adalah indikator yang mengukur laju kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam ekonomi. Inflasi yang terkendali sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan menghindari ketimpangan sosial ekonomi. Di Kabupaten Bogor, yang memiliki basis ekonomi yang besar di sektor pertanian dan pariwisata, fluktuasi harga barang konsumsi seperti bahan pangan dan bahan bakar dapat mempengaruhi inflasi lokal. Tingginya permintaan di daerah wisata seperti Puncak juga dapat berpengaruh pada harga barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Peran dalam Stabilitas Ekonomi: Inflasi yang terkendali memastikan daya beli masyarakat tetap stabil, serta mendukung kestabilan ekonomi makro dalam jangka panjang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang menghitung Laju Inflasi Gabungan 7 (tujuh) Kota di Jawa Barat, dimana Kabupaten Bogor merujuk pada inflasi Kota Bogor yang tercatat tahun 2024 inflasi Kabupaten Bogor sebesar 1,75 persen. Angka ini mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya 3,36 persen. Laju inflasi Kabupaten Bogor dari tahun 2020 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.

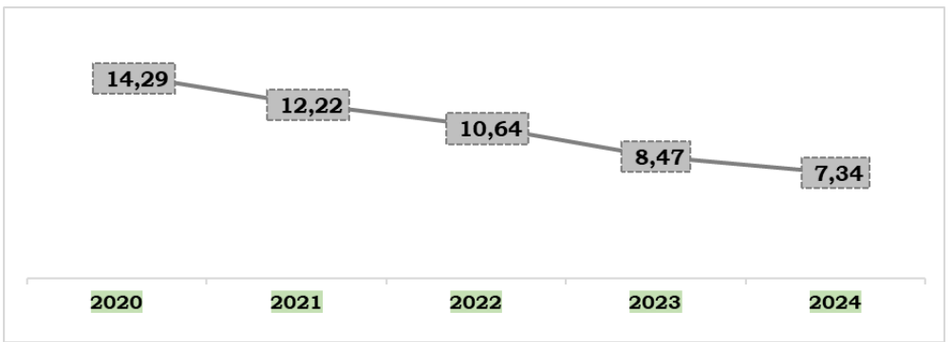


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.63
Inflasi Kabupaten Bogor
2020-2024

3) Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran merupakan indikator penting dalam mengukur kesehatan ekonomi daerah. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor terus mengalami penurunan signifikan hingga tahun 2024. Pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bogor mencapai 10,64 persen, tahun 2023 sebesar 8,47 persen dan di tahun 2024 semakin menurun menjadi 7,34 persen. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan dalam pengurangan pengangguran yang cukup baik. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini dapat menunjukkan kondisi ekonomi daerah yang relatif lebih baik dan peluang kerja yang lebih tinggi. Meski demikian, upaya untuk mempertahankan tren positif ini perlu terus dilakukan, terutama dengan memperkuat sektor ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bogor tahun 2020 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.64
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bogor
2020-2024

4) Rasio Belanja Modal terhadap Anggaran Daerah

Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB adalah perbandingan antara Belanja Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio ini menggambarkan kontribusi Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan PDRB melalui kebijakan Belanja Daerah. Antara tahun 2020-2024, Kabupaten Bogor memiliki rata-rata Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB sebesar 19,36% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,20%, artinya Pemerintah Kabupaten Bogor dapat memanfaatkan sumber daya fiskal menjadi kebijakan Belanja Daerah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

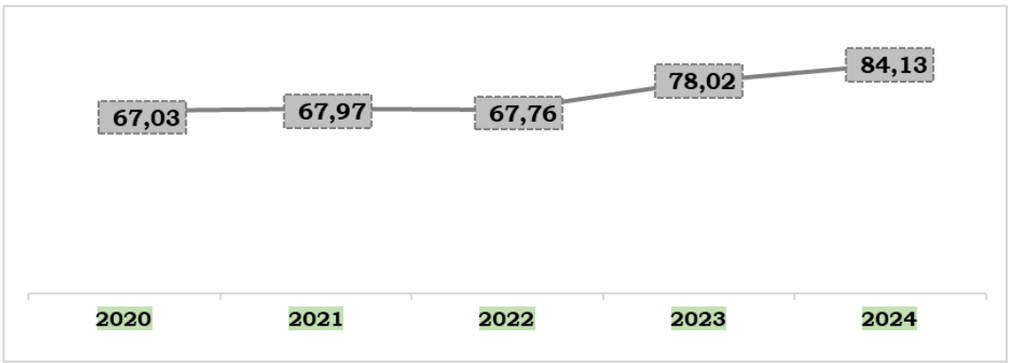
Aspek pelayanan umum merupakan aspek yang menggambarkan kinerja kewenangan konkuren daerah berdasarkan urusan/bidang urusan yang menjadi bagian penting dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah. Aspek pelayanan umum diuraikan sebagai berikut:

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi merupakan ukuran yang menggambarkan tata kelola pemerintahan di suatu instansi. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bogor mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. pada tahun 2023 dan 2024 terjadi kenaikan yang signifikan terhadap indeks reformasi birokrasi yang didorong oleh kebijakan startegis dan perbaikan berbagai aspek

birokrasi. Digitalisasi dan peningkatan pelayanan publik ikut mendukung peningkatan indeks reformasi birokrasi. Perkembangan indeks reformasi birokrasi tahun 2020 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, 2024

Gambar 2.65
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bogor
2020-2024

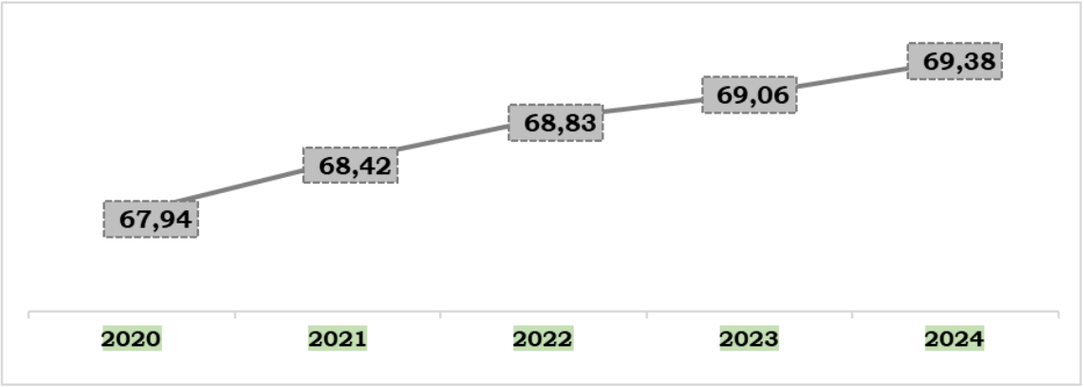
2) Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum memberikan gambaran mengenai kondisi reformasi hukum di Pemerintahan Daerah berdasarkan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan serta penguatan sistem regulasi nasional. Pada tahun 2024, indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bogor mencapai 99,82 poin

3) Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah kerangka kerja yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia untuk mengukur dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. SAKIP menjadi alat untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara berorientasi pada hasil (*outcome*) yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada tahun 2020 nilai SAKIP Kabupaten Bogor sebesar 67,94 poin, dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 menjadi 69,38 poin. Peningkatan nilai SAKIP ini menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Bogor tahun 2020 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, 2024

Gambar 2.66
Nilai SAKIP Kabupaten Bogor
2020-2024

4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan indeks SPBE mencerminkan perbaikan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik

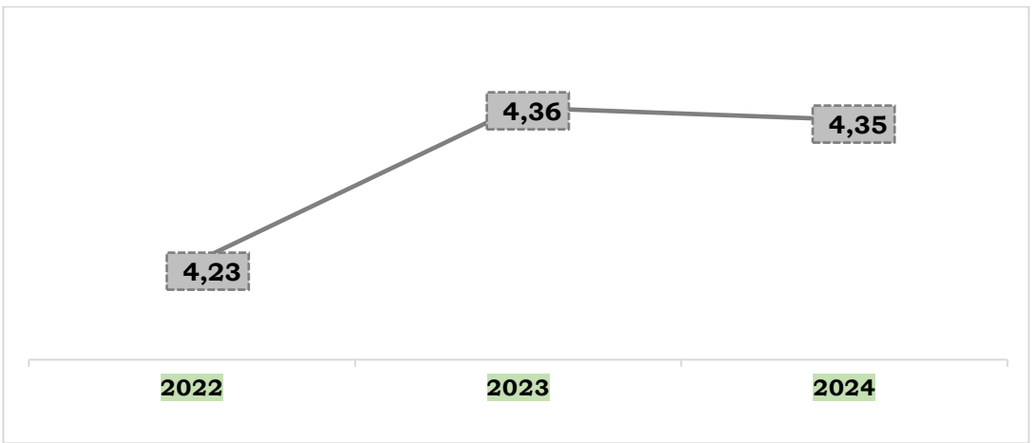
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dengan layanan berkualitas, diantaranya adalah melalui pelaksanaan pelayanan publik berbasis elektronik, Kabupaten Bogor mengalami peningkatan indeks SPBE, dimana pada tahun 2023 mendapatkan nilai sebesar 3,71 kemudian meningkat di 2024 menjadi 4,1 poin pada skala 1-5 yang berarti bahwa, telah masuk dalam kategori baik. Peningkatan ini didukung oleh adanya infrastruktur teknologi yang semakin baik.

5) Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan pemantauan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Indeks pelayanan publik Kabupaten Bogor tahun 2022 mendapatkan nilai 4,23 poin, kemudian meningkat pada tahun 2023

menjadi 4,36 poin, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 4,35 poin. Dengan menurunnya indeks pelayanan publik pada tahun 2024, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk kembali meningkatkan nilai indeks pelayanan publik seperti peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi dan informasi serta penyederhanaan prosedur. Perkembangan indeks pelayanan publik Kabupaten Bogor terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, 2024

Gambar 2.67
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bogor
2022-2024

6) Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan merupakan gambaran kualitas kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pemda pada proses perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan. Indeks kualitas kebijakan Kabupaten Bogor pada tahun 2023 sebesar 90,53. Nilai ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari sebelumnya di tahun 2021 mendapatkan nilai sebesar 38,95 poin.

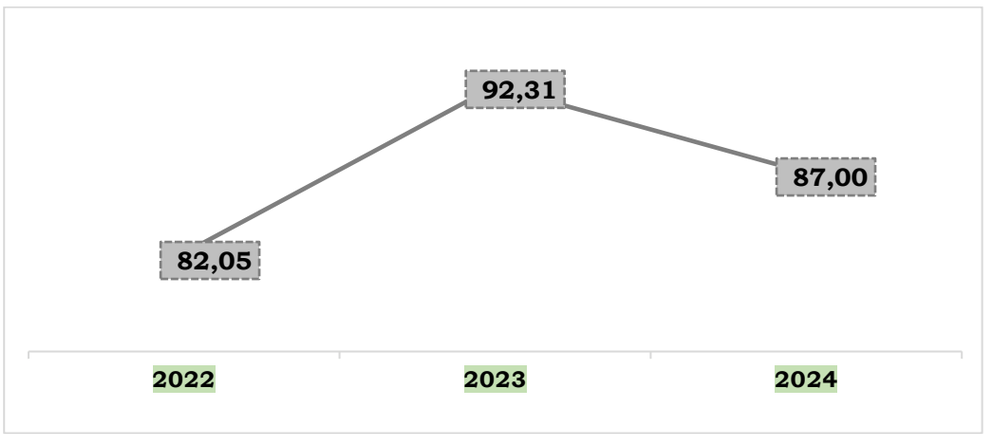
Peningkatan ini didorong oleh adanya peningkatan dalam proses penyusunan kebijakan hingga evaluasi kebijakan. Untuk meningkatkan indeks kualitas kebijakan perlu diperhatikan beberapa hal diantaranya peningkatan dukungan pengkajian/analisis/telaah kebijakan dalam perumusan kebijakan, pelibatan stakeholder dalam proses kebijakan secara lebih representatif termasuk dengan kelompok stakeholder di luar instansi dan kelompok rentan di lapangan, meningkatkan intensitas komunikasi kebijakan kepada seluruh stakeholder sasaran kebijakan. Peningkatan intensitas monitoring

kebijakan untuk memastikan ketercapaian tujuan kebijakan atau keselarasan implementasi kebijakan dalam penyelesaian masalah kebijakan yang menjadi latar belakang kebijakan.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1) Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada

Tingkat kepatuhan Perda dan Perkada Kabupaten Bogor semakin baik, dimana pada tahun 2022 mencapai 82,05 persen kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 92,31 persen. Peningkatan kepatuhan menandakan semakin meningkatnya masyarakat yang mematuhi perda dan perkada. Dengan demikian maka dapat menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini tergambar pada penurunan gangguan trantibum di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 sebesar 87 persen. Perkembangan tingkat kepatuhan Perda dan Perkada Kabupaten Bogor terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Bappedalitbang, 2024

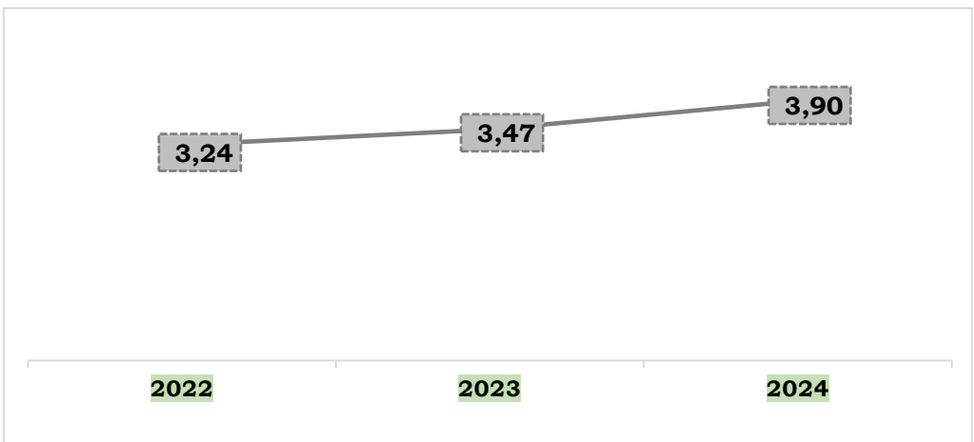
Gambar 2.68
Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada Kabupaten Bogor 2022-2024

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1) Indeks Daya Saing Daerah

Indeks daya saing daerah menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas dilihat dari 4 (empat) pilar yaitu lingkungan, sumber daya manusia, ekosistem inovasi dan pasar. Indeks daya saing daerah Kabupaten Bogor terus

mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada tahun 2022 skor indeks daya saing daerah Kabupaten Bogor berada di angka 3,24 poin, kemudian meningkat menjadi 3,47 poin, hingga di tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 3,90 poin. Perkembangan indeks daya saing daerah Kabupaten Bogor terdapat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Gambar 2.69
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bogor
2022-2024

D. Kinerja setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Penghitungan kinerja urusan merupakan bagian dari sistem evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan setiap urusan pemerintahan (wajib dan pilihan) oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun capaian hasilnya.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren ini menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Adapun di dalam pelaksanaannya urusan pemerintahan konkuren ini terbagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pelaksanaan pelayanan bidang pendidikan pada prinsipnya diupayakan untuk memberikan kepastian kepada seluruh masyarakat mendapatkan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas. Untuk itu, hal yang perlu dipastikan adalah sejauhmana seluruh penduduk usia sekolah mendapatkan pelayanan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar 9 tahun. Sampai dengan tahun 2023, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar telah mencapai angka realisasi 103,9 persen. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat peningkatan akses pendidikan dan keberhasilan program pendidikan dini. Namun hal ini juga perlu dilakukan perhatian lebih pada Angka Partisipasi Murni (APM) yang lebih spesifik dalam menghitung anak bersekolah sesuai dengan usianya. Gambaran umum pelayanan pendidikan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Rata-Rata Lama Sekolah**	**Tahun**	**8.3**	**8.3**	**8.47**	**8.31**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**8.36**	8.39
2	**Harapan Lama Sekolah**	**Tahun**	**12.68**	**12.48**	**12.77**	**12.49**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**12,52**	12,75
a	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartispasi dalam Pendidikan Dasar	%	n/a	n/a	96.13	86.54	97.2	87.43	98.28	103.19	76.83	n/a
b	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	n/a	97.25	74.69	73.72	75.8	76.33	76.92	86.98	68.48	n/a
c	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	n/a	88.37	41.03	36.02	43.53	49.64	46.15	57.63	57.25	n/a

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
d	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartispasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	n/a	n/a	5.18	7.19	5.23	1.82	5.29	2.45	5.3	n/a
e	Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.58	n/a
f	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar	%	n/a	n/a	86.64	82.34	87.68	90.68	88.72	103.9	90,95	97,65
g	Indeks Rapor Pendidikan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	72,05	72,79
h	Nilai IKM Eksternal Perangkat Daerah	poin	n/a	79.34	n/a	80.81	n/a	81.11	n/a	81.86	90	81,89

Sumber : Dinas Pendidikan yang dikelola dalam SIPD, 2025

Evaluasi terhadap indikator kinerja pembangunan daerah di bidang pendidikan menunjukkan adanya dinamika capaian yang cukup beragam selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, indikator Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan kecenderungan stabil dengan sedikit peningkatan dari 8,3 tahun pada 2020 menjadi 8,39 tahun pada 2024. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah juga mengalami peningkatan dari 12,48 tahun menjadi 12,75 tahun. Capaian ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam akses dan keberlanjutan pendidikan, meskipun peningkatan tersebut masih tergolong lambat. Di sisi lain, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang PAUD dan pendidikan dasar menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 82,34 persen pada 2021 menjadi 103,9 persen pada 2023, meskipun sedikit menurun pada 2024 menjadi 97,65 persen. Indeks Rapor Pendidikan dan Nilai IKM Eksternal Perangkat Daerah juga mencatat tren positif yang menunjukkan adanya perbaikan mutu layanan pendidikan.

Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan krusial yang masih dihadapi. Pertama, tingkat partisipasi pendidikan pada kelompok

usia tertentu masih fluktuatif dan bahkan menurun secara signifikan**.** Partisipasi anak usia 7–12 tahun yang seharusnya mengikuti pendidikan dasar turun drastis dari 96,13 persen pada 2021 menjadi hanya 76,83 persen pada 2024. Situasi serupa juga terjadi pada kelompok usia 13–15 tahun (setara SMP), di mana tingkat partisipasi turun dari 86,98 persen pada 2023 menjadi hanya 68,48 persen pada 2024. Sementara itu, partisipasi anak usia 5–6 tahun dalam PAUD meskipun meningkat dari 36,02 persen pada 2021 menjadi 57,25 persen pada 2024, masih tergolong rendah. Kedua, tingkat partisipasi warga usia 7–18 tahun dalam pendidikan kesetaraan juga mengalami penurunan signifikan**,** dari 7,19 persen pada 2021 menjadi hanya 2,4 persen pada 2023, jauh dari target 5,3 persen.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sejumlah strategi dan solusi kebijakan yang komprehensif. Pertama, perlu dilakukan penguatan sistem pendataan dan monitoring pendidikan secara berkala dan konsisten, termasuk integrasi data lintas lembaga seperti Dinas Pendidikan, BPS, dan sekolah. Kedua, pemerintah daerah perlu menyusun program intervensi spesifik berdasarkan kelompok usia dan wilayah, seperti penyediaan akses pendidikan yang merata untuk usia SMP dan perluasan layanan PAUD di daerah terpencil. Ketiga, program pendidikan kesetaraan harus direvitalisasi dengan pendekatan berbasis komunitas dan insentif bagi peserta maupun lembaga penyelenggara. Keempat, upaya pencegahan anak putus sekolah harus diperkuat melalui sistem deteksi dini, bantuan pendidikan, serta pendampingan sosial bagi keluarga miskin. Terakhir, peningkatan kualitas pembelajaran juga menjadi prioritas, dengan memanfaatkan hasil Indeks Rapor Pendidikan sebagai dasar untuk pelatihan guru dan pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual dan relevan. Dengan intervensi yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan pembangunan sektor pendidikan dapat lebih merata, inklusif, dan berdampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

b. Kesehatan

Sektor kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal peningkatkan kualitas sumber daya manusia selain sektor

pendidikan. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten/kota memiliki kewenangan utama dalam pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan masyarakat. Terkait gambaran umum pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Indeks Keluarga Sehat**	**Poin**	n/a	**77.53**	**0.52**	**0.16**	**0.68**	**0.167**	**0.84**	**0.2**	**0,40**	**0.28**
2	**Angka Harapan Hidup**	**Tahun**	**71.48**	**71.17**	**72.74**	**71.36**	**n/a**	**71.65**	**n/a**	**n/a**	**74.91**	**74.65**
a	Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	n/a	100	68	45.87	70	71.08	72	84.05	75	90,15
b	Tingkat layanan rumah sakit	%	n/a	100	100	96.62	100	99.24	100	99.85	85	84.7
c	Cakupan Jaminan Kesehatan	%	n/a	100	80	73.56	83	86.85	86	92.23	91.8	96.23
d	Prevalensi Balita Stunting	%	0.296	12.86	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	26,4	8,4
e	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	n/a	79.32	n/a	80.57	n/a	80.51	n/a	81.68	81,70	86,47

Sumber : Dinas Kesehatan yang dikelola dalam SIPD, 2025

Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan mengalami perubahan pada indikator tujuan dan indikator sasaran. Indikator tujuan menjadi Angka Harapan Hidup menggantikan indeks keluarga sehat. Untuk indikator sasaran terjadi penambahan indikator yaitu Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah.

Berdasarkan data indikator kinerja pembangunan daerah dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa terdapat kemajuan di beberapa aspek, namun juga ditemukan berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian serius. Salah satu indikator utama, yakni *Indeks Keluarga Sehat*, menunjukkan tren fluktuatif dengan capaian realisasi yang konsisten di bawah target. Meskipun ada kenaikan secara bertahap dari 0.16 (2021) ke 0.28 (2024), pencapaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan, mencerminkan perlunya perbaikan signifikan dalam program kesehatan keluarga.

Sementara itu, *Angka Harapan Hidup* mengalami peningkatan secara bertahap dari 71.17 tahun (2020) ke 74.65 tahun (2024), meskipun pencatatan target sempat tidak tersedia di tahun 2022 dan 2023. Ini menunjukkan adanya tren positif dalam aspek kesehatan secara umum. Indikator turunan seperti *Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat* menunjukkan peningkatan dari 45.87 persen (2021) ke 90.15 persen (2024), mengindikasikan adanya perbaikan layanan dasar yang signifikan. Namun, capaian tersebut masih harus ditingkatkan untuk mendekati cakupan universal.

Pada indikator *Tingkat Layanan Rumah Sakit* dan *Cakupan Jaminan Kesehatan*, capaian berada relatif tinggi dan stabil di atas 90 persen pada tahun-tahun terakhir, meskipun terdapat penurunan pada layanan rumah sakit di 2024 (84.7 persen dari target 85 persen). Hal ini menandakan adanya konsistensi dalam pelayanan, namun tetap memerlukan penguatan, terutama dari sisi ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur.

Pada indikator *Prevalensi Balita Stunting*, di mana meskipun tidak ada data antara 2021–2023, capaian tahun 2024 menunjukkan perbaikan signifikan dari target 26.4 persen menjadi 8.4 persen yang merupakan perkembangan sangat positif dan mencerminkan efektivitas intervensi program gizi. Namun, konsistensi data tahunan perlu diperbaiki untuk evaluasi yang berkesinambungan.

Terakhir, *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah* mengalami peningkatan dari 79.32 poin (2020) ke 86.47 poin (2024), menunjukkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan yang semakin baik.

Untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh, perlu dilakukan:

1. Penguatan data dan pemantauan indikator agar tidak terdapat kekosongan data pada tahun-tahun tertentu.
2. Penajaman program kesehatan keluarga dengan pendekatan berbasis komunitas dan penguatan peran Puskesmas dalam pelayanan promotif, preventif dan *outreach* pelayanan dasar kesehatan.

3. Peningkatan kualitas layanan rumah sakit, melalui pelatihan SDM dan pembenahan sarana prasarana.
4. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dengan pendekatan integratif antara pemerintah daerah dan BPJS.
5. Perluasan intervensi stunting secara lintas sektor agar capaian yang telah baik dapat dipertahankan.
6. Peningkatan pelayanan publik berbasis digital dan keterbukaan informasi untuk memperkuat kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi salah satu yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bogor, bidang urusan ini diampu oleh 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Hal tersebut terjadi akibat dinamika peraturan yang memberikan kewenangan lain kepada DPKPP untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan. Gambaran umum terkait dengan pelayanan Pemerintah Kabupaten Bogor di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari capaian indikator kinerja berikut:

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Persentase kualitas dan cakupan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang**	%	n/a	n/a	61.44	63.66	63.51	67.52	65.72	65.6	70,23	60,99
a	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	85.1	82.15	82.22	86.63	82.32	84.69	82.42	84.7	82.52	82,52
b	Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	%	68.65	68.94	70	67.32	72	74.47	74	69.4	69,49	69,49

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
c	Persentase cakupan pelayanan air minum	%	n/a	n/a	22.5	29.24	27	37.26	31.5	34.6	73.6	73,63
d	Persentase cakupan pelayanan air limbah	%	n/a	n/a	71.03	71.46	72.73	73.67	74.96	73.7	72	72

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikelola dalam SIPD, 2025

Berdasarkan data capaian indikator pembangunan daerah dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa kinerja pada sektor infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama pada indikator agregat "Persentase kualitas dan cakupan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang". Setelah mencatat peningkatan dari 63,66 persen (2021) menjadi 67,52 persen (2022), angka tersebut justru menurun menjadi 65,6 persen pada 2023 dan mengalami penurunan tajam ke 60,99 persen pada 2024, jauh di bawah target 70,23 persen. Hal ini mengindikasikan adanya stagnasi dan bahkan kemunduran dalam kualitas dan cakupan infrastruktur secara umum.

Secara lebih rinci, indikator tingkat kemantapan jalan kabupaten relatif stabil namun stagnan, dengan realisasi tahun 2024 tetap pada angka 82,52 persen, meskipun target tahun tersebut juga hanya 82,52 persen. Artinya, tidak ada peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya meskipun infrastruktur jalan merupakan tulang punggung konektivitas wilayah. Sementara itu, kondisi daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang mengalami pasang surut: setelah sempat mencapai 74,47 persen di tahun 2022, turun menjadi 69,4 persen pada 2023 dan stagnan di 69,49 persen pada 2024, yang tidak memenuhi target. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang sangat penting bagi sektor pertanian.

Berbeda dengan dua indikator sebelumnya, cakupan pelayanan air minum menunjukkan tren positif yang cukup kuat. Realisasi meningkat dari 29,24 persen (2021) menjadi 73,63 persen (2024), bahkan melebihi target sebesar 73,6 persen. Peningkatan signifikan ini

menunjukkan bahwa kebijakan dan program di sektor air minum telah berjalan efektif. Sebaliknya, cakupan pelayanan air limbah tidak menunjukkan peningkatan signifikan, hanya naik sekitar 1,24 persen dari 2021 (71,46 persen) ke 2024 (72 persen), jauh dari target peningkatan yang seharusnya terjadi secara tahunan.

Untuk mengatasi penurunan dan stagnasi kinerja infrastruktur secara umum, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran dan efektivitas program di sektor jalan dan irigasi, termasuk pemanfaatan teknologi dan manajemen aset infrastruktur yang lebih baik. Diperlukan intervensi teknis dan kebijakan yang lebih fokus untuk pemeliharaan jalan dan rehabilitasi irigasi. Selain itu, replikasi pendekatan yang berhasil dalam peningkatan cakupan pelayanan air minum dapat menjadi model dalam sektor lain, terutama air limbah, yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Kolaborasi lintas sektor, pelibatan masyarakat, serta penguatan kapasitas daerah dalam perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur juga menjadi kunci agar target tahun-tahun mendatang dapat tercapai secara berkelanjutan dan merata.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pelayanan perumahan dan kawasan permukiman termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Fokus pelayanan yang dilaksanakan terkait dengan penanganan kawasan kumuh dan bencana. Adapun pelayanan yang dilaksanakan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.34
Pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Persentase Permukiman Layak**	**%**	**n/a**	**23.76**	**99.7**	**99.7**	**99.86**	**99.74**	**100**	**99.8**	**99.5**	**99.6**
a	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	%	n/a	85.65	18.42	18.74	27.09	23.39	35.84	29.6	22.18	3.05
b	Persenatse Luas Permukiman Kumuh	%	n/a	13.16	0.13	0.15	0.07	0.11	0	0.05	n/a	n/a

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
c	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	n/a	23.76	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a
d.	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	235	216.5
e.	Persentase penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25	16.35
f.	Persentase aset pemda yang diproses sertifikasinya	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80,33	79,86
g.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	46,69	46,94
h.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	89,05	89,08

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dikelola dalam SIPD, 2025

Evaluasi kinerja pembangunan daerah pada sektor permukiman menunjukkan capaian yang cukup baik secara umum, terutama pada indikator utama *Persentase Permukiman Layak* yang konsisten mendekati atau mencapai target dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2023, capaian berada di angka 99,8 persen dari target 100 persen, sementara pada 2024 tercapai 99,6 persen dari target 99,5 persen. Hal ini mencerminkan stabilitas dalam kualitas permukiman secara umum. Namun, jika ditinjau lebih dalam melalui indikator turunannya, masih ditemukan sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi.

Masalah utama terletak pada rendahnya capaian *Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni*, yang meskipun mengalami peningkatan pada 2021 dan 2022, justru menurun drastis pada 2024 hanya mencapai 3,05 persen dari target 22,18 persen. Penurunan tajam ini mengindikasikan adanya hambatan signifikan dalam pembangunan rumah layak huni, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan anggaran, lambatnya realisasi proyek, atau kurang optimalnya sinergi antarinstansi. Sebagai solusinya, perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap program penyediaan rumah, mempercepat proses pengadaan lahan dan perizinan, serta menggalang kemitraan dengan sektor swasta untuk memperkuat kapasitas pembangunan rumah layak huni.

Dari sisi *Persentase Luas Permukiman Kumuh*, meskipun datanya hanya tersedia hingga 2023, capaian menunjukkan hasil yang baik,

dengan penurunan signifikan dari 13,16 persen pada 2020 menjadi hanya 0,05 persen pada 2023. Demikian pula, *Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan* secara konsisten mencapai 100 persen dari 2021 hingga 2023. Namun, pada tahun 2024, beberapa indikator baru menunjukkan adanya kesenjangan, seperti *Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Permukiman* yang hanya mencapai 16,35 persen dari target 25 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun fisik bangunan dan lingkungan telah ditata, aksesibilitas dan fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi masih belum merata. Solusinya adalah dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur pendukung ke dalam perencanaan kawasan secara lebih menyeluruh dan memastikan alokasi anggaran yang memadai serta pengawasan ketat dalam implementasi.

Indikator lainnya, seperti *Luas Kawasan Permukiman Kumuh*, mengalami penurunan dari 235 hektar pada awal 2024 menjadi 216,5 hektar, menandakan adanya progres dalam pengurangan kawasan kumuh. Sementara itu, *Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau* menunjukkan tren positif dengan realisasi mendekati target. Di sisi lain, *Indeks Kepuasan Masyarakat* yang mencapai 89,08 persen juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan perumahan dan permukiman cukup baik, walaupun perlu terus ditingkatkan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat sejumlah capaian positif, tantangan nyata masih ada terutama dalam hal penyediaan rumah layak huni dan infrastruktur dasar permukiman. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pendekatan yang lebih integratif, kolaboratif, dan berbasis data untuk memastikan pembangunan permukiman tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga mendukung kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas keamanan, menciptakan lingkungan yang kondusif, serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang mengganggu ketertiban sosial dan keselamatan publik.

Dalam pelaksanaannya, bidang urusan ini diampu oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar). Ketiganya memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda, hal tersebut dapat dilihat dari IKU masing-masing Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
A	**SATPOL PP :**											
1	**Tingkat Penyelesaian Gangguan Trantibum**	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	99.9	87	87
a	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	n/a	n/a	100	100	100	82.05	100	92.3	100	100
b	Indeks Penegakan Perda dan Perkada	poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100
c	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	poin	n/a	76.45	n/a	81.46	n/a	79.43	n/a	80.96		80,50
B	**BPBD :**											
2	**Indeks Bencana**	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	84	84,06
	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	n/a	0.49	0.5	0.5	0.55	0.6	0.6	0.58	0.53	0,56
a	Persentase mitigasi yang dilaksanakan	%	n/a	21.05	35	24.8	40	31.2	45	45	40	58.33
b	Persentase jumlah korban yang selamat	%	n/a	99.98	100	99.96	100	99.94	100	99.99	n/a	n/a
c	Persentase Rekomendasi Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%	n/a	59.23	100	79.2	100	100	100	100	100	100.58
d	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	poin	n/a	78.34	n/a	78.42	n/a	78.23	n/a	79.28	70	81,33
C	**DISDAMKAR :**											
3	**Indeks Sub Urusan Kebakaran**	poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Response Time pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	n/a	87.5	15	11.57	15	12.46	15	12.1	15	11.75
a	Persentase pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	%	n/a	97.16	100	104.92	100	100	100	80.8	100	81.71

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
b	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	poin	n/a	90.22	n/a	86.61	n/a	84.22	n/a	82.16	84	82,15

Sumber : 1. Satuan Polisi Pamong Praja yang dikelola dalam SIPD, 2025

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikelola dalam SIPD, 2025

3. Dinas Pemadam Kebakaran yang dikelola dalam SIPD, 2025

Secara umum indikator urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang menjadi indikator kinerjanya Satpol PP telah tercapai pada tahun 2024. Untuk indikator tingkat penyelesaian gangguan trantibum juga mencapai target. Capaian ini cerminan dari jumlah pelanggaran gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan oleh masyarakat.

Terkait dengan indikator yang diampu oleh BPBD urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan perbaikan dan peningkatan upaya dalam menghadapi potensi risiko bencana. Upaya preventif dan mitigasi bencana serta sosialisasi terkait dengan antisipasi bencana kepada masyarakat harus sering dilakukan seiring dengan perubahan cuaca ekstrem yang sering terjadi pada saat ini. Peningkatan kompetensi petugas yang terjun langsung dalam proses penanganan bencana juga perlu untuk ditingkatkan disertai dengan penambahan kuantitas dan kualitas peralatan pendukung dalam kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

Indikator kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran mengalami peningkatan hingga tahun 2024, Peningkatan Response Time pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Bogor semakin membaik, hal ini menunjukan peningkatan total waktu tanggap kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bogor. Namun dengan capaian yang semakin baik tersebut, harus ditunjang dengan kemampuan sumber daya manusia dan peralatan yang baik. Kualitas dan kuantitas potensi sumber daya yang dikerahkan dalam penanganan bencana kebakaran perlu ditingkatkan.

f. Sosial

Urusan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan ini mencakup perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat rentan, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, serta mitigasi dampak sosial akibat bencana atau perubahan sosial ekonomi.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, Dengan sinergi kebijakan, optimalisasi sumber daya, dan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Gambaran mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan sosial dapat dilihat dari capaian IKU yang diampu oleh Dinas Sosial sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Sosial Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Persentase PPKS yang ditangani**	**%**	**n/a**	**0.84**	**100**	**100**	**100**	**97.21**	**100**	**99.47**	**100**	**67,98**
	Indeks Kesejahteraan Sosial	**poin**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**100**	**93,95**
a	Persentase PSKS yang Berkualitas	%	n/a	60.15	100	100	100	99.16	100	100	n/a	n/a
b	Persentase layanan SLRT dan puskesos desa	%	n/a	n/a	100	100	100	99.19	100	100	n/a	n/a
c	Persentase masyarakat miskin yang tertangani	%	n/a	100	100	100	100	90.87	100	100	100	100
d	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapat penanganan PPKS	%	n/a	93.76	100	100	100	99.05	100	100	100	99.83
e	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan PPKS	%	n/a	99.27	100	100	100	96.04	100	97.34	100	96,05
f	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	poin	n/a	82.62	n/a	83.72	n/a	87.02	n/a	87.17	88	87,19

Sumber : Dinas Sosial yang dikelola dalam SIPD, 2025

Evaluasi kinerja pembangunan daerah menunjukkan hasil yang cukup beragam dalam lima tahun terakhir. Salah satu indikator utama, yaitu persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani, menunjukkan capaian optimal pada tahun 2021 hingga 2023, mendekati target 100 persen. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2024 menjadi hanya 67,98 persen, jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya kendala serius baik dari sisi operasional, sistem pelaporan, maupun distribusi sumber daya. Dibutuhkan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebab penurunan tersebut, serta penguatan koordinasi lintas sektor, pelatihan SDM, dan peningkatan teknologi pendataan untuk mengembalikan capaian pada target optimal.

Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial, yang baru mulai diukur pada tahun 2024, menunjukkan nilai 93,95 poin dari target 100. Ini merupakan awal yang baik, namun tetap perlu diidentifikasi aspek-aspek mana yang masih menjadi kelemahan agar capaian indeks dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Di sisi lain, persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkualitas mencatat performa sangat baik dari tahun 2021 hingga 2023 dengan realisasi selalu mencapai 100 persen namun tidak terdapat data pada tahun 2024. Ketiadaan data ini menunjukkan adanya permasalahan pada pelaporan atau perubahan fokus kebijakan, yang perlu segera ditangani untuk menjaga kesinambungan data dan kinerja.

Berbeda dengan indikator sebelumnya, persentase masyarakat miskin yang tertangani secara konsisten mencapai target 100 persen setiap tahun, kecuali sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 90,87 persen. Capaian ini menunjukkan efektivitas penanganan kemiskinan, meskipun perlu terus diupayakan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala. Demikian juga dengan indikator penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis, yang terus mencatat angka mendekati 100 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan keberlanjutan intervensi sosial bagi kelompok rentan, namun perlu

dipastikan bahwa layanan yang diberikan juga berkualitas dan berkelanjutan.

Indikator penanganan korban bencana alam dan sosial mengalami sedikit penurunan dari capaian maksimal 100% menjadi 96,05 persen pada tahun 2024. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya kejadian bencana atau keterbatasan kapasitas tanggap darurat. Upaya peningkatan kesiapsiagaan, distribusi logistik, dan pelatihan petugas menjadi kunci untuk memastikan layanan tanggap bencana tetap optimal. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap perangkat daerah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 82,62 poin pada tahun 2020 menjadi 87,19 poin pada tahun 2024, meskipun masih sedikit di bawah target 88. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas layanan publik, namun aspek-aspek seperti kecepatan pelayanan, akses informasi, dan empati petugas masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kepuasan maksimal dari masyarakat.

Secara umum, kinerja pembangunan daerah dalam bidang kesejahteraan sosial menunjukkan progres positif, meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan tajam khususnya pada tahun 2024. Penurunan ini perlu menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam perencanaan tahun berikutnya. Dibutuhkan peningkatan sistem pelaporan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pembaruan basis data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Evaluasi menyeluruh atas program-program yang mengalami penurunan harus segera dilakukan agar kebijakan intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat dirumuskan. Melalui upaya ini, target-target pembangunan sosial yang berkeadilan dan inklusif dapat kembali dicapai dengan optimal.

2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a UU No. 23 Tahun 2014. Urusan ini meliputi pengembangan tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja,

perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial, dan kesejahteraan pekerja.

Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya mutu tenaga kerja. Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah tingkat pendidikan yang minim akan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang kompetitif, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan indikator yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan kinerja pelayanannya di bidang urusan tenaga kerja sebagai berikut:

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	n/a	n/a	0.41	1.03	0.43	0,99	0.45	0.45	1.05	1.09
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	64,43	66,30
a	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	n/a	12	20.73	16.69	20.85	26,13	21.98	21.98	22.96	28.5
b	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	92,66	92,66
c	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	poin	n/a	86.44	n/a	86.1	n/a	87.89	n/a	87.26	87,85	87,85

Sumber : Dinas Tenaga Kerja yang dikelola dalam SIPD, 2025

Berdasarkan data indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bogor dari tahun 2020 hingga tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan tren

positif dalam peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja serta pelayanan publik. Peningkatan capaian persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari tahun ke tahun mencerminkan keberhasilan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang didukung oleh pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Hal ini penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di pasar kerja, baik dalam skala nasional maupun internasional. Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mulai tersedia pada tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan, dengan capaian yang melampaui target. Ini menjadi indikasi positif meningkatnya keikutsertaan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Terkait penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja mengalami peningkatan signifikan, mencerminkan efektivitas layanan antar kerja di tingkat kabupaten/kota. Kebijakan transmigrasi, Kabupaten Bogor secara konsisten menunjukkan kinerja maksimal dengan tingkat tindak lanjut terhadap kebijakan pusat mencapai 100% sejak tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap sinkronisasi program nasional dan daerah. Untuk tingkat penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan hasil yang baik dengan persentase di atas 92% sejak tersedia datanya, yang menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang tersedia mampu diserap oleh pasar kerja lokal. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perangkat daerah yang terus meningkat mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Kenaikan dari 87,85 menjadi 88 poin menunjukkan respons positif masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program kerja Pemerintah Kabupaten Bogor dalam bidang ketenagakerjaan dan pelayanan publik, serta mengindikasikan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait pelaksanan urusan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi:

- Perluas akses sertifikasi tenaga kerja melalui kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Balai Latihan Kerja (BLK), serta subsidi bagi kelompok rentan.

- Dorong partisipasi angkatan kerja dengan program pemberdayaan untuk perempuan, disabilitas, dan sektor informal.
- Perkuat layanan penempatan kerja melalui digitalisasi sistem informasi pasar kerja dan perluasan jaringan antar kerja.
- Pastikan keberlanjutan program transmigrasi yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.
- Dorong penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi di sektor padat karya dan ekonomi kreatif.
- Tingkatkan kualitas pelayanan publik lewat pelatihan SDM dan survei kepuasan masyarakat secara berkala.
- Bangun sistem monitoring berbasis data untuk pengambilan keputusan yang lebih responsif dan tepat sasaran.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selaras dengan isu prioritas yang dijabarkan dalam arahan Presiden terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya untuk meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan Kabupaten Bogor yang "Ramah Perempuan dan Layak Anak".

Oleh sebab itu, mengenai gambaran umum terkait dengan pelayanan di bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	n/a	n/a	7.82	23.06	7.28	8.43	6.81	7.92	7.7	n/a
2	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Nindya	n/a

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
3	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**poin**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**90.77**	**90.98**
a	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	27.80	18.26	27.85	27.91	27.90	28.76	27.95	30.33	28.19	n/a
b	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	12.00	10.00	72.50	72.50	85.00	100	100	100	70.00	n/a
c	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	59,35	56.99
d	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	poin	n/a	78.84	n/a	80.75	n/a	88.3	n/a	79.26	84,92	86,24

Sumber : DP3AP2KB yang dikelola dalam SIPD, 2025

Berdasarkan data kinerja pembangunan daerah dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat beberapa indikasi penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan fluktuasi signifikan. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 23,06 persen, jauh melampaui target 7,82 persen, namun pada tahun-tahun berikutnya realisasi turun drastis dan bahkan tidak tercatat pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya potret ketidakstabilan dalam pemanfaatan tenaga kerja perempuan yang perlu segera ditangani agar peran perempuan dalam perekonomian dapat meningkat secara konsisten.

Selain itu, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta relatif stagnan, berkisar antara 18,26 persen hingga 28,19 persen selama periode yang diamati, menandakan kurang optimalnya keterlibatan perempuan dalam sektor swasta. Sementara itu, pencapaian pembentukan kecamatan layak anak menunjukkan tren positif dengan 100 persen realisasi di tahun 2022 dan 2023, meskipun pada 2024 kembali turun menjadi 70%, yang mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan untuk mempertahankan standar ini.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah juga mengalami kenaikan dari 78,84 poin di 2020 menjadi 86,24 poin pada 2024, yang menjadi sinyal baik adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, belum tersedianya data pada beberapa indikator

penting seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi kendala dalam melakukan evaluasi komprehensif.

Solusi yang dapat diimplementasikan antara lain:

1. Meningkatkan program pelatihan dan pemberdayaan perempuan untuk memperkuat partisipasi mereka di sektor formal dan swasta.
2. Menetapkan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan keluarga agar perempuan lebih mudah berkontribusi dalam dunia kerja.
3. Memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap program kecamatan layak anak agar pencapaian tidak menurun.
4. Mengoptimalkan pengumpulan dan pelaporan data indikator gender untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Meskipun belum semua indikator memiliki data lengkap, tren capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa beberapa program strategis telah memberikan hasil yang konkret, khususnya di sektor pemberdayaan gender, dan kepuasan layanan publik. Ke depan, penting untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi data untuk memastikan keberlanjutan evaluasi berbasis bukti (*evidence-based policy*).

c. Pangan

Pangan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan yang kuat tidak hanya mencerminkan ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga aksesibilitas dan kualitas konsumsi pangan yang baik. Dalam konteks pembangunan daerah, pengelolaan pangan yang efektif menjadi strategi utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, serta mendukung ketahanan ekonomi dan sosial.

Gambaran umum terkait dengan pelayanan di bidang urusan Pangan dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Pangan Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Tingkat Kecukupan Energi per kapita**	**%**	**n/a**	**103.4**	**103**	**98.52**	**102.2**	**101.3**	**101.6**	**101.6**	**n/a**	**n/a**
a	Ketersediaan Energi per kapita	%	n/a	n/a	104.2	97.29	104.5	104.51	104.8	104.9	n/a	n/a
2	**Tingkat kecukupan protein per kapita**	**%**	**n/a**	109.3	**110**	**103.5**	**109.9**	**104,39**	**110.2**	**110.2**	**n/a**	**n/a**
a	Ketersediaan Protein per kapita	%	n/a	n/a	128.3	118.55	128.55	130,08	128.85	142.42	n/a	n/a
3	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**Poin**	n/a	n/a	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**
a	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85.6	86.24
b	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	81,64	84,90
4	**Indeks Ketahanan Pangan**	**Poin**	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	70,01
5	**Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU)**	**Poin**	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5,05	n/a
a	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	n/a	82.44	n/a	80.34	n/a	84.59	n/a	83.65	86,30	84,27

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan yang dikelola dalam SIPD, 2025

Berdasarkan data indikator kinerja pembangunan daerah dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya beberapa capaian dan tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertama, pada indikator tingkat kecukupan energi per kapita, realisasi capaian tahun 2021 sebesar 98,52 persen masih di bawah target 103 persen, menunjukkan adanya kekurangan pasokan atau distribusi energi yang memadai bagi masyarakat. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, realisasi capaian energi cenderung stabil mendekati target, yakni sekitar 101-102 persen, yang menunjukkan perbaikan pengelolaan energi meski masih perlu dioptimalkan. Ketersediaan energi per kapita juga sempat menurun pada 2021 (97,29 persen), namun mengalami peningkatan kembali hingga 104,9 persen pada 2023, menunjukkan upaya pemerintah dalam memperbaiki akses energi.

Kedua, indikator kecukupan protein per kapita menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, dengan realisasi yang selalu berada di atas 100 persen target, seperti pada 2023 sebesar 110,2 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat relatif tercukupi kebutuhan protein, didukung pula oleh ketersediaan protein yang meningkat signifikan dari 118,55 persen pada 2021 menjadi 142,42 persen pada 2023. Namun, walaupun secara kuantitatif cukup baik, perlu perhatian lebih pada kualitas konsumsi protein agar tidak hanya cukup secara angka tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi yang sehat dan seimbang.

Pada aspek skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mulai diukur pada tahun 2024, terlihat nilai ketersediaan dan konsumsi berada di kisaran 85,6 dan 84,9 poin, yang meskipun belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perlu terus dipantau untuk memastikan pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan tahun 2024 sebesar 70,01 poin mengindikasikan ketahanan pangan yang cukup, namun tetap menjadi tantangan agar lebih kuat menghadapi risiko krisis pangan.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) pada 2024 tercatat 5,05 poin, yang masih perlu upaya pengurangan agar angka ini dapat menurun lebih signifikan. Di sisi lain, indeks kepuasan masyarakat terhadap perangkat daerah relatif stabil dengan realisasi sekitar 80-86 poin dari tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap layanan pemerintah, namun harus terus ditingkatkan agar dapat mendukung pencapaian target pembangunan yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan potret pembangunan yang berjalan dengan beberapa capaian positif, terutama dalam ketersediaan protein dan energi, tetapi juga menyimpan tantangan di bidang ketahanan pangan dan konsumsi pangan yang perlu mendapat perhatian serius. Solusi yang dapat diambil meliputi peningkatan koordinasi antar sektor terkait pengelolaan energi dan pangan, penguatan program edukasi gizi bagi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung distribusi energi dan pangan yang lebih merata. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan

target-target pembangunan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

d. Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan daerah yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, urusan pertanahan menjadi bagian dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya tanah secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

Gambaran umum terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan pertanahan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
a	Tingkat Pelayanan Unsur Pertanahan	%	n/a	78	54.02	54.02	77.01	81	100	88.96	n/a	n/a
b	Persentase aset pemda yang diproses sertifikasinya	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80,33	79,86

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dikelola dalam SIPD, 2025

Evaluasi terhadap indikator kinerja pembangunan daerah menunjukkan bahwa capaian terkait tingkat pelayanan unsur pertanahan mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, meskipun target belum ditetapkan, realisasi mencapai 78 persen. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan dengan realisasi hanya 54,02 persen, jauh di bawah target yang sama. Meskipun pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 81 persen, target sebesar 100 persen pada tahun 2023 kembali tidak tercapai dengan realisasi hanya 88,96 persen. Permasalahan utama dalam pencapaian indikator ini kemungkinan disebabkan oleh koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, serta hambatan dalam sistem administrasi pertanahan.

Sementara itu, pada indikator persentase aset pemerintah daerah yang diproses sertifikasinya, data baru tersedia pada tahun 2024

dengan capaian 79,86 persen dari target 80,33 persen. Walaupun pencapaian ini tergolong tinggi, namun tetap sedikit di bawah target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya kendala administratif atau teknis dalam proses sertifikasi aset, seperti ketidaksesuaian dokumen atau keterbatasan tenaga pengukur.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan koordinasi antara dinas terkait dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), penyederhanaan proses birokrasi, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana di bidang pertanahan dan aset daerah. Selain itu, penggunaan sistem digital dalam pengelolaan data pertanahan dan aset dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan.

e. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kualitas lingkungan yang baik mendukung kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Perencanaan pembangunan lingkungan hidup harus mencakup strategi perlindungan, konservasi, serta pengelolaan sumber daya alam agar tetap lestari untuk generasi mendatang

Gambaran umum terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan lingkungan hidup di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Persentase peningkatan IKLH**	**%**	**n/a**	**n/a**	**0.18**	**5.92**	**0.18**	**-0.35**	**0.18**	**4.36**	**n/a**	**n/a**
a	Indeks Kualitas Air	poin	n/a	n/a	48.47	48.77	48.57	48.35	48.67	50.24	48.77	51.64
b	Indeks Kualitas Udara	poin	n/a	n/a	71.89	76.72	71.99	78,91	72.09	79.15	72.19	75.65
c	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	n/a	n/a	39.75	44.96	39.85	40.06	39.95	44.15	40.05	42.97
	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	CO2eq/ 2010	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
d	Persentase Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah	%	n/a	n/a	7.81	26.67	8.04	8.3	11.13	8.31	36.54	32.37
e	Persentase air permukaan dan udara yang tercemar	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6.59	8.05
f	Persentase luas tutupan lahan hijau	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19.71	23.13
g	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	n/a	80.23	n/a	76.96	n/a	76.94	n/a	77.04	75	86,84

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup yang dikelola dalam SIPD, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator kinerja pembangunan daerah khususnya terkait dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2021 hingga tahun 2024, dapat diperoleh nilai capaian IKLH dan persentase capaiannya pada tahun 2021 tercatat sebesar 59,26 (+5.91 persen), kemudian mengalami penurunan menjadi 58,91 pada tahun 2022 (-0,58 persen), meningkat menjadi 60,61 pada tahun 2023 (+2,89 persen), dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 59,47 (-1,90 persen).

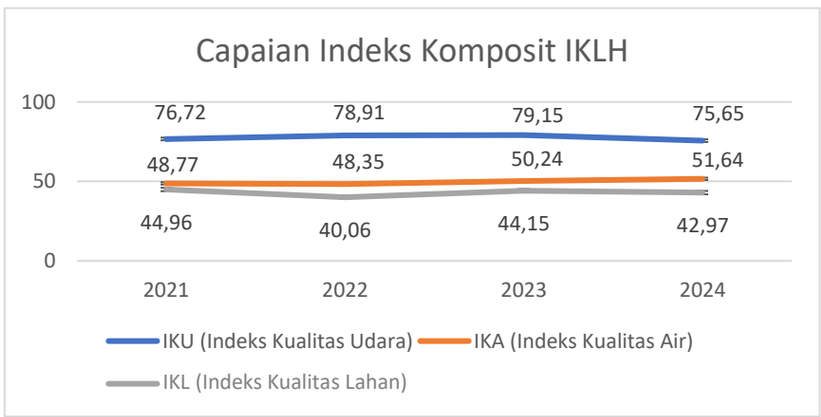
Apabila dilihat dari komposit IKLH maka selama kurun waktu empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024, terdapat dinamika yang cukup mencolok pada tiga indikator lingkungan utama Kabupaten Bogor, yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Ketiga indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi kondisi dan arah keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bogor.

Indeks Kualitas Udara (IKU) secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 76,72 menjadi 78,91 di tahun 2022, dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2023 dengan angka 79,15. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi 75,65. Penurunan ini menandakan adanya tantangan baru dalam pengelolaan kualitas udara, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, atau

berkurangnya tutupan vegetasi yang berfungsi sebagai penyaring alami polutan.

Di sisi lain, Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan kecenderungan membaik dari tahun ke tahun. Setelah mengalami sedikit penurunan dari 48,77 pada tahun 2021 menjadi 48,35 pada tahun 2022, nilai IKA kemudian meningkat menjadi 50,24 pada tahun 2023 dan terus naik menjadi 51,64 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan limbah domestik dan industri serta penguatan terhadap pelestarian badan air dan daerah tangkapan air.

Adapun Indeks Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan pola yang tidak stabil. Setelah berada pada posisi 44,96 di tahun 2021, IKL turun tajam ke angka 40,06 pada tahun 2022. Nilai ini sempat pulih menjadi 44,15 pada tahun 2023, namun kembali menurun menjadi 42,97 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan masih tingginya tekanan terhadap lahan terbuka hijau, baik karena alih fungsi lahan untuk pembangunan maupun belum optimalnya program rehabilitasi lahan dan reboisasi. Ketiga indeks ini memiliki keterkaitan erat. Penurunan tutupan lahan, misalnya, dapat berdampak langsung terhadap kualitas udara dan air karena hilangnya fungsi ekologis hutan dan vegetasi dalam menyerap polutan serta menyaring air. Capaian indeks komposit IKLH lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, 2024

Gambar 2.70
Capaian Indeks Komposit IKLH

Terkait dengan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi isu strategis yang berdampak langsung terhadap perubahan iklim dan turut menjadi tantangan di Kabupaten Bogor. Urbanisasi yang pesat,

meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, konsumsi energi fosil, serta berkurangnya kawasan hijau menjadi faktor utama peningkatan emisi GRK di wilayah ini. Selain itu, sektor pertanian khususnya peternakan dan sawah irigasi serta pengelolaan limbah padat yang belum optimal turut menyumbang emisi metana. Evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan mitigasi GRK belum terintegrasi secara menyeluruh, inventarisasi emisi belum dilakukan secara rutin, dan koordinasi lintas sektor masih terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK, memperkuat sistem inventarisasi data, mendorong penggunaan energi terbarukan, memperbaiki pengelolaan sampah berbasis rendah emisi, serta melindungi kawasan hijau dari konversi lahan. Upaya ini perlu didukung oleh kampanye publik dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga pengurangan emisi GRK dapat diwujudkan secara berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Bogor.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor perlu memperkuat sistem pengendalian pencemaran udara, melalui pemantauan emisi secara berkala, penegakan regulasi lingkungan, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pengurangan sumber pencemar. Di bidang pengelolaan sampah, dibutuhkan penguatan tata kelola melalui penyediaan infrastruktur pengolahan yang memadai, pemberdayaan masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada pendekatan ekonomi sirkular. Selanjutnya, tren positif pada tutupan lahan dan kepuasan publik harus dijaga dan ditingkatkan melalui program reboisasi, perlindungan kawasan hijau, serta pelayanan publik berbasis digital dan transparansi. Untuk mendukung efektivitas kebijakan, sangat penting untuk membangun sistem informasi lingkungan yang terpadu dan *real time*, guna memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan dapat dirumuskan berdasarkan data yang valid, terkini, dan terintegrasi lintas sektor.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan aspek fundamental dalam pembangunan daerah. Data kependudukan yang akurat dan sistem administrasi yang efisien menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan serta penyediaan layanan publik. Strategi pengelolaan kependudukan dan administrasi kependudukan harus diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan bagi masyarakat.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Persentase kepemilikan dokumen kependudukan**	**%**	**n/a**	**n/a**	**68.4**	**78.64**	**73.11**	**72.75**	**79.45**	**73.63**	**81.45**	**76.54**
2	**Cakupan Layanan Adminduk**	**%**	**n/a**	**n/a**	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	**83,06**	**76,54**
a	Perekaman KTP elektronik	%	**n/a**	99.94	100	99.99	100	99,12	100	99.99	98.43	100
b	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	**n/a**	21.36	20	83.46	30	24,58	45	29.61	50.12	37.52
c	Kepemilikan akta kelahiran	%	**n/a**	85.35	85.18	97.44	89.33	94,56	93.36	91.28	95.81	92.11
d	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama	%	**n/a**	25	27.78	30.56	41.67	61,11	55.56	76.47	65.71	82.35
e	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	**n/a**	76.97	n/a	80.67	n/a	80.78	n/a	81.03	80	86,98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dikelola dalam SIPD, 2025

Berdasarkan data capaian indikator kinerja pembangunan daerah dari tahun 2020 hingga 2024 pada sektor administrasi kependudukan, terlihat adanya kemajuan signifikan**,** khususnya dalam aspek perekaman KTP elektronik yang secara konsisten mendekati angka 100 persen dari tahun ke tahun. Namun demikian, terdapat sejumlah

permasalahan utama yang menghambat pencapaian target secara menyeluruh, terutama pada indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan**,** cakupan layanan adminduk**,** dan kepemilikan KIA oleh anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari. Misalnya, pada tahun 2024, realisasi kepemilikan dokumen kependudukan hanya mencapai 76.54 persen, masih berada di bawah target 81.45 persen Sementara itu, cakupan layanan adminduk yang baru mulai terdata pada tahun 2024 pun masih di bawah target (76.54 persen dari target 83.06 persen). Hal serupa terjadi pada kepemilikan KIA, di mana dari target 50.12% hanya terealisasi 37.52 persen

Permasalahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor penghambat**,** seperti kurangnya literasi masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan**,** terbatasnya akses layanan adminduk di wilayah terpencil**,** serta masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan integrasi antar-OPD. Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor pendorong yang patut diapresiasi, seperti meningkatnya jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berbasis perjanjian kerja sama (dari 25 persen pada 2020 menjadi 82.35 persen pada 2024), serta meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dari 76.97 poin menjadi 86.98 poin, yang mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan publik yang semakin membaik.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa rekomendasi solusi dapat diterapkan, antara lain: memperkuat sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan sejak usia dini, meningkatkan aksesibilitas layanan adminduk melalui program jemput bola dan digitalisasi pelayanan, serta memperluas kerja sama lintas sektor dan pemanfaatan data kependudukan secara integratif. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh target indikator dapat tercapai secara lebih merata dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan daerah, karena desa merupakan ujung tombak pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendorong kemandirian desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Berbagai upaya dirancang untuk memperkuat kapasitas desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan klasifikasi desa yang beragam, mulai dari desa mandiri hingga desa tertinggal. Pembangunan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses infrastruktur, tingkat pendidikan, potensi ekonomi lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya dana desa dan kebijakan pembangunan berbasis desa, diharapkan terjadi percepatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Gambaran umum terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Persentase peningkatan status desa mandiri**	**%**	**n/a**	**n/a**	**11.3**	**11.5**	**14.29**	**22,84**	**17.07**	**24.04**	**24.04**	**41.11**
a	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	n/a	n/a	100	99.76	100	100	100	99.76	100	99.52
b	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan Masyarakat	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a
c	Persentase desa yang terfasilitasi melakukan kerjasama	%	n/a	n/a	2.4	5.29	4.81	8,65	7.21	8.41	7.69	7.69
d	Persentase Desa Tertib Administrasi pemerintahan desa	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12,02	12,02
e	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100
f	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	n/a	78.56	n/a	81	n/a	80	n/a	80	80.99	86,98

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikelola dalam SIPD, 2025

Evaluasi terhadap indikator kinerja pembangunan daerah, khususnya pada peningkatan status desa mandiri, menunjukkan tren positif yang signifikan selama periode 2021–2024. Persentase peningkatan status desa mandiri berhasil melampaui target setiap

tahunnya, dari 11,5 persen pada 2021 menjadi 41,11 persen pada 2024, melampaui target sebesar 24,04 persen. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi pemberdayaan desa, fasilitasi penataan desa, dan penguatan kelembagaan masyarakat desa. Keberhasilan ini didukung oleh tingginya komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi penataan desa, yang konsisten mencapai hampir 100 persen setiap tahun, serta partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan yang juga tercatat 100 persen hingga 2023.

Faktor pendorong keberhasilan lainnya meliputi kolaborasi antar desa yang semakin meningkat, terlihat dari meningkatnya persentase desa yang melakukan kerja sama dari 5,29 persen pada 2021 menjadi 8,41 persen pada 2023. Selain itu, peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap perangkat daerah dari 78,56 poin pada 2021 menjadi 86,98 poin pada 2024 menjadi indikator lain keberhasilan pelayanan publik yang berdampak pada pembangunan desa. Terlebih, pada tahun 2024, telah dicapai target 100% lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dan mulai terukur pula persentase desa yang tertib administrasi sebesar 12,02 persen.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian. Masih rendahnya capaian desa yang terfasilitasi dalam melakukan kerja sama pada tahun 2024 yang stagnan di angka 7,69 persen menunjukkan perlunya penguatan fasilitasi kolaborasi antar desa. Selain itu, belum tersedia data awal (baseline) pada tahun 2021 serta kurangnya indikator terukur pada beberapa aspek hingga tahun 2023 (seperti administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan desa) menjadi tantangan dalam melakukan evaluasi yang lebih komprehensif sejak awal program. Permasalahan lain adalah adanya sedikit penurunan dalam fasilitasi penataan desa yang mencapai 99,52 persen pada 2024, menurun dari capaian sempurna pada tahun sebelumnya.

Untuk itu, beberapa rekomendasi solusi dapat dipertimbangkan. Pertama, memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data sejak tahun pertama program guna memperoleh baseline dan tren capaian yang lebih akurat. Kedua, perlu adanya insentif atau dukungan teknis kepada desa agar lebih aktif menjalin kerja sama antar wilayah

sebagai upaya pemerataan pembangunan. Ketiga, menjaga konsistensi dan kualitas fasilitasi penataan desa serta meningkatkan digitalisasi administrasi pemerintahan desa guna mempercepat pencapaian desa yang tertib administrasi. Terakhir, mempertahankan dan memperluas ruang partisipasi masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan publik yang terbukti berdampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan ini berperan strategis dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui program keluarga berencana yang efektif dan berkelanjutan.

Gambaran umum terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Rata-rata jumlah anak per keluarga**	**poin**	**2.04**	**2.04**	**2.44**	**2.12**	**2.42**	**2.17**	**2.40**	**2.17**	**2.39**	**n/a**
2	**Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB (CPR)**	**%**	**70.69**	**73.76**	**70.75**	**74.25**	**70.82**	**61.70**	**61.74**	**66.69**	**61.79**	**66.69**
a	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	**16.49**	**14.01**	**16.39**	**13.62**	**16.30**	**24.58**	**24.54**	**13.04**	**11.00**	**8,38**

Sumber : DP3AP2KB yang dikelola dalam SIPD, 2025

Berdasarkan data indikator kinerja pembangunan daerah dari tahun 2020 hingga 2024 yang berkaitan dengan kependudukan dan program keluarga berencana (KB), terdapat beberapa temuan penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pencapaian target pembangunan.

Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,04, sedangkan target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 2,39. Namun, data realisasi untuk tahun 2024 belum tersedia sehingga evaluasi terhadap capaian indikator ini masih terbatas. Target peningkatan rata-rata anak per keluarga ini dapat mencerminkan perubahan kebijakan atau prioritas yang mungkin mengarah pada peningkatan jumlah anak yang diharapkan dalam keluarga.

Pada indikator persentase pemakaian kontrasepsi KB (Contraceptive Prevalence Rate/CPR), data menunjukkan penurunan dari 73,76 persen pada tahun 2020 menjadi 66,69 persen pada tahun 2024, meskipun realisasi tahun 2024 masih berada di atas target yang ditetapkan sebesar 61,79 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan atau meningkatkan tingkat penggunaan alat kontrasepsi di kalangan pasangan usia subur. Di sisi lain, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 24,41 persen pada 2023 menjadi 8,38 persen pada 2024, yang menunjukkan kemajuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga akan alat kontrasepsi yang sebelumnya belum terpenuhi.

Faktor pendorong keberhasilan ini antara lain adalah peningkatan akses terhadap layanan KB dan penyuluhan yang lebih masif, dukungan kebijakan pemerintah yang memberikan fasilitas dan alat kontrasepsi gratis atau dengan biaya terjangkau, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menyebarkan edukasi dan informasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelibatan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan tenaga kesehatan di tingkat lokal, turut mendukung pencapaian tersebut.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam upaya pencapaian target indikator KB. Penurunan persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) mengindikasikan adanya tantangan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya edukasi yang berkelanjutan dan kurangnya motivasi dari pasangan usia subur untuk menggunakan kontrasepsi secara konsisten. Hambatan sosial dan budaya seperti mitos, stigma, dan norma yang kurang

mendukung juga masih menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, ketidaklengkapan data realisasi pada beberapa tahun menyulitkan proses monitoring dan evaluasi yang efektif, sehingga perencanaan program menjadi kurang optimal.

Berdasarkan evaluasi tersebut, beberapa rekomendasi solusi yang perlu dilakukan antara lain adalah memperkuat kampanye edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya KB dan berbagai metode kontrasepsi yang aman dan efektif. Upaya ini harus melibatkan media sosial, komunitas lokal, dan tenaga kesehatan untuk mencapai cakupan yang lebih luas. Keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama juga sangat penting untuk mengatasi hambatan sosial dan budaya yang masih melekat dalam masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem pencatatan dan pelaporan data agar realisasi program dapat tercatat secara akurat dan lengkap, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh dan tepat waktu. Perluasan akses terhadap berbagai metode kontrasepsi, termasuk melalui layanan mobile dan distribusi di daerah terpencil, juga penting untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terakhir, monitoring dan evaluasi berkala harus dijalankan secara sistematis agar program KB dapat terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga target pembangunan dapat tercapai secara optimal.

i. Perhubungan

Transportasi memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan wilayah. Sistem perhubungan yang baik akan meningkatkan mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Sektor perhubungan menjadi salah satu fokus utama guna menciptakan konektivitas yang lebih baik, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi sektor transportasi saat ini terkait dengan infrastuktur dan pemerataan wilayah. Akses transportasi yang mudah, aman dan lancar ke berbagai wilayah merupakan pekerjaan rumah yang ditangani oleh semua daerah secara komprehensif. Hambatan-hambatan harus ditangani secara terpadu. Transportasi

tidak dapat dilihat secara parsial/sektoral semata dalam penanganannya.

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perhubungan yang belum terselesaikan adalah kemacetan dikarenakan belum optimalnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Kabupaten Bogor, belum optimalnya sarana transportasi yang berkualitas dan terintegrasi, belum optimalnya pemenuhan prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan.

Kabupaten Bogor mengalami pertumbuhan penduduk maupun kendaraan yang cukup tinggi, sementara pertambahan panjang ruas jalan tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah kendaraan ditambah dengan adanya hambatan samping di ruas jalan yang ada, yang mengakibatkan meningkatnya tundaan khususnya pada jam sibuk/jam puncak hampir di setiap ruas jalan yang ada.

Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas adalah suatu ketentuan atau ukuran dalam mengukur kualitas perjalanan terhadap gambaran kondisi operasional arus lalu lintas dan pengendara dalam kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Nilai dari tingkat pelayanan akan berubah seiring dengan adanya peningkatan volume lalu lintas di suatu ruas jalan, *level of service* ini dapat dijadikan sebagai suatu parameter terhadap pelayanan pada suatu arus lalu lintas.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan memberikan pelayanan dalam bidang urusan perhubungan yang dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		*2024*	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Persentase capaian kinerja jaringan jalan**	**%**	**n/a**	**n/a**	**33**	**30**	**67**	**61,60**	**100**	**93**	**33.3**	**30**
2	**Kinerja Lalu Lintas**	**V/C Ratio**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**0,524**	**0,524**
a	Tingkat Ketersediaan Sarana dan prasarana	**%**	**n/a**	**0.59**	53	51	60	59,50	66	65	70.5	70.24

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
b	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	n/a	74.9	n/a	76.8	n/a	80.04	n/a	86.1	86,50	92,99

Sumber : Dinas Perhubungan yang dikelola dalam SIPD, 2025

Berdasarkan data yang ada, rata-rata kualitas pelayanan jalan di jalan Kabupaten Bogor masih berada dalam tingkat pelayanan C dengan karakteristik arus stabil akan tetapi gerak dan kecepatan kendaraan dikendalikan/dibatasi menunjukan kondisi lalu lintas yang cukup terkendali dengan V/C ratio. Di ruas jalan Kabupaten pada angka 0,524 pada tahun 2024 dengan capaian kinerja jaringan jalan sebesar 30 %, terdepat perbedaan capaian pada tahun 2020 hingga 2023 dengan capaian 2024 dikarenakan adanya perubahan target pada Renstra 2018–2023 ke Renstra 2024-2026.

Pada indikator tingkat ketersediaan sarana dan prasarana, realisasi hampir mencapai target, yaitu 70,24 persen pada 2024 dari target 70,5 persen, menandakan adanya peningkatan fasilitas yang mendukung mobilitas masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat terhadap perangkat daerah juga meningkat secara konsisten dari 74,9 poin di 2020 menjadi 92,99 poin di 2024, menunjukkan peningkatan pelayanan publik yang signifikan.

Tantangan yang dihadapi dalam penanganan permasalahan dan pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan adalah: masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum dan belum optimalnya konektivitas serta integrasi transportasi, belum optimalnya kinerja pelayanan lalu lintas, belum memadainya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas, rendahnya dukungan pemerintah dan pendanaan dalam penyelenggaraan transportasi, belum optimalnya bisnis proses kebijakan transportasi baik pusat maupun daerah, perlunya peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor, rendahnya disiplin pengguna jalan, masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transportasi serta masih belum

optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat.

Dengan peluang pengembangan transportasi ramah lingkungan dengan pengembangan angkutan umum massal berupa bus listrik, pengembangan angkutan masal berbasis jalan dan rel beserta prasarananya, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan sarana dan prasarana LLAJ, pengembangan kerjasama pemerintah dan badan usaha (swasta), pelaksanaan reviu rencana aksi RITJ jabodetabek, pengembangan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di wilayah barat dan timur Kabupaten Bogor, pengembangan SDM perhubungan dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu faktor pendorong keberhasil lain yang mendukung pencapaian indikator seperti ketersediaan sarana dan prasarana serta kepuasan masyarakat adalah adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, penggunaan anggaran yang cukup, dan adanya program pelatihan bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kendala administratif, dan resistensi perubahan pada sebagian pelaksana yang kurang adaptif terhadap inovasi baru.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut dan menjalankan rekomendasi solusi yang disarankan, diharapkan pembangunan daerah dapat lebih optimal dan target-target kinerja dapat tercapai secara berkelanjutan. Melalui kebijakan yang tepat, sektor perhubungan diharapkan dapat berkembang secara signifikan dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat, perencanaan transportasi yang berkelanjutan dan inklusif dapat diwujudkan. Keberhasilan dalam pengelolaan perhubungan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah dalam pembangunan nasional.

j. Komunikasi dan Informatika

Sektor komunikasi dan informatika memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan transparansi pemerintahan, serta mempercepat pelayanan publik berbasis digital.

Sektor ini diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, pemerataan akses informasi, serta penguatan sistem digitalisasi pemerintahan dan layanan publik.

Selanjutnya mengenai gambaran umum terkait dengan pelayanan dalam bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Indeks Keterbukaan Informasi Publik**	**poin**	**n/a**	**69.24**	**70**	**74.56**	**70.5**	**82**	**71**	**92.78**	**92**	**90.74**
a	Persentase Diseminasi Informasi melalui Media	%	n/a	88.24	91.67	91.67	91.67	91.67	100	100	67	87.21
2	**Indeks SPBE**	**Poin**	**n/a**	**3.27**	**3.27**	**2.72**	**3.5**	**3.33**	**3.6**	**3.71**	**3.39**	**4.1**
a	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	n/a	88.89	88.89	88.89	88.89	88.89	100	100	90	95.24
3	**Tingkat Kematangan Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik**	poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	n/a
4	**Tingkat Kematangan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi**	poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	n/a
a	Persentase Pemenuhan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	75	86,8
b	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	n/a	80.14	n/a	81.78	n/a	82.06	n/a	83.02	84	84

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikelola dalam SIPD, 2025

Evaluasi kinerja pembangunan daerah pada bidang urusan komunikasi dan informatika dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan, khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik dan transformasi digital pemerintahan. Indeks Keterbukaan Informasi Publik mengalami peningkatan signifikan dari 69,24 poin pada tahun 2020 menjadi 90,74 poin pada tahun 2024, mendekati target tahun tersebut sebesar 92 poin. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam

menyediakan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Namun demikian, terdapat penurunan capaian pada sub-indikator persentase diseminasi informasi melalui media di tahun 2024, yaitu hanya sebesar 87,21 persen setelah sebelumnya mencapai angka maksimal 100 persen pada 2022 dan 2023. Penurunan ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam strategi komunikasi publik dan distribusi informasi, termasuk evaluasi terhadap efektivitas media yang digunakan dan peningkatan kolaborasi antarinstansi dalam publikasi informasi.

Di sisi lain, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan tren yang fluktuatif. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2021 (2,72) dari capaian tahun sebelumnya (3,27), indeks ini kembali meningkat hingga mencapai 4,1 poin di tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,39 poin. Meski capaian ini menunjukkan peningkatan adaptasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan, fluktuasi nilai SPBE mengindikasikan belum stabilnya implementasi dan pemeliharaan sistem digital. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemeliharaan sistem yang berkelanjutan, serta evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur teknologi informasi yang digunakan agar capaian dapat lebih konsisten dan berkelanjutan.

Sementara itu, indikator tingkat kematangan pengelolaan dan layanan informasi serta tingkat kematangan layanan teknologi informasi dan komunikasi baru mulai diukur pada tahun 2024, masing-masing dengan skor 3 dari skala maksimal (kemungkinan 5). Meski belum dapat dianalisis secara tren, nilai awal ini menjadi landasan untuk pembenahan ke depan. Pada sub-indikator pendukung, seperti persentase pemenuhan layanan TIK yang mencapai 86,8 persen (melampaui target 75 persen) dan indeks kepuasan masyarakat terhadap perangkat daerah yang meningkat stabil dari 80,14 pada tahun 2020 menjadi 84 pada 2024, tampak bahwa pelayanan publik yang berbasis digital mendapat respons positif dari masyarakat.

Namun, keterlambatan dalam pengukuran beberapa indikator dan ketiadaan data historis menjadi hambatan dalam melakukan evaluasi komprehensif. Oleh karena itu, perlu dilakukan standardisasi

pengukuran indikator setiap tahun agar hasil evaluasi lebih akurat dan menjadi dasar perencanaan yang kuat. Disamping itu, diperlukan penguatan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi teknis aparatur, serta optimalisasi media komunikasi publik yang lebih adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka, efisien, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sektor koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah harus diarahkan untuk memperkuat ekosistem koperasi dan UMKM agar lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

Peran koperasi sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan, serta UMKM yang merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi, dapat diandalkan sebagai katup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan kesempatan kerja dan nilai tambah.

Mengenai gambaran umum terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Persentase Koperasi Aktif**	**%**	**n/a**	**35.44**	**35.74**	**38.39**	**36.03**	**40.65**	**36.32**	**36.32**	**37**	**43.09**
a	Jumlah usaha koperasi yang melaksanakan RAT	Unit	n/a	n/a	174	175	180	177	185	185	n/a	n/a
b	Persentase KSP/USP Koperasi sehat	%	n/a	n/a	9.84	10.25	10.57	8.22	11.29	11.29	11.41	17.84
2	**Laju Omset Usaha Mikro**	**%**	n/a	n/a	**9.09**	**10.73**	**10**	**9.02**	**10.61**	**10.61**	**10**	**10.76**
a	Rata-rata Omset Usaha Mikro	Rp (000)	n/a	n/a	60,000	60,900	66,000	66,744	73,000	73,000	n/a	n/a
b	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,08	1,16

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
3	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,65	0,71
a	Persentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25,13	33.41
b	Persentase Koperasi Sehat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11.41	17.84
c	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11.28	11.56
d	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.036	0.046
e	Volume Penjualan Produk Usaha Mikro	Rp (Juta)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	103,908	114,790,4
f	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	n/a	78.75	n/a	79.75	n/a	79.06	n/a	79.06	80	83,02

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dikelola dalam SIPD, 2025

Berdasarkan data indikator kinerja pembangunan daerah dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat kemajuan yang cukup signifikan pada beberapa aspek, namun juga ditemukan sejumlah permasalahan yang perlu segera diatasi. Persentase koperasi aktif menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil dari 35,44 persen pada 2020 menjadi 43,09 persen pada 2024, melampaui target tahun tersebut sebesar 37 persen Hal ini mencerminkan peningkatan partisipasi dan aktivitas koperasi, namun masih menyisakan catatan terkait kualitas. Hal ini terlihat dari persentase KSP/USP koperasi sehat yang sempat menurun pada 2022 (8,22 persen) meskipun kemudian meningkat signifikan menjadi 17,84 persen di 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah koperasi aktif bertambah, belum semua memiliki kesehatan usaha yang baik. Permasalahan ini kemungkinan disebabkan oleh lemahnya pembinaan dan kurangnya kapasitas manajerial koperasi.

Di sisi lain, laju omset usaha mikro mengalami fluktuasi namun tetap berada di kisaran yang mendekati target, dengan realisasi 10,76 persen pada 2024 dari target 10 persen Meskipun begitu, pertumbuhan omset usaha mikro tergolong lambat, dengan pertumbuhan hanya sebesar 1,16 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan masih rendahnya akselerasi skala usaha mikro, yang bisa dipengaruhi oleh terbatasnya akses pasar dan permodalan.

Pertumbuhan volume usaha koperasi pada 2024 tercatat 0,71 persen, naik dari 0,65 persen pada tahun sebelumnya, namun angka ini masih relatif kecil. Ini mengindikasikan bahwa meskipun koperasi tumbuh dalam jumlah, skalanya belum berkembang secara signifikan. Salah satu indikator pendukung, yaitu persentase koperasi yang melaksanakan RAT, meningkat dari 25,13 persen menjadi 33,41 persen, menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap tata kelola. Namun, angka ini masih rendah dibandingkan dengan keseluruhan jumlah koperasi yang seharusnya melaksanakan RAT secara rutin. Sementara itu, kepuasan masyarakat terhadap perangkat daerah juga mengalami peningkatan dari 78,75 pada 2020 menjadi 83,02 pada 2024, yang mencerminkan persepsi positif atas pelayanan publik.

Rekomendasi solusi terhadap permasalahan di atas mencakup: (1) peningkatan program pendampingan dan pelatihan manajemen bagi koperasi, terutama yang berbasis simpan pinjam, untuk mendorong peningkatan kesehatan koperasi; (2) penguatan akses pasar dan kemitraan strategis bagi pelaku usaha mikro agar pertumbuhan omset dapat lebih signifikan; (3) peningkatan insentif dan sistem monitoring terhadap pelaksanaan RAT untuk memperbaiki tata kelola koperasi; dan (4) memperluas akses pembiayaan mikro serta literasi keuangan sebagai langkah konkret mendorong pertumbuhan skala usaha mikro. Dukungan ini perlu diiringi dengan digitalisasi sistem pengawasan dan penilaian kinerja koperasi dan UMKM agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

l. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal merupakan aspek strategis dalam pembangunan ekonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kabupaten Bogor sebagai salah satu wilayah penyangga ibu kota memiliki potensi besar untuk menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang komprehensif dalam lima tahun ke depan guna mengoptimalkan investasi di berbagai sektor.

Mengenai gambaran umum terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan penanaman modal di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Persentase peningkatan investasi di Kabupaten**	**%**	**n/a**	**0,22**	**1.1**	**8.04**	**1.6**	**56.42**	**2.6**	**-1.008**	**1.3**	**40.79**
	Perolehan nilai investasi	Triliun Rp	n/a	357	9,2	9.89	9.35	15.33	9.6	12,06	15.2	22,90
2	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan**	**Poin**	**n/a**	**60.402**	**76.7**	**82.86**	**76.8**	**83.77**	**77**	**89.19**	**89,07**	**88.55**
a	Presentase jumlah jenis perizinan yang telah didelegasikan ke DPMPTSP	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a
b	Persentase penurunan pengaduan layanan penanaman modal	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	-25
c	Persentase pelaporan LKPM	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	81
d	Nilai kepatuhan pelayanan publik sangat baik	Poin		78	n/a	82.86	n/a	83.77	n/a	89.07	93	95,31

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikelola dalam SIPD, 2025

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bogor dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sepanjang tahun 2020 hingga Tahun 2024 menunjukkan capaian yang relatif positif meskipun terdapat dinamika yang signifikan. Persentase peningkatan investasi mengalami lonjakan tajam pada tahun 2022 sebesar 56,42 persen dari target 1,6 persen, namun terjadi kontraksi pada tahun 2023 dengan realisasi -1,008 persen dibanding target 2,6 persen, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 40,79 persen, jauh melampaui target 1,3 persen. Perolehan nilai investasi secara nominal terus meningkat, dari Rp9,89 triliun (2021) menjadi Rp22,9 triliun (2024),

menunjukkan keberhasilan dalam menarik investor. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik, khususnya perizinan dan non-perizinan, menunjukkan tren yang sangat baik, tercermin dari peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 82,86 poin (2021) menjadi 93,04 poin (Triwulan I 2025), serta pencapaian nilai kepatuhan pelayanan publik pada kategori "sangat baik" yang konsisten meningkat dari 93 poin (2024) menjadi 95,40 poin. Capaian indikator pendukung lainnya seperti target pelaporan LKPM sebesar 80 persen (2024) terealisasi sebesar 81 persen (2024), serta penurunan pengaduan layanan sebesar -25 persen di tahun 2024 dari target 10 persen, menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pengelolaan investasi dan layanan. Namun demikian, terdapat kekosongan data pada beberapa indikator di tahun 2024, seperti status delegasi perizinan dan pengaduan layanan, yang perlu segera dimutakhirkan untuk mendukung monitoring dan evaluasi secara menyeluruh. Upaya stabilisasi dan keberlanjutan investasi dengan meningkatkan promosi sektor unggulan dan kemudahan berusaha, memperluas digitalisasi layanan dan pelaporan LKPM, meningkatkan kapasitas respons terhadap pengaduan, serta menjamin ketersediaan dan validitas data indikator sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Dengan strategi yang tepat, diharapkan investasi dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor secara inklusif dan berkelanjutan.

m. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bogor. Pemuda sebagai agen perubahan dan inovasi memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, sementara olahraga tidak hanya menjadi sarana meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai industri yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mendukung pengembangan pemuda dan olahraga dalam lima tahun ke depan. Gambaran umum terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan

pemuda dan olahraga di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Tingkat Partisipasi Pemuda**	**%**	**n/a**	**n/a**	**5.44**	**4.89**	**5.46**	**4.97**	**5.49**	**5.78**	**5.37**	**24,47**
a	Persentase organisasi pemuda aktif	%	n/a	87.21	17.44	15.12	23.26	22.09	29.07	17.44	24.42	24.47
2	**Raihan Prestasi Olahraga**	**Prestasi**	n/a	**100**	**77**	**144**	**914**	**863**	**1,011**	**1,301**	**n/a**	**n/a**
a	Prestasi Atlet (Persentase atlet berprestasi)	%	n/a	100	4.74	6.77	25.03	66.22	35.18	49.49	29.76	68.18
3	**Peningkatan Prestasi Olahraga**	**%**	n/a	n/a	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**77**	**201**
4	**Partisipasi Masyarakat Berolahraga (Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO))**	**%**	n/a	n/a	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**22.81**	**26.56**
a	Jumlah masyarakat yang berolahraga	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,237,800	1,509,070
b	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8,35
5	**Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**	**poin**	n/a	45,96	**n/a**	**52,22**	**n/a**	**56,11**	**n/a**	**54,38**	**48,86**	**54,41**
a	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	poin	n/a	77.73	n/a	77.76	n/a	76.81	n/a	85.09	85,10	85,17

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga yang dikelola pada SIPD, 2025

Berdasarkan data indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2020 hingga tahun 2024, terlihat adanya tren peningkatan signifikan pada beberapa aspek pembangunan kepemudaan dan olahraga, namun masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Tingkat partisipasi pemuda menunjukkan peningkatan drastis pada tahun 2024 mencapai 24,47 persen, jauh melampaui target tahun sebelumnya, meskipun sebelumnya cenderung stagnan dan sempat berada di bawah target. Prestasi olahraga juga mengalami lonjakan, dari 144 prestasi pada 2021 menjadi 1.301 pada 2023, menunjukkan efektivitas pembinaan atlet, di

mana persentase atlet berprestasi mencapai 68,18 persen pada 2024, melampaui target 29,76 persen. Selain itu, angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO) menunjukkan tren positif dari 22,81 persen di tahun 2024 menjadi 26,56 persen, dengan peningkatan jumlah masyarakat yang berolahraga mencapai 1,5 juta orang. Namun, persentase organisasi pemuda aktif masih menunjukkan fluktuasi dan belum sepenuhnya konsisten mendekati target. Oleh karena itu, perlunya peningkatan konsistensi pendataan dan pelaporan kinerja tahunan, penguatan dukungan kelembagaan bagi organisasi kepemudaan, serta pengembangan program pembinaan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan raihan prestasi serta partisipasi aktif pemuda dan masyarakat dalam bidang olahraga.

n. Statistika

Dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan statistika merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib non-pelayanan dasar**.** Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Statistik daerah memegang peranan penting sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Dalam konteks kebijakan nasional saat ini, khususnya dalam mendukung transformasi digital pemerintahan**,** pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan, keberadaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan strategis.

Gambaran umum terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan statistika di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistika Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
a	Persentase jumlah data yang ditetapkan telah memenuhi standar kualitas	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30	38.8
b	Indeks Pembangunan Statistik	poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2,80	2,81

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikelola pada SIPD, 2025

Evaluasi kinerja pembangunan daerah terhadap dua indikator utama di bidang statistika, yaitu *Persentase jumlah data yang ditetapkan telah memenuhi standar kualitas* dan *Indeks Pembangunan Statistik*, menunjukkan capaian positif pada tahun 2024. Untuk indikator pertama, capaian realisasi sebesar 38,8 persen melampaui target yang ditetapkan sebesar 30 persen mencerminkan adanya peningkatan dalam pemenuhan standar kualitas data. Demikian pula, Indeks Pembangunan Statistik menunjukkan realisasi sebesar 2,81 poin, sedikit melebihi target sebesar 2,80 poin, yang mengindikasikan kemajuan dalam pembangunan sistem statistik daerah.

Meskipun capaian tahun 2024 menunjukkan tren positif, terdapat sejumlah permasalahan krusial yang perlu dicermati. Salah satu permasalahan utama adalah tidak tersedianya data target dan realisasi untuk kedua indikator pada tahun 2020 hingga 2023. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem dokumentasi, pelaporan, dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Ketidaktercatatannya data historis menyulitkan analisis tren, penilaian efektivitas kebijakan, serta penyusunan perencanaan yang berbasis capaian tahunan. Selain itu, kurangnya integrasi sistem monitoring dan evaluasi, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pengumpulan dan pengelolaan data, turut menjadi hambatan dalam pengembangan statistik yang berkelanjutan dan akuntabel.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa rekomendasi strategis dapat diusulkan. Pertama, perlu dilakukan penguatan sistem

dokumentasi dan pelaporan kinerja melalui pengembangan sistem digital terintegrasi serta pelaksanaan audit data secara berkala. Kedua, menyusun kembali data historis melalui pendekatan rekonstruksi dari sumber-sumber yang tersedia, guna mendapatkan gambaran tren jangka panjang. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik menjadi penting, agar pemahaman terhadap standar kualitas data semakin merata. Keempat, diperlukan penguatan koordinasi antar-perangkat daerah agar indikator yang disusun mencerminkan kondisi riil lintas sektor secara menyeluruh. Terakhir, evaluasi rutin tahunan berbasis data perlu diinstitusikan sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan berbasis bukti. Penguatan fungsi statistik daerah akan mendorong terciptanya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

o. Persandian

Bidang urusan persandian merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berperan strategis dalam menjaga keamanan informasi dan komunikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, persandian menjadi urusan yang harus dikelola dengan cermat dan profesional untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta informasi pemerintah.

Persandian tidak hanya berfungsi sebagai alat pengamanan komunikasi, tetapi juga sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan penerapan sistem persandian yang baik, pemerintah daerah mampu melindungi dokumen dan data strategis dari ancaman penyadapan, pembocoran, atau penyalahgunaan informasi, sehingga mendukung terlaksananya pelayanan publik yang optimal serta menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

Dalam konteks otonomi daerah, penyelenggaraan urusan persandian harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah

pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengamanan informasi negara. Gambaran umum terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan persandian di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Persandian Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
a	Indeks KAMI	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	430	497

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikelola pada SIPD, 2025

Berdasarkan data Indeks Kinerja Pembangunan Daerah (Indeks KAMI) selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa target pencapaian untuk tahun-tahun sebelumnya belum ditetapkan (n/a) sehingga realisasi tidak tercatat. Namun, pada tahun 2024, target Indeks KAMI ditetapkan sebesar 430 poin, dengan realisasi yang berhasil melampaui target yaitu 497 poin. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan dalam pembangunan daerah pada tahun terakhir yang diukur. Meskipun hasil ini sangat positif, permasalahan yang mungkin timbul adalah kurangnya data historis untuk melakukan analisis tren secara menyeluruh serta potensi ketergantungan pada pencapaian satu tahun saja tanpa melihat faktor pendukung jangka panjang. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan standarisasi dan penetapan target Indeks KAMI yang konsisten sejak tahun-tahun sebelumnya untuk memudahkan evaluasi berkelanjutan. Selain itu, perlu dikembangkan sistem monitoring dan pelaporan yang lebih komprehensif serta penerapan strategi pembangunan berkelanjutan agar capaian Indeks KAMI tidak hanya meningkat pada satu periode, tetapi dapat dipertahankan dan terus berkembang secara konsisten.

p. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan identitas dan jati diri suatu daerah yang harus dilestarikan serta dikembangkan sebagai bagian dari

pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Bogor memiliki warisan budaya yang kaya, mulai dari seni, tradisi, hingga cagar budaya yang menjadi aset penting bagi kemajuan daerah. Oleh karena itu, dalam RPJMD Kabupaten Bogor lima tahun ke depan, strategi penguatan kebudayaan menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya tarik wisata berbasis budaya. Mengenai gambaran umum terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan kebudayaan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Jumlah Kebudayaan yang dilestarikan**	**Kebudayaan**	**65**	**65**	**122**	**122**	**124**	**127**	**126**	**144**	**n/a**	**n/a**
2	**Persentase Kebudayaan yang dilestarikan**	**%**	n/a	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**66.4**	**66,36**
A	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan (Festival Budaya + Karya Budaya)	Objek	n/a	54	54	54	56	57	58	72	65	65
B	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	n/a	68	68	68	70	70	72	72	74	74
C	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	84,40	84,17

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang dikelola dalam SIPD,2025

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait urusan kebudayaan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya, terbatasnya infrastruktur dan sarana budaya, ancaman terhadap warisan budaya dan dukungan pembiayaan yang terbatas.

Langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan adalah pelestarian dan revitalisasi budaya lokal dengan penyusunan regulasi dan kebijakan perlindungan warisan budaya, pengembangan infrastruktur dan fasilitas budaya, peningkatan kapasitas dan peran

pelaku budaya, penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya dan promosi digitalisasi budaya. Pelaksanaan urusan kebudayaan lima tahun ke depan harus berfokus pada perlindungan, pelestarian, dan pengembangan budaya lokal sebagai identitas daerah. Dengan strategi yang tepat, kebudayaan dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Kabupaten Bogor dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

q. Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat, mendukung pendidikan formal dan nonformal, serta sebagai pusat informasi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, urusan perpustakaan di Kabupaten Bogor perlu diarahkan pada peningkatan aksesibilitas, kualitas layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung transformasi digital di bidang literasi.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan perpustakaan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**	**poin**	**n/a**	**n/a**	**15.3**	**43.06**	**18.46**	**65.7**	**19**	**38.19**	**66.3**	**58.1**
a	Persentase pengunjung perpustakaan	%	n/a	0.68	1.86	0.74	1.89	2.51	1.93	2.46	n/a	n/a
b	Persentase perpustakaan yang mengelola perpustakaan berbasis TI	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	13.59	9.77
c	IKM Perangkat Daerah	poin	n/a	77.48	n/a	84.11	n/a	84.43	n/a	84.5	n/a	80.86

Sumber : Dinas Dinas Arsip dan Perpustakaan, yang dikelola dalam SIPD,2025

Evaluasi terhadap capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang tidak konsisten. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi indeks literasi

masyarakat berhasil melampaui target dengan capaian masing-masing 43,06 dibanding target 15,3 dan 65,7 dibanding target 18,46. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, realisasi menurun signifikan yakni 38,19 dan 58,1 meskipun target meningkat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam upaya peningkatan literasi yang perlu diatasi. Persentase pengunjung perpustakaan juga masih sangat rendah, yakni berkisar di bawah 3 persen, jauh dari target yang diharapkan. Selain itu, pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi juga belum optimal dengan realisasi di bawah target, yaitu 9,77 persen dibanding target 13,59 persen pada 2024. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap perangkat daerah cenderung stabil, namun ada sedikit penurunan pada 2024 yang perlu diperhatikan.

Permasalahan utama terletak pada rendahnya minat masyarakat terhadap perpustakaan dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan perpustakaan yang berdampak pada capaian literasi. Rekomendasi solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan promosi dan sosialisasi perpustakaan sebagai pusat literasi yang menarik dengan berbagai program inovatif dan berbasis teknologi, serta meningkatkan pelatihan dan fasilitas TI di perpustakaan untuk memperluas akses dan kenyamanan pengguna. Selain itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan efektif dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan masyarakat.

r. Kearsipan

Urusan kearsipan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, urusan kearsipan dikategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan urusan kearsipan memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), melalui pengelolaan arsip yang tertib, autentik, utuh, dan terpercaya. Arsip bukan hanya sebagai bukti akuntabilitas kinerja

pemerintahan, tetapi juga sebagai sumber informasi dan memori kolektif bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membangun sistem kearsipan yang efektif dan efisien, mencakup pembinaan, pengelolaan, dan pelestarian arsip dinamis maupun statis.

Mengenai gambaran umum terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan kearsipan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Persentase arsip yang dialihmediakan dan terautentikasi ke dalam sistem informasi kearsipan**	**%**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**21.73**	**22.12**
a	Persentase unit kearsipan yang mengelola kearsipan berbasis Ti	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	32.89	32.89
b	Persentase arsip vital yang dialihmediakan	%	n/a	9.62	29.33	35.58	65.14	66.11	100	93.51	n/a	n/a

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan, yang dikelola dalam SIPD,2025

Evaluasi terhadap indikator kinerja pembangunan daerah di bidang kearsipan menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama pada tahun 2024. Indikator utama yaitu persentase arsip yang dialihmediakan dan terautentikasi ke dalam sistem informasi kearsipan menunjukkan realisasi sebesar 22,12 persen dari target 21,73 persen, melampaui target yang ditetapkan. Ini mencerminkan adanya komitmen dan peningkatan kinerja dalam digitalisasi dan autentikasi arsip, yang menjadi bagian penting dari transformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.

Selain itu, subindikator persentase unit kearsipan yang mengelola kearsipan berbasis TI juga menunjukkan pencapaian yang sesuai target, yaitu sebesar 32,89 persen. Hal ini menandakan bahwa implementasi sistem digital di unit-unit kearsipan mulai merata dan

dapat dijalankan dengan baik. Namun demikian, perhatian khusus perlu diberikan pada persentase arsip vital yang dialihmediakan, yang meskipun mengalami peningkatan yang cukup stabil dari tahun 2020 hingga 2023 (dari 9,62 persen menjadi 93,51 persen), ternyata tidak tersedia data untuk tahun 2024. Tidak tersedianya data tersebut menjadi catatan penting karena arsip vital memiliki nilai strategis tinggi bagi keberlangsungan fungsi pemerintahan.

Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah belum konsistennya pelaporan data historis untuk beberapa indikator, terutama pada periode 2020 hingga 2022, di mana banyak data tidak tersedia atau tidak ditetapkan target. Hal ini menyulitkan dalam mengukur tren kemajuan secara longitudinal. Selain itu, tidak tercapainya target 100 persen untuk pengalihan media arsip vital pada tahun 2023 (hanya tercapai 93,51 persen mengindikasikan adanya tantangan teknis atau administratif dalam proses tersebut.

Sebagai solusi, perlu dilakukan penguatan sistem perencanaan dan monitoring evaluasi kinerja yang lebih akurat dan konsisten dari tahun ke tahun. Pengembangan kapasitas SDM di bidang pengelolaan arsip digital, penambahan anggaran untuk digitalisasi arsip vital, serta peningkatan integrasi antarunit kerja dalam pelaporan kinerja menjadi langkah strategis yang dapat ditempuh. Selain itu, keberadaan sistem informasi kearsipan yang andal harus terus dikembangkan agar mampu menyimpan, mengautentikasi, dan memantau kinerja arsip secara real time, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

3. Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pembagian kewenangan yang lebih tegas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam urusan kelautan dan perikanan, Undang-Undang ini menempatkan kewenangan pengelolaan sumber daya laut (hingga 12 mil) pada pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota difokuskan pada aspek perikanan budidaya, pemberdayaan masyarakat nelayan, dan pengelolaan hasil perikanan di wilayah darat.

Kabupaten Bogor, meskipun tidak memiliki wilayah laut, tetap memiliki kontribusi strategis dalam sektor perikanan nasional, khususnya di bidang perikanan air tawar dan budidaya ikan hias. Dengan kondisi geografis yang mendukung, termasuk ketersediaan sumber air dan iklim yang ideal, Kabupaten Bogor menjadi salah satu sentra utama budidaya ikan konsumsi dan ikan hias di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Wilayah seperti Parung, Ciseeng, dan Kemang telah dikenal luas sebagai kawasan minapolitan yang mendukung ekonomi lokal berbasis perikanan.

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari pencapaian IKU Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) sebagai berikut:

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Total Produksi Perikanan**	**Ton**	**n/a**	**n/a**	**143,439**	**143,454**	**145,201.50**	**151,055**	**147,159**	**151,223**	**151,112**	**151,112**
a	Jumlah Benih Ikan Konsumsi	RE	n/a	n/a	5,770,238	5,770,236	5,827,940	6,101,022	5,886,220	6,108,879	6,122,752	6,122,752
b	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	n/a	86.74	n/a	83,46	n/a	82.49	n/a	83.51	n/a	90.63

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, yang dikelola dalam SIPD,2025

Evaluasi terhadap indicator bidang urusan kelautan dan perikanan pada periode 2020 hingga 2024, kinerjanya menunjukkan capaian yang positif secara umum, terutama pada indikator Total Produksi Perikanan. Sejak tahun 2021 hingga 2024, produksi perikanan mengalami peningkatan dari 143.454 ton menjadi 151.112 ton. Realisasi produksi setiap tahun juga secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa sektor perikanan memiliki potensi pertumbuhan yang kuat. Namun, terdapat permasalahan dalam penetapan target yang terkesan terlalu konservatif, sehingga tidak mencerminkan tantangan dan potensi riil yang ada di lapangan. Selain

itu, tidak tersedianya data pada tahun 2020 menyulitkan evaluasi tren jangka panjang dan pengambilan kebijakan berbasis data. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap metode penetapan target agar lebih realistis dan menantang. Selain itu, pengumpulan dan pelaporan data sejak tahun dasar perlu diperbaiki untuk mendukung perencanaan yang lebih akurat dan berkelanjutan.

Pada sub-indikator Jumlah Benih Ikan Konsumsi, kinerja juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Realisasi benih ikan konsumsi meningkat setiap tahun, dari 5.770.236 RE pada tahun 2021 menjadi 6.122.752 RE pada tahun 2024. Seluruh capaian ini juga selalu melebihi target tahunan. Meskipun demikian, permasalahan yang sama ditemukan, yaitu penetapan target yang belum mencerminkan kapasitas produksi aktual di lapangan. Tidak adanya data pada tahun 2020 juga menjadi kendala dalam memahami pola perkembangan sektor ini secara menyeluruh. Sebagai solusi, pemerintah daerah perlu melakukan pemutakhiran sistem perencanaan target yang lebih berbasis pada data historis dan potensi lapangan. Selain itu, integrasi sistem informasi antar lembaga dan peningkatan kualitas pendataan di semua level sangat penting untuk mencegah terulangnya kekosongan data.

Sementara itu, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Perangkat Daerah, terjadi fluktuasi yang cukup signifikan. Nilai IKM menurun dari 86,74 poin pada tahun 2020 menjadi 82,49 poin pada tahun 2022, sebelum akhirnya meningkat secara tajam menjadi 90,63 poin pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya penurunan kualitas pelayanan atau ketidakpuasan masyarakat pada periode 2021–2022. Permasalahan lainnya adalah tidak adanya target IKM yang ditetapkan setiap tahun, sehingga menyulitkan pengukuran kinerja secara obyektif. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat yang lebih mendalam guna mengetahui penyebab utama penurunan nilai. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mulai menetapkan target IKM tahunan sebagai tolok ukur peningkatan layanan. Upaya peningkatan kapasitas aparatur dan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat juga perlu terus diperkuat agar peningkatan nilai IKM dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meskipun capaian indikator kinerja pembangunan daerah di bidang perikanan cukup menggembirakan, namun masih terdapat tantangan dalam hal perencanaan yang lebih akurat, peningkatan kualitas data, serta penguatan layanan publik. Dengan mengatasi permasalahan tersebut melalui solusi yang terarah, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data capaian indikator kinerja pembangunan daerah, terdapat beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sektor ini ke depan.

Mengenai gambaran umum terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan pariwisata di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Pariwisata Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**	**%**	**n/a**	**n/a**	**4.98**	**4.36**	**5.03**	**4.7**	**5.08**	**4.9**	**5,09**	**n/a**
2	**Persentase PAD sektor pariwisata**	**%**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**11**	**12.63**
a	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kunjungan	n/a	4.469.286	5,000,000	6,455,954	8,000,000	8,157,531	10,000,000	12,803,679	10,500,000	16,256,354

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dikelola pada SIPD, 2025

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, realisasi kontribusi sektor ini sebesar 4,36%, sedikit di bawah target sebesar 4,98 persen. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan tren yang meningkat dengan realisasi masing-masing 4,7 persen dan 4,9

persen, meskipun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan potensi besar yang masih dapat dioptimalkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.

Persentase PAD dari sektor pariwisata juga mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, realisasi PAD dari sektor ini mencapai 12,63 persen, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 11 persen. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan optimalisasi potensi ekonomi dari sektor pariwisata.

Jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi kunjungan wisatawan mencapai 4.469.286 dan pada tahun berikutnya 2021 jumlahnya mencapai 6.455.954 kunjungan, melampaui target sebesar 5.000.000 kunjungan. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dengan realisasi jumlah kunjungan wisatawan mencapai 13.490.608 kunjungan, jauh di atas target sebesar 10.500.000 kunjungan. Hal ini menunjukkan daya tarik wisata Kabupaten Bogor yang semakin meningkat serta efektivitas strategi pemasaran dan pengelolaan destinasi wisata.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah untuk kurun lima waktu ke depan terkait dengan pelaksanaan urusan pariwisata adalah:

- Diversifikasi Produk Wisata: Pengembangan destinasi wisata yang lebih variatif dan inovatif perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing dengan daerah lain.
- Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas: Ketersediaan infrastruktur penunjang, seperti jalan, transportasi umum, dan fasilitas wisata, harus terus ditingkatkan untuk mendukung kenyamanan wisatawan.
- Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Masyarakat sekitar destinasi wisata perlu lebih dilibatkan dalam kegiatan ekonomi pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Penguatan Promosi dan Digitalisasi: Pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran wisata dapat lebih ditingkatkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.

- Keberlanjutan Lingkungan: Aspek kelestarian lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan destinasi wisata agar dapat terus memberikan manfaat jangka panjang.

Dengan berbagai capaian positif serta strategi pengembangan yang tepat, sektor pariwisata di Kabupaten Bogor berpotensi menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi hal yang penting dalam memastikan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Namun demikian sektor pertanian di Kabupaten Bogor mengalami permasalahan berupa peningkatan konversi lahan sawah dan produktivitas padi yang cenderung tidak meningkat.

Gambaran umum mengenai kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan pertanian di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanian Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Produksi pertanian lokal yang berdaya saing**	**Ton**	**n/a**	**858868**	**738,076**	**877,313**	**739,401**	**857,242**	**740,728**	**828,067**	**n/a**	**n/a**
2	**Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan**	**ton**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**748,135**	**802,441**
a	Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ton/Ha	n/a	13.33	6.95	6.74	6.96	6.9	6.97	6.65	6.74	6.46
b	Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya	%	n/a	4.368	1.51	2.42	1.62	1.71	1.73	3	1.78	1.87
c	Produktivitas pertanian per hektar	Ton/Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6,74	6,46

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
d	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	n/a	80.98	n/a	81.01	n/a	81.01	n/a	81.01	82	84,67
1	**Total Produksi Peternakan**	**Ton**	**n/a**	**n/a**	**368,609**	**369,101**	**380,945**	**341,025**	**393,830**	**349,483**	**364,334**	**364,391**
a	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	n/a	354,694	38,270,763	38,380,306	39,213,020	39,185,935	40,181,541	40,140,051	40,432,827	40,432,827

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikelola pada SIPD, 2024

Evaluasi kinerja pembangunan daerah pada sektor pertanian dan peternakan menunjukkan beberapa perkembangan yang perlu mendapat perhatian serius. Produksi pertanian lokal yang berdaya saing sepanjang tahun 2020 hingga 2023 cenderung stagnan dengan realisasi produksi yang hampir selalu di bawah target, misalnya pada 2022 target produksi sebesar 857.242 ton, namun realisasinya hanya mencapai 740.728 ton. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 13,33 ton/ha pada 2020 turun menjadi hanya sekitar 6,46 ton/ha pada 2024. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) pertanian juga masih rendah, dengan persentase peningkatan kompetensi yang tidak konsisten dan cenderung di bawah target, sehingga berdampak pada produktivitas yang stagnan. Sektor peternakan, meskipun populasi ternak meningkat dari sekitar 38 juta ekor pada 2021 menjadi lebih dari 40 juta ekor pada 2024, total produksi peternakan justru mengalami fluktuasi dan tidak menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Permasalahan utama yang tampak adalah rendahnya produktivitas per hektar di sektor pertanian, kurangnya peningkatan kompetensi SDM yang memadai, dan ketidakseimbangan antara populasi ternak dengan output produksi. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala teknis di lapangan seperti penggunaan teknologi pertanian yang belum optimal, kurangnya pelatihan dan pembinaan SDM, serta kemungkinan masalah kesehatan dan manajemen ternak yang belum efektif.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah harus fokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan

intensif dan pendampingan teknologi pertanian modern. Selain itu, perlu diupayakan penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan guna meningkatkan produktivitas lahan. Di sektor peternakan, perlu dilakukan evaluasi manajemen kesehatan ternak dan peningkatan program breeding yang berkualitas agar peningkatan populasi ternak dapat diimbangi dengan peningkatan produksi. Pendekatan terpadu antara pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen produksi akan menjadi kunci untuk mencapai target kinerja pembangunan yang lebih optimal di masa mendatang.

d. Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Bogor. Dengan potensi geografis yang menguntungkan serta pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, perdagangan menjadi salah satu sektor yang dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bogor memiliki aksesibilitas yang baik dengan berbagai daerah di sekitarnya, termasuk Jakarta dan kota-kota penyangga lainnya. Kondisi ini mendukung berkembangnya perdagangan barang dan jasa, baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan perdagangan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari pencapaian IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) sebagai berikut:

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Perdagangan Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan**	**Miliar (Rp)**	**n/a**	**29.858**	**30,156**	**30,594**	**30,458**	**32,391**	**30,458**	**32,391**	**35,840**	**35,521**
a	Persentase Pertumbuhan Nilai ekspor	%	n/a	n/a	1	1	1	1.19	1	1.95	2.14	2,14
b	Cakupan wilayah tertib ukur	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a
c	Persentase cakupan layanan wajib tera dan tera ulang	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80.02	121
d	Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri	Ribu (Rp)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	458,950,900	458,950,900
e	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18	18
f	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	poin	n/a	80.34	n/a	80.48	n/a	81.36	n/a	81.45	83,72	83,72

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dikelola pada SIPD, 2025

Kinerja pembangunan daerah di sektor perdagangan menunjukkan tren positif secara umum dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, terutama terlihat dari peningkatan Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan yang mengalami kenaikan dari Rp29.858 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp35.521 miliar pada tahun 2024. Meskipun capaian ini mendekati target yang ditetapkan sebesar Rp35.840 miliar, masih terdapat sedikit deviasi yang mencerminkan perlunya penguatan strategi peningkatan sektor perdagangan. Persentase pertumbuhan nilai ekspor juga menunjukkan perbaikan, dari 1 persen pada tahun 2021 menjadi 2,14 persen pada tahun 2024, yang menandakan adanya peningkatan daya saing produk lokal di pasar internasional. Di sisi lain, indikator cakupan wilayah tertib ukur dan layanan wajib tera dan tera ulang menunjukkan konsistensi dan peningkatan signifikan, bahkan cakupan layanan tera mencapai 121 persen dari target 80,02 persen pada 2024, yang patut diapresiasi. Namun demikian, indikator lain seperti nilai investasi sektor perdagangan dalam negeri yang baru

tersedia datanya di tahun 2024 memerlukan perhatian lebih lanjut untuk menjamin keberlanjutan investasi di tahun-tahun mendatang. Selain itu, koefisien variasi harga antar wilayah tetap berada pada angka 18% tanpa perbaikan, mengindikasikan masih adanya ketimpangan harga di tingkat kabupaten. Meskipun demikian, indeks kepuasan masyarakat terhadap perangkat daerah meningkat secara stabil hingga mencapai 83,72 poin di tahun 2024, mencerminkan peningkatan pelayanan publik.

Beberapa permasalahan utama yang perlu diperhatikan meliputi tidak tercapainya target NTB secara penuh, keterbatasan data historis pada sejumlah indikator penting, dan masih tingginya disparitas harga antar wilayah. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan terkait dengan pelaksanaan layanan urusan perdagangan adalah: (1) Peningkatan infrastruktur perdagangan, termasuk pasar modern dan tradisional yang lebih efisien; (2) Penguatan ekosistem ekspor, dengan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor; (3) Pengembangan program digitalisasi perdagangan untuk meningkatkan akses pasar bagi UMKM dan (4) Penguatan regulasi dan edukasi mengenai standar perdagangan, guna memastikan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.

e. Perindustrian

Dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor perindustrian di Kabupaten Bogor, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah bruto serta pengembangan sentra industri. Pembangunan sektor ini diarahkan untuk menciptakan daya saing industri lokal, meningkatkan produktivitas usaha, serta memperkuat rantai pasok industri yang berkelanjutan.

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan perindustrian di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari pencapaian IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) sebagai berikut:

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Perindustrian Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	**Nilai Tambah Bruto (NTB) Pengolahan**	**Miliar (Rp)**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**151,653**	**151,684**
f	Proporsi Industri Kecil Menengah pada tingkat Kabupaten	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96,62	96,62

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dikelola pada SIPD, 2025

Pada tahun 2024, capaian pembangunan daerah pada indikator Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor pengolahan menunjukkan hasil yang positif. Target yang ditetapkan sebesar Rp151.653 miliar berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar Rp151.684 miliar, atau tercapai 100,02%. Capaian ini mencerminkan adanya kontribusi yang stabil dari sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, indikator proporsi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di tingkat kabupaten juga menunjukkan capaian sesuai target, yakni sebesar 96,62%. Capaian ini menunjukkan bahwa porsi IKM dalam struktur ekonomi daerah masih sangat dominan. Perlu dilakukan pendataan dan pemetaan IKM secara berkala serta pengembangan basis data tahunan yang terintegrasi. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap program-program IKM juga penting dilakukan agar peningkatan proporsional ini dapat berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah.

Selain itu, proporsi Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 18 persen pada tahun 2024 menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan akses pasar bagi IKM. Sebagai solusi, pemerintah daerah perlu memperkuat program inkubasi bisnis industri berbasis potensi lokal, memperluas kemitraan dengan sektor swasta, serta mempercepat digitalisasi industri dan pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan produktivitas serta nilai tambah sektor industri secara berkelanjutan.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, beberapa strategi akan terus dikembangkan, antara lain: (1) meningkatkan efisiensi

produksi melalui adopsi teknologi industri 4.0; (2) memperkuat kapasitas tenaga kerja industri melalui pelatihan dan sertifikasi; dan (3) Meningkatkan akses pasar bagi produk industri lokal melalui promosi dan ekspor

f. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu strategi pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan penduduk, pengembangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan transmigrasi dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam lampiran undang-undang tersebut, transmigrasi termasuk dalam urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, yang sebagian kewenangannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan sebagian lainnya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip pembagian urusan pemerintahan yang meliputi kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan transmigrasi di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Transmigrasi Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
a	Kebijakan Transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja yang dikelola pada SIPD, 2025

Indikator kinerja pembangunan daerah terkait "Kebijakan Transmigrasi Pemerintah Pusat yang Ditindaklanjuti" menunjukkan capaian yang konsisten sebesar 100 persen dari tahun 2021 hingga

2024. Capaian ini sejalan dengan target yang telah ditetapkan sejak tahun 2022 hingga 2024, mencerminkan keseriusan daerah dalam merespons kebijakan pemerintah pusat. Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pada tahun 2021 tidak terdapat target yang ditetapkan (n/a), yang menunjukkan adanya kelemahan dalam proses perencanaan awal atau kurangnya sinkronisasi antara perumusan indikator dan target tahunan. Kedua, indikator ini bersifat *kuantitatif* dan *biner*—menilai hanya apakah kebijakan telah ditindaklanjuti atau belum—tanpa memberikan gambaran mengenai kualitas, efektivitas, atau dampak dari tindak lanjut tersebut. Hal ini menimbulkan potensi bahwa capaian 100 persen hanya mencerminkan kepatuhan administratif, bukan keberhasilan substansial di lapangan. Oleh karena itu, disarankan agar perencanaan indikator lebih diperkuat, khususnya dalam penetapan target sejak awal periode. Selain itu, indikator perlu dikembangkan agar mencakup aspek kualitas pelaksanaan dan dampak terhadap masyarakat. Evaluasi lapangan serta audit kualitatif juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditindaklanjuti benar-benar memberi manfaat. Terakhir, peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci untuk menjaga keselarasan kebijakan serta keberlanjutan program transmigrasi di masa mendatang.

2.2 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bogor Sampai Dengan Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan urusan wajib tersebut dimaksudkan agar daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dengan menggunakan prinsip pemerataan

dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Terkait hal tersebut, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Selain itu, dalam Pasal 298 undang-undang tersebut, mengamanatkan bahwa Belanja Daerah di prioritaskan untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) diartikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Keenam urusan wajib tersebut kemudian dikelompokan menjadi 6 (enam) Jenis Standar Pelayanan Minimal yang masing-masingnya memiliki muatan materi SPM yang mencakup Jenis, Mutu, dan Penerima Pelayanan Dasar.

Luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjangkau dan

menerapkan standar pelayanan minimal bagi masyarakatnya. Namun Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SPM.

Selain itu, dalam konteks belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah memprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM pada setiap urusan sesuai yang ditentukan. Pemerintah Kabupaten Bogor secara berkelanjutan terus meningkatkan jumlah anggaran belanja untuk penguatan penerapan SPM di Kabupaten Bogor. Hal tersebut dilandasi oleh paradigma dalam penerapan SPM, bahwa bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama, tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan. Sasaran Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhanan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas setiap tahapan penerapan SPM di Kabupaten Bogor. Upaya optimalisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui pembentukan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan fungsi utama mengoordinasikan penerapan SPM di Pemerintah Kabupaten Bogor. Selanjutnya dalam rangka memastikan pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten Bogor secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan setiap jenis SPM yang disusun dalam bentuk Rencana Aksi Penerapan SPM setiap tahun. Berikut ini disajikan data capaian SPM Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Tabel 2.61
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bogor Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian	Total Pencapaian
I	**Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan**	**Tuntas Utama**	**99,89 %**
1	Pendidikan Dasar Usia Dini		99,96 %
2	Pendidikan Dasar		99,71 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian	Total Pencapaian
3	Pendidikan Kesetaraan		100,00 %
II	**Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan**	**Tuntas Utama**	**99,99 %**
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		100,00 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		100,00 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		99,98 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita		99,89 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		99,97 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		100,00 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		100,00 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		100,00 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		100,00 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		100,00 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		100,00 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*		100,00 %
III	**Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum**	**Tuntas Paripurna**	**100,00 %**
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		100,00 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik		100,00 %
IV	**Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Permukiman**	**Tuntas Paripurna**	**100,00 %**
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		100,00 %
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100,00 %
V	**Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas**	**Tuntas Paripurna**	**100,00 %**
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)		100,00 %
VI	**Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Kebencanaan**	**Tuntas Paripurna**	**100,00 %**
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		100,00 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)		100,00 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)		100,00 %
VII	**Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pemadam Kebakaran**	**Tuntas Paripurna**	**100,00 %**
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		100,00 %
VIII	**Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial**	**Tuntas Paripurna**	**100,00 %**
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		100,00 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti		100,00 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		100,00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian	Total Pencapaian
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		100,00 %

Sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/

2.3 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, tujuan pembentukan BUMD adalah:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dengan kata lain, BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pencapaian visi dan misi daerah yang ditandai dengan kontribusi dalam capaian Indikator Kinerja Daerah, selain itu BUMD juga memiliki peran sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam bentuk dividen atas penyertaan modal pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bogor hingga tahun 2024 memiliki delapan BUMD yang dibagi menjadi BUMD Aneka Usaha dan BUMD Lembaga Keuangan, yaitu:

1. BUMD Aneka Usaha:
   a. Perumda Pasar Tohaga
   b. Perumda Air Minum Tirta Kahuripan
   c. PT. Prayoga Pertambangan dan Energi
   d. PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda)
2. BUMD Lembaga Keuangan:
   a. PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda)
   b. PT. LKM Bogor
   c. PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda)
   d. LPK Ciampea

2.3.1.Profil dan Kinerja BUMD

1. Perumda Pasar Tohaga

a. Dasar Pembentukan

- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Bogor;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga.

b. Visi dan Misi Perusahaan

- Visi: Menjadikan Perumda Pasar Tohaga sebagai pengelola Pasar Rakyat yang modern, berdaya saing dan adaptif dengan inovasi dan digitalisasi.
- Misi:
  1) Terwujudnya Transformasi Digital.
  2) Tercapainya Peningkatan Pendapatan Daerah.
  3) Terlaksananya Tata Kelola Sumber Daya Manusia Yang Baik dan Berkelanjutan.
  4) Terwujudnya Kemitraan Strategis.

c. Struktur Modal

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor (100%)

d. Susunan Pengurus

Dewan Pengawas :

Ketua Dewan Pengawas : Ir.Suryanto Putra, M.Si.
Anggota Dewan Pengawas : Adrianto, S.E.
Anggota Dewan Pengawas : Jajang Purkon, SH, M.H.

Direksi :

Direktur Utama : H. Haris Setiawan, S.E.,M.M
Direktur Umum : M. Zakie Hanifan, S.E., M.M.
Direktur Operasional : Haris Ibrahim, S.T.

e. Capaian kinerja pembangunan

Tabel 2.62

Capaian Kinerja Pembangunan Perumda Pasar Tohaga

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pasar Rakyat Yang Dikelola	Pasar	30	30	30	30	31

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.	Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Rakyat	Pasar	2	3	1	-	1
3	Fasilitas Penunjang	Pasar	-	2	3	2	2

Sumber: Data Perumda Pasar Tohaga, 2025

f. Kinerja keuangan

1) Tahun 2020 :
   Laba Bersih Rp. 1.058.693.536,- Predikat WTP
   Deviden Pemerintah Daerah (PAD) : Rp. 582.281.445,-
2) Tahun 2021 :
   Laba Bersih Rp. 1.149.673.928,- Predikat WTP
   Deviden Pemerintah Daerah (PAD) : Rp. 632.320.660,-
3) Tahun 2022 :
   Laba Bersih Rp. 1.635.847.033,- Predikat WTP
   Deviden Pemerintah Daerah (PAD) : Rp. 899.715.868,-
4) Tahun 2023 :
   Laba Bersih Rp. 762.608.293,- Predikat WTP
   Deviden Pemerintah Daerah (PAD) : Rp. 419.434.561,-
5) Tahun 2024 :
   Laba Bersih Rp. 1.284.830.949,- Predikat WTP
   Deviden Pemerintah Daerah (PAD) : Rp. 706.657.022,-

2. Perumda Air Minum Tirta Kahuripan

a. Dasar Pembentukan

   Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

b. Visi dan Misi Perusahaan

- Visi: Menjadi Perusahaan Air Minum Termaju dan Terbaik Di Indonesia
- Misi:
  1) Memberikan Pelayanan Air Minum Dengan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Sesuai Dengan Persyaratan Serta Memperhatikan Keterjangkauan Masyarakat

2) Terciptanya pelayanan air minum yang efektif dan efisien dalam memperluas cakupan pelayanan
3) Meningkatkan Pendapatan Perusahaan dalam mendukung Perekonomian Daerah
4) Meningkatkan peran Dalam Pelestarian Lingkungan Sumber Air Baku di Wilayah Kabupaten Bogor
5) Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, penerapan teknologi dan Kesejahteraan Pegawai
6) Meningkatkan pelayanan berkelanjutan dan berdaya saing sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Pelanggan, Pemerintah Dearah serta Pegawai

c. Struktur Modal
   - Pemerintah Kabupaten Bogor : 100%

d. Susunan Pengurus:

Ketua Dewan Pengawas : Ajat Rochmat Jatnika
Anggota Dewan Pengawas : Bambang Pria Kusuma
Anggota Dewan Pengawas : Yuli Iriani
Direktur Utama : Tedi Kurniawan
Direktur Operasional : Asep Wildan
Direktur Umum : Abdul Somad

e. Capaian Kinerja Pembangunan

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Pembangunan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sambungan Langganan Terdaftar	SL	**182.045**	**198.587**	**212.377**	**224.161**	**234.795**
	- Cab. Leuwiliang	SL	14.042	14.824	15.596	16.492	17.250
	- Cab. Ciomas	SL	29.171	29.914	31.063	31.822	32.452
	- Cab. Kemang	SL	17.756	18.287	18.700	19.102	20.135
	- Cab. Parung Panjang	SL	21.482	23.773	25.794	30.400	34.195
	- Cab. Cileungsi	SL	30.307	30.906	31.434	34.956	35.784
	- Cab. Ciawi	SL	10.530	11.208	11.830	12.672	13.273
	- Cab. Cibinong	SL	32.486	34.179	39.786	32.452	33.179
	- Cab. Jonggol	SL	26.271	27.876	29.456	27.612	28.435
	- Cab. Babakan Madang	SL	-	7.620	8.718	18.653	20.092
2.	Sambungan Langganan Tertagih	SL	**157.259**	**170.221**	**180.387**	**188.527**	**197.339**
	- Cab. Leuwiliang	SL	9.981	10.876	11.282	11.566	11.858

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	- Cab. Ciomas	SL	27.002	27.444	28.031	28.585	29.686
	- Cab. Kemang	SL	14.854	15.274	15.567	15.495	16.365
	- Cab. Parung Panjang	SL	18.741	20.777	22.440	24.954	28.065
	- Cab. Cileungsi	SL	26.488	24.636	27.132	30.152	30.564
	- Cab. Ciawi	SL	8.918	9.426	9.962	10.498	10.963
	- Cab. Cibinong	SL	31.680	33.626	35.169	28.574	29.542
	- Cab. Jonggol	SL	19.595	21.387	22.759	21.771	22.110
	- Cab. Babakan Madang	SL	-	6.775	8.048	16.932	18.186
3.	Cakupan Wilayah						
	- Administrasi	%	24,92	13,17	11,21	11,97	13,10
	- Teknis	%	28,43	28,60	24,00	30,57	31,78
4.	Pembagian laba ke Pemda (PAD)	Rp.	48.061.426.503	51.031.316.189	51.358.311.620	52.039.716.905	57.000.365.210

Sumber: Data Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, 2025

f. Kinerja Keuangan

Tabel 2.64

Kinerja Keuangan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Laba/(Rugi)**						
	- Pendapatan	Rp.	377.311.701.384	392.671.435.090	401.283.470.287	465.642.318.443	507.730.167.698
	- Biaya	Rp.	261.228.582.859	274.347.034.477	281.220.910.108	333.840.282.641	371.391.497.180
	- Laba Sblm Pjk	Rp.	116.083.118.525	118.324.400.613	120.062.560.179	131.802.035.802	136.338.670.518
	- Laba Stlh Pjk	Rp.	92.784.211.252	93.378.746.582	94.617.667.100	103.637.027.656	107.814.501.926
2.	**Neraca**						
	Jumlah Aset	**Rp.**	**801.563.142.787**	**833.290.433.192**	**885.396.307.944**	**982.218.133.091**	**1.065.692.657.650**
	- Aset Lancar	Rp.	151.714.509.144	160.334.729.033	147.876.015.477	145.405.452.420	149.127.955.653
	- Aset Tdk Lancar	Rp.	649.848.633.643	672.955.704.159	737.520.292.467	836.812.680.671	916.564.701.997
	Jumlah Kewajiban & Ekuitas	**Rp.**	**801.563.208.787**	**833.290.433.192**	**885.396.307.944**	**982.218.133.091**	**1.065.692.657.650**
	- Kewajiban	Rp.	83.652.398.237	76.911.642.264	46.320.790.571	55.372.832.777	91.122.861.689
	- Ekuitas	Rp.	717.910.810.550	756.378.790.928	839.075.517.373	926.845.300.314	974.569.795.961
3.	Investasi	Rp.	69.485.402.433	103.288.692.618	122.038.832.113	84.193.413.285	204.863.096.517

Sumber: Data Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, 2025

3. PT. Prayoga Pertambangan dan Energi

a. Dasar Pembentukan

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi

b. Visi dan Misi Perusahaan

- Visi: Menjadi BUMD unggulan di sektor pertambangan dan energi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing nasional.
- Misi:
  1) Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan
  2) Memberikan kontribusi nyata terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat
  3) Menjalankan usaha berbasis tata kelola yang baik

c. Struktur Modal

- Pemerintah Kabupaten Bogor Rp. 164.000.000.000,-
- Radjab Tampubolon Rp. 625.000.000,-

d. Susunan Pengurus

- Komisaris : Didi Kurnia, SH, MSi
- Direktur : Anjar Putri Kirana, SH, MH

e. Capaian Kinerja Pembangunan

- Perkembangan bisnis perusahaan masih memprihatinkan, yang ditunjukkan dengan hilangnya lini bisnis tambang .
- Posisi akun utang-piutang mengindikasikan, sebagian besar utang-piutang itu adalah utang-piutang berusia panjang (lebih dari 5 tahun). Kondisi ini juga menunjukkan ada masalah dalam proses penagihan piutang dan pelunasan utang sehingga menimbulkan keraguan mengenai keberadaan/eksistensi dan kewajaran penilaiannya. Kondisi ini juga menjadi pertimbangan bagi auditor eksternal dalam memberikan pernyataan pendapatnya (*disclaimer of opinion* untuk tahun 2019 – 2020, dan *qualified opinion* untuk tahun 2021 – 2022), sementara tidak ada audit independen untuk tahun 2017 – 2018.
- Postur hasil usaha selama tahun 2017–2023 menunjukkan beban usaha yang relatif jauh lebih besar daripada laba kotor (*gross-margin*) sehingga perusahaan mengalami rugi usaha selama periode tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa bisnis yang dikelola perusahaan tidak layak (*feasible*) karena

(1) biaya produksi yang terlalu tinggi dan/atau tidak efisien, dan (2) biaya usaha yang terlalu tinggi dan/atau tidak efisien.

f. Kinerja Keuangan

AKUN	TAHUN BUKU						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN USAHA							
Usaha Tambang	3.476.729	4.671.614	0	0	0	0	0
Usaha AMP	18.603.096	22.002.443	911.667	10.219.339	6.945.074	1.460.013	0
Jumlah Pendapatan Usaha	22.079.825	26.674.057	911.667	10.219.339	6.945.074	1.460.013	0
BEBAN POKOK PENDAPATAN							
Usaha Tambang	6.738.242	3.765.414	0	0	0	0	0
Usaha AMP	23.405.607	20.679.732	294.983	7.422.204	2.732.230	2.162.900	0
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	30.143.849	24.445.146	294.983	7.422.204	2.732.230	2.162.900	0
LABA (RUGI) KOTOR	-8.064.024	2.228.911	616.684	2.797.135	4.212.844	-702.887	0
BEBAN USAHA							
Beban Operasional	1.594.607	455.652	6.152.732	6.159.913	5.926.716	3.177.325	1.328.432
Beban Pegawai	9.240.603	7.910.964	469.127	1.745.400	2.324.565	3.356.467	0
Beban Umum dan Administrasi	2.665.427	1.887.661	164.517	206.588	2.319.396	2.220.127	40.500
Beban Perizinan, Survei	314.466	339.494	0	0	0	0	0
Beban Pajak dan Retribusi	145.038	287.369	0	0	0	0	0
Jumlah Beban Usaha	13.960.141	10.881.140	6.786.376	8.111.901	10.570.677	8.753.919	1.368.932
LABA (RUGI) USAHA	-22.024.165	-8.652.229	-6.169.692	-5.314.766	-6.357.833	-9.456.806	-1.368.932
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN LAIN							
Pendapatan Keuangan	83.483	26.030	5.394	20.416	0	0	0
Beban Keuangan	-1.639.657	-2.278.525	-176.186	-4.132	-1.872.066	-635.564	0
Pendapatan (Beban) Lain Lain	64.418	2.910	0	0	392433	7.880.745	0
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain Lain	-1.491.756	-2.249.585	-170.792	16.284	-1.479.633	7.245.181	0
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	-23.515.921	-10.901.814	-6.340.484	-5.298.482	-7.837.466	-2.211.625	-1.368.932
BEBAN PAJAK							
Pajak Tangguhan	76.020	0	0	0	0	0	0
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	-23.439.901	-10.901.814	-6.340.484	-5.298.482	-7.837.466	-2.211.625	-1.368.932

Sumber: Data PT. Prayoga Pertambangan dan Energi, 2025

Gambar 2.71

Kinerja Keuangan PT. Prayoga Pertambangan dan Energi

4. PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda)

a. Dasar Pembentukan

- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Pariwisata

b. Visi dan Misi Perusahaan

- Visi: Menjadi pemilik dan pengelola bisnis wisata dan sarana wisata yang terkemuka dan berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
- Misi:

1) Memiliki unit usaha yang menguntungkan (*profitable*).

2) Menjadikan objek wisata dan tujuan wisata yang berkelas di Bogor, dikelola secara profesional, dan memberi manfaat ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat sekitarnya.
3) Membangun proses bisnis yang memiliki efektifitas, efisiensi dan daya saing yang tinggi.

c. Struktur Modal

- Penyertaan Modal Daerah (PMD): 189.171.038.000
- Setoran Modal Perorangan: 150.000.000

TOTAL 189.321.038.000

d. Susunan Pengurus

- Dewan Pemegang Saham dan Komisaris
  1. Komisaris Utama: Zaenal Ashari
  2. Pemegang Saham dan Komisaris: Zainal Syafruddin
- Dewan Direksi
  1. Direktur Utama: Supriadi Jufri
  2. Direktur Umum dan Keuangan: Aminudin

e. Capaian Kinerja Pembanguan

Tabel 2.65

Capaian Kinerja Pembangunan PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda)

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Banyaknya Unit Bisnis	unit	3	4	4	4	4
2.	Pendapatan usaha tahunan	(Rp) Miliar	11	8	25	10	8
3.	Jumlah kunjungan wisata	Ribu Orang	35	39	51.8	50.3	58

Sumber: Data PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda), 2025

f. Kinerja Keuangan

Tabel 2.66

Capaian Kinerja Keuangan PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda)

No.	Tahun	Pendapatan (Rp)	Biaya (Rp)	Laba/ Rugi (Rp)
1	2020	11.006.482.264	11.517.161.376	-510.679.112

No.	Tahun	Pendapatan (Rp)	Biaya (Rp)	Laba/ Rugi (Rp)
2	2021	0	0	0
3	2022	25.158.724.445	21.897.406.594	3.261.317.851
4	2023	10.893.202.000	13.655.412.386	-2.762.210.386
5	2024	7.317.634.209	10.806.934.092	-3.489.299.883

Sumber: Data PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda), 2025

Keterangan:

- Kerugian PT Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) terjadi akibat belum terselesaikannya Pembangunan Hotel yang menjadi penopang utama rencana pendapatan dan menyerap **94.6%** modal investasi PT Sayaga Wisata Bogor (Perseroda).

  Merujuk pada kajian investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Penyertaan Modal Daerah (PMD), bahwa pendapatan utama PT Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) sebagian besar direncanakan dari kegiatan bisnis hotel, sehingga PT Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) akan terus mengalami kerugian selama hotel masih belum dapat beroperasi.
- Lonjakan angka kerugian yang terjadi di tahun 2023 dan 2024 diakibatkan oleh:
  1) Unit Bisnis Rest Area Gunung Mas Puncak

     Kerugian diakibatkan oleh belum beroperasinya Rest Area di tahun 2023 serta biaya proses relokasi pedagang dan perbaikan sarana Rest Area Gunung Mas menjelang relokasi yang harus ditanggung oleh PT Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) pada tahun 2024.
  2) Unit Bisnis Penangkaran Rusa Tanjungsari

     Batalnya pengelolaan Penangkaran Rusa Tanjungsari oleh PT Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) sebagai dampak dari tidak diperpanjangnya kerja sama antara Perum Perhutani dengan pihak Disbudpar Kabupaten Bogor.

5. PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda)

   a. Dasar Pembentukan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

b. Visi dan Misi Perusahaan
   - Visi: Menjadi bank syariah yang sehat dan terpercaya, berkah, tumbuh berkelanjutan
   - Misi:
     1) Menggerakan ekonomi rakyat terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
     2) Beroperasi sesuai prinsip syariah.
     3) Memberikan layanan pembiayaan secara prudent dan sehat.
     4) Menggerakan dana masyarakat secara produktif.
     5) Memberikan layanan jasa secara prima.
     6) Berkah bagi pemilik, pengurus, pengelola, nasabah, dan pemangku kepentingan.
     7) Mengembangkan ukhuwah islamiyah.
     8) Mengembangkan sumber daya insani yang berintegritas dan kompeten.

c. Struktur Modal
   - Pemerintah Kabupaten Bogor : Rp. 74.568.000.000,- atau 99,42%
   - Dewi Megawati : Rp. 432.000.000,- atau 0,57%

d. Susunan Pengurus
   - Komisaris Utama : Ade Jaya Munadi
   - Ketua DPS : Yulizar D. Sanrego
   - Anggota DPS : Abdul Mughni
   - Direktur Utama : Dedin Nazarudin
   - Direktur : Arie Wibowo Irawan

e. Capaian Kinerja Pembangunan

Tabel 2.67

Capaian Kinerja Pembangunan PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda)

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Deviden	Rp.	425.718.177	2.421.580.461	1.590.314.640	768.513.301	0

Sumber: Data PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda), 2025

f. Kinerja Keuangan

Tabel 2.68

Capaian Kinerja Keuangan PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Asset	98.862.866	122.861.506	161.192.209	168.693.634	207.788.955
2.	Tabungan	29.483.657	8.307.127	13.445.484	8.406.987	11.019.122
3.	Deposito	44.260.000	80.850.000	64.695.000	122.853.298	92.145.163
4.	Pembiayaan	54.811.406	76.571.094	101.060.059	141.553.854	200.167.264
5.	Laba Rugi	3.570.110	4.402.873	2.891.481	1.397.296	(9.872.135)

Sumber: Data PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda), 2025

6. PT. LKM Bogor

a. Dasar Pembentukan

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi Atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro

b. Visi dan Misi Perusahaan

- Visi: Menjadi Perusahaan Keuangan Yang Berdaya Saing Tinggi dan Maju Berkembang Bersama Mitra Usaha
- Misi:
  1) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik.
  2) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi berkelanjutan dan digitalisasi serta pembinaan.
  3) Menjadikan mitra dalam pengembangan usaha sebagai upaya peningkatan produktivitas secara efektif dan efisien.
  4) Meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan daya beli masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

c. Struktur Modal

Tabel 2.69

Struktur Modal PT. LKM Bogor

Nama Pemegang Saham	Rupiah	Persentase
Pemerintah Kab. Bogor	25.378.960.000	87%
Pemerintah Prov. Jawa Barat	3.764.040.000	13%

Sumber: Data PT. LKM Bogor, 2025

d. Susunan Pengurus

Tabel 2.70

Susunan Pengurus PT. LKM Bogor

Nama	Jabatan
Ir. Emy Sriwahyuni, M.Si	Komisaris Utama
Rudy Bodewyn Mangasa Tua, MM	Komisaris
Chrisnur Trisakti, SE	Direktur Utama
M. Husein Adam, ST., SH., MH.	Direktur

Sumber: Data PT. LKM Bogor, 2025

e. Capaian Kinerja Pembangunan

Tabel 2.71

Capaian Kinerja Pembangunan PT. LKM Bogor

No	Uraian	Satuan	Target Tahun		
			2022	2023	2024
1.	Aset	(Rp)	47.577.591.758	49.756.198.427	52.476.274.910
2.	Laba	(Rp)	0	0	0

Sumber: Data PT. LKM Bogor, 2025

f. Kinerja Keuangan

Tabel 2.72

Capaian Kinerja Keuangan PT. LKM Bogor

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laba (EAT)	(Rp)	57.475.700	750.544.710	856.679.412	951.174.634	1.299.772.779
2.	Deviden	(Rp)	-	-	-	187.575.255	714.875.028

Sumber: Data PT. LKM Bogor, 2025

7. PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda)

a. Dasar Pembentukan

PD. BPR LPK Parungpanjang didirikan tanggal 1 Juli 1972 berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat nomor 171/A.V/18/ SK/72 dikukuhkan melalui perda Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 1996 bernama LPK atau Lembaga Perkreditan Kecamatan dan diubah dengan Perda Provinsi Jawa Barat nomor 25 Tahun 2000 dengan nama BPR LPK dan diubah kembali dengan Perda Provinsi Jawabarat nomor 14 tahun 2006 dengan nama BPR Parungpanjang dan disahkan sebagai Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia tanggal 20 Agustus tahun 1999 dengan keputusan direksi Bank Indonesia nomor 32/75/Kep/Dir. Selanjutnya pada tahun 2018 dilaksanakan penggabungan (merger) dengan 4 (empat) PD BPR LPK yang ada di Kabupaten Bogor yaitu PD BPR LPK Leuwiliang, PD BPR LPK Sawangan, PD BPR LPK Pancoran Mas dan PD BPR LPK Citeureup. Selanjutnya berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No.6 Tahun 2021 dan Akta No.32 Tahun 2023 PD BPR LPK Parungpanjang telah berubah nama dan badan hukum menjadi PT BPR Bogor Jabar (Perseroda)

b. Visi dan Misi Perusahaan

- Visi: Mewujudkan BPR yang Sehat dan Berkemajuan
- Misi:
  1) Mencetak karyawan yang handal dalam perbankan dan berkeadaban dalam pelayanan.
  2) Menciptakan aneka produk perbankan yang variatif dan inovatif untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha, konsumtif dan investasi dengan memaksimalkan peran teknologi.
  3) Melaksanakan fungsi kepatuhan untuk memberikan nilai tambah dalam peningkatan efektifitas tata kelola pada BPR.
  4) Berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan berperan aktif membantu pemerintah dalam menurunkan angka

c. Struktur Modal

NO	PEMEGANG SAHAM	MODAL DASAR	%	MODAL DISETOR	%	KEKURANGAN MODAL DISETOR	%
1	PEMPROV JABAR	36.720.000.000	51.00	7.000.000.000	37.66	29.720.000.000	55.64
2	PEMKAB	20.880.000.000	29.00	9.998.500.000	53.79	10.881.500.000	20.37
3	BANK BJB	14.400.000.000	20.00	1.590.000.000	8.55	12.810.000.000	23.98
	JUMLAH	**72.000.000.000**	**100.00**	**18.588.500.000**	**100.00**	**53.411.500.000**	**100**

Sumber: Data PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), 2025

Gambar 2.72

Struktur Modal PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda)

d. Susunan Pengurus

Tabel 2.73

Susunan Pengurus PT BPR Bogor Jabar (Perseroda)

JABATAN		NAMA
1. Dewan Komisaris	Ketua Dewan Pengawas	-
	Anggota Dewan Pengawas	Darwin Nahwan
2. Direksi	Direktur Utama	M.Roby Binarta
	Direktur Operasional (Yang Membawahi Kepatuhan)	Fasirun

Sumber: Data PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), 2025

e. Capaian Kinerja Pembangunan

Posisi Desember 2024, penyebaran kredit berdasarkan jenis penggunaan yaitu kredit Modal kerja sebesar Rp. 57.592.683.327 atau sebesar 70 % dengan total nasabah sebanyak 792 dan Kredit Konsumtif sebesar Rp. 24.393.092.740 atau sebesar 30 % dengan total nasabah sebanyak 684 dari total keseluruhan penyaluran kredit.

Dana Pihak Ketiga	Realisasi 2024	Jumlah Noa
Tabungan	49.530.149.007	12.058
Deposito	20.262.500.000	224
Total	**69.792.649.007**	12.282

Sumber: Data PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), 2025

Gambar 2.73

Capaian Kinerja Pembangunan PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda)

f. Kinerja Keuangan

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Dana Pihak Ketiga	Rupiah	64.206.876.731	64.737.798.315	62.378.741.233	66.897.596.135	69.792.649.008
2.	Kredit Yang Diberikan	Rupiah	77.886.061.497	81.934.090.675	83.556.084.777	84.574.641.573	80.744.206.942
3.	Laba Bersih	Rupiah	1.573.453.192	2.035.674.622	(978.762.516)	915.695.810	(1.723.392.213)

Sumber: Data PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), 2025

Gambar 2.74

Capaian Kinerja Keuangan PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda)

8. LPK Ciampea

a. Dasar Pembentukan

Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 584.3/81/Kpts/Huk/ 2007 tentang Pengaktifan Kembali Lembaga Perkreditan kecamatan (LPK) Ciampea dan Pengangkatan Pimpinan Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) Ciampea

b. Visi dan Misi Perusahaan

- Visi: Menjadi lembaga keuangan regional yang sehat dan tangguh dan berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian rakyat dan bermanfaat bagi masyarakat dengan pelayanan prima.
- Misi: Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat disegala bidang serta sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat

c. Struktur Modal

Penyertaan Modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

d. Susunan Pengurus

- Dewan Pengawas : -
- Pimpinan : Ajie Priyo Handoko, SH
- Teller : Nining Kurniawati
- Pembukuan : Dina Mustika
- Staf Kredit : Muhamad Zulfikarudin Fiqhi
- Staf Kredit : Alga Ogala Marsyah

e. Capaian Kinerja Pembangunan

Memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses keuangan dan permodalan.

f. Kinerja Keuangan

Tabel 2.74

Capaian Kinerja Keuangan LPK Ciampea

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Aset	5.977.290.133,67	6.145.322.318,67	6.607.316.375,67	6.753.767.226,67	6.848.255.228,67
2.	Pendapatan	1.006.298.702	948.096.479	954.496.053	1.030.075.100	1.087.201.959
3.	Biaya	753.713.643	719.867.795	790.127.617	820.990.105	861.505.569
4.	Laba/Rugi	242.564.515	223.983.702	151.431.356	186.936.085	203.881.857

Sumber: Data LPK Ciampea, 2025

Secara keseluruhan, kinerja keuangan BUMD di Kabupaten Bogor tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.75 sampai dengan 2.81 berikut:

Tabel 2.75

Ekuitas BUMD di Kabupaten Bogor

EKUITAS	2020	2021	2022	2023	2024
Perumda Pasar Tohaga	123.272.935.836	124.422.609.764	121.771.336.478	121.289.216.694	120.573.273.856
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan	717.910.810.550	756.378.790.928	839.075.517.372	926.845.300.314	974.569.795.961
PT. Prayoga Pertambangan dan Energi	164.625.000.000	164.000.000.000	40.167.212.437	40.126.712.437	-
PT Sayaga Wisata Bogor	189.321.038.000	189.321.038.000	173.888.639.582	171.119.595.453	168.346.274.828
PT. BPRS Bogor Tegar Beriman	21.432.000.000	21.000.000.000	25.208.112.485	24.292.224.463	13.302.251.277
PT. LKM Bogor	29.143.000.000	30.000.000.000	28.533.490.734	29.484.665.368	30.511.601.412
PD BPR LPK PARUNG PANJANG	18.602.191.500	18.602.191.500	25.708.941.286	26.624.637.097	24.161.406.408
LPK CIAMPEA	2.000.000.000	2.000.000.000	3.467.288.599	3.654.224.684	3.858.106.542
TOTAL	**1.266.306.975.886**	**1.305.724.630.192**	**1.257.820.538.973**	**1.343.436.576.510**	**1.335.322.710.284**

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Tabel 2.76

Aset BUMD di Kabupaten Bogor

ASET	2020	2021	2022	2023	2024
Perumda Pasar Tohaga	147.046.300.381	138.820.885.294	139.067.623.229	137.617.005.774	137.828.028.559
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan	801.563.208.787	833.290.433.191	885.396.307.944	982.218.133.091	1.065.692.657.650
PT. Prayoga Pertambangan dan Energi	106.662.533.113	90.250.004.379	70.517.346.402	70.476.846.402	-
PT Sayaga Wisata Bogor	176.917.571.376	177.082.978.998	177.806.722.404	181.352.578.798	189.641.505.470
PT. BPRS Bogor Tegar Beriman	98.862.866.842	122.861.506.898	161.192.209.523	168.693.634.657	207.788.955.453
PT. LKM Bogor	41.699.019.000	44.559.633.653	47.577.591.758	49.756.198.427	52.476.274.910
PD BPR LPK PARUNG PANJANG	106.890.388.208	103.401.176.428	102.478.561.239	114.315.677.305	107.799.936.395

ASET	2020	2021	2022	2023	2024
LPK CIAMPEA	5.977.290.133	6.145.322.319	6.486.109.118	6.638.251.421	6.732.773.694
TOTAL	**1.485.619.177.840**	**1.516.411.941.160**	**1.590.522.471.617**	**1.711.068.325.875**	**1.767.960.132.131**

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Tabel 2.77
Pendapatan BUMD di Kabupaten Bogor

PENDAPATAN	2020	2021	2022	2023	2024
Perumda Pasar Tohaga	35.165.948.700	37.423.370.415	37.114.865.725	35.927.685.409	39.669.236.505
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan	377.311.701.384	392.671.435.090	401.283.469.987	465.642.318.443	507.730.167.698
PT. Prayoga Pertambangan dan Energi	10.239.754.853	7.337.507.679	9.340.758.880	-	-
PT Sayaga Wisata Bogor	11.006.482.264	-	25.158.724.445	10.893.202.000	7.317.634.209
PT. BPRS Bogor Tegar Beriman	3.948.242.381	17.194.890.618	19.029.338.354	21.864.656.703	20.922.725.168
PT. LKM Bogor	12.568.975.000	9.019.669.837	8.501.557.372	9.636.042.943	10.414.838.019
PD BPR LPK PARUNG PANJANG	2.229.709.219	18.920.985.341	19.716.234.393	19.330.749.620	5.716.337.853
LPK CIAMPEA	1.006.298.702	948.096.479	692.602.617	763.464.892	799.771.831
TOTAL	**453.477.112.503**	**483.515.955.459**	**520.837.551.773**	**564.058.120.010**	**592.570.711.283**

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Tabel 2.78
Biaya BUMD di Kabupaten Bogor

BIAYA	2020	2021	2022	2023	2024
Perumda Pasar Tohaga	33.469.760.143	35.621.813.678	34.542.479.489	34.243.263.032	37.466.519.626
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan	261.228.582.859	274.347.034.477	281.220.910.108	333.840.282.641	371.391.497.180
PT. Prayoga Pertambangan dan Energi	15.131.721.225	42.082.178.010	10.965.626.831	40.500.000	-
PT Sayaga Wisata Bogor	11.517.161.376	-	21.897.406.594	13.655.412.386	10.806.934.092
PT. BPRS Bogor Tegar Beriman	4.200.759.160	-	15.138.966.864	19.940.727.947	30.794.860.827
PT. LKM Bogor	12.510.928.000	8.264.632.786	7.894.633.380	8.611.790.473	8.831.043.338
PD BPR LPK PARUNG PANJANG	20.411.053.890	16.179.345.308	20.694.996.910	18.089.266.442	18.272.780.305
LPK CIAMPEA	753.713.643	719.867.795	536.398.781	553.424.347	574.075.441
TOTAL	**359.223.680.296**	**377.214.872.054**	**392.891.418.957**	**428.974.667.268**	**478.137.710.809**

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Tabel 2.79
Laba/Rugi BUMD di Kabupaten Bogor

LABA/RUGI	2020	2021	2022	2023	2024
Perumda Pasar Tohaga	1.058.693.536	1.149.673.928	1.635.847.033	762.608.293	1.284.830.949
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan	92.784.211.252	93.378.746.582	94.617.667.100	103.637.027.656	107.814.501.926
PT. Prayoga Pertambangan dan Energi	-4.891.966.372	-7.837.466.488	-1.624.867.950	-40.500.000	-
PT Sayaga Wisata Bogor	-510.679.112	-1.869.092.154	-891.601.976	-2.769.044.129	-2.773.320.626
PT. BPRS Bogor Tegar Beriman	3.570.110.039	4.402.874.000	2.891.481.163	1.397.296.911	-9.872.135.659

LABA/RUGI	2020	2021	2022	2023	2024
PT. LKM Bogor	58.047.000	750.544.710	856.679.412	951.174.634	1.299.772.779
PD BPR LPK PARUNG PANJANG	1.515.822.029	2.035.675.000	-978.762.516	915.695.810	-1.723.392.213
LPK CIAMPEA	237.402.886	219.180.619	151.431.356	186.936.085	203.881.857
TOTAL	**93.821.641.258**	**92.230.136.197**	**96.657.873.622**	**105.041.195.260**	**96.234.139.013**

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Tabel 2.80

Penyertaan Modal Pemerintah Terhadap BUMD di Kabupaten Bogor

KONTRIBUSI PEMDA TERHADAP BUMD (PMP)	2020	2021	2022	2023	2024
Perumda Pasar Tohaga	-	-	-	-	-
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	-
PT. Prayoga Pertambangan dan Energi	-	-	-	-	-
PT Sayaga Wisata Bogor	-	-	-	-	-
PT. BPRS Bogor Tegar Beriman	-	-	-	-	-
PT. LKM Bogor	-	-	-	-	-
PD BPR LPK PARUNG PANJANG	-	-	-	-	-
LPK CIAMPEA	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**-**

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Tabel 2.81

Kontribusi BUMD Terhadap PAD Kabupaten Bogor

KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PAD	2020	2021	2022	2023	2024
Perumda Pasar Tohaga	582.281.445	632.320.660	899.715.868	419.434.561	706.657.022
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan	51.031.316.189	51.358.310.620	52.039.716.905	57.000.365.211	59.297.976.059
PT. Prayoga Pertambangan dan Energi	-	-	-	-	-
PT Sayaga Wisata Bogor	-	-	-	-	-
PT. BPRS Bogor Tegar Beriman	417.203.813	2.372.664.536	1.558.190.284	768.513.301	-
PT. LKM Bogor	-	-	-	523.146.049	714.875.028
PD BPR LPK PARUNG PANJANG	450.199.142	602.244.159	-	-	-
LPK CIAMPEA	-	-	-	102.814.847	-
TOTAL	**52.481.000.589**	**54.965.539.975**	**54.497.623.057**	**58.814.273.969**	**60.719.508.109**

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Secara umum BUMD yang berada di Kabupaten Bogor memiliki kontribusi yang positif terhadap pencapaian pembangunan, khususnya kontribusi terhadap aspek ekonomi dan keuangan. Terdapat 2 (dua) BUMD yang konsisten mengalami kerugian pada kurun waktu 2020-2024, yaitu PT. Prayoga Pertambangan dan Energi dan PT. Sayaga Wisata Bogor. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan evaluasi mendalam

agar dapat menentukan strategi dan kebijakan yang tepat dalam pengambilan keputusan terhadap arah bisnis maupun keberlanjutan BUMD dimaksud.

Selain memiliki kontribusi keuangan, BUMD juga memiliki peran dalam mengontribusi capaian pembangunan di Kabupaten Bogor. Kontribusi BUMD terhadap capaian IKD Kabupaten Bogor tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.82

Kontribusi BUMD Terhadap IKD Kabupaten Bogor

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KONTRIBUSI OLEH BUMD					BUMD PENGAMPU
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kontribusi PDRB sektor pertambangan oleh BUMD	(Rp) Miliar	-	-	-	-	-	PT. Prayoga Pertambangan dan Energi
2	Kontribusi PDRB sektor pariwisata oleh BUMD	(Rp) Miliar	0,054	0,095	0,139	0,152	0,198	PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda)
3	Kontribusi PDRB sektor perdagangan oleh BUMD	(Rp) Miliar	-	-	-	-	-	Perumda Pasar Tohaga
4	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank BUMD	Persen	74,33	85,88	129,33	107,84	194,02	PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda)
5	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR BUMD	Persen	29,16 79,90 79,79	29,89 86,19 81,10	17,38 84,60 78,57	17,28 80,70 81,08	17,10 98,79 117,47 (Tanpa ABP) 82,09	1. PT. LKM Bogor 2. PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda) 3. LPK Ciampea
6	Jumlah penduduk berakses air minum	Orang	Adm: 563.505 Teknis : 614.447	Adm: 722.867 Teknis : 785.456	Adm: 624.028 Teknis : 703.488	Adm: 673.454 Teknis : 726.903	Adm: 712.282 Teknis : 779.003 (UNAUDIT)	Perumda Air Minum Tirta Kahuripan
7	Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan)	Rumah Tangga	Adm: 166.680 Teknis: 182.646	Adm: 178.715 Teknis: 193.996	Adm: 191.800 Teknis: 209.567	Adm: 201.727 Teknis: 217.848	Adm: 216.889 Teknis: 230.220 (UNAUDIT)	Perumda Air Minum Tirta Kahuripan
8	Jumlah Kunjungan wisata yang dikontribusi oleh BUMD	Kunjungan	35.000	39.000	51.800	50.300	58.000	PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda)
9	Rata-rata lama Kunjungan wisata yang dikontribusi oleh BUMD	Hari	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda)
10	Jumlah bina kelompok pedagang / usaha informal	Kelompok	10.436	9.412	9.583	9.813	10.299	Perumda Pasar Tohaga

Sumber : Sekretariat Daerah dan data BUMD, 2025, diolah

2.4 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan

daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.4.1 Kinerja Keuangan Tahun 2019-2024

Adapun kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Dengan kata lain, kinerja keuangan daerah memperlihatkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan keuangan daerah untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan sehingga sekaligus menunjukkan pencapaian kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja keuangan daerah dapat menunjukkan beberapa hal, diantaranya:

1. kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
2. efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
3. sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

Asas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal-hal yang dikelola dalam APBD berupa pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kinerja keuangan tahun 2019-2024 diuraikan dalam Tabel 2.69, sementara kinerja berdasarkan neraca daerah, dapat dilihat pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83
Realisasi APBD tahun Anggaran 2019-2024

NO	URAIAN	REALISASI					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PENDAPATAN**						
	A. Pendapatan Asli Daerah	3.161.165.915.498,00	2.810.155.352.282,00	3.761.911.243.274,10	3.736.339.670.708,06	4.033.867.901.443,28	4.532.919.146.053,13
	B. Pendapatan Transfer	4.496.672.696.056,00	4.280.269.728.409,00	4.729.476.665.520,00	5.282.559.672.996,00	5.691.706.034.538,00	6.308.114.934.139,00
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	480.151.262.252,00	596.754.636.313,00	633.235.099.074,00	10.707.892.912,00	13.988.777.564,00	81.991.038.495,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**8.137.989.873.806,00**	**7.687.179.717.004,00**	**9.124.623.007.868,10**	**9.029.607.236.616,06**	**9.739.562.713.545,28**	**10.923.025.118.687,10**
2	**BELANJA**						
	A. Belanja Operasi	5.175.171.018.466,00	5.473.764.412.506,40	5.521.703.558.330,00	6.341.846.179.088,00	6.659.025.417.145,00	7.436.816.487.349,00
	B. Belanja Modal	1.567.693.720.671,00	1.488.950.269.912,60	1.701.254.453.271,00	1.414.652.065.780,00	1.304.007.925.132,21	1.991.689.489.433,00
	C. Belanja Tak Terduga	9.877.952.074,00	394.033.804.687,00	75.948.512.154,00	30.229.239.161,00	52.261.011.730,00	32.871.816.732,00
	D. Belanja Transfer	1.018.475.488.566,00	1.048.744.893.473,00	1.409.487.609.776,00	1.523.675.273.337,00	1.602.333.206.687,00	1.653.167.606.817,00
	JUMLAH BELANJA	**7.771.218.179.777,00**	**8.405.493.380.579,00**	**8.708.394.133.531,00**	**9.310.402.757.366,00**	**9.617.627.560.694,21**	**11.114.545.400.331,00**
	Surplus / (Defisit)	**366.771.694.029,00**	**(718.313.663.575,00)**	**416.228.874.337,10**	**(280.795.520.749,94)**	**121.935.152.851,07**	**(191.520.281.643,87)**
3	**PEMBIAYAAN**						
	A. Penerimaan Pembiayaan	846.364.143.134,97	1.105.295.799.163,97	386.977.035.588,97	803.205.909.926,07	453.409.687.633,13	525.344.840.484,20
	B. Pengeluaran Pembiayaan	107.840.038.000,00			119.040.344.825,00	150.000.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**738.524.105.134,97**	**1.105.295.799.163,97**	**386.977.035.588,97**	**684.165.565.101,07**	**303.409.687.633,13**	**525.344.840.484,20**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**1.105.295.799.163,97**	**386.982.135.588,97**	**803.205.909.926,07**	**403.370.044.351,13**	**425.344.840.484,20**	**333.824.558.840,33**

Sumber : LRA 2019-2024 *(audited)*

Tabel 2.84
Neraca Daerah Tahun 2019-2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**ASET**							
	A. Aset Lancar	2.122.125.036.105,00	2.248.530.959.354,00	1.601.461.375.061,00	2.068.478.046.542,00	1.652.441.323.745,61	1.926.027.887.139,48	1.938.340.237.135,34
	B. Investasi Jangka Panjang	970.345.037.260,00	1.169.288.907.712,00	1.213.094.736.915,00	1.232.677.572.319,00	1.359.681.228.961,73	1.424.852.794.599,45	1.464.016.267.370,72
	C. Aset Tetap	19.235.817.933.874,00	22.047.105.703.304,00	22.918.595.556.987,00	23.664.306.476.781,00	24.089.051.665.018,00	23.995.664.076.200,40	26.194.011.176.321,60
	D. Dana Cadangan					50.683.870.081,00	104.418.258.055,00	-
	E. Aset Lainnya	1.041.171.806.678,00	1.027.667.879.836,00	1.001.530.692.169,00	756.441.714.376,00	792.415.719.983,38	1.281.996.421.920,85	1.086.369.228.087,73
	F. Properti Investasi					-	26.537.087.310,43	26.554.897.050,99
	JUMLAH ASET	**23.369.459.813.917,00**	**26.492.593.450.206,00**	**26.734.682.361.132,00**	**27.721.903.810.018,00**	**27.944.273.807.789,70**	**28.759.496.525.225,60**	**30.709.291.805.966,40**
2	**KEWAJIBAN**							
	A. Kewajiban Jangka Pendek	219.143.283.772,00	122.803.233.948,00	121.985.121.961,00	318.370.229.733,00	203.990.983.969,82	360.184.009.840,20	432.847.923.124,66
	B. Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	**219.143.283.772,00**	**122.803.233.948,00**	**121.985.121.961,00**	**318.370.229.733,00**	**203.990.983.969,82**	**360.184.009.840,20**	**432.847.923.124,66**
3	**EKUITAS**							
	Ekuitas	22.508.665.400.002	26.147.190.372.558	27.340.354.196.777	27.107.732.733.476	27.740.282.823.819,80	28.598.034.812.268,70	29.441.822.549.806,60
	Surplus/Defisit - LO	641.651.130.143	222.599.843.700	-727.656.957.606	295.800.846.809	564.449.484.290,48	(198.742.296.883)	834.621.333.035,23
	JUMLAH EKUITAS	**23.150.316.530.145**	**26.369.790.216.258**	**26.612.697.239.171**	**27.403.533.580.285**	**28.304.732.308.110**	**28.399.292.515.385**	**30.276.443.882.842**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**23.369.459.813.917,00**	**26.492.593.450.206,00**	**26.734.682.361.132,00**	**27.721.903.810.018,00**	**28.508.723.292.080,10**	**28.759.476.525.225,50**	**30.709.291.805.966,50**

Sumber : LRA Tahun 2019- 2024 *(audited)*

2.4.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030

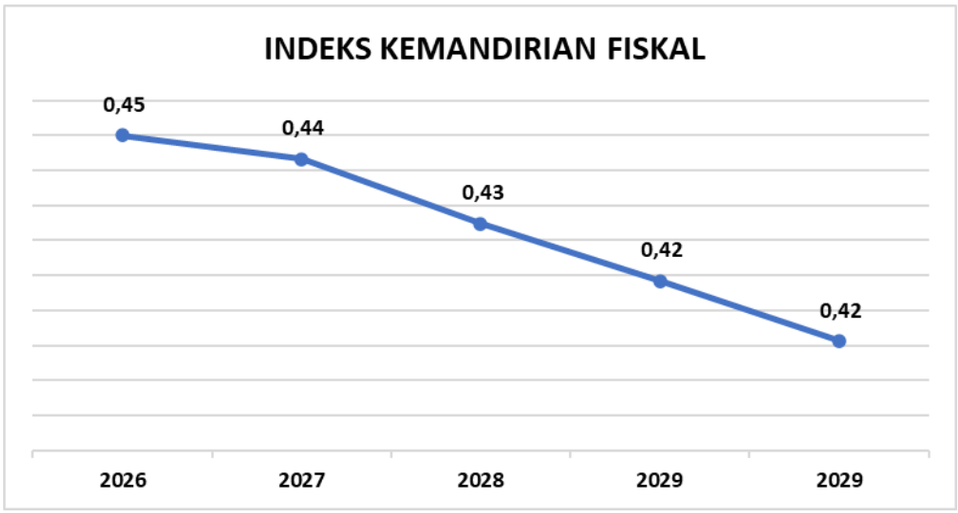
Proyeksi keuangan daerah tahun 2025-2030 dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.85
Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	APBD TAHUN 2024	APBD (PERUBAHAN PENJABARAN) TAHUN 2025	PROYEKSI SEMENTARA				
				TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	**PENDAPATAN DAERAH**							
	A. Pendapatan Asli Daerah	4.445.897.665.318	5.145.530.165.866	5.303.511.989.200	5.575.921.837.910	5.740.380.475.909	5.951.061.102.434	6.175.663.511.214
	B. Pendapatan Transfer	6.349.050.023.208	6.243.982.050.233	6.595.253.031.083	7.031.424.299.799	7.517.808.839.749	8.060.292.404.373	8.665.452.564.153
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	72.815.967.996	17.680.301.421	17.680.301.421	17.680.301.421	17.680.301.421	17.680.301.421	17.680.301.421
	JUMLAH PENDAPATAN	10.867.763.656.522	11.407.192.517.520	11.916.445.321.704	12.625.026.439.130	13.275.869.617.079	14.029.033.808.228	14.858.796.376.788
2	**BELANJA DAERAH**							
	A. Belanja Operasi	7.631.079.735.850	8.300.373.771.521	7.422.351.764.138	7.820.866.260.039	8.190.116.003.577	8.682.830.672.037	9.378.024.681.716
	B. Belanja Modal	2.065.003.354.986	1.837.232.579.091	2.495.951.365.102	2.751.318.226.800	2.841.520.364.640	3.001.737.950.719	3.133.618.878.443
	C. Belanja Tidak Terduga	34.889.316.695	100.633.181.707	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	D. Belanja Transfer	1.662.136.089.475	1.661.202.975.186	2.265.125.467.689	2.368.823.222.530	2.479.122.586.092	2.596.443.830.131	2.721.233.981.755
	JUMLAH BELANJA	11.393.108.497.006	11.899.442.507.505	12.233.428.596.929	12.991.007.709.369	13.560.758.954.309	14.331.012.452.887	15.282.877.541.914
	SURPLUS / (DEFISIT)	-525.344.840.484	-492.249.989.985	-316.983.275.225	-365.981.270.239	-284.889.337.230	-301.978.644.659	-424.081.165.126
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**							
	A. Penerimaan Pembiayaan	525.344.840.484	581.417.989.985	356.983.275.225	365.981.270.239	384.889.337.230	401.978.644.659	424.081.165.126
	B. Pengeluaran Pembiayaan	0	89.168.000.000	40.000.000.000		100.000.000.000	100.000.000.000	
	Pembiayaan Daerah Netto	525.344.840.484	492.249.989.985	316.983.275.225	365.981.270.239	284.889.337.230	301.978.644.659	424.081.165.126
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Proyeksi Bappenda, Bappedalitbang dan BPKAD, 2025, diolah

Pendapatan Daerah diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,43% yang dikontribusi dari rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,72% dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer sebesar 6,78%. Proyeksi pertumbuhan pendapatan ini dihitung berdasarkan tren realisasi pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi pertumbuhan PAD yang lebih lambat daripada pertumbuhan Pendapatan Transfer ini menyebabkan Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Bogor tahun 2025-2030 mengalami penurunan. Proyeksi Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Bogor dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Proyeksi Bappenda, Bappedalitbang dan BPKAD, 2025, diolah

Gambar 2.75
Proyeksi Indeks Kemandirian Fiskal

Meskipun mengalami penurunan, Kabupaten Bogor masih tetap berada pada kategori "**Menuju Mandiri**", namun perlu dirumuskan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan potensi PAD agar meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Bogor.

Pada sisi Belanja Daerah, pertumbuhan diproyeksikan pada rata-rata 5,14%. Pertumbuhan ini dikontribusikan terbesar oleh pertumbuhan Belanja Transfer sebesar 11,03% dan Belanja Modal sebesar 11,88%. Pertumbuhan Belanja Transfer disebabkan oleh kebijakan penambahan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa sebagai konsekuensi dari penambahan Pajak dan Retribusi Daerah. Belanja Modal diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang tinggi disebabkan oleh kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur. Defisit antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah diproyeksikan agar berada pada tingkat rata-rata sebesar 2,48%.

Pada sisi Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pada tahun berkenaan diformulasikan dengan hitungan rata-rata sebesar 2,83% dari Belanja Daerah tahun sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukan Dana Cadangan dalam

rangka pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2029.

Dengan memperhatikan kapasitas fiskal, kebijakan keuangan Kabupaten Bogor diarahkan untuk mempertimbangkan skema-skema pendanaan program melalui pinjaman daerah dan/atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang didasarkan oleh urgensi percepatan pembangunan infrastruktur strategis serta penyediaan sarana dan prasarana publik bagi masyarakat.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis

2.5.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan ditinjau dari beberapa aspek, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Aspek Geografi

Berdasarkan aspek geografi, beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah:

a. Masih tingginya risiko bencana
b. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup
c. Semakin meluasnya titik wilayah yang terdampak bencana alam
d. Kurangnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

B. Aspek Demografi

Berdasarkan aspek demografi, beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah:

a. Laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi
b. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah
c. Jumlah penduduk usia tua yang cenderung meningkat
d. Tingkat urbanisasi yang masih tinggi

C. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah:

a. Masih tingginya tingkat kemiskinan

b. Masih banyaknya penduduk yang menganggur/mencari pekerjaan akibat masih rendahnya kesempatan kerja
c. Masih tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang berdampak pada ketimpangan mengakses sumber-sumber ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat
d. Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
e. Belum optimalnya pelestarian dan pemeliharaan warisan budaya lokal

D. Aspek Daya Saing

Berdasarkan aspek daya saing, beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah:

a. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia dilihat dari pendidikan, kesehatan dan daya beli
b. Belum meratanya pemenuhan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi masyarakat
c. Belum optimalnya pemenuhan kualitas angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
d. Belum optimalnya kinerja dan kapasitas usaha dan daya saing IKM/UMKM

E. Aspek Pelayanan Umum

Berdasarkan aspek pelayanan umum, beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah:

a. Belum optimalnya pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar
b. Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi daerah
c. Belum optimalnya implementasi kompetensi aparatur
d. Penggunaan teknologi untuk pembangunan/pelayanan publik yang belum optimal

2.5.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,

mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis diangkat dengan mempertimbangkan beberapa kondisi, yaitu:

1. Isu Strategis Global

Isu ini diangkat dengan mempertimbangkan dinamika global/dunia yang berdampak terhadap daerah, antara lain:

a. Perubahan Iklim

Terdapat tren pemanasan global akibat perubahan iklim. tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tinggi pada periode 2020-2050. *World Meteorological Organization (WMO) dalam State of The Climate* 2022 menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi satu isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ke depan.

b. Geopolitik dan Geoekonomi

Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan-Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam mitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui

perdagangan luar negeri, menjadi windows of opportunity sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

c. Demografi global

Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

d. Disrupsi Teknologi

Saat ini, kecerdasan buatan (artificial intelligence) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpeng tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

e. Perdagangan Internasional

Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

f. Urbanisasi Dunia

Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/ jasa.

2. Isu Strategis Nasional

a. Perpindahan IKN

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB Jawa Barat sebesar 0,06 persen, serta upah nyata Jawa Barat di sektor pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu

diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Jawa Barat saat ini.

b. Bonus Demografi Indonesia

Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nila PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu, produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN.

Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif yang tinggi sebagai modal utama pembangunan. Penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya. Selain itu, penduduk usia produktif yang dominan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk- produk berkualitas

(*consuming class*) di dunia. *Consuming class* ini berpotensi akan terus bertambah. Masyarakat consuming class ini mendorong pertumbuhan dari sisi konsumsi tetapi perlu di imbangi dengan pemenuhan dari sisi produksi dan investasi di Indonesia. Untuk itu, kemampuan menguasai pasar domestik sangat penting, dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang dapat memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh kelompok masyarakat tersebut.

c. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan Ekonomi Hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi Hijau merupakan model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai "tulang punggung"- nya. Strategi Ekonomi Hijau ini diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.

Arah kebijakan penerapan ekonomi hujan berlandaskan pada pelaksanaan pembangunan rendah karbon yang meliputi : (i) peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (ii) transisi energi menyiapkan secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil; (iii) pengembangan smart grid termasuk jaringan interkoneksi dalam (*island grid*) dan antar pulau (*national grid*) serta sistem terisolasi (*isolated grid*); (iv) pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (*battery/energy storage system*); (v) pengembangan transportasi ramah lingkungan; (vi) penerapan ekonomi sirkular;

(vii) pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk produk turunanya secara berkelanjutan; (viii) perkuatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal maupun nonfiskal untuk mendorong produk produk hijau, melalui pengembangan green financing dan penerapan carbon pricing untuk mendukung investasi hijau, serta (ix) penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor. Paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

d. Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan, serta masih rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Diperlukan kesinambungan pembangunan dalam menjaga konsistensi satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan. Selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak

dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Terkait pemenuhan kebutuhan air, terdapat tantangan keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air sehingga keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti dan produktivitas air dari sisi ekonomi masih merupakan salah satu yang terendah di Asia. Pelayanan tenaga Listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

e. Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta Ketahanan Bencana

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun pertahunnya, adapun jumlah kematian akibat bencana hidrometeorologi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir mencapai 1.183 orang. Terdapat 18.000 km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terlebih lagi hingga tahun 2040, tinggi gelombang ekstrim dapat mengalami peningkatan 1-1,5 m yang menyebabkan potensi tinggi gelombang berdampak pada keselamatan pelayaran. Rerata kenaikan tinggi muka laut pun pada periode 2006-2040 mencapai 0,9 cm/tahun yang akan meningkatkan kerentanan pesisir seperti penggenangan pesisir. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp. 544 triliun selama periode Tahun 2020-2024 yang diperkirakan

akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Sebagai bentuk pengendalian perubahan iklim, Indonesia turut berkontribusi dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Pada tahun 2020 Indonesia berkontribusi menurunkan emisi GRK sebesar 1.05 Gr Co2 atau 2,67 persen dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GrCOe GrCO2e (Our World in Data based on the Global Carbon Project 2022). Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, transportasi, serta penggunaan produk. Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila paradigma Pembangunan tidak berubah. Daya dukung sumber daya alam diperkirakan akan terus menurun. Daya dukung lahan hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar dari tahun 2025 sampai tahun 2060 (BaU) yang dipengaruhi oleh pengurangan luas tutupan hutan dalam kawasan konservasi sebesar 700 ribu hektar selama kurun waktu Tahun 2020-2045 serta pengurangan luas lahan sawah sehingga diproyeksikan akan menurun hingga 7 juta hektar diiringi dengan menurunnya tingkat produktivitas menjadi 7 ton/hektar/tahun akibat degradasi tanah. Selain itu, daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju kelangkaan, sampai dengan tahun 2045 tingkat ketersediaan air di wilayah Jawa sudah berada pada tingkat langka atau kritis sehingga berdampak pada ketersediaan dan kualitas lahan untuk penyediaan pangan yang diprediksi akan mengalami penurunan. Adapun, daya dukung ekosistem laut yang diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan, sampah plastik menurunkan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati laut secara signifikan serta berdampak pada kualitas sumber pangan akuatik, keselamatan pelayaran, dan daya tarik wisata bahari, selain itu naiknya suhu

air laut semakin memperburuk daya dukung ekosistem yang mengancam pemutihan pada ekosistem terumbu karang.

Daya tampung kualitas air, lahan, dan lingkungan laut diperkirakan akan terus menurun. Daya tampung kualitas air akan mengalami krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Komponen IKA nasional memiliki tren fluktuatif dengan rata-rata Tahun 2015-2021 sebesar 52,35 (KLHK 2021) nilai yang paling rendah setiap tahunnya dibandingkan dengan komponen lainnya dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun, daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas, persentase tutupan lahan diperkirakan terus turun hingga sekitar 44 persen akibat tingginya laju alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, Daya tampung lingkungan laut mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim namun pengelolaan yang berkelanjutan yang disebabkan aktivitas perikanan, pariwisata, transportasi, dan sampah laut masih rendah. Namun disisi lain, daya tampung kualitas udara telah melampaui standar baku mutu saat ini konsentrasi rata-rata tahunan polusi PM2.5 terus meningkat mencapai 26,5 mikrogram/hari atau berada di atas baku mutu udara ambien (15 mikrogram/hari) khususnya di daerah perkotaan.

f. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan trend pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu pemekaran wilayah bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Trend pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih

besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Disamping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

3. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

a. *Green* dan *blue economy* serta pembangunan inklusif

Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan green economy. Perekonomian yang bersih atau "clean economy" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "blue economy" mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pemanfaatan laut, samudera, dan sumber daya alam didalamnya dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengedepankan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadlilan dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik antarindividu, antar kelompok, dan antar wilayah.

b. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Daya saing sumber daya manusia mengacu pada kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam pasar kerja global serta kontribusi pada pembangunan. Kualitas sumber daya manusia mencakup kualifikasi pendidikan, keterampilan, pengetahuan, derajat

kesehatan, dan karakter sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dengan menciptakan karakter sosial budaya yang inklusif yang akan membentuk identitas suatu masyarakat dan indivdu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

c. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar

Kesenjangan pembangunan merujuk pada perbedaan atau disparitas dalam tingkat kemajuan, atau perkembangan antara daerah, kelompok masyarakat, atau individu yang berbeda, dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesenjangan infrastruktur pelayanan dasar merujuk pada perbedaan yang siginifikan dalam ketersediaan akses, dan kualitas layanan dasar.

Kesenjangan infrastruktur dasar antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan sosial masyarakat di kedua wilayah tersebut. Percepatan pngembangan infrastruktur dasar di wilayah Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur fasilitas pendidikan akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

d. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merujuk pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia dalam jangka waktu yang berkelanjutan tanpa mengalami penurunan kualitas

lingkungan dan degradasi atau kerusakan yang tidak dapat pulih, untuk memastikan bahwa aktivitas manusia menggunakan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, serta mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumberdaya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang.

e. Keberlanjutan Penataan Ruang

Keberlanjutan penataan ruang merujuk pada upaya untuk mengambangkan dan memelihara lingkungan yang seimbang antara kebutuhan manusia dengan keberlangsungan ekosistem alam, pengunaan teknologi dan inovasi dalam perencanaan, penggunaan lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan seperti transportasi publik dan penggunaan kendaraan listrik. Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarananya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut diatas akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

f. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada

masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat. Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4. Isu Strategis Kabupaten Bogor 2025-2029

a. Bonus demografi

Kabupaten Bogor telah mengalami perubahan demografi yang cepat, meskipun jumlah penduduk usia produktif diprediksi terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2035-2040. Dalam periode tersebut Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah dengan angkatan kerja terbanyak di Jawa Barat. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) juga meningkat. Dengan demikian, tahun 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan hal-hal melalui penyiapan kebijakan untuk mewujudkan penduduk berkualitas.

b. Percepatan dan peningkatan efektivitas pengentasan kemiskinan.

Terkait isu percepatan dan pengentasan kemiskinan melibatkan sejumlah faktor kunci yang harus dipertimbangkan. Berikut beberapa substansi yang harus diperhatikan terkait pengentasan kemiskinan, yaitu: (1) peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, (2) pemberdayaan ekonomi, (3) akses terhadap pelayanan kesehatan, (4) penguatan infrastruktur, (5) perlindungan sosial, (6) ketimpangan sosial ekonomi, (7) partisipasi masyarakat. Menghadapi isu strategis pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik, integratif, dan berkelanjutan yang melibatkan kerjasama pemerintah, sektor swasta, lembaga non pemerintah dan masyarakat.

c. Daya saing sumber daya manusia

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada kemampuan individu atau angkatan kerja suatu daerah untuk bersaing secara efektif di pasar kerja global. Hal Ini melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas, kreativitas, dan adaptabilitas SDM dalam lingkungan ekonomi secara kompetitif. Dalam perspektif lain SDM juga melihat kepada tingkat pendidikan, dan derajat kesehatan penduduk, serta kemampuan ekonomi penduduk suatu daerah. Pembangunan masyarakat dari sisi aspek sosial dan moralitas juga perlu mendapat perhatian. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat, yang mempunyai kesadaran sosial, tata nilai dan hukum yang tinggi sehingga pada akhirnya akan menciptakan kehdupan yang berkeadaban.

d. Konektivitas dan infrastruktur dasar

Konektivitas dan infrastruktur dasar merupakan elemen kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah. Beberapa aspek penting yang berpengaruh terhadap isu strategis ini adalah (1) transportasi, (2) telekomunikasi, (3) energi, (4) air bersih dan sanitasi, (5) pengelolaan sampah dan limbah domestik, (6) konektivitas digital, serta (7) konektivitas regional. Kaitan dengan transportasi publik di Kabupaten Bogor pada tahun 2025-2029, akan difokuskan pada beberapa aspek berikut: a. Pengembangan Infrastruktur dengan membangun dan memperbaiki jalur transportasi seperti jalan raya, terminal bus, dan stasiun kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi.; b. Meningkatkan penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti bus listrik atau kendaraan berbasis bahan bakar alternatif untuk mengurangi emisi karbon.; c. Memperbaiki kualitas layanan angkutan umum seperti bus dan angkutan kota dengan penjadwalan yang lebih baik, peningkatan kenyamanan, dan keamanan bagi penumpang.; d. Membangun sistem transportasi yang terintegrasi antara berbagai moda transportasi seperti bus, kereta, dan angkutan kota untuk memudahkan perpindahan penumpang.; e. Pengembangan

Teknologi melalui adopsi teknologi modern seperti aplikasi pemesanan tiket online, sistem pembayaran digital, dan informasi perjalanan *real-time* untuk mempermudah akses dan penggunaan transportasi publik; f. Peningkatan Keselamatan transportasi melalui upaya pelatihan pengemudi, perawatan kendaraan, dan penegakan aturan lalu lintas.

e. Kualitas dan daya dukung lingkungan

Isu ini mengacu pada upaya untuk menjamin bahwa pembangunan di Kabupaten Bogor dilaksanakan dengan tetap menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan. Pembangunan dilaksanakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mempertimbangkan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan serta memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait isu ini adalah (1) kesejahteraan sosial, (2) inklusif, (3) konservasi lingkungan, (4) keadilan bagi generasi berikutnya, (5) partisipasi masyarakat, dan (6) kolaborasi antar sektor.

f. Ketimpangan pembangunan antar wilayah

Isu ini mengacu pada upaya menciptakan pemerataan pembangunan dan kemudahan dalam mendapatkan akses pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait isu ini adalah (1) kualitas dan kuantitas infrastruktur, (2) akses terhadap pelayanan publik, (3) ekonomi dan lapangan kerja, (4) investasi dan pengembangan penanaman modal, (5) sumber daya alam, (6) kebijakan dan perencanaan pembangunan, (7) mobilitas dan migrasi penduduk dan (8) kualitas sumber daya manusia. Terkait wilayah Kabupaten Bogor yang luas, hal ini berpengaruh terhadap rentang kendali dalam proses penyelengaran pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, selain peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan, pemekaran wilayah juga menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah, yaitu dengan mengoptimalkan kendali

pembangunan di wilayah yang lebih kecil untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

g. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut (1) kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan yang masih rendah dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, (2) birokrasi yang kompleks dan tidak efisien, (3) transparansi dan akuntabilitas yang rendah, (4) perencanaan dan penganggaran yang kurang matang, (5) minimnya partisipasi publik, dan (6) pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh dengan cara meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur, mendorong partisipasi publik, dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan perencanaan dan penganggaran yang berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.

Apabila dilakukan sanding data antara isu strategis global, nasional, provinsi dan daerah maka kita dapat lihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2.86
Matriks Sanding Isu Strategis
Global, Nasional Provinsi dan Daerah

NO	ISU STRATEGIS			
	GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN BOGOR
1	Perubahan Iklim	Perubahan Iklim, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan, serta Ketahanan Bencana	Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan
2	Geopolitik dan Geoekonomi	Perpindahan IKN	Keberlanjutan Penataan Ruang	
3	Demografi Global	Bonus Demografi Indonesia	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Bonus Demografi
				Daya Saing Sumber Daya Manusia
4	Disrupsi Teknologi	-	-	-
5	Perdagangan Internasional	Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Green dan Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif	-
6	Urbanisasi Dunia	Konektivitas dan Infrastruktur Dasar	Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Konektivitas dan Infrastruktur Dasar
				Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah
		Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan
				Percepatan dan Peningkatan Efektifitas Pengentasan Kemiskinan

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari tahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 yang menekankan pada penguatan fondasi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dilaksanakan serta berorientasi pada peningkatan capaian kinerja yang belum optimal.

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Dengan kata lain, visi Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan bentuk ungkapan kondisi yang ingin diwujudkan hingga tahun 2029.

Beberapa hal yang melatarbelakangi penetapan visi Pemerintah Kabupaten Bogor, diantaranya adalah:

1. Merupakan visi yang diusung dalam kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bogor saat mendaftar menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Adanya keinginan untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan dan isu strategis daerah dengan kinerja yang sesuai dengan slogan visi.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah:

“Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor dimaksud adalah:

1. **Kabupaten Bogor** adalah sebuah kabupaten di bagian Barat, Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di sebelah Utara; Kabupaten Karawang di sebelah Timur, Kabupaten Cianjur di sebelah Tenggara, Kabupaten Sukabumi di sebelah Selatan, serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten di sebelah Barat. Kabupaten Bogor memiliki

semboyan "**Prayoga, Tohaga, Sayaga**" - "**Kuta Udaya Wangsa**". Prayoga artinya Utama, Tohaga artinya Kokoh dan Kuat, Sayaga artinya Sedia atau Siap Siaga, yang memiliki makna pendirian dan perjuangan masyarakat Kabupaten Bogor hendaknya selalu mengutamakan kekokohan, kuat pada pendirian dan perjuangannya serta selalu siap siaga menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai cita-cita, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sementara Kuta artinya Kota, Udaya artinya Fajar atau Kebangkitan, Wangsa artinya Bangsa atau Suku Bangsa, yang memiliki makna bahwa Kabupaten Bogor dengan dukungan masyarakatnya akan menjadi pusat kebangkitan bagi perjuangan pembangunan untuk memperoleh kemajuan dan kemakmuran bangsa.

2. **Istimewa,** singkatan dari Inspiratif, Merakyat dan Wibawa, yang dijelaskan sebagai berikut:

- **Inspiratif** adalah kepemimpinan dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor harus dapat menjadi teladan bagi bawahannya serta memberikan inspirasi kepada masyarakat yang dipimpinnya.
- **Merakyat** adalah sosok Bupati dan Wakil Bupati harus menjadi panutan dan harus mampu menyelesaikan segala bentuk masalah dengan sikap dan perilaku merakyat, dalam arti ramah kepada masyarakat dengan mengedepankan sikap profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik yang memuaskan masyarakat.
- **Wibawa** adalah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati harus mampu mewujudkan kewibawaan Kabupaten Bogor kepada seluruh masyarakat dan pemerintahan lainnya

Dengan demikian, **Istimewa** adalah kondisi dengan kekhasan tertentu yang merupakan aktualisasi dari kerja konkrit Pemerintah Kabupaten Bogor yang Inspiratif, Merakyat dan Berwibawa, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menjadi masyarakat yang terbaik.

3. **Gemilang,** merupakan perwujudan kinerja pembangunan daerah selama lima tahun, yang menunjukkan peningkatan (kemajuan) yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan pelampauan dalam pencapaian target kinerja utama daerah.

Adapun sinergi visi Kabupaten Bogor dengan nasional dan Jawa Barat dijabarkan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sanding Visi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor dalam Perencanaan Jangka Menengah Tahun 2025-2029

Visi	Uraian Arti Visi
Visi Nasional	**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045** Pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.
Visi Jawa Barat	**Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata** Tata kelola wilayah yang adil dan seimbangcantara pengembangan wilayah perdesaan dan perkotaan, antara pembangunan ekonomi dan konservasi. Tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 adalah untuk mencipkatan kondisi Jawa Barat yang istimewa dalam penyelenggaraan pembangunannya, dengan memperhatikan unsur mikro lokal sebagai asal muasal tradisi (dimaknai dengan lembur / perdesaan) . **Jabar :** merupakan akronim dari Jawa Barat sebagai provinsi yang terdiri atas penduduk / masyarakat dan wilayah / daerah yang terbagi dalam 27 kabupaten / kota **Istimewa :** memiliki arti situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. **Lembur Diurus :** Lembur dalam bahasa Sunda berarti desa atau kampung, dan diurus berarti dikelola atau dipelihara menjadi lebih baik. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi lokal, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat desa agar berkembang dan menikmati kesejahteraan yang setara dengan daerah perkotaan.

Visi	Uraian Arti Visi
	Pengelolaan perdesaan meliputi pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, pariwisata, serta sektor lainnyayang dilaksanakan dengan tetap menjaga fungsi konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup serta menjaga kearifan lokal dan tradisi. **Kota Ditata :** Kota merujuk pada kawasan perkotaan atau kota-kota besar di Jawa Barat, sedangkan ditata berarti dikelola atau ditata dengan baik. Slogan ini mengandung arti bahwa pemerintah akan fokus pada penataan kota, termasuk perbaikan infrastruktur, transportasi, tata ruang, pengelolaan limbah dan pembangunan ekonomi yang lebih terencana. Pembangunan wilayah perkotaan akan diwujudkan sebagai kawasan perdagangan barang dan jasa, serta kawasan industri yang dikelola untuk pengelolaan sumber daya dan daya saing daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kota-kota di Jawa Barat sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali, dengan memperhatikan kesejahteraan warganya, dan menciptakan kota yang lebih maju, modern, serta ramah lingkungan.
Visi Kabupaten Bogor	**Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang** **Istimewa:** kondisi dengan kekhasan tertentu yang merupakan aktualisasi dari kerja konkrit Pemerintah Kabupaten Bogor yang Inspiratif, Merakyat dan Berwibawa, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menjadi masyarakat yang terbaik.. **Gemilang:** kinerja pemerintah daerah yang selalu menunjukkan hasil terbaik serta mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bogor

Sumber : - RPJMN Tahun 2025-2029
- Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
- Rumusan Visi dan Misi Kepala Daerah, diolah

3.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun sinergi dan keterkaitan misi nasional (asta cita), Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, dijabarkan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sanding Misi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025-2029

Misi Nasional (Asta Cita)	Misi Jawa Barat	Misi Kabupaten Bogor
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan.	1. Mewujudkan sumber daya manusia berkarakter unggul; 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif; 3. Mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan pedesaan, serta miskin dan kaya; 4. Mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan sesuai dengan prinsip *good and clean governance*.	1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik; 2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju; 3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan; 4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas; 5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Misi Nasional (Asta Cita)	Misi Jawa Barat	Misi Kabupaten Bogor
pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; 7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		

Sumber : - RPJMN Tahun 2025-2029
- Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029
- Rumusan Visi dan Misi Kepala Daerah, diolah

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut serta keselarasannya dengan rumusan misi nasional dan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama**, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang Baik, selaras dengan misi ketujuh Nasional dan misi keempat Jawa Barat.
2. **Misi kedua**, yaitu Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju, selaras dengan misi kedua, ketiga, kelima dan keenam Nasional serta misi kedua Jawa Barat.
3. **Misi ketiga**, yaitu Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, selaras dengan misi kedelapan Nasional, serta misi kedua Jawa Barat.
4. **Misi keempat**, yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, selaras dengan misi kesatu, keempat dan kedelapan Nasional, serta misi kesatu Jawa Barat.

5. **Misi kelima**, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, selaras dengan misi ketiga, keenam dan kedelapan Nasional, serta misi kedua dan ketiga Jawa Barat.

3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun, sedangkan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Tujuan diturunkan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Adapun sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan sasaran bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan *ultimate outcome* yang benar-benar mempertimbangkan kinerja yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran tahun 2025-2029 dijabarkan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

VISI/ MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN
Visi : Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang							
1	Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik	1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan			**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	**Poin**
				1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi	Indeks Pelayanan Publik	Poin
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin
						Nilai SAKIP	Predikat
2	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju	2	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah			**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**%**
				2.1	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Daerah (PDRB Sekunder dan Tersier)	PDRB ADHB	Juta Rupiah
				2.2	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Poin

VISI/ MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN
				2.3	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Williamson	Poin
3	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Poin**
				3.1	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2eq/ Milyar Rupiah
				3.2	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Poin
4	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Poin**
				4.1	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun
						Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun
				4.2	Meningkatnya akses layanan kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun
				4.3	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin
						Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin
						Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin
5	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	5	Meningkatnya taraf hidup masyarakat			**Rasio Gini**	**Poin**
				5.1	Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%
				5.2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%

Sumber: Rumusan teknokratik

Adapun indikator kinerja utama tujuan dan sasaran daerah tahun 2025-2030 dijabarkan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indikator dan Target Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran Daerah
Tahun 2025-2030

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	**Poin**	**86,15**	**86,85**	**87,12**	**88,18**	**89,46**	**90,94**	**91,74**
Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,38	4,4	4,42	4,46	4,48	4,5	4,5
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	4,10	4,10	1,70	1,80	1,90	2,00	2,00
Nilai SAKIP	Predikat	B (69,38)	B (69,8)	BB (70,09)	BB (70,25)	BB (70,6)	BB (71,5)	BB (72,3)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	**%**	**5,21**	**5,15 - 5,81**	**5,30 – 5,30**	**5,86 - 6,36**	**6,00 - 6,50**	**6,15 - 6,65**	**6,75 - 7,25**
PDRB ADHB	Juta Rupiah	311.713.180	316.462.692	353.491.524	351.672.674	369.884.571	388.543.969	406.998.603
Indeks Ketahanan Pangan	Poin	72,95	73,65	74,62	75,59	76,56	77,53	78,5
Indeks Ketimpangan Williamson	Poin	0,967	0,955	0,945	0,936	0,926	0,917	0,907
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**Poin**	**59,47**	**59,26**	**59,36**	**59,45**	**59,54**	**59,64**	**59,73**
Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2eq/Milyar Rupiah	-	0,55	0,75	0,97	1,26	1,59	1,83
Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Poin	101,72	101	98	96	95	93	92
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**Poin**	**73,63**	**74,02**	**74,56**	**75,09**	**75,67**	**76,23**	**76,89**
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,39	8,46	8,5	8,54	8,59	8,63	8,67
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,75	12,78	12,81	12,84	12,87	12,9	12,93

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,9	75,34	75,67	76,01	76,35	76,69	77,03
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,17	90,35	90,51	90,65	90,76	90,83	90,88
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	54,41	54,44	54,47	54,50	54,53	54,56	54,59
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	55,50	55,75	56,00	56,25	56,50	56,75	57,00
Rasio Gini	**Poin**	**0,398**	**0,364-0,371**	**0,377 – 0,377**	**0,354-0,377**	**0,353-0,376**	**0,352-0,375**	**0,351-0,374**
Tingkat Kemiskinan	%	7,05	6,39 - 7,05	6,40 – 6,40	5,96 - 6,51	5,7 - 6,25	5,41 - 5,95	5,09 - 5,64
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,34	7,17-7,79	6,92 – 6,92	6,68-7,30	6,44-7,06	6,19-6,81	5,95-6,57

Sumber: - Hasil penyepakatan target dengan Provinsi Jawa Barat, 2025
Hasil penghitungan Bappedalitbang, 2025

3.2 Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Daerah

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Strategi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi RPJMD tahun 2025-2029 yang berada pada tahapan I RPJPD Tahun 2025-2029.

Strategi dijabarkan dalam bentuk penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan ini dijabarkan dalam Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2030

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi	Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN	Perluasan jaringan dan pengembangan layanan pemerintahan berbasis digital	Perluasan jaringan dan pengembangan layanan pemerintahan berbasis digital	Perluasan jaringan dan pengembangan layanan pemerintahan berbasis digital	Perluasan jaringan dan pengembangan layanan pemerintahan berbasis digital	pengembangan layanan pemerintahan berbasis digital	pengembangan layanan pemerintahan berbasis digital
				Peningkatan kompetensi SDM berbasis digital	Peningkatan kompetensi SDM berbasis digital	Peningkatan kompetensi SDM berbasis digital	Peningkatan kompetensi SDM berbasis digital	Peningkatan kompetensi SDM berbasis digital	Peningkatan kompetensi SDM berbasis digital
				-	Penyediaan data digital desa melalui bantuan keuangan desa	Penyediaan data digital desa melalui bantuan keuangan desa	Penyediaan data digital desa melalui bantuan keuangan desa	Penyediaan data digital desa melalui bantuan keuangan desa	Penyediaan data digital desa melalui bantuan keuangan desa
				Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa	Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa	Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa	Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa	Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa	Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas melalui bantuan keuangan desa
				Penyiapan Perubahan status desa menjadi kelurahan	Penyiapan Perubahan status desa menjadi kelurahan	Penyiapan Perubahan status desa menjadi kelurahan	Penyiapan Perubahan status desa menjadi kelurahan	Penyiapan Perubahan status desa menjadi kelurahan	Penyiapan Perubahan status desa menjadi kelurahan

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Akselerasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan melalui pembinaan kecamatan	Akselerasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan melalui pembinaan kecamatan	Akselerasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan melalui pembinaan kecamatan	Akselerasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan melalui pembinaan kecamatan	Akselerasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan melalui pembinaan kecamatan	Akselerasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan melalui pembinaan kecamatan
				Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat desa dan kelurahan	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat desa dan kelurahan	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat desa dan kelurahan	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat desa dan kelurahan	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat desa dan kelurahan	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat desa dan kelurahan
				Pengharmonisasian Human Capital Development Plan (HCDP) dengan stakeholder terkait	Penyempurnaan Human Capital Development Plan (HCDP) berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan dan Aspek Kinerja	Penyusunan Human Capital Development Plan (DCDP) ASN Kabupaten Bogor	Implementasi Pengembangan kompetensi yang didasari oleh Human Capital Development Plan (HCDP)	Pemantauan dan evaluasi hasil Implementasi Human Capital Development Plan (HCDP)	Penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) ASN Kabupaten Bogor 2030-2035
				Reviu sistem karir ASN yang ada dan melakukan studi komparatif sistem merit	Perancangan sistem manajemen talenta dan indikator reward-punishment	Pelaksanaan simulasi/uji coba sistem merit	Implementasi penuh sistem merit	Pemantauan dan evaluasi hasil Implementasi Sistem merit	Penyempurnaan sistem dan digitalisasi penuh manajemen talenta ASN
				Peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi	Peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi	Peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi	Peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi	Peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi	Peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan Berbasis IT	Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan Berbasis IT dan Membangun Komitmen Bersama Stakeholder	Penerapan Pengelolaan Arsip Surat Menyurat Melalui Aplikasi di Lingkup Perangkat Daerah Non-Kecamatan	Penerapan Pengelolaan Arsip Surat Menyurat Melalui Aplikasi di Lingkup Perangkat Daerah	Pemantauan dan Evaluasi Pengaplikasian Pengelolaan Arsip Surat Menyurat Berbasis IT	Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengaplikasian Pengelolaan Arsip Surat Menyurat Berbasis IT
				Peningkatan kesatuan bangsa dan politik melalui penguatan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Peningkatan kesatuan bangsa dan politik melalui penguatan ketahanan ekonomi sosial, budaya dan agama	Peningkatan kesatuan bangsa dan politik melalui penguatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan kesatuan bangsa dan politik melalui penguatan pendidikan politik kepada kader partai politik dan masyarakat	Peningkatan kesatuan bangsa dan politik melalui penguatan fungsi inteligen daerah, dan kewaspadaan daerah	Peningkatan kesatuan bangsa dan politik melalui koordinasi dan integrasi, baik dengan pihak internal maupun ekternal dalam penyusunan strategi lima tahun ke depan
				Peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan melalui perluasan jenis pelayanan sampai dengan tingkat kecamatan	Peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan melalui perluasan jenis pelayanan sampai dengan tingkat desa dan kelurahan	Peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan melalui pengembangan layanan terintegrasi dinas, UPT, kecamatan, desa dan kelurahan berbasis aplikasi online	Peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan melalui pengembangan inovasi layanan terintegrasi dengan berbagai instansi publik	Peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan melalui pengembangan inovasi layanan terintegrasi dengan berbagai instansi publik	Peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan melalui pengembangan inovasi layanan terintegrasi dengan berbagai instansi publik

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD-RI dalam penganggaran, penatausahaan , dan pelaporan
				Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui optimalisasi penatausahaan aset sebagai syarat pencairan	Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui optimalisasi pemetaan aset yang dapat dimanfaatkan	Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtangan an aset	Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui pelaksanaan sensus Barang milik daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui optimalisasi pengamanan barang milik daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah melalui optimalisasi pelaporan pengelolaan barang milik daerah
				Pemantapan regulasi dan pedoman pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah serta penguatan basis data pajak daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mendorong percepatan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui pelayanan online	Optimalisasi Pengolahan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Instensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah	Penerapan *One Map System* sebagai bank data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pemanfaatan potensi alternatif pembiayaan non APBD dalam pendanaan pembangunan daerah	Pemanfaatan potensi alternatif pembiayaan non APBD dalam pendanaan pembangunan daerah	Pemanfaatan potensi alternatif pembiayaan non APBD dalam pendanaan pembangunan daerah	Pemanfaatan potensi alternatif pembiayaan non APBD dalam pendanaan pembangunan daerah	Pemanfaatan potensi alternatif pembiayaan non APBD dalam pendanaan pembangunan daerah	Pemanfaatan potensi alternatif pembiayaan non APBD dalam pendanaan pembangunan daerah
				Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda/perkada dan sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan perlindungan masyarakat	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda/perkada dan sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan perlindungan masyarakat	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda/perkada dan sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan perlindungan masyarakat	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda/perkada dan sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan perlindungan masyarakat	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda/perkada dan sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan perlindungan masyarakat	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda/perkada dan sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan perlindungan masyarakat
				Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 5 Tahunan dan Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Tahunan dan Rancangan Teknokratik Perencanaan Pembangunan 5 Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 5 Tahunan dan Tahunan

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Penguatan kualitas kebijakan Strategis Pemerintah Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Peningkatan kualitas kebijakan Strategis Pemerintah Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Kolaborasi dan Pemanfaatan kualitas kebijakan Pemerintah Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Peningkatan kualitas kebijakan berbasis Riset dan Inovasi melalui Pengembangan talenta	Penguatan Tata kelola berbasis Riset dan Inovasi yang efektif dan akuntabel	Peningkatan Tata kelola berbasis Riset dan Inovasi yang efektif dan akuntabel
				Penguatan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan publik	Penguatan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan publik	Penguatan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan publik	Penguatan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan publik	Penguatan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan publik	Penguatan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan publik
				Penguatan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Penguatan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Penguatan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Penguatan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Penguatan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Penguatan pelayanan publik di wilayah kecamatan
				Peningkatan kualitas koordinasi, evaluasi, dan rumusan kebijakan	Peningkatan kualitas koordinasi, evaluasi, dan rumusan kebijakan	Peningkatan kualitas koordinasi, evaluasi, dan rumusan kebijakan	Peningkatan kualitas koordinasi, evaluasi, dan rumusan kebijakan	Peningkatan kualitas koordinasi, evaluasi, dan rumusan kebijakan	Peningkatan kualitas koordinasi, evaluasi, dan rumusan kebijakan
				Penataan dan evaluasi organisasi Perangkat Daerah dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB)	Penataan dan evaluasi organisasi Perangkat Daerah dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB)	Penataan dan evaluasi organisasi Perangkat Daerah dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB)	Penataan dan evaluasi organisasi Perangkat Daerah dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB)	Penataan dan evaluasi organisasi Perangkat Daerah dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB)	Penataan dan evaluasi organisasi Perangkat Daerah dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB)

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pengoordinasian penyiapan administrasian, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	Pengoordinasian penyiapan administrasian, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	Pengoordinasian penyiapan administrasian, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	Pengoordinasian penyiapan administrasian, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	Pengoordinasian penyiapan administrasian, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	Pengoordinasian penyiapan administrasian, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)
				Penguatan tata kelola pertanahan	Penguatan tata kelola pertanahan	Penguatan tata kelola pertanahan	Memperkuat Penguatan tata kelola pertanahan	Penguatan tata kelola pertanahan	Pemantapan tata kelola pertanahan
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Daerah (PDRB Sekunder dan Tersier)	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Inventarisasi / Identifikasi potensi kemitraan usaha mikro / IKM / koperasi dengan toko modern	Penataan potensi kemitraan usaha mikro / IKM / koperasi dengan toko modern	Penguatan kemitraan usaha mikro / IKM / koperasi dengan toko modern	Pengembangan kemitraan usaha mikro / IKM / koperasi dengan toko modern	Pengembangan kemitraan usaha mikro / IKM / koperasi dengan toko modern	Pemantapan kemitraan usaha mikro / IKM / koperasi dengan toko modern
				Pemenuhan kualifikasi kelembagaan dan aspek legalitas berusaha bagi koperasi/IKM/ usaha mikro	Pemenuhan kualifikasi dan aspek legalitas berusaha bagi koperasi/IKM/ usaha mikro	Pemenuhan kualifikasi dan aspek legalitas berusaha bagi koperasi/IKM/ usaha mikro	Pemenuhan kualifikasi dan aspek legalitas berusaha bagi koperasi/IKM/ usaha mikro	Pemenuhan kualifikasi dan aspek legalitas berusaha bagi koperasi/IKM/ usaha mikro	Pemenuhan kualifikasi dan aspek legalitas berusaha bagi koperasi/IKM/ usaha mikro

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Identifikasi, pemetaan, dan promosi sektor-sektor potensial investasi	Penyiapan infrastruktur pendukung investasi dan deregulasi kebijakan yang mendukung investasi	Penyiapan tenaga kerja berkualifikasi yang dapat diserap dalam investasi	Pengembangan dan Fasilitasi kemitraan investasi bermodal besar dengan UMKM	Penguatan kemitraan investasi dengan UMKM serta evaluasi dan monitoring keberlanjutan promosi sektor-sektor yang berpotensi menarik investasi	Penguatan kemitraan investasi dengan UMKM serta evaluasi monitoring keberlanjutan kegiatan penanaman modal
				Pengembangan sentra UMKM dan industri	Pengembangan sentra UMKM dan IKM	Penguatan sentra UMKM dan IKM	Penguatan sentra UMKM dan IKM	Penguatan sentra UMKM dan IKM	Penguatan sentra UMKM dan IKM
				Perintisan pasar berstandar nasional	Perintisan pasar berstandar nasional	Perintisan pasar berstandar nasional	Pengembangan pasar berstandar nasional	Pengembangan pasar berstandar nasional	Pengembangan pasar berstandar nasional
				Pengawasan dan pengendalian distribusi barang pokok dan barang penting	Pengawasan dan pengendalian distribusi barang pokok dan barang penting	Pengawasan dan pengendalian distribusi barang pokok dan barang penting	Pengawasan dan pengendalian distribusi barang pokok dan barang penting	Pengawasan dan pengendalian distribusi barang pokok dan barang penting	Pengawasan dan pengendalian distribusi barang pokok dan barang penting
				Identifikasi Potensi pengembangan produk unggulan daerah berorientasi ekspor dan pasar digital	Fasilitasi legalitas produk unggulan daerah berorientasi ekspor dan pasar digital	Fasilitasi legalitas hukum produk unggulan daerah berorientasi ekspor dan pasar digital	Pengembangan produk unggulan daerah berorientasi ekspor dan pasar digital	Pengembangan produk unggulan daerah berorientasi ekspor dan pasar digital	Pengembangan produk unggulan daerah berorientasi ekspor dan pasar digital

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Menyiapkan basis data terintegrasi untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dan Pembangunan Creative-Hub sebagai sarana Kreatif masyarakat	Penataan destinasi (Sarpras, Amenitas dan Atraksi), penguatan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan pemasaran pariwisata	Digitalisasi layanan wisata dan perluasan pasar ekraf melalui teknologi dan kolaborasi	Pengembangan Community Based Tourism (CBT), destinasi berdaya tarik rendah, Penguatan jejaring pelaku ekraf dengan buyer nasional dan internasional	Terwujudnya ekosistem pariwisata dan ekraf yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan
				Penguatan peran badan usaha (BUMD, BUMDes, dan Koperasi)	Penguatan peran badan usaha (BUMD, BUMDes, dan Koperasi)	Penguatan peran badan usaha (BUMD, BUMDes, dan Koperasi)	Penguatan peran badan usaha (BUMD, BUMDes, dan Koperasi)	Penguatan peran badan usaha (BUMD, BUMDes, dan Koperasi)	Penguatan peran badan usaha (BUMD, BUMDes, dan Koperasi)
				Pengembangan pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya	Pengembangan pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya	Pengembangan pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya	Pengembangan pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya	Pengembangan pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya	Pengembangan pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya
				Penguatan Fondasi Legalitas dan Data untuk Revalidasi Geopark Nasional serta Penataan Perwilayahan Geopark	Penyelarasan Dokumen Strategis, Penguatan Kelembagaan, dan Pengembangan Infrastruktur Amenitas untuk Edukasi Geopark	Penguatan Infrastruktur Amenitas, Edukasi Geopark, dan Pengembangan Kapasitas SDM Lokal	Optimalisasi Promosi Digital Geopark, Pengembangan Festival, dan Penguatan Geoproduk sebagai Ciri Khas Geopark Halimun Salak	Penguatan Kelembagaan Pengelola Geopark, Jejaring Nasional-Internasional, dan Finalisasi Persiapan Nominasi UGGs	Pengajuan Resmi Geopark Halimun Salak ke UNESCO Global Geopark Council dan Optimalisasi Publikasi Internasional
				Pengendalian inflasi	Pengendalian inflasi	Pengendalian inflasi	Pengendalian inflasi	Pengendalian inflasi	Pengendalian inflasi

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya Ketahanan Pangan		Penyediaan infrastruktur, diversifikasi pangan masyarakat, dan pengawasan keamanan pangan	Peningkatan infrastruktur, diversifikasi pangan masyarakat, dan pengawasan keamanan pangan	Peningkatan infrastruktur, diversifikasi pangan masyarakat, dan pengawasan keamanan pangan	Peningkatan infrastruktur, diversifikasi pangan masyarakat, dan pengawasan keamanan pangan	Optimalisasi infrastruktur, diversifikasi pangan masyarakat, dan pengawasan keamanan pangan	Optimalisasi infrastruktur, diversifikasi pangan masyarakat, dan pengawasan keamanan pangan
				Fasilitasi sarana, prasarana, perizinan, mitigasi bencana, dan sumberdaya manusia produksi perikanan, pertanian dan peternakan	Fasilitasi sarana, prasarana, perizinan, mitigasi bencana, dan sumberdaya manusia produksi perikanan, pertanian dan peternakan	Fasilitasi sarana, prasarana, perizinan, mitigasi bencana, dan sumberdaya manusia produksi perikanan, pertanian dan peternakan	Fasilitasi sarana, prasarana, perizinan, mitigasi bencana, dan sumberdaya manusia produksi perikanan, pertanian dan peternakan	Fasilitasi sarana, prasarana, perizinan, mitigasi bencana, dan sumberdaya manusia produksi perikanan, pertanian dan peternakan	Fasilitasi sarana, prasarana, perizinan, mitigasi bencana, dan sumberdaya manusia produksi perikanan, pertanian dan peternakan
				Penyiapan upaya mandiri benih padi unggul bersertifikat	Peningkatan upaya mandiri benih padi unggul bersertifikat	Peningkatan upaya mandiri benih padi unggul bersertifikat	Peningkatan upaya mandiri benih padi unggul bersertifikat	Mandiri benih padi unggul bersertifikat	Mandiri benih padi unggul bersertifikat
				Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk di calon Ibukota Daerah Otonomi Baru	Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk di calon Ibukota Daerah Otonomi Baru	Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk di calon Ibukota Daerah Otonomi Baru	Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk di calon Ibukota Daerah Otonomi Baru	Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk di calon Ibukota Daerah Otonomi Baru	Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk di calon Ibukota Daerah Otonomi Baru

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah	Peningkatan Akses Infrastruktur Palayanan Dasar dan Konektivitas Antarwilayah secara merata	Perencanaan penyediaan infrastruktur sistem angkutan umum massal	Penyediaan moda angkutan umum massal (BRT, *Shuttle*, LRT, dll)	Operasionalisasi sistem angkutan umum massal	Peningkatan cakupan layanan angkutan umum massal	Optimasi Operasional layanan angkutan umum massal	Monitoring, Evaluasi, replikasi dan keberlanjutan sistem angkutan umum massal
				Perencanaan dan Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah	Percepatan pembangunan jaringan transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah	Rehabilitasi dan optimasi layanan jaringan transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah	Rehabilitasi dan Pemantapan jaringan transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah	Pemantapan kualitas jaringan transportasi sesuai standar/NSPK terkait dan pengembangan sistem monitoring evaluasi berbasis digital.
				Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi melalui penyediaan sarana, prasarana, dan perlengkapan jalan yang memadai	Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi melalui penyediaan sarana, prasarana, dan perlengkapan jalan yang memadai	Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi melalui penyediaan sarana, prasarana, dan perlengkapan jalan yang memadai	Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi melalui penyediaan sarana, prasarana, dan perlengkapan jalan yang memadai	Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi melalui penyediaan sarana, prasarana, dan perlengkapan jalan yang memadai	Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi melalui penyediaan sarana, prasarana, dan perlengkapan jalan yang memadai

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, berkelanjutan serta fasilitasi penyediaan PSU	Penyediaan hunian layak dan penataan kawasan permukiman serta fasilitasi PSU untuk menunjang fungsi hunian	Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman serta penyediaan PSU untuk menunjang fungsi hunian	Rehabilitasi dan Peningkatan kualitas perumahan, kawasan permukiman serta pemeliharaan PSU untuk menunjang fungsi hunian	Pengembangan kerja sama dalam peningkatan kualitas perumahan, kawasan permukiman dan fasilitasi penyediaan PSU	Monitoring dan evaluasi kualitas perumahan, kawasan permukiman, serta penyediaan PSU
				Identifikasi kondisi pelayanan dasar (*Baseline*) kawasan permukiman di seluruh Wilayah Pengembangan, serta penyusunan rencana prioritas penanganannya	Pembangunan prasarana dasar kawasan permukiman (air minum, air limbah, dan drainase) sesuai skala prioritas penanganan	Percepatan pembangunan prasarana dasar kawasan permukiman (air minum, air limbah, dan drainase) sesuai skala prioritas penanganan	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan prasarana dasar kawasan permukiman (air minum, air limbah, dan drainase).	Optimasi layanan prasarana dasar kawasan permukiman (air minum, air limbah, dan drainase).	Pengembangan sistem digitalisasi (monitoring dan evaluasi) kualitas prasarana dasar kawasan permukiman (air minum, air limbah, dan drainase).
				Penyusunan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan (PKL dan PPK) berdasarkan arahan RTRW Kabupaten	Penyusunan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan (PKL dan PPK) berdasarkan arahan RTRW Kabupaten	Penyelesaian legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penataan kawasan strategis/prioritas (CBD, pasar, ruang terbuka publik, dll) pada kawasan perkotaan di WP Barat	Penyelesaian legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penataan kawasan strategis/prioritas (CBD, pasar, ruang terbuka publik, dll) pada kawasan perkotaan di WP Timur	Penyelesaian legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penataan kawasan strategis/prioritas (CBD, pasar, ruang terbuka publik, dll) pada kawasan perkotaan di WP Tengah	Pengembangan sistem digitalisasi sebagai dasar perwujudan kawasan perkotaan inklusif dengan prinsip *"liveable, smart, and sustainable city"*

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Penyediaan sistem infrastruktur sumberdaya air pada setiap Wilayah Pengembangan (WP)	Percepatan penyediaan infrastruktur sumberdaya air pada setiap Wilayah Pengembangan (WP)	Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur sumberdaya air pada setiap Wilayah Pengembangan (WP)	Pengembangan dan pengelolaan layanan infrastruktur sumberdaya air pada setiap Wilayah Pengembangan (WP)	Optimasi layanan infrastruktur sumberdaya air pada setiap Wilayah Pengembangan (WP)	Pemantapan kualitas infrastruktur sumberdaya air sesuai standar/NSPK terkait dan pengembangan sistem monitoring pembangunan infrastruktur berbasis digital.
				Penyiapan rencana pembangunan kawasan berorientasi transit	Pengaturan tata ruang dan legalitas penetapan kawasan berorientasi transit	Pembangunan infrastruktur kawasan berorientasi transit dan penataan kawasan sekitar simpul transportasi.	Ekspansi kawasan berorientasi transit dan keterpaduan/integrasi dengan kawasan sekitar simpul transportasi	Penguatan investasi, pemasaran dan pelayanan publik terpadu pada kawasan berorientasi transit	Konsolidasi, replikasi, dan keberlanjutan kawasan berorientasi transit lainnya di wilayah kabupaten.
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan	Penguatan Tata Kelola Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyiapan dan harmonisasi dokumen perizinan lingkungan hidup dan tata ruang.	Integrasi dan implementasi penerapan izin berbasis kesesuaian ruang dan kajian lingkungan hidup	Integrasi dan implementasi penerapan izin berbasis kesesuaian ruang dan kajian lingkungan hidup	Penguatan sistem penerapan izin berbasis kesesuaian ruang dan kajian lingkungan hidup	Pemantauan dan Evaluasi sistem integrasi perizinan terhadap pengendalian lingkungan hidup	Penguatan keberlanjutan dan konsolidasi dalam pengembangan sistem monitoring perizinan lingkungan hidup

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Identifikasi data dasar dan pemetaan wilayah tercemar serta penyusunan rencana aksi penanganan pencemaran	Intervensi penanganan pencemaran melalui pengendalian, remediasi, dan rehabilitasi secara terpadu.	Intervensi penanganan pencemaran melalui pengendalian, remediasi, dan rehabilitasi secara terpadu.	Intervensi penanganan pencemaran melalui pengendalian, remediasi, dan rehabilitasi secara terpadu.	Intervensi penanganan pencemaran melalui pengendalian, remediasi, dan rehabilitasi secara terpadu.	Konsolidasi dan monitoring berkelanjutan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
				Identifikasi dan penyiapan Peta Jalan (*Road Map)* termasuk Rencana Aksi Daerah Penuntasan Pengelolaan Sampah berbasis kewilayahan yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mulai dari sumber timbul (hulu) hingga akhir pengolahan/pemrosesan (hilir) serta mendorong operasionalisasi TPPAS Nambo untuk mendukung optimalisasi penanganan sampah.	Peningkatan sarana prasarana serta optimalisasi layanan pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan *(Reduce and Reuse)* serta penanganan sampah (Recycle) secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.	Implementasi program Bank Sampah berbasis kewilayahan di tingkat Desa didukung penetapan regulasi daerah yang mengatur aspek pengelolaan, penyediaan fasilitas, dan tata kelola/kelembaga-an.	Pengembangan inovasi, edukasi, dan kolaborasi antar stakeholder untuk mewujudkan perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Pengembangan diversifikasi program serta monitoring dan evaluasi untuk perbaikan keberlanjutan penuntasan pengelolaan sampah.

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Inventarisasi dan pemetaan data dasar ekosistem alami	Implementasi program rehabilitasi di kawasan ekosistem alami	Rehabilitasi dan konservasi hutan kota, kawasan ekosistem alami dan perlindungan/ pemantauan pada kawasan implementasi program.	Rehabilitasi dan konservasi hutan kota, kawasan ekosistem alami dan perlindungan/ pemantauan pada kawasan implementasi program.	Rehabilitasi dan konservasi hutan kota, kawasan ekosistem alami dan perlindungan/ pemantauan pada kawasan implementasi program.	Konsolidasi dan ekspansi berkelanjutan dalam rangka penambahan/ perluasan hutan kota maupun ekosistem alami lainnya.
				Penyiapan perencanaan strategis pengelolaan sistem transportasi publik massal rendah emisi yang terintegrasi.	Pembangunan infrastruktur transportasi publik massal rendah emisi.	Integrasi antarmoda dan pembangunan infrastruktur transportasi publik massal rendah emisi.	Pembangunan infrastruktur transportasi publik massal rendah emisi serta ekspansi layanan koridor pengembangan.	Pembangunan infrastruktur transportasi publik massal rendah emisi serta ekspansi layanan koridor pengembangan.	Replikasi pengembangan infrastruktur transportasi publik massal rendah emisi.
				Identifikasi sektor-sektor penyumbang emisi.	Penerapan teknologi rendah emisi pada sektor-sektor penyumbang emisi.	Penerapan teknologi rendah emisi pada sektor-sektor penyumbang emisi.	Replikasi penerapan teknologi rendah emisi pada sektor-sektor penyumbang emisi.	Ekspansi dan Replikasi penerapan teknologi rendah emisi pada sektor-sektor penyumbang emisi.	Konsolidasi dan ekspansi berkelanjutan dalam rangka pengurangan emisi sektor-sektor penyumbang emisi
		Meningkatnya ketahanan bencana	Penurunan Risiko Bencana	Penanganan bencana di wilayah prioritas terdampak bencana	Penanganan bencana di wilayah prioritas terdampak bencana	Penanganan bencana di wilayah prioritas terdampak bencana	Penanganan bencana di wilayah prioritas terdampak bencana	Penanganan bencana di wilayah prioritas terdampak bencana	Penanganan bencana di wilayah prioritas terdampak bencana

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berualitas	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kajian Pengembangan percontohan sekolah istimewa Tingkat SD, dan SMP	Penyiapan Kurikulum dan Sarana prasarana Sekolah istimewa Tingkat SD, dan SMP	Pembangunan Sarana prasarana sekolah istimewa Tingkat SMP	Penyelenggaraan Sekolah istimewa Tingkat SMP	Pembangunan Sarana prasarana sekolah istimewa Tingkat SD	Penyelenggara-an Sekolah istimewa Tingkat SD
				Pemberian bantuan pendidikan	Pemberian bantuan pendidikan	Pemberian bantuan pendidikan	Pemberian bantuan Pendidikan	Pemberian bantuan pendidikan	Pemberian bantuan pendidikan
				Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Penyiapan pemberian dukungan Sekolah Rakyat	Pemberian dukungan Sekolah Rakyat	Pemberian dukungan Sekolah Rakyat	Pemberian dukungan Sekolah Rakyat	Pemberian dukungan Sekolah Rakyat	Pemberian dukungan Sekolah Rakyat
				Pemenuhan kebutuhan Ruang Kelas Layak Belajar pada SD dan SMP Negeri	Pemenuhan kebutuhan Ruang Kelas Layak Belajar pada SD dan SMP Negeri	Pemenuhan kebutuhan Ruang Kelas Layak Belajar pada SD dan SMP Negeri	Pemenuhan kebutuhan Ruang Kelas Layak Belajar pada SD dan SMP Negeri	Pemenuhan kebutuhan Ruang Kelas Layak Belajar pada SD dan SMP Negeri	Pemenuhan kebutuhan Ruang Kelas Layak Belajar pada SD dan SMP Negeri
				Pemberian dukungan terhadap madrasah, sekolah terbuka, pesantren, pengembangan sekolah berbasis asrama dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya	Pemberian dukungan terhadap madrasah, sekolah terbuka, pesantren, pengembangan sekolah berbasis asrama dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya	Pemberian dukungan terhadap madrasah, sekolah terbuka, pesantren, pengembangan sekolah berbasis asrama dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya	Pemberian dukungan terhadap madrasah, sekolah terbuka, pesantren, pengembangan sekolah berbasis asrama dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya	Pemberian dukungan terhadap madrasah, sekolah terbuka, pesantren, pengembangan sekolah berbasis asrama dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya	Pemberian dukungan terhadap madrasah, sekolah terbuka, pesantren, pengembangan sekolah berbasis asrama dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi serta Penguatan Koleksi Buku.	Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Melalui Peningkatkan Kompetensi SDM Perpustakaan Berbasis Teknilogi Informasi	Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan melalui Usulan Sertifikasi bagi Perpustakaan Umum/khusus, sekolah yang Mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) untuk Mendapatkan Sertifikasi.	Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan melalui Usulan Sertifikasi bagi Perpustakaan Umum/khusus, sekolah yang Mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) untuk Mendapatkan Sertifikasi.	Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan melalui Usulan Sertifikasi bagi Perpustakaan Umum/khusus , sekolah yang Mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) untuk Mendapatkan Sertifikasi.	Monitoring dan Evaluasi Kualitas Layanan Pada Perpustakaa Umum Khusus dan Sekolah
		Meningkatnya akses layanan kesehatan		Penjaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat (UHC 98%)	Penjaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat (UHC 100%)	Penjaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat (UHC 100%)	Penjaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat (UHC 100%)	Penjaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat (UHC 100%)	Penjaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat (UHC 100%)
				Optimalisasi layanan dan sarana dan prasarana pada Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Optimalisasi layanan dan sarana dan prasarana pada Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Optimalisasi layanan dan sarana dan prasarana pada Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Optimalisasi layanan dan sarana dan prasarana pada Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Optimalisasi layanan dan sarana dan prasarana pada Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Optimalisasi layanan dan sarana dan prasarana pada Instalasi Gawat Darurat (IGD)
				Percepatan penanganan penyakit menular dan penuntasan TBC	Percepatan penanganan penyakit menular dan penuntasan TBC	Percepatan penanganan penyakit menular dan penuntasan TBC	Percepatan penanganan penyakit menular dan penuntasan TBC	Percepatan penanganan penyakit menular dan penuntasan TBC	Percepatan penanganan penyakit menular dan penuntasan TBC
				pengembangan layanan pada RSUD	pengembangan layanan pada RSUD	pengembangan layanan pada RSUD	pengembangan layanan pada RSUD	pengembangan layanan pada RSUD	pengembangan layanan pada RSUD

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas
		Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender		Peningkatan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
				Pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga berencana	Pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga berencana	Pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga berencana	Pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga berencana	Pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga berencana	Pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga berencana
				Penguatan ketahanan keluarga	Penguatan ketahanan keluarga	Penguatan ketahanan keluarga	Penguatan ketahanan keluarga	Penguatan ketahanan keluarga	Penguatan ketahanan keluarga
				Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi	Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi	Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi	Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi	Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi	Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Peningkatan kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/ kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	Peningkatan kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/ kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	Peningkatan kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/ kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	Peningkatan kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/ kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	Peningkatan kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/ kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	Peningkatan kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/ kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader
				Peningkatan pembinaan Insan Olahraga	Pencapaian Prestasi Olahraga Terbaik	Peningkatan pembinaan Insan Olahraga	Peningkatan pembinaan Insan Olahraga	Peningkatan pembinaan Insan Olahraga	Pencapaian Prestasi Olahraga Terbaik
				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Olahraga	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Olahraga	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Olahraga	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Olahraga	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Olahraga	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Olahraga
				Penyelenggaraan pemassalan olahraga pendidikan, tradisional dan rekreasi di masyarakat	Penyelenggaraan pemassalan olahraga pendidikan, tradisional dan rekreasi di masyarakat	Penyelenggaraan pemassalan olahraga pendidikan, tradisional dan rekreasi di masyarakat	Penyelenggaraan pemassalan olahraga pendidikan, tradisional dan rekreasi di masyarakat	Penyelenggaraan pemassalan olahraga pendidikan, tradisional dan rekreasi di masyarakat	Penyelenggaraan pemassalan olahraga pendidikan, tradisional dan rekreasi di masyarakat

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Inventarisasi dan penhyusunan kajian potensi objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya sebagai dasar perencanaan dan pelestarian berbasis bukti.	Penyusunan Rencana Induk Pemanfaatan dan penetapan skala prioritas pelestarian dan pengembangan Objek Pemaujuan Kebudayaan dan Cagar Budaya secara bertahap dan terarah.	Konservasi ringan dan peningkatan sarana pendukung Cagar Budaya secara bertahap, serta produksi media interpretatif	Peningkatkan kapasitas SDM lokal serta penyelenggaraan program edukatif dan kegiatan budaya di lokasi cagar budaya.	Pengembangan promosi budaya melalui media digital dan publikasi, serta peluncuran ikonografi Objek Pemaujuan Kebudayaan dan Cagar Budaya sebagai bagian dari identitas daerah.	Penyusunan strategi keberlanjutan pengelolaan Objek Pemaujuan Kebudayaan dan Cagar Budaya berbasis partisipatif dan berkelanjutan.
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Taraf hidup Masyarakat	Menurunnya kemiskinan	Penurunan Kemiskinan	Penguatan dan pelaksanaan penurunan kemiskinan melalui skema graduasi	Penguatan dan pelaksanaan penurunan kemiskinan melalui skema graduasi	Penguatan dan pelaksanaan penurunan kemiskinan melalui skema graduasi	Penguatan dan pelaksanaan penurunan kemiskinan melalui skema graduasi	Penguatan dan pelaksanaan penurunan kemiskinan melalui skema graduasi	Penguatan dan pelaksanaan penurunan kemiskinan melalui skema graduasi
			Pemenuhan hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas	Pemenuhan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar bagi kelompok rentan, terutama disabilitas, lansia	Pemenuhan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar bagi kelompok rentan, terutama disabilitas, lansia	Pemenuhan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar bagi kelompok rentan, terutama disabilitas, lansia	Pemenuhan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar bagi kelompok rentan, terutama disabilitas, lansia	Pemenuhan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar bagi kelompok rentan, terutama disabilitas, lansia	Pemenuhan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar bagi kelompok rentan, terutama disabilitas, lansia

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja
				Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja	Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja	Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja	Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja	Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja	Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja

Sumber : Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati, dianalisis dan diolah

3.2.2 Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

Program prioritas, di sisi lain merupakan program yang sesuai dengan nomenklatur perundang-undangan yang tercantum dalam SIPD-RI. Diturunkan dari program prioritas tersebut, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, salapan lengkah (9 langkah) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

Berdasarkan hasil cascading, program prioritas dijabarkan dalam Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Program Prioritas Daerah Tahun 2025-2030

VISI/ MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
Visi : Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang										
1	**Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Governance)**	**1**	**Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan**				**Poin**	**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**		
				1.1	**Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi**		**Poin**	**Indeks Pelayanan Publik**		
						Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	Cakupan penerbitan KTP	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							%	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
						Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	Cakupan penerbitan akte kelahiran anak	Program Pencatatan Sipil	
						Meningkatnya Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Persentase Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
							%	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama		
						Tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum sesuai SOP yang berlaku	%	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
						Meningkatnya kapasitas anggota Perlindungan masyarakat	%	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas		
						Meningkatnya kapasitas anggota Satpol PP	%	Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP		
						Tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP yang berlaku	%	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		

VISI/ MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Meningkatnya etika dan budaya politik	%	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
						Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	%	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
						Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
						Tercapainya peran dan sinergitas kewaspadaan dini di daerah antar pemerintah dengan lembaga/ masyarakat	%	Persentase konflik sosial yang tertangani di daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Terpenuhinya Sarana Prasarana Publik dan Perkembangan Kewilayahan Desa	%	Persentase Fasilitasi Desa yang tertata	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				%	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Desa		
			Terfasilitasi kerjasama desa	%	Presentase Desa yang terfasilitasi melakukan Kerjasama	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Meningkatnya Tata kelola Administrasi dan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan serta Keterbukaan Informasi Publik Desa	%	Persentase Fasilitasi terpenuhinya Administrasi keuangan dan aset desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				%	Presentase Fasilitasi Lembaga BUM Desa yang terbina		
				%	Persentase Fasilitasi Terbinanya Administrasi Pemerintahan Desa		
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	%	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
			Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	%	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya fasilitasi pendaftaran hak atas tanah	**%**	Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				Poin	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	%	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Terpenuhinya Ketersediaan Infrastruktur TIK yang berkualitas di lingkup Pemerintah Daerah	%	Persentase Layanan Infrastruktur TIK yang berkualitas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Meningkatnya Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi		
			Meningkatnya kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	%	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
				Predikat	**Nilai SAKIP**		
			Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja	%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	%	Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK/ Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
				Level	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				%	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"		
			Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	Nilai rata-rata dari Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah / Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
			Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan menjadi kebijakan	%	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	
			Tercapainya Tingkat Kematangan Kelembagaan	Predikat	Tingkat Kematangan Kelembagaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
			Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Administrasi Umum	%	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Administrasi Umum		

VISI/ MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						Tercapainya Indeks Reformasi Hukum	Predikat	Indeks Reformasi Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
						Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
							%	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
						Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Poin	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	
						Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan		
							%	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Perekonomian dan Pembangunan		
						Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM	%	Nilai sistem merit aspek pengembangan SDM	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							%	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20JP/Orang/Tahun		
							%	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi berdasarkan hasil analisis kesenjangan		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran Manajemen Kepegawaian Daerah	Poin	Nilai sistem merit aspek kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	
				%	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
				%	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
				Poin	Indeks NSPK Manajemen ASN		
			Terwujudnya Perencanaan Penganggaran yang berkualitas	Status	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Terwujudnya Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan	%	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan		
			Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan	%	Persentase laporan pertanggung-jawaban keuangan daerah sesuai ketentuan		
			Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	%	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Optimalnya Tata Kelola Pajak Daerah	Rupiah	Jumlah Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

VISI/ MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip sesuai dengan NSPK	%	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Arsip dan Perpustakaan
						Terlindunginya kondisi fisk arsip yang bernilai guna	%	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
						Terpenuhinya cakupan dukungan sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	Cakupan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
2	**Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju**	**2**	**Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah**				**%**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**		
				2.1	**Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Daerah (PDRB Sekunder dan Tersier)**		**Juta Rupiah**	**PDRB ADHB**		
						Meningkatnya wirausaha baru	%	Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						Meningkatnya usaha mikro yang berkembang menjadi wirausaha yang mandiri	%	Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha	Program Pengembangan UMKM	
						Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	%	Persentase Koperasi Aktif	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Kualitas Koperasi	%	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
			Meningkatnya pelaku usaha Perdagangan yang berizin	%	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar rakyat	%	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting	
			Meningkat Pelaku Usaha Ekspor	Pelaku usaha ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang terintegrasi	Program Pengembangan Ekspor	
			Meningkatnya cakupan Indutrsi Kecil Menengah (IKM) yang terbina	%	Persentase Indutrsi Kecil Menengah (IKM) yang dibina	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
			Meningkatnya cakupan pelaku usaha industri yang terfasilitasi proses pengajuan izin dan yang dilakukan pengawasan	%	Persentase pelaku usaha industri yang mengajukan izin dan yang dilakukan pengawasan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	%	Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan sesuai dengan ketentuan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	%	Realisasi total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	%	Persentase peningkatan investor yang berinvetasi di Kabupaten Bogor	Program Promosi Penanaman Modal	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	%	Persentase pengendalian kegiatan penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan pemanfaatan ruang & operasional yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	%	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin pemanfaatan ruang sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	
				%	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin operasional sesuai ketentuan		
			Meningkatnya pemanfaatan pelayanan data dan sistem informasi DPMPTSP	%	Persentase peningkatan pengguna layanan sistem informasi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				%	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal		
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	Tingkat Hunian Akomodasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
							Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual	%	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		2.2 Meningkatnya ketahanan pangan		**Poin**	**Indeks Ketahanan Pangan**		
			Tersedianya cadangan pangan yang dikelola masyarakat	%	Persentase cadangan pangan masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	%	Tingkat Kecukupan Energi dan Protein Per Kapita	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	%	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawnana Pangan	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	%	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Kebutuhan sarana pertanian yang terpenuhi	%	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	

VISI/ MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
						Meningkatnya pelayanan ijin usaha pertanian	%	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis ijin usaha pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	
						Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pertanian	%	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	
						Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Ton	Jumlah produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan dan Peternakan
						Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Ton	Jumlah produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
						Meningkatnya penyediaan sarana peternakan	%	Persentase Penyediaan Sarana Peternakan (Bibit Ternak)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
						Meningkatnya penyediaan prasarana peternakan	%	Persentase prasarana (Infrastruktur) peternakan yang dibangun/direhabiltasi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				2.3	**Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah**		**Poin**	**Indeks Ketimpangan Williamson**		
						Meningkatnya Akses Air Minum Rumah Tangga yang dilayani melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perdesaan	%	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perdesaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Akses Air Minum Rumah Tangga melalui Jaringan Perpipaan perdesaan	%	Persentase Rumah Tangga dengan Akses air minum perpipaan perdesaan		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya Akses Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertata	%	Persentase luas permukiman kumuh yang tertangani	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Terwujudnya pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	%	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya Prasarana, sarana dan utilitas umum	%	Persentase fasilitasi Penyediaan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Jalan	%	Persentase Jalan yang Dibangun, Ditingkatkan (Struktur/Fungsi/Pelebaran), Direkonstruksi, dan Direhabilitasi, Sesuai Standar dan Umur Teknis Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Jalan	%	Persentase Jalan yang Dipelihara Sesuai Standar dan Umur Teknis Jalan		
			Meningkatnya Infrastruktur Jembatan Permukiman	%	Persentase Penyediaan Jembatan Gantung Di Lingkungan Permukiman		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya Kualitas Jalan	%	Persentase Jalan yang Dibangun, Ditingkatkan (Struktur/Fungsi/Pelebaran), Direkonstruksi, Direhabilitasi, dan/atau Dipelihara Sesuai Standar dan Umur Teknis Jalan		Dinas Pekerjaan Umum
			Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pengendali banjir	%	Persentase infrastruktur pengendali banjir yang terbangun	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Daerah Irigasi yang Berkualitas	%	Persentase Jumlah Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik dan Sedang		
			Terpenuhinya penyelenggaraan bangunan gedung, serta pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi	%	Persentase penataan bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
							Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

VISI/ MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Transportasi yang Selamat, Aman, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau	Poin	Rasio Konektivitas Angkutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
						Meningkatnyaa keselamatan pada perlintasan Kereta Api Sebidang	%	Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Program Pengelolaan Perkeretaapian	
3	**Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan**	**3**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana**				**Poin**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**		
				3.1	**Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan**		**Ton CO2eq/Milyar Rupiah**	**Penurunan Intensitas Emisi GRK**		
						Meningkatnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	%	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
						Meningkatnya luas area hutan kota terbangun	%	Persentase luas hutan kota yang terbangun	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	

VISI/ MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						Pemanfatan ruang sesuai dengan ketentuan ruang	%	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Meningkatnya tertib tata kelola penataan ruang	%	Persentase ketersediaan rancangan regulasi penataan ruang		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							%	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang di terbitkan		
							%	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang		
						Meningkatnya cakupan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
				3.2	**Meningkatnya ketahanan bencana**		**Poin**	**Indeks Risiko Bencana (IRBI)**		
						Meningkatnya Akses informasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang teredukasi penanggulangan bencana di daerah rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Meningkatnya pelayanan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	%	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
						Terbitnya rekomendasi hasil pengawasan penanggulangan bencana	Rekomendasi	Rekomendasi hasil pascabencana yang diterbitkan		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas pelayanan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	%	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kab. Bogor pada tahun berjalan dalam tingkat waktu tanggap response time	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
			Meningkatnya kapasitas relawan kebakaran dalam penanganan kebakaran	%	Persentase pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Redkar, Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya) atau dibawah pembinaan dinas dalam tanggap waktu response time		
			Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dalam operasi darurat non kebakaran	Layanan	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia dalam Operasi Darurat Non Kebakaran		
			Meningkatnya kualitas Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelamatan (SKIKP) yang dimanfaatkan	%	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kab. Bogor yang dilaporkan melalui Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)		
			Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	%	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran		
				%	Persentase bangunan/ gedung diawasi yang telah memenuhi ketentuan sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				%	Persentase pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Redkar, Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya) atau dibawah pembinaan dinas dalam tanggap waktu response time		
			Meningkatnya kualitas pelayanan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	%	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kab. Bogor pada tahun berjalan dalam tingkat waktu tanggap response time	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dalam operasi darurat non kebakaran	Layanan	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia dalam Operasi Darurat Non Kebakaran		
			Meningkatnya Ketersediaan dan Keandalan Sarana Prasarana serta Sistem Informasi dalam Mendukung Layanan Kebakaran dan Penyelamatan	Unit	Ketersediaan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi dalam Mendukung Layanan Kebakaran serta Penyelamatan		
			Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	%	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran		
				%	Persentase bangunan/ gedung diawasi yang telah memenuhi ketentuan sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan		

VISI/ MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
							%	Persentase pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Redkar, Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya) atau dibawah pembinaan dinas dalam tanggap waktu response time		
						Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air	%	Persentase Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air yang Terpenuhi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum
4	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**	**4**	**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia**				**Poin**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		
				4.1	**Meningkatnya akses layanan pendidikan**		**Tahun**	**Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**		
							Tahun	**Harapan Lama Sekolah (HLS)**		
						Meningkatnya mutu dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Jenjang PAUD, DIKDAS dan DIKMAS	%	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan kondisi baik	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
							%	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		
							%	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar		
							%	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama		

VISI/ MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
							%	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan		
						Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan	%	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan
				4.2	**Meningkatnya akses layanan kesehatan**		**Tahun**	**Usia Harapan Hidup (UHH)**		
						Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	%	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi nasional	%	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (SIKN)		
						Terwujudnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	%	Persentase ibu hamil periksa kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan		
						Terpenuhinya sarana prasarana dan alat di fasilitas kesehatan sesuai standar	%	Persentase fasilitas kesehatan daerah yang memenuhi standar srana prasarana alat (SPA)		
						Terkendalinya penyakit sehingga angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dapat menurun	%	Indeks penduduk yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
		4.3 Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender		**Poin**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**		
			Meningkatnya Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	%	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Tertanganinya Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	
			Terwujudnya Keluarga Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	Persentase Keluarga yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	
			Terpenuhinya hak anak secara komprehensif	Indeks	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
			Tertanganinya Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Terkendalinya Angka Kelahiran pada Remaja Umur 15-19 Tahun dalam Menekan Pertumbuhan Jumlah Penduduk	%	Angka Kelahiran dari Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Program Pengendalian Penduduk	
			Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Tercapainya keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
				Poin	**Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**		
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	%	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Poin	**Indeks Pembangunan Kebudayaan**		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	%	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Terlindunginya objek pemajuan kebudayaan daerah melalui penetapan Warisan Budaya Tingkat Kabupaten / Provinsi/ Nasional / UNESCO	%	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi melalui Penetapan Warisan Budaya Tingkat Kabupaten / Provinsi/ Nasional / UNESCO		Dinas Kebudayaan

VISI/ MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	%	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						Lembaga kesenian tradisional yang terbina	%	Persentase lembaga Kesenian Tradisional yang dibina		Dinas Kebudayaan
						Meningkatnya Cagar Budaya yang dilestarikan	%	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						Terlindunginya Benda Situs dan Cagar Budaya daerah	%	Persentase Benda Situs dan Cagar Budaya yang dilindungi melalui Penetapan Tingkat Kabupaten / Provinsi/ Nasional / UNESCO		Dinas Kebudayaan
5	**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**	**5**	**Meningkatnya taraf hidup masyarakat**				**Poin**	**Rasio Gini**		
				5.1	**Menurunnya kemiskinan**		**%**	**Tingkat Kemiskinan**		
						Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
						Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Fakir Miskin	%	Persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi jaminan dan atau perlindungan sosial		
						Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	%	Persentase keluarga miskin ekstrem yang mendapatkan pendampingan atau fasilitasi PSKS	Program Pemberdayaan Sosial	

VISI/ MISI		TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	SATUAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
						Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	Persentase Disabiltas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Pengemis/ Gelandangan di luar panti yang terehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	
				5.2	**Menurunnya tingkat pengangguran terbuka**		**%**	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**		
						Meningkatnya Pencari Kerja Yang Bekerja	%	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
						Meningkatnya Tenaga Kerja yang kompeten	%	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	

Sumber: Bappedalitbang, hasil analisis

Program strategis dalam rangka melaksanakan misi daerah, secara konkrit dijabarkan sebagai berikut:

Misi-1 : Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik

Prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu:

- **Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta pengembangan digitalisasi data desa/kelurahan dalam satu sistem terintegrasi.

  Aktivitas yang akan dilakukan adalah:

  1. Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan layanan internet publik di seluruh desa dan kecamatan
  2. Perluasan jaringan dengan penyediaan layanan digital bagi seluruh wilayah Kabupaten Bogor dengan mengatasi blank spot/lemah sinyal di wilayah Kabupaten Bogor melalui koordinasi dengan pihak swasta

- **Pelayanan publik yang cepat dan responsif**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk:

  1. Penguatan sistem layanan terintegrasi untuk layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik
  2. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menangani aduan masyarakat

- **Optimalisasi Tata Kelola Desa**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk:

  1. Pengembangan data digital desa untuk mendorong terciptanya desa cerdas (*smart village*) sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik bagi masyarakat desa
  2. Sekolah Pemerintahan Desa
  3. Program Satu Sarjana Satu Desa

Misi-2 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju

Terdapat beberapa prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu:

- **Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk:

  1. pengendalian inflasi di 40 kecamatan, berupa gerakan pangan murah dan operasi pasar untuk masyarakat

2. Pengadaan cadangan pangan
3. Pengendalian dan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting

- **Ketersediaan pangan menuju swasembada**

Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk menjadikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu produsen perikanan air tawar terbesar di Jawa Barat, dan menjadikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu pusat penyedia benih padi unggul bersertifikat yang didukung oleh infrastruktur pertanian yang handal.

Aktivitas yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah:

A. Salah satu produsen perikanan air tawar terbesar di Jawa Barat

1. Penyediaan dan pendistribusian benih ikan
2. Pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana produksi perikanan ke masyarakat di Kawasan
3. Penebaran benih ikan di perairan umum daratan
4. Penguatan kelompok-kelompok masyarakat pembudidaya

B. Mandiri penyediaan benih padi unggul bersertifikat

1. Pemberian bantuan pupuk dan pestisida untuk produksi benih padi
2. Pemberian bantuan alat mesin pertanian untuk fasilitasi penangkaran benih padi
3. Pemberian bantuan berupa benih padi untuk memfasilitasi penangkaran benih
4. Penyediaan bantuan irigasi perpipaan, pembangunan gudang untuk memfasilitasi penyimpanan benih padi, dan
5. Optimalisasi produksi benih padi

- **Penguatan UMKM, sentra IKM, fasilitasi kemitraan usaha dan kewirausahaan**

prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Peningkatan kemitraan antara UMKM dengan toko modern
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha/wirausaha baru
3. Fasilitasi legalisasi lembaga dan produk usaha mikro

- **Penguatan koperasi untuk pengembangan sektor riil**

Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

2. Peningkatan peran koperasi dalam mendukung peran UMKM

- **Peningkatan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk:

  1. Pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi di kawasan industri, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya
  2. Penyederhanaan regulasi lokal untuk investasi
  3. Penyiapan informasi investasi
  4. Penyiapan daerah otonomi baru (DOB) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

- **Pengembangan destinasi di Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) dan Geopark Bogor Halimun Salak**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk:

  1. Pembangunan infrastruktur, visibilitas, dan amenitas yang mendukung pengembangan destinasi di KSP dan Geopark Bogor Halimun Salak
  2. Pengembangan produk dan jasa unggulan di KSP dan Geopark Bogor Halimun Salak
  3. Peningkatan status Geopark Bogor Halimun Salak

- **Revitalisasi BUMD**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk penguatan kinerja BUMD

- **Penguatan kinerja BUMDes**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk Pengembangan usaha BUMDes

- **Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk percepatan pembangunan infrastruktur strategis di tiap wilayah pengembangan, serta peningkatan akses pariwisata, pertanian, dan industri.

  Aktivitas yang dilakukan adalah:

  1. Penyelesaian jalan Bojonggede – Kemang
  2. Penyelesaian jalan Leuwiliang – Rancabungur
  3. Pembangunan jalan penunjang khusus kegiatan tambang
  4. Pembangunan drainase lingkungan
  5. Pengembangan sistem angkutan umum massal jalur Bojonggede-Sentul Selatan, Ciawi-Cisarua, Cileungsi-Sentul Selatan, Laladon-Jasinga, Jasinga - Tenjo - Parung Panjang
  6. Pengembangan *Sky Bridge* serta *Park and Ride* Bojonggede

7. Pembangunan *Park and Ride* kawasan Pakansari sebagai pendukung kawasan tertib lalu lintas
8. Pengembangan *Park and Ride* wilayah Cibinong sebagai pendukung integrasi terminal dan stasiun
9. Pembangunan *Park and Ride* wilayah Puncak
10. Pembangunan *Park and Ride* wilayah Cileungsi sebagai pendukung integrasi moda pengembangan BRT (Bus Rapid Transit) dan LRT
11. Pembangunan Terminal Tipe C Jonggol dan Parung
12. Pembangunan gedung uji kendaraan bermotor beserta fasilitas pendukungnya di Kecamatan Leuwiliang dan Cileungsi

- **Peningkatan infrastruktur dasar permukiman**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk:

  1. Penanganan rumah tidak layak huni
  2. Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi
  3. Pembangunan ruang terbuka publik

Misi-3 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Terdapat beberapa prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu:

- **Penanganan Persampahan**

  Prioritas ini dilakukan dalam bentuk:

  1. Revitalisasi TPA Galuga
  2. Pembangunan TPST Zonasi
  3. Pembangunan Wisata Edukasi Sampah
  4. Pengelolaan sampah di tingkat desa dan kawasan
  5. Penanganan sampah di badan air

- **Peningkatan ketahanan bencana**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk:

  1. Penguatan kesiapsiagaan bencana
  2. Pengendalian banjir melalui pembuatan embung dan kolam retensi, serta penanganan sedimentasi
  3. Pembangunan hutan kota dan penyediaan ruang terbuka hijau

Misi-4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Terdapat beberapa prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu:

- **Aksesibilitas pendidikan dasar**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk:

  1. Pemberian bantuan biaya sekolah siswa miskin yang tidak dapat bersekolah di SMP Negeri
  2. Pemberian bantuan biaya pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C)
  3. Pengembangan percontohan sekolah unggulan tingkat SD dan SMP Negeri
  4. Pemberian beasiswa untuk guru PAUD, serta insentif untuk guru honor
  5. Pemberian dukungan Sekolah Rakyat
  6. Pemenuhan kebutuhan Ruang Kelas Layak Belajar pada SD dan SMP Negeri
  7. Peningkatan dukungan terhadap madrasah, sekolah terbuka, pesantren, pengembangan sekolah berbasis asrama dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya

- **Pemenuhan cakupan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk *Universal Health Coverage* (UHC) 100% mulai tahun 2026

- **Transformasi pelayanan kesehatan**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk:

  1. Optimalisasi pelayanan di IGD (Instalasi Gawat Darurat) rumah sakit melalui peningkatan mutu sistem Triase
  2. Percepatan penanganan penyakit menular dan penuntasan TBC
  3. Pengembangan layanan unggulan pada RSUD
  4. Pembangunan dan pengembangan rumah sakit dan puskesmas
  5. Peningkatan kualitas SDM kesehatan

- **Peningkatan fasilitas keagamaan dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama di masyarakat**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk:

  1. pembangunan masjid agung Kabupaten Bogor
  2. Rehabilitasi sarana dan prasarana keagamaan

Misi-5 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Terdapat beberapa prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu:

- **Penurunan kemiskinan melalui skema graduasi**

  Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan mata pencaharian, dan pendampingan intensif masyarakat miskin dan rentan miskin

- **Perluasan kesempatan kerja**

  1. Pendidikan/pelatihan vokasi serta peningkatan produktivitas tenaga kerja
  2. Peningkatan cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ)

- **Peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas**

  Prioritas ini dilaksanakan selama tahun 2025-2030 dalam bentuk:

  1. Rehabilitasi dan optimalisasi fungsi Balai Kesejahteraan Sosial (BKS)
  2. Pengembangan Wisma Istimewa untuk pemenuhan kebutuhan permakanan, sandang dan antar jemput klien
  3. Pemberian alat bantu untuk disabilitas

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah merupakan keseluruhan program yang dilaksanakan untuk merealisasikan target kinerja utama perangkat daerah yang telah ditentukan untuk mencapai terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah. Program perangkat daerah secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sekaligus pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Program perangkat daerah ada yang menjadi program prioritas, karena secara langsung mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, dan ada yang menjadi program rutin untuk melaksanakan kewenangan konkuren daerah melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Secara umum, program perangkat daerah telah dibakukan secara nasional, sehingga penyesuaian dilakukan pada kinerja (outcome) dan indikator kinerja yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja daerah atau target kinerja kewenangan perangkat daerah.

Program perangkat daerah secara akumulasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi Jawa Barat dan nasional. Program perangkat daerah juga menggambarkan target pencapaian tahunan yang akan dipedomani dalam penyusunan RKPD untuk tahun 2025-2030.

Khusus untuk tahun 2030, program dipersiapkan untuk menjaga kesinambungan antara tahapan I (2025-2029) dengan tahapan II (2030-2034) yang akan dilaksanakan oleh bupati/wakil bupati periode tahun 2030-2035. Hal ini penting direncanakan, mengingat tahun 2030 penyusunan RKPD harus dilakukan pada tahun 2029. Dengan demikian, perencanaan program perangkat daerah terutama dipersiapkan untuk melaksanakan kewajiban kewenangan konkuren yang menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang mencakup seluruh program dari Renstra Perangkat Daerah, termasuk Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah. Adapun penjabaran program perangkat daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penjabaran Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**																	
1.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**1.295.586.979.848,75**		**1.758.921.963.805,00**		**1.376.492.995.756,00**		**1.475.899.977.840,00**		**1.523.035.061.630,00**		**1.533.134.758.653,00**		**1.610.437.119.455,00**	**Dinas Pendidikan**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	1.376.492.995.756,00	BB	1.475.899.977.840,00	BB	1.523.035.061.630,00	BB	1.533.134.758.653,00	BB	1.610.437.119.455,00	
1.01.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**				**1.797.287.936.903,00**		**1.438.591.898.411,00**		**1.253.726.108.563,00**		**1.156.152.541.279,52**		**1.194.094.711.536,03**		**1.204.316.318.291,04**		**1.280.807.396.583,43**	**Dinas Pendidikan**
	Meningkatnya mutu dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Jenjang PAUD, DIKDAS dan DIKMAS	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	61,06	-	63,75	-	64,80	29.042.312.269,00	65,00	27.869.415.995,00	66,00	28.775.950.036,00	67,00	29.011.219.688,00	70,00	30.289.723.518,00	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	107,02	-	100	-	100	616.261.993.956,00	100	591.373.776.038,00	100	610.609.932.952,00	100	615.602.226.372,00	100	642.731.378.922,00	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	98,41	-	100	-	100	323.296.131.011,00	100	310.239.566.369,00	100	320.331.013.135,00	100	322.950.011.489,00	100	337.182.188.944,00	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	60,74	-	61,15	-	62,23	9.727.490.635,00	63,00	9.334.638.392,00	64,00	9.638.274.732,00	65,00	9.717.076.423,00	66,00	10.145.301.074,00	
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan kondisi baik	%	84,23	-	85,17	-	86,22	275.398.180.692,00	87,00	217.335.144.485,52	88,00	224.739.540.681,03	89,00	227.035.784.319,04	90,00	260.458.804.125,43	
1.01.04	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**				**47.150.350.000,00**		**98.400.000,00**		**685.045.476,00**		**470.859.384,00**		**416.120.369,00**		**273.476.074,00**		**3.242.268.032,00**	**Dinas Pendidikan**
	Terpenuhinya Kebutuhan Pendidik yang Kompeten	Guru yg memenuhi kualifikasi minimal S1 / D-IV dan memiliki sertifikasi pendidik	%	24,50	-	25,15	-	26,37	685.045.476,00	27,00	470.859.384,00	28,00	416.120.369,00	29,00	273.476.074,00	30,00	3.242.268.032,00	
1.01.06	**Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**				**233.914.455,00**		**177.585.534,00**		**342.571.357,00**		**142.216.349,00**		**76.787.260,00**		**342.204.602,00**		**2.885.084.132,00**	**Dinas Pendidikan**
	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Bahasa dan Sastra	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar Yang Melaksanakan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	29,49	-	100,00	-	34,23	342.571.357,00	36,86	142.216.349,00	39,49	76.787.260,00	42,13	342.204.602,00	44,76	2.885.084.132,00	
									-		-		-		-		-	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								-		-		-		-		-	
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**1.403.767.105.262,00**		**1.506.553.931.832,59**		**1.554.184.630.085,00**		**1.217.110.151.900,00**		**1.406.058.656.702,53**		**1.442.225.292.511,20**		**1.629.743.127.769,85**	**Dinas Kesehatan**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	1.554.184.630.085,00	BB	1.217.110.151.900,00	BB	1.406.058.656.702,53	BB	1.442.225.292.511,20	A	1.629.743.127.769,85	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**2.451.651.246.565,00**		**2.541.828.793.457,00**		**1.562.100.864.173,00**		**1.804.017.016.374,00**		**1.965.650.368.193,00**		**2.330.064.849.206,00**		**2.120.869.534.929,00**	**Dinas Kesehatan**
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	-	-	80	-	81	732.910.008.783,00	82	710.408.797.105,00	83	734.562.548.040,00	84	851.084.363.843,00	85	895.013.566.305,00	
	Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi nasional	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (SIKN)	%	-	-	60	-	65	651.103.174.093,00	70	759.268.844.596,00	75	879.204.157.275,00	80	898.156.636.105,00	90	999.703.510.065,00	
	Terwujudnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil periksa kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan	%	89,16	-	90	-	100	4.541.886.435,00	100	8.508.840.616,00	100	10.010.816.118,00	100	10.592.190.860,00	100	12.338.922.375,00	
	Terpenuhinya sarana prasarana dan alat di fasilitas kesehatan sesuai standar	Persentase fasilitas kesehatan daerah yang memenuhi standar srana prasarana alat (SPA)	%	-	-	62	-	64	170.039.979.713,00	66	301.632.454.260,00	68	315.776.912.192,00	70	544.041.306.540,00	72	185.076.049.714,00	
	Terkendalinya penyakit sehingga angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dapat menurun	Indeks penduduk yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit	%	-	-	92,24	-	93,71	3.505.815.149,00	94,53	24.198.079.797,00	95,29	26.095.934.568,00	96	26.190.351.858,00	96,29	28.737.486.470,00	
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**				**8.066.491.414,00**		**5.907.937.650,00**		**7.122.722.285,00**		**5.514.220.760,00**		**6.677.222.277,00**		**6.759.576.931,00**		**7.305.723.535,00**	**Dinas Kesehatan**
	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	rasio	1,59:1000	-	1,60:1000	-	1,61:1000	7.122.722.285,00	1,62:1000	5.514.220.760,00	1,63:1000	6.677.222.277,00	1,64:1000	6.759.576.931,00	1,65:1000	7.305.723.535,00	
1.02.04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**				**1.243.337.034,00**		**1.068.206.998,00**		**282.547.125,00**		**199.519.818,46**		**240.820.292,91**		**256.460.140,40**		**297.408.933,78**	**Dinas Kesehatan**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya kebutuhan farmasi, alat kesehatan yang memenuhi syarat	Persentase Sarana Kefarmasian yang memenuhi syarat	%	100	-	100	-	100	282.547.125,00	100	199.519.818,46	100	240.820.292,91	100	256.460.140,40	100	297.408.933,78	
1.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**				**11.709.296.389,00**		**2.037.492.193,00**		**973.724.471,00**		**791.133.465,02**		**959.366.129,54**		**1.026.256.232,36**		**1.195.236.660,94**	**Dinas Kesehatan**
	Meningkatnya kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih sehat masyarakat	Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	%		-	17	-	19	973.724.471,00	21	791.133.465,02	23	959.366.129,54	25	1.026.256.232,36	25	1.195.236.660,94	
									-		-		-		-		-	
01.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								-		-		-		-		-	
01.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**82.453.038.875,00**		**80.724.202.142,00**		**73.002.290.713,00**		**72.430.417.817,00**		**77.781.383.872,00**		**81.538.141.471,00**		**88.097.962.896,00**	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-		-		-		-		-		-	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat		-		-	BB	73.002.290.713,00	BB	72.430.417.817,00	BB	77.781.383.872,00	BB	81.538.141.471,00	BB	88.097.962.896,00	**Dinas Pekerjaan Umum**
01.03.02	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**				**58.073.665.901,00**		**66.974.918.134,00**		**111.417.697.812,00**		**154.131.496.556,00**		**178.081.961.132,00**		**191.092.945.332,00**		**172.829.202.808,00**	
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pengendali banjir	Persentase infrastruktur pengendali banjir yang terbangun	%	37,21	-	44,45	-		-		-		-		-		-	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Daerah Irigasi yang Berkualitas	Persentase Jumlah Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik dan Sedang	%	44,10	-	56,00	-		-		-		-		-		-	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air	Persentase Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air yang Terpenuhi	%		-		-	48,42	25.315.763.499,00	52,40	70.424.692.785,00	56,37	85.990.713.986,00	60,34	91.879.600.766,00	64,32	68.989.813.420,00	**Dinas Pekerjaan Umum**
	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Daerah Irigasi yang Berkualitas	Persentase Jumlah Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik dan Sedang	%		-		-	57,65	86.101.934.313,00	59,34	83.706.803.771,00	61,02	92.091.247.146,00	62,7	99.213.344.566,00	64,42	103.839.389.388,00	**Dinas Pekerjaan Umum**
01.03.03	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**				**42.828.701.958,00**		**52.019.580.203,00**		**24.727.631.184,00**		**44.350.000.000,00**		**49.650.000.000,00**		**54.700.000.000,00**		**59.750.000.000,00**	
	Meningkatnya Akses Air Minum Rumah Tangga yang dilayani melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perdesaan	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perdesaan	%	3,88	-		-		-		-		-		-		-	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Meningkatnya Akses Air Minum Rumah Tangga yang dilayani melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perdesaan	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perdesaan	%		-	4,05	-		-		-		-		-		-	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Meningkatnya Akses Air Minum Rumah Tangga melalui Jaringan Perpipaan perdesaan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses air minum perpipaan perdesaan	%		-		-	5,20	24.727.631.184,00	5,32	44.350.000.000,00	5,44	49.650.000.000,00	5,55	54.700.000.000,00	5,67	59.750.000.000,00	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
01.03.05	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**				**28.608.126.160,00**		**42.922.397.697,00**		**20.813.049.398,00**		**49.578.520.051,00**		**50.744.946.054,00**		**51.917.193.957,00**		**53.095.553.025,00**	
	Meningkatnya Akses Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	33,94	-		-		-		-		-		-		-	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Meningkatnya Akses Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%		-	34,20	-		-		-		-		-		-	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Meningkatnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%		-		-	1,54	20.813.049.398,00	1,77	49.578.520.051,00	2,01	50.744.946.054,00	2,25	51.917.193.957,00	2,51	53.095.553.025,00	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
01.03.06	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**				**63.988.449.700,00**		**31.204.563.235,00**		**22.629.531.608,00**		**74.500.000.000,00**		**77.680.000.000,00**		**81.200.000.000,00**		**85.000.000.000,00**	
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur drainase lingkungan	Persentase luas kawasan genangan yang terlindungi infastruktur drainase lingkungan	%	56,93	-	65,29	-		-		-		-		-		-	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Meningkatnya cakupan drainase lingkungan	Persentase cakupan drainase lingkungan yang terbangun	%		-		-	39,12	22.629.531.608,00	46,22	74.500.000.000,00	53,33	77.680.000.000,00	60,43	81.200.000.000,00	67,53	85.000.000.000,00	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
01.03.08	**Program Penataan Bangunan Gedung**				**117.229.187.217,00**		**246.553.391.670,00**		**242.064.344.170,00**		**67.873.373.161,00**		**32.709.486.667,00**		**21.163.333.691,00**		**29.516.141.247,00**	
	Meningkatnya cakupan bangunan gedung yang tertata	Persentase penataan bangunan gedung	%	100	-	100	-		-		-		-		-		-	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya penyelenggaraan bangunan gedung, serta pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi	Persentase penataan bangunan gedung	%		-		-	100	242.064.344.170,00	100	67.873.373.161,00	100	32.709.486.667,00	100	21.163.333.691,00	100	29.516.141.247,00	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**
									-		-		-		-		-	
01.03.09	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**				**6.780.986.608,00**		**7.817.410.609,00**		**5.476.958.457,00**		**6.163.502.227,00**		**6.953.027.561,00**		**7.860.981.695,00**		**8.905.128.950,00**	
	Terpenuhinya penataan Bangunan dan lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata	%	100	-	100	-											**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	Meningkatnya tertib tata kelola perencanaan tata bangunan dan lingkungannya	Persentase ketersediaan regulasi tata bangunan dan lingkungannya	%		-		-	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**
		Persentase kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	%		-		-	100	4.576.958.457,00	100	5.263.502.227,00	100	6.053.027.561,00	100	6.960.981.695,00	100	8.005.128.950,00	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**
01.03.10	**Program Penyelenggaraan Jalan**				**257.255.185.296,00**		**658.312.013.753,00**		**507.862.441.370,00**		**526.979.829.300,00**		**569.109.872.068,00**		**594.559.029.513,00**		**558.590.354.174,00**	
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Jalan	Persentase Jalan yang Dibangun, Ditingkatkan (Struktur/Fungsi/Pelebaran), Direkonstruksi, dan Direhabilitasi, Sesuai Standar dan Umur Teknis Jalan	%	2,32	-	2,51	-		-		-		-		-		-	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Jalan	Persentase Jalan yang Dipelihara Sesuai Standar dan Umur Teknis Jalan	%	84,79	-	84,20	-		-		-		-		-		-	
	Meningkatnya Infrastruktur Jembatan Permukiman	Persentase Penyediaan Jembatan Gantung Di Lingkungan Permukiman	%	83,74	-	85,94	-		-		-		-		-		-	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	Meningkatnya Kualitas Jalan	Persentase Jalan yang Dibangun, Ditingkatkan (Struktur/Fungsi/Pelebaran), Direkonstruksi, Direhabilitasi, dan/atau Dipelihara Sesuai Standar dan Umur Teknis Jalan	%		-	4,19	-	86,77	507.862.441.370,00	86,85	526.979.829.300,00	86,92	569.109.872.068,00	86,99	594.559.029.513,00	87,06	558.590.354.174,00	**Dinas Pekerjaan Umum**
01.03.11	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**				**5.573.248.585,00**		**2.798.750.855,00**		**4.211.541.957,00**		**4.158.755.321,00**		**4.846.150.962,00**		**5.035.037.477,00**		**5.726.552.479,00**	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan konstruksi daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Jasa Konstruksi	%	72	-	72	-		-		-		-		-		-	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Konstruksi Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Jasa Konstruksi	%		-		-	76	4.211.541.957,00	76	4.158.755.321,00	80	4.846.150.962,00	80	5.035.037.477,00	84	5.726.552.479,00	**Dinas Pekerjaan Umum**
01.03.12	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**				**3.646.063.961,00**		**4.072.824.963,00**		**8.780.990.354,00**		**10.374.595.040,00**		**10.100.987.116,00**		**12.240.417.025,00**		**3.775.810.654,00**	
	Pemanfatan ruang sesuai dengan ketentuan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	69,36	-	69,50	-		-		-		-		-		-	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Meningkatnya tertib tata kelola penataan ruang	Persentase ketersediaan rancangan regulasi penataan ruang	%		-		-	15,00	6.579.146.868,00	41	7.900.000.000,00	62	7.755.000.000,00	85	9.701.121.243,00	100	918.662.180,00	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**
		Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang di terbitkan	%		-		-	100	1.397.559.989,00	100	1.370.000.000,00	100	1.480.000.000,00	100	1.540.000.000,00	100	1.625.000.000,00	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%		-		-	70,00	804.283.497,00	70,32	1.104.595.040,00	70,64	865.987.116,00	70,96	999.295.782,00	71,28	1.232.148.474,00	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**
									-		-		-		-		-	
01.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**37.451.884.590,00**		**51.556.760.976,00**		**38.475.404.773,00**		**41.878.405.515,00**		**44.731.385.425,00**		**47.372.072.088,00**		**50.703.331.536,00**	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-		-		-		-		-		-	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat		-		-	BB	38.475.404.773,00	BB	41.878.405.515,00	BB	44.731.385.425,00	BB	47.372.072.088,00	BB	50.703.331.536,00	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman**
01.04.02	**Program Pengembangan Perumahan**				**22.393.894.123,00**		**76.457.887.917,00**		**263.639.705.529,00**		**56.181.343.414,00**		**56.391.392.897,00**		**57.109.987.557,00**		**57.837.301.148,00**	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana	Persentase hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	82,28	-		-		-		-		-		-		-	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana	Persentase hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%		-	65,56	-		-		-		-		-		-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya Ketersediaan dan Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana	Persentase hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%		-		-	70,06	263.639.705.529,00	74,60	56.181.343.414,00	79,14	56.391.392.897,00	83,68	57.109.987.557,00	88,22	57.837.301.148,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
01.04.03	**Program Kawasan Permukiman**				**9.920.433.428,00**		**15.528.692.492,00**		**12.589.336.335,00**		**11.203.650.919,00**		**11.403.650.919,00**		**10.103.650.919,00**		**10.203.650.919,00**	
	Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertata	Persentase luas permukiman kumuh yang tertangani	%	35,78	-	42,94	-		-		-		-		-		-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertata	Persentase luas permukiman kumuh yang tertangani	%		-		-	62,63	12.589.336.335,00	80,26	11.203.650.919,00	100,00	11.403.650.919,00	100,00	10.103.650.919,00	100,00	10.203.650.919,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
01.04.04	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**				**-**		**-**		**21.959.925.883,00**		**68.426.914.657,00**		**69.100.035.506,00**		**67.252.682.183,00**		**73.256.956.660,00**	
	Terwujudnya pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	%	-	-	0	-		-		-		-		-		-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Terwujudnya pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	%		-		-	68,30	21.959.925.883,00	75,08	68.426.914.657,00	81,86	69.100.035.506,00	88,63	67.252.682.183,00	95,41	73.256.956.660,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
01.04.05	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**				**26.318.991.243,00**		**42.917.048.386,00**		**27.381.164.227,00**		**27.091.417.608,00**		**27.936.448.493,00**		**31.072.133.423,00**		**28.643.998.597,00**	
	Meningkatnya Prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase fasilitasi penyediaan PSU	%	44,47	-		-		-		-		-		-		-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya Prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase fasilitasi penyediaan PSU	%		-	49,38	-		-		-		-		-		-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya Prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase fasilitasi penyediaan PSU	%		-		-	55,61	27.381.164.227,00	61,85	27.091.417.608,00	68,08	27.936.448.493,00	74,31	31.072.133.423,00	80,55	28.643.998.597,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
									-		-		-		-		-	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								-		-		-		-		-	
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**49.001.505.789,00**		**44.153.207.185,00**		**44.671.747.034,00**		**49.947.810.889,00**		**55.743.380.687,00**		**60.849.631.508,00**		**71.779.458.871,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	44.671.747.034,00	BB	49.947.810.889,00	BB	55.743.380.687,00	BB	60.849.631.508,00	BB	71.779.458.871,00	
1.05.02	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**18.016.972.259,00**		**8.489.101.383,00**		**4.311.107.920,00**		**11.030.473.533,00**		**12.330.737.809,00**		**13.435.961.429,00**		**15.054.708.705,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	-	100	-	100	2.591.300.859,00	100	6.445.184.870,00	100	7.059.582.716,00	100	7.516.621.779,00	100	8.255.808.000,00	
	Meningkatnya kapasitas anggota Perlindungan masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas	%	100	-	100	-	100	60.181.663,00	100	1.473.185.113,00	100	1.694.299.851,00	100	1.879.155.444,00	100	2.136.797.364,00	
	Meningkatnya kapasitas anggota Satpol PP	Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP	%	100	-	100	-	100	463.007.474,00	100	1.335.074.008,00	100	1.411.916.543,00	100	1.597.282.128,00	100	1.942.543.059,00	
	Tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP yang berlaku	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	-	100	-	100	1.196.617.924,00	100	1.777.029.542,00	100	2.164.938.699,00	100	2.442.902.078,00	100	2.719.560.282,00	
									-		-		-		-		-	
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**15.199.339.469,00**		**15.829.494.740,00**		**23.676.232.843,00**		**26.987.983.366,00**		**29.784.806.154,00**		**32.657.468.175,00**		**36.489.279.838,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	23.676.232.843,00	BB	26.987.983.366,00	BB	29.784.806.154,00	BB	32.657.468.175,00	BB	36.489.279.838,00	
1.05.03	**Program Penanggulangan Bencana**				**14.077.827.789,00**		**9.542.625.053,00**		**17.588.279.281,00**		**25.349.822.750,00**		**36.474.145.708,00**		**39.991.975.992,00**		**44.684.370.370,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	Meningkatnya pelayanan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang teredukasi penanggulangan bencana di daerah rawan bencana	%	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Meningkatnya Akses informasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang teredukasi penanggulangan bencana di daerah rawan bencana	%	-	-	70	-	72	7.843.551.207,00	74	9.640.812.097,00	75	16.351.927.837,00	77	18.310.959.394,00	78	20.409.471.371,00	
	Meningkatnya pelayanan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	90	-	95	-	99	7.942.224.682,00	99	11.198.000.167,00	99	15.143.721.662,00	99	16.222.358.225,00	99	18.175.757.698,00	
	Terbitnya rekomendasi hasil pengawasan penanggulangan bencana	Rekomendasi hasil pascabencana yang diterbitkan	Rekomendasi	-	-	10	-	11	1.802.503.392,00	12	4.511.010.486,00	13	4.978.496.209,00	14	5.458.658.373,00	15	6.099.141.301,00	
									-		-		-		-		-	
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**14.664.043.364,00**		**15.099.523.387,00**		**20.453.902.620,00**		**19.492.151.246,00**		**20.860.839.284,00**		**21.728.762.499,00**		**26.558.530.109,00**	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Pemadam Kebakaran**
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	-	-	-	-	BB	20.453.902.620,00	BB	19.492.151.246,00	BB	20.860.839.284,00	A	21.728.762.499,00	A	26.558.530.109,00	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
1.05.04	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**				**55.950.977.315,00**		**25.616.071.376,00**		**50.273.812.481,00**		**69.137.806.017,00**		**74.237.679.763,00**		**77.815.744.777,00**		**130.877.354.022,00**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kab. Bogor pada tahun berjalan dalam tingkat waktu tanggap response time	%	81,71	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Pemadam Kebakaran**
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kab. Bogor pada tahun berjalan dalam tingkat waktu tanggap response time	%	-	-	-	-	85	19.448.348.860,00	87	19.130.532.797,00	89	20.815.317.995,00	91	18.742.528.473,00	93	66.976.272.020,00	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
	Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dalam operasi darurat non kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia dalam Operasi Darurat Non Kebakaran	%	276,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Pemadam Kebakaran**
		Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia dalam Operasi Darurat Non Kebakaran	Layanan	-	-	994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Pemadam Kebakaran**
		Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia dalam Operasi Darurat Non Kebakaran	Layanan	-	-	-	-	1.000	4.688.129.900,00	1.006	8.683.721.898,00	1.012	7.841.173.668,00	1.018	9.737.506.054,00	1.023	10.493.942.574,00	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
	Meningkatnya kualitas Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelamatan (SKIKP) yang dimanfaatkan	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kab. Bogor yang dilaporkan melalui Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	%	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Pemadam Kebakaran**
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kab. Bogor yang dilaporkan melalui Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
	Meningkatnya Ketersediaan dan Keandalan Sarana Prasarana serta Sistem Informasi dalam Mendukung Layanan Kebakaran dan Penyelamatan	Ketersediaan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi dalam Mendukung Layanan Kebakaran serta Penyelamatan	Unit	-	-	2.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Pemadam Kebakaran**
		Ketersediaan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi dalam Mendukung Layanan Kebakaran serta Penyelamatan	Unit	-	-	-	-	2.327	23.040.159.460,00	2.434	37.675.959.558,00	2.542	41.728.350.529,00	2.649	45.312.489.688,00	2.756	49.067.220.107,00	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
	Meningkatnya kapasitas relawan kebakaran dalam penanganan kebakaran	Persentase pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Redkar, Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya) atau dibawah pembinaan dinas dalam tanggap waktu response time	%	56,47	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Pemadam Kebakaran**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	Persentase pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Redkar, Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya) atau dibawah pembinaan dinas dalam tanggap waktu response time	%	-	-	-	-	20	869.322.415,00	22	536.208.715,00	24	570.483.230,00	26	597.798.144,00	28	642.031.326,00	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
		Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	%	-	-	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Pemadam Kebakaran**
		Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	%	-	-	-	-	35,33	1.816.709.073,00	37,33	2.780.037.618,00	39,33	2.926.529.994,00	41,33	3.052.412.136,00	43	3.294.868.679,00	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
		Persentase bangunan/gedung dengan sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan pada tahun berjalan	%	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Pemadam Kebakaran**
		Persentase bangunan/gedung dengan sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan pada tahun berjalan	%	-	-	-	-	90	411.142.773,00	90	331.345.431,00	90	355.824.347,00	90	373.010.282,00	90	403.019.316,00	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
									-		-		-		-		-	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								-		-		-		-		-	
1.06.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**25.986.047.029,00**		**22.017.190.298,00**		**18.905.189.973,00**		**58.771.304.317,00**		**58.965.364.587,00**		**58.774.918.736,00**		**59.701.072.348,00**	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	18.905.189.973,00	BB	58.771.304.317,00	BB	58.965.364.587,00	BB	58.774.918.736,00	BB	59.701.072.348,00	
1.06.02	**Program Pemberdayaan Sosial**				**4.624.926.700,00**		**8.110.063.576,00**		**8.926.576.678,00**		**14.111.248.265,00**		**14.157.842.988,00**		**14.112.116.103,00**		**14.334.489.652,00**	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin ekstrem yang mendapatkan pendampingan atau fasilitasi PSKS	%	100	-	100	-	100	8.926.576.678,00	100	14.111.248.265,00	100	14.157.842.988,00	100	14.112.116.103,00	100	14.334.489.652,00	
1.06.03	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**				**59.859.700,00**		**1.480.000,00**		**4.543.769,00**		**4.471.829,00**		**4.486.594,00**		**4.472.104,00**		**4.542.573,00**	**Dinas Sosial**
	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100	-	100	-	100	4.543.769,00	100	4.471.829,00	100	4.486.594,00	100	4.472.104,00	100	4.542.573,00	
1.06.04	**Program Rehabilitasi Sosial**				**13.844.216.875,00**		**10.905.502.225,00**		**8.420.674.035,00**		**17.738.303.715,00**		**17.796.874.816,00**		**17.739.394.615,00**		**18.018.925.489,00**	**Dinas Sosial**
	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persentase Disabiltas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Pengemis/Gelandangan di luar panti yang terehabilitasi sosial	%	100	-	29,05	-	29,55	8.420.674.035,00	30,05	17.738.303.715,00	30,55	17.796.874.816,00	31,05	17.739.394.615,00	31,55	18.018.925.489,00	
									-		-		-		-		-	
1.06.05	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**				**3.111.544.275,00**		**1.458.407.100,00**		**4.933.765.612,00**		**9.770.118.726,00**		**9.802.379.230,00**		**9.770.719.586,00**		**9.924.683.000,00**	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	73,17	-	73,67	-	74,17	2.466.882.806,00	74,67	4.885.059.363,00	75,17	4.901.189.615,00	75,67	4.885.359.793,00	76,17	4.962.341.500,00	
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Fakir Miskin	Persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi jaminan dan atau perlindungan sosial	%	-	-	-	-	58,37	2.466.882.806,00	58,99	4.885.059.363,00	60,76	4.901.189.615,00	62,58	4.885.359.793,00	64,46	4.962.341.500,00	
1.06.06	**Program Penanganan Bencana**				**5.907.890.000,00**		**3.054.311.100,00**		**2.127.260.624,00**		**8.982.237.733,00**		**9.011.896.688,00**		**8.982.790.138,00**		**9.124.337.650,00**	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan bencana	%	100	-	100	-	100	2.127.260.624,00	100	8.982.237.733,00	100	9.011.896.688,00	100	8.982.790.138,00	100	9.124.337.650,00	
1.06.07	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**				**1.120.700.136,00**		**798.646.299,00**		**259.917.915,00**		**255.802.695,00**		**256.647.344,00**		**255.818.427,00**		**259.849.520,00**	**Dinas Sosial**
	Terkelolaanya taman makam pahlawan dengan baik	Tingkat pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	-	100	-	100	259.917.915,00	100	255.802.695,00	100	256.647.344,00	100	255.818.427,00	100	259.849.520,00	
									-		-		-		-		-	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								-		-		-		-		-	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								-		-		-		-		-	
2.07.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**39.820.037.528,00**		**18.572.050.652,00**		**16.430.064.354,00**		**35.540.298.285,00**		**17.433.729.126,00**		**18.514.875.856,00**		**24.839.430.163,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	16.430.064.354,00	BB	35.540.298.285,00	BB	17.433.729.126,00	A	18.514.875.856,00	A	24.839.430.163,00	
2.07.02	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**				**1.351.945.313,75**		**158.432.800,00**		**206.705.908,00**		**2.019.693.690,00**		**2.221.353.874,00**		**2.232.001.752,00**		**2.779.617.860,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	76,92	-	76,92	-	76,92	206.705.908,00	76,92	2.019.693.690,00	84,62	2.221.353.874,00	84,62	2.232.001.752,00	84,62	2.779.617.860,00	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2.07.03	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**				**3.080.267.124,00**		**4.197.621.662,00**		**7.802.286.157,00**		**3.198.803.870,00**		**3.371.232.542,00**		**3.397.841.240,00**		**6.661.807.744,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
	Meningkatnya Tenaga Kerja yang kompeten	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	1,05	-	1,05	-	1,07	7.802.286.157,00	1,09	3.198.803.870,00	1,12	3.371.232.542,00	1,14	3.397.841.240,00	1,15	6.661.807.744,00	
2.07.04	**Program Penempatan Tenaga Kerja**				**1.329.331.156,00**		**1.130.281.430,00**		**1.941.513.785,00**		**1.745.318.741,00**		**1.805.713.222,00**		**1.751.545.852,00**		**4.869.065.058,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
	Meningkatnya Pencari Kerja Yang Bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	%	31,7	-	24,33	-	24,58	1.941.513.785,00	24,86	1.745.318.741,00	25,18	1.805.713.222,00	25,67	1.751.545.852,00	25,96	4.869.065.058,00	
2.07.05	**Program Hubungan Industrial**				**1.776.686.395,00**		**1.108.872.489,00**		**142.139.585,00**		**1.587.758.738,00**		**2.578.099.061,00**		**1.585.325.815,00**		**5.660.496.631,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
	Diterapkannya Tata Kelola Kerja yang Layak Bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	%	42,65	-	43,06	-	43,26	142.139.585,00	43,42	1.587.758.738,00	43,63	2.578.099.061,00	43,79	1.585.325.815,00	43,99	5.660.496.631,00	
									-		-		-		-		-	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								-		-		-		-		-	
2.08.02	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**				**292.721.078,00**		**677.177.274,00**		**4.059.358.616,00**		**3.897.596.078,00**		**3.888.973.371,00**		**4.054.885.161,00**		**4.308.642.261,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender pada Belanja APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja APBD	%	35,10	-		-		-		-		-		-		-	
	Meningkatnya Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%		-	33,61	-	33,14	4.059.358.616,00	31,00	3.897.596.078,00	31,84	3.888.973.371,00	31,33	4.054.885.161,00	29,76	4.308.642.261,00	
2.08.03	**Program Perlindungan Perempuan**				**625.421.259,00**		**333.390.685,00**		**1.979.299.320,00**		**1.399.770.569,00**		**1.489.535.809,00**		**1.575.324.140,00**		**1.698.437.796,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Menurunnya jumlah Perempuan yang mengalami tindak kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	4,37	-		-		-		-		-		-		-	
	Tertanganinya Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%		-	100	-	100	1.979.299.320,00	100	1.399.770.569,00	100	1.489.535.809,00	100	1.575.324.140,00	100	1.698.437.796,00	
2.08.04	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**				**286.306.849,00**		**220.241.110,00**		**4.311.499.452,00**		**3.609.380.551,00**		**2.310.243.759,00**		**2.348.866.487,00**		**2.413.077.253,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender	Tingkat Pemenuhan Ekonomi Keluarga yang Dikontribusi Oleh Perempuan	%	3,65	-		-		-		-		-		-		-	
	Terwujudnya Keluarga Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persentase Keluarga yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%		-	16,78	-	33,56	4.311.499.452,00	50,34	3.609.380.551,00	67,13	2.310.243.759,00	83,91	2.348.866.487,00	100	2.413.077.253,00	
2.08.05	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**				**157.961.199,00**		**97.368.557,00**		**660.550.754,00**		**662.475.120,00**		**711.188.965,00**		**758.514.410,00**		**824.399.479,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Meningkatnya Pemanfaatan informasi Data Gender dan Anak oleh pemangku kepentingan	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak	%	34,15	-		-		-		-		-		-		-	
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%		-	6,74	-	13,47	660.550.754,00	20,21	662.475.120,00	26,95	711.188.965,00	33,68	758.514.410,00	40,42	824.399.479,00	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2.08.06	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**				**370.161.457,00**		**182.230.634,00**		**1.152.195.829,00**		**1.187.951.160,00**		**1.311.061.095,00**		**1.449.348.517,00**		**1.635.480.158,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya (639,91 Poin)	-		-		-		-		-		-		-	
	Terpenuhinya hak anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	-	-	58,35	-	59,15	1.152.195.829,00	59,85	1.187.951.160,00	60,45	1.311.061.095,00	60,95	1.449.348.517,00	61,35	1.635.480.158,00	
2.08.07	**Program Perlindungan Khusus Anak**				**1.745.049.720,00**		**1.303.565.014,00**		**3.633.733.751,00**		**2.751.390.764,00**		**3.007.355.400,00**		**3.258.091.227,00**		**3.598.264.088,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Meningkatnya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100	-		-		-		-		-		-		-	
	Tertanganinya Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%		-	100	-	100	3.633.733.751,00	100	2.751.390.764,00	100	3.007.355.400,00	100	3.258.091.227,00	100	3.598.264.088,00	
									-		-		-		-		-	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								-		-		-		-		-	
2.09.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**11.407.018.013,00**		**14.352.437.291,00**		**15.645.887.480,00**		**15.124.371.996,00**		**15.235.361.242,00**		**17.463.981.400,00**		**18.650.906.206,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	15.645.887.480,00	BB	15.124.371.996,00	BB	15.235.361.242,00	BB	17.463.981.400,00	BB	18.650.906.206,00	
2.09.02	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**				**2.437.303.957,00**		**3.775.222.736,00**		**8.383.343.511,00**		**5.462.396.664,00**		**6.142.658.171,00**		**5.623.509.320,00**		**6.394.521.502,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	Tersedianya cadangan pangan yang dikelola masyarakat	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	10	-	10	-	10	8.383.343.511,00	10	5.462.396.664,00	10	6.142.658.171,00	10	5.623.509.320,00	10	6.394.521.502,00	
2.09.03	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**				**6.600.294.602,00**		**7.564.258.026,00**		**10.616.923.835,00**		**10.052.341.017,00**		**10.482.700.276,00**		**11.468.629.432,00**		**12.488.871.523,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Tingkat Kecukupan Energi dan Protein Per Kapita	%	96,96	-	98,90	-	98,95	10.616.923.835,00	99,00	10.052.341.017,00	99,05	10.482.700.276,00	99,10	11.468.629.432,00	99,15	12.488.871.523,00	
2.09.04	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**				**838.980.152,00**		**592.319.113,00**		**810.077.745,00**		**785.598.736,00**		**843.277.483,00**		**883.842.226,00**		**959.338.763,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	38,62	-	37,00	-	35,40	810.077.745,00	33,79	785.598.736,00	32,18	843.277.483,00	30,57	883.842.226,00	28,97	959.338.763,00	
2.09.05	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**				**1.901.694.864,00**		**2.041.097.121,00**		**2.474.136.620,00**		**2.644.005.107,00**		**2.838.128.257,00**		**2.974.652.646,00**		**3.228.743.216,00**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	92,70	-	92,71	-	93,08	2.474.136.620,00	93,44	2.644.005.107,00	93,81	2.838.128.257,00	94,16	2.974.652.646,00	94,51	3.228.743.216,00	
									-		-		-		-		-	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								-		-		-		-		-	
2.10.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**								**24.353.310.940,00**		**32.832.678.728,00**		**38.326.132.554,00**		**36.445.516.343,00**		**47.123.381.422,00**	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	-	-	-	-	BB	24.353.310.940,00	BB	32.832.678.728,00	BB	38.326.132.554,00	BB	36.445.516.343,00	BB	47.123.381.422,00	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**
2.10.04	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**				**346.693.386,00**		**536.407.111,00**		**3.023.296.055,00**		**2.833.741.955,00**		**2.843.098.846,00**		**2.833.916.229,00**		**2.878.572.042,00**	
	Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya	%	100	-	100	-		-		-		-		-		-	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya	%		-		-	100	3.023.296.055,00	100	2.833.741.955,00	100	2.843.098.846,00	100	2.833.916.229,00	100	2.878.572.042,00	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**
2.10.06	**Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**				**-**		**449.038.650,00**		**549.629.194,00**		**566.685.473,00**		**596.984.477,00**		**624.809.157,00**		**666.387.405,00**	
	Meningkatnya redistribusi Lahan kosong	Persentase Lahan yang Diredistribusi	%	-	**-**	44,51	-		-		-		-		-		-	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	Meningkatnya redistribusi Lahan kosong	Persentase Lahan yang Diredistribusi	%		-		-	56,74	549.629.194,00	67,72	566.685.473,00	76,73	596.984.477,00	89,88	624.809.157,00	95,60	666.387.405,00	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2.10.08	**Program Pengelolaan Tanah Kosong**				**202.620.568,00**		**174.399.754,00**		**216.954.758,00**		**244.022.587,00**		**293.794.007,00**		**351.414.137,00**		**428.341.715,00**	
	Meningkatnya identifikasi Tanah kosong milik pemda	Persentase Tanah Kosong yang Terinventarisasi	%	25	-	37,5	-		-		-		-		-		-	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	Meningkatnya identifikasi Tanah kosong milik pemda	Persentase Tanah Kosong yang Terinventarisasi	%		-		-	50,00	216.954.758,00	62,50	244.022.587,00	75,00	293.794.007,00	87,5	351.414.137,00	100	428.341.715,00	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**
2.10.10	**Program Penatagunaan Tanah**				**1.831.020.104,00**		**1.693.066.263,00**		**3.038.416.779,00**		**3.038.963.691,00**		**3.276.734.766,00**		**3.538.552.805,00**		**3.926.343.767,00**	
	Meningkatnya fasilitasi pendaftaran hak atas tanah	Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi	%	27,12	-		-		-		-		-		-		-	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	Meningkatnya fasilitasi pendaftaran hak atas tanah	Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi	%		-	10,00	-		-		-		-		-		-	
	Meningkatnya fasilitasi pendaftaran hak atas tanah	Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi	%		-		-	20,01	3.038.416.779,00	30,01	3.038.963.691,00	40,01	3.276.734.766,00	50,02	3.538.552.805,00	60,02	3.926.343.767,00	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**
									-		-		-		-		-	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								-		-		-		-		-	
2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**40.865.978.657,00**		**39.831.976.026,00**		**40.898.409.023,00**		**40.456.101.440,00**		**42.288.923.563,00**		**43.416.909.319,00**		**45.424.088.762,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	40.898.409.023,00	BB	40.456.101.440,00	BB	42.288.923.563,00	BB	43.416.909.319,00	BB	45.424.088.762,00	
2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**				**3.122.218.092,00**		**3.265.661.506,00**		**1.635.454.868,00**		**3.323.215.754,00**		**3.434.214.532,00**		**3.525.816.416,00**		**3.688.816.187,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	Tercapainya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP (Kebijakan Rencana dan Progra*m)*	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	-	100	-	100	1.635.454.868,00	100	3.323.215.754,00	100	3.434.214.532,00	100	3.525.816.416,00	100	3.688.816.187,00	
2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**				**9.206.017.212,00**		**8.963.001.492,00**		**1.972.468.965,00**		**10.695.893.618,00**		**11.804.332.090,00**		**12.942.827.210,00**		**14.461.453.087,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	Meningkatnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi	%	50,98	-	56,91	-	59,79	1.972.468.965,00	62,89	10.695.893.618,00	65,69	11.804.332.090,00	68,76	12.942.827.210,00	71,56	14.461.453.087,00	
2.11.04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**				**669.837.846,00**		**2.810.001.679,00**		**13.089.122.776,00**		**6.714.458.000,00**		**7.073.460.289,00**		**7.386.358.032,00**		**6.030.351.865,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	Meningkatnya luas area hutan kota terbangun	Persentase luas hutan kota yang terbangun	%	10,42	-	22,68	-	55,27	13.089.122.776,00	66,45	6.714.458.000,00	77,63	7.073.460.289,00	88,82	7.386.358.032,00	100,00	6.030.351.865,00	
2.11.05	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**				**740.339.500,00**		**839.046.135,00**		**519.691.463,00**		**973.832.205,00**		**1.074.752.533,00**		**1.194.546.056,00**		**1.353.227.913,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan pengendalian B3 dan LB3	%	60	-	70	-	80	519.691.463,00	85	973.832.205,00	90	1.074.752.533,00	95	1.194.546.056,00	100	1.353.227.913,00	
2.11.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**				**1.405.220.461,00**		**1.144.338.333,00**		**358.259.100,00**		**2.148.338.922,00**		**3.015.450.267,00**		**4.204.989.677,00**		**5.975.479.256,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan	%	20	-	40	-	50	358.259.100,00	60	2.148.338.922,00	70	3.015.450.267,00	80	4.204.989.677,00	90	5.975.479.256,00	
2.11.08	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**				**14.220.140.188,00**		**4.400.909.062,00**		**1.142.508.202,00**		**4.654.080.752,00**		**4.902.920.739,00**		**5.131.439.592,00**		**5.472.913.881,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	10,56	-	11,78	-	14,20	1.142.508.202,00	17,26	4.654.080.752,00	20,27	4.902.920.739,00	23,25	5.131.439.592,00	26,18	5.472.913.881,00	
2.11.09	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**				**1.610.102.925,00**		**1.729.905.835,00**		**458.843.666,00**		**1.760.393.816,00**		**1.819.192.756,00**		**1.867.716.658,00**		**1.954.061.874,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	Meningkatnya apresiasi terhadap kinerja masyarakat peduli lingkungan	Persentase masyarakat yang mendapatkan apresiasi peduli lingkungan	%	29,25	-	29,33	-	29,43	458.843.666,00	29,53	1.760.393.816,00	29,63	1.819.192.756,00	29,73	1.867.716.658,00	29,83	1.954.061.874,00	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2.11.10	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**				**1.327.153.330,00**		**1.377.001.403,00**		**442.458.521,00**		**1.401.269.772,00**		**1.448.075.529,00**		**1.486.698.527,00**		**1.555.429.139,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persentase penanganan pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	95,65	-	96,67	-	97,80	442.458.521,00	97,83	1.401.269.772,00	98,92	1.448.075.529,00	100	1.486.698.527,00	100	1.555.429.139,00	
2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan**				**121.695.815.145,00**		**148.322.471.417,00**		**73.524.365.784,00**		**192.353.643.783,00**		**193.420.865.889,00**		**210.436.396.858,00**		**233.031.736.833,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	Meningkatnya cakupan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah	%	n/a	-	8,20	-	8,88	73.524.365.784,00	9,54	192.353.643.783,00	10,19	193.420.865.889,00	10,84	210.436.396.858,00	11,47	233.031.736.833,00	
									-		-		-		-		-	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								-		-		-		-		-	
2.12.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**38.231.534.556,00**		**39.555.618.052,00**		**45.819.262.338,00**		**60.082.801.814,00**		**63.295.252.221,00**		**66.245.362.821,00**		**70.653.694.598,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	45.819.262.338,00	BB	60.082.801.814,00	BB	63.295.252.221,00	BB	66.245.362.821,00	BB	70.653.694.598,00	
2.12.02	**Program Pendaftaran Penduduk**				**13.518.798.688,00**		**16.668.195.174,00**		**23.797.363.152,00**		**22.808.772.087,00**		**24.028.289.935,00**		**25.148.217.740,00**		**26.821.718.837,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan KTP	%	98,43	-	98,72	-	98,92	17.970.907.751,00	99,09	17.981.119.636,00	99,12	18.942.517.130,00	99,22	19.825.403.581,00	99,66	21.144.695.270,00	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	37,52	-	42,68	-	48,78	5.826.455.401,00	50,74	4.827.652.451,00	56,68	5.085.772.805,00	60,79	5.322.814.159,00	65,28	5.677.023.567,00	
2.12.03	**Program Pencatatan Sipil**				**2.191.762.859,00**		**3.815.717.183,00**		**6.002.218.336,00**		**6.247.918.149,00**		**6.581.975.926,00**		**6.888.753.390,00**		**7.347.169.031,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akte kelahiran anak	%	92,11	-	94,09	-	94,54	6.002.218.336,00	95,40	6.247.918.149,00	96,73	6.581.975.926,00	97,08	6.888.753.390,00	97,94	7.347.169.031,00	
2.12.04	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				**3.172.834.361,00**		**2.868.993.652,00**		**3.387.305.882,00**		**4.507.360.897,00**		**4.748.356.205,00**		**4.969.671.003,00**		**5.300.380.318,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	Meningkatnya Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	100	-	100	-	100	1.865.685.340,00	100	3.328.362.810,00	100	3.506.320.564,00	100	3.669.745.672,00	100	3.913.950.787,00	
		Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	%	65,71	-	83,33	-	85,71	1.521.620.542,00	90,48	1.178.998.087,00	91,67	1.242.035.641,00	96,00	1.299.925.331,00	96,67	1.386.429.531,00	
2.12.05	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**				**57.502.000,00**		**51.984.750,00**		**87.233.082,00**		**102.156.634,00**		**107.618.648,00**		**112.634.615,00**		**120.129.944,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	Penyajian Profil Kependudukan sesuai ketentuan	Persentase data profil kependudukan yang tersaji	%	100	-	100	-	100	87.233.082,00	100	102.156.634,00	100	107.618.648,00	100	112.634.615,00	100	120.129.944,00	
									-		-		-		-		-	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**26.540.259.440,00**		**14.476.427.318,00**		**14.866.709.973,00**		**17.317.704.571,00**		**17.637.860.381,00**		**17.457.093.044,00**		**20.972.023.725,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	14.866.709.973,00	BB	17.317.704.571,00	BB	17.637.860.381,00	BB	17.457.093.044,00	BB	20.972.023.725,00	
2.13.02	**Program Penataan Desa**				**81.121.004.055,00**		**104.242.670.890,00**		**1.561.871.635,00**		**1.883.986.394,00**		**1.926.828.842,00**		**1.923.707.250,00**		**1.979.496.512,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	Meningkatnya Penataan Desa	Persentase Desa yang Tertata Kewilayahannya	%	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya sarana dan prasarana desa	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Terpenuhinya Sarana Prasarana Publik dan Perkembangan Kewilayahan Desa	Persentase Fasilitasi Desa yang tertata	%	-	-	16,83	-	32,45	487.331.556,00	49,28	376.797.278,00	66,11	385.365.768,00	82,93	384.741.449,00	100	395.899.302,00	
		Persentase Fasilitasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Desa	%	-	-	100	-	100	1.074.540.079,00	100	1.507.189.116,00	100	1.541.463.074,00	100	1.538.965.801,00	100	1.583.597.210,00	
2.13.03	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**				**342.074.498,00**		**248.744.593,00**		**390.927.914,00**		**468.569.991,00**		**405.571.146,00**		**348.906.633,00**		**1.367.684.332,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	Terfasilitasi kerjasama desa	Presentase Desa yang terfasilitasi melakukan Kerjasama	%	2.4	-	8,17	-	8,65	390.927.914,00	9,13	468.569.991,00	9,62	405.571.146,00	10,10	348.906.633,00	10,58	1.367.684.332,00	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2.13.04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**				**56.945.474.913,00**		**16.503.429.745,00**		**12.783.573.168,00**		**18.368.867.354,00**		**18.786.581.214,00**		**19.237.072.507,00**		**21.794.965.125,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	Meningkatnya tata kelola administrasi desa	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (RPJM Desa. RKP Desa. APB Desa. LPP Desa)	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Meningkatnya Tata kelola Administrasi dan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan serta Keterbukaan Informasi Publik Desa	Persentase fasilitasi terpenuhinya Administrasi keuangan dan aset desa		-	-	100	-	100	7.811.062.506,00	100	13.023.526.955,00	100	13.319.686.081,00	100	13.639.084.408,00	100	13.651.849.274,94	
		presentase Fasilitasi Lembaga BUM Desa yang terbina		-	-	7,21	-	8,41	358.180.026,00	9,62	1.102.132.041,00	10,82	1.127.194.873,00	12,02	1.154.224.350,00	13,22	3.096.168.000,78	
		Persentase Fasilitasi Terbinanya Administrasi Pemerintahan Desa		-	-	100	-	100	4.614.330.636,00	100	4.243.208.358,00	100	4.339.700.260,00	100	4.443.763.749,00	100	5.046.947.849,28	
2.13.05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**				**59.791.494.875,00**		**21.155.529.086,00**		**4.222.332.582,00**		**2.258.357.067,00**		**2.236.058.547,00**		**2.561.169.971,00**		**5.644.105.322,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	Terbinanya Lembaga kemasyarakatan desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	12,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	%	-	-	100	-	100	4.222.332.582,00	100	2.258.357.067,00	100	2.236.058.547,00	100	2.561.169.971,00	100	5.644.105.322,00	
									-		-		-		-		-	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								-		-		-		-		-	
2.14.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**37.887.939.922,00**		**15.920.510.446,00**		**19.934.933.422,00**		**21.359.236.101,00**		**22.521.054.784,00**		**23.592.445.504,00**		**25.186.677.786,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	19.934.933.422,00	BB	21.359.236.101,00	BB	22.521.054.784,00	BB	23.592.445.504,00	BB	25.186.677.786,00	
2.14.02	**Program Pengendalian Penduduk**				**941.918.117,00**		**992.034.178,00**		**1.648.945.198,00**		**481.086.693,00**		**679.183.839,00**		**591.250.409,00**		**812.926.966,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Terwujudnya Sinergi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kebijakan yang Disinergikan	**%**	33,33	-		-		-		-		-		-		-	
	Terkendalinya Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun dalam Menekan Pertumbuhan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran dari Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	17,1	-	16,70	-	16,30	1.648.945.198,00	15,90	481.086.693,00	15,50	679.183.839,00	15,10	591.250.409,00	14,70	812.926.966,00	
2.14.03	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**				**13.616.927.497,00**		**9.612.330.868,00**		**9.144.546.365,00**		**11.864.466.471,00**		**10.141.513.541,00**		**11.131.625.261,00**		**12.435.300.704,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Meningkatnya Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,79	-		-		-		-		-		-		-	
	Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	8,38	-	14,80	-	14,20	9.144.546.365,00	13,70	11.864.466.471,00	13,20	10.141.513.541,00	12,80	11.131.625.261,00	12,30	12.435.300.704,00	
2.14.04	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**				**27.781.275.448,00**		**26.217.024.843,00**		**8.513.485.501,00**		**18.730.855.896,00**		**19.707.356.948,00**		**20.612.474.073,00**		**21.937.043.997,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Meningkatnya kepesertaan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) Anggota Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga yang ber-KB	%	84,05	-		-		-		-		-		-		-	
	Tercapainya keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%		-	3,65	-	4,05	8.513.485.501,00	4,12	18.730.855.896,00	4,19	19.707.356.948,00	4,26	20.612.474.073,00	4,29	21.937.043.997,00	
									-		-		-		-		-	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								-		-		-		-		-	
2.15.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**51.425.705.986,00**		**54.109.125.078,00**		**49.355.968.866,00**		**56.601.951.286,00**		**59.522.518.806,00**		**62.327.598.751,00**		**66.541.880.768,00**	**Dinas Perhubungan**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	49.355.968.866,00	BB	56.601.951.286,00	BB	59.522.518.806,00	BB	62.327.598.751,00	BB	66.541.880.768,00	
2.15.02	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**				**126.308.250.345,00**		**134.710.278.815,00**		**70.527.271.361,00**		**242.689.884.761,00**		**281.376.171.835,00**		**293.453.627.675,00**		**327.885.538.535,00**	**Dinas Perhubungan**
	Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Transportasi yang Selamat, Aman, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau	Rasio Konektivitas Angkutan	Poin	0,526	-	0,729	-	0,737	70.527.271.361,00	0,745	242.689.884.761,00	0,753	281.376.171.835,00	0,761	293.453.627.675,00	0,769	327.885.538.535,00	
2.15.05	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**				**306.153.074,00**		**270.754.600,00**		**283.443.057,00**		**474.808.101,00**		**524.013.486,00**		**574.553.135,00**		**641.967.406,00**	**Dinas Perhubungan**
	Meningkatnya Keselamatan Pada Perlintasan Kereta Api Sebidang	Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditanggani	%	30	-	3,57	-	7,14	283.443.057,00	10,71	474.808.101,00	14,29	524.013.486,00	17,86	574.553.135,00	21,43	641.967.406,00	
									-		-		-		-		-	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								-		-		-		-		-	
2.16.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**19.582.263.157,00**		**16.486.125.108,00**		**21.331.416.003,00**		**20.253.279.851,00**		**21.336.163.066,00**		**22.330.614.290,00**		**23.816.616.554,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	21.331.416.003,00	BB	20.253.279.851,00	BB	21.336.163.066,00	BB	22.330.614.290,00	BB	23.816.616.554,00	
2.16.02	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**				**19.340.898.761,00**		**26.519.069.481,00**		**16.207.761.590,00**		**16.463.093.965,00**		**17.343.327.108,00**		**18.151.677.375,00**		**19.359.590.098,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	81	-	82	-	83	16.207.761.590,00	84	16.463.093.965,00	85	17.343.327.108,00	86	18.151.677.375,00	87	19.359.590.098,00	
2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**				**37.795.907.867,00**		**43.832.564.229,00**		**17.698.472.593,00**		**23.757.823.573,00**		**25.028.084.410,00**		**26.194.611.363,00**		**27.937.745.274,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	Terpenuhinya Ketersediaan Infrastruktur TIK yang berkualitas di lingkup Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Infrastruktur TIK yang berkualitas	%	87,5	-	87,50	-	87,50	10.906.392.762,00	100	15.641.649.382,00	100	16.477.962.296,00	100	17.245.979.008,00	100	18.393.621.568,00	
	Meningkatnya Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	90,9	-	95,2	-	95,2	6.792.079.831,00	95,2	8.116.174.191,00	100	8.550.122.114,00	100	8.948.632.355,00	100	9.544.123.706,00	
									-		-		-		-		-	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								-		-		-		-		-	
2.17.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**11.843.167.479,00**		**13.710.892.076,00**		**15.206.565.938,00**		**13.650.521.739,00**		**14.590.316.687,00**		**15.156.604.744,00**		**15.424.988.050,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	15.206.565.938,00	BB	13.650.521.739,00	BB	14.590.316.687,00	BB	15.156.604.744,00	BB	15.424.988.050,00	
2.17.07	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**				**2.755.579.401,00**		**1.344.875.472,00**		**4.354.445.749,00**		**8.815.096.563,00**		**9.399.874.055,00**		**9.716.482.764,00**		**9.520.178.642,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	Meningkatnya wirausaha baru	Pertumbuhan Wirausaha	%	3,45	-	3,59	-	3,72	4.354.445.749,00	3,82	8.815.096.563,00	3,91	9.399.874.055,00	3,99	9.716.482.764,00	3,99	9.520.178.642,00	
2.17.08	**Program Pengembangan UMKM**				**1.278.091.375,00**		**697.301.352,00**		**2.149.080.158,00**		**6.725.181.188,00**		**7.156.516.861,00**		**7.365.211.853,00**		**7.968.065.537,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	Meningkatnya usaha mikro yang berkembang menjadi wirausaha yang mandiri	Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha	%	58,54	-	58,54	-	58,74	2.149.080.158,00	58,86	6.725.181.188,00	58,95	7.156.516.861,00	59,01	7.365.211.853,00	59,18	7.968.065.537,00	
2.17.02	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**				**600.003.002,00**		**182.309.372,00**		**757.295.481,00**		**1.130.414.025,00**		**1.150.981.271,00**		**1.070.787.951,00**		**1.135.980.958,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	Meningkatnya cakupan koperasi simpan pinjam yang berizin	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin	%	8,66	-	9,13	-	9,57	757.295.481,00	10,00	1.130.414.025,00	10,43	1.150.981.271,00	10,87	1.070.787.951,00	10,87	1.135.980.958,00	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2.17.03	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**				**1.010.681.277,00**		**382.709.255,00**		**839.164.633,00**		**983.211.501,00**		**992.971.121,00**		**905.176.933,00**		**956.223.684,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	Koperasi terbina dan terawasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	31,59	-	31,70	-	31.79	839.164.633,00	31,83	983.211.501,00	32,00	992.971.121,00	32,05	905.176.933,00	32,05	956.223.684,00	
2.17.04	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**				**322.186.693,00**		**233.768.787,00**		**460.517.176,00**		**1.130.414.025,00**		**1.150.981.271,00**		**1.070.787.951,00**		**4.135.980.958,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	43,64	-	44,87	-	45,09	460.517.176,00	45,36	1.130.414.025,00	45,63	1.150.981.271,00	45,89	1.070.787.951,00	45,89	4.135.980.958,00	
2.17.05	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**				**347.947.668,00**		**234.655.474,00**		**665.191.477,00**		**1.198.688.357,00**		**1.224.268.311,00**		**1.147.600.368,00**		**1.219.354.581,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	SDM Koperasi Terlatih	Persentase SDM Koperasi yang dilatih	%	4,48	-	4,66	-	4,69	665.191.477,00	4,72	1.198.688.357,00	4,74	1.224.268.311,00	4,76	1.147.600.368,00	4,76	1.219.354.581,00	
2.17.06	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**				**478.215.884,00**		**5.894.787.595,00**		**834.047.775,00**		**1.398.774.008,00**		**1.439.044.273,00**		**1.372.707.842,00**		**1.463.690.414,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	33,41	-	33,49	-	33,57	834.047.775,00	33,61	1.398.774.008,00	33,65	1.439.044.273,00	33,68	1.372.707.842,00	33,68	1.463.690.414,00	
									-		-		-		-		-	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								-		-		-		-		-	
2.18.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**29.582.389.655,00**		**37.001.316.038,00**		**30.816.459.246,00**		**37.713.997.866,00**		**42.410.723.971,00**		**46.567.541.956,00**		**52.952.192.548,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	71,20	-		-		-		-		-		-		-	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat		-	BB	33.490.002.769,74	BB	30.816.459.246,00	BB	37.713.997.866,00	BB	42.410.723.971,00	BB	46.567.541.956,00	BB	52.952.192.548,00	
2.18.02	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**				**563.682.529,00**		**497.668.964,00**		**1.095.234.376,00**		**1.062.004.384,00**		**1.269.004.869,00**		**1.423.821.048,00**		**4.803.651.183,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	Meningkatnya kualitas Iklim penanaman modal yang menarik bagi investor	Persentase peningkatan proyek investasi	%	69	-		-		-		-		-		-		-	
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	%		-	100,0	-	100,1	1.095.234.376,00	100,2	1.062.004.384,00	100,3	1.269.004.869,00	100,4	1.423.821.048,00	100,5	4.803.651.183,00	
2.18.03	**Program Promosi Penanaman Modal**				**1.304.279.398,00**		**719.599.623,00**		**1.557.496.860,00**		**4.149.298.848,00**		**4.613.139.388,00**		**4.942.837.375,00**		**8.615.488.466,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvetasi di Kabupaten Bogor	%	5	-	5	-	6	1.557.496.860,00	7	4.149.298.848,00	8	4.613.139.388,00	9	4.942.837.375,00	10	8.615.488.466,00	
2.18.05	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**				**1.873.685.235,00**		**744.149.910,00**		**2.865.310.137,00**		**2.808.085.550,00**		**3.104.897.617,00**		**3.286.767.745,00**		**6.732.363.134,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	Meningkatnya pengawasan kegiatan usaha	Persentase kegiatan usaha yang diawasi	%	5,36	-		-		-		-		-		-		-	
	Meningkatnya pembinaan ke pelaku usaha	Persentase pelaku usaha yang dibina	%	12,4	-		-		-		-		-		-		-	
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase pengendalian kegiatan penanaman modal	%		-	5,0	-	5,2	2.865.310.137,00	5,5	2.808.085.550,00	5,7	3.104.897.617,00	6,0	3.286.767.745,00	6,3	6.732.363.134,00	
2.18.06	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**				**1.498.322.272,00**		**808.423.456,00**		**1.319.440.928,00**		**1.317.786.148,00**		**1.582.789.202,00**		**1.799.682.204,00**		**5.269.892.598,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan data dan sistem informasi DPMPTSP	Persentase peningkatan pengguna layanan sistem informasi	%	5	-	5	-	5,1	659.720.464,00	5,2	658.893.074,00	5,3	791.394.601,00	5,4	899.841.102,00	5,5	2.634.946.299,00	
		Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%		-	75	-	75	659.720.464,00	80	658.893.074,00	80	791.394.601,00	85	899.841.102,00	85	2.634.946.299,00	
2.18.04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**				**3.367.249.855,00**		**3.282.938.563,00**		**2.249.134.796,00**		**4.872.146.532,00**		**5.426.007.166,00**		**5.835.377.064,00**		**9.630.399.956,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	Presentase perizinan dan non perizinan pemanfaatan ruang yang diproses	%	90	-		-		-		-		-		-		-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan operasional dilaksanakan sesuai standar pelayanan	Presentase perizinan dan non perizinan operasional yang diproses	%	90	-		-		-		-		-		-		-	
	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan pemanfaatan ruang & operasional yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin pemanfaatan ruang sesuai ketentuan	%		-	50	-	53	1.124.567.398,00	56	2.436.073.266,00	59	2.713.003.583,00	61	2.917.688.532,00	64	4.815.199.978,00	
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin operasional sesuai ketentuan	%		-	70	-	72	1.124.567.398,00	74	2.436.073.266,00	76	2.713.003.583,00	78	2.917.688.532,00	80	4.815.199.978,00	
									-		-		-		-		-	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								-		-		-		-		-	
2.19.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**46.304.659.957,00**		**76.780.731.908,00**		**42.197.926.836,00**		**42.097.442.992,00**		**45.188.241.947,00**		**47.361.962.292,00**		**51.407.553.288,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	42.197.926.836,00	BB	42.097.442.992,00	BB	45.188.241.947,00	BB	47.361.962.292,00	BB	51.407.553.288,00	
2.19.02	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**				**19.704.509.672,00**		**15.428.127.115,00**		**21.274.965.214,00**		**21.224.304.188,00**		**22.782.594.966,00**		**23.878.521.429,00**		**25.918.190.536,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	%	76,36	-	14,34	-	15,73	21.274.965.214,00	16,43	21.224.304.188,00	17,13	22.782.594.966,00	17,82	23.878.521.429,00	18,52	25.918.190.536,00	
2.19.03	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**				**114.041.394.046,00**		**122.622.854.965,00**		**368.997.989.035,00**		**168.406.599.849,00**		**177.900.041.413,00**		**183.534.565.795,00**		**395.289.188.284,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	206	-	68	-	849	249.329.642.148,00	204	51.776.497.498,00	220	55.577.933.712,00	70	58.251.436.376,00	869	262.386.711.211,00	
		Persentase sarana prasarana olahraga di kecamatan yang dimanfaatkan	%	57,14	-	57,14	-	62,50	96.594.963.819,00	63,64	93.611.662.793,00	64,71	97.613.651.746,00	65,71	99.386.106.016,00	66,67	104.793.367.016,00	
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Event Olahraga	%	5,28	-	5,28	-	5,31	23.073.383.068,00	5,33	23.018.439.558,00	5,36	24.708.455.955,00	5,38	25.897.023.403,00	5,41	28.109.110.057,00	
2.19.04	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**				**4.185.575.100,00**		**2.847.607.823,00**		**3.756.162.076,00**		**3.925.656.652,00**		**4.414.539.696,00**		**4.847.223.609,00**		**5.511.803.008,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	8,09	-	8,13	-	8,14	3.756.162.076,00	8,16	3.925.656.652,00	8,17	4.414.539.696,00	8,18	4.847.223.609,00	8,19	5.511.803.008,00	
									-		-		-		-		-	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								-		-		-		-		-	
2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**				**553.595.720,00**		**737.085.539,00**		**1.545.239.313,00**		**1.448.356.092,00**		**1.525.795.427,00**		**1.596.910.788,00**		**1.703.178.031,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	Meningkatnya kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Poin	3,50	-	3,60	-	3.70	1.545.239.313,00	3.75	1.448.356.092,00	3.80	1.525.795.427,00	3.85	1.596.910.788,00	3.90	1.703.178.031,00	
									-		-		-		-		-	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								-		-		-		-		-	
2.21.02	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**				**94.056.634,00**		**2.504.339.486,00**		**1.792.253.884,00**		**1.679.883.375,00**		**1.769.701.792,00**		**1.852.185.326,00**		**1.975.439.951,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	77,05	-	80,00	-	81,54	1.792.253.884,00	83,08	1.679.883.375,00	84,62	1.769.701.792,00	86,15	1.852.185.326,00	86,92	1.975.439.951,00	
									-		-		-		-		-	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								-		-		-		-		-	
2.22.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**13.132.665.995,00**		-		**20.542.711.540,00**		**20.307.274.200,00**		**21.735.808.656,00**		**22.645.821.111,00**		**27.553.922.554,00**	
	Peningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai IKM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Poin	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
	Peningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Kebudayaan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat			-	-	BB	20.542.711.540,00	BB	20.307.274.200,00	BB	21.735.808.656,00	BB	22.645.821.111,00	BB	27.553.922.554,00	**Dinas Kebudayaan**
2.22.02	**Program Pengembangan Kebudayaan**				**1.040.517.121,00**		**6.760.772.475,00**		**1.592.823.276,00**		**4.302.843.557,00**		**4.556.330.933,00**		**4.639.947.435,00**		**8.010.012.934,00**	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	%	-	-	30	-		-		-		-		-		-	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
	Terlindunginya objek pemajuan kebudayaan daerah melalui penetapan Warisan Budaya Tingkat Kabupaten / Provinsi/ Nasional / UNESCO	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi melalui Penetapan Warisan Budaya Tingkat Kabupaten / Provinsi/ Nasional / UNESCO	%		-		-	3,59	1.592.823.276,00	4,62	4.302.843.557,00	5,64	4.556.330.933,00	6,67	4.639.947.435,00	7,69	8.010.012.934,00	**Dinas Kebudayaan**
2.22.03	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**				**1.494.176.794,00**		**2.275.559.432,00**		**2.425.732.478,00**		**2.233.436.202,00**		**2.334.987.459,00**		**2.311.749.184,00**		**5.482.943.323,00**	
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	100	-	100	-		-		-		-		-		-	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Lembaga kesenian tradisional yang terbina	Persentase lembaga Kesenian Tradisional yang dibina	%		-	-	-	45,50	2.425.732.478,00	51,18	2.233.436.202,00	56,87	2.334.987.459,00	62,56	2.311.749.184,00	68,25	5.482.943.323,00	**Dinas Kebudayaan**
2.22.04	**Program Pembinaan Sejarah**				**-**	**-**			**255.842.876,00**		**263.782.278,00**		**291.118.603,00**		**319.196.186,00**		**356.648.559,00**	
	Teraksesnya informasi sejarah oleh masyarakat	Persentase informasi sejarah yang diakses masyarakat	%	-	-	-	-	100	255.842.876,00	100	263.782.278,00	100	291.118.603,00	100	319.196.186,00	100	356.648.559,00	**Dinas Kebudayaan**
2.22.05	**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**				**917.931.645,00**		**1.896.174.575,00**		**1.562.924.477,00**		**3.808.245.158,00**		**4.025.419.064,00**		**4.083.496.756,00**		**7.406.031.035,00**	
	Meningkatnya Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	-	-	49,66	-		-		-		-		-		-	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
	Terlindunginya Benda Situs dan Cagar Budaya daerah	Persentase Benda Situs dan Cagar Budaya yang dilindungi melalui Penetapan Tingkat Kabupaten / Provinsi/ Nasional / UNESCO	%		-	-	-	24,83	1.562.924.477,00	28,19	3.808.245.158,00	31,54	4.025.419.064,00	34,90	4.083.496.756,00	38,26	7.406.031.035,00	**Dinas Kebudayaan**
2.22.06	**Program Pengelolaan Permuseuman**				**-**	-	-		**255.842.876,00**		**1.007.168.700,00**		**19.728.698.765,00**		**2.158.351.373,00**		**2.411.598.070,00**	
	Meningkatnya tata kelola permuseuman	Persentase materi permuseuman yang dikelola	%	-	-	-	-	20,00	255.842.876,00	23,13	1.007.168.700,00	26,25	19.728.698.765,00	29,38	2.158.351.373,00	32,50	2.411.598.070,00	**Dinas Kebudayaan**
									-		-		-		-		-	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								-		-		-		-		-	
2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**				**1.950.722.101,00**		**893.552.739,00**		**1.457.199.592,00**		**1.775.114.556,00**		**1.962.997.997,00**		**2.052.727.123,00**		**2.397.834.231,00**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
	Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	1,330	-	1,345	-	1,419	1.457.199.592,00	1,457	1.775.114.556,00	1,494	1.962.997.997,00	1,532	2.052.727.123,00	1,569	2.397.834.231,00	
2.23.03	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**				**16.141.600,00**		**4.310.000,00**		**40.030.404,00**		**49.639.028,00**		**57.273.374,00**		**65.651.652,00**		**76.689.092,00**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
	Terkelolanya naskah kuno dan koleksi muatan lokal daerah	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Nusantara yang terlindungi	%	100	-	100	-	100	40.030.404,00	100	49.639.028,00	100	57.273.374,00	100	65.651.652,00	100	76.689.092,00	
									-		-		-		-		-	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								-		-		-		-		-	
2.24.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**10.681.441.326,00**		**10.645.810.611,00**		**13.169.853.442,00**		**27.788.847.894,00**		**14.326.837.277,00**		**14.880.034.533,00**		**17.381.684.959,00**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	13.169.853.442,00	BB	27.788.847.894,00	BB	14.326.837.277,00	BB	14.880.034.533,00	BB	17.381.684.959,00	
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**				**2.762.021.916,00**		**1.448.441.327,00**		**1.820.604.075,00**		**1.650.771.454,00**		**1.821.838.516,00**		**1.896.293.943,00**		**2.215.101.304,00**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip sesuai dengan NSPK	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	96,89	-	96,95	-	97,10	1.820.604.075,00	97,25	1.650.771.454,00	97,50	1.821.838.516,00	97,70	1.896.293.943,00	98,00	2.215.101.304,00	
2.24.03	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**				**137.731.775,00**		**132.891.465,00**		**323.711.065,00**		**427.122.290,00**		**432.700.896,00**		**356.849.235,00**		**416.843.185,00**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
	Terlindunginya kondisi fisik arsip yang bernilai guna	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	-	100	-	100	323.711.065,00	100	427.122.290,00	100	432.700.896,00	100	356.849.235,00	100	416.843.185,00	
2.24.04	**Program Perizinan Penggunaan Arsip**				**2.135.300,00**		-		**-**		**-**		**-**		**-**		**48.719.152,00**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
	Tersedianya akses informasi arsip yang bersifat tertutup	Cakupan layanan arsip bersifat tertutup	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	48.719.152,00	
									-		-		-		-		-	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								-		-		-		-		-	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								-		-		-		-		-	
3.25.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**33.641.152.850,00**		**28.403.844.807,00**		**33.689.917.229,00**		**33.663.934.282,00**		**37.096.296.596,00**		**38.880.764.661,00**		**42.201.903.900,00**	**Dinas Perikanan dan Peternakan**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	33.689.917.229,00	BB	33.663.934.282,00	BB	37.096.296.596,00	BB	38.880.764.661,00	BB	42.201.903.900,00	
3.25.03	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**				**735.089.962,00**		**541.111.291,00**		**1.188.854.545,00**		**1.186.023.584,00**		**1.273.101.568,00**		**1.334.342.428,00**		**1.448.320.046,00**	**Dinas Perikanan dan Peternakan**
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	112,78	-	115,00	-	118,00	1.188.854.545,00	121,00	1.186.023.584,00	124,00	1.273.101.568,00	127,00	1.334.342.428,00	130,00	1.448.320.046,00	
3.25.04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**				**16.912.508.245,00**		**12.358.237.976,00**		**14.775.025.077,00**		**15.737.460.788,00**		**16.892.906.912,00**		**17.705.517.756,00**		**19.217.897.728,00**	**Dinas Perikanan dan Peternakan**
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	139.934	-	141.332	-	142.039	14.775.025.077,00	142.749	15.737.460.788,00	143.463	16.892.906.912,00	144.180	17.705.517.756,00	144.901	19.217.897.728,00	
3.25.05	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**				**658.712.783,00**		**216.181.192,00**		**580.978.499,00**		**579.595.044,00**		**622.148.977,00**		**652.076.627,00**		**707.776.078,00**	**Dinas Perikanan dan Peternakan**
	Meningkatnya Pengawasan pada perairan Umum	Persentase Perairan Umum yang diawasi	%	17,00	-	27,00	-	30,00	580.978.499,00	33,00	579.595.044,00	36,00	622.148.977,00	39,00	652.076.627,00	42,00	707.776.078,00	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
3.25.06	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**				**4.319.180.875,00**		**7.876.401.750,00**		**11.480.957.656,00**		**12.451.237.367,00**		**13.365.408.601,00**		**14.008.333.825,00**		**15.204.905.641,00**	**Dinas Perikanan dan Peternakan**
	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	23.367	-	23.600	-	23.836	11.480.957.656,00	24.076	12.451.237.367,00	24.325	13.365.408.601,00	24.564	14.008.333.825,00	24.802	15.204.905.641,00	
									-		-		-		-		-	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								-		-		-		-		-	
3.26.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**13.385.619.899,00**		**15.592.264.676,00**		**19.542.711.540,00**		**20.307.274.200,00**		**21.735.808.656,00**		**22.645.821.111,00**		**27.553.922.554,00**	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	-	-	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat		-	-	-	BB	19.542.711.540,00	BB	20.307.274.200,00	BB	21.735.808.656,00	BB	22.645.821.111,00	BB	27.553.922.554,00	**Dinas Pariwasata dan Ekonomi Kreatif**
3.26.02	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**				**2.076.489.348,00**		**1.920.146.609,00**		**3.413.301.031,00**		**5.556.600.588,00**		**5.902.138.944,00**		**6.050.493.752,00**		**9.541.046.098,00**	
	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	40,03	-		-		-		-		-		-		-	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tingkat Hunian Akomodasi	%	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tingkat Hunian Akomodasi	%	-	-	-	-	42	3.413.301.031,00	44	5.556.600.588,00	46	5.902.138.944,00	48	6.050.493.752,00	50	9.541.046.098,00	**Dinas Pariwasata dan Ekonomi Kreatif**
3.26.03	**Program Pemasaran Pariwisata**				**3.214.646.404,00**		**5.295.723.714,00**		**4.987.605.990,00**		**6.529.409.166,00**		**6.946.371.236,00**		**7.144.957.452,00**		**10.728.997.319,00**	
	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	-	-	5,00	-		-		-		-		-		-	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	-	-	-	-	6,67	4.987.605.990,00	10,00	6.529.409.166,00	13,33	6.946.371.236,00	16,67	7.144.957.452,00	20,00	10.728.997.319,00	**Dinas Pariwasata dan Ekonomi Kreatif**
3.26.04	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**				**1.587.086.108,00**		**1.513.820.925,00**		**1.945.146.710,00**		**1.846.400.296,00**		**2.023.448.549,00**		**2.099.322.209,00**		**5.382.112.678,00**	
	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
	Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual	%	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
	Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual	%	-	-	-	-	4,67	1.945.146.710,00	8,40	1.846.400.296,00	11,28	2.023.448.549,00	13,42	2.099.322.209,00	14,97	5.382.112.678,00	**Dinas Pariwasata dan Ekonomi Kreatif**
3.26.05	**Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**				**3.704.440.666,00**		**1.866.023.514,00**		**2.364.543.090,00**		**2.057.987.140,00**		**2.146.656.907,00**		**2.114.359.241,00**		**5.268.692.613,00**	
	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi	Orang	-	-	125	-		-		-		-		-		-	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	%	-	-	-	-	6,37	1.418.725.854,00	6,79	1.234.792.284,00	7,20	1.287.994.144,00	7,61	1.268.615.545,00	8,02	3.161.215.568,00	**Dinas Pariwasata dan Ekonomi Kreatif**
	Meningkatnya Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi berdasarkan keahlian	Orang		-		-	90	945.817.236,00	140	823.194.856,00	190	858.662.763,00	240	845.743.696,00	290	2.107.477.045,00	
									-		-		-		-		-	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								-		-		-		-		-	
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**43.824.262.243,00**		**50.427.158.742,00**		**47.118.090.242,00**		**47.506.897.952,00**		**49.905.326.766,00**		**52.111.521.884,00**		**55.482.027.582,00**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	47.118.090.242,00	BB	47.506.897.952,00	BB	49.905.326.766,00	BB	52.111.521.884,00	BB	55.482.027.582,00	
3.27.02	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**				**12.006.906.064,00**		**24.232.519.914,00**		**23.758.046.023,00**		**45.809.391.233,00**		**49.325.143.065,00**		**52.246.498.354,00**		**34.322.881.987,00**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**
	Kebutuhan sarana pertanian yang terpenuhi	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	14,15	-	17,24	-	16,92	23.758.046.023,00	17,21	45.809.391.233,00	17,51	49.325.143.065,00	17,81	52.246.498.354,00	18,10	34.322.881.987,00	
3.27.03	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**				**3.750.632.682,00**		**6.593.048.696,00**		**16.078.371.130,00**		**19.405.820.928,00**		**20.273.157.900,00**		**20.112.524.506,00**		**12.023.562.089,00**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	22,22	-	16,55	-	17,55	16.078.371.130,00	18,64	19.405.820.928,00	19,73	20.273.157.900,00	20,91	20.112.524.506,00	22,16	12.023.562.089,00	
3.27.05	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**				**1.299.843.390,00**		**1.435.251.171,00**		**2.285.946.326,00**		**2.315.261.696,00**		**2.812.003.408,00**		**2.921.967.888,00**		**3.105.367.575,00**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	26,69	-	2,80	-	9,78	2.285.946.326,00	12,58	2.315.261.696,00	18,17	2.812.003.408,00	20,97	2.921.967.888,00	22,36	3.105.367.575,00	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
3.27.06	**Program Perizinan Usaha Pertanian**				**2.402.170.710,00**		**1.770.735.568,00**		**2.896.141.207,00**		**3.081.936.222,00**		**3.325.969.899,00**		**3.873.521.264,00**		**3.684.142.345,00**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**
	Meningkatnya pelayanan ijin usaha pertanian	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis ijin usaha pertanian	%	32,10	-	13,49	-	28,49	2.896.141.207,00	46,08	3.081.936.222,00	63,86	3.325.969.899,00	81,81	3.873.521.264,00	100,00	3.684.142.345,00	
3.27.07	**Program Penyuluhan Pertanian**				**4.327.068.762,00**		**7.020.474.366,00**		**8.262.026.601,00**		**9.071.195.733,00**		**9.646.489.837,00**		**10.156.714.335,00**		**10.608.146.287,00**	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pertanian	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM pertanian	%	1,87	-	1,08	-	1,98	8.262.026.601,00	2,93	9.071.195.733,00	3,90	9.646.489.837,00	4,91	10.156.714.335,00	5,94	10.608.146.287,00	
3.27.02	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**				**7.973.164.690,00**		**6.879.404.244,00**		**11.755.725.674,00**		**11.727.732.344,00**		**12.588.783.759,00**		**13.194.350.477,00**		**14.321.393.000,00**	**Dinas Perikanan dan Peternakan**
	Meningkatnya penyediaan sarana peternakan	Persentase Penyediaan Sarana Peternakan (Bibit Ternak)	%	31,06	-	16,31	-	16,45	11.755.725.674,00	16,59	11.727.732.344,00	16,74	12.588.783.759,00	16,88	13.194.350.477,00	17,02	14.321.393.000,00	
3.27.03	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**				**18.247.277.089,00**		**27.290.647.172,00**		**30.518.756.073,00**		**317.429.876.391,00**		**34.073.561.327,00**		**35.712.624.727,00**		**38.763.145.990,00**	**Dinas Perikanan dan Peternakan**
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana peternakan	Persentase prasarana (Infrastruktur) peternakan yang dibangun/direhabiltasi	%	25,00	-	13,21	-	15,09	30.518.756.073,00	16,98	317.429.876.391,00	18,87	34.073.561.327,00	16,98	35.712.624.727,00	18,87	38.763.145.990,00	
3.27.04	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**				**4.736.083.748,00**		**1.831.750.084,00**		**2.994.378.914,00**		**2.665.179.921,00**		**2.860.857.728,00**		**2.998.475.488,00**		**3.254.600.971,00**	**Dinas Perikanan dan Peternakan**
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	60	-	81,25	-	81,50	2.994.378.914,00	81,75	2.665.179.921,00	82,00	2.860.857.728,00	82,25	2.998.475.488,00	82,50	3.254.600.971,00	
3.27.06	**Prgram Perizinan Usaha Pertanian**				**233.099.700,00**		**40.052.671,00**		**116.290.243,00**		**93.645.797,00**		**100.521.283,00**		**105.356.725,00**		**114.356.146,00**	**Dinas Perikanan dan Peternakan**
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase rekomendasi perizinan Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%	25,32	-	11,11	-	13,33	116.290.243,00	15,56	93.645.797,00	17,78	100.521.283,00	22,22	105.356.725,00	24,44	114.356.146,00	
3.27.07	**Program Penyuluhan Pertanian**				**510.112.850,00**		**1.004.178.690,00**		**1.227.118.105,00**		**1.224.196.029,00**		**1.314.076.639,00**		**1.377.288.549,00**		**1.494.934.564,00**	**Dinas Perikanan dan Peternakan**
	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok yang dibina	Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok yang dibina	%	15,00	-	4,24	-	7,27	1.227.118.105,00	10,30	1.224.196.029,00	13,33	1.314.076.639,00	16,36	1.377.288.549,00	19,39	1.494.934.564,00	
									-		-		-		-		-	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								-		-		-		-		-	
3.30.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**19.239.194.474,00**		**18.203.365.857,00**		**20.417.519.653,00**		**20.712.332.466,00**		**23.208.916.873,00**		**25.409.944.059,00**		**28.796.244.321,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	20.417.519.653,00	BB	20.712.332.466,00	BB	23.208.916.873,00	BB	25.409.944.059,00	BB	28.796.244.321,00	
3.30.02	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**				**2.041.326.016,00**		**1.044.828.536,00**		**2.784.582.488,00**		**2.910.235.113,00**		**3.272.661.965,00**		**3.593.426.556,00**		**4.086.103.970,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	Meningkatnya pelaku usaha Perdagangan yang berizin	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	66,00	-	81,11	-	82,70	2.784.582.488,00	83,15	2.910.235.113,00	83,55	3.272.661.965,00	83,95	3.593.426.556,00	84,40	4.086.103.970,00	
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**				**14.547.086.741,00**		**13.573.235.466,00**		**12.186.483.616,00**		**14.304.077.952,00**		**16.085.441.262,00**		**17.662.029.626,00**		**20.083.585.158,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan ketentuan	%	33,33	-	40,00	-	46,67	12.186.483.616,00	56,67	14.304.077.952,00	66,67	16.085.441.262,00	76,67	17.662.029.626,00	86,67	20.083.585.158,00	
3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting**				**913.920.388,00**		**3.956.157.873,00**		**3.393.546.816,00**		**3.546.678.520,00**		**3.988.365.190,00**		**4.379.278.182,00**		**4.979.699.904,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	Terkendalinya harga dan stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok	%	100	-	100	-	100	3.393.546.816,00	100	3.546.678.520,00	100	3.988.365.190,00	100	4.379.278.182,00	100	4.979.699.904,00	
3.30.05	**Program Pengembangan Ekspor**				**1.303.559.527,00**		**1.144.758.271,00**		**2.986.621.281,00**		**3.121.390.787,00**		**3.510.114.230,00**		**3.854.152.233,00**		**4.382.576.446,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	Meningkatnya nilai ekspor Daerah	Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA)	USD	1.875.427.336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Meningkat Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang terintegrasi	Pelaku usaha ekspor	-	-	430	-	460	2.986.621.281,00	490	3.121.390.787,00	520	3.510.114.230,00	550	3.854.152.233,00	580	4.382.576.446,00	
3.30.06	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**				**1.778.039.811,00**		**2.579.069.012,00**		**3.199.503.171,00**		**3.343.878.845,00**		**3.760.309.889,00**		**4.128.870.571,00**		**4.694.960.097,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	Meningkatnya cakupan alat ukur yang ditera/ tera ulang	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ tera ulang	%	100	-	100	-	100	3.199.503.171,00	100	3.343.878.845,00	100	3.760.309.889,00	100	4.128.870.571,00	100	4.694.960.097,00	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
3.30.07	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**				**86.021.552,00**		**151.245.959,00**		**536.902.365,00**		**561.129.764,00**		**631.010.164,00**		**692.857.578,00**		**787.851.951,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	Meningkatnya pelaku usaha yang bersertifikat TKDN	Persentase pelaku usaha yang bersertifikat TKDN	%	16,33	-	16,65	-	16,96	536.902.365,00	17,24	561.129.764,00	17,59	631.010.164,00	17,95	692.857.578,00	18,30	787.851.951,00	
									-		-		-		-		-	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								-		-		-		-		-	
3.31.02	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**				**1.901.320.359,00**		**2.340.849.376,00**		**2.298.225.677,00**		**2.401.931.741,00**		**2.701.057.059,00**		**2.965.796.624,00**		**3.372.422.683,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	Meningkatnya cakupan Industri Kecil Menengah (IKM) yang terbina	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	%	50,75	-	43,10	-	49,32	2.298.225.677,00	55,52	2.401.931.741,00	61,71	2.701.057.059,00	67,88	2.965.796.624,00	74,04	3.372.422.683,00	
3.31.03	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota**				**2.009.430.743,00**		**391.466.454,00**		**758.194.946,00**		**792.408.041,00**		**891.090.745,00**		**978.429.543,00**		**1.112.577.356,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	Meningkatnya cakupan pelaku usaha industri yang terfasilitasi proses pengajuan izin dan yang dilakukan pengawasan	Persentase pelaku usaha industri yang mengajukan izin dan yang dilakukan pengawasan	%	3,30	-	1,56	-	1,84	758.194.946,00	2,05	792.408.041,00	2,29	891.090.745,00	2,53	978.429.543,00	2,81	1.112.577.356,00	
3.31.04	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**				**1.570.295.620,00**		**513.159.121,00**		**671.965.730,00**		**702.287.783,00**		**789.747.235,00**		**867.153.192,00**		**986.044.278,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
	Terpenuhinya Informasi Industri	Indeks ketersediaan informasi industri	Indeks	125	-	125	-	125	671.965.730,00	125	702.287.783,00	125	789.747.235,00	125	867.153.192,00	125	986.044.278,00	
									-		-		-		-		-	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								-		-		-		-		-	
3.32.03	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**				**78.238.320,00**		**65.302.625,00**		**138.098.765,00**		**135.912.332,00**		**143.179.154,00**		**149.852.417,00**		**159.824.350,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
	Meningkatnya Jumlah Kepala Keluarga yang diberikan penyuluhan / sosialisasi program transmigrasi	Persentase kepala keluarga yang mendapatkan penyuluhan	%	100	-	100	-	100	138.098.765,00	100	135.912.332,00	100	143.179.154,00	100	149.852.417,00	100	159.824.350,00	
									-		-		-		-		-	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								-		-		-		-		-	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**								-		-		-		-		-	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**			**-**	**104.976.581.502,00**		**148.327.586.304,00**		**138.671.972.729,00**		**154.674.776.751,00**		**159.996.256.771,00**		**164.423.366.741,00**		**172.191.732.830,00**	**Sekretariat Daerah**
	Meningkatnya Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Predikat	76,65	-	BB	-	BB	137.521.587.075,00	BB	153.957.220.026,00	BB	159.254.012.997,00	BB	163.660.585.019,00	BB	171.392.912.632,00	
	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Poin	11,84	-	11,85	-	11,90	303.365.904,00	11,92	215.019.228,00	11,94	222.416.818,00	11,96	228.571.110,00	11,98	239.370.208,00	
	Tercapainya Tingkat Implementasi Sistem Kerja	Tingkat Implementasi Sistem Kerja	%	100	-	80	-	100	217.466.444,00	100	131.636.963,00	100	136.165.843,00	100	139.933.563,00	100	146.544.881,00	
	Tercapainya Tingkat Kematangan Kelembagaan	Tingkat Kematangan Kelembagaan	Predikat	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	217.466.444,00	Tinggi	131.636.963,00	Sangat Tinggi	136.165.843,00	Sangat Tinggi	139.933.563,00	Sangat Tinggi	146.544.881,00	
	Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Administrasi Umum	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Administrasi Umum	%	84,81	-	100	-	100	218.154.227,00	100	129.995.201,00	100	134.467.597,00	100	138.188.327,00	100	144.717.189,00	
		Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Administrasi Umum	%	100	-	100	-	100	193.932.635,00	100	109.268.370,00	100	113.027.673,00	100	116.155.159,00	100	121.643.039,00	
									-		-		-		-		-	
04.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**31.947.650.721,00**		**35.080.781.028,00**		**33.141.237.269,00**		**34.447.225.452,00**		**35.768.767.359,00**		**36.795.628.725,00**		**38.577.155.735,00**	**Sekretariat Daerah**
	Tercapainya Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Predikat	AA (99,82)	-	AA (>90)	-	AA (>90)	1.269.109.994,00	AA (>90)	1.308.083.237,00	AA (>90)	1.353.086.947,00	AA (>90)	1.390.526.978,00	AA (>90)	1.456.223.982,00	
	Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	-	100	-	100	31.087.957.520,00	100	32.042.641.121,00	100	33.145.046.297,00	100	34.062.172.534,00	100	35.671.478.020,00	
		Persentase Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	-	100	-	100	784.169.755,00	100	1.096.501.094,00	100	1.270.634.115,00	100	1.342.929.213,00	100	1.449.453.733,00	
									-		-		-		-		-	
04.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**11.489.623.446,00**		**9.675.497.585,00**		**10.531.732.344,00**		**9.373.958.957,00**		**9.696.463.611,00**		**9.964.765.580,00**		**10.435.562.089,00**	**Sekretariat Daerah**
	Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Poin	83,35	-	75,00	-	77,00	5.125.988.750,00	79,00	4.562.479.050,00	80,00	4.719.448.025,00	81,00	4.850.035.551,00	82,00	5.079.180.912,00	
	Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100	-	100	-	100	3.038.366.521,00	100	2.704.353.102,00	100	2.797.394.523,00	100	2.874.798.666,00	100	3.010.621.749,00	
		Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100	-	100	-	100	2.367.377.073,00	100	2.107.126.805,00	100	2.179.621.063,00	100	2.239.931.363,00	100	2.345.759.428,00	
									-		-		-		-		-	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**								-		-		-		-		-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
4.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**120.779.480.349,00**		**109.456.480.366,00**		**108.301.518.979,00**		**131.294.408.709,00**		**156.877.725.676,00**		**183.532.631.700,00**		**210.792.706.045,00**	**Sekretariat DPRD**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	108.301.518.979,00	BB	131.294.408.709,00	BB	156.877.725.676,00	BB	183.532.631.700,00	BB	210.792.706.045,00	
4.02.02	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**				**62.842.322.432,00**		**69.181.096.056,00**		**80.839.820.794,00**		**113.784.332.138,00**		**128.345.024.412,00**		**141.938.566.665,00**		**163.712.342.178,00**	**Sekretariat DPRD**
	Terpenuhinya cakupan dukungan sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Cakupan dukungan sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	-	100	-	100	80.839.820.794,00	100	113.784.332.138,00	100	128.345.024.412,00	100	141.938.566.665,00	100	163.712.342.178,00	
									-		-		-		-		-	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								-		-		-		-		-	
5.01	**PERENCANAAN**								-		-		-		-		-	
5.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**26.773.181.877,00**		**24.874.769.491,00**		**27.892.276.808,00**		**31.466.875.080,00**		**36.306.393.920,00**		**41.617.501.601,00**		**48.614.289.166,00**	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	-	-	-	-	BB	27.892.276.808,00	BB	31.466.875.080,00	BB	36.306.393.920,00	BB	41.617.501.601,00	BB	48.614.289.166,00	**Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah**
5.01.02	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**				**3.237.358.351,00**		**2.734.261.173,00**		**2.109.618.831,00**		**4.682.851.411,00**		**5.403.061.078,00**		**6.928.316.671,00**		**8.093.114.126,00**	
	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai rata-rata dari Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai rata-rata dari Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	-	-	-	-	100	2.109.618.831,00	100	4.682.851.411,00	100	5.403.061.078,00	100	6.928.316.671,00	100	8.093.114.126,00	**Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah**
5.01.03	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**				**9.598.078.785,00**		**10.042.764.433,00**		**4.623.051.356,00**		**7.876.786.334,00**		**9.088.214.407,00**		**10.417.690.573,00**		**12.169.126.027,00**	
	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	-	-	-	-	81	4.623.051.356,00	82	7.876.786.334,00	83	9.088.214.407,00	84	10.417.690.573,00	85	12.169.126.027,00	**Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah**
	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	-	-	-	-	81	-	82	-	83	-	84	-	85	-	
	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	-	-	-	-	81	-	82	-	83	-	84	-	85	-	
									-		-		-		-		-	
5.02	**KEUANGAN**								-		-		-		-		-	
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**45.646.563.139,00**		**45.199.323.807,00**		**50.105.775.782,00**		**48.091.466.277,00**		**49.409.412.120,00**		**50.481.075.757,00**		**52.558.451.483,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	50.105.775.782,00	A	48.091.466.277,00	A	49.409.412.120,00	A	50.481.075.757,00	A	52.558.451.483,00	
5.02.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**				**1.697.490.000.048,00**		**1.739.397.446.348,00**		**1.689.119.441.513,00**		**1.969.771.007.331,00**		**2.025.681.982.451,00**		**2.069.617.937.688,00**		**2.154.785.973.488,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terwujudnya Perencanaan Penganggaran yang berkualitas	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Status	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	5.714.192.188,00	Tepat Waktu	5.489.822.595,00	Tepat Waktu	5.645.648.492,00	Tepat Waktu	5.768.099.579,00	Tepat Waktu	6.005.465.956,00	
	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan	%	99	-	100	-	100	1.680.830.280.730,00	100	1.961.807.323.110,00	100	2.017.492.252.996,00	100	2.061.250.577.394,00	100	2.146.074.283.148,00	
	Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai ketentuan	%	100	-	100	-	100	2.574.968.595,00	100	2.473.861.626,00	100	2.544.080.963,00	100	2.599.260.715,00	100	2.706.224.384,00	
5.02.03	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**3.389.982.015,00**		**2.337.561.520,00**		**2.947.489.397,00**		**2.831.755.278,00**		**2.912.133.250,00**		**2.975.295.858,00**		**3.097.733.965,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	%	100	-	100	-	100	2.947.489.397,00	100	2.831.755.278,00	100	2.912.133.250,00	100	2.975.295.858,00	100	3.097.733.965,00	
									-		-		-		-		-	
05.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**178.160.651.039,00**		**198.099.311.616,00**		**221.346.229.495,00**		**217.841.705.931,00**		**229.489.060.177,00**		**240.185.251.208,00**		**256.168.502.414,00**	**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	221.346.229.495,00	BB	217.841.705.931,00	BB	229.489.060.177,00	BB	240.185.251.208,00	BB	256.168.502.414,00	
05.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**24.386.400.741,00**		**25.697.229.378,00**		**28.671.940.200,00**		**28.217.984.014,00**		**29.726.716.488,00**		**31.112.240.653,00**		**33.182.620.726,00**	**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
	Optimalnya Tata Kelola Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Rupiah	3.162.898.099.760	-	3.817.688.382.057	-	3.852.645.892.463	28.671.940.200,00	3.955.208.923.002	28.217.984.014,00	4.038.547.072.261	29.726.716.488,00	4.133.795.758.293	31.112.240.653,00	4.240.635.093.049	33.182.620.726,00	
									-		-		-		-		-	
5.03	**KEPEGAWAIAN**								-		-		-		-		-	
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**182.877.205.624,00**		**243.159.259.023,00**		**323.609.882.829,00**		**338.943.843.665,00**		**381.262.549.565,00**		**418.584.012.139,00**		**476.847.598.955,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	323.609.882.829,00	BB	338.943.843.665,00	A	381.262.549.565,00	A	418.584.012.139,00	A	476.847.598.955,00	
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**				**15.648.737.897,00**		**12.920.575.500,00**		**21.836.386.287,00**		**22.490.673.962,00**		**23.414.950.658,00**		**24.656.679.571,00**		**26.820.197.218,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran Manajemen Kepegawaian Daerah	Nilai sistem merit aspek kepegawaian	poin	324	-	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	71,5	-	72,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	17,59	-	16,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Indeks NSPK Manajemen ASN	poin	-	-	-	-	95,0	21.836.386.287,00	95,5	22.490.673.962,00	96,0	23.414.950.658,00	96,5	24.656.679.571,00	97,0	26.820.197.218,00	
									-		-		-		-		-	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								-		-		-		-		-	
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**				**12.048.261.077,00**		**9.636.139.350,00**		**12.174.405.846,00**		**14.543.843.637,00**		**15.549.226.378,00**		**16.635.140.869,00**		**21.054.095.594,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM	Nilai sistem merit aspek pengembangan SDM	poin	38	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20JP/Orang/Tahun	%	49,41	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi berdasarkan hasil analisis kesenjangan	%	-	-	-	-	52,5	12.174.405.846,00	55,0	14.543.843.637,00	57,5	15.549.226.378,00	60,00	16.635.140.869,00	62,5	21.054.095.594,00	
									-		-		-		-		-	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								-		-		-		-		-	
5.05.02	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**				**3.169.369.789,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Meningkatnya hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat	Persentase Riset yang dihasilkan menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	-		-		-		-		-		-		-	
	Program Riset dan Inovasi Daerah				**-**		**3.463.362.738,00**		**3.390.895.139,00**		**3.753.221.259,00**		**4.330.456.366,00**		**4.963.940.378,00**		**5.798.484.379,00**	
	Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan menjadi kebijakan	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan	%	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
	Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan menjadi kebijakan	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan	%	-	-	-	-	7,00	3.390.895.139,00	7,00	3.753.221.259,00	7,00	4.330.456.366,00	7,00	4.963.940.378,00	7,00	5.798.484.379,00	**Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah**
									-		-		-		-		-	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**								-		-		-		-		-	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**								-		-		-		-		-	
6.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**41.470.438.403,00**		**49.466.535.855,00**		**65.321.985.024,00**		**54.509.256.276,00**		**60.158.167.795,00**		**65.960.256.382,00**		**73.699.597.299,00**	**Inspektorat**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	65.321.985.024,00	BB	54.509.256.276,00	BB	60.158.167.795,00	BB	65.960.256.382,00	A	73.699.597.299,00	
6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**				**3.258.298.795,00**		**1.944.575.728,00**		**3.231.997.103,00**		**2.906.777.159,00**		**3.208.012.731,00**		**3.517.416.670,00**		**3.930.127.115,00**	**Inspektorat**
	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	%	99,75	-	99,76	-	99,78	3.231.997.103,00	99,79	2.906.777.159,00	99,80	3.208.012.731,00	99,81	3.517.416.670,00	99,82	3.930.127.115,00	
6.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**				**1.207.637.746,00**		**2.872.805.445,00**		**660.838.433,00**		**1.691.990.171,10**		**1.867.334.753,68**		**2.047.434.016,00**		**2.287.666.403,00**	**Inspektorat**
	Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK/ Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK	%	91,0	-	93,0	-	93,5	361.765.838,73	94,0	837.782.806,43	94,5	977.706.651,87	95,0	1.118.843.104,53	95,5	1.316.216.400,07	
		Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri	Level	3	-	3	-	3	224.251.908,27	3	536.882.394,87	3	565.570.634,81	3	597.127.698,47	3	631.840.467,93	
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	48,61	-	63,89	-	73,61	74.820.686,00	80,56	317.324.969,80	87,50	324.057.467,00	94,44	331.463.213,00	100	339.609.535,00	
									-		-		-		-		-	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								-		-		-		-		-	
7.01	**KECAMATAN**								-		-		-		-		-	
7.01.1	**KECAMATAN CIBINONG**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**25.583.334.256,00**		**50.236.682.034,00**		**70.981.010.074,00**		**73.183.716.768,00**		**80.767.902.811,00**		**88.557.743.232,00**		**98.948.524.034,00**	**Kecamatan Cibinong**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	70.981.010.074,00	BB	73.183.716.768,00	BB	80.767.902.811,00	BB	88.557.743.232,00	BB	98.948.524.034,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**1.677.696.480,00**		**1.788.141.884,00**		**2.349.705.234,00**		**2.422.622.081,00**		**2.673.683.620,00**		**2.931.552.996,00**		**3.275.522.066,00**	**Kecamatan Cibinong**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	97,30	-	100	-	100	2.349.705.234,00	100	2.422.622.081,00	100	2.673.683.620,00	100	2.931.552.996,00	100	3.275.522.066,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**29.703.598.979,00**		**37.197.675.235,00**		**47.635.045.911,00**		**49.113.272.755,00**		**54.202.986.891,00**		**59.430.714.782,00**		**66.403.922.406,00**	**Kecamatan Cibinong**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	95,23	-	100	-	100	47.635.045.911,00	100	49.113.272.755,00	100	54.202.986.891,00	100	59.430.714.782,00	100	66.403.922.406,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**135.354.200,00**		**136.266.900,00**		**194.369.026,00**		**200.400.751,00**		**221.168.712,00**		**242.499.822,00**		**270.953.150,00**	**Kecamatan Cibinong**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	81,33	-	100	-	100	194.369.026,00	100	200.400.751,00	100	221.168.712,00	100	242.499.822,00	100	270.953.150,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**484.188.262,00**		**335.776.187,00**		**508.821.232,00**		**524.611.145,00**		**578.977.727,00**		**634.818.524,00**		**709.303.938,00**	**Kecamatan Cibinong**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	82,66	-	100	-	100	508.821.232,00	100	524.611.145,00	100	578.977.727,00	100	634.818.524,00	100	709.303.938,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.2	**KECAMATAN GUNUNGPUTRI**								-		-		-		-		-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**6.753.702.567,00**		**16.064.040.047,00**		**7.512.762.145,00**		**7.745.900.719,00**		**8.548.625.078,00**		**9.373.116.279,00**		**10.472.895.848,00**	**Kecamatan Gunungputri**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	B	7.512.762.145,00	B	7.745.900.719,00	B	8.548.625.078,00	B	9.373.116.279,00	B	10.472.895.848,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**897.854.483,00**		**954.722.446,00**		**1.011.873.124,00**		**1.043.273.913,00**		**1.151.390.634,00**		**1.262.439.070,00**		**1.410.565.334,00**	**Kecamatan Gunungputri**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,71	-	100	-	100	1.011.873.124,00	100	1.043.273.913,00	100	1.151.390.634,00	100	1.262.439.070,00	100	1.410.565.334,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**474.463.602,00**		**486.488.536,00**		**514.499.360,00**		**530.465.478,00**		**585.438.757,00**		**641.902.703,00**		**717.219.327,00**	**Kecamatan Gunungputri**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92,41	-	100	-	100	514.499.360,00	100	530.465.478,00	100	585.438.757,00	100	641.902.703,00	100	717.219.327,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**51.841.982,00**		**90.252.462,00**		**84.931.828,00**		**87.567.461,00**		**96.642.265,00**		**105.963.144,00**		**118.396.160,00**	**Kecamatan Gunungputri**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,90	-	100	-	100	84.931.828,00	100	87.567.461,00	100	96.642.265,00	100	105.963.144,00	100	118.396.160,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**29.654.310,00**		**39.360.600,00**		**71.863.080,00**		**74.093.160,00**		**81.771.593,00**		**89.658.237,00**		**100.178.142,00**	**Kecamatan Gunungputri**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100,00	-	100	-	100	71.863.080,00	100	74.093.160,00	100	81.771.593,00	100	89.658.237,00	100	100.178.142,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**564.995.296,00**		**258.114.303,00**		**372.457.239,00**		**384.015.458,00**		**423.811.806,00**		**464.687.280,00**		**519.210.617,00**	**Kecamatan Gunungputri**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	-	100	-	100	372.457.239,00	100	384.015.458,00	100	423.811.806,00	100	464.687.280,00	100	519.210.617,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.3	**KECAMATAN CITEUREUP**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**8.353.073.805,00**		**7.748.306.250,00**		**8.796.439.127,00**		**9.069.413.199,00**		**10.009.296.004,00**		**10.974.664.868,00**		**12.262.359.573,00**	**Kecamatan Citeureup**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	8.796.439.127,00	BB	9.069.413.199,00	BB	10.009.296.004,00	BB	10.974.664.868,00	BB	12.262.359.573,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**764.606.104,00**		**663.820.488,00**		**668.063.966,00**		**688.795.553,00**		**760.176.918,00**		**833.493.876,00**		**931.290.543,00**	**Kecamatan Citeureup**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	96,54	-	100	-	100	668.063.966,00	100	688.795.553,00	100	760.176.918,00	100	833.493.876,00	100	931.290.543,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**4.351.945.815,00**		**5.436.890.254,00**		**6.377.182.812,00**		**6.575.081.705,00**		**7.256.471.570,00**		**7.956.338.146,00**		**8.889.882.324,00**	**Kecamatan Citeureup**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	97,75	-	100	-	100	6.377.182.812,00	100	6.575.081.705,00	100	7.256.471.570,00	100	7.956.338.146,00	100	8.889.882.324,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**117.971.433,00**		**131.058.295,00**		**148.599.291,00**		**153.210.675,00**		**169.088.227,00**		**185.396.318,00**		**207.149.497,00**	**Kecamatan Citeureup**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	96,00	-	100	-	100	148.599.291,00	100	153.210.675,00	100	169.088.227,00	100	185.396.318,00	100	207.149.497,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**36.932.399,00**		**17.938.946,00**		**31.789.116,00**		**32.775.607,00**		**36.172.214,00**		**39.660.924,00**		**44.314.475,00**	**Kecamatan Citeureup**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	88,77	-	100	-	100	31.789.116,00	100	32.775.607,00	100	36.172.214,00	100	39.660.924,00	100	44.314.475,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**229.799.962,00**		**417.286.248,00**		**261.688.023,00**		**269.808.814,00**		**297.769.682,00**		**326.488.742,00**		**364.796.776,00**	**Kecamatan Citeureup**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	94,41	-	100	-	100	261.688.023,00	100	269.808.814,00	100	297.769.682,00	100	326.488.742,00	100	364.796.776,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.4	**KECAMATAN SUKARAJA**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**6.335.922.510,00**		**6.674.475.162,00**		**8.469.807.994,00**		**8.732.645.939,00**		**9.637.628.828,00**		**10.567.151.423,00**		**11.807.031.191,00**	**Kecamatan Sukaraja**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	B	8.469.807.994,00	B	8.732.645.939,00	B	9.637.628.828,00	B	10.567.151.423,00	B	11.807.031.191,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**872.355.785,00**		**1.222.907.597,00**		**1.560.884.097,00**		**1.609.321.979,00**		**1.776.099.479,00**		**1.947.399.352,00**		**2.175.894.333,00**	**Kecamatan Sukaraja**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,69	-	100	-	100	1.560.884.097,00	100	1.609.321.979,00	100	1.776.099.479,00	100	1.947.399.352,00	100	2.175.894.333,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**517.735.426,00**		**382.808.019,00**		**338.960.825,00**		**349.479.571,00**		**385.696.891,00**		**422.896.288,00**		**472.516.146,00**	**Kecamatan Sukaraja**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,00	-	100	-	100	338.960.825,00	100	349.479.571,00	100	385.696.891,00	100	422.896.288,00	100	472.516.146,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**65.236.940,00**		**195.646.413,00**		**287.055.706,00**		**295.963.716,00**		**326.635.073,00**		**358.138.121,00**		**400.159.683,00**	**Kecamatan Sukaraja**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,00	-	100	-	100	287.055.706,00	100	295.963.716,00	100	326.635.073,00	100	358.138.121,00	100	400.159.683,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**90.008.535,00**		**94.064.055,00**		**67.542.519,00**		**69.638.521,00**		**76.855.311,00**		**84.267.793,00**		**94.155.219,00**	**Kecamatan Sukaraja**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99,00	-	100	-	100	67.542.519,00	100	69.638.521,00	100	76.855.311,00	100	84.267.793,00	100	94.155.219,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**148.717.203,00**		**299.612.839,00**		**346.155.411,00**		**356.897.422,00**		**393.883.470,00**		**431.872.440,00**		**482.545.500,00**	**Kecamatan Sukaraja**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	98,95	-	100	-	100	346.155.411,00	100	356.897.422,00	100	393.883.470,00	100	431.872.440,00	100	482.545.500,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.5	**KECAMATAN BABAKAN MADANG**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**4.841.318.015,00**		**4.648.591.683,00**		**5.344.905.705,00**		**5.129.047.548,00**		**5.295.884.780,00**		**5.339.183.471,00**		**5.574.477.491,00**	**Kecamatan Babakan Madang**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	5.344.905.705,00	BB	5.129.047.548,00	BB	5.295.884.780,00	BB	5.339.183.471,00	BB	5.574.477.491,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**718.057.046,00**		**639.628.515,00**		**431.201.660,00**		**413.787.247,00**		**427.246.884,00**		**430.740.017,00**		**449.722.423,00**	**Kecamatan Babakan Madang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	87,88	-	100	-	100	431.201.660,00	100	413.787.247,00	100	427.246.884,00	100	430.740.017,00	100	449.722.423,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**438.787.191,00**		**432.836.778,00**		**429.702.822,00**		**412.348.941,00**		**425.761.792,00**		**429.242.784,00**		**448.159.209,00**	**Kecamatan Babakan Madang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,72	-	100	-	100	429.702.822,00	100	412.348.941,00	100	425.761.792,00	100	429.242.784,00	100	448.159.209,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**80.817.151,00**		**81.164.800,00**		**131.103.437,00**		**125.808.723,00**		**129.901.018,00**		**130.963.078,00**		**136.734.527,00**	**Kecamatan Babakan Madang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	96,91	-	100	-	100	131.103.437,00	100	125.808.723,00	100	129.901.018,00	100	130.963.078,00	100	136.734.527,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**172.721.410,00**		**91.526.550,00**		**105.223.128,00**		**100.973.611,00**		**104.258.072,00**		**105.110.477,00**		**109.742.621,00**	**Kecamatan Babakan Madang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	97,17	-	100	-	100	105.223.128,00	100	100.973.611,00	100	104.258.072,00	100	105.110.477,00	100	109.742.621,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**421.853.632,00**		**462.817.452,00**		**404.441.632,00**		**388.107.944,00**		**400.732.287,00**		**404.008.638,00**		**421.813.012,00**	**Kecamatan Babakan Madang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	93,32	-	100	-	100	404.441.632,00	100	388.107.944,00	100	400.732.287,00	100	404.008.638,00	100	421.813.012,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.6	**KECAMATAN JONGGOL**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**4.793.013.276,00**		**5.911.992.522,00**		**6.555.819.569,00**		**8.336.390.295,00**		**9.045.665.732,00**		**9.760.432.670,00**		**10.745.088.440,00**	**Kecamatan Jonggol**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	B	6.555.819.569,00	B	8.336.390.295,00	B	9.045.665.732,00	B	9.760.432.670,00	B	10.745.088.440,00	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**945.517.750,00**		**1.167.720.427,00**		**1.229.138.720,00**		**1.278.363.160,00**		**1.297.689.180,00**		**1.317.116.085,00**		**1.435.371.295,00**	**Kecamatan Jonggol**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	97,21	-	100	-	100	1.229.138.720,00	100	1.278.363.160,00	100	1.297.689.180,00	100	1.317.116.085,00	100	1.435.371.295,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**612.527.167,00**		**413.225.153,00**		**445.095.538,00**		**1.328.628.018,00**		**1.383.948.992,00**		**1.437.922.501,00**		**1.573.282.938,00**	**Kecamatan Jonggol**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,24	-	100	-	100	445.095.538,00	100	1.328.628.018,00	100	1.383.948.992,00	100	1.437.922.501,00	100	1.573.282.938,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**45.416.792,00**		**68.740.289,00**		**98.761.288,00**		**101.826.082,00**		**112.378.538,00**		**123.217.137,00**		**137.674.622,00**	**Kecamatan Jonggol**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,58	-	100	-	100	98.761.288,00	100	101.826.082,00	100	112.378.538,00	100	123.217.137,00	100	137.674.622,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**25.457.097,00**		**28.745.415,00**		**61.402.290,00**		**198.251.043,00**		**218.796.225,00**		**239.898.515,00**		**250.507.728,00**	**Kecamatan Jonggol**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	87,77	-	100	-	100	61.402.290,00	100	198.251.043,00	100	218.796.225,00	100	239.898.515,00	100	250.507.728,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**361.172.797,00**		**371.669.355,00**		**478.929.541,00**		**1.407.985.734,00**		**1.579.632.019,00**		**1.674.313.531,00**		**1.776.052.737,00**	**Kecamatan Jonggol**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	97,14	-	100	-	100	478.929.541,00	100	1.407.985.734,00	100	1.579.632.019,00	100	1.674.313.531,00	100	1.776.052.737,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.7	**KECAMATAN CILEUNGSI**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.815.695.371,00**		**5.384.124.222,00**		**6.206.209.181,00**		**6.689.657.015,00**		**7.718.507.864,00**		**8.847.615.495,00**		**10.335.087.921,00**	**Kecamatan Cileungsi**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	B	6.206.209.181,00	B	6.689.657.015,00	B	7.718.507.864,00	B	8.847.615.495,00	B	10.335.087.921,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**593.159.210,00**		**647.414.003,00**		**809.956.825,00**		**873.050.392,00**		**1.007.323.141,00**		**1.154.680.152,00**		**1.348.806.455,00**	**Kecamatan Cileungsi**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	97,62	-	100	-	100	809.956.825,00	100	873.050.392,00	100	1.007.323.141,00	100	1.154.680.152,00	100	1.348.806.455,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**464.685.068,00**		**347.859.319,00**		**393.933.006,00**		**424.619.380,00**		**489.924.673,00**		**561.593.666,00**		**656.009.511,00**	**Kecamatan Cileungsi**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,13	-	100	-	100	393.933.006,00	100	424.619.380,00	100	489.924.673,00	100	561.593.666,00	100	656.009.511,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**32.085.657,00**		**70.040.584,00**		**72.253.697,00**		**77.882.076,00**		**89.860.125,00**		**103.005.380,00**		**120.322.776,00**	**Kecamatan Cileungsi**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	96,79	-	100	-	100	72.253.697,00	100	77.882.076,00	100	89.860.125,00	100	103.005.380,00	100	120.322.776,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**45.266.753,00**		**46.151.366,00**		**47.663.795,00**		**51.376.683,00**		**59.278.276,00**		**67.949.842,00**		**79.373.657,00**	**Kecamatan Cileungsi**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	96,45	-	100	-	100	47.663.795,00	100	51.376.683,00	100	59.278.276,00	100	67.949.842,00	100	79.373.657,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**177.218.248,00**		**220.582.358,00**		**199.112.288,00**		**214.622.627,00**		**247.630.997,00**		**283.855.880,00**		**331.578.094,00**	**Kecamatan Cileungsi**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	95,99	-	100	-	100	199.112.288,00	100	214.622.627,00	100	247.630.997,00	100	283.855.880,00	100	331.578.094,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.8	**KECAMATAN CARIU**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**4.927.092.555,00**		**4.871.582.428,00**		**5.809.754.544,00**		**5.990.044.810,00**		**6.610.806.043,00**		**7.248.399.968,00**		**8.098.879.355,00**	**Kecamatan Cariu**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	BB	5.809.754.544,00	BB	5.990.044.810,00	BB	6.610.806.043,00	BB	7.248.399.968,00	BB	8.098.879.355,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**770.854.618,00**		**395.996.473,00**		**562.781.642,00**		**580.246.072,00**		**640.378.221,00**		**702.140.926,00**		**784.525.506,00**	**Kecamatan Cariu**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,00	-	100	-	100	562.781.642,00	100	580.246.072,00	100	640.378.221,00	100	702.140.926,00	100	784.525.506,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**632.849.214,00**		**484.616.038,00**		**597.952.669,00**		**616.508.538,00**		**680.398.645,00**		**746.021.209,00**		**833.554.411,00**	**Kecamatan Cariu**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	93,00	-	100	-	100	597.952.669,00	100	616.508.538,00	100	680.398.645,00	100	746.021.209,00	100	833.554.411,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**125.449.150,00**		**123.000.825,00**		**169.363.916,00**		**174.619.674,00**		**192.715.886,00**		**211.302.800,00**		**236.095.675,00**	**Kecamatan Cariu**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100	-	100	-	100	169.363.916,00	100	174.619.674,00	100	192.715.886,00	100	211.302.800,00	100	236.095.675,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**40.637.325,00**		**56.097.575,00**		**63.837.351,00**		**65.818.373,00**		**72.639.273,00**		**79.645.130,00**		**88.990.163,00**	**Kecamatan Cariu**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	80,00	-	100	-	100	63.837.351,00	100	65.818.373,00	100	72.639.273,00	100	79.645.130,00	100	88.990.163,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**418.116.379,00**		**378.644.307,00**		**627.104.532,00**		**646.565.052,00**		**713.569.979,00**		**782.391.827,00**		**874.192.517,00**	**Kecamatan Cariu**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99,00	-	100	-	100	627.104.532,00	100	646.565.052,00	100	713.569.979,00	100	782.391.827,00	100	874.192.517,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.9	**KECAMATAN SUKAMAKMUR**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**12.300.346.961,00**		**7.584.831.898,00**		**6.320.895.899,00**		**6.517.048.077,00**		**7.192.423.792,00**		**7.886.113.137,00**		**8.811.417.577,00**	**Kecamatan Sukamakmur**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	BB	6.320.895.899,00	BB	6.517.048.077,00	BB	7.192.423.792,00	BB	7.886.113.137,00	BB	8.811.417.577,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**851.711.100,00**		**770.013.520,00**		**946.845.881,00**		**976.228.722,00**		**1.077.397.405,00**		**1.181.309.400,00**		**1.319.916.444,00**	**Kecamatan Sukamakmur**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	95,00	-	100	-	100	946.845.881,00	100	976.228.722,00	100	1.077.397.405,00	100	1.181.309.400,00	100	1.319.916.444,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**415.396.650,00**		**337.977.446,00**		**556.789.077,00**		**574.067.543,00**		**633.559.398,00**		**694.664.447,00**		**776.171.786,00**	**Kecamatan Sukamakmur**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,00	-	100	-	100	556.789.077,00	100	574.067.543,00	100	633.559.398,00	100	694.664.447,00	100	776.171.786,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**38.961.000,00**		**88.920.140,00**		**103.484.132,00**		**106.695.486,00**		**117.752.569,00**		**129.109.478,00**		**144.258.332,00**	**Kecamatan Sukamakmur**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	93,00	-	100	-	100	103.484.132,00	100	106.695.486,00	100	117.752.569,00	100	129.109.478,00	100	144.258.332,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**63.842.000,00**		**68.365.701,00**		**113.219.667,00**		**116.733.138,00**		**128.830.444,00**		**141.255.784,00**		**157.829.805,00**	**Kecamatan Sukamakmur**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	98,00	-	100	-	100	113.219.667,00	100	116.733.138,00	100	128.830.444,00	100	141.255.784,00	100	157.829.805,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**237.806.975,00**		**264.842.790,00**		**606.861.150,00**		**625.693.470,00**		**690.535.431,00**		**757.135.659,00**		**845.972.958,00**	**Kecamatan Sukamakmur**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	95,00	-	100	-	100	606.861.150,00	100	625.693.470,00	100	690.535.431,00	100	757.135.659,00	100	845.972.958,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.10	**KECAMATAN PARUNG**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.917.718.771,00**		**5.600.500.754,00**		**6.705.183.998,00**		**6.913.261.534,00**		**7.629.697.703,00**		**8.365.560.904,00**		**9.347.120.579,00**	**Kecamatan Parung**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	BB	6.705.183.998,00	BB	6.913.261.534,00	BB	7.629.697.703,00	BB	8.365.560.904,00	BB	9.347.120.579,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**952.788.801,00**		**992.783.150,00**		**1.353.748.112,00**		**1.395.758.081,00**		**1.540.403.495,00**		**1.688.971.143,00**		**1.887.143.864,00**	**Kecamatan Parung**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,58	-	100	-	100	1.353.748.112,00	100	1.395.758.081,00	100	1.540.403.495,00	100	1.688.971.143,00	100	1.887.143.864,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**353.374.625,00**		**347.856.859,00**		**390.080.051,00**		**402.185.147,00**		**443.864.459,00**		**486.673.956,00**		**543.777.064,00**	**Kecamatan Parung**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,93	-	100	-	100	390.080.051,00	100	402.185.147,00	100	443.864.459,00	100	486.673.956,00	100	543.777.064,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**41.041.950,00**		**78.797.900,00**		**99.739.833,00**		**102.834.993,00**		**113.492.005,00**		**124.437.994,00**		**139.038.727,00**	**Kecamatan Parung**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,56	-	100	-	100	99.739.833,00	100	102.834.993,00	100	113.492.005,00	100	124.437.994,00	100	139.038.727,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**77.337.400,00**		**100.195.450,00**		**153.662.710,00**		**158.431.223,00**		**174.849.792,00**		**191.713.570,00**		**214.207.975,00**	**Kecamatan Parung**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	98,84	-	100	-	100	153.662.710,00	100	158.431.223,00	100	174.849.792,00	100	191.713.570,00	100	214.207.975,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**208.954.375,00**		**370.418.350,00**		**503.431.544,00**		**854.777.102,00**		**620.963.683,00**		**676.057.573,00**		**701.790.637,00**	**Kecamatan Parung**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99,92	-	100	-	100	503.431.544,00	100	854.777.102,00	100	620.963.683,00	100	676.057.573,00	100	701.790.637,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.11	**KECAMATAN GUNUNGSINDUR**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.581.482.578,00**		**5.337.653.563,00**		**23.834.783.228,00**		**9.542.722.429,00**		**11.489.078.496,00**		**13.742.365.398,00**		**16.750.695.061,00**	**Kecamatan Gunungsindur**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	23.834.783.228,00	BB	9.542.722.429,00	BB	11.489.078.496,00	BB	13.742.365.398,00	BB	16.750.695.061,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**658.140.392,00**		**582.835.730,00**		**653.479.890,00**		**735.009.708,00**		**884.924.013,00**		**1.058.479.071,00**		**1.290.189.836,00**	**Kecamatan Gunungsindur**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,00	-	100	-	100	653.479.890,00	100	735.009.708,00	100	884.924.013,00	100	1.058.479.071,00	100	1.290.189.836,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**438.637.624,00**		**383.706.685,00**		**275.090.751,00**		**309.411.774,00**		**372.520.126,00**		**445.580.357,00**		**543.121.978,00**	**Kecamatan Gunungsindur**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,00	-	100	-	100	275.090.751,00	100	309.411.774,00	100	372.520.126,00	100	445.580.357,00	100	543.121.978,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**84.465.097,00**		**134.698.750,00**		**245.608.419,00**		**276.251.152,00**		**332.595.985,00**		**397.826.123,00**		**484.913.906,00**	**Kecamatan Gunungsindur**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	95,00	-	100	-	100	245.608.419,00	100	276.251.152,00	100	332.595.985,00	100	397.826.123,00	100	484.913.906,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**170.849.741,00**		**193.846.497,00**		**373.529.080,00**		**420.131.521,00**		**505.822.532,00**		**605.026.596,00**		**737.472.461,00**	**Kecamatan Gunungsindur**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	91,00	-	100	-	100	373.529.080,00	100	420.131.521,00	100	505.822.532,00	100	605.026.596,00	100	737.472.461,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**343.217.468,00**		**496.808.254,00**		**511.682.463,00**		**575.521.272,00**		**692.905.942,00**		**828.801.600,00**		**1.010.233.863,00**	**Kecamatan Gunungsindur**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	90,00	-	100	-	100	511.682.463,00	100	575.521.272,00	100	692.905.942,00	100	828.801.600,00	100	1.010.233.863,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.12	**KECAMATAN KEMANG**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**6.436.721.809,00**		**16.624.932.329,00**		**8.397.098.438,00**		**8.945.442.521,00**		**8.794.104.648,00**		**8.747.672.407,00**		**9.531.236.085,00**	**Kecamatan Kemang**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	B	8.397.098.438,00	B	8.945.442.521,00	B	8.794.104.648,00	B	8.747.672.407,00	B	9.531.236.085,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**1.145.561.215,00**		**1.473.675.966,00**		**862.309.221,00**		**1.032.949.935,00**		**1.088.178.725,00**		**1.138.897.341,00**		**1.214.685.851,00**	**Kecamatan Kemang**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,20	-	100	-	100	862.309.221,00	100	1.032.949.935,00	100	1.088.178.725,00	100	1.138.897.341,00	100	1.214.685.851,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**1.147.698.494,00**		**2.688.747.179,00**		**2.076.292.684,00**		**2.140.724.900,00**		**2.255.183.154,00**		**2.360.294.351,00**		**2.517.361.354,00**	**Kecamatan Kemang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	96,68	-	100	-	100	2.076.292.684,00	100	2.140.724.900,00	100	2.255.183.154,00	100	2.360.294.351,00	100	2.517.361.354,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**262.551.503,00**		**217.491.878,00**		**212.765.219,00**		**219.367.821,00**		**231.096.772,00**		**241.867.896,00**		**257.963.120,00**	**Kecamatan Kemang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	97,97	-	100	-	100	212.765.219,00	100	219.367.821,00	100	231.096.772,00	100	241.867.896,00	100	257.963.120,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**72.807.285,00**		**144.231.037,00**		**149.308.390,00**		**153.941.779,00**		**162.172.592,00**		**169.731.249,00**		**181.026.102,00**	**Kecamatan Kemang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	90,06	-	100	-	100	149.308.390,00	100	153.941.779,00	100	162.172.592,00	100	169.731.249,00	100	181.026.102,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**227.834.100,00**		**535.278.609,00**		**324.385.228,00**		**574.253.731,00**		**362.665.902,00**		**340.215.119,00**		**343.954.013,00**	**Kecamatan Kemang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	97,74	-	100	-	100	324.385.228,00	100	574.253.731,00	100	362.665.902,00	100	340.215.119,00	100	343.954.013,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.13	**KECAMATAN BOJONGGEDE**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**6.814.314.226,00**		**7.526.415.337,00**		**7.829.430.510,00**		**8.806.250.229,00**		**9.718.860.890,00**		**10.656.218.092,00**		**11.906.548.355,00**	**Kecamatan Bojonggede**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	B	7.829.430.510,00	B	8.806.250.229,00	B	9.718.860.890,00	B	10.656.218.092,00	B	11.906.548.355,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**685.031.648,00**		**667.433.881,00**		**779.627.423,00**		**876.895.729,00**		**967.770.320,00**		**1.061.109.086,00**		**1.185.612.619,00**	**Kecamatan Bojonggede**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,00	-	100	-	100	779.627.423,00	100	876.895.729,00	100	967.770.320,00	100	1.061.109.086,00	100	1.185.612.619,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**2.743.126.317,00**		**3.169.403.062,00**		**3.524.084.117,00**		**3.963.757.840,00**		**4.374.530.594,00**		**4.796.441.948,00**		**5.359.224.773,00**	**Kecamatan Bojonggede**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	98,70	-	100	-	100	3.524.084.117,00	100	3.963.757.840,00	100	4.374.530.594,00	100	4.796.441.948,00	100	5.359.224.773,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**74.718.152,00**		**99.415.240,00**		**82.495.636,00**		**92.788.002,00**		**102.403.822,00**		**112.280.387,00**		**125.454.627,00**	**Kecamatan Bojonggede**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,20	-	100	-	100	82.495.636,00	100	92.788.002,00	100	102.403.822,00	100	112.280.387,00	100	125.454.627,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**245.845.275,00**		**230.224.336,00**		**205.716.332,00**		**231.382.027,00**		**255.360.644,00**		**279.989.470,00**		**312.841.586,00**	**Kecamatan Bojonggede**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99,56	-	100	-	100	205.716.332,00	100	231.382.027,00	100	255.360.644,00	100	279.989.470,00	100	312.841.586,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**360.878.912,00**		**367.235.894,00**		**325.530.360,00**		**366.144.358,00**		**404.088.686,00**		**443.061.920,00**		**495.047.880,00**	**Kecamatan Bojonggede**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99,50	-	100	-	100	325.530.360,00	100	366.144.358,00	100	404.088.686,00	100	443.061.920,00	100	495.047.880,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.14	**KECAMATAN LEUWILIANG**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.982.296.816,00**		**9.130.592.799,00**		**6.426.662.476,00**		**6.174.317.509,00**		**6.349.572.455,00**		**6.487.291.275,00**		**6.754.253.522,00**	**Kecamatan Leuwiliang**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	B	6.426.662.476,00	B	6.174.317.509,00	B	6.349.572.455,00	B	6.487.291.275,00	B	6.754.253.522,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**455.237.566,00**		**720.232.151,00**		**892.311.626,00**		**857.274.723,00**		**881.608.042,00**		**900.729.647,00**		**937.796.090,00**	**Kecamatan Leuwiliang**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	71,83	-	100	-	100	892.311.626,00	100	857.274.723,00	100	881.608.042,00	100	900.729.647,00	100	937.796.090,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**448.775.860,00**		**475.741.092,00**		**746.188.331,00**		**716.889.006,00**		**737.237.546,00**		**753.227.833,00**		**784.224.344,00**	**Kecamatan Leuwiliang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,02	-	100	-	100	746.188.331,00	100	716.889.006,00	100	737.237.546,00	100	753.227.833,00	100	784.224.344,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**64.242.869,00**		**79.545.957,00**		**112.894.479,00**		**108.461.641,00**		**111.540.271,00**		**113.959.519,00**		**118.649.133,00**	**Kecamatan Leuwiliang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	91,54	-	100	-	100	112.894.479,00	100	108.461.641,00	100	111.540.271,00	100	113.959.519,00	100	118.649.133,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**221.199.750,00**		**120.542.261,00**		**178.987.201,00**		**171.959.211,00**		**176.840.188,00**		**180.675.757,00**		**188.110.848,00**	**Kecamatan Leuwiliang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	91,12	-	100	-	100	178.987.201,00	100	171.959.211,00	100	176.840.188,00	100	180.675.757,00	100	188.110.848,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**118.063.176,00**		**246.929.785,00**		**192.233.162,00**		**184.685.065,00**		**189.927.259,00**		**194.046.680,00**		**202.032.006,00**	**Kecamatan Leuwiliang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	94,61	-	100	-	100	192.233.162,00	100	184.685.065,00	100	189.927.259,00	100	194.046.680,00	100	202.032.006,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.15	**KECAMATAN CIAMPEA**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**4.785.610.453,00**		**19.209.494.711,00**		**6.805.662.930,00**		**7.335.806.679,00**		**8.464.033.569,00**		**9.702.200.979,00**		**11.333.347.409,00**	**Kecamatan Ciampea**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	B	-	B	6.805.662.930,00	B	7.335.806.679,00	B	8.464.033.569,00	B	9.702.200.979,00	B	11.333.347.409,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**944.586.129,00**		**834.593.952,00**		**799.185.407,00**		**861.439.908,00**		**993.926.997,00**		**1.139.324.342,00**		**1.330.869.007,00**	**Kecamatan Ciampea**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,00	-	100	-	100	799.185.407,00	100	861.439.908,00	100	993.926.997,00	100	1.139.324.342,00	100	1.330.869.007,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**595.457.053,00**		**351.685.708,00**		**365.152.334,00**		**393.596.767,00**		**454.130.868,00**		**520.563.738,00**		**608.081.579,00**	**Kecamatan Ciampea**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92,00	-	100	-	100	365.152.334,00	100	393.596.767,00	100	454.130.868,00	100	520.563.738,00	100	608.081.579,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**94.855.478,00**		**64.816.063,00**		**176.144.308,00**		**189.865.500,00**		**219.066.292,00**		**251.112.566,00**		**293.329.932,00**	**Kecamatan Ciampea**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	97,00	-	100	-	100	176.144.308,00	100	189.865.500,00	100	219.066.292,00	100	251.112.566,00	100	293.329.932,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**56.044.601,00**		**51.806.579,00**		**59.697.177,00**		**79.801.563,00**		**92.074.824,00**		**105.544.058,00**		**123.288.260,00**	**Kecamatan Ciampea**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100,00	-	100	-	100	59.697.177,00	100	79.801.563,00	100	92.074.824,00	100	105.544.058,00	100	123.288.260,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**199.854.038,00**		**234.060.904,00**		**313.010.183,00**		**730.342.456,00**		**770.286.662,00**		**485.256.609,00**		**566.838.570,00**	**Kecamatan Ciampea**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	-	100	-	100	313.010.183,00	100	730.342.456,00	100	770.286.662,00	100	485.256.609,00	100	566.838.570,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.16	**KECAMATAN CIBUNGBULANG**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.557.524.431,00**		**5.520.845.827,00**		**7.085.434.330,00**		**7.305.311.922,00**		**8.062.377.116,00**		**8.839.971.049,00**		**9.877.194.877,00**	**Kecamatan Cibungbulang**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	7.085.434.330,00	BB	7.305.311.922,00	BB	8.062.377.116,00	BB	8.839.971.049,00	BB	9.877.194.877,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**908.787.450,00**		**1.120.161.900,00**		**1.361.400.497,00**		**1.403.647.937,00**		**1.549.110.993,00**		**1.698.518.456,00**		**1.897.811.395,00**	**Kecamatan Cibungbulang**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,73	-	100	-	100	1.361.400.497,00	100	1.403.647.937,00	100	1.549.110.993,00	100	1.698.518.456,00	100	1.897.811.395,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**589.399.600,00**		**401.144.650,00**		**466.744.864,00**		**481.229.048,00**		**531.099.850,00**		**582.322.959,00**		**650.648.889,00**	**Kecamatan Cibungbulang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,91	-	100	-	100	466.744.864,00	100	481.229.048,00	100	531.099.850,00	100	582.322.959,00	100	650.648.889,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**86.728.450,00**		**56.634.000,00**		**93.422.198,00**		**96.321.308,00**		**106.303.292,00**		**116.555.950,00**		**130.231.856,00**	**Kecamatan Cibungbulang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	-	100	-	100	93.422.198,00	100	96.321.308,00	100	106.303.292,00	100	116.555.950,00	100	130.231.856,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**25.307.400,00**		**12.720.000,00**		**98.917.623,00**		**101.987.268,00**		**112.556.428,00**		**123.412.183,00**		**137.892.554,00**	**Kecamatan Cibungbulang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100,00	-	100	-	100	98.917.623,00	100	101.987.268,00	100	112.556.428,00	100	123.412.183,00	100	137.892.554,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**121.659.175,00**		**280.835.200,00**		**391.072.279,00**		**403.208.166,00**		**444.993.496,00**		**487.911.886,00**		**545.160.245,00**	**Kecamatan Cibungbulang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99,73	-	100	-	100	391.072.279,00	100	403.208.166,00	100	444.993.496,00	100	487.911.886,00	100	545.160.245,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.17	**KECAMATAN PAMIJAHAN**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.850.703.955,00**		**5.059.973.793,00**		**5.398.407.785,00**		**5.755.249.715,00**		**6.255.441.072,00**		**6.475.054.119,00**		**6.820.681.411,00**	**Kecamatan Pamijahan**
	Meningkatnya akuntabilitas kineria perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	5.398.407.785,00	BB	5.755.249.715,00	BB	6.255.441.072,00	BB	6.475.054.119,00	BB	6.820.681.411,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**646.496.350,00**		**442.207.500,00**		**509.726.878,00**		**525.544.894,00**		**580.008.243,00**		**635.948.430,00**		**710.566.420,00**	**Kecamatan Pamijahan**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	95,99	-	100	-	100	509.726.878,00	100	525.544.894,00	100	580.008.243,00	100	635.948.430,00	100	710.566.420,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**582.666.100,00**		**258.739.809,00**		**427.741.446,00**		**441.015.264,00**		**486.718.624,00**		**533.661.287,00**		**596.277.578,00**	**Kecamatan Pamijahan**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	87,40	-	100	-	100	427.741.446,00	100	441.015.264,00	100	486.718.624,00	100	533.661.287,00	100	596.277.578,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**12.375.000,00**		**13.612.500,00**		**14.642.758,00**		**15.097.157,00**		**16.661.708,00**		**18.268.684,00**		**20.412.211,00**	**Kecamatan Pamijahan**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	-	100	-	100	14.642.758,00	100	15.097.157,00	100	16.661.708,00	100	18.268.684,00	100	20.412.211,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**35.097.150,00**		**28.594.500,00**		**41.134.190,00**		**42.410.681,00**		**46.805.791,00**		**51.320.079,00**		**57.341.639,00**	**Kecamatan Pamijahan**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	53,14	-	100	-	100	41.134.190,00	100	42.410.681,00	100	46.805.791,00	100	51.320.079,00	100	57.341.639,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**268.736.000,00**		**267.077.475,00**		**322.362.023,00**		**332.365.671,00**		**366.809.440,00**		**402.187.194,00**		**449.377.184,00**	**Kecamatan Pamijahan**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	93,65	-	100	-	100	322.362.023,00	100	332.365.671,00	100	366.809.440,00	100	402.187.194,00	100	449.377.184,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.18	**KECAMATAN RUMPIN**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**6.223.904.937,00**		**5.721.759.508,00**		**5.924.971.796,00**		**6.244.158.178,00**		**6.891.253.726,00**		**7.555.896.052,00**		**8.442.455.000,00**	**Kecamatan Rumpin**
	Meningkatnya akuntabilitas kineria perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	5.924.971.796,00	BB	6.244.158.178,00	BB	6.891.253.726,00	BB	7.555.896.052,00	BB	8.442.455.000,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**903.344.054,00**		**911.337.085,00**		**681.102.380,00**		**886.788.060,00**		**978.687.815,00**		**1.073.079.542,00**		**1.198.987.610,00**	**Kecamatan Rumpin**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,21	-	100	-	100	681.102.380,00	100	886.788.060,00	100	978.687.815,00	100	1.073.079.542,00	100	1.198.987.610,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**538.669.798,00**		**280.173.573,00**		**176.569.099,00**		**617.730.136,00**		**681.746.839,00**		**747.499.432,00**		**835.206.080,00**	**Kecamatan Rumpin**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,84	-	100	-	100	176.569.099,00	100	617.730.136,00	100	681.746.839,00	100	747.499.432,00	100	835.206.080,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**65.865.804,00**		**86.827.135,00**		**79.417.466,00**		**129.013.514,00**		**142.383.462,00**		**156.115.952,00**		**174.433.567,00**	**Kecamatan Rumpin**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	97,16	-	100	-	100	79.417.466,00	100	129.013.514,00	100	142.383.462,00	100	156.115.952,00	100	174.433.567,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**84.041.732,00**		**84.129.596,00**		**92.043.823,00**		**96.400.432,00**		**106.390.617,00**		**116.651.697,00**		**130.338.837,00**	**Kecamatan Rumpin**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	95,73	-	100	-	100	92.043.823,00	100	96.400.432,00	100	106.390.617,00	100	116.651.697,00	100	130.338.837,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**143.313.485,00**		**188.057.663,00**		**278.239.867,00**		**220.617.905,00**		**243.481.014,00**		**266.964.083,00**		**298.287.885,00**	**Kecamatan Rumpin**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	97,95	-	100	-	100	278.239.867,00	100	220.617.905,00	100	243.481.014,00	100	266.964.083,00	100	298.287.885,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.19	**KECAMATAN JASINGA**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.838.822.860,00**		**6.838.382.696,00**		**7.438.753.837,00**		**7.138.334.002,00**		**7.370.529.136,00**		**7.430.789.938,00**		**7.758.259.569,00**	**Kecamatan Jasinga**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	BB	7.438.753.837,00	BB	7.138.334.002,00	BB	7.370.529.136,00	BB	7.430.789.938,00	BB	7.758.259.569,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**613.657.820,00**		**730.704.472,00**		**599.909.707,00**		**575.681.889,00**		**594.407.622,00**		**599.267.447,00**		**625.676.736,00**	**Kecamatan Jasinga**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,49	-	100	-	100	599.909.707,00	100	575.681.889,00	100	594.407.622,00	100	599.267.447,00	100	625.676.736,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**577.834.726,00**		**325.011.321,00**		**365.252.654,00**		**350.501.643,00**		**361.902.731,00**		**364.861.616,00**		**380.940.808,00**	**Kecamatan Jasinga**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,32	-	100	-	100	365.252.654,00	100	350.501.643,00	100	361.902.731,00	100	364.861.616,00	100	380.940.808,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**43.545.101,00**		**110.952.883,00**		**121.280.649,00**		**116.382.636,00**		**120.168.321,00**		**121.150.807,00**		**126.489.837,00**	**Kecamatan Jasinga**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,52	-	100	-	100	121.280.649,00	100	116.382.636,00	100	120.168.321,00	100	121.150.807,00	100	126.489.837,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**30.108.000,00**		**25.188.395,00**		**58.563.994,00**		**56.198.841,00**		**58.026.873,00**		**58.501.296,00**		**61.079.406,00**	**Kecamatan Jasinga**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99,81	-	100	-	100	58.563.994,00	100	56.198.841,00	100	58.026.873,00	100	58.501.296,00	100	61.079.406,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**166.157.338,00**		**328.843.686,00**		**382.491.802,00**		**367.044.574,00**		**378.983.769,00**		**382.082.308,00**		**398.920.403,00**	**Kecamatan Jasinga**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	97,75	-	100	-	100	382.491.802,00	100	367.044.574,00	100	378.983.769,00	100	382.082.308,00	100	398.920.403,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.20	**KECAMATAN PARUNG PANJANG**																	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**6.944.846.750,00**		**15.770.203.757,00**		**6.810.640.796,00**		**7.021.990.903,00**		**7.749.694.930,00**		**8.497.131.532,00**		**9.494.128.836,00**	**Kecamatan Parungpanjang**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	6.810.640.796,00	BB	7.021.990.903,00	BB	7.749.694.930,00	BB	8.497.131.532,00	BB	9.494.128.836,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**933.844.485,00**		**1.044.256.608,00**		**1.031.345.537,00**		**1.063.350.600,00**		**1.173.547.911,00**		**1.286.733.356,00**		**1.437.710.151,00**	**Kecamatan Parungpanjang**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	96	-	100	-	100	1.031.345.537,00	100	1.063.350.600,00	100	1.173.547.911,00	100	1.286.733.356,00	100	1.437.710.151,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**508.314.758,00**		**404.544.749,00**		**467.484.825,00**		**481.991.972,00**		**531.941.837,00**		**583.246.153,00**		**651.680.406,00**	**Kecamatan Parungpanjang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92	-	100	-	100	467.484.825,00	100	481.991.972,00	100	531.941.837,00	100	583.246.153,00	100	651.680.406,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**21.459.056,00**		**83.839.681,00**		**129.526.253,00**		**133.545.755,00**		**147.385.389,00**		**161.600.302,00**		**180.561.414,00**	**Kecamatan Parungpanjang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99	-	100	-	100	129.526.253,00	100	133.545.755,00	100	147.385.389,00	100	161.600.302,00	100	180.561.414,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**107.506.688,00**		**211.195.731,00**		**231.817.764,00**		**239.011.611,00**		**263.780.899,00**		**289.221.836,00**		**323.157.216,00**	**Kecamatan Parungpanjang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	98	-	100	-	100	231.817.764,00	100	239.011.611,00	100	263.780.899,00	100	289.221.836,00	100	323.157.216,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**197.069.644,00**		**514.011.285,00**		**466.634.706,00**		**481.115.472,00**		**530.974.504,00**		**582.185.523,00**		**650.495.328,00**	**Kecamatan Parungpanjang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	95	-	100	-	100	466.634.706,00	100	481.115.472,00	100	530.974.504,00	100	582.185.523,00	100	650.495.328,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.21	**KECAMATAN NANGGUNG**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**6.814.283.999,00**		**6.012.714.691,00**		**5.972.430.434,00**		**5.693.892.569,00**		**5.712.693.552,00**		**5.847.725.506,00**		**6.232.186.737,00**	**Kecamatan Nanggung**
	- Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	5.972.430.434,00	BB	5.693.892.569,00	BB	5.712.693.552,00	BB	5.847.725.506,00	BB	6.232.186.737,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**729.955.095,00**		**745.554.536,00**		**951.689.544,00**		**903.657.185,00**		**924.912.009,00**		**958.078.546,00**		**973.175.596,00**	**Kecamatan Nanggung**
	- Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,99	-	100	-	100	951.689.544,00	100	903.657.185,00	100	924.912.009,00	100	958.078.546,00	100	973.175.596,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**532.875.385,00**		**406.525.885,00**		**750.003.785,00**		**750.940.556,00**		**788.065.648,00**		**823.891.051,00**		**875.848.947,00**	**Kecamatan Nanggung**
	- Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,60	-	100	-	100	750.003.785,00	100	750.940.556,00	100	788.065.648,00	100	823.891.051,00	100	875.848.947,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**48.477.093,00**		**65.116.986,00**		**100.890.617,00**		**107.421.058,00**		**180.605.225,00**		**220.598.023,00**		**267.563.603,00**	**Kecamatan Nanggung**
	- Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,89	-	100	-	100	100.890.617,00	100	107.421.058,00	100	180.605.225,00	100	220.598.023,00	100	267.563.603,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**111.828.949,00**		**154.280.741,00**		**264.348.892,00**		**295.735.192,00**		**335.206.719,00**		**391.680.108,00**		**446.571.212,00**	**Kecamatan Nanggung**
	- Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	94,59	-	100	-	100	264.348.892,00	100	295.735.192,00	100	335.206.719,00	100	391.680.108,00	100	446.571.212,00	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				207.348.143,00		**299.493.017,00**		**296.084.499,00**		**379.717.503,00**		**401.968.384,00**		**461.469.660,00**		**486.113.204,00**	**Kecamatan Nanggung**
	- Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	98,41	-	100	-	100	296.084.499,00	100	379.717.503,00	100	401.968.384,00	100	461.469.660,00	100	486.113.204,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.22	**KECAMATAN CIGUDEG**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.783.876.399,00**		**7.273.883.178,00**		**5.933.514.368,00**		**6.117.645.191,00**		**6.751.629.926,00**		**7.402.805.924,00**		**8.271.402.287,00**	**Kecamatan Cigudeg**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	5.933.514.368,00	BB	6.117.645.191,00	BB	6.751.629.926,00	BB	7.402.805.924,00	BB	8.271.402.287,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**1.051.827.730,00**		**1.100.947.822,00**		**745.876.375,00**		**769.022.663,00**		**848.718.136,00**		**930.574.648,00**		**1.039.762.133,00**	**Kecamatan Cigudeg**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	92,00	-	100	-	100	745.876.375,00	100	769.022.663,00	100	848.718.136,00	100	930.574.648,00	100	1.039.762.133,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**656.111.013,00**		**394.054.305,00**		**342.905.618,00**		**353.546.781,00**		**390.185.595,00**		**427.817.914,00**		**478.015.243,00**	**Kecamatan Cigudeg**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,00	-	100	-	100	342.905.618,00	100	353.546.781,00	100	390.185.595,00	100	427.817.914,00	100	478.015.243,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**141.352.981,00**		**218.179.558,00**		**146.055.401,00**		**150.587.842,00**		**166.193.584,00**		**182.222.495,00**		**203.603.279,00**	**Kecamatan Cigudeg**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,00	-	100	-	100	146.055.401,00	100	150.587.842,00	100	166.193.584,00	100	182.222.495,00	100	203.603.279,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**80.647.815,00**		**49.195.018,00**		**42.267.827,00**		**43.579.496,00**		**48.095.733,00**		**52.734.433,00**		**58.921.944,00**	**Kecamatan Cigudeg**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	82,00	-	100	-	100	42.267.827,00	100	43.579.496,00	100	48.095.733,00	100	52.734.433,00	100	58.921.944,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**180.840.269,00**		**454.008.382,00**		**182.557.521,00**		**188.222.707,00**		**207.728.632,00**		**227.763.483,00**		**254.487.746,00**	**Kecamatan Cigudeg**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	94,00	-	100	-	100	182.557.521,00	100	188.222.707,00	100	207.728.632,00	100	227.763.483,00	100	254.487.746,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.23	**KECAMATAN TENJO**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**4.408.898.372,00**		**4.719.341.996,00**		**6.500.133.567,00**		**6.701.847.909,00**		**7.396.374.829,00**		**8.109.734.686,00**		**9.061.277.402,00**	**Kecamatan Tenjo**
	Meningkatnya akuntabilitas kineria perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	6.500.133.567,00	BB	6.701.847.909,00	BB	7.396.374.829,00	BB	8.109.734.686,00	BB	9.061.277.402,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**712.237.886,00**		**830.776.155,00**		**868.795.485,00**		**895.756.240,00**		**988.585.387,00**		**1.083.931.708,00**		**1.211.113.097,00**	**Kecamatan Tenjo**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	89,15	-	**100**	-	**100**	868.795.485,00	**100**	895.756.240,00	**100**	988.585.387,00	**100**	1.083.931.708,00	**100**	1.211.113.097,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**367.001.042,00**		**374.328.595,00**		**349.050.478,00**		**359.882.330,00**		**397.177.710,00**		**435.484.400,00**		**486.581.264,00**	**Kecamatan Tenjo**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,34	-	**100**	-	**100**	349.050.478,00	**100**	359.882.330,00	**100**	397.177.710,00	**100**	435.484.400,00	**100**	486.581.264,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**33.991.010,00**		**60.134.300,00**		**58.912.887,00**		**60.741.092,00**		**67.035.822,00**		**73.501.241,00**		**82.125.392,00**	**Kecamatan Tenjo**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	92,32	-	**100**	-	**100**	58.912.887,00	**100**	60.741.092,00	**100**	67.035.822,00	**100**	73.501.241,00	**100**	82.125.392,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**124.043.047,00**		**70.259.050,00**		**44.667.019,00**		**46.053.141,00**		**50.825.727,00**		**55.727.728,00**		**62.266.451,00**	**Kecamatan Tenjo**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	97,94	-	**100**	-	**100**	44.667.019,00	**100**	46.053.141,00	**100**	50.825.727,00	**100**	55.727.728,00	**100**	62.266.451,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**169.392.841,00**		**238.300.861,00**		**246.691.222,00**		**254.346.628,00**		**280.705.116,00**		**307.778.347,00**		**343.891.026,00**	**Kecamatan Tenjo**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	96,63	-	**100**	-	**100**	246.691.222,00	**100**	254.346.628,00	**100**	280.705.116,00	**100**	307.778.347,00	**100**	343.891.026,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.24	**KECAMATAN CIAWI**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.331.695.799,00**		**5.141.987.683,00**		**5.879.124.560,00**		**6.061.567.540,00**		**6.689.740.828,00**		**7.334.947.794,00**		**8.195.582.132,00**	**Kecamatan Ciawi**
	Meningkatnya akuntabilitas kineria perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	5.879.124.560,00	BB	6.061.567.540,00	BB	6.689.740.828,00	BB	7.334.947.794,00	BB	8.195.582.132,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**957.697.865,00**		**991.917.350,00**		**940.144.928,00**		**969.319.823,00**		**1.069.772.522,00**		**1.172.949.117,00**		**1.310.575.221,00**	**Kecamatan Ciawi**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,41	-	100	-	100	940.144.928,00	100	969.319.823,00	100	1.069.772.522,00	100	1.172.949.117,00	100	1.310.575.221,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**568.814.350,00**		**377.437.950,00**		**600.375.308,00**		**619.006.357,00**		**683.155.318,00**		**749.043.756,00**		**836.931.604,00**	**Kecamatan Ciawi**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,97	-	100	-	100	600.375.308,00	100	619.006.357,00	100	683.155.318,00	100	749.043.756,00	100	836.931.604,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**144.787.204,00**		**121.785.600,00**		**185.307.689,00**		**191.058.220,00**		**210.857.994,00**		**231.194.664,00**		**258.321.519,00**	**Kecamatan Ciawi**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	-	100	-	100	185.307.689,00	100	191.058.220,00	100	210.857.994,00	100	231.194.664,00	100	258.321.519,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**87.611.750,00**		**87.602.800,00**		**119.417.540,00**		**123.123.346,00**		**135.882.883,00**		**148.988.410,00**		**166.469.727,00**	**Kecamatan Ciawi**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100,00	-	100	-	100	119.417.540,00	100	123.123.346,00	100	135.882.883,00	100	148.988.410,00	100	166.469.727,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**191.787.500,00**		**357.093.100,00**		**277.760.381,00**		**286.379.935,00**		**316.058.104,00**		**346.541.032,00**		**387.201.869,00**	**Kecamatan Ciawi**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	-	100	-	100	277.760.381,00	100	286.379.935,00	100	316.058.104,00	100	346.541.032,00	100	387.201.869,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.25	**KECAMATAN CISARUA**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**7.592.424.438,00**		**7.662.731.489,00**		**10.863.446.951,00**		**10.424.718.232,00**		**10.763.812.598,00**		**10.851.816.589,00**		**11.330.048.433,00**	**Kecamatan Cisarua**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	10.863.446.951,00	BB	10.424.718.232,00	BB	10.763.812.598,00	BB	10.851.816.589,00	BB	11.330.048.433,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**852.075.949,00**		**985.442.550,00**		**1.276.537.291,00**		**1.375.976.283,00**		**1.587.597.651,00**		**1.819.840.548,00**		**2.125.794.467,00**	**Kecamatan Cisarua**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,29	-	100	-	100	1.276.537.291,00	100	1.375.976.283,00	100	1.587.597.651,00	100	1.819.840.548,00	100	2.125.794.467,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**2.308.333.654,00**		**3.331.297.492,00**		**3.565.505.218,00**		**3.843.248.962,00**		**4.434.330.082,00**		**5.083.009.337,00**		**5.937.571.364,00**	**Kecamatan Cisarua**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	98,27	-	100	-	100	3.565.505.218,00	100	3.843.248.962,00	100	4.434.330.082,00	100	5.083.009.337,00	100	5.937.571.364,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**39.765.110,00**		**61.864.475,00**		**98.313.279,00**		**105.971.632,00**		**122.269.778,00**		**140.156.102,00**		**163.719.326,00**	**Kecamatan Cisarua**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,48	-	100	-	100	98.313.279,00	100	105.971.632,00	100	122.269.778,00	100	140.156.102,00	100	163.719.326,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**91.735.885,00**		**91.818.875,00**		**125.323.200,00**		**135.085.557,00**		**155.861.344,00**		**178.661.636,00**		**208.698.458,00**	**Kecamatan Cisarua**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100,00	-	100	-	100	125.323.200,00	100	135.085.557,00	100	155.861.344,00	100	178.661.636,00	100	208.698.458,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**633.851.729,00**		**452.536.480,00**		**604.267.562,00**		**651.338.461,00**		**751.512.525,00**		**861.448.090,00**		**1.006.275.844,00**	**Kecamatan Cisarua**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99,52	-	100	-	100	604.267.562,00	100	651.338.461,00	100	751.512.525,00	100	861.448.090,00	100	1.006.275.844,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.26	**KECAMATAN MEGAMENDUNG**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**4.725.109.704,00**		**5.031.429.508,00**		**5.871.912.296,00**		**6.329.319.257,00**		**7.302.751.150,00**		**8.371.039.502,00**		**9.778.389.363,00**	**Kecamatan Megamendung**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	B	5.871.912.296,00	B	6.329.319.257,00	B	7.302.751.150,00	B	8.371.039.502,00	B	9.778.389.363,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**733.738.252,00**		**1.012.266.575,00**		**1.106.706.743,00**		**1.192.916.370,00**		**1.376.383.627,00**		**1.577.728.923,00**		**1.842.978.727,00**	**Kecamatan Megamendung**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	97,94	-	100	-	100	1.106.706.743,00	100	1.192.916.370,00	100	1.376.383.627,00	100	1.577.728.923,00	100	1.842.978.727,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**568.885.515,00**		**438.172.347,00**		**506.289.488,00**		**545.728.145,00**		**629.659.633,00**		**721.769.858,00**		**843.114.729,00**	**Kecamatan Megamendung**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92,20	-	100	-	100	506.289.488,00	100	545.728.145,00	100	629.659.633,00	100	721.769.858,00	100	843.114.729,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**35.291.000,00**		**59.198.050,00**		**60.656.815,00**		**65.381.826,00**		**75.437.371,00**		**86.472.782,00**		**101.010.697,00**	**Kecamatan Megamendung**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,26	-	100	-	100	60.656.815,00	100	65.381.826,00	100	75.437.371,00	100	86.472.782,00	100	101.010.697,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**52.613.000,00**		**29.267.400,00**		**32.761.959,00**		**35.314.032,00**		**40.745.233,00**		**46.705.680,00**		**54.557.898,00**	**Kecamatan Megamendung**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99,66	-	100	-	100	32.761.959,00	100	35.314.032,00	100	40.745.233,00	100	46.705.680,00	100	54.557.898,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**272.708.283,00**		**189.490.450,00**		**242.800.287,00**		**261.713.809,00**		**301.964.673,00**		**346.137.799,00**		**404.330.928,00**	**Kecamatan Megamendung**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	97,76	-	100	-	100	242.800.287,00	100	261.713.809,00	100	301.964.673,00	100	346.137.799,00	100	404.330.928,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.27	**KECAMATAN CARINGIN**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.549.771.174,00**		**5.792.856.317,00**		**9.058.290.470,00**		**8.224.925.995,00**		**8.492.465.702,00**		**8.561.899.360,00**		**8.939.216.179,00**	**Kecamatan Caringin**
	Meningkatnya akuntabilitas kineria perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	BB	-	BB	9.058.290.470,00	BB	8.224.925.995,00	BB	8.492.465.702,00	BB	8.561.899.360,00	BB	8.939.216.179,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**678.499.333,00**		**752.349.838,00**		**870.571.879,00**		**842.068.007,00**		**869.458.725,00**		**876.567.344,00**		**915.197.044,00**	**Kecamatan Caringin**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,00	-	100	-	100	870.571.879,00	100	842.068.007,00	100	869.458.725,00	100	876.567.344,00	100	915.197.044,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**523.680.191,00**		**424.093.516,00**		**843.244.832,00**		**239.461.636,00**		**247.250.824,00**		**249.272.326,00**		**260.257.580,00**	**Kecamatan Caringin**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92,00	-	100	-	100	843.244.832,00	100	239.461.636,00	100	247.250.824,00	100	249.272.326,00	100	260.257.580,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**76.968.318,00**		**139.171.614,00**		**295.586.787,00**		**276.194.586,00**		**285.178.621,00**		**287.510.216,00**		**300.180.587,00**	**Kecamatan Caringin**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	96,00	-	100	-	100	295.586.787,00	100	276.194.586,00	100	285.178.621,00	100	287.510.216,00	100	300.180.587,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**109.679.425,00**		**126.747.164,00**		**299.104.652,00**		**333.386.394,00**		**344.230.759,00**		**347.045.160,00**		**362.339.194,00**	**Kecamatan Caringin**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99,00	-	100	-	100	299.104.652,00	100	333.386.394,00	100	344.230.759,00	100	347.045.160,00	100	362.339.194,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**287.516.051,00**		**431.261.471,00**		**750.936.757,00**		**588.192.175,00**		**607.324.841,00**		**612.290.276,00**		**639.273.473,00**	**Kecamatan Caringin**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99,00	-	100	-	100	750.936.757,00	100	588.192.175,00	100	607.324.841,00	100	612.290.276,00	100	639.273.473,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.28	**KECAMATAN CIJERUK**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.509.607.745,00**		**5.039.704.950,00**		**5.395.573.235,00**		**5.563.010.487,00**		**6.139.517.234,00**		**6.731.656.659,00**		**7.521.504.799,00**	**Kecamatan Cijeruk**
	Meningkatnya akuntabilitas kineria perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	5.395.573.235,00	BB	5.563.010.487,00	BB	6.139.517.234,00	BB	6.731.656.659,00	BB	7.521.504.799,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**696.331.681,00**		**954.705.229,00**		**800.416.180,00**		**825.254.966,00**		**910.777.914,00**		**998.619.920,00**		**1.115.791.387,00**	**Kecamatan Cijeruk**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	97,25	-	100	-	100	800.416.180,00	100	825.254.966,00	100	910.777.914,00	100	998.619.920,00	100	1.115.791.387,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**393.257.000,00**		**383.019.432,00**		**354.448.107,00**		**365.447.461,00**		**403.319.568,00**		**442.218.622,00**		**494.105.635,00**	**Kecamatan Cijeruk**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,81	-	100	-	100	354.448.107,00	100	365.447.461,00	100	403.319.568,00	100	442.218.622,00	100	494.105.635,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**118.911.500,00**		**143.967.554,00**		**129.335.916,00**		**133.349.512,00**		**147.168.809,00**		**161.362.833,00**		**180.296.082,00**	**Kecamatan Cijeruk**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,07	-	100	-	100	129.335.916,00	100	133.349.512,00	100	147.168.809,00	100	161.362.833,00	100	180.296.082,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**78.959.000,00**		**74.912.103,00**		**72.158.410,00**		**74.397.655,00**		**82.107.644,00**		**90.026.698,00**		**100.589.837,00**	**Kecamatan Cijeruk**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	98,61	-	100	-	100	72.158.410,00	100	74.397.655,00	100	82.107.644,00	100	90.026.698,00	100	100.589.837,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**238.520.500,00**		**439.081.302,00**		**314.994.030,00**		**324.769.031,00**		**358.425.545,00**		**392.994.695,00**		**439.106.098,00**	**Kecamatan Cijeruk**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99,14	-	100	-	100	314.994.030,00	100	324.769.031,00	100	358.425.545,00	100	392.994.695,00	100	439.106.098,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.29	**KECAMATAN CIOMAS**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**7.868.440.791,00**		**7.461.519.906,00**		**15.604.478.905,00**		**8.000.457.101,00**		**8.078.858.556,00**		**8.176.893.175,00**		**7.549.624.875,00**	**Kecamatan Ciomas**
	Meningkatnya akuntabilitas kineria perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	B	15.604.478.905,00	B	8.000.457.101,00	B	8.078.858.556,00	B	8.176.893.175,00	B	7.549.624.875,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**639.097.540,00**		**732.463.349,00**		**666.804.311,00**		**741.741.786,00**		**781.400.535,00**		**761.346.863,00**		**634.884.615,00**	**Kecamatan Ciomas**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	97,32	-	100	-	100	666.804.311,00	100	741.741.786,00	100	781.400.535,00	100	761.346.863,00	100	634.884.615,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**2.604.974.059,00**		**2.949.812.995,00**		**3.243.080.465,00**		**3.384.565.059,00**		**3.565.527.781,00**		**3.384.773.209,00**		**3.087.835.308,00**	**Kecamatan Ciomas**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	98,03	-	100	-	100	3.243.080.465,00	100	3.384.565.059,00	100	3.565.527.781,00	100	3.384.773.209,00	100	3.087.835.308,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**50.045.775,00**		**113.389.600,00**		**128.330.786,00**		**132.313.190,00**		**139.387.587,00**		**132.321.328,00**		**122.187.635,00**	**Kecamatan Ciomas**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	98,16	-	100	-	100	128.330.786,00	100	132.313.190,00	100	139.387.587,00	100	132.321.328,00	100	122.187.635,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**19.520.500,00**		**41.491.689,00**		**55.722.578,00**		**88.024.786,00**		**92.731.212,00**		**88.030.199,00**		**53.055.157,00**	**Kecamatan Ciomas**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	94,87	-	100	-	100	55.722.578,00	100	88.024.786,00	100	92.731.212,00	100	88.030.199,00	100	53.055.157,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**76.065.400,00**		**222.803.856,00**		**140.488.440,00**		**433.759.290,00**		**204.327.539,00**		**289.895.874,00**		**133.763.306,00**	**Kecamatan Ciomas**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	95,99	-	100	-	100	140.488.440,00	100	433.759.290,00	100	204.327.539,00	100	289.895.874,00	100	133.763.306,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.30	**KECAMATAN DRAMAGA**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.756.040.349,00**		**5.052.927.629,00**		**6.717.312.531,00**		**6.610.958.879,00**		**6.964.427.374,00**		**7.289.030.409,00**		**7.774.082.691,00**	**Kecamatan Dramaga**
	Meningkatnya akuntabilitas kineria perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat		-	B	-	B	6.717.312.531,00	B	6.610.958.879,00	B	6.964.427.374,00	B	7.289.030.409,00	B	7.774.082.691,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**538.620.874,00**		**573.810.493,00**		**587.221.307,00**		**577.923.968,00**		**608.823.860,00**		**877.017.179,00**		**674.860.071,00**	**Kecamatan Dramaga**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	87	-	100	-	100	587.221.307,00	100	577.923.968,00	100	608.823.860,00	100	877.017.179,00	100	674.860.071,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				635.221.008,00		582.350.189,00		635.867.790,00		625.800.243,00		659.259.938,00		689.987.199,00		735.902.752,00	Kecamatan Dramaga
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	93,00	-	100	-	100	635.867.790,00	100	625.800.243,00	100	659.259.938,00	100	689.987.199,00	100	735.902.752,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				54.096.475,00		97.020.000,00		99.287.503,00		97.715.507,00		102.940.067,00		107.737.972,00		114.907.451,00	Kecamatan Dramaga
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100	-	100	-	100	99.287.503,00	100	97.715.507,00	100	102.940.067,00	100	107.737.972,00	100	114.907.451,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		%		84.488.733,00		91.933.296,00		287.823.747,00		283.266.700,00		298.412.136,00		312.320.743,00		333.104.288,00	Kecamatan Dramaga
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100	-	100	-	100	287.823.747,00	100	283.266.700,00	100	298.412.136,00	100	312.320.743,00	100	333.104.288,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				219.352.649,00		307.101.110,00		329.629.097,00		501.144.282,00		325.840.125,00		532.880.572,00		753.474.165,00	Kecamatan Dramaga
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	91	-	100	-	100	329.629.097,00	100	501.144.282,00	100	325.840.125,00	100	532.880.572,00	100	753.474.165,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.31	**KECAMATAN TAMANSARI**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				6.041.198.797,00		5.897.711.891,00		7.431.267.715,00		7.131.150.213,00		7.363.111.673,00		7.423.311.830,00		7.750.451.906,00	Kecamatan Tamansari
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	B	7.431.267.715,00	B	7.131.150.213,00	B	7.363.111.673,00	B	7.423.311.830,00	B	7.750.451.906,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				904.817.893,00		881.683.930,00		1.072.019.087,00		1.028.724.765,00		1.062.187.038,00		1.070.871.387,00		1.118.063.928,00	Kecamatan Tamansari
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,00	-	100	-	100	1.072.019.087,00	100	1.028.724.765,00	100	1.062.187.038,00	100	1.070.871.387,00	100	1.118.063.928,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				415.007.279,00		385.783.686,00		482.040.974,00		462.573.376,00		477.619.925,00		481.524.903,00		502.745.364,00	Kecamatan Tamansari
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	93,00	-	100	-	100	482.040.974,00	100	462.573.376,00	100	477.619.925,00	100	481.524.903,00	100	502.745.364,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				84.090.264,00		121.871.284,00		104.865.615,00		100.630.535,00		103.903.837,00		104.753.346,00		109.369.751,00	Kecamatan Tamansari
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	-	100	-	100	104.865.615,00	100	100.630.535,00	100	103.903.837,00	100	104.753.346,00	100	109.369.751,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				45.096.591,00		52.915.109,00		63.581.634,00		61.013.840,00		62.998.494,00		63.513.564,00		66.312.562,00	Kecamatan Tamansari
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100,00	-	100	-	100	63.581.634,00	100	61.013.840,00	100	62.998.494,00	100	63.513.564,00	100	66.312.562,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				131.798.256,00		164.882.470,00		199.392.573,00		191.339.948,00		197.563.838,00		199.179.103,00		207.956.785,00	Kecamatan Tamansari
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99,00	-	100	-	100	199.392.573,00	100	191.339.948,00	100	197.563.838,00	100	199.179.103,00	100	207.956.785,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.32	**KECAMATAN KLAPANUNGGAL**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				5.821.592.916,00		5.953.504.197,00		7.448.668.129,00		7.679.817.716,00		8.475.693.751,00		9.293.150.927,00		10.383.547.890,00	Kecamatan Klapanunggal
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	B	7.448.668.129,00	B	7.679.817.716,00	B	8.475.693.751,00	B	9.293.150.927,00	B	10.383.547.890,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				1.126.980.578,00		1.195.934.635,00		1.314.732.242,00		1.355.531.457,00		1.496.008.099,00		1.640.293.934,00		1.832.755.193,00	Kecamatan Klapanunggal

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	-	100	-	100	1.314.732.242,00	100	1.355.531.457,00	100	1.496.008.099,00	100	1.640.293.934,00	100	1.832.755.193,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**532.048.554,00**		**429.035.677,00**		**519.144.583,00**		**535.254.854,00**		**590.724.466,00**		**647.698.204,00**		**723.694.834,00**	**Kecamatan Klapanunggal**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	93,00	-	100	-	100	519.144.583,00	100	535.254.854,00	100	590.724.466,00	100	647.698.204,00	100	723.694.834,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**128.840.274,00**		**116.990.332,00**		**213.276.756,00**		**219.895.232,00**		**242.683.449,00**		**266.089.595,00**		**297.310.791,00**	**Kecamatan Klapanunggal**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100	-	100	-	100	213.276.756,00	100	219.895.232,00	100	242.683.449,00	100	266.089.595,00	100	297.310.791,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**56.419.785,00**		**83.542.677,00**		**99.044.256,00**		**102.117.830,00**		**112.700.521,00**		**123.570.174,00**		**138.069.082,00**	**Kecamatan Klapanunggal**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99,00	-	100	-	100	99.044.256,00	100	102.117.830,00	100	112.700.521,00	100	123.570.174,00	100	138.069.082,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**188.744.900,00**		**499.412.321,00**		**315.786.571,00**		**325.586.166,00**		**359.327.361,00**		**393.983.490,00**		**440.210.911,00**	**Kecamatan Klapanunggal**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99,00	-	100	-	100	315.786.571,00	100	325.586.166,00	100	359.327.361,00	100	393.983.490,00	100	440.210.911,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.33	**KECAMATAN CISEENG**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**4.413.165.965,00**		**6.153.871.467,00**		**8.180.129.926,00**		**7.323.889.334,00**		**7.562.120.196,00**		**7.623.947.429,00**		**10.354.308.272,00**	**Kecamatan Ciseeng**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	8.180.129.926,00	BB	7.323.889.334,00	BB	7.562.120.196,00	BB	7.623.947.429,00	BB	10.354.308.272,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**959.835.799,00**		**1.098.579.461,00**		**986.893.426,00**		**1.017.519.037,00**		**1.122.966.724,00**		**1.231.273.753,00**		**1.410.506.349,00**	**Kecamatan Ciseeng**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100,00	-	100	-	100	986.893.426,00	100	1.017.519.037,00	100	1.122.966.724,00	100	1.231.273.753,00	100	1.410.506.349,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**456.158.947,00**		**347.144.181,00**		**444.613.983,00**		**458.411.395,00**		**505.917.554,00**		**554.711.900,00**		**619.798.131,00**	**Kecamatan Ciseeng**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	-	100	-	100	444.613.983,00	100	458.411.395,00	100	505.917.554,00	100	554.711.900,00	100	619.798.131,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**39.246.609,00**		**102.867.562,00**		**124.462.186,00**		**128.324.539,00**		**141.623.087,00**		**155.282.241,00**		**173.502.034,00**	**Kecamatan Ciseeng**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	97,96	-	100	-	100	124.462.186,00	100	128.324.539,00	100	141.623.087,00	100	155.282.241,00	100	173.502.034,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**182.310.970,00**		**116.020.699,00**		**187.583.331,00**		**193.404.480,00**		**213.447.403,00**		**234.033.813,00**		**261.493.796,00**	**Kecamatan Ciseeng**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	95,08	-	100	-	100	187.583.331,00	100	193.404.480,00	100	213.447.403,00	100	234.033.813,00	100	261.493.796,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**166.181.380,00**		**289.922.384,00**		**252.151.574,00**		**547.738.913,00**		**286.918.344,00**		**314.590.823,00**		**643.817.751,00**	**Kecamatan Ciseeng**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	-	100	-	100	252.151.574,00	100	547.738.913,00	100	286.918.344,00	100	314.590.823,00	100	643.817.751,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.34	**KECAMATAN RANCABUNGUR**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**4.141.131.281,00**		**4.979.872.229,00**		**7.088.514.806,00**		**7.308.487.993,00**		**8.065.882.330,00**		**8.843.814.330,00**		**9.881.489.104,00**	**Kecamatan Rancabungur**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	7.088.514.806,00	BB	7.308.487.993,00	BB	8.065.882.330,00	BB	8.843.814.330,00	BB	9.881.489.104,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**540.825.309,00**		**677.573.539,00**		**1.299.677.221,00**		**1.340.009.244,00**		**1.478.877.285,00**		**1.621.510.901,00**		**1.811.768.283,00**	**Kecamatan Rancabungur**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	93,00	-	100	-	100	1.299.677.221,00	100	1.340.009.244,00	100	1.478.877.285,00	100	1.621.510.901,00	100	1.811.768.283,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**327.303.214,00**		**374.547.473,00**		**616.967.847,00**		**636.113.802,00**		**702.035.644,00**		**769.745.036,00**		**860.061.836,00**	**Kecamatan Rancabungur**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,00	-	100	-	100	616.967.847,00	100	636.113.802,00	100	702.035.644,00	100	769.745.036,00	100	860.061.836,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**28.651.148,00**		**114.269.331,00**		**115.021.615,00**		**118.591.004,00**		**130.880.845,00**		**143.503.940,00**		**160.341.745,00**	**Kecamatan Rancabungur**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	-	100	-	100	115.021.615,00	100	118.591.004,00	100	130.880.845,00	100	143.503.940,00	100	160.341.745,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**269.542.014,00**		**46.709.928,00**		**199.866.657,00**		**206.068.986,00**		**227.424.359,00**		**249.358.808,00**		**278.616.924,00**	**Kecamatan Rancabungur**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	98,00	-	100	-	100	199.866.657,00	100	206.068.986,00	100	227.424.359,00	100	249.358.808,00	100	278.616.924,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**201.474.700,00**		**230.403.035,00**		**613.418.204,00**		**632.454.005,00**		**697.996.575,00**		**765.316.410,00**		**855.113.584,00**	**Kecamatan Rancabungur**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	91,00	-	100	-	100	613.418.204,00	100	632.454.005,00	100	697.996.575,00	100	765.316.410,00	100	855.113.584,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.35	**KECAMATAN SUKAJAYA**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.989.258.196,00**		**7.108.647.522,00**		**7.580.715.498,00**		**7.815.962.823,00**		**8.625.947.869,00**		**9.457.896.639,00**		**10.567.623.775,00**	**Kecamatan Sukajaya**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	BB	-	BB	7.580.715.498,00	BB	7.815.962.823,00	BB	8.625.947.869,00	BB	9.457.896.639,00	BB	10.567.623.775,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**842.758.800,00**		**968.529.832,00**		**883.355.733,00**		**910.768.327,00**		**1.005.153.208,00**		**1.102.097.450,00**		**1.231.410.287,00**	**Kecamatan Sukajaya**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,32	-	100	-	100	883.355.733,00	100	910.768.327,00	100	1.005.153.208,00	100	1.102.097.450,00	100	1.231.410.287,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**470.335.625,00**		**510.433.450,00**		**534.921.453,00**		**551.521.316,00**		**608.676.657,00**		**667.381.834,00**		**745.688.011,00**	**Kecamatan Sukajaya**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,79	-	100	-	100	534.921.453,00	100	551.521.316,00	100	608.676.657,00	100	667.381.834,00	100	745.688.011,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**54.000.000,00**		**120.225.350,00**		**111.809.604,00**		**115.279.318,00**		**127.225.962,00**		**139.496.553,00**		**155.864.158,00**	**Kecamatan Sukajaya**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	-	100	-	100	111.809.604,00	100	115.279.318,00	100	127.225.962,00	100	139.496.553,00	100	155.864.158,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**126.219.300,00**		**212.621.780,00**		**268.714.049,00**		**277.052.874,00**		**305.764.460,00**		**335.254.595,00**		**374.591.155,00**	**Kecamatan Sukajaya**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100,00	-	100	-	100	268.714.049,00	100	277.052.874,00	100	305.764.460,00	100	335.254.595,00	100	374.591.155,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**258.774.151,00**		**528.601.050,00**		**579.315.129,00**		**597.292.632,00**		**659.191.353,00**		**722.768.533,00**		**807.573.419,00**	**Kecamatan Sukajaya**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	97,30	-	100	-	100	579.315.129,00	100	597.292.632,00	100	659.191.353,00	100	722.768.533,00	100	807.573.419,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.36	**KECAMATAN TANJUNGSARI**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**11.873.658.710,00**		**4.778.551.607,00**		**6.504.548.873,00**		**6.706.400.232,00**		**7.401.398.919,00**		**8.115.243.336,00**		**9.067.432.400,00**	**Kecamatan Tanjungsari**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	100,00	6.504.548.873,00	100,00	6.706.400.232,00	100,00	7.401.398.919,00	100,00	8.115.243.336,00	100,00	9.067.432.400,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**688.972.068,00**		**652.623.562,00**		**762.590.234,00**		**786.255.192,00**		**867.736.510,00**		**951.427.292,00**		**1.063.061.488,00**	**Kecamatan Tanjungsari**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100,00	-	100	-	100	762.590.234,00	100	786.255.192,00	100	867.736.510,00	100	951.427.292,00	100	1.063.061.488,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**458.906.562,00**		**413.851.619,00**		**510.834.052,00**		**526.686.427,00**		**581.268.074,00**		**637.329.769,00**		**712.109.836,00**	**Kecamatan Tanjungsari**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92,00	-	100	-	100	510.834.052,00	100	526.686.427,00	100	581.268.074,00	100	637.329.769,00	100	712.109.836,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**63.587.672,00**		**134.699.194,00**		**138.153.549,00**		**142.440.777,00**		**157.202.221,00**		**172.363.939,00**		**192.587.986,00**	**Kecamatan Tanjungsari**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	-	100	-	100	138.153.549,00	100	142.440.777,00	100	157.202.221,00	100	172.363.939,00	100	192.587.986,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**137.544.299,00**		**235.452.250,00**		**242.505.434,00**		**250.030.945,00**		**275.942.190,00**		**302.556.049,00**		**338.055.978,00**	**Kecamatan Tanjungsari**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99,00	-	100	-	100	242.505.434,00	100	250.030.945,00	100	275.942.190,00	100	302.556.049,00	100	338.055.978,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**221.863.322,00**		**292.076.970,00**		**328.487.849,00**		**338.681.595,00**		**373.779.898,00**		**409.829.933,00**		**457.916.671,00**	**Kecamatan Tanjungsari**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	-	100	-	100	328.487.849,00	100	338.681.595,00	100	373.779.898,00	100	409.829.933,00	100	457.916.671,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.37	**KECAMATAN TAJURHALANG**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**4.795.381.686,00**		**17.095.960.041,00**		**12.152.324.797,00**		**17.064.177.347,00**		**17.619.239.486,00**		**17.763.292.848,00**		**18.546.108.537,00**	**Kecamatan Tajurhalang**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	BB	12.152.324.797,00	BB	17.064.177.347,00	BB	17.619.239.486,00	BB	17.763.292.848,00	BB	18.546.108.537,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**807.895.924,00**		**1.216.431.074,00**		**1.185.507.333,00**		**1.099.164.524,00**		**1.134.918.056,00**		**1.144.197.047,00**		**1.194.620.997,00**	**Kecamatan Tajurhalang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,37	-	100	-	100	1.185.507.333,00	100	1.099.164.524,00	100	1.134.918.056,00	100	1.144.197.047,00	100	1.194.620.997,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**316.327.264,00**		**524.028.474,00**		**683.053.378,00**		**620.109.605,00**		**640.280.478,00**		**645.515.355,00**		**673.962.758,00**	**Kecamatan Tajurhalang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92,12	-	100	-	100	683.053.378,00	100	620.109.605,00	100	640.280.478,00	100	645.515.355,00	100	673.962.758,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**60.234.847,00**		**130.036.884,00**		**146.342.125,00**		**136.324.812,00**		**140.759.174,00**		**141.910.009,00**		**148.163.882,00**	**Kecamatan Tajurhalang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	-	100	-	100	146.342.125,00	100	136.324.812,00	100	140.759.174,00	100	141.910.009,00	100	148.163.882,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**42.332.466,00**		**111.767.878,00**		**150.435.611,00**		**139.853.253,00**		**144.402.389,00**		**145.583.010,00**		**151.998.749,00**	**Kecamatan Tajurhalang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100,00	-	100	-	100	150.435.611,00	100	139.853.253,00	100	144.402.389,00	100	145.583.010,00	100	151.998.749,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**144.118.309,00**		**494.109.964,00**		**532.153.182,00**		**488.461.609,00**		**504.350.248,00**		**508.473.771,00**		**530.881.849,00**	**Kecamatan Tajurhalang**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	-	100	-	100	532.153.182,00	100	488.461.609,00	100	504.350.248,00	100	508.473.771,00	100	530.881.849,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.38	**KECAMATAN CIGOMBONG**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**4.914.266.469,00**		**17.514.945.754,00**		**5.906.758.324,00**		**5.764.796.209,00**		**5.952.313.019,00**		**6.000.978.610,00**		**6.265.437.472,00**	**Kecamatan Cigombong**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	BB	5.906.758.324,00	BB	5.764.796.209,00	BB	5.952.313.019,00	A	6.000.978.610,00	A	6.265.437.472,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**625.354.484,00**		**905.355.618,00**		**646.721.080,00**		**841.677.428,00**		**869.055.442,00**		**876.160.764,00**		**914.772.546,00**	**Kecamatan Cigombong**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,57	-	100	-	100	646.721.080,00	100	841.677.428,00	100	869.055.442,00	100	876.160.764,00	100	914.772.546,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**509.455.307,00**		**442.415.875,00**		**377.541.985,00**		**329.967.590,00**		**340.700.749,00**		**343.486.288,00**		**358.623.485,00**	**Kecamatan Cigombong**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	93,36	-	100	-	100	377.541.985,00	100	329.967.590,00	100	340.700.749,00	100	343.486.288,00	100	358.623.485,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**111.368.732,00**		**171.594.974,00**		**98.268.271,00**		**203.286.625,00**		**209.899.115,00**		**211.615.233,00**		**220.940.965,00**	**Kecamatan Cigombong**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,20	-	100	-	100	98.268.271,00	100	203.286.625,00	100	209.899.115,00	100	211.615.233,00	100	220.940.965,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**63.003.825,00**		**206.439.482,00**		**82.806.514,00**		**233.067.642,00**		**240.648.845,00**		**242.616.370,00**		**253.308.301,00**	**Kecamatan Cigombong**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99,39	-	100	-	100	82.806.514,00	100	233.067.642,00	100	240.648.845,00	100	242.616.370,00	100	253.308.301,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**377.536.052,00**		**574.295.740,00**		**488.909.809,00**		**838.658.021,00**		**865.937.819,00**		**873.017.651,00**		**911.490.918,00**	**Kecamatan Cigombong**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	98,85	-	100	-	100	488.909.809,00	100	838.658.021,00	100	865.937.819,00	100	873.017.651,00	100	911.490.918,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.39	**KECAMATAN LEUWISADENG**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**12.334.679.891,00**		**5.405.095.609,00**		**9.795.302.135,00**		**8.562.718.166,00**		**8.845.011.459,00**		**8.918.988.769,00**		**9.269.424.039,00**	**Kecamatan Leuwisadeng**
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	-	B	-	BB	9.795.302.135,00	BB	8.562.718.166,00	BB	8.845.011.459,00	BB	8.918.988.769,00	BB	9.269.424.039,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**657.713.892,00**		**646.822.796,00**		**853.003.174,00**		**615.894.699,00**		**636.199.344,00**		**641.520.344,00**		**666.726.269,00**	**Kecamatan Leuwisadeng**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,99	-	100	-	100	853.003.174,00	100	615.894.699,00	100	636.199.344,00	100	641.520.344,00	100	666.726.269,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**345.768.276,00**		**421.342.554,00**		**465.035.362,00**		**682.642.034,00**		**697.663.350,00**		**700.564.043,00**		**722.152.699,00**	**Kecamatan Leuwisadeng**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,6	-	100	-	100	465.035.362,00	100	682.642.034,00	100	697.663.350,00	100	700.564.043,00	100	722.152.699,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**71.653.368,00**		**146.082.867,00**		**223.478.752,00**		**184.157.721,00**		**190.228.981,00**		**191.820.004,00**		**199.356.789,00**	**Kecamatan Leuwisadeng**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,89	-	100	-	100	223.478.752,00	100	184.157.721,00	100	190.228.981,00	100	191.820.004,00	100	199.356.789,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**34.857.298,00**		**45.661.245,00**		**35.459.822,00**		**858.015.894,00**		**886.302.721,00**		**893.715.520,00**		**928.830.424,00**	**Kecamatan Leuwisadeng**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	94,59	-	100	-	100	35.459.822,00	100	858.015.894,00	100	886.302.721,00	100	893.715.520,00	100	928.830.424,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**269.946.418,00**		**310.698.079,00**		**359.477.917,00**		**350.941.254,00**		**362.510.987,00**		**365.542.932,00**		**379.905.450,00**	**Kecamatan Leuwisadeng**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	98,41	-	100	-	100	359.477.917,00	100	350.941.254,00	100	362.510.987,00	100	365.542.932,00	100	379.905.450,00	
									-		-		-		-		-	
7.01.40	**KECAMATAN TENJOLAYA**								-		-		-		-		-	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5.442.917.314,00**		**5.918.132.670,00**		**21.260.631.129,00**		**8.632.000.000,00**		**6.876.500.000,00**		**7.335.000.000,00**		**7.500.000.000,00**	**Kecamatan Tenjolaya**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	21.260.631.129,00	BB	8.632.000.000,00	BB	6.876.500.000,00	BB	7.335.000.000,00	BB	7.500.000.000,00	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**809.794.875,00**		**767.963.908,00**		**342.535.963,00**		**328.702.383,00**		**339.394.387,00**		**342.169.245,00**		**357.248.401,00**	**Kecamatan Tenjolaya**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	96,27	-	100	-	100	342.535.963,00	100	328.702.383,00	100	339.394.387,00	100	342.169.245,00	100	357.248.401,00	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**353.653.444,00**		**350.947.546,00**		**128.720.025,00**		**130.746.869,00**		**127.539.467,00**		**128.582.218,00**		**134.248.745,00**	**Kecamatan Tenjolaya**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92,60	-	100	-	100	128.720.025,00	100	130.746.869,00	100	127.539.467,00	100	128.582.218,00	100	134.248.745,00	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**26.013.460,00**		**85.001.114,00**		**47.600.786,00**		**45.678.391,00**		**47.164.214,00**		**47.549.825,00**		**49.645.312,00**	**Kecamatan Tenjolaya**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	98,89	-	100	-	100	47.600.786,00	100	45.678.391,00	100	47.164.214,00	100	47.549.825,00	100	49.645.312,00	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**88.022.268,00**		**109.410.183,00**		**316.251.269,00**		**303.479.217,00**		**313.350.764,00**		**315.912.692,00**		**329.834.740,00**	**Kecamatan Tenjolaya**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	97,93	-	100	-	100	316.251.269,00	100	303.479.217,00	100	313.350.764,00	100	315.912.692,00	100	329.834.740,00	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**198.878.917,00**		**449.578.391,00**		**389.187.454,00**		**373.469.818,00**		**385.618.013,00**		**388.770.792,00**		**405.903.644,00**	**Kecamatan Tenjolaya**
	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	98,28	-	100	-	100	389.187.454,00	100	373.469.818,00	100	385.618.013,00	100	388.770.792,00	100	405.903.644,00	
									-		-		-		-		-	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								-		-		-		-		-	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**										-		-		-		-	
8.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**11.301.493.391,00**		**13.347.470.377,00**		**15.027.513.086,00**		**19.589.830.145,00**		**21.976.562.731,00**		**24.008.108.355,00**		**30.294.706.597,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	-	BB	15.027.513.086,00	BB	19.589.830.145,00	BB	21.976.562.731,00	BB	24.008.108.355,00	BB	30.294.706.597,00	
8.01.02	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**4.842.096.710,00**		**5.438.384.930,00**		**6.576.209.078,00**		**6.368.152.229,00**		**7.108.318.463,00**		**7.682.577.360,00**		**11.730.860.957,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	Terciptanya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	%	0,4253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	-	-	0,5196	-	0,7794	6.576.209.078,00	1,0393	6.368.152.229,00	1,2991	7.108.318.463,00	1,5589	7.682.577.360,00	1,8187	11.730.860.957,00	
8.01.03	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**				**179.229.578.051,00**		**77.854.132.976,00**		**74.006.107.333,00**		**106.324.597.952,00**		**119.512.875.619,00**		**131.104.283.979,00**		**152.074.321.207,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	Meningkatnya Pemahaman tentang Politik serta Etika dan Budaya Politik	Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	0,4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		-	-	0,6626	-	1,2149	74.006.107.333,00	2,3193	106.324.597.952,00	3,4237	119.512.875.619,00	4,5281	131.104.283.979,00	5,6325	152.074.321.207,00	
8.01.04	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**5.498.797.386,00**		**4.399.364.704,00**		**5.180.639.068,00**		**5.843.494.778,00**		**6.518.322.610,00**		**7.034.754.026,00**		**10.994.217.696,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi	Tingkat Bina Ormas	%	0,103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	-	-	55,27	-	55,61	5.180.639.068,00	55,98	5.843.494.778,00	56,20	6.518.322.610,00	56,62	7.034.754.026,00	56,90	10.994.217.696,00	
8.01.05	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**				**1.461.583.170,00**		**1.076.247.957,00**		**2.040.909.020,00**		**2.080.374.210,00**		**2.286.560.487,00**		**2.388.222.634,00**		**5.710.622.845,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	%	0,1183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	-	-	0,3743	-	0,5183	2.040.909.020,00	0,6623	2.080.374.210,00	0,8063	2.286.560.487,00	0,9502	2.388.222.634,00	1,0942	5.710.622.845,00	
8.01.06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**				**4.176.002.334,00**		**4.305.726.270,00**		**9.681.453.803,00**		**4.303.489.282,00**		**4.786.531.953,00**		**5.133.224.705,00**		**8.831.978.857,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				REALISASI	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik yang Tertangani melalui Koordinasi Pimpinan Daerah	Konflik	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tercapainya peran dan sinergitas kewaspadaan dini di daerah antar pemerintah dengan lembaga/ masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani di daerah	%	-	-	5,26	-	10,53	9.681.453.803,00	15,79	4.303.489.282,00	21,05	4.786.531.953,00	26,32	5.133.224.705,00	31,58	8.831.978.857,00	
TOTAL ANGGARAN					**11.114.545.400.331,00**		**11.899.442.507.505,00**		**12.233.428.596.921,000**		**12.991.007.709.360,10**		**13.560.758.954.301,70**		**14.331.012.452.880,00**		**15.282.877.541.907,00**	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2025, diolah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bogor menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah yang ditinjau dari indikator-indikator kinerja yang representatif. Terdapat 2 (dua) indikator yang dapat menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu:

1. indikator kinerja utama (IKU), yaitu indikator terseleksi untuk menggambarkan keberhasilan kinerja pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi daerah.
2. indikator kinerja daerah (IKD), yaitu indikator terseleksi untuk menggambarkan kinerja daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Terdapat 5 (lima) tujuan dengan 5 (lima) indikator tujuan, dan 11 (sebelas) sasaran dengan 16 (enam belas) indikator kinerja sasaran yang menjadi kinerja dan indikator kinerja utama daerah sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025-2030

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	**Poin**	**86,15**	**86,85**	**87,12**	**88,18**	**89,46**	**90,94**	**91,74**
Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,38	4,4	4,42	4,46	4,48	4,5	4,5
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	4,10	4,10	1,70	1,80	1,90	2,00	2,00
Nilai SAKIP	Predikat	B (69,38)	B (69,80)	BB (70,09)	BB (70,25)	BB (70,6)	BB (71,5)	BB (72,3)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	**%**	**5,21**	**5,15 - 5,81**	**5,30 – 5,30**	**5,86 - 6,36**	**6,00 - 6,50**	**6,15 - 6,65**	**6,75 - 7,25**
PDRB ADHB	Juta Rupiah	311.713.180	316.462.692	353.491.524	351.672.674	369.884.571	388.543.969	406.998.603
Indeks Ketahanan Pangan	Poin	72,95	73,65	74,62	75,59	76,56	77,53	78,5
Indeks Ketimpangan Williamson	Poin	0,967	0,955	0,945	0,936	0,926	0,917	0,907
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**Poin**	**59,47**	**59,26**	**59,36**	**59,45**	**59,54**	**59,64**	**59,73**
Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2eq/Milyar Rupiah	-	0,55	0,75	0,97	1,26	1,59	1,83
Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Poin	101,72	101	98	96	95	93	92
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**Poin**	**73,63**	**74,02**	**74,56**	**75,09**	**75,67**	**76,23**	**76,89**
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,39	8,46	8,5	8,54	8,59	8,63	8,67
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,75	12,78	12,81	12,84	12,87	12,9	12,93
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,9	75,34	75,67	76,01	76,35	76,69	77,03

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,17	90,35	90,51	90,65	90,76	90,83	90,88
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	54,41	54,44	54,47	54,50	54,53	54,56	54,59
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	55,50	55,75	56,00	56,25	56,50	56,75	57,00
Rasio Gini	**Poin**	**0,398**	**0,364-0,371**	**0,377 – 0,377**	**0,354-0,377**	**0,353-0,376**	**0,352-0,375**	**0,351-0,374**
Tingkat Kemiskinan	%	7,05	6,39 - 7,05	6,40 – 6,40	5,96 - 6,51	5,7 - 6,25	5,41 - 5,95	5,09 - 5,64
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,34	7,17-7,79	6,92 – 6,92	6,68-7,30	6,44-7,06	6,19-6,81	5,95-6,57

Sumber : Bappedalitbang, 2025, diolah

Sebagaimana indikator kinerja utama daerah, sasaran daerah dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun indikator kinerja utama perangkat daerah dijabarkan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya pendidikan dasar yang berkualitas dan merata **A. Cakupan penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan dasar**	**%**	**96,21**	**97,72**	**97,79**	**97,84**	**97,91**	**97,99**	**98,02**	**Dinas Pendidikan**
1. Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar a. Indeks Rapor Pendidikan	Poin	72,79	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	Dinas Pendidikan
Meningkatnya kualitas Kesehatan **A. Usia Harapan Hidup (UHH)**	**Tahun**	**74,90**	**75,34**	**75,67**	**76,01**	**76,35**	**76,69**	**77,03**	**Dinas Kesehatan**
1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan a. Jumlah kematian ibu	orang	105	100	93	86	80	74	68	Dinas Kesehatan
b. Jumlah kematian bayi	orang	842	794	746	698	650	602	554	Dinas Kesehatan
c. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	-	10	30	50	65	80	90	Dinas Kesehatan
d. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	%	86	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
e. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	96,23	98,12	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan cakupan infrastruktur pekerjaan umum yang merata serta tertib penataan ruang **A. Persentase kualitas dan cakupan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang**	**%**	**56,17**	**57,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
1. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur jalan kabupaten yang berkualitas a. Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	82,52	86,71	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi dan sumber daya air a. Persentase luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	%	58,90	59,15	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Meningkatnya cakupan layanan jasa konstruksi a. Persentase Cakupan Pelayanan Jasa Konstruksi	%	72,00	72,00	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Meningkatnya akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan a. Persentase akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan	%	15,47	17,03	–	–	–	–	–	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Meningkatnya akses rumah tangga dengan akses sanitasi aman dan layak a. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman dan layak	%	33,94	34,20	–	–	–	–	–	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6. Meningkatnya akses infrastruktur lingkungan a. Persentase luas kawasan genangan yang tertangani infrastruktur drainase	%	56,93	65,29	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Terwujudnya tata ruang kabupaten bogor yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing a. Persentase kesesuaian pemanfatan ruang	%	69,36	69,50	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur pekerjaan umum **A. Persentase kualitas infrastruktur pekerjaan umum yang berkualitas**	**%**	**-**	**-**	**74,06**	**74,17**	**75,61**	**75,71**	**77,15**	**Dinas Pekerjaan Umum**
1. Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Jalan Kabupaten Yang Berkualitas a. Persentase jalan mantap	%	-	-	86,77	86,85	86,92	86,99	87,06	Dinas Pekerjaan Umum
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi dan sumberdaya air a. Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik dan sedang	%	-	-	59,40	59,65	59,90	60,15	60,40	Dinas Pekerjaan Umum

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3. Meningkatnya cakupan layanan jasa konstruksi b. Persentase cakupan pelayanan jasa konstruksi	%	-	-	76,00	76,00	80,00	80,00	84,00	Dinas Pekerjaan Umum
Terwujudnya permukiman layak, infrastruktur permukiman dan tata kelola pertanahan yang berkualitas **A. Persentase kualitas dan cakupan kawasan permukiman dan pertanahan**	**%**	**-**	**68,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman a. Persentase Kawasan Permukiman Layak	**%**	99,57	99,80	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	46,94	48,40	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Meningkatnya tata kelola administrasi dan pemanfaatan pertanahan a. Persentase aset pemda yang didaftarkan sertifikasi	%	79,86	58,41	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Terwujudnya kawasan permukiman layak dan berkualitas **A. Persentase kawasan permukiman layak dan berkualitas**	**%**	**-**	**-**	57,62	58,79	59,97	61,14	62,30	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman a. Persentase Kawasan Permukiman Layak	**%**	-	-	99,85	99,88	99,95	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
b. Persentase Akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan	**%**	-	-	19,43	20,28	21,12	21,95	22,77	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
c. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman dan layak	**%**	-	-	42,30	42,46	42,63	42,81	43,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
d. Persentase luas kawasan rawan genangan yang tertangani infrastruktur drainase	%	-	-	68,92	72,55	76,18	79,80	83,43	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Trantibumlinmas **A. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (sub urusan trantibum dan linmas)**	**Poin**	**-**	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**	**80**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1. Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah a. Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Poin	-	75	76	77	78	79	80	Satuan Polisi Pamong Praja
Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana **A. Indeks Bencana**	**Poin**	**84,06**	**86**	**88**	**89**	**90**	**91**	**92**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1. Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana a. Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6	0,61	0,62	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran **A. Indeks Sub Urusan Kebakaran**	**Poin**	**75**	**78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pemadam Kebakaran**
1. Terpenuhinya target waktu tanggap (response time) maksimal 15 menit pada seluruh kejadian kebakaran di Wilayah Pelayanan guna meminimalkan kerugian jiwa dan harta benda a. *Response Time* pada Wilayah Kabupaten Bogor	Menit	15	15	-	-	-	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran
Terwujudnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran **A. Indeks Sub Urusan Kebakaran**	**Poin**	-	-	**81**	**83**	**85**	**87**	**89**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Meningkatnya penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran a. *Response Time* penanganan kebakaran pada Wilayah Kabupaten Bogor	Menit	-	-	15	15	14,5	14	13,5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
b. Persentase pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	%	-	-	90	91	92	93	94	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) **A. Cakupan pelayanan PPKS yang mendapatkan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi**	**%**	**20,61**	**21,72**	**22,96**	**25,05**	**27,15**	**29,24**	**31,34**	**Dinas Sosial**
1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) a. Persentase PPKS yang menjadi kewenangan terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	41,22	41,72	42,22	42,72	43,22	43,72	44,22	Dinas Sosial
2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga sasaran graduasi kemiskinan a. Persentase jumlah sasaran keluarga graduasi miskin yang dapat melakukan usaha	%	-	3,70	7,40	11,10	14,80	18,50	22,20	Dinas Sosial
Meningkatnya pembangunan ketenagakerjaan **A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**	**%**	**66,3**	**66,75**	**67,22**	**67,48**	**67,66**	**67,91**	**68,24**	**Dinas Tenaga Kerja**
1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja a. Persentase penyerapan tenaga kerja	%	92,66	92,71	92,75	92,81	92,87	92,92	92,99	Dinas Tenaga Kerja
2. Meningkatnya jumlah kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang terlaksana di Kabupaten Bogor a. Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana									
A. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	**Poin**	**0,5836**	**0,5750**	**0,5720**	**0,5680**	**0,5650**	**0,5620**	**0,5600**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
B. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**Poin**	**63,25**	**63,88**	**64,20**	**64,52**	**64,85**	**65,17**	**65,50**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
C. Angka kelahiran total (TFR)	**Anak**	**1,92**	**1,92**	**1,92**	**1,92**	**1,92**	**1,92**	**1,92**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Kepesertaan Pasangan Usia Susbur (PUS) untuk Ber-KB a. Persentase Perempuan Usia Kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi	%	25,93	35,40	35,93	36,47	37,02	37,57	38,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
b. Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
c. Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR))	%	66,39	60,80	61,60	62,30	63,10	63,80	64,60	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan **A. *Prevalence of Undernourishment* (PoU)**	**Poin**	**5,68**	**5,6**	**5,4**	**5,3**	**5,2**	**5,1**	**5,0**	**Dinas Ketahanan Pangan**
1. Meningkatnya Kualitas pola konsumsi pangan a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	poin	84,9	85,1	85,7	86,3	86,9	87,5	88,1	Dinas Ketahanan Pangan
Terwujudnya tertib tata kelola pertanahan dan penataan ruang yang berkualitas **A. Persentase Kinerja Pengelolaan Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang**	%	-	-	**66,52**	**68,99**	**71,46**	**73,93**	**76,41**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang a. Persentase Kesesuaian Pemanfatan Ruang	%	-	-	70,00	70,32	70,64	70,96	71,28	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2. Meningkatnya tata kelola administrasi dan pemanfaatan pertanahan a. Persentase aset pemda yang didaftarkan sertifikasi	%	-	-	63,04	67,66	72,28	76,90	81,53	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan terpadu **A. Indeks Kualitas Udara (IKU)**	**Poin**	**75,65**	**50,17**	**50,27**	**50,37**	**50,47**	**50,57**	**50,67**	**Dinas Lingkungan Hidup**
B. Indeks Kualitas Air (IKA)	**Poin**	**51,64**	**67,20**	**67,30**	**67,40**	**67,50**	**67,60**	**67,70**	**Dinas Lingkungan Hidup**

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
C. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	**Poin**	**42,97**	**62,45**	**62,52**	**62,59**	**62,66**	**62,73**	**62,80**	**Dinas Lingkungan Hidup**
1. Meningkatnya kualitas air yang baik a. Persentase air permukaan dengan kualitas baik	%	-	39,13	39,71	40,29	40,87	41,45	42,03	Dinas Lingkungan Hidup
2. Menurunnya pencemaran udara a. Persentase penurunan udara yang tercemar	%	-	62.50	50,89	50.00	49,11	48,21	47,32	Dinas Lingkungan Hidup
3. Meningkatnya luasan tutupan lahan hijau a. Persentase luas tutupan lahan hijau	%	23,13	23,14	23,15	23,16	23,17	23,18	23,19	Dinas Lingkungan Hidup
4. Meningkatnya pengelolaan sampah secara kolaboratif yang mendukung pembangunan rendah karbon a. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	-	39,42	40,36	41,29	42,21	43,12	44,01	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan **A. Cakupan Layanan Adminduk**	**%**	**76,54**	**78,5**	**80,75**	**81,74**	**84,17**	**85,7**	**87,63**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil a. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	76,54	78,5	80,75	81,74	84,17	85,7	87,63	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminitsrasi Kependudukan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk	Poin	86,98	88,24	89,36	90,21	91,09	91,98	92,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik **A. Persentase Desa Berstatus Mandiri**	**%**	**41,11**	**48,08**	**50,48**	**52,88**	**55,29**	**57,69**	**60,1**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa**

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pembangunan Desa yang Berkualitas a. Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	%	-	69,71	87,74	90,14	92,55	94,95	97,36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
b. Persentase Sarpras Desa Dalam Kondisi Baik	%	-	89,9	91,11	92,31	93,51	94,71	95,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi **A. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Bogor**	**V/C Ratio (Derajat kejenuhan lalu lintas)**	**33**	**0.504**	**0.499**	**0.494**	**0.489**	**0.484**	**0.479**	**Dinas Perhubungan**
1. Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi yang Berkualitas a. Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkualitas	%	70,50	48,88	55,06	58,38	64,57	67,89	74,08	Dinas Perhubungan
Tercapainya Tata Kelola Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang informatif dan terintegrasi **A. Presentase Capaian Tata kelola penyelenggaran, komunikasi, informatika, persandian dan statistik**	**%**	**77,7**	**78**	**79**	**80**	**81**	**82**	**83**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
1. Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Informatif a. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	%	90,74	91	91,5	92	92,5	93	93,5	Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi a. Persentase Pemenuhan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	86,8	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	92,5	Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Statistik Sektoral a. Indeks Pembangunan Statistik	Poin	2,81	2,85	2,88	2,9	2,92	2,94	2,96	Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi a. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Poin	497	520	530	540	550	560	565	Dinas Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kesempatan Berusaha Bagi Masyarakat **A. Produktivitas Koperasi**	%	**85,79**	**87,22**	**87,58**	**87,94**	**88,33**	**88,74**	**88,78**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
B. Persentase Usaha Mikro Terbina	%	**3,57**	**3,72**	**3,86**	**3,97**	**4,07**	**4,15**	**4,16**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi a. Volume Usaha Koperasi	Rp	469.901.934.624	473.501.934.624	477.201.934.624	480.951.934.624	484.851.934.624	488.851.934.624	490.851.934.624	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Meningkatnya volume penjualan produk usaha mikro a. Rata-rata Omset Usaha Mikro	Rp	55.080.000,00	56.280.000,00	57.550.000,00	58.870.000,00	60.270.000,00	61.730.000,00	63.330.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya Perolehan nilai investasi **A. Perolehan nilai investasi**	**Triliun Rp**	**22,9**	**22,9**	**22,95**	**23,00**	**23,05**	**23,10**	**23,15**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
1. Meningkatnya Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM a. Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan nilai investasi dalam LKPM	%	81	82	83	84	85	86	87	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga **A. Tingkat Partisipasi Pemuda**	**%**	**5,37**	**5,41**	**5,45**	**5,48**	**5,52**	**5,55**	**5,75**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
B. Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	**%**	**26,56**	**26,70**	**27,04**	**27,89**	**30,33**	**31,25**	**32,48**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan a. Persentase Organisasi Pemuda Aktif	%	23,40	24,47	26,60	27,66	28,72	29,79	30,85	Dinas Pemuda dan Olahraga
2. Meningkatnya prestasi atlet a. Persentase atlet berprestasi	%	68,18	68,50	69,00	69,57	71,20	71,25	71,75	Dinas Pemuda dan Olahraga

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
b. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Olahraga di Masyarakat	%	42,50	45,00	47,50	50,00	52,50	55,00	57,50	Dinas Pemuda dan Olahraga
3. Meningkatnya partisipasi berolahraga) a. Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	8,35	8,95	9,95	10,16	10,45	10,95	11,45	Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata **A. Nilai PDRB Sektor Pariwisata**	**Juta Rupiah**	**10.339.320**	**10.506.561**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan a. Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kunjungan	14.789.734	15.000.000	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Meningkatnya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya a. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	%	100	100	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
b. Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	48,28	49,66	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya **A. Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang terdokumentasi dan dilindungi**	**%**	**-**	**-**	**81,41**	**81,94**	**82,46**	**82,98**	**83,51**	**Dinas Kebudayaan**
1. Tercapainya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan a. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	%	-	-	100	100	100	100	100	Dinas Kebudayaan
2. Terlestarikanya Benda Situs dan Cagar Budaya Daerah a. Persentase Benda Situs dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	-	-	51,03	52,41	53,79	55,17	56,55	Dinas Kebudayaan
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata **A. Nilai PDRB Sektor Pariwisata**	**Juta Rupiah**	-	-	**11.735.919**	**11.675.533**	**12.280.168**	**12.899.660**	**13.512.354**	**Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan a. Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kunjungan	-	-	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Meningkatnya Usaha Ekonomi Kreatif a. Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	%	-	-	10,31	11,21	11,76	12,03	12,08	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan dan Budaya Literasi **A. Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip dan Indek Pembangunan Literasi Masyarakat**	**%**	**-**	**92,5**	**94,5**	**96,5**	**98**	**98,5**	**100**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
1. Meningkatnya Budaya Membaca Masyarakat a. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Kategori	65.96 (Sedang)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah a. Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Kategori	AA (Sangat Memuaskan)	AA (Sangat Memuaskan)	AA (Sangat Memuaskan)	AA (Sangat Memuaskan)	AA (Sangat Memuaskan)	AA (Sangat Memuaskan)	AA (Sangat Memuaskan)	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya Produksi Perikanan dan Peternakan **A. Jumlah Produksi Perikanan dan Peternakan**	**Ton**	**660.821,00**	**672.911,00**	**683.909,00**	**695.112,00**	**706.532,00**	**718.153,00**	**729.988,00**	**Dinas Perikanan dan Peternakan**
1. Meningkatnya Produksi Perikanan a. Jumlah Produksi Perikanan	Ton	163.413,00	165.047,00	165.993,00	166.946,00	167.912,00	168.871,00	169.833,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
2. Meningkatnya Produksi Peternakan a. Jumlah Produksi Peternakan	Ton	497.408,00	507.864,00	517.916,00	528.166,00	538.620,00	549.282,00	560.155,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
Meningkatnya konstribusi sektor perdagangan dan Perindustrian **A. Nilai PDRB Perdagangan**	**Miliar Rp**	**30.915,00**	**38,367.00**	**39,134.34**	**39,525.68**	**39,920.94**	**40,320.00**	**40,723.00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
B. Nilai PDRB Industri Pengolahan	**Miliar Rp**	**133.237,00**	**160,985.00**	**162,594.85**	**164,220.80**	**165,863.01**	**167,522.00**	**169,197.00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri a. Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri	Ribu Rp	458.950.900,00	716.696.700,00	723.863.667,00	725.311.394,00	726.762.017,00	728.215.541,00	729.671.972,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2. Meningkatnya nilai ekspor a. Nilai ekspor	USD	1.875.427.336,48	1.875.500.000,00	1.875.550.000,00	1.875.600.000,00	1.875.650.000,00	1.875.700.000,00	1.875.750.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3. Stabilitas harga a. Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten	%	18	17	16	15	14	13	12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4. Kabupaten Bogor memiliki Sentra Industri Kecil Menengah yang ditetapkan a. Sentra Industri Kecil Menengah yang ditetapkan	Sentra	-	10,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya produksi pertanian **A. Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan**	**Ton**	**802.441,00**	**710.189,00**	**713.490,00**	**716.798,00**	**720.112,00**	**723.433,00**	**726.760,00**	**Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**
1. Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan a. Produktivitas pertanian per hektar	Ton/Ha	6.46	7.13	7.16	7.19	7.21	7.24	7.26	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Akuntabel **A. Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik**	**%**	**119,36**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Sekretariat Daerah**
1. Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah a. Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda	%	Belum di publish	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD **A. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat DPRD**	**Poin**	**89,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
B. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	**Poin**	**88,95**	**89,05**	**89,15**	**89,25**	**89,35**	**89,45**	**89,55**	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
1. Terpenuhinya pelayanan Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD a. Persentase agenda DPRD yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas **A. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)**	**Predikat**	**-**	**Baik**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
B. Indeks Riset dan Inovasi Daerah	**Predikat**	**-**	**Sangat Baik**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah a. Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	-	88	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2. Hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan Daerah a. Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan Daerah	%	-	53,85	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas **A. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)**	**Predikat**	**-**	**-**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah**
B. Indeks Riset dan Inovasi Daerah	**Predikat**	**-**	**-**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah**
1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah a. Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	-	-	89	90	91	92	92	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2. Hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan Daerah a. Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan Daerah	%	-	-	64,86	72,22	73,68	78,57	78,57	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel **A. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	**Opini**	**WDP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas a. Tingkat Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	%	93,06	94,44	95,83	95,83	95,83	95,83	97,22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib a. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	%	86,11	90,28	91,67	91,67	93,06	93,06	93,06	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya pendapatan asli daerah **A. Rasio PAD Terhadap APBD**	**%**	**41,50**	**45,13**	**44,51**	**44,17**	**43,24**	**42,42**	**41,56**	**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
1. Meningkatnya pendapatan pajak daerah a. Rasio Pajak Daerah terhadap APBD	%	28,96	33,48	32,33	31,33	30,42	29,47	28,54	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya pendapatan retribusi daerah a. Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD	%	10,65	9,77	10,31	11,07	11,12	11,33	11,47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Terwujudnya ASN yang Profesional **A. Indeks Profesionalitas ASN**	**Poin**	**84,07**	**85**	**85,72**	**86**	**86,5**	**86,75**	**86,8**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit a. Indeks Sistem Merit	Poin	362	369	386	395	410	410	410	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien **A. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**	**Level**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**Inspektorat**

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	4	4	4	Inspektorat
b. Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Level	2	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
c. Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	2	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Cibinong**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Cibinong
2. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	87	88	-	-	-	-	-	Kecamatan Cibinong
3. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cibinong
4. tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cibinong
5. tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cibinong

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Gunung Putri**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Gunung Putri
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,8	0,82	-	-	-	-	-	Kecamatan Gunung Putri
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	88	88,5	-	-	-	-	-	Kecamatan Gunung Putri
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Gunung Putri
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Gunung Putri
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Gunung Putri
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Citeureup**

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Citeureup
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,8	0,81	-	-	-	-	-	Kecamatan Citeureup
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80,7	81	-	-	-	-	-	Kecamatan Citeureup
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Citeureup
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Citeureup
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Citeureup
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Sukaraja**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Sukaraja
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,83	0,84	-	-	-	-	-	Kecamatan Sukaraja

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	83	83	-	-	-	-	-	Kecamatan Sukaraja
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sukaraja
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sukaraja
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sukaraja
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Babakan Madang**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Babakan Madang
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,83	-	-	-	-	-	Kecamatan Babakan Madang
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	90,33	90,5	-	-	-	-	-	Kecamatan Babakan Madang

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Babakan Madang
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Babakan Madang
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Babakan Madang
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Jonggol**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Jonggol
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,8	0,81	-	-	-	-	-	Kecamatan Jonggol
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80	80,5	-	-	-	-	-	Kecamatan Jonggol
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Jonggol

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Jonggol
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Jonggol
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Cileungsi**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Cileungsi
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,82	0,83	-	-	-	-	-	Kecamatan Cileungsi
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	87	87,12	-	-	-	-	-	Kecamatan Cileungsi
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cileungsi
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cileungsi

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cileungsi
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Cariu**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Cariu
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,8	0,81	-	-	-	-	-	Kecamatan Cariu
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	88,44	88,47	-	-	-	-	-	Kecamatan Cariu
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cariu
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cariu
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cariu

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Sukamakmur**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Sukamakmur
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,8	0,81	-	-	-	-	-	Kecamatan Sukamakmur
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	84	84,11	-	-	-	-	-	Kecamatan Sukamakmur
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sukamakmur
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sukamakmur
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sukamakmur
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Parung**

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Parung
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,83	0,84	-	-	-	-	-	Kecamatan Parung
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85,12	85,18	-	-	-	-	-	Kecamatan Parung
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Parung
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Parung
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Parung
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Gunung Sindur**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Gunung Sindur
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,83	-	-	-	-	-	Kecamatan Gunung Sindur

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	86,83	86,93	-	-	-	-	-	Kecamatan Gunung Sindur
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Gunung Sindur
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Gunung Sindur
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Gunung Sindur
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Kemang**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Kemang
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,83	-	-	-	-	-	Kecamatan Kemang
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat	Poin	84	84,21	-	-	-	-	-	Kecamatan Kemang

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Daerah									
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Kemang
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Kemang
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Kemang
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Bojonggede**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Bojonggede
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,8	0,82	-	-	-	-	-	Kecamatan Bojonggede
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	88,54	88,57	-	-	-	-	-	Kecamatan Bojonggede

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Bojonggede
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Bojonggede
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Bojonggede
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Leuwiliang**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Leuwiliang
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,8	0,81	-	-	-	-	-	Kecamatan Leuwiliang
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	87	87,16	-	-	-	-	-	Kecamatan Leuwiliang
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Leuwiliang

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Leuwiliang
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Leuwiliang
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Ciampea**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Ciampea
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,82	-	-	-	-	-	Kecamatan Ciampea
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80	80,26	-	-	-	-	-	Kecamatan Ciampea
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Ciampea
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Ciampea

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Ciampea
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Cibungbulang**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Cibungbulang
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,83	-	-	-	-	-	Kecamatan Cibungbulang
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	92	92,06	-	-	-	-	-	Kecamatan Cibungbulang
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cibungbulang
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cibungbulang
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cibungbulang

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Pamijahan**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Pamijahan
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,8	0,81	-	-	-	-	-	Kecamatan Pamijahan
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80	81	-	-	-	-	-	Kecamatan Pamijahan
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pamijahan
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pamijahan
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pamijahan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Rumpin**

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Rumpin
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,8	0,81	-	-	-	-	-	Kecamatan Rumpin
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	85,5	-	-	-	-	-	Kecamatan Rumpin
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Rumpin
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Rumpin
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Rumpin
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Jasinga**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Jasinga
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,82	-	-	-	-	-	Kecamatan Jasinga

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	85,14	-	-	-	-	-	Kecamatan Jasinga
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Jasinga
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Jasinga
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Jasinga
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Parung Panjang**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	–	–	–	–	–	Kecamatan Parung Panjang
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,83	-	-	-	-	-	Kecamatan Parung Panjang
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80	81,25	–	–	–	–	–	Kecamatan Parung Panjang
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Parung Panjang

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
urusan pemerintahan									
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Parung Panjang
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Parung Panjang
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Nanggung**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Nanggung
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,8	0,81	-	-	-	-	-	Kecamatan Nanggung
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	88	88,14	-	-	-	-	-	Kecamatan Nanggung
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Nanggung
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Nanggung

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
publik di kecamatan									
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Nanggung
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Cigudeg**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Cigudeg
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,8	0,81	-	-	-	-	-	Kecamatan Cigudeg
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	85,13	-	-	-	-	-	Kecamatan Cigudeg
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cigudeg
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cigudeg
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cigudeg

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan									
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Tenjo**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Tenjo
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,82	-	-	-	-	-	Kecamatan Tenjo
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	85,21	-	-	-	-	-	Kecamatan Tenjo
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tenjo
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tenjo
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tenjo
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Ciawi**

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A. Persentase capaian kinerja kecamatan									
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Ciawi
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,83	-	-	-	-	-	Kecamatan Ciawi
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	77,41	77,58	-	-	-	-	-	Kecamatan Ciawi
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Ciawi
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Ciawi
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Ciawi
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Cisarua**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Cisarua

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
kecamatan									
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,82	-	-	-	-	-	Kecamatan Cisarua
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	85,27	-	-	-	-	-	Kecamatan Cisarua
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cisarua
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cisarua
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cisarua
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Megamendung**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Megamendung
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,82	-	-	-	-	-	Kecamatan Megamendung

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	83	83,21	-	-	-	-	-	Kecamatan Megamendung
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Megamendung
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Megamendung
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Megamendung
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Caringin**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Caringin
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,82	-	-	-	-	-	Kecamatan Caringin
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat	Poin	80	81	-	-	-	-	-	Kecamatan Caringin

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Daerah									
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Caringin
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Caringin
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Caringin
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Cijeruk**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Cijeruk
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,8	0,81	-	-	-	-	-	Kecamatan Cijeruk
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	84	84,18	-	-	-	-	-	Kecamatan Cijeruk
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cijeruk

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cijeruk
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cijeruk
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Ciomas**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Ciomas
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,83	-	-	-	-	-	Kecamatan Ciomas
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	85,09	-	-	-	-	-	Kecamatan Ciomas
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Ciomas
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Ciomas

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Ciomas
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Dramaga**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Dramaga
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,82	0,83	-	-	-	-	-	Kecamatan Dramaga
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	88,47	88,52	-	-	-	-	-	Kecamatan Dramaga
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Dramaga
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Dramaga
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Dramaga

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Tamansari**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Tamansari
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,82	-	-	-	-	-	Kecamatan Tamansari
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	89	89,2	-	-	-	-	-	Kecamatan Tamansari
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tamansari
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tamansari
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tamansari
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Klapanunggal**

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Klapanunggal
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,83	-	-	-	-	-	Kecamatan Klapanunggal
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	86	86,18	-	-	-	-	-	Kecamatan Klapanunggal
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Klapanunggal
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Klapanunggal
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Klapanunggal
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Ciseeng**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Ciseeng
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,82	-	-	-	-	-	Kecamatan Ciseeng

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	90	90,17	-	-	-	-	-	Kecamatan Ciseeng
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Ciseeng
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Ciseeng
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Ciseeng
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Rancabungur**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Rancabungur
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,82	0,83	-	-	-	-	-	Kecamatan Rancabungur

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	85,24	-	-	-	-	-	Kecamatan Rancabungur
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Rancabungur
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Rancabungur
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Rancabungur
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Sukajaya**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Sukajaya
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,8	0,81	-	-	-	-	-	Kecamatan Sukajaya
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80	81,02	-	-	-	-	-	Kecamatan Sukajaya

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sukajaya
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sukajaya
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sukajaya
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Tanjungsari**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Tanjungsari
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,8	0,81	-	-	-	-	-	Kecamatan Tanjungsari
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	90	90,09	-	-	-	-	-	Kecamatan Tanjungsari
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tanjungsari

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tanjungsari
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tanjungsari
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Tajurhalang**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	–	–	–	–	–	Kecamatan Tajurhalang
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,82	0,83	–	–	–	–	–	Kecamatan Tajurhalang
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	89,56	89,59	-	-	-	-	-	Kecamatan Tajurhalang
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tajurhalang
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tajurhalang
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tajurhalang

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan									
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Cigombong**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Cigombong
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,82	-	-	-	-	-	Kecamatan Cigombong
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	89,03	89,18	-	-	-	-	-	Kecamatan Cigombong
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cigombong
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cigombong
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cigombong

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Leuwisadeng**
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Leuwisadeng
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,8	0,81	-	-	-	-	-	Kecamatan Leuwisadeng
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	90	90,08	-	-	-	-	-	Kecamatan Leuwisadeng
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Leuwisadeng
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Leuwisadeng
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Leuwisadeng
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan **A. Persentase capaian kinerja kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Tenjolaya**

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	-	-	-	-	-	Kecamatan Tenjolaya
2. Meningkatnya pembinaan kecamatan a. Rata-rata Indeks Desa Membangun	%	0,81	0,82	-	-	-	-	-	Kecamatan Tenjolaya
3. Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	87,47	87,56	-	-	-	-	-	Kecamatan Tenjolaya
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan a. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tenjolaya
5. Tercapainya penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tenjolaya
6. Tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan a. Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tenjolaya
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Harmonis **A. Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)**	**Poin**	**-**	**6,5**	**6,6**	**6,7**	**6,8**	**6,9**	**7**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
1. Teredamnya Potensi Konflik Sosial yang Terjadi di Kabupaten Bogor a. Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial	%	88,88	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2. Teredamnya Potensi Konflik Sosial yang Terjadi di Kabupaten Bogor a. Tingkat Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	-	73.68	75.00	76.19	77.27	78.26	79.17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Data Perangkat Daerah, diolah

Keterangan :

- : *Kinerja dan indikator tidak digunakan pada tahun rencana*

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2025-2030 dijabarkan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	INDIKATOR MAKRO DAERAH								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi**	%	5,21	5,15-5,81	5,30-5,30	5,33-7,61	5,37-7,77	5,55-8,09	5,6-6,18
2	PDRB per Kapita**	Juta Rupiah	54,86	55,31 - 55,67	61,36 - 62,33	60,63 - 62,38	63,34 - 66,14	66,09 - 70,24	68,77 - 74,98
3	Kontribusi PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat***	%	11,04	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94
4	Tingkat Kemiskinan**	%	7,05	6,39-7,05	6,40-6,40	5,96-6,51	5,70-6,25	5,41-5,95	5,09 - 5,64
5	Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	7,34	7,17-7,79	6,92-6,92	6,68-7,30	6,44-7,06	6,19-6,81	5,95-6,57
6	Rasio Gini**	Poin	0,398	0,364-0,371	0,377-0,377	0,354-0,377	0,353-0,376	0,352-0,375	0,351 - 0,374
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	Poin	73,63	74,02	74,56	75,09	75,67	76,23	76,89
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK*	ton CO2eq/Miliar Rupiah	-	0,55	0,75	0,97	1,26	1,59	1,83
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*	Poin	59,47	59,26	59,36	59,45	59,54	59,64	59,73
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita **	%	18,9	18,0	17,1	16,2	15,3	14,4	13,5
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	72,95	73,65	74,62	75,59	76,56	77,53	78,5
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan*****	%	5,68	5,6	5,4	5,3	5,2	5,1	5

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	12,69	13,49	14,23	14,96	15,68	16,40	17,10
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*****	Poin	59,47	59,26	59,36	59,45	59,54	59,64	59,73
5	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman*****	%	1,19	1,31	1,54	1,77	2,01	2,25	2,51
6	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah*****	%	-	8,20	8,88	9,54	10,19	10,84	11,47
7	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah*****	%	-	39,42	40,36	41,29	42,21	43,12	44,01
8	Penurunan intensitas emisi GRK*****	Ton CO2eq/Milyar Rupiah	-	0,55	0,75	0,97	1,26	1,59	1,83
9	Penurunan Emisi GRK Kumulatif*****	TonCO2eq	n/a	484.301,08	562.218,85	658.041,65	789.299,43	970.537,25	1.185.052,68
10	Indeks risiko bencana*****	Poin	101,72	101	98	96	95	93	92
11	Indeks ketahanan daerah	Poin	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6	0,61	0,62
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,23	0,69	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67
13	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Poin	52,5	52,7	52,9	53,1	53,3	53,5	53,7
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju pertumbuhan ekonomi (LPE)	%	5,21	5,15 - 5,81	5,25-6,19	5,33-7,61	5,37-7,77	5,55-8,09	5,6-6,18
2	Tingkat kemiskinan*****	%	7,05	6,39-7,05	6,24-6,79	5,96-6,51	5,70-6,25	5,41-5,95	5,09 - 5,64
3	PDRB per kapita	Rp juta	54,86	55,31 - 55,67	61,36 - 62,33	60,63 - 62,38	63,34 - 66,14	66,09 - 70,24	68,77 - 74,98
4	Tingkat pengangguran Terbuka*****	%	7,34	7,17-7,79	6,92-6,92	6,68-7,30	6,44-7,06	6,19-6,81	5,95-6,57
5	Rasio Gini	poin	0,398	0,364-0,371	0,377-0,377	0,354-0,377	0,353-0,376	0,352-0,375	0,351 - 0,374

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	73,63	74,02	74,56	75,09	75,67	76,23	76,89
7	Indeks Kesehatan	Poin	79,23	79,39	79,56	79,72	79,88	80,05	80,21
8	Usia Harapan Hidup*****	tahun	74,9	75,34	75,67	76,01	76,35	76,69	77,03
9	Indeks Pendidikan	Poin	64,53	65,15	65,77	66,39	67,00	67,62	68,24
10	Rata-rata lama sekolah	tahun	8,39	8,46	8,5	8,54	8,59	8,63	8,67
11	Harapan lama sekolah	tahun	12,75	12,78	12,81	12,84	12,87	12,9	12,93
12	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita) *****	%	18,9	18,0	17,1	16,2	15,3	14,4	13,5
13	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
14	Indeks ketimpangan gender (IKG)*****	poin	0,583	0,575	0,572	0,568	0,565	0,562	0,560
15	Indeks pembangunan gender (IPG)	poin	90,17	90,35	90,51	90,65	90,76	90,83	90,88
16	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)*****	poin	61,29	61,79	62,29	62,79	63,29	63,79	64,29
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	42,40	51,33	55,80	60,26	64,73	69,19	73,66
18	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	54,41	54,44	54,47	54,50	54,53	54,56	54,59
19	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)*****	Poin	-	95,00	95,20	95,40	95,60	95,80	96,00
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	55,50	55,75	56,00	56,25	56,50	56,75	57,00
21	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59
	ASPEK DAYA SAING								
1	Indeks inovasi daerah*****	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan*****	%	46,94	48,40	49,77	51,13	52,49	53,85	55,21
3	Persentase Desa Berstatus Mandiri*****	%	41,11	48,08	50,48	52,88	55,29	57,69	60,10
4	Kontribusi PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat	%	11,04	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94
5	Indeks Ekonomi Hijau Daerah*****	Poin	45,29	46,36	48,11	50,19	52,42	54,82	57,43
6	Rasio Kewirausahaan Daerah*****	%	3,05	3,12	3,19	3,26	3,33	3,40	3,47
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto*****	Rp	-	21,29	21,36	21,43	21,5	21,57	21,65
8	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB*****	%	1,01	1,14	1,07	1,02	0,96	0,92	0,,87
9	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,46	3,55	3,59	3,64	3,68	3,72	3,74
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks reformasi hukum*****	Predikat	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*****	Poin	4,1	4,15	1,70	1,80	1,90	2,00	2,0
3	Indeks pelayanan publik*****	Poin	4,38	4,4	4,42	4,46	4,48	4,5	4,5
4	Persentase Penegakan Perda	Poin	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,5	75,6
5	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Poin	78	78,1	78,2	78,3	78,4	78,5	78,6
6	Indeks daya saing daerah	poin	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10	4,05	4,20
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemerintah Daerah)	poin	84,85 (B)	85 (B)	85,7 (B)	86,5 (B)	87,4 (B)	88,4 (B)	88,50 (B)
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk	Poin	86,98	88,24	89,36	90,21	91,09	91,98	92,55

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Bidang Urusan Keuangan Daerah	Poin	80,5	80,5	81,5	82	82,25	82,75	83
10	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah	Poin	82,45	84	84,5	85	85,5	86	86,5
11	Indeks Ketahanan Wilayah*****	Poin	-	69,63	73,41	77,11	80,75	84,35	87,89
	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	61,06	63,75	64,8	65	66	67	70
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	107,02	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	98,41	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	60,74	61,15	62,23	63	64	65	66

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan kondisi baik	%	84,23	85,17	86,22	87	88	89	90
	Guru yg memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV dan memiliki sertifikasi pendidik	%	24,5	25,15	26,37	27	28	29	30
	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar Yang Melaksanakan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	100	100	100	100	100	100	100
	INDIKATOR SPM PENDIDIKAN								
	Pendidikan Anak Usia Dini	orang	222.111	227.108	227.108	227.108	227.108	227.108	227.108
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) PAUD	%	58,30	61,34	64,38	67,42	70,46	73,50	76,54
	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	52,07	52,12	52,20	52,29	52,41	52,54	52,67
	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	74,78	63,62	64,37	65,12	65,87	66,62	67,37
	Pendidikan Dasar	orang	179.921	566.647	566.647	566.647	566.647	566.647	566.647
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD	%	99,98	99,99	99,99	99,99	100,00	100,00	100,00
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP	%	94,22	95,28	96,34	97,40	98,46	98,94	98,94

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	SD	orang	-	467.334	467.334	467.334	467.334	467.334	467.334
	Kemampuan literasi	Poin	61,11	63,61	66,11	68,61	71,11	73,61	76,11
	Kemampuan numerasi	Poin	54,13	57,03	59,93	62,83	65,73	68,63	71,53
	Indeks iklim keamanan	Poin	75,18	76,08	76,98	77,88	78,78	79,68	80,58
	Indeks iklim kebhinekaan	Poin	70,65	61,10	72,65	73,65	74,65	75,65	76,65
	Indeks iklim inklusivitas	Poin	58,60	71,65	63,60	66,10	68,60	71,10	73,60
	SMP	orang	-	99.883	99.883	99.883	99.883	99.883	99.883
	Kemampuan literasi	Poin	69,70	70,80	71,90	73,00	74,10	75,20	76,30
	Kemampuan numerasi	Poin	61,87	63,37	64,87	66,37	67,87	69,37	70,87
	Indeks iklim keamanan	Poin	68,68	70,18	71,68	73,18	74,68	76,18	77,68
	Indeks iklim kebhinekaan	Poin	68,41	69,41	70,41	71,41	72,41	73,41	74,41
	Indeks iklim inklusivitas	Poin	56,24	58,64	61,04	63,44	65,84	68,24	70,64
	Pendidikan Kesetaraan	orang	36.995	68.947	68.947	68.947	68.947	68.947	68.947
	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%	23,53	27,63	31,73	35,83	39,93	44,03	48,13
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	-	80	81	82	83	84	85
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (SIKN)	%	-	60	65	70	75	80	90
	Persentase ibu hamil periksa kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan	%	89,16	90	100	100	100	100	100
	Persentase fasilitas kesehatan daerah yang memenuhi standar srana prasarana alat (SPA)	%	-	62	64	66	68	70	72

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Indeks penduduk yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit	%	-	92,24	93,71	94,53	95,29	96	96,29
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	rasio	1,59:1000	1,60:1000	1,61:1000	1,62:1000	1,63:1000	1,64:1000	1,65:1000
	Persentase Sarana Kefarmasian yang memenuhi syarat	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	%	-	17	19	21	23	25	25
	INDIKATOR SPM KESEHATAN								
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	93.781	92.296	90.484	88.890	87.404	90.484	90.484
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	92.794	92.296	90.484	88.890	87.404	90.484	90.484
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	91.119	89.361	87.607	86.063	84.625	87.607	87.607
	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	437.062	363.149	359.706	355.604	351.041	359.706	359.706
	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	368.007	366.299	366.240	366.535	366.546	364.861	359.116
	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	713.142	720.487	727.908	735.405	742.980	750.633	758.364

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	484.809	482.376	558.039	593.141	629.515	666.950	705.268
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	202.191	202.595	203.054	203.514	203.975	204.437	204.900
	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	65.751	65.883	67.489	69.134	70.819	72.546	74.314
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Orang	6.840	6.941	7.044	7.149	7.255	7.362	7.472
	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	58.300	70.965	77.270	77.656	78.045	78.435	78.827
	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	91.292	90.048	95.048	100.048	105.813	110.813	115.813
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN YANG MENUNJANG KEGIATAN STUNTING								
	Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) atau ibu hamil risiko KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	%	77,7	84	85	86	88	90	92

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)/multivitamin & mineral supplementation (MMS) untuk ibu hamil minimal 180 tablet selama masa kehamilan	%	93,2	94	95	96	97	98	99
	Bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini	%	84,2	86	88	90	92	94	96
	Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif	%	80,5	82	84	86	88	90	92
	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI)	%	87	88	89	90	91	92	93
	Bayi di bawah usia dua tahun (baduta) yang memperoleh imunisasi rutin lengkap	%	87	73	76	79	82	85	85
	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 6-23 bulan (baduta) yang diare	%	80,3	85	88	90	92	95	95
	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	%	97,91	98	99	100	100	100	100
	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	95,06	96	97	98	99	100	100
	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) bermasalah gizi (gizi kurang) yang mendapat tambahan asupan gizi	%	73,19	75	77	79	81	83	85

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan yang diare	%	78,38	65	70	75	80	85	85
	Penemuan kasus pneumonia balita	%	33,45	40	45	50	55	60	60
	Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacingan pada balita	%	75	80	85	90	95	98	98
	Remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)	%	65,95	68	70	72	74	76	78
	Remaja putri yang diskrining anemia	%	86,4	88	90	92	94	96	98
	Calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	%	58,3	65	67	69	71	73	75
	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	%	90,9	100	100	100	100	100	100
	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	%	90,9	100	100	100	100	100	100
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
	Persentase infrastruktur pengendali banjir yang terbangun	%	37,21	44,45	-	-	-	-	-
	Persentase Jumlah Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik dan Sedang	%	44,10	56,00	57,65	59,34	61,02	62,70	64,42
	Persentase Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air yang Terpenuhi	%	-	-	48,42	52,40	56,37	60,34	64,32

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perdesaan	%	3,88	4,05	-	-	-	-	-
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses air minum perpipaan Perdesaan	%	-	-	5,20	5,32	5,44	5,55	5,67
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	33,94	34,20	-	-	-	-	-
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	-	-	1,54	1,77	2,01	2,25	2,51
	Persentase luas kawasan genangan yang terlindungi infastruktur drainase lingkungan	%	56,93	65,29	-	-	-	-	-
	Persentase cakupan drainase lingkungan yang terbangun	%	-	-	39,12	46,22	53,33	60,43	67,53
	Persentase penataan bangunan gedung	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata	%	100	100	-	-	-	-	-
	Persentase ketersediaan regulasi tata bangunan dan lingkungannya	%	-	-	100	100	100	100	100
	Persentase kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	%	-	-	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Jalan yang Dibangun, Ditingkatkan (Struktur/Fungsi/Pelebaran), Direkonstruksi, dan Direhabilitasi, Sesuai Standar dan Umur Teknis Jalan	%	2,32	2,51	-	-	-	-	-
	Persentase Jalan yang Dipelihara Sesuai Standar dan Umur Teknis Jalan	%	84,79	84,20	-	-	-	-	-
	Persentase Penyediaan Jembatan Gantung Di Lingkungan Permukiman	%	83,74	85,94	-	-	-	-	-
	Persentase Jalan yang Dibangun, Ditingkatkan (Struktur/Fungsi/Pelebaran), Direkonstruksi, Direhabilitasi, dan/atau Dipelihara Sesuai Standar dan Umur Teknis Jalan	%	-	-	86,77	86,85	86,92	86,99	87,06
	Persentase Cakupan Pelayanan Jasa Konstruksi	%	72	72	76	76	80	80	84
	Persentase Kesesuaian Pemanfatan Ruang	%	69,36	69.50	-	-	-	-	-
	Persentase ketersediaan rancangan regulasi penataan ruang	%	-	-	15,00	41	62	85	100
	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang di terbitkan	%	-	-	100,00	100	100	100	100
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	-	-	70,00	70,32	70,64	70,96	71,28

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	INDIKATOR SPM PEKERJAAN UMUM								
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	-	17.528	12.715	14.250	14.250	14.250	14.250
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2Tahun 2023)	Rumah Tangga	-	17.528	12.715	14.250	14.250	14.250	14.250
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan air limbah Domestik	Rumah Tangga	2.340	2.631	766	3.000	3.000	3.000	3.000

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	1.410	1.924	1.800	3.491	3.666	3.850	4.043
	Ukuran kualitas pelayanan akses layak terhadap fasilitas buang air besar bagi Masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangka septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	2.340	2.631	766	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
	Persentase hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	82,28	65,56	70,06	74,60	79,14	83,68	88,22

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase luas permukiman kumuh yang tertangani	%	35,78	42,94	62,63	80,26	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	%	-	-	68,30	75,08	81,86	88,63	95,41
	Persentase fasilitasi penyediaan PSU	%	44,47	49,38	55,61	61,85	68,08	74,31	80,55
	INDIKATOR SPM PERUMAHAN RAKYAT								
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah Tangga	122	122	38	100	100	100	100
	Pembangunan Rumah Baru di Lokasi Baru/relokasi Bagi Korban Bencana	Rumah Tangga	100	400	309	250	250	250	250
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	INDIKATOR SPM TRANTIBUM								
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Orang	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600
	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Unit	-	148	149	151	152	153	158
	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	Dokumen	-	35	35	35	35	35	35
	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	-	455	505	555	605	655	705

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	-	2	5	5	5	5	5
	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	-	1	5	5	5	5	5
	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang teredukasi penanggulangan bencana di daerah rawan bencana	%	60	-	-	-	-	-	-
	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang teredukasi penanggulangan bencana di daerah rawan bencana	%	-	70	72	74	75	77	78
	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	90	95	99	99	99	99	99
	Rekomendasi hasil pascabencana yang diterbitkan	Rekomendasi	-	10	11	12	13	14	15
	INDIKATOR SPM PENANGGULANGAN BENCANA								
	Pelayanan informasi rawan bencana	Orang	-	787.013	978.616	925.203	841.178	758.908	920.781

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik	dokumen	-	1	2	1	1	1	1
	Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	orang	-	1	2	1	1	1	1
	Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	1	3	3	3	3	3
	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	10	1	10	10	10	10
	Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	-	750	800	1.650	1.750	1.850	1.800
	Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	-	30	110	33	35	37	1800
	Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	3	52	4	4	4	4

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	15	1	33	35	37	37
	Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	-	5	5	10	10	10	10
	Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	-	100	7	60	60	60	60
	Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	-	4	2	4	4	4	4
	Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	3	3	3	3	3	3
	Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	2	2	2	2	2	2
	Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	-	-	5	25	25	25	25
	Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	-	5	5	20	20	30	30
	Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	3	5	5	5	10	10
	Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	3	3	3	3	5	5
	Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	10	10	10	10	15	15

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Orang	-	787.013	978.616	925.203	841.178	758.908	920.781
	Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	-	1	2	1	1	1	1
	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	3	2	3	3	3	3
	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	2	10	10	10	10	10
	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	-	1	1	2	4	4	4
	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	-	1	1	2	2	2	2
	Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	3	2	3	3	3	3
	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	5	1	10	10	10	10
	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	200	150	160	160	160	160
	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	200	150	160	160	160	160

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	-	200	150	160	160	160	160
	Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	20	1	1	1	1	1
	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	12	4	12	12	12	12
	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	284	150	160	160	160	160
	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	284	150	160	160	160	160
	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	-	284	150	160	160	160	160
	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	12	4	1	1	12	12
	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	1	1	12	12	1	12
	Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	1	2	1	1	1	1
	Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	1	50	1	1	1	1

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	1	2	1	1	1	1
	Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	1.200	350	1	1.500	1.600	1
	Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun	hari	-	365	365	365	365	365	365
	Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	3	3	3	3	3	3
	Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	-	4	4	4	4	4	4
	Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	-	2	2	2	2	2	2
	Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	-	1	1	1	1	1	1

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	7	7	7	7	7	7
	Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	2	2	2	2	2	2
	Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	506	20	20	20	20	20
	Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	20	10	10	10	10	10
	Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	102	102	102	102	102	102
	Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	-	20	20	20	20	20	20

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	Orang	-	50.000	50.000	51.500	52.000	53.000	54.000
	Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	-	12	12	12	12	12	12
	Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	-	102	102	102	102	102	102
	Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	2	2	2	2	2	2
	Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-	120	120	120	120	120	120

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	-	120	120	120	120	120	120
	Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	-	25	25	25	25	25	25
	Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	-	1	3	1	1	1	1
	Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	-	2	2	2	2	2	1
	Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-	8	8	8	8	8	2
	Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-	102	102	102	102	102	102

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kab. Bogor pada tahun berjalan dalam tingkat waktu tanggap response time	%	81,71	83	85	87	89	91	93
	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia dalam Operasi Darurat Non Kebakaran	%	276,25	-	-	-	-	-	-
	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia dalam Operasi Darurat Non Kebakaran	Layanan	-	994	1000	1006	1012	1018	1023
	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kab. Bogor yang dilaporkan melalui Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	%	-	70	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi dalam Mendukung Layanan Kebakaran serta Penyelamatan	Unit	-	2.220	2.377	2.534	2.692	2.849	3.006
	Persentase pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Redkar, Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya) atau dibawah pembinaan dinas dalam tanggap waktu response time	%	56,47	18	20	22	24	26	28

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	%	-	33,33	35,33	37,33	39,33	41,33	43
	Persentase bangunan/gedung diawasi yang telah memenuhi ketentuan sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan	%	-	90	90	90	90	90	90
	INDIKATOR SPM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang	400	78	100	350	400	450	500
	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	254	66	70	175	200	225	250
	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	7	16	3	3	3	3	4
	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	1.292	3	227	216	73	93	173

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	542	86	47	112	78	83	262
	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	254	68	90	260	290	320	350
	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	2	10	10	90	110	130	150
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								
	Persentase keluarga miskin ekstrem yang mendapatkan pendampingan atau fasilitasi PSKS	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertanPemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakarangani	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Disabiltas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Pengemis/Gelandangan di luar panti yang terehabilitasi sosial	%	100	29,05	29,55	30,05	30,55	31,05	31,55
	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	73,17	73,67	74,17	74,67	75,17	75,67	76,17

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi jaminan dan atau perlindungan sosial	%	-	-	58,37	58,99	60,76	62,58	64,46
	Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	100
	TARGET INDIKATOR SPM								
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti								
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI	Orang	2623	2653	1208	2729	2765	2802	3437
	Layanan data dan pengaduan	Orang	2400	2208	2208	2434	2556	2684	2818
	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	500	10	5	11	12	12	13
	Penyediaan permakanan	Orang	10	2000	500	2000	2000	2000	2553
	Penyediaan sandang	Orang	400	300	300	331	347	365	383
	Penyediaan alat bantu	Orang	1458	273	273	301	316	332	348
	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	5	6	6	6	6
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	40	2000	500	2000	2000	2000	51
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	140	40	90	44	46	49	51
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	5	10	10	10	10	6

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	15	5	10	10	10	10	6
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	20	20	20	20	20	20	13
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	20	10	10	11	12	12	13
	Layanan rujukan	Orang	25	10	10	11	12	12	13
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti								
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI	Orang	843	1371	925	926	927	929	1794
	Layanan data dan pengaduan	Orang	960	864	1104	1104	1104	1104	1103
	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	5	5	5	5	5	6
	Penyediaan permakanan	Orang	250	1000	500	500	500	500	1276
	Penyediaan sandang	Orang	400	300	300	300	300	300	383
	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	2	1	5	5	5	5	1
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	60	1000	500	500	500	500	38
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	45	10	50	50	50	50	13
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	15	10	10	10	10	19
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	15	40	40	40	40	20
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	26	20	20	20	20	13

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	16	10	10	10	10	26
	Layanan rujukan	Orang	36	10	10	11	12	14	13
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti								
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI	Orang	1847	1.682	1.168	1.857	1.947	2.046	2.185
	Layanan data dan pengaduan	Orang	960	864	1104	953	1.000	1.050	1103
	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	5	5	6	6	6	6
	Penyediaan permakanan	Orang	250	1000	500	1.103	1.158	1.216	1276
	Penyediaan sandang	Orang	400	300	300	331	347	365	383
	Penyediaan alat bantu	Orang	1000	273	273	301	316	332	348
	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	2	1	5	1	1	1	1
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	90	1000	500	1103	1158	1216	38
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	45	50	50	55	58	61	64
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	15	10	17	17	18	19
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	15	10	17	17	18	19
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	24	20	8	8	9	9

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	7	10	8	8	9	9
	Layanan rujukan	Orang	10	17	10	19	20	21	22
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti								
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI	Orang	480	155	165	161	168	176	198
	Layanan data dan pengaduan	Orang	20	100	165	110	116	122	128
	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	25	20	35	22	23	24	26
	Penyediaan permakanan	Orang	400	100	100	110	116	122	128
	Penyediaan sandang	Orang	400	100	100	110	116	122	128
	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	2	20	2	2	2	3
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	20	40	100	110	116	122	51
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	20	40	30	44	46	49	51
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	5	5	5	6	6	6	6

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	5	5	6	6	6	6
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	15	15	15	17	17	18	19
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15	15	15	17	17	18	19
	Layanan rujukan	Orang	10	15	30	32	33	34	13
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI	Orang	4325	4000	4000	4000	4000	4000	4675
	Penyediaan permakanan	Orang	3900	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	Penyediaan sandang	Orang	250	600	600	600	600	600	500
	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	5	300	300	300	300	300	5
	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	10	10	10	10	10	10	10
	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	160	160	160	160	160	160	160
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	76,92	76,92	76,92	76,92	84,62	84,62	84,62
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	1,05	1,05	1,07	1,09	1,12	1,14	1,15
	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	%	31,7	24,33	24,58	24,86	25,18	25,67	25,96
	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	%	42,65	43,06	43,26	43,42	43,63	43,79	43,99

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja APBD	%	35,10	-	-	-	-	-	-
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	-	33,61	33,14	31,00	31,84	31,33	29,76
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	%	4,37	-	-	-	-	-	-
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	-	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Pemenuhan Ekonomi Keluarga yang Dikontribusi Oleh Perempuan	%	3,65	-	-	-	-	-	-
	Persentase Keluarga yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	-	16,78	33,56	50,34	67,13	83,91	100
	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak	%	34,15	-	-	-	-	-	
	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	-	6,74	13,47	20,21	26,95	33,68	40,42

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kategori Kabupaten Layak Anak	Katagori	Madya (639,91 Poin)	-	-	-	-	-	-
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	-	58,35	59,15	59,85	60,45	60,95	61,35
	Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100	-	-	-	-	-	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	-	100	100	100	100	100	100
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								
	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	10	10	10	10	10	10	10
	Tingkat Kecukupan Energi dan Protein Per Kapita	%	96,97	98,90	98,95	99,00	99,05	99,10	99,15
	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	38,62	37,00	35,40	33,79	32,18	30,57	28,97
	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	92,70	92,71	93,08	93,44	93,81	94,16	94,51
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Lahan yang Diredistribusi	%	0	44,51	56,74	67,72	76,73	89,88	95,60
	Persentase Tanah Kosong yang Terinventarisasi	%	25,00	37,50	50,00	62,50	75,00	87,50	100
	Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi	%	27,12	10,00	20,01	30,01	40,01	50,02	60,02

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								
	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi	%	50,98	56,91	59,79	62,89	65,69	68,76	71,56
	Persentase luas hutan kota yang terbangun	%	10,42	22,68	55,27	66,45	77,63	88,82	100
	Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan pengendalian B3 dan LB3	%	60	70	80	85	90	95	100
	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan	%	20	40	50	60	70	80	90
	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	10,56	11,78	14,20	17,26	20,27	23,25	26,18
	Persentase masyarakat yang mendapatkan apresiasi peduli lingkungan	%	29,25	29,33	29,43	29,53	29,63	29,73	29,83
	Persentase penanganan pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	95,65	96,67	97,80	97,82	98,92	100	100
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah	%	0	8,20	8,88	9,54	10,19	10,84	11,47

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
	Cakupan penerbitan KTP	%	98,43	98,72	98,92	99,09	99,12	99,22	99,66
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	37,52	42,68	48,78	50,74	56,68	60,79	65,28
	Cakupan penerbitan akte kelahiran anak	%	92,11	94,09	94,54	95,40	96,73	97,08	97,94
	Persentase Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	%	65,71	83,33	85,71	90,48	91,67	96,00	96,67
	Persentase data profil kependudukan yang tersaji	%	100	100	100	100	100	100	100
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
	Persentase Desa yang Tertata Kewilayahannya	%	2,88	-	-	-	-	-	-
	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	%	100	-	-	-	-	-	-
	Persentase Fasilitasi Desa yang tertata	%	-	16,83	32,45	49,28	66,11	82,93	100
	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Desa	%	-	100	100	100	100	100	100
	Presentase Desa yang terfasilitasi melakukan Kerjasama	%	2,4	8,17	8,65	9,13	9,62	10,10	10,58

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, LPP Desa)	%	100	-	-	-	-	-	-
	Persentase fasilitasi terpenuhinya Administrasi keuangan dan aset desa	%	-	100	100	100	100	100	100
	presentase Fasilitasi Lembaga BUM Desa yang terbina	%	-	7,21	8,41	9,62	10,82	12,02	13,22
	Persentase Fasilitasi Terbinanya Administrasi Pemerintahan Desa	%	-	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	12,02	-	-	-	-	-	-
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	%	-	100	100	100	100	100	100
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
	Persentase Kebijakan yang Disinergikan	%	33,33	-	-	-	-	-	-
	Angka Kelahiran dari Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	17,1	16,70	16,30	15,90	15,50	15,10	14,70
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,79	-	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	8,39	14,80	14,20	13,70	13,20	12,80	12,30
	Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga yang ber-KB	%	84,05	-	-	-	-	-	-
	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	-	3,65	4,05	4,12	4,19	4,26	4,29
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								
	Rasio Konektivitas Angkutan	Poin	0,526	0,729	0,737	0,745	0,753	0,761	0,769
	Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	%	30	3,57	7,14	10,71	14,29	17,86	21,43
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	81	82	83	84	85	86	87
	Persentase Layanan Infrastruktur TIK yang berkualitas	%	87,5	87,5	87,5	100	100	100	100
	Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	90,9	95,2	95,2	95,2	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								
	Pertumbuhan wirausaha	%	3,45	3,59	3,72	3,82	3,91	3,99	3,99
	Persentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha	%	58,54	58,54	58,74	58,86	58,95	59,01	59,18
	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin	%	8,66	9,13	9,57	10,00	10,43	10,87	10,87
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	31,59	31,70	31,79	31,83	32,00	32,05	32,05
	Persentase Koperasi Aktif	%	43,64	44,87	45,09	45,36	45,63	45,89	45,89
	Persentase SDM Koperasi yang dilatih	%	4,48	4,66	4,69	4,72	4,74	4,76	4,76
	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	33,41	33,49	33,57	33,61	33,65	33,68	33,68
18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								
	Persentase peningkatan proyek investasi	%	69	-	-	-	-	-	-
	Realisasi total terhadap target investasi	%	-	100	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5
	Persentase peningkatan investor yang berinvetasi di Kabupaten Bogor	%	5	5	6	7	8	9	10
	Persentase kegiatan usaha yang diawasi	%	5,36	-	-	-	-	-	-
	Persentase pelaku usaha yang dibina	%	12,4	-	-	-	-	-	-
	Persentase pengendalian kegiatan penanaman modal	%	-	5	5,2	5,5	5,7	6	6,3

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase peningkatan pengguna layanan sistem informasi	%	5	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	-	75	75	80	80	85	85
	Presentase perizinan dan non perizinan pemanfaatan ruang yang diproses	%	90	-	-	-	-	-	-
	Presentase perizinan dan non perizinan operasional yang diproses	%	90	-	-	-	-	-	-
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin pemanfaatan ruang sesuai ketentuan	%	-	50	53	56	59	61	64
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin operasional sesuai ketentuan	%	-	70	72	74	76	78	80
19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
	Rasio Wirausaha Pemuda	%	76,36	14,34	15,73	16,43	17,13	17,82	18,52
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	206	68	849	204	220	70	869
	Persentase sarana prasarana olahraga di kecamatan yang dimanfaatkan	%	57,14	57,14	62,50	63,64	64,71	65,71	66,67
	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Event Olahraga Rekreasi dan Tradisional	%	5,28	5,28	5,31	5,33	5,36	5,38	5,41
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	8,09	8,13	8,14	8,16	8,17	8,18	8,19

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								
	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	%	3,50	3,60	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90
21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								
	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	77,05	80,00	81,54	83,08	84,62	86,15	86,92
22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	%	-	30	-	-	-	-	-
	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi melalui Penetapan Warisan Budaya Tingkat Kabupaten / Provinsi/ Nasional / UNESCO	%	-	-	3,59	4,62	5,64	6,67	7,69
	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	100	100	-	-	-	-	-
	Persentase lembaga Kesenian Tradisional yang dibina	%	-	-	45,50	51,18	56,87	62,56	68,25
	persentase informasi sejarah yang diakses masyarakat	%	-	-	100	100	100	100	100
	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	-	49,66	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Benda Situs dan Cagar Budaya yang dilindungi melalui Penetapan Tingkat Kabupaten / Provinsi/Nasional/UNESCO	%	-	-	24,83	28,19	31,54	34,90	38,26
	Persentase materi permuseuman yang dikelola	%	-	-	20,00	23,13	26,25	29,38	32,50
23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								
	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	1,330	1,345	1,419	1,457	1,494	1,532	1,569
	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Nusantara yang terlindungi	%	100	100	100	100	100	100	100
24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	96,89	96,95	97,10	97,25	97,50	97,70	98,00
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan layanan arsip bersifat tertutup	%	100	-	-	-	-	-	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	112,78	115,00	118,00	121,00	124,00	127,00	130,00
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	139.934	141.332	142.039	142.749	143.463	144.180	144.901
	Persentase Perairan Umum yang diawasi	%	17	27	30	33	36	39	42
	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	23.367	23.600	23.836	24.076	24.325	24.564	24.802
26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	40,03	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Hunian Akomodasi	%	-	40	42	44	46	48	50
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	-	5,00	6,67	10,00	13,33	16,67	20,00
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual	%	-	10,00	4,67	8,40	11,28	13,42	14,97
	Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi	Orang	-	125	-	-	-	-	-
	Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	%	-	-	6,37	6,79	7,20	7,61	8,02
	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi berdasarkan keahlian	Orang	-	-	90	140	190	240	290
27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								
	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	14,15	17,24	16,92	17,21	17,51	17,81	18,10

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	22,22	16,55	17,55	18,64	19,73	20,91	22,16
	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	26,69	2,80	9,78	12,58	18,17	20,97	22,36
	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis ijin usaha pertanian	%	32,10	13,49	28,49	46,08	63,86	81,81	100
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM pertanian	%	1,87	1,08	1,98	2,93	3,90	4,91	5,94
	Persentase Penyediaan Sarana Peternakan (Bibit Ternak)	%	31,06	16,31	16,45	16,59	16,74	16,88	17,02
	Persentase prasarana (Infrastruktur) peternakan yang dibangun/direhabiltasi	%	25,00	13,21	15,09	16,98	18,87	16,98	18,87
	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	60,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50
	Persentase rekomendasi perizinan Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%	25,32	11,11	13,33	15,56	17,78	22,22	24,44
	Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok yang dibina	%	15,00	4,24	7,27	10,30	13,33	16,36	19,39
28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	66,00	81,11	82,74	83,15	83,57	83,98	84,4

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan ketentuan	%	33,33	40,00	46,67	56,67	66,67	76,67	86,67
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok	%	100	100	100	100	100	100	100
	Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA)	USD	1.875.427.336	-	-	-	-	-	-
	Jumlah pelaku usaha ekspor yang terintegrasi	Pelaku Usaha Ekspor	-	430	460	490	520	550	580
	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ tera ulang	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelaku usaha yang bersertifikat TKDN	%	16,33	16,65	16,96	17,24	17,59	17,95	18,30
29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								
	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	%	50,75	43,10	49,32	55,52	61,71	67,88	74,04
	Persentase pelaku usaha industri yang mengajukan izin dan yang dilakukan pengawasan	%	3,30	1,56	1,84	2,05	2,29	2,53	2,81
	Indeks ketersediaan informasi industri	Indeks	125	125	125	125	125	125	125
30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								
	Persentase kepala keluarga yang mendapatkan penyuluhan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
31	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
	SEKRETARIAT DAERAH								
	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Poin	11,84	11,85	11,90	11,92	11,94	11,96	11,98
	Tingkat Implementasi Sistem Kerja	%	100	80	100	100	100	100	100
	Tingkat Kematangan Kelembagaan	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Administrasi Umum	%	84,81	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Administrasi Umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks Reformasi Hukum	Predikat	AA (99,82)	AA (>90)	AA (>90)	AA (>90)	AA (>90)	AA (>90)	AA (>90)
	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Poin	83,35	75,00	77,00	79,00	80,00	81,00	82,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	SEKRETARIAT DPRD								
	Cakupan dukungan sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100
32	**PERENCANAAN**								
	Nilai rata-rata dari Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	-	100	100	100	100	100	100
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	-	80	81	82	83	84	85
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	-	80	81	82	83	84	85
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	-	80	81	82	83	84	85

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
33	**KEUANGAN**								
	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan	%	99	100	100	100	100	100	100
	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pajak Daerah	Rupiah	3.162.898.099.760	3.817.688.382.057	3.852.645.892.463	3.955.208.923.002	4.038.547.072.261	4.133.795.758.293	4.240.635.093.049
34	**KEPEGAWAIAN**								
	Nilai sistem merit aspek kepegawaian	poin	324	326	-	-	-	-	-
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	71,5	72,0	–	–	–	–	–
	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	17,59	16,45	–	–	–	–	–
	Indeks NSPK Manajemen ASN	poin	-	-	95,0	95,5	96,0	96,5	97,0
35	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Nilai sistem merit aspek pengembangan SDM	poin	38	43	-	-	-	-	-
	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20JP/Orang/Tahun	%	49,41	50	-	-	-	-	-
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi berdasarkan hasil analisis kesenjangan	%	-	-	52,5	55,0	57,5	60,0	62,5
36	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
	Persentase Riset yang dihasilkan menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100	-	-	-	-	-	-
	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	-	-	-	-	-	-
	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan	Rekomendasi	-	7	7	7	7	7	7
37	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**								
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	%	99,75	99,76	99,78	99,79	99,80	99,81	99,82

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK/ Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK	%	91,0	93,0	93,5	94,0	94,5	95,0	95,5
	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri	Level	3	3	3	3	3	3	3
	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB”	%	48,61	63,89	73,61	80,56	87,50	94,44	100
38	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
	KECAMATAN CIBINONG								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	97,33	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	95,23	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	81,33	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	82,66	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KECAMATAN GUNUNG PUTRI								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,71	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92,41	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,90	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN CITEUREUP								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	96,54	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	97,75	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	96	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	88,77	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	94,41	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN SUKARAJA								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,69	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	98,95	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KECAMATAN BABAKAN MADANG								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	87,88	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,72	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	96,91	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	97,17	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	93,32	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN JONGGOL								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	97,21	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,24	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,58	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	87,77	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	97,14	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN CILEUNGSI								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	97,62	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,13	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	96,79	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	96,45	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	95,99	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KECAMATAN CARIU								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	93	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	80	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN SUKAMAKMUR								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	95	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	93	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	98	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	95	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN PARUNG								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,58	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,93	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,56	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	98,84	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99,92	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KECAMATAN GUNUNG SINDUR								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	95	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	91	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	90	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN KEMANG								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,2	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	96,68	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	97,97	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	90,06	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	97,74	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN BOJONG GEDE								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	98,7	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,2	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99,56	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99,5	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KECAMATAN LEUWILIANG								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	71,83	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,02	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	91,54	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	91,12	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	94,61	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN CIAMPEA								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	97	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN CIBUNGBULANG								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,73	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,91	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99,73	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KECAMATAN PAMIJAHAN								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	95,99	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	87,4	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	53,14	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	93,65	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN RUMPIN								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,21	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,84	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	97,16	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	95,73	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	97,95	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN JASINGA								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,49	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,32	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,52	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99,81	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	97,75	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KECAMATAN PARUNG PANJANG								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	96	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	98	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	95	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN NANGGUNG								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,99	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,6	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,89	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	94,59	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	98,41	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN CIGUDEG								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	92	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	82	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	94	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KECAMATAN TENJO								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	89,15	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,34	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	92,32	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	97,94	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	96,63	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN CIAWI								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,41	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,97	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN CISARUA								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,29	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	98,27	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,48	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99,52	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KECAMATAN MEGAMENDUNG								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	97,94	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92,2	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,26	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99,66	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	97,76	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN CARINGIN								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	96	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN CIJERUK								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	97,25	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,81	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,07	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	98,61	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99,14	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KECAMATAN CIOMAS								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	97,32	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	98,03	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	98,16	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	94,87	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	95,99	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN DRAMAGA								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	87	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	93	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	91	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN TAMANSARI								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	93	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KECAMATAN KLAPANUNGGAL								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	93	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	99	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN CISEENG								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	97,96	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	95,08	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN RANCABUNGUR								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	93	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	98	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	91	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KECAMATAN SUKAJAYA								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,32	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90,79	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	97,3	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN TANJUNGSARI								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN TAJURHALANG								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,37	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92,12	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KECAMATAN CIGOMBONG								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,57	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	93,36	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,2	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	99,39	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	98,85	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN LEUWISADENG								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	98,99	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,6	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	99,89	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	94,59	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	98,41	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN TENJOLAYA								
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	96,27	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92,6	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum	%	98,89	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum	%	97,93	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	98,28	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
39	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	%	0,4253	-	-	-	-	-	-
	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	-	0,5196	0,7794	1,0393	1,2991	1,5589	1,8187
	Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	0,4280	-	-	-	-	-	-
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	-	0,6626	1,2149	2,3193	3,4237	4,5281	5,6325
	Tingkat Bina Ormas	%	0,103						
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	-	55,27	55,61	55,98	56,20	56,62	56,90
	Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	%	0,1183	-	-	-	-	-	-
	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	-	0,3743	0,5183	0,6623	0,8063	0,9502	1,0942
	Jumlah Konflik yang Tertangani melalui Koordinasi Pimpinan Daerah	Konflik	18	-	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024 (BASELINE)	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase konflik sosial yang tertangani di daerah	%	-	5,26	10,53	15,79	21,05	26,32	31,58

Sumber : Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, diolah

Hasil Penghitungan Bappedalitbang, 2025

Keterangan :

* : *Menjadi indikator pada aspek geografi dan demografi*
** : *Menjadi indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat*
*** : *Menjadi indikator pada aspek daya saing daerah*
**** : *Menjadi indikator pada aspek pelayanan umum*
***** : *Menjadi indikator utama pembangunan (IUP)*
\- : *Kinerja dan indikator tidak digunakan pada tahun rencana*

BAB V
PENUTUP

RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi implementasi tahap pertama perencanaan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Sebagai dokumen yang diacu dalam pencapaian target kinerja daerah, RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 memiliki peran penting dalam keberhasilan pencapaian target visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam program-program prioritas dan program-program pembangunan daerah.

Dokumen ini penting untuk dipedomani bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menyinergikan seluruh target-target lintas sektoral yang bermuara pada terwujudnya ***Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang***. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian seluruh indikator dan target daerah sangat ditentukan oleh tingkat ketaatan terhadap substansi yang telah ditentukan dalam dokumen ini.

Untuk itu, merujuk pada tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 ini, kaidah pelaksanaan yang perlu dipedomani bersama adalah:

1. Seluruh Perangkat Daerah menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang kemudian dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun;
2. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Dalam hal terdapat kekosongan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030, target kinerja disusun berdasarkan target transisi yang tercantum dalam RPJMD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah, DPRD, sektor swasta, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam implementasi kebijakan, pengawasan yang berkesinambungan, serta evaluasi berkala untuk

memastikan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Sementara itu, Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Dalam hal masa transisi pergantian kepala daerah, dokumen RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya, tahun 2030-2034. Namun demikian, kebijakan pembangunan di tahun transisi tersebut diharapkan dapat selaras dan berkesinambungan dengan dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Demikian dokumen ini disusun untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab. Semoga bermanfaat.

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

LAMPIRAN

CASCADING KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025-2029

VISI/ MISI		TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTOCOME
Visi : Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang															
1	Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik	1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan			**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	**Poin**								
				1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi	Indeks Pelayanan Publik	Poin	Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Trantibumlinmas	Indeks Penyelenggaraan Tramtibumlinmas (sub urusan trantibum dan linmas)	Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
														Meningkatnya kapasitas anggota Perlindungan masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas
														Meningkatnya kapasitas anggota Satpol PP	Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP
														Tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP yang berlaku	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
													Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
								Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Adminduk	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan KTP
															Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
													Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akte kelahiran anak
													Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Kependudukan
										Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminitsrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk				Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama
													Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian Profil Kependudukan sesuai ketentuan	Persentase data profil kependudukan yang tersaji
													Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
								Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik	Persentase Desa Berstatus Mandiri	Terwujudnya Penyelenggaraan Pembangunan Desa yang Berkualitas	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penataan Desa	Terpenuhinya Sarana Prasarana Publik dan Perkembangan Kewilayahan Desa	Persentase Fasilitasi Desa yang tertata
															Persentase Fasilitasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Desa
													Program Peningkatan Kerjasama Desa	Terfasilitasi kerjasama desa	Presentase Desa yang terfasilitasi melakukan Kerjasama
													Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Tata kelola Administrasi dan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan serta Keterbukaan Informasi Publik Desa	Persentase fasilitasi terpenuhinya Administrasi keuangan dan aset desa
											Persentase Sarpras Desa Dalam Kondisi Baik				presentase Fasilitasi Lembaga BUM Desa yang terbina
															Persentase Fasilitasi Terbinanya Administrasi Pemerintahan Desa
													Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang ditingkatkan kapasitasnya
													Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah

VISI/ MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTOCOME
					Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan dan Budaya Literasi	Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip dan Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip sesuai dengan NSPK	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional
										Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Terlindunginya kondisi fisik arsip yang bernilai guna	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
										Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tersedianya akses informasi arsip yang bersifat tertutup	Cakupan layanan arsip bersifat tertutup
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
					Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat DPRD	Terpenuhinya pelayanan Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terfasilitasi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terpenuhinya cakupan dukungan sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Cakupan dukungan sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
						Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
					Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan	Persentase capaian kinerja kecamatan	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayaha kecamatan	Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
							Meningkatnya pembinaan kecamatan	Rata-rata Indeks Desa Membangun		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
							Meningkatnya capaian hasil dan dampak penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup ketentraman dan ketertiban umum
							Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pemerintahan umum
							Tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang terlaksana lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
							tercapainya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan	Persentase penyelenggaraan pembinaan Kecamatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
								Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
										Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik

VISI/ MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTOCOME
					Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Harmonis	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Teredamnya Potensi Konflik Sosial yang Terjadi di Kabupaten Bogor		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif
								Tingkat Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
										Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tercapainya peran dan sinergitas kewaspadaan dini di daerah antar pemerintah dengan lembaga/ masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani di daerah
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
					Terwujudnya permukiman layak, infrastruktur permukiman dan tata kelola pertanahan yang berkualitas	Persentase kualitas dan cakupan kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatnya tata kelola administrasi dan pemanfaatan pertanahan	Persentase aset pemda yang didaftarkan sertifikasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya
										Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Meningkatnya redistribusi Lahan kosong	Persentase Lahan yang Diredistribusi
										Program Pengelolaan Tanah Kosong	Meningkatnya identifikasinya Tanah kosong milik pemda	Persentase Tanah Kosong yang Terinventarisasi
										Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya fasilitasi pendaftaran hak atas tanah	Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi
					Terwujudnya tertib tata kelola pertanahan dan penataan ruang berkualitas	Persentase Kinerja Pengelolaan Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya tata kelola administrasi dan pemanfaatan pertanahan	Persentase aset pemda yang didaftarkan sertifikasi	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya
										Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Meningkatnya redistribusi Lahan kosong	Persentase Lahan yang Diredistribusi
										Program Pengelolaan Tanah Kosong	Meningkatnya identifikasinya Tanah kosong milik pemda	Persentase Tanah Kosong yang Terinventarisasi
										Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya fasilitasi pendaftaran hak atas tanah	Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	Tercapainya Tata Kelola Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik yang Informatif dan Terintegrasi	Presentase Capaian Tata kelola penyelenggaran, komunikasi, informatika, persandian dan statistik	Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
							Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Pemenuhan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terpenuhinya Ketersediaan Infrastruktur TIK yang berkualitas di lingkup Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Infrastruktur TIK yang berkualitas
											Meningkatnya Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi
							Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral
							Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah

VISI/ MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTOCOME
			Nilai SAKIP	Predikat	Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Akuntabel	Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik	Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tercapainya Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum
											Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
												Persentase Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
										PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan
											Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan
												Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Perekonomian dan Pembangunan
										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Meningkatnya Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah
											Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan
											Tercapainya Tingkat Implementasi Sistem Kerja	Tingkat Implementasi Sistem Kerja
											Tercapainya Tingkat Kematangan Kelembagaan	Tingkat Kematangan Kelembagaan
											Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Administrasi Umum	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Administrasi Umum
												Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Administrasi Umum
					Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai rata-rata dari Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD
										Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
											Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
											Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
						Indeks Riset dan Inovasi Daerah	Hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan Daerah		Program Riset dan Inovasi Daerah	Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan menjadi kebijakan	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
										Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai rata-rata dari Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD

VISI/ MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTOCOME
					Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
											Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
						Indeks Riset dan Inovasi Daerah	Hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan Daerah			Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
										Program Riset dan Inovasi Daerah	Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan menjadi kebijakan	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
					Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Perencanaan Penganggaran yang berkualitas	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan
											Terwujudnya Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan
											Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai ketentuan
							Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
					Meningkatnya pendapatan asli daerah	Rasio PAD Terhadap APBD	Meningkatnya pendapatan pajak daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap APBD	Badan pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Optimalnya Tata Kelola Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah
							Meningkatnya pendapatan retribusi daerah	Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
					Terwujudnya ASN yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran Manajemen Kepegawaian Daerah	Nilai sistem merit aspek kepegawaian
												Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
												Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
												Indeks NSPK Manajemen ASN
										Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM	Nilai sistem merit aspek pengembangan SDM
												Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20JP/Orang/Tahun
												Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi berdasarkan hasil analisis kesenjangan

VISI/ MISI		TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTOCOME
													Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
								Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti
													Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK/ Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK
											Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah				Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri
											Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)				Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"
													Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
2	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju	2	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah			**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	%								
				2.1	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Daerah (PDRB Sekunder dan Tersier)	PDRB ADHB	Juta Rupiah	Meningkatnya kesempatan berusaha bagi masyarakat	Produktivitas Koperasi	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi	Volume Usaha Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya wirausaha baru	Pertumbuhan Wirausaha
													Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha mikro yang berkembang menjadi wirausaha yang mandiri	Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha
													Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya cakupan koperasi simpan pinjam yang berizin	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin
													Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi terbina dan terawasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
									Persentase Usaha Mikro Terbina	Meningkatnya volume penjualan produk usaha mikro	Rata-rata Omset Usaha Mikro		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif
													Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	SDM Koperasi Terlatih	Persentase SDM Koperasi yang dilatih
													Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas
													Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
								Meningkatnya Perolehan nilai investasi	Perolehan nilai investasi	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan nilai investasi dalam LKPM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi
													Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvetasi di Kabupaten Bogor
													Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase pengendalian kegiatan penanaman modal
													Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan data dan sistem informasi DPMPTSP	Persentase peningkatan pengguna layanan sistem informasi
															Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal
													Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan pemanfaatan ruang & operasional yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin pemanfaatan ruang sesuai ketentuan
															Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin operasional sesuai ketentuan

VISI/ MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTOCOME
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
					Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Nilai PDRB Sektor Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tingkat Hunian Akomodasi
										Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
										Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual
										Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
					Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Nilai PDRB Sektor Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tingkat Hunian Akomodasi
										Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
										Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual
							Meningkatnya Usaha Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif		Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi
											Meningkatnya Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi berdasarkan keahlian
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
					Meningkatnya konstribusi sektor perdagangan dan Perindustrian	Nilai PDRB Perdagangan	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri	Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya pelaku usaha Perdagangan yang berizin	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan
										Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan ketentuan
							Meningkatnya nilai ekspor	Nilai ekspor		Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting	Terkendalinya harga dan stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok
										Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor Daerah	Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA)
											Meningkat Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang terintegrasi
						Nilai PDRB Industri Pengolahan	Stabilitas harga	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya cakupan alat ukur yang ditera/ tera ulang	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ tera ulang
										Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya pelaku usaha yang bersertifikat TKDN	Persentase pelaku usaha yang bersertifikat TKDN
										Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya cakupan Industri Kecil Menengah (IKM) yang terbina	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina
							Kabupaten Bogor memiliki Sentra Industri Kecil Menengah yang ditetapkan	Sentra Industri Kecil Menengah yang ditetapkan		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Meningkatnya cakupan pelaku usaha industri yang terfasilitasi proses pengajuan izin dan yang dilakukan pengawasan	Persentase pelaku usaha industri yang mengajukan izin dan yang dilakukan pengawasan
										Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terpenuhinya Informasi Industri	Indeks ketersediaan informasi industri
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah

VISI/ MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTOCOME
		2.2	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Prevalence of Undernourishment (PoU)	Meningkatnya Kualitas pola konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Tersedianya cadangan pangan yang dikelola masyarakat	Persentase cadangan pangan masyarakat
											Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Tingkat Kecukupan Energi dan Protein Per Kapita
											Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
											Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
											Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
						Meningkatnya Produksi Perikanan dan Peternakan	Jumlah Produksi Perikanan dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
											Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
											Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Pengawasan pada perairan Umum	Persentase Perairan Umum yang diawasi
											Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan
											Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya penyediaan sarana peternakan	Persentase Penyediaan Sarana Peternakan (Bibit Ternak)
								Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah Produksi Peternakan		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana peternakan	Persentase prasarana (Infrastruktur) peternakan yang dibangun/direhabiltasi
											Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
											Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase rekomendasi perizinan Usaha Pertanian yang Diterbitkan
											Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok yang dibina	Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok yang dibina
											Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
						Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kebutuhan sarana pertanian yang terpenuhi	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi
											Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi
											Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian
											Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya pelayanan ijin usaha pertanian	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis ijin usaha pertanian
											Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pertanian	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM pertanian
											Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah

VISI/ MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTOCOME
		2.3 Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Williamson	Poin	Meningkatnya kualitas dan cakupan infrastruktur pekerjaan umum yang merata serta tertib penataan ruang	Persentase kualitas dan cakupan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur jalan kabupaten yang berkualitas	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Jalan	Persentase Jalan yang Dibangun, Ditingkatkan (Struktur/Fungsi/Pelebaran), Direkonstruksi, dan Direhabilitasi, Sesuai Standar dan Umur Teknis Jalan
											Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Jalan	Persentase Jalan yang Dipelihara Sesuai Standar dan Umur Teknis Jalan
							Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi dan sumber daya air	Persentase luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pengendali banjir	Persentase infrastruktur pengendali banjir yang terbangun
											Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Daerah Irigasi yang Berkualitas	Persentase Jumlah Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik dan Sedang
							Meningkatnya cakupan layanan jasa konstruksi	Persentase Cakupan Pelayanan Jasa Konstruksi		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan konstruksi daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Jasa Konstruksi
							Meningkatnya akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan	Persentase akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Air Minum Rumah Tangga yang dilayani melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perdesaan	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perdesaan
							Meningkatnya akses rumah tangga dengan akses sanitasi aman dan layak	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman dan layak		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Akses Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik
							Meningkatnya akses infrastruktur lingkungan	Persentase luas kawasan genangan yang tertangani infrastruktur drainase		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur drainase lingkungan	Persentase luas kawasan genangan yang terlindungi infastruktur drainase lingkungan
							Terwujudnya Tata Ruang Kabupaten Bogor yang Efisien, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing	Persentase Kesesuaian Pemanfatan Ruang		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pemanfatan ruang sesuai dengan ketentuan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
					Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur pekerjaan umum	Persentase kualitas infrastruktur pekerjaan umum yang berkualitas	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur jalan kabupaten yang berkualitas	Persentase jalan mantap	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Kualitas Jalan	Persentase Jalan yang Dibangun, Ditingkatkan (Struktur/Fungsi/Pelebaran), Direkonstruksi, Direhabilitasi, dan/atau Dipelihara Sesuai Standar dan Umur Teknis Jalan
							Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi dan sumber daya air	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik dan sedang		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air	Persentase Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air yang Terpenuhi
											Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Daerah Irigasi yang Berkualitas	Persentase Jumlah Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik dan Sedang
							Meningkatnya cakupan layanan jasa konstruksi	Persentase cakupan pelayanan jasa konstruksi		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Konstruksi Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Jasa Konstruksi
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
							Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Layak		Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya cakupan bangunan gedung yang tertata	Persentase penataan bangunan gedung
										Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Terpenuhinya penataan Bangunan dan lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata
										Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Infrastruktur Jembatan Permukiman	Persentase Penyediaan Jembatan Gantung Di Lingkungan Permukiman

VISI/ MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTOCOME
					Terwujudnya permukiman layak, infrastruktur permukiman dan tata kelola pertanahan yang berkualitas	Persentase kualitas dan cakupan kawasan permukiman dan pertanahan			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Ketersediaan dan Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana	Persentase hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
							Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertata	Persentase luas permukiman kumuh yang tertangani
										Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Terwujudnya pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
										Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase fasilitasi penyediaan PSU
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
					Terwujudnya kawasan permukiman layak dan berkualitas	Persentase kawasan permukiman layak dan berkualitas	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Layak	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Air Minum Rumah Tangga melalui Jaringan Perpipaan perdesaan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses air minum perpipaan perdesaan
										Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
								Persentase Akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya cakupan drainase lingkungan	Persentase cakupan drainase lingkungan yang terbangun
										Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Ketersediaan dan Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana	Persentase hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
								Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman dan layak		Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertata	Persentase luas permukiman kumuh yang tertangani
								Persentase luas kawasan rawan genangan yang tertangani infrastruktur drainase		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Terwujudnya pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
										Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase fasilitasi penyediaan PSU
					Terwujudnya tertib tata kelola pertanahan dan penataan ruang berkualitas	Persentase Kinerja Pengelolaan Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfatan Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	Terpenuhinya penyelenggaraan bangunan gedung, serta pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi	Persentase penataan bangunan gedung
										Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya tertib tata kelola perencanaan tata bangunan dan lingkungannya	Persentase ketersediaan regulasi tata bangunan dan lingkungannya
												Persentase kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan
										Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya tertib tata kelola penataan ruang	Persentase ketersediaan rancangan regulasi penataan ruang
												Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang di terbitkan
												Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

VISI/ MISI		TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTOCOME
								Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Bogor	Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi yang Berkualitas	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkualitas	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Transportasi yang Selamat, Aman, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau	Rasio Konektivitas Angkutan
													Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya Keselamatan Pada Perlintasan Kereta Api Sebidang	Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani
													Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
3	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Poin**								
				3.1	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2eq/Milyar Rupiah	Meningkatknya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan terpadu	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Meningkatnya kualitas air yang baik	Persentase air permukaan dengan kualitas baik	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tercapainya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP (Kebijakan Rencana dan Program)	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
													Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi
													Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya luas area hutan kota terbangun	Persentase luas hutan kota yang terbangun
									Indeks Kualitas Air (IKA)	Menurunnya pencemaran udara	Persentase penurunan udara yang tercemar		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan pengendalian B3 dan LB3
													Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan
										Meningkatnya luasan tutupan lahan hijau	Persentase luas tutupan lahan hijau		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
									Indeks Kualitas Lahan (IKL)				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya apresiasi terhadap kinerja masyarakat peduli lingkungan	Persentase masyarakat yang mendapatkan apresiasi peduli lingkungan
										Meningkatnya pengelolaan sampah secara kolaboratif yang mendukung pembangunan rendah karbon	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persentase penanganan pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
													Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya cakupan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah
													Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
				3.2	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Poin							Meningkatnya Akses informasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang teredukasi penanggulangan bencana di daerah rawan bencana

VISI/ MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTOCOME
					Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana	Indeks Bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya pelayanan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
											Terbitnya rekomendasi hasil pengawasan penanggulangan bencana	Rekomendasi hasil pascabencana yang diterbitkan
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
					Terwujudnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran	Indeks Sub Urusan Kebakaran	Terpenuhinya target waktu tanggap (response time) maksimal 15 menit pada seluruh kejadian kebakaran di Wilayah Pelayanan guna meminimalkan kerugian jiwa dan harta benda	*Response Time* pada Wilayah Kabupaten Bogor	Dinas Pemadan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya kualitas pelayanan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kab. Bogor pada tahun berjalan dalam tingkat waktu tanggap response time
											Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dalam operasi darurat non kebakaran	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia dalam Operasi Darurat Non Kebakaran
											Meningkatnya kualitas Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelamatan (SKIKP) yang dimanfaatkan	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kab. Bogor yang dilaporkan melalui Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)
											Meningkatnya Ketersediaan dan Keandalan Sarana Prasarana serta Sistem Informasi dalam Mendukung Layanan Kebakaran dan Penyelamatan	Ketersediaan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi dalam Mendukung Layanan Kebakaran serta Penyelamatan
											Meningkatnya kapasitas relawan kebakaran dalam penanganan kebakaran	Persentase pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Redkar, Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya) atau dibawah pembinaan dinas dalam tanggap waktu response time
											Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran
												Persentase bangunan/gedung dengan sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan pada tahun berjalan
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah

VISI/ MISI		TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME
								Terwujudnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran	Indeks Sub Urusan Kebakaran	Meningkatnya penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	*Response Time* penanganan kebakaran pada Wilayah Kabupaten Bogor	Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya kualitas pelayanan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kab. Bogor pada tahun berjalan dalam tingkat waktu tanggap response time
														Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dalam operasi darurat non kebakaran	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia dalam Operasi Darurat Non Kebakaran
														Meningkatnya kualitas Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelamatan (SKIKP) yang dimanfaatkan	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kab. Bogor yang dilaporkan melalui Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)
														Meningkatnya Ketersediaan dan Keandalan Sarana Prasarana serta Sistem Informasi dalam Mendukung Layanan Kebakaran dan Penyelamatan	Ketersediaan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi dalam Mendukung Layanan Kebakaran serta Penyelamatan
											Persentase pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran			Meningkatnya kapasitas relawan kebakaran dalam penanganan kebakaran	Persentase pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Redkar, Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya) atau dibawah pembinaan dinas dalam tanggap waktu response time
														Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran
															Persentase bangunan/gedung dengan sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan pada tahun berjalan
													Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
4	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Poin**								

VISI/ MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTOCOME
		4.1 Meningkatnya akses layanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Terwujudnya pendidikan dasar yang berkualitas dan merata	Cakupan penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan dasar	Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar	Indeks Rapor Pendidikan	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya mutu dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Jenjang PAUD, DIKDAS dan DIKMAS	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
												Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar
												Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama
												Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan
												Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan kondisi baik
										Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terpenuhinya Kebutuhan Pendidik yang Kompeten	Guru yg memenuhi kualifikasi minimal S1 / D-IV dan memiliki sertifikasi pendidik
										Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Bahasa dan Sastra	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar Yang Melaksanakan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan dan Budaya Literasi	Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip dan Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatnya Budaya Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
										Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Terkelolanya naskah kuno dan koleksi muatan lokal daerah	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Nusantara yang terlindungi
		4.2 Meningkatnya akses layanan kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Meningkatnya kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah kematian ibu	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan
								Jumlah kematian bayi			Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi nasional	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (SIKN)
											Terwujudnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil periksa kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan
								Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis			Terpenuhinya sarana prasarana dan alat di fasilitas kesehatan sesuai standar	Persentase fasilitas kesehatan daerah yang memenuhi standar srana prasarana alat (SPA)
											Terkendalinya penyakit sehingga angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dapat menurun	Indeks penduduk yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
								Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi
										Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan farmasi, alat kesehatan yang memenuhi syarat	Persentase Sarana Kefarmasian yang memenuhi syarat

VISI/ MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTOCOME
									Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih sehat masyarakat	Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat
											Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
		4.3	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Kepesertaan Pasangan Usia Susbur (PUS) untuk Ber-KB	Persentase Perempuan Usia Kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
											Program Perlindungan Perempuan	Tertanganinya Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Terwujudnya Keluarga Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persentase Keluarga yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar
											Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan
							Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Kabupaten Layak Anak		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terpenuhinya hak anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
											Program Perlindungan Khusus Anak	Tertanganinya Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
											Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun dalam Menekan Pertumbuhan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran dari Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
							Angka kelahiran total (TFR)		Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR))		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)
											Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Tercapainya keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga
											Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Tingkat Partisipasi Pemuda	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda Aktif	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda
											Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga
								Meningkatnya prestasi atlet	Persentase atlet berprestasi				Persentase sarana prasarana olahraga di kecamatan yang dimanfaatkan
							Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Olahraga di Masyarakat				Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Event Olahraga
								Meningkatnya partisipasi berolahraga	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan
											Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah

VISI/ MISI		TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME
						Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Nilai PDRB Sektor Pariwisata	Meningkatnya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan
													Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan
											Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan
								Meningkatnya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang terdokumentasi dan dilindungi.	Tercapainya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Terlindunginya objek pemajuan kebudayaan daerah melalui penetapan Warisan Budaya Tingkat Kabupaten / Provinsi/ Nasional / UNESCO	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi melalui Penetapan Warisan Budaya Tingkat Kabupaten / Provinsi/ Nasional / UNESCO
													Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Lembaga kesenian tradisional yang terbina	Persentase lembaga Kesenian Tradisional yang dibina
													Program Pembinaan Sejarah	Teraksesnya informasi sejarah oleh masyarakat	Persentase informasi sejarah yang diakses masyarakat
										Terlestarikanya Benda Situs dan Cagar Budaya Daerah	Persentase Benda Situs dan Cagar Budaya yang Dilestarikan		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlindunginya Benda Situs dan Cagar Budaya daerah	Persentase Benda Situs dan Cagar Budaya yang dilindungi melalui Penetapan Tingkat Kabupaten / Provinsi/ Nasional / UNESCO
													Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya tata kelola permuseuman	Persentase materi permuseuman yang dikelola
													Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Kebudayaan	Nilai AKIP Perangkat Daerah
5	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	5	Meningkatnya taraf hidup masyarakat			**Rasio Gini**	**Poin**								
				5.1	Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Cakupan pelayanan PPKS yang mendapatkan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang menjadi kewenangan terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin ekstrem yang mendapatkan pendampingan atau fasilitasi PSKS
													Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani
													Program Rehabilitasi Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persentase Disabiltas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Pengemis/Gelandangan di luar panti yang terehabilitasi sosial
													Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial
														Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Fakir Miskin	Persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi jaminan dan atau perlindungan sosial
										Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga sasaran graduasi kemiskinan	Persentase jumlah sasaran keluarga graduasi miskin yang dapat melakukan usaha		Program Penanganan Bencana	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan bencana
													Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terkelolaanya taman makam pahlawan dengan baik	Tingkat pengelolaan Taman Makam Pahlawan
													Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
				5.2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%			Meningkatnya penyerapan	Persentase penyerapan		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

VISI/ MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTOCOME
					Meningkatnya pembangunan ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	tenaga kerja	tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Tenaga Kerja yang kompeten	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
										Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Pencari Kerja Yang Bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja
							Meningkatnya jumlah kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang terlaksana di Kabupaten Bogor	Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti		Program Hubungan Industrial	Diterapkannya Tata Kelola Kerja yang Layak Bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak
										Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Jumlah Kepala Keluarga yang diberikan penyuluhan / sosialisasi program transmigrasi	Persentase kepala keluarga yang mendapatkan penyuluhan
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah